

Laporan Tahunan
Annual Report 2014

bankriaukepri
tumbuh kembangkan usaha

Jln. Jendral Sudirman No.377 Pekanbaru 28116, PO Box 1102
Telepon (0761) 37050/37060 (hunting 8 lines)
Faksimili (0761) 24150, 21195, 28322
E-mail corsec@bankriaukepri.co.id
Website www.bankriaukepri.co.id

bankriaukepri
tumbuh kembangkan usaha

Kinerja
Cemerlang

Laporan Tahunan
Annual Report 2014

bankriaukepri
tumbuh kembangkan usaha

Kinerja
Cemerlang



Laporan Tahunan
Annual Report 2014

بسم الله الرحمن الرحيم

Bank Riau Kepri, bank milik masyarakat Riau dan Kepri sudah semakin besar, semakin berkembang, aset terus bertambah, cabang terus bertambah, dan karyawan yang juga bertambah.

Namun demikian, dari waktu ke waktu persaingan di dunia perbankan juga semakin ketat. Sebut saja Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 adalah era persaingan yang tak bisa dihindari. Untuk itu, salah satu hal yang harus dijaga sebagai Perbankan daerah, adalah menjadi terkuat di daerah sendiri. Dengan membangun kepercayaan nasabah, Bank Riau Kepri bisa lebih besar dan hanya bisa dicapai jika dapat bersaing dengan keterbukaan (transparency) dan akuntabilitas (accountability) seperti sekarang ini.

Sebagai pemberi jasa, maka kami berkomitmen menigkatkan pelayanan Bank kepada nasabah. Karena kepuasan nasabah akan layanan bank beredar dari mulut ke mulut dan berdasarkan kepercayaan nasabah. Hal ini yang harus kami bangun. Untuk itu, dari internal, kami terus berupaya meningkatkan kualitas SDM, kemampuan, kompetensi untuk menjadi lebih profesional, serta mengerti fungsi sebagai pelayan, serta merubah sikap dan perilaku dalam memberikan jasa pelayanan yang baik kepada nasabah, agar meningkatkan loyalitas nasabah terhadap Bank Riau Kepri.

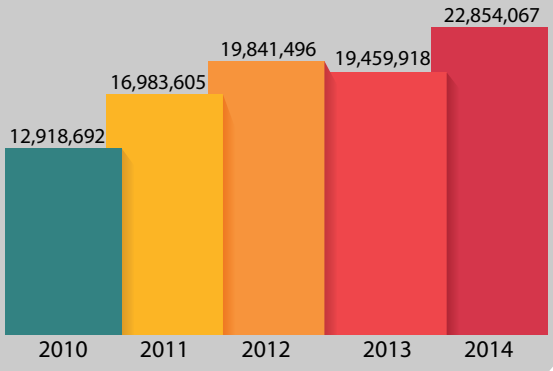
Upaya dan usaha segenap jajaran Bank Riau Kepri terbukti dengan kinerja cemerlang dengan mencatat pertumbuhan yang signifikan. Hal ini tidak terlepas dari tujuan berdirinya Bank Riau Kepri yakni untuk membangun daerah. Dengan visi dan misinya menjadi bank yang selalu sehat dan kuat serta memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau dan Provinsi Kepuluan Riau, Bank Riau Kepri optimis menjadi tuan di negri sendiri.

Performa Penting 2014

Aset

Asset meningkat sebesar 17,44% dibandingkan tahun 2013

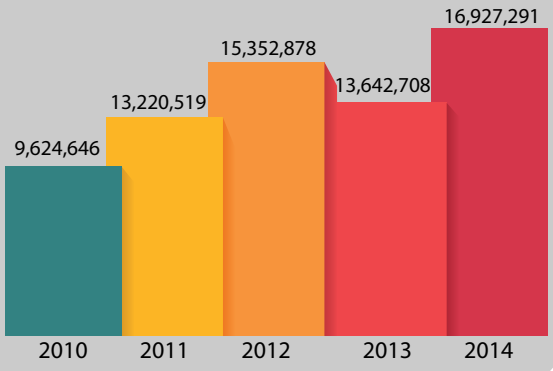
17,44%



DPK

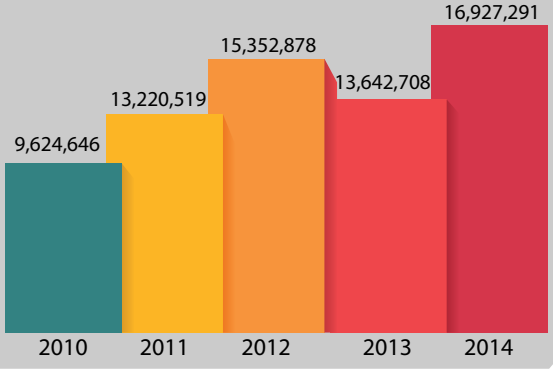
DPK meningkat sebesar + 24,08% dibandingkan tahun 2013

+ 24,08%



Kredit Yang Diberikan

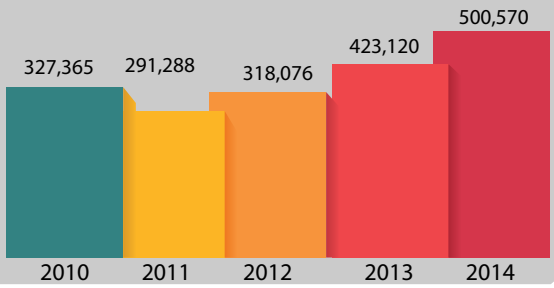
+ 10,08%



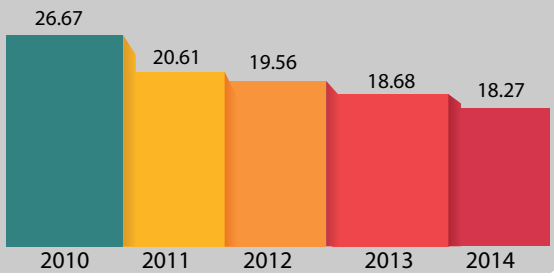
Laba Bersih

Laba Bersih meningkat sebesar + 18,30% dibandingkan tahun 2013

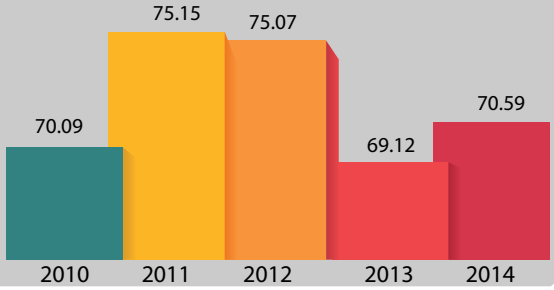
+ 18,30%



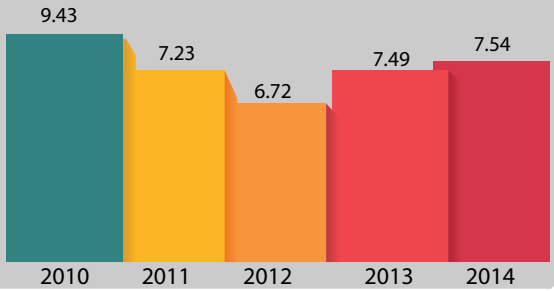
CAR



BOPO



NIM



01 PENDAHULUAN

- Pembukaan
- Selayang Pandang
- Performa Penting 2014
- Daftar Isi
- Ikhtisar Keuangan Penting
- Ikhtisar Efek Lainnya (Obligasi)
- Profil Perusahaan
  - A. Sejarah Singkat Dan Status Perusahaan
  - B. Perubahan Logo
  - C. Visi & Misi
  - D. Nilai-Nilai Perusahaan
  - E. Komposisi & Identitas Pemegang Saham
- Penghargaan & Sertifikasi Di Tahun 2014
- Rangkaian Kegiatan Penting Selama Tahun 2014
- Laporan Dewan Komisaris
- Laporan Direksi

53 ANALISA DAN PEMBAHASAN KINERJA BANK OLEH MANAJEMEN

- Kondisi Perekonomian Indonesia Tahun 2014
- Kondisi Perekonomian Daerah Riau Dan Kepulauan Riau Tahun 2014
- Kondisi Perbanakan Riau Dan Kepulauan Riau Tahun 2014
- Strategi Bisnis 2014
  - A. Target BPD Regional Champion (BRC)
  - B. Pangsa Pasar/Market Share
  - C. Perbandingan Antara Target Awal Tahun Buku Dengan Realisasi Tahun 2014 Dan Proyeksi Tahun 2015
- Uraian Kinerja Keuangan 2014
  - A. Aset
  - B. Kredit Yang Diberikan
  - C. Tingkat Kolektibilitas Piutang
  - D. Kewajiban
  - E. Ekuitas
  - F. Hasil-Hasil Usaha
  - G. Rasio-Rasio Keuangan
- Uraian Dan Informasi Keuangan Lainnya
  - A. Kepatuhan Bmpk
  - B. Ikatan Material Untuk Investasi Barang Modal
  - C. Informasi Keuangan Luar Biasa Dan Jarang Terjadi
  - D. Informasi Keuangan Yang Telah Dilaporkan Yang Mengandung Kejadian Yang Sifatnya Luar Biasa Dan Jarang Terjadi
  - E. Komponen Substansi Dari Pendapatan Dan Beban Lain-Lain
  - F. Materialitas Peningkatan Usaha
  - G. Dampak Perubahan Harga Terhadap Pendapatan Usaha
  - H. Informasi Dan Fakta Material Yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan
  - I. Realisasi Perolehan Dan Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
  - J. Buy Back Shares Dan Buy Back Obligasi
  - K. Informasi Material Antara Lain Mengenai:investasi, Ekspansi, Divestasi, Akuisisi, Restukturisasi Hutang/ Modal
  - L. Transaksi Material Yang Mengandung Benturan Kepentingan Dan Transaksi Dengan Pihak Afiliasi
  - M. Upaya Untuk Pengendalian Bopo (Efisiensi)
  - N. Kebijakan Akuntansi Perusahaan
  - O. Perubahan Kebijakan Akuntansi
  - P. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum
  - Q. Kebijakan Penggunaan Laba Dan Pembagian Dividen
  - R. Perubahan-Perubahan Penting Yang Terjadi
  - S. Informasi Dan Fakta Material Setelah Tanggal Laporan Akuntan
  - T. Peristiwa Penting Setelah Tanggal Neraca
  - U. Perubahan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Perusahaan
  - V. Uraian Tentang Prospek Usaha Perusahaan
  - W. Uraian Tentang Aspek Pemasaran
  - X. Masalah Dan Kendala Yang Dihadapi
- Struktur Modal
- Rencana Kerja 2015

91 TINJAUAN PERSEGMEN USAHA

- Kredit Dan Pembiayaan
  - A. Kredit Komersial
  - B. Kredit Mikro Dan Kecil
  - C. Kredit Konsumer
  - D. Penanganan Kredit Bermasalah
- Penghimpunan Dana
  - A. Tabungan
  - B. Giro
  - C. Deposito
- Perbankan Syariah
  - A. Pertumbuhan Aset
  - B. Pendanaan Syariah
  - C. Pembiayaan Syariah
  - D. Npf Dan Fdr
  - E. Dana Qordh Dan Zis
- Treasury & Internasional

115 TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS

- Uraian Tentang Sumber Daya Manusia
- Uraian Tentangteknologi Informasi
- Uraian Tentang Manajemen Risiko

187 LAPORAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DATA PERUSAHAAN

- Pendahuluan
- Kebijakan Gcg
- Program Pengenalan Dan Pemahaman Gcg
- Unit Kerja Pengelola Gcg
- Struktur Gcg Bank Riau Kepri
  - A. Rups
  - B. Dewan Komisaris
  - C. Direksi
  - D. Rasio Gaji Dan Komposisi Pegawai
  - E. Komite-Komite Di Bawah Dewan Komisaris
  - F. Komite Audit
    - Susunan Anggota Komite Audit
    - Keahlian Dan Independensi Komite Audit
    - Tugas Dan Tanggung Jawab Komite Audit
    - Rencana Dan Realisasi Kegiatan Komite Audit
    - Aktivitas Rapat Komite Audit
  - G. Komite Pemantau Risiko
    - Komposisi Komite Pemantau Risiko
    - Keahlian Dan Independensi Komite Pemantau Risiko
    - Tugas Dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko
    - Rencana Dan Realisasi Program Kerja Komite Pemantau Risiko
    - Aktivitas Rapat Komite Pemantau Risiko
  - H. Komite Nominasi Dan Remunerasi
    - Komposisi Komite Remunerasi Dan Nominasi
    - Keahlian Dan Independensi Komite Remunerasi Dan Nominasi
    - Tugas Dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi Dan Nominasi
    - Rencana Dan Realisasi Kegiatan Komite Remunerasi Dan Nominasi
    - Aktivitas Rapat Komite Remunerasi Dan Nominasi
  - I. Komite-Komite Eksekutif Yang Dimiliki Oleh Bank
  - J. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan
  - K. Penerapan Fungsi Dan Budaya Kepatuhan
  - L. Penerapan Fungsi Audit Intern
  - M. Penerapan Fungsi Audit Ekstern
  - N. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait Dan Penyediaan Dana Besar
  - O. Rencana Strategis Bank
  - P. Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan Bank
  - Q. Kepemilikan Saham Dan Shares Option
  - R. Penyimpangan Internal (Internal Fraud)
  - S. Permasalahan Hukum
  - T. Buy Back Shares Dan Buy Back Obligasi Bank
  - U. Unit Usaha Syariah (Uus)
  - V. Corporate Secretary
  - W. Code Of Conduct
  - X. Media Penyebaran Dan Akses Informasi
- Kesimpulan Umum Hasil Self Assessment Pelaksanaan Gcg

273 LAPORAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

- Strategi Dan Kebijakan
  - A. Landasan Hukum Program Csr Bank Riau Kepri
  - B. Visi Misi
  - C. Prinsip Pengelolaan
- Realisasi Program Corporate Social Responsibility (Csr) Bank Riau Kepri Tahun 2014
  - A. Program Kemitraan
  - B. Program Bantuan Kemasyarakatan
    1) Kegiatan Keagamaan
    2) Kegiatan Pendidikan
    3) Kegiatan Sosial
    4) Kegiatan Kesehatan
    5) Kegiatan Kepemudaan Dan Pembinaan Olahraga
    6) Kegiatan Seni Dan Budaya
    7) Kegiatan Ligkungan
    8) Ketenaga Kerjaan/Keselamatan Kerja
    9) Perlindungan Konsumen
    10) Kegiatan Csr Di Cabang (Branch)
    11) Total Realisasi Anggaran Program Bantuan Kemasyarakatan
- Dampak Keuangan Dan Non Keuangan Bagi Perusahaan Dari Program CSR

279 DATA PERUSAHAAN

- Struktur Organisasi
- Biografi Dewan Komisaris
- Biografi Direksi
- Biografi Dewan Pengawas Syariah
- Biografi Anggota Komite
- Biografi Pejabat Eksekutif
- Produk Dan Layanan Perbankan
- Jaringan Kantor

SURAT PERNYATAAN TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS ISI LAPORAN TAHUNAN

LAPORAN KEUANGAN AUDIT

Ikhtisar Keuangan Penting

NO	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
A	Jumlah Aset	12,918,692	16,983,605	19,841,497	19,459,918	22,854,068
B	Penggunaan Dana	11,663,824	15,133,784	17,891,334	17,624,140	20,451,154
	1 Kredit Yang Diberikan	7,259,317	8,691,732	10,208,592	11,951,592	13,156,173
	2 Penempatan Pada Bank Indonesia dan Bank Lain	1,596,868	2,480,396	6,848,603	4,637,668	5,873,426
	3 Surat Berharga	2,805,984	3,960,000	832,483	1,033,223	1,419,899
	4 Penyertaan	1,656	1,656	1,656	1,656	1,656
			2,132,359			
C	Penghimpunan Dana	11,060,857	14,870,717	17,157,463	16,003,487	19,549,304
	Dana Pihak Ketiga	9,624,646	13,220,519	15,352,878	13,642,708	16,927,291
	1 Giro	4,909,768	6,247,579	8,442,539	7,148,857	7,099,934
	2 Tabungan	2,711,782	3,566,602	3,721,147	4,579,235	4,316,428
	3 Deposito	2,003,096	3,406,338	3,189,192	1,914,616	5,510,929
	Dana Lainnya	1,436,211	1,650,198	1,804,585	2,360,779	2,622,013
	1 Simpanan Dari Bank Lain	1,418,646	1,147,820	1,301,420	1,856,698	1,810,746
	2 Pinjaman Yang Diterima	17,565	2,377	3,165	4,296	311,373
	3 Obligasi Yang Diterbitkan	-	500,000	500,000	499,785	499,894
D	Ekuitas	1,407,414	1,607,201	1,812,777	2,081,853	2,390,966
	1 Modal Disetor	747,944	826,874	894,875	957,146	976,788
	Provinsi Riau	364,168	399,168	419,168	419,168	419,168
	Provinsi Kepulauan Riau	-	-	-	12,000	12,000
	Kota & Kab. se - Riau	329,135	356,831	377,832	442,604	457,245
	Kota & Kab. se - Kepulauan Riau	54,641	70,874	97,875	83,374	88,374
	2 Tambahan Modal Disetor	82,215	70,086	64,357	21,727	64,500
	3 Saldo Laba	577,254	710,241	853,545	1,102,980	1,349,678
	Cadangan	209,942	354,123	478,383	605,613	774,862
	Laba/ Rugi Tahun Lalu	21,555	64,831	57,086	74,246	74,246
	Laba/ Rugi Tahun Berjalan	345,758	291,288	318,076	423,120	500,570
E	Modal Bank	1,301,783	1,538,825	1,720,848	1,897,690	2,116,617
	1 Modal Inti	1,242,428	1,466,849	1,633,303	1,796,665	2,000,486
	2 Modal Pelengkap	61,010	72,804	87,545	101,025	116,131
	3 Penyertaan (- / -)	1,656	828	-	-	-
F	Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)	4,880,814	7,465,213	8,798,788	10,160,445	11,584,535
G	Laba (Rugi)					
	1 Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil Syariah	1,513,722	1,550,761	1,739,028	1,959,591	2,174,999
	2 Beban Bunga dan Bagi Hasil Syariah	487,780	649,373	679,156	652,254	817,856

NO	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
	3 Pendapatan Bunga Bersih	1,025,942	901,388	1,059,873	1,307,337	1,357,143
	4 Pendapatan Operasional Lainnya	57,975	77,005	97,600	120,946	163,554
	5 Beban Operasional Lainnya	530,430	508,287	601,611	732,715	805,446
	6 Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	472,455	431,283	504,011	611,769	641,892
	7 Pendapatan Non Operasional	7,993	6,895	5,775	9,764	31,104
	8 Beban Non Operasional	17,493	14,584	15,080	48,352	28,845
	9 Laba Sebelum Pajak	460,531	396,739	453,462	603,875	690,141
	10 Pajak Penghasilan	133,166	105,451	135,386	180,754	189,571
	11 Laba Bersih Tahun Berjalan	327,365	291,288	318,076	423,120	500,570
	12 Total Laba (Rugi) Komprehensif	-	-	318,076	418,140	496,742
	12 Laba Bersih Per Saham *)	43,769	35,228	37,855	45,960	51,855
H	Rasio-rasio Keuangan (%)					
	1 Rasio KPMM	26.67	20.61	19.56	18.68	18.27
	2 Laba terhadap Aktiva (ROA)	3.83	2.62	2.95	3.00	3.37
	3 Laba terhadap Ekuitas (ROE)	28.96	20.71	19.91	23.56	24.96
	4 Margin Bunga Bersih (NIM)	9.43	7.23	6.72	7.49	7.54
	5 NPL Gross	2.45	2.57	2.95	2.81	2.79
	6 NPL Netto	0.68	0.84	0.19	0.19	0.28
	7 Biaya Operasional/Pendapatan Operasional (BOPO)	70.09	75.15	75.07	69.12	70.59
	8 Kredit terhadap Dana Pihak Ketiga (LDR)	75.42	65.74	66.49	87.60	77.72
	9 Aset Tetap terhadap Modal	14.96	14.56	14.07	13.30	22.09
	10 Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	1.63	1.79	1.85	1.92	1.80
	11 Giro Wajib Minimum (Rupiah)	8.06	10.32	9.25	8.35	8.17
	12 Giro Wajib Minimum (Valas)	-	-	15.33	14.95	154.39

Ikhtisar Efek Lainnya (Obligasi)

PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri (Bank Riau Kepri) melakukan Public Expose dan Penawaran umum Obligasi Bank Riau Kepri Tahun 2011 pada tanggal 10 Juni 2011 di Jakarta. Penerbitan Obligasi perdana ini senilai Rp 500 miliar ini berjangka waktu lima tahun. Masa penawaran awal dilakukan pada 10 sampai 21 Juni 2011, dengan tanggal efektif pada 27 Juni 2011. Obligasi ini dicatat di Bursa Efek Indonesia pada 11 Juli 2011.

Nama Obligasi

OBLIGASI I BANK RIAU KEPRI TAHUN 2011

Obligasi	Seri	Nominal (juta)	Tingkat Bunga per Tahun (%)	Jk. Waktu	Peringkat	Tgl. Efektif Bapepam	Jatuh Tempo
Obligasi I Bank Riau Kepri Tahun 2011	Seri A	Rp 500.000,-	10,4	5 Tahun	A(idn)	30 Juni 2011	8 Juli 2016

Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

Jumlah Pokok Obligasi Dan Satuan Pemindahbukuan

Jumlah pokok Obligasi adalah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah), dengan Satuan Pemindahbukuan sebesar Rp1,- (satu Rupiah).

Jumlah obligasi Yang Beredar

Jumlah Obligasi yang beredar adalah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah).

Jangka Waktu dan Jatuh Tempo Obligasi

Obligasi berjangka waktu 5 (lima) tahun. Obligasi akan jatuh tempo serta dilunasi pada tanggal 8 Juli 2016.

Tanggal Pembayaran Bunga untuk Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga Ke	Tanggal	Bunga Ke	Tanggal
1	8 Oktober 2011	11	8 April 2014
2	8 Januari 2012	12	8 Juli 2014
3	8 April 2012	13	8 Oktober 2014
4	8 Juli 2012	14	8 Januari 2015
5	8 Oktober 2012	15	8 April 2015
6	8 Januari 2013	16	8 Juli 2015
7	8 April 2013	17	8 Oktober 2015
8	8 Juli 2013	18	8 Januari 2016
9	8 Oktober 2013	19	8 April 2016
10	8 Januari 2014	20	8 Juli 2016

Bunga Obligasi

Obligasi I Bank Riau Kepri Tahun 2011 ini memberikan tingkat bunga sebesar 10,4% (sepuluh koma empat persen) per tahun

Ketentuan Umum Pembayaran Bunga Obligasi

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing bunga, dimana pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2011, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 8 Juli 2016.

Bunga Obligasi dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Distribusi Obligasi secara elektronik (yang juga merupakan Tanggal Emisi), di mana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari. Bunga tersebut dibayarkan

oleh PT. Bank Riau Kepri kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening KSEI pada Tanggal Pembayaran Bunga yang bersangkutan.

Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan pasal 1132 kitab Undang Undang Hukum Perdata Indonesia.

Hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang mupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Hasil Pemeringkatan Obligasi

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.C.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 dan Peraturan No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Bapepam-LK No. KEP-135/BL/2006 tanggal 14 Desember 2006, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Fitch Ratings Indonesia. Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang sesuai dengan surat No.RC118/DIR/II/2015 tanggal 6 Februari 2015, Obligasi I Bank Riau Kepri Tahun 2011 telah mendapat peringkat A (idn).

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Fitch, baik langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi "Afiliasi" dalam UUPM. Sesuai Peraturan Bapepam-LK No.IX.C.11, Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas efek belum lunas.

Penggunaan Dana

Perseroan menggunakan penerimaan hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait seluruhnya akan digunakan untuk ekspansi kredit konsumer Perseroan. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi I Bank Riau Kepri dari posisi 30 September 2011 sampai dengan 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

Jenis Penawaran Umum	Tanggal Efektif	Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum			Rencana Penggunaan Dana		Realisasi Penggunaan Dana	
		Jumlah Hasil Penawaran Umum	Biaya Penawaran Umum	Hasil Bersih	Ekspansi Kredit Konsumer	Total	Ekspansi Kredit Konsumer	Total
Penawaran Umum (IPO)	30 Juni 2011	Rp 500.000	Rp2.427	Rp 497.573	Rp 497.573	Rp 497.573	Rp 497.573	Rp 497.573
Jumlah		Rp 500.000	Rp2.427	Rp 497.573	Rp 497.573	Rp 497.573	Rp 497.573	Rp 497.573

Wali Amanat

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Bank Riau Tahun 2011 No.19 tanggal 12 April 2011 juncto Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Bank Riau Kepri Tahun 2011 No. 69 tanggal 24 Mei 2011 juncto Akta Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Bank Riau Kepri Tahun 2011 No.101 tanggal 23 Juni 2011 yang ketiganya dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang bertindak selaku Wali Amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

Alamat PT Bank Mega Tbk. adalah sebagai berikut:

PT. BANK MEGA Tbk.
Menara Bank Mega, Lantai 16
Jalan Kapten Tendean Kav. 12-14 A
Jakarta 12790
Telp. (021) 79175000
Faks. (021) 7990720
Up : Capital Market Services Division

Profil Perusahaan



IDENTITAS PERUSAHAAN

- **Nama Perusahaan**
  PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri (Bank Riau Kepri)
- **Alamat Kantor Pusat**
  Jalan Jendral Sudirman No.377
  Pekanbaru 28116, PO Box 1102
- **Telepon**
  (0761) 37050/37060 (hunting 8 lines)
- **Faksimili**
  (0761) 24150, 21195, 28322
- **Website**
  www.bankriaukepri.co.id
- **E-mail**
  corsec@bankriaukepri.co.id
- **Media Sosial**
  bankriaukepri1
  @bankriaukepri1
- **Tanggal berdiri**
  1 April 1966
- **Modal Dasar**
  Rp2.000.000 juta
- **Modal Disetor**
  Rp 976,787 juta
- **Pemilik**
  Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota se-Riau dan Kepri
- **Jumlah Aset**
  Rp 22,854,068 juta
- **Jumlah Jaringan Kantor**
  - 1 Kantor Pusat,
  - 19 Kantor Cabang,
  - 38 Kantor Cabang Pembantu, 32 Kantor Kedai,
  - 30 Kantor Kas,
  - 4 Butik,
  - 6 Payment Point,
  - 51 Unit Layanan Syariah
- **Jaringan ATM**
  Total sebanyak 149 ATM, yang juga dapat menggunakan jaringan ATM BERSAMA, ATM Prima, dan Malaysia Electronic Payment System (MEPS)
- **Fasilitas Lainnya**
  - 2 Unit CDM/Cash Deposit Machine,
  - 6 Oto Banking,
  - 40 EDC/ Electronic Data Capture
- **Pemeringkatan**
  A (idn), Fitch Ratings Indonesia 2015
- **ENTITAS ANAK DAN ASOSIASI**
  Bank Riau Kepri tidak memiliki entitas anak dan entitas asosiasi.

Sejarah Singkat dan Status Perusahaan

Bank kebanggaan milik masyarakat Riau dan Kepri ini didirikan sesuai dengan Undang-Undang No. 13 tahun 1962 tentang Bank Pembangunan Daerah. Terhitung tanggal 01 April 1966 secara resmi kegiatan Bank Pembangunan Daerah Riau dimulai dengan status sebagai Bank Milik Pemerintah Daerah Riau.

Dengan berbagai perubahan dan perkembangan kegiatan bank, sejak tahun 1975 status pendirian Bank Pembangunan Daerah Riau disesuaikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor 10 Tahun 1975, yang kemudian diatur kembali dengan Peraturan Daerah Tingkat I Riau Nomor 18 tahun 1986 berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962. Status pendirian Bank Pembangunan Daerah Riau diatur dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah No. 14 tahun 1992 tentang Bank Pembangunan Daerah Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Bank Pembangunan Daerah Riau.

Selanjutnya Bank Pembangunan Daerah Riau disetujui berubah status dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) sesuai hasil Keputusan RUPS tanggal 26 Juni 2002 yang dibuat oleh notaris Ferry Bakti, SH dengan Akta Nomor 33, yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2002 tanggal 26 Agustus 2002 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2002 Nomor 50. Perubahan Bentuk Hukum tersebut telah dibuat dengan Akta Notaris Muhammad Dahad Umar, SH Notaris di Pekanbaru nomor 36 tanggal 18 Januari 2003 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM dengan Surat Keputusan Nomor:C-09851.HT.01.01.TH.2003 tanggal 5 Mei 2003. Perubahan badan hukum tersebut telah disahkan dalam RUPS tanggal 13 Juni 2003 yang dituangkan di dalam Akta Notaris No. 209 tanggal 13 Juni 2003 Notaris Yondri Darto, SH, Notaris di Batam, dan telah pula mendapat persetujuan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia nomor 5/30/KEP.DGS/2003 tanggal 22 Juli 2003.

Sesuai keputusan RUPSLB tanggal 26 April 2010, telah dilakukan perubahan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Riau menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri yang disingkat PT. Bank Riau Kepri setelah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI melalui keputusan No.AHU-36484.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 22 Juli 2010 dan Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Direktur Perdata No.AHU.2-AH.01.01-6849 tanggal 25 Agustus 2010, serta persetujuan dari Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/59/KEP.GBI/2010 tanggal 23 September 2010.

01/04/1966

Bank Pembangunan Daerah Riau Mulai didirikan, dengan status sebagai Bank milik Pemda Provinsi Riau.

26/08/2002

Perubahan status dari PD menjadi PT ditetapkan dengan Perda No.10 tahun 2002.

26/04/2010

Sesuai keputusan RUPSLB, PT. BPD Riau berubah nama menjadi PT. Bank Riau Kepri.

Perubahan Logo

Awal mulanya bank ini berstatus Bank Pembangunan Daerah yang lebih banyak berfungsi sebagai kas daerah dalam mengelola keuangan daerah. Keterikatan dan kedekatan bank ini dituangkan dalam logo perusahaan.

Dengan perkembangan perekonomian daerah yang semakin maju sejak otonomi daerah, maka perubahan status dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) menjadi strategi yang tepat untuk mengembangkan bank ini menjadi lebih profesional. Ini ditandai dengan perubahan logo yang penuh makna.

Namun, sejalan dengan masuknya Pemprov. Kepri sebagai pemegang saham, maka telah disepakai perubahan nama Bank Riau menjadi Bank Riau Kepri. Perubahan ini disahkan Menteri Hukum dan HAM RI melalui surat No No.AHU-36484.AH.01.02 tahun 2010 tanggal 22 Juli 2010 dan Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Direktur Perdata No.AHU.2-AH.01.01-6849 tanggal 25 Agustus 2010, serta Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/59/KEP.GBI/ 2010 tanggal 23 September 2010. Perubahan logo ini diresmikan secara bersama oleh Gubernur Riau dan Gubernur Kepulauan Riau pada tanggal 13 Oktober 2010 di Batam.



Logo lama

Bank Riau

Bank Riau
SYARIAH
Mitra Syariah Terpercaya

Logo baru

bankriau
Tumbuh Kembangkan Usaha

bankriau
SYARIAH
Mitra Syariah Terpercaya

Logo Terbaru
New logo

bankriaukepri
tumbuh kembangkan usaha

bankriaukepri
syariah mitra syariah terpercaya

Visi & Misi

VISI & MISI

Keberadaan Bank Riau Kepri sebagai bank yang profesional dituangkan dalam visi dan misi perusahan sebagai berikut:

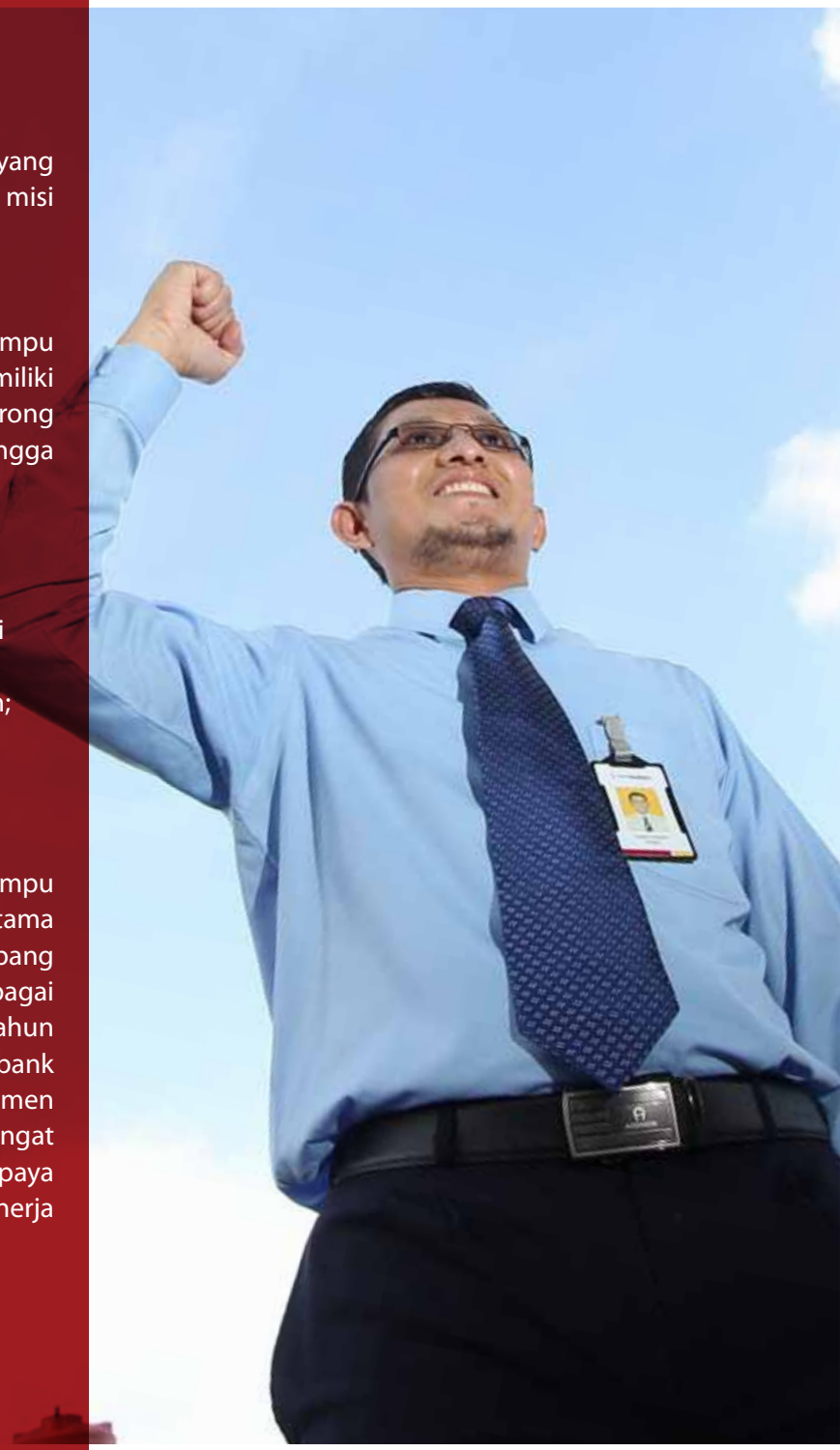
Visi:

Sebagai perusahaan perbankan yang mampu berkembang dan terkemuka di daerah, memiliki manajemen yang profesional dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, sehingga dapat memberdayakan perekonomian rakyat

Misi:

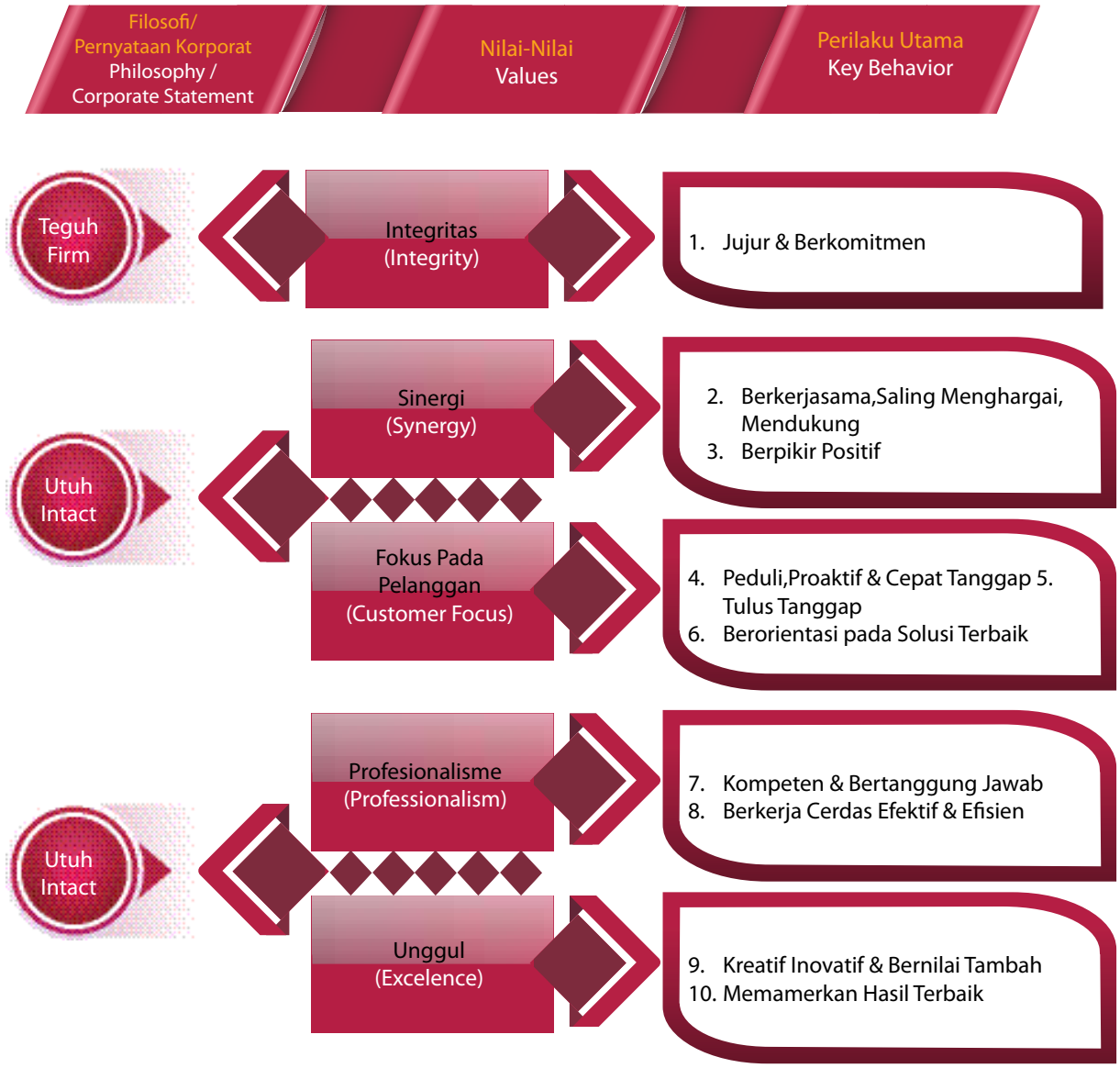
1. Sebagai bank "sehat", elit dan merakyat;
2. Sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
3. Sebagai pengelola dana pemerintah daerah;
4. Sebagai sumber pendapatan daerah;
5. Sebagai pembina, pengembang, dan pendamping usaha kecil dan menengah.

"Menjadi perusahaan perbankan yang mampu berkembang dan terkemuka" adalah tujuan utama kami. Ini bukan sebuah pekerjaan yang gampang dan singkat. Dengan telah menjalani berbagai perjalanan masa dari waktu ke waktu, sejak tahun 1966 sampai dengan 2014, kami hadir sebagai bank dengan penuh pengalaman. Dengan komitmen untuk selalu terkemuka menjadikan semangat untuk terus memberikan yang terbaik. Upaya maksimal ditunjukkan dengan peningkatan kinerja yang cemerlang dari waktu ke waktu.



Nilai-Nilai Perusahaan

Guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Perusahaan, Bank Riau Kepri merumuskan nilai-nilai perusahaan. Nilai-nilai ini lahir dari Filosofi/Pernyataan Korporat yang dituangkan dalam pernyataan perilaku utama.



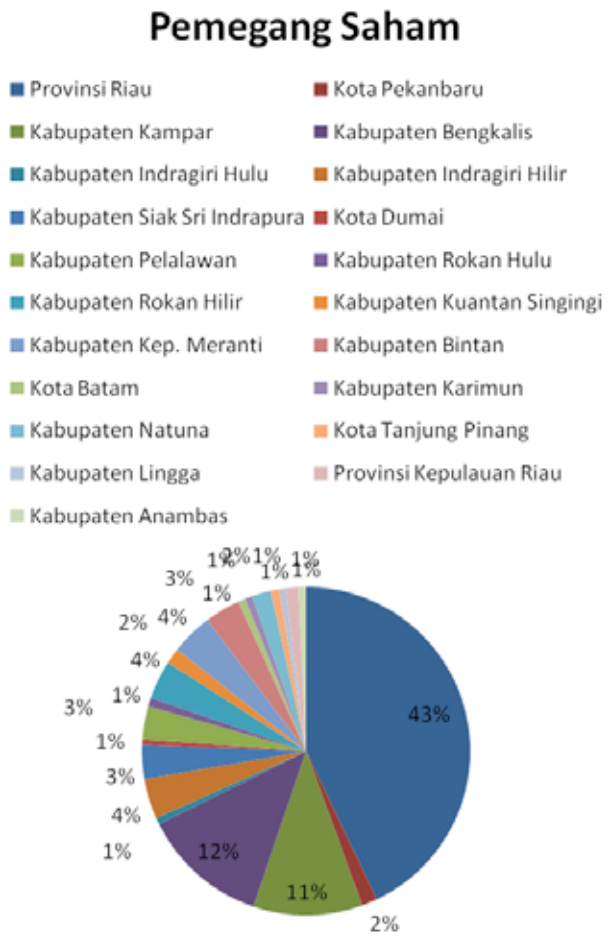
Dengan meimplementasikan nilai-nilai budaya perusahaan ini, seluruh insan di Bank Riau Kepri mampu mencatat kinerja cemerlang untuk kemudian menjadikan Bank Riau Kepri lebih sehat, kuat, dan tuan rumah di daerahnya (Regional Champion).

Komposisi & Nama-Nama Pemegang Saham

Setelah mendapat persetujuan RUPS-LB pada tanggal 01 Juni 2014 dan dan tercatat pada OJK, maka terjadi penambahan modal disetor sebesar Rp4641.843.946 oleh Pemkab.Inhil, Rp4.000.000.000 oleh Pemkab. Kuantan Singgingi, Rp1.000.000.000 oleh Pemkab. Lingga, Rp10.000.000.000 oleh Pemkab. Meranti. Pada RUPS-LB pada 8 November 2014 modal disetor sebesar Rp42.940.400.000 oleh Pemko Batam dan Rp10.000.000.000 oleh Pemkab. Meranti yang merubah komposisi pemegang saham PT. Bank Riau Kepri di tahun 2014. Namun setoran modal Pemko. Batam sebagaimana ketentuan belum memenuhi persyaratan administrasi, sehingga belum diakui sebagai setoran modal sebagaimana yang tercatat pada laporan Kantor Akuntan Publik. Total modal disetor pada tahun 2014 menjadi Rp 64,500,700,524

Saham bank ini 100% dimiliki oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Riau dan Kepulauan Riau. Tabel dan grafik dibawah ini menggambar kompisis pemegang saham sampai dengan akhir Desember 2014:

No	Pemegang Saham	Komposisi Saham	Modal 2014
1.	Provinsi Riau	42,91%	419.168.200.000,00
2.	Kota Pekanbaru	1,54%	15.000.000.000,00
3.	Kabupaten Kampar	10,77%	105.181.200.000,00
4.	Kabupaten Bengkalis	12,45%	121.606.200.000,00
5.	Kabupaten Indragiri Hulu	0,66%	6.400.700.000,00
6.	Kabupaten Indragiri Hilir	3,95%	38.552.000.000,00
7.	Kabupaten Siak Sri Indrapura	3,35%	32.711.000.000,00
8.	Kota Dumai	0,53%	5.203.000.000,00
9.	Kabupaten Pelalawan	3,27%	31.966.800.000,00
10.	Kabupaten Rokan Hulu	0,85%	8.280.700.000,00
11.	Kabupaten Rokan Hilir	3,80%	37.135.100.000,00
12.	Kabupaten Kuantan Singingi	1,56%	15.208.600.000,00
13.	Kabupaten Bintan	4,10%	40.000.000.000,00
14.	Kota Batam	3,49%	34.078.900.000,00
15.	Kabupaten Karimun	0,72%	7.059.600.000,00
16.	Kabupaten Natuna	0,74%	7.190.000.000,00
17.	Kota Tanjung Pinang	1,86%	18.154.600.000,00
18.	Kabupaten Kep. Meranti	0,86%	8.391.300.000,00
19.	Kabupaten Lingga	0,61%	6.000.000.000,00
20.	Provinsi Kepulauan Riau	1,23%	12.000.000.000,00
21.	Kabupaten Anambas	0,77%	7.500.000.000,00
	Jumlah/Total	100,00%	976.787.900.000,00



A. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Tahun 1961

Berdasarkan Akta Pendirian PT Bank Pembangunan Daerah Riau No.1 tanggal 2 Agustus 1961, dibuat di hadapan Syawal Sutan Diatas, Notaris di Pekanbaru ("Akta No. 1/1961"), struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham/		Nilai Saham		%
		Saham Prioritas	Saham Biasa	Saham Prioritas @ Rp50.000,-	Saham Biasa @Rp50.000,-	
	Modal Dasar Rp12.500.000,-	150	100	7.500.000,-	5.000.000,-	
	Modal Ditempatkan dan Modal Disetor					
1	Pemerintah Prov. Riau	30	-	1.500.000,-	-	60.00
2	Pemerintah Kota Pekanbaru	-	10.00	-	500.000,-	20.00
3	Pemerintah Kabupaten Kampar	-	10.00	-	500.000,-	20.00
	Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	30	20	1.500.000,-	1.000.000,-	100.00
	Jumlah saham Dalam Portepel	120	80	6.000.000,-	4.000.000,-	

100 % (seratus persen) dari nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) telah disetor penuh oleh para pemegang saham pada tanggal penandatanganan Akta No. 1/1961. Cara penyetoran saham tidak disebutkan dalam Akta No. 1/1961.

Tahun 1975

Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Riau No. 10 Tahun 1975 tentang Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Riau sebagaimana diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Riau No. 14 Tahun 1977 Seri D No. 9 tanggal 31 Desember 1977, disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan No. PEM.10/64/27-473 tanggal 21 Desember 1977 ("Perda No. 10/1975"), struktur permodalan Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 8 Perda No. 10/1975 yaitu sebagai berikut:

1. Modal dasar Bank adalah sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) yang terdiri dari:
   a. 800 saham prioritas @Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah), nominal Rp400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah).
   b. 200 saham biasa @Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah), nominal Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah).
2. Modal dasar Bank telah disetorkan minimum Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah), yang terdiri dari:
   a. Pemerintah Daerah Tingkat I Riau, 150 saham prioritas @Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah), nominal Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah).
   b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Propinsi Daerah Tingkat I Riau, 50 saham biasa @ Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah), nominal Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah).
3. Modal dasar Bank dapat ditambah dengan Keputusan Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Tingkat I Riau."

Tahun 1986

Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Riau No. 18 Tahun 1986 tentang Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Riau sebagaimana diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Riau No. 26 Tahun 1987 Seri D No. 25 tanggal 5 Maret 1987, disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan No. 584.24-221 tanggal 3 Maret 1987 ("Perda No. 18/1986"), struktur permodalan Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 9 Perda No. 18/1986 yaitu sebagai berikut:

1. Modal dasar Bank adalah sebesar Rp7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) yang merupakan kekayaan Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II yang telah dipisahkan, yaitu terdiri dari:
   a. 8.000 saham seri A nominal @Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah)…..... Rp6.000.000.000,-

b. 2.000 saham seri B nominal @Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah)..... Rp1.500.000.000,-

Jumlah..... Rp7.500.000.000,-

2. Modal dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini hanya dapat diubah dengan Peraturan Daerah dan berlaku setelah mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri."

Tahun 1992

Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Riau No. 14 Tahun 1992 tentang Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Riau sebagaimana diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Riau No. 2 Tahun 1993 Seri D No. 2 tanggal 7 Juni 1993, disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan No. 584.24-405 tanggal 23 Maret 1993 ("Perda No. 14/1992"), struktur permodalan Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 Perda No. 14/1992 yaitu sebagai berikut:

1. Modal dasar Bank adalah sejumlah Rp22.500.000.000,- (dua puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah) dalam bentuk saham-saham yang bernilai nominal Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) per saham, dengan ketentuan sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah saham dimiliki Pemerintah Daerah Tingkat I dan Tingkat II.
2. Dari jumlah modal dasar tersebut ayat (1) Pasal ini, telah disetor sejumlah Rp7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) yang merupakan penyertaan saham dari:
   a. Pemerintah Daerah Tingkat I sejumlah Rp6.947.250.000,- (enam miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah).
   b. Pemerintah Daerah Tingkat II sejumlah Rp552.750.000,- (lima ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribuRupiah).
3. Penyertaan saham sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan.
4. Penyertaan modal bank dimungkinkan dari pihak ketiga dengan ketentuan sebahagian besar modal (mayoritas) dimiliki oleh pemerintah daerah."

Susunan para pemegang saham Perseroan berdasarkan struktur permodalan sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut:

N0	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Saham @Rp750.000,-	%
Modal Dasar Rp22.500.000.000,-		30.000	22.500.000.000.-	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor				
1.	Pemerintah Prov. Riau	9.263	6.947.250.000,-	92,63
2.	Pemerintah Kota Pekanbaru	46	34.500.000,-	0,46
3.	Pemerintah Kabupaten Kampar	35	26.250.000,-	0,35
4.	Pemerintah Kabupaten Bengkalis	272	204.000.000,-	2,72
5.	Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu	48	36.000.000,-	0,48
6.	Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir	66	49.500.000,-	0,66
7.	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau	270	202.500.000,-	2,70
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor		10.000	7.500.000.000,-	100.00
Jumlah saham Dalam Portepel		20.000	15.000.000.000,-	

Tahun 1998

Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Riau No. 5 Tahun 1998 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Riau No. 14 Tahun 1992 tentang Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Riau sebagaimana diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Riau No. 1 Tahun 1999 Seri D No. 1 tanggal 9 Maret 1999, disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan No. 584.24-143 tanggal 2 Maret 1999 ("Perda No. 5/1998"), struktur permodalan Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 Perda No. 5/1998 yaitu
sebagai berikut:

1. Modal dasar Bank adalah sejumlah Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dalam bentuk saham-saham yang bernilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) per saham, dengan ketentuan sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen)

dari jumlah saham dimiliki Pemerintah Daerah Tingkat I dan Tingkat II.

2. Dari jumlah modal dasar tersebut ayat (1) Pasal ini, telah disetor sejumlah Rp20.016.750.000,- (dua puluh miliar enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) yang merupakan penyertaan saham dari:

   a. Pemerintah Daerah Tingkat I sejumlah Rp17.152.500.000,- (tujuh belas miliar seratus lima puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah).
   b. Pemerintah Daerah Tingkat II sejumlah Rp2.864.250.000,- (dua miliar delapan ratus enam puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

3. Penyertaan saham sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan.
4. Penyertaan modal bank dimungkinkan dari pihak ketiga dengan ketentuan sebahagian besar modal (mayoritas) dimiliki oleh pemerintah daerah.

Susunan para pemegang saham Perseroan berdasarkan struktur permodalan sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut:

N0.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Saham @Rp1.000.000,-	%
Modal Dasar Rp100.000.000.000,-		100.000	100.000.000.000.-	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor				
1.	Pemerintah Prov. Riau	22.870	17.152.500.000,-	85,69
2.	Pemerintah Kota Pekanbaru	389	291.750.000,-	1,46
3.	Pemerintah Kabupaten Kampar	378	283.500.000,-	1,42
4.	Pemerintah Kabupaten Bengkalis	1.613	1.209.750.000,-	6,04
5.	Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu	194	145.500.000,-	0,73
6.	Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir	149	111.750.000,-	0,56
7.	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau	1.096	822.000.000,-	4,11
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor		26.689	20.016.750.000,-	100.00
Jumlah saham Dalam Portepel		73.311	54.983.250.000,-	

Catatan: Tabel tersebut sudah sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 584.24-143 tanggal 2 Maret 1999 ("Perda No.5/1998").

Tahun 2003

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Riau No. 36 tanggal 18 Januari 2003 dibuat di hadapan Mohamad Dahad Umar, S.H., Notaris di Pekanbaru, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No.C-09851.HT.01.01. TH.2003 tanggal 5 Mei 2003, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan No. TDP 040116500042 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Pekanbaru dengan No.1151/BH.04.01/ VI/2003 tanggal 4 Juni 2003, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.59 tanggal 5 Juli 2003, Tambahan No.5817, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

N0.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham		Nilai Saham		%
		Saham Seri A	Saham Seri B	Saham Prioritas @Rp1.000.000,-	Saham Biasa @Rp500.000,-	
Modal Dasar Rp250.000.000.000		212.500	75.000	212.500.000.000,-	37.500.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor						
1.	Pemerintah Prov. Riau	66.253	-	66.253.000.000,-	-	71,06
2.	Pemerintah Kota Pekanbaru	1.023	-	1.023.000.000,-	-	1,10
3.	Pemerintah Kabupaten Kampar	1.074	-	1.074.000.000,-	-	1,15
4.	Pemerintah Kabupaten Bengkalis	5.004	-	5.004.000.000,-	-	5,37
5.	Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu	581	-	581.000.000,-	-	0,62
6.	Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir	3.448	-	3.448.000.000,-	-	3,70
7.	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau	3.963	-	3.963.000.000,-	-	4,25
8.	Pemerintah Kabupaten Karimun	1.743	-	1.743.000.000,-	-	1,87
9.	Pemerintah Kabupaten Natuna	1.000	-	1.000.000.000,-	-	1,07
10.	Pemerintah Kabupaten Siak	1.743	-	1.743.000.000,-	-	1,87
11.	Pemerintah Kabupaten Pelalawan	871	-	871.000.000,-	-	0,93
12.	Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi	435	-	435.000.000,-	-	0,47
13.	Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu	1.743	-	1.743.000.000,-	-	1,87
14.	Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir	1.743	-	1.743.000.000,-	-	1,87
15.	Pemerintah Kota Dumai	871	-	871.000.000,-	-	0,93
16.	Pemerintah Kota Batam	1.743	-	1.743.000.000,-	-	1,87
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor		93.238	-	93.238.000.000,-	-	100.00
Jumlah saham Dalam Portepel		119.262	75.000	119.262.000.000,-	37.500.000.000,-	

100% (seratus persen) dari nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp93.238.000.000,- (sembilan puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh delapan juta Rupiah) telah disetor penuh dengan cara inbreng berupa seluruh aktiva dan pasiva dari Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Riau sampai dengan tanggal 31 Desember 2002 sebagaimana ternyata dalam neraca tertanggal 31 Desember 2002 dengan nilai sebesar Rp93.238.000.000,- (sembilan puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh delapan juta Rupiah).

Tahun 2004

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.18 tanggal 19 Juni 2004 dibuat di hadapan Agnes Margono, S.H., Notaris di Tanjung Uban, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No.C-23817 HT.01.04.TH.2004 tanggal 23 September 2004 dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UU No.3/1982 dengan No.TDP 040116500042 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Pekanbaru dengan No.457/BH.04.01/X/2004 tanggal 30 Oktober 2004, Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari semula Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) menjadi Rp700.000.000.000,- (tujuh ratus miliar Rupiah) dan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor dari Rp93.238.000.000,- (sembilan puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh delapan juta Rupiah) menjadi Rp176.097.000.000,- (seratus tujuh puluh enam miliar sembilan puluh tujuh juta Rupiah). terdapat tambahan modal ditempatkan dan modal disetor sebesar Rp82.859.000.000,- (delapan puluh dua miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta Rupiah) yang telah disetor penuh oleh masing-masing pemegang saham secara tunai dengan perincian sebagai berikut:

a. Pemerintah Propinsi Riau sebesar Rp62.403.000.000,- (enam puluh dua miliar empat ratus tiga juta Rupiah).
b. Pemerintah Kota Pekanbaru sebesar Rp1.270.000.000,- (satu miliar dua ratus tujuh puluh juta Rupiah).
c. Pemerintah Kabupaten Kampar sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah).
d. Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah).
e. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu sebesar Rp585.000.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta Rupiah).
f. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sebesar Rp2.647.000.000,- (dua miliar enam ratus empat puluh tujuh juta Rupiah).

g. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah).
h. Pemerintah Kabupaten Siak sebesar Rp1.595.000.000,- (satu miliar lima ratus sembilan puluh lima juta Rupiah).
i. Pemerintah Kabupaten Natuna sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah).
j. Pemerintah Kabupaten Karimun sebesar Rp1.257.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh tujuh juta Rupiah).
k. Pemerintah Kabupaten Pelalawan sebesar Rp475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta Rupiah).
l. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi sebesar Rp565.000.000,- (lima ratus enam puluh lima juta Rupiah).
m. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sebesar Rp1.257.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh tujuh juta Rupiah).
n. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir sebesar Rp1.338.000.000,- (satu miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta Rupiah).
o. Pemerintah Kota Dumai sebesar Rp629.000.000,- (enam ratus dua puluh sembilan juta Rupiah).
p. Pemerintah Kota Batam sebesar Rp1.338.000.000,- (satu miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta Rupiah).
q. Pemerintah Kota Tanjung Pinang sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah).

Dengan adanya peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sebagaimana tersebut di atas, maka susunan para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

N0.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham		Nilai Saham		%
		Saham Seri A	Saham Seri B	Saham Prioritas @Rp1.000.000	Saham Biasa @Rp500.000,-	
Modal Dasar Rp700.000.000.000,-		662.500	75.000	662.500.000.000,-	37.500.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor						
1.	Pemerintah Prov. Riau	125.656	-	125.656.000.000,-	-	73,06
2.	Pemerintah Kota Pekanbaru	2.293	-	2.293.000.000,-	-	1,30
3.	Pemerintah Kabupaten Kampar	3.074	-	3.074.000.000,-	-	1,75
4.	Pemerintah Kabupaten Bengkalis	7.004	-	7.004.000.000,-	-	3,98
5.	Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu	1.166	-	1.166.000.000,-	-	0,66
6.	Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir	6.095	-	6.095.000.000,-	-	3,46
7.	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau	4.963	-	4.963.000.000,-	-	2,82
8.	Pemerintah Kabupaten Siak	3.338	-	3.338.000.000,-	-	1,90
9.	Pemerintah Kabupaten Natuna	3.000	-	3.000.000.000,-	-	1,70
10.	Pemerintah Kabupaten Karimun Siak	3.000	-	3.000.000.000,-	-	1,70
11.	Pemerintah Kabupaten Pelalawan	1.346	-	1.346.000.000,-	-	0,76
12.	Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi	1.000	-	1.000.000.000,-	-	0,57
13.	Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu	3.000	-	3.000.000.000,-	-	1,70
14.	Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir	3.081	-	3.081.000.000,-	-	1,75
15.	Pemerintah Kota Dumai	1.500	-	1.500.000.000,-	-	0,85
16.	Pemerintah Kota Batam	3.081	--	3.081.000.000,-	-	1,75
17.	Pemerintah Kota Tanjung Pinang	500		500.000.000,-		0,28
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor		176.097	-	176.097.000.000,-	-	100.00
Jumlah saham Dalam Portepel		486.403	75.000	486.403.000.000,-	37.500.000.000,-	

Tahun 2005

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.616 tanggal 30 Mei 2005 dibuat di hadapan Yondri Darto, S.H., Notaris di Batam, Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari semula Rp176.097.000.000,- (seratus tujuh puluh enam miliar sembilan puluh tujuh juta Rupiah) menjadi Rp217.112.000.000,- (dua ratus tujuh belas miliar seratus dua belas juta Rupiah). Terdapat tambahan modal ditempatkan dan modal disetor sebesar Rp41.015.000.000,- (empat puluh satu miliar lima belas juta Rupiah) yang telah disetor penuh oleh masing-masing pemegang saham secara tunai dengan perincian sebagai berikut:

a. Pemerintah Propinsi Riau sebesar Rp25.314.000.000,- (dua puluh lima miliar tiga ratus empat belas juta Rupiah).

b. Pemerintah Kota Pekanbaru sebesar Rp1.110.000.000,- (satu miliar seratus juta Rupiah).
c. Pemerintah Kabupaten Kampar sebesar Rp207.000.000,- (dua ratus tujuh juta Rupiah).
d. Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah).
e. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu sebesar Rp229.000.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta Rupiah).
f. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sebesar Rp1.199.000.000,- (satu miliar seratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah).
g. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau sebesar Rp4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah).
h. Pemerintah Kabupaten Natuna sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah).
i. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi sebesar Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).
j. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah).
k. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir sebesar Rp606.000.000,- (enam ratus enam juta Rupiah).
l. Pemerintah Kota Dumai sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah).
m. Pemerintah Kota Tanjung Pinang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah).

Dengan adanya peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, maka susunan para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

N0.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham		Nilai Saham		%
		Saham Seri A	Saham Seri B	Saham Prioritas @Rp1.000.000,-	Saham Biasa @Rp500.000,-	
Modal Dasar Rp700.000.000.000,-		662.500	75.000	662.500.000.000,-	37.500.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor						
1.	Pemerintah Prov. Riau	153.970	-	153.970.000.000,-	-	70,92
2.	Pemerintah Kota Pekanbaru	3.403	-	3.403.000.000,-	-	1,57
3.	Pemerintah Kabupaten Kampar	3.261	-	3.261.000.000,-	-	1,51
4.	Pemerintah Kabupaten Bengkalis	9.004	-	9.004.000.000,-	-	4,15
5.	Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu	1.395	-	1.395.000.000,-	-	0,64
6.	Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir	7.294	-	7.294.000.000,-	-	3,36
7.	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau	8.963	-	8.963.000.000,-	-	4,13
8.	Pemerintah Kabupaten Siak	3.338	-	3.338.000.000,-	-	1,54
9.	Pemerintah Kabupaten Karimun	3.000	-	3.000.000.000,-	-	1,38
10.	Pemerintah Kabupaten Natuna	6.000	-	6.000.000.000,-	-	2,76
11.	Pemerintah Kabupaten Pelalawan	1.346	-	1.346.000.000,-	-	0,62
12.	Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi	1.750	-	1.750.000.000,-	-	0,81
13.	Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu	5.000	-	5.000.000.000,-	-	2,30
14.	Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir	3.687	-	3.687.000.000,-	-	1,70
15.	Pemerintah Kota Dumai	2.000	-	2.000.000.000,-	-	0,92
16.	Pemerintah Kota Batam	3.081	--	3.081.000.000,-	-	1,42
17.	Pemerintah Kota Tanjung Pinang	600		600.000.000,-		0,28
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor		217.112	-	217.112.000.000,-	-	100.00
Jumlah saham Dalam Portepel		445.388	75.000	445.388.000.000,-	37.500.000.000,-	

Tahun 2006

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.490 tanggal 31 Maret 2006 dibuat di hadapan Yondri Darto, S.H., Notaris di Batam, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik berdasarkan Keputusan No.C-09643 HT.01.04.TH.2006 tanggal 4 Mei 2006 ("Akta No.490/2006"), Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari semula Rp217.112.000.000,- (dua ratus tujuh belas miliar seratus dua belas juta Rupiah) menjadi Rp245.544.000.000,- (dua ratus empat puluh lima miliar lima ratus empat puluh empat juta Rupiah). Terdapat tambahan modal ditempatkan dan modal disetor sebesar Rp28.432.000.000,- (dua puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh dua juta Rupiah) yang telah disetor penuh oleh masing-masing pemegang saham secara tunai dengan

perincian sebagai berikut:

a. Pemerintah Propinsi Riau sebesar Rp16.894.000.000,- (enam belas miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta Rupiah).
b. Pemerintah Kota Pekanbaru sebesar Rp534.000.000,- (lima ratus tiga puluh empat juta Rupiah).
c. Pemerintah Kabupaten Kampar sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah).
d. Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebesar Rp4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah).
e. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu sebesar Rp435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta Rupiah).
f. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sebesar Rp801.000.000,- (delapan ratus satu juta Rupiah).
g. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau sebesar Rp1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta Rupiah).
h. Pemerintah Kabupaten Karimun sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah).
i. Pemerintah Kabupaten Siak sebesar Rp523.000.000,- (lima ratus dua puluh tiga juta Rupiah).
j. Pemerintah Kabupaten Pelalawan sebesar Rp955.000.000,- (sembilan ratus lima puluh lima juta Rupiah).
k. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi sebesar Rp274.000.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta Rupiah).
l. Pemerintah Kota Batam sebesar Rp338.000.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta Rupiah).
m. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah).
n. Pemerintah Kota Dumai sebesar Rp313.000.000,- (tiga ratus tiga belas juta Rupiah).
o. Pemerintah Kota Tanjung Pinang sebesar Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta Rupiah).

Dengan adanya peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, maka susunan para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

NO.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham		Nilai Saham		%
		Saham Seri A	Saham Seri B	Saham Prioritas @ Rp1.000.000,-	Saham Biasa @Rp500.000,-	
Modal Dasar Rp700.000.000.000,-		662.500	75.000	662.500.000.000,-	37.500.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor						
1.	Pemerintah Prov. Riau	170.864	-	170.864.000.000,-	-	69,59
2.	Pemerintah Kota Pekanbaru	3.937	-	3.937.000.000,-	-	1,60
3.	Pemerintah Kabupaten Kampar	4.281	-	4.281.000.000,-	-	1,74
4.	Pemerintah Kabupaten Bengkalis	13.004	-	13.004.000.000,-	-	5,30
5.	Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu	1.830	-	1.830.000.000,-	-	0,75
6.	Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir	8.095	-	8.095.000.000,-	-	3,30
7.	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau	10.363	-	10.363.000.000,-	-	4,22
8.	Pemerintah Kabupaten Siak	3.861	-	3.861.000.000,-	-	1,57
9.	Pemerintah Kabupaten Karimun	3.500	-	3.500.000.000,-	-	1,43
10.	Pemerintah Kabupaten Natuna	6.000	-	6.000.000.000,-	-	2,44
11.	Pemerintah Kabupaten Pelalawan	2.301	-	2.301.000.000,-	-	0,94
12.	Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi	2.024	-	2.024.000.000,-	-	0,82
13.	Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu	5.000	-	5.000.000.000,-	-	2,04
14.	Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir	4.087	-	4.087.000.000,-	-	1,66
15.	Pemerintah Kota Dumai	2.313	-	2.313.000.000,-	-	0,94
16.	Pemerintah Kota Batam	3.419	--	3.419.000.000,-	-	1,39
17.	Pemerintah Kota Tanjung Pinang	665		665.000.000,-		0,27
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor		245.544	-	245.544.000.000,-	-	100.00
Jumlah saham Dalam Portepel		416.956	75.000	416.956.000.000,-	37.500.000.000,-	

Tahun 2007

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.36 tanggal 26 Januari 2007 dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang penerimaan laporannya telah dicatat dalam database Sisminbakum

No. W7-HT.01.04-1624 tanggal 8 Februari 2007("Akta No.36/2007), Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan menyetujui (i) perubahan nilai nominal Saham Seri A dari semula Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) menjadi Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) dan Saham Seri B dari semula Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) menjadi Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah), (ii) peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari semula Rp245.544.000.000,- (dua ratus empat puluh lima miliar lima ratus empat puluh empat juta Rupiah) menjadi Rp304.420.000.000,- (tiga ratus empat miliar empat ratus dua puluh juta Rupiah), dan (iii) perubahan nama salah satu pemegang saham yaitu Pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Pemerintah Kabupaten Bintan. Terdapat tambahan modal ditempatkan dan modal disetor sebesar Rp58.877.000.000,- (lima puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta Rupiah) yang telah disetor penuh oleh masing-masing pemegang saham secara tunai dengan perincian sebagai berikut:

a. Pemerintah Propinsi Riau sebesar Rp26.976.000.000,- (dua puluh enam miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta Rupiah).
b. Pemerintah Kota Pekanbaru sebesar Rp993.000.000,- (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta Rupiah).
c. Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebesar Rp1.996.000.000,- (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta Rupiah).
d. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah).
e. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sebesar Rp1.605.000.000,- (satu miliar enam ratus lima juta Rupiah).
f. Pemerintah Kabupaten Bintan sebesar Rp2.707.000.000,- (dua miliar tujuh ratus tujuh juta Rupiah).
g. Pemerintah Kabupaten Siak sebesar Rp849.000.000,- (delapan ratus empat puluh sembilan juta Rupiah).
h. Pemerintah Kabupaten Karimun sebesar Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta Rupiah).
i. Pemerintah Kabupaten Natuna sebesar Rp9.000.000.000,- (sembilan miliar Rupiah).
j. Pemerintah Kabupaten Pelalawan sebesar Rp539.000.000,- (lima ratus tiga puluh sembilan juta Rupiah).
k. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi sebesar Rp3.996.000.000,- (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta Rupiah).
l. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah).
m. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir sebesar Rp913.000.000,- (sembilan ratus tiga belas juta Rupiah).
n. Pemerintah Kota Dumai sebesar Rp947.000.000,- (sembilan ratus empat puluh tujuh juta Rupiah).
o. Pemerintah Kota Batam sebesar Rp661.000.000,- (enam ratus enam puluh satu juta Rupiah).
p. Pemerintah Kota Tanjung Pinang sebesar Rp4.995.000.000,- (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta Rupiah).

Dengan adanya peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, maka susunan para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

NO.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham		Nilai Saham		%
		Saham Seri A	Saham Seri B	Saham Prioritas @Rp10.000.000,-	Saham Biasa @Rp5.000.000,-	
Modal Dasar Rp700.000.000.000,-		66.250	7.500	662.500.000.000,-	37.500.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor						
1.	Pemerintah Prov. Riau	19.764	-	197.640.000.000,-	-	64,99
2.	Pemerintah Kota Pekanbaru	493	-	4.930.000.000,-	-	1,62
3.	Pemerintah Kabupaten Kampar	428	-	4.281.000.000,-	-	1,41
4.	Pemerintah Kabupaten Bengkalis	1.500	-	15.000.000.000,-	-	4,93
5.	Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu	283	-	2.830.000.000,-	-	0,93
6.	Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir	970	-	9.700.000.000,-	-	3,19
7.	Pemerintah Kabupaten Bintan	1.307	-	13.070.000.000,-	-	4,29
8.	Pemerintah Kabupaten Siak	471	-	4.710.000.000,-	-	1,55
9.	Pemerintah Kabupaten Karimun	420	-	4.200.000.000,-	-	1,38
10.	Pemerintah Kabupaten Natuna	1.500	-	15.000.000.000,-	-	4,93
11.	Pemerintah Kabupaten Pelalawan	284	-	2.840.000.000,-	-	0,93
12.	Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi	602	-	6.020.000.000,-	-	1,98
13.	Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu	600	-	6.000.000.000,-	-	1,97
14.	Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir	500	-	5.000.000.000,-	-	1,64

NO.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham		Nilai Saham		%
		Saham Seri A	Saham Seri B	Saham Prioritas @Rp10.000.000,-	Saham Biasa @Rp5.000.000,-	
16.	Pemerintah Kota Batam	408	--	4.080.000.000,-	-	1,34
17.	Pemerintah Kota Tanjung Pinang	566		5.660.000.000,-		1,86
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor		30.442	-	304.420.000.000,-	-	100.00
Jumlah saham Dalam Portepel		35.808	7.500	358.080.000.000,-	37.500.000.000,-	

Berdasarkan Surat Perseroan No. 1060/DIR/2011 tanggal 24 Mei 2011 perihal Penjelasan Setoran Modal Berdasarkan Akta No. 36 tanggal 26 Januari 2007, Perseroan menjelaskan bahwa pada tanggal 29 Desember 2006 terdapat tambahan setoran modal dari pemegang saham sebesar Rp58.877.000.000,- (lima puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta Rupiah), sehingga total setoran modal per tanggal 29 Desember 2006 menjadi sebesar Rp304.421.000.000,- (tiga ratus empat miliar empat ratus dua puluh satu juta Rupiah) dengan nilai nominal setiap saham sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah). Namun demikian, berdasarkan Akta No. 36/2007, Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari semula Rp245.544.000.000,- (dua ratus empat puluh lima miliar lima ratus empat puluh empat juta Rupiah) menjadi Rp304.420.000.000,- (tiga ratus empat miliar empat ratus dua puluh juta Rupiah). Selisih modal disetor sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) disebabkan karena setoran modal Pemerintah Kabupaten Kampar tidak seluruhnya dapat dibukukan sebagai modal disetor karena tidak cukup untuk 1 (satu) lembar saham yang bernilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), sehingga modal disetor Pemerintah Kabupaten Kampar berubah dari semula Rp4.281.000.000,- (empat miliar dua ratus delapan puluh satu juta Rupiah) atau sejumlah 4.281 (empat ribu dua ratus delapan puluh satu) lembar saham sebagaimana dinyatakan dalam Akta No.490/2006 menjadi Rp4.280.000.000,- (empat miliar dua ratus delapan puluh juta Rupiah), dan modal disetor Perseroan pada neraca berubah dari semula Rp304.421.000.000,- (tiga ratus empat miliar empat ratus dua puluh satu juta Rupiah) menjadi Rp304.420.000.000,- (tiga ratus empat miliar empat ratus dua puluh juta Rupiah). Sisa setoran modal Pemerintah Kabupaten Kampar sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) dibukukan dalam rekening titipan setoran modal.

Tahun 2008

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.19 tanggal 22 Januari 2008 dibuat di hadapan Refizal, S.H., M.Hum, Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar telah dicatat dalam database Sisminbakum sesuai surat No. AHU-AH.01.10-3788 tanggal 18 Februari 2008 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0011590.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 18 Februari 2008, Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari semula Rp304.420.000.000,- (tiga ratus empat miliar empat ratus dua puluh juta Rupiah) menjadi Rp516.040.000.000,- (lima ratus enam belas miliar empat puluh juta Rupiah) yang terealisasi dari pengembalian deviden, termasuk titipan setoran modal, dan penyetoran modal oleh Kabupaten Lingga serta dengan penetapan tambahan modal disetor di luar pengembalian deviden sebagaimana ternyata dalam neraca Perseroan tanggal 31 Desember 2007. Terdapat tambahan modal ditempatkan dan modal disetor sebesar Rp211.620.000.000,- (dua ratus sebelas miliar enam ratus dua puluh juta Rupiah) yang terealisasi dari pengembalian deviden, termasuk titipan setoran modal, dan penyetoran modal oleh Kabupaten Lingga serta dengan penerapan tambahan modal disetor di luar pengembalian deviden sebagaimana ternyata dalam Neraca Perseroan per tanggal 31 Desember 2007 dengan perincian sebagai berikut:

a. Pemerintah Propinsi Riau sebesar Rp75.340.000.000,- (tujuh puluh lima miliar tiga ratus empat puluh juta Rupiah).
b. Pemerintah Kota Pekanbaru sebesar Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah).
c. Pemerintah Kabupaten Kampar sebesar Rp100.900.000.000,- (seratus miliar sembilan ratus juta Rupiah).
d. Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah).
e. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah).
f. Pemerintah Kabupaten Bintan sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah).
g. Pemerintah Kabupaten Karimun sebesar Rp1.590.000.000,- (satu miliar lima ratus sembilan puluh juta Rupiah).
h. Pemerintah Kabupaten Siak sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah).
i. Pemerintah Kabupaten Pelalawan sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah).
j. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi sebesar Rp2.290.000.000,- (dua miliar dua ratus sembilan puluh juta Rupiah).
k. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sebesar Rp2.280.000.000,- (dua miliar dua ratus delapan puluh juta Rupiah).
l. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir sebesar Rp11.900.000.000,- (sebelas miliar sembilan ratus juta Rupiah).

m. Pemerintah Kota Dumai sebesar Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta Rupiah).
n. Pemerintah Kota Batam sebesar Rp1.550.000.000,- (satu miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah).
o. Pemerintah Kota Tanjung Pinang sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta Rupiah).
p. Pemerintah Kabupaten Lingga sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah).

Dengan adanya peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, maka susunan para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

N0	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham		Nilai Saham		%
		Saham Seri A	Saham Seri B	Saham Prioritas @Rp10.000.000,-	Saham Biasa @Rp5.000.000,-	
Modal Dasar Rp700.000.000.000,-		66.250	7.500	662.500.000.000,-	37.500.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor						
1.	Pemerintah Prov. Riau	27.318	-	273.180.000.000,-	-	52,94
2.	Pemerintah Kota Pekanbaru	643	-	6.430.000.000,-	-	1,25
3.	Pemerintah Kabupaten Kampar	10.518	-	105.180.000.000,-	-	20,38
4.	Pemerintah Kabupaten Bengkalis	1.700	-	17.000.000.000,-	-	3,29
5.	Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu	383	-	3.830.000.000,-	-	0,74
6.	Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir	970	-	9.700.000.000,-	-	1,88
7.	Pemerintah Kabupaten Bintan	1.507	-	15.070.000.000,-	-	2,92
8.	Pemerintah Kabupaten Karimun	579	-	5.790.000.000,-	-	1,12
9.	Pemerintah Kabupaten Natuna	1.500	-	15.000.000.000,-	-	2,91
10.	Pemerintah Kabupaten Siak	771	-	7.710.000.000,-	-	1,49
11.	Pemerintah Kabupaten Pelalawan	784	-	7.840.000.000,-	-	1,52
12.	Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi	831	-	8.310.000.000,-	-	1,61
13.	Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu	828	-	8.280.000.000,-	-	1,60
14.	Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir	1.690	-	16.900.000.000,-	-	3,27
15.	Pemerintah Kota Dumai	396	-	3.960.000.000,-	-	0,77
16.	Pemerintah Kota Batam	563	-	5.630.000.000,-	-	1,09
17.	Pemerintah Kota Tanjung Pinang	573	-	5.730.000.000,-		1,11
18.	Pemerintah Kabupaten Lingga	50	-	500.000.000,-		0,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor		51.604	-	516.040.000.000,-	-	100.00
Jumlah saham Dalam Portepel		14.646	7.500	146.460.000.000,-	37.500.000.000,-	

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.34 tanggal 26 Mei 2008 dibuat di hadapan Refizal, S.H., M.Hum.,Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik berdasarkan Keputusan No.AHU-91873. AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 1 Desember 2008, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0116382.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 1 Desember 2008, dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UU No.3/1982 dengan No.TDP 040116500042 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Pekanbaru dengan No.1105/BH.04.01/XII/2008 tanggal 23 Desember 2008, Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari semula Rp700.000.000.000,- (tujuh ratus miliar Rupiah) menjadi Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) dan perubahan nilai nominal Saham Seri A dari semula Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) menjadi Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) dan Saham Seri B dari semula Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) menjadi Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah).

Susunan para pemegang saham Perseroan berdasarkan striktur permodalan sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut:

N0.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham		Nilai Saham		%
		Saham Seri A	Saham Seri B	Saham Prioritas @Rp10.000.000,-	Saham Biasa @Rp5.000.000,-	
Modal Dasar Rp2.000.000.000.000,-		17.000.000	3.000.000	1.700.000.000.000,-	300.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor						
1.	Pemerintah Prov. Riau	27.318	-	273.180.000.000,-	-	52,94
2.	Pemerintah Kota Pekanbaru	643	-	6.430.000.000,-	-	1,25
3.	Pemerintah Kabupaten Kampar	10.518	-	105.180.000.000,-	-	20,38
4.	Pemerintah Kabupaten Bengkalis	1.700	-	17.000.000.000,-	-	3,29
5.	Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu	383	-	3.830.000.000,-	-	0,74
6.	Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir	970	-	9.700.000.000,-	-	1,88
7.	Pemerintah Kabupaten Bintan	1.507	-	15.070.000.000,-	-	2,92
8.	Pemerintah Kabupaten Karimun	579	-	5.790.000.000,-	-	1,12
9.	Pemerintah Kabupaten Natuna	1.500	-	15.000.000.000,-	-	2,91
10.	Pemerintah Kabupaten Siak	771	-	7.710.000.000,-	-	1,49
11.	Pemerintah Kabupaten Pelalawan	784	-	7.840.000.000,-	-	1,52
12.	Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi	831	-	8.310.000.000,-	-	1,61
13.	Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu	828	-	8.280.000.000,-	-	1,60
14.	Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir	1.690	-	16.900.000.000,-	-	3,27
15.	Pemerintah Kota Dumai	396	-	3.960.000.000,-	-	0,77
16.	Pemerintah Kota Batam	563	-	5.630.000.000,-	-	1,09
17.	Pemerintah Kota Tanjung Pinang	573	-	5.730.000.000,-		1,11
18.	Pemerintah Kabupaten Lingga	50	-	500.000.000,-		0,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor		5.160.400	-	516.040.000.000,-	-	100.00
Jumlah saham Dalam Portepel		11.839.600	3.000.000	1.183.960.000.000,-	300.000.000.000,-	

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.278 tanggal 27 Desember 2008 dibuat di hadapan Yondri Darto, S.H., Notaris di Batam, yang penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar telah dicatat dalam database Sisminbakum sesuai surat No. AHU-AH.01.10-03624 tanggal 14 April 2009 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0016115.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 14 April 2009, Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari semula Rp516.040.000.000,- (lima ratus enam belas miliar empat puluh juta Rupiah) menjadi Rp579.196.800.000,- (lima ratus tujuh puluh sembilan miliar seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu Rupiah).

Terdapat tambahan setoran modal sebesar Rp63.157.194.230,- (enam puluh tiga miliar seratus lima puluh tujuh juta seratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tiga puluh Rupiah) berasal dari (i) setoran pengembalian dividen pemegang saham Perseroan Tahun 2007 sebesar Rp15.539.319.553,- (lima belas miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus Sembilan belas ribu lima ratus lima puluh tiga Rupiah); (ii) titipan setoran modal sebesar Rp56.587.447,- (lima puluh enam juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh tujuh Rupiah); dan (iii) setoran tunai sebesar Rp47.561.287.231,- (empat puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh satu Rupiah), penyetoran oleh para pemegang saham yang dicatat sebagai modal ditempatkan dan disetor adalah sebesar Rp63.156.800.000,- (enam puluh tiga miliar seratus lima puluh enam juta delapan ratus ribu Rupiah), selisih setoran modal dengan total sebesar Rp394.230,- dibukukan dalam rekening titipan setoran para pemegang saham, tambahan modal ditempatkan dan disetor seluruhnya diambil bagian dengan pemegang saham Perseroan dengan perincian sebagai berikut:

a. Pemerintah Propinsi Riau sebesar Rp6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu Rupiah).
b. Pemerintah Kota Pekanbaru sebesar Rp1.560.900.000,- (satu miliar lima ratus enam puluh juta sembilan ratus ribu Rupiah).
c. Pemerintah Kabupaten Kampar sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah).
d. Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebesar Rp25.004.200.000,- (dua puluh lima miliar empat juta dua ratus ribu Rupiah).

e. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu sebesar Rp2.570.700.000,- (dua miliar lima ratus tujuh puluh juta tujuh ratus ribu Rupiah).
f. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sebesar Rp13.690.100.000,- (tiga belas miliar enam ratus sembilan puluh juta seratus ribu Rupiah).
g. Pemerintah Kabupaten Bintan sebesar Rp2.008.900.000,- (dua miliar delapan juta sembilan ratus ribu Rupiah).
h. Pemerintah Kabupaten Karimun sebesar Rp1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta Rupiah).
i. Pemerintah Kabupaten Siak sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah).
j. Pemerintah Kabupaten Pelalawan sebesar Rp10.006.800.000,- (sepuluh miliar enam juta delapan ratus ribu Rupiah).
k. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi sebesar Rp2.296.000.000,- (dua miliar dua ratus sembilan puluh enam juta Rupiah).
l. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah).
m. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir sebesar Rp2.855.500.000,- (dua miliar delapan ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu Rupiah).
n. Pemerintah Kota Dumai sebesar Rp1.243.000.000,- (satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta Rupiah).
o. Pemerintah Kota Batam sebesar Rp5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu Rupiah).
p. Pemerintah Kota Tanjung Pinang sebesar Rp5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu Rupiah).
q. Pemerintah Kabupaten Lingga sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah).

Dengan adanya peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sebagaimana tersebut di atas, maka susunan para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

N0.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham		Nilai Saham		%
		Saham Seri A	Saham Seri B	Saham Prioritas @Rp10.000.000,-	Saham Biasa @Rp5.000.000,-	
Modal Dasar Rp2.000.000.000.000,-		17.000.000	3.000.000	1.700.000.000.000,-	300.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor						
1.	Pemerintah Prov. Riau	2.731.862	-	273.186.200.000,-	-	47,17
2.	Pemerintah Kota Pekanbaru	79.909	-	7.990.900.000,-	-	1,38
3.	Pemerintah Kabupaten Kampar	1.051.812	-	105.181.200.000,-	-	18,16
4.	Pemerintah Kabupaten Bengkalis	420.042	-	42.004.200.000,-	-	7,25
5.	Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu	64.007	-	6.400.700.000,-	-	1,11
6.	Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir	233.901	-	23.390.100.000,-	-	4.04
7.	Pemerintah Kabupaten Bintan	170.789	-	17.078.900.000,-	-	2,95
8.	Pemerintah Kabupaten Karimun	71.900	-	7.190.000.000,-	-	1,24
9.	Pemerintah Kabupaten Natuna	150.000	-	15.000.000.000,-	-	2,59
10.	Pemerintah Kabupaten Siak	77.110	-	7.711.000.000,-	-	1,33
11.	Pemerintah Kabupaten Pelalawan	178.468	-	17.846.800.000,-	-	3.08
12.	Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi	106.060	-	10.606.000.000,-	-	1,83
13.	Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu	82.807	-	8.280.700.000,-	-	1,43
14.	Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir	197.555	-	19.755.500.000,-	-	3,41
15.	Pemerintah Kota Dumai	52.030	-	5.203.000.000,-	-	0,90
16.	Pemerintah Kota Batam	56.358	-	5.635.800.000,-	-	0,97
17.	Pemerintah Kota Tanjung Pinang	57.358	-	5.735.800.000,-		0,99
18.	Pemerintah Kabupaten Lingga	10.000	-	1.000.000.000,-		0,17
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor		5.791.968	-	579.196.800.000,-	-	100.00
Jumlah saham Dalam Portepel		11.208.032	3.000.000	1.120.803.200.000,-	300.000.000.000,-	

Tahun 2010

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.06 tanggal 8 Januari 2010 dibuat di hadapan Fery Bakti, S.H., Notaris di Pekanbaru, yang penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar telah dicatat dalam database Sisminbakum sesuai surat No. AHU-AH.01.10-09855 tanggal 23 April 2010 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0030672.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 23 April 2010, Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari semula Rp579.196.800.000,- (lima ratus tujuh puluh sembilan miliar seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu Rupiah) menjadi Rp747.944.100.000,- (tujuh ratus empat puluh tujuh miliar sembilan ratus empat puluh empat juta seratus ribu Rupiah). Terdapat tambahan modal ditempatkan dan modal disetor sebesar Rp168.747.300.000,- (seratus enam puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus ribu Rupiah) yang seluruhnya telah disetor penuh oleh masing-masing pemegang saham dengan perincian sebagai berikut:

a. Pemerintah Propinsi Riau total setoran sebesar Rp90.982.000.000,- (sembilan puluh miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta Rupiah), terdiri dari (i) setoran tunai sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) dan (ii) inbreng tanah senilai Rp70.982.000.000,- (tujuh puluh miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta Rupiah).
b. Pemerintah Kabupaten Bengkalis setoran tunai sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah).
c. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir setoran tunai sebesar Rp1.635.000.000,- (satu miliar enam ratus tiga puluh lima juta Rupiah).
d. Pemerintah Kabupaten Bintan setoran tunai sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah).
e. Pemerintah Kabupaten Lingga setoran tunai sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah).
f. Pemerintah Kabupaten Siak setoran tunai sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah).
g. Pemerintah Kabupaten Pelalawan setoran tunai sebesar Rp10.00.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah).
h. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulir setoran tunai sebesar Rp4.328.900.000,- (empat miliar tiga ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus ribu Rupiah).
i. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi setoran tunai sebesar Rp2.145.200.000,- (dua miliar seratus empat puluh lima juta dua ratus ribu Rupiah).
j. Pemerintah Kota Pekanbaru setoran tunai sebesar Rp1.656.200.000,- (satu miliar enap ratus lima puluh enam juta dua ratus ribu Rupiah)

Dengan adanya peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sebagaimana tersebut di atas, maka susunan para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

N0.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham		Nilai Saham		%
		Saham Seri A	Saham Seri B	Saham Prioritas @ Rp10.000.000,-	Saham Biasa @Rp5.000.000,-	
Modal Dasar Rp2.000.000.000.000,-		17.000.000	3.000.000	1.700.000.000.000,-	300.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor						
1.	Pemerintah Prov. Riau	3.991.682	-	399.168.200.000.-	-	48,27
2.	Pemerintah Kota Pekanbaru	113.531	-	11.353.100.000.-	-	1,37
3.	Pemerintah Kabupaten Kampar	1.051.812	-	105.181.200.000.-	-	12,72
4.	Pemerintah Kabupaten Bengkalis	920.042	-	92.004.200.000.-	-	11,13
5.	Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu	64.007	-	6.400.700.000,-	-	0,77
6.	Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir	279.937	-	27.993.700.000.-	-	3,39
7.	Pemerintah Kabupaten Bintan	220.789	-	22.078.900.000.-	-	2,67
8.	Pemerintah Kabupaten Karimun	71.900	-	7.190.000.000,-	-	0,87
9.	Pemerintah Kabupaten Natuna	181.546	-	18.154.600.000.-	-	2,20
10.	Pemerintah Kabupaten Siak	315.110	-	31.511.000.000.-	-	3,81
11.	Pemerintah Kabupaten Pelalawan	278.468	-	27.846.800.000.-	-	3,37
12.	Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi	127.512	-	12.751.200.000.-	-	1,54
13.	Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu	82.807	-	8.280.700.000,-	-	1,02
14.	Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir	283.057	-	28.305.700.000.-	-	3,42
15.	Pemerintah Kota Dumai	52.030	-	5.203.000.000,-	-	0,63
16.	Pemerintah Kota Batam	70.596	-	7.059.600.000.-	-	0,85
17.	Pemerintah Kota Tanjung Pinang	83.913	-	8.391.300.000.-		1,01
18.	Pemerintah Kabupaten Lingga	30.000	-	3.000.000.000.-		0,36
19	Pemerintah Kabupaten Meranti	50.000		5.000.000.000.-		0,60
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor		8.268.739	-	826.873.900.000,-	-	100.00
Jumlah saham Dalam Portepel		8.731.261	3.000.000	873.126.100.000,-	300.000.000.000,-	

Tahun 2011

Modal dasar perseroan berjumlah Rp.2.000.000.000.000 terbagi atas 20.000.000 lembar saham yang terdiri dari 17.000.000 lembar saham seri A dengan nilai nominal Rp.100.000 per saham dan 3.000.000 lembar saham seri B dengan nilai nominal Rp.100.000 per saham. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh oleh para pemegang saham sebanyak 7.479.441 lembar saham seri A dengan nilai nominal saham sebesar Rp100.000 per lembar saham atau sebesar Rp.747.944.100.000. Perubahan modal tersebut telah mendapat penegasan dari Bank Indonesia melalui surat Bank Indonesia nomor 12/50/DPB1/APBU/Pbr tanggal 5 Oktober 2010.

Di Akhir tahun 2010, berdasarkan perubahan anggaran dasar Bank yang telah diaktakan oleh Notaris Fery Bakti, SH dengan akta nomor 53 tanggal 31 Desember 2010 mengenai penetapan penambahan modal disetor Bank, telah diterima tambahan setoran modal dari pemegang saham untuk tahun 2010 sebesar Rp78.930.000.000 serta aset berupa tanah milik Pemerintah Kabupaten Siak senilai Rp1.200.000.000 yang diperuntukkan untuk pembangunan gedung Bank Riau Kepri cabang Siak Sri Indrapura. Adapun kewenangan dan pelaksanaannya masih menunggu rekomendasi dari Dewan Komisaris perseroan

Setoran modal tersebut belum dapat dicatat sebagai modal disetor pada 31 Desember 2010, karena sampai dengan akhir periode belum mendapat penegasan dari Bank Indonesia yang disampaikan melalui surat dari Bank Indonesia dengan nomor surat 13/3/DPB1/APBU/Pbr tanggal 31 Januari 2011. Dengan demikian pada 31 Desember 2010, setoran tersebut dicatat sebagai tambahan setoran modal pemda

Modal dasar perseroan berjumlah Rp.2.000.000.000.000 terbagi atas 20.000.000 lembar saham yang terdiri dari 17.000.000 lembar saham seri A dengan nilai nominal Rp.100.000 per saham dan 3.000.000 lembar saham seri B dengan nilai nominal Rp.100.000 per

saham. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh oleh para pemegang saham sebanyak 8.268.739 lembar saham seri A dengan nilai nominal saham sebesar Rp100.000 per lembar saham atau sebesar Rp.826.873.900.000.

Perubahan modal tersebut (sebesar Rp. 826.873.900.000,-) telah mendapat penegasan dari Bank Indonesia melalui surat Bank Indonesia nomor 13/25/DPIP/Prz/Pbr tanggal 25 April 2011.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Riau nomor 47 tanggal 31 Mei 2011 yang diaktakan oleh notaris Fery Bakti, SH menerangkan bahwa terdapat penambahan modal ditempatkan dan disetor oleh pemegang saham sebesar Rp13.200.000.000 dimana modal ditempatkan awal sebesar Rp826.873.900.000 berubah menjadi Rp840.073.900.000 berdasarkan akta tersebut diatas. Penambahan tersebut terbagi atas kas yang disetor dari Provinsi kepulauan Riau sebesar Rp12.000.000.000 dan aset berupa tanah milik Pemerintah Kabupaten Siak sebesar Rp1.200.000.000 yang diperuntukkan untuk pembangunan gedung Bank Riau Kepri cabang Siak Sri Indrapura.

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dengan akta no.45 tanggal 15 Juni 2012 yang diaktakan oleh notaris Refizal, SH, M.Hum disebutkan bahwa posisi modal disetor Bank telah berubah dari Rp826.873.900.000 menjadi Rp840.073.900.000. Penambahan modal ditempatkan dan modal disetor sebesar Rp13.200.000.000 telah dicatat dan ditatausahakan sesuai dengan administrasi Bank Indonesia berdasarkan surat No.14/12/DPB1/APBU/Pbr tanggal 7 Februari 2012.

Tahun 2012

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diaktakan oleh Notaris Refizal, SH, M.Hum dengan nomor 46 tertanggal 15 Juni 2012 bahwa pemegang saham telah menyetujui tambahan modal tahun 2011 sebesar Rp54.800.929.133, rencana tambahan modal dari 70% dividen tahun 2011 sebesar Rp122.340.843.240, dari kabupaten Anambas sebesar Rp7.500.000.000 dan dari kabupaten kep.Meranti sebesar Rp15.000.000.000.

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat dengan akta no.60 tanggal 26 Juni 2012 yang diaktakan oleh Notaris Refizal, SH, M.Hum dijelaskan bahwa para pemegang saham menyetujui penambahan modal disetor sebesar Rp54.801.000.000 sehingga posisi modal disetor Bank telah berubah dari Rp840.073.900.000 menjadi Rp894.874.900.000. Berdasarkan surat dari Bank Indonesia mengenai Laporan Perubahan Modal Disetor Bank dengan Nomor 14/52/DPB1/APBU/Pbr tanggal 28 Desember 2012.

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dengan akta no.45 tanggal 15 Juni 2012 yang diaktakan oleh Notaris Refizal, SH, M.Hum disebutkan bahwa posisi modal disetor Bank telah berubah dari Rp826.873.900.000 menjadi Rp840.073.900.000. Penambahan modal ditempatkan dan modal disetor sebesar Rp13.200.000.000 telah dicatat dan ditatausahakan sesuai dengan administrasi Bank Indonesia berdasarkan surat No.14/12/DPB1/APBU/Pbr tanggal 7 Pebruari 2012.

Tahun 2013

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Riau Kepri nomor 68 tanggal 26 Juni 2013 yang diaktakan oleh Notaris Refizal, SH, M.Hum menerangkan bahwa telah menyetujui penambahan modal disetor sebesar Rp.54.771.345.829 sehingga posisi modal disetor Bank telah berubah dari Rp902.374.800.000 menjadi Rp957.146.100.000. Laporan perubahan modal disetor tersebut telah disetujui oleh Bank Indonesia berdasarkan surat No.15/9/DPKP/Pbr tanggal 17 September 2013. Dengan adanya peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sebagaimana tersebut di atas, maka susunan para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No	31 Desember 13				
	Pemegang Saham / Shareholders	% Kepemilikan/ % ownership	Lembar saham / per share	Per lembar saham / par value (Rp)	Jumlah Nilai Saham / Value of share
Terdiri dari pemerintah daerah :					
1.	Provinsi Riau	43.79%	4,191,682	100,000	419,168,200,000
2.	Kota Pekanbaru	1.57%	150,000	100,000	15,000,000,000
3.	Kabupaten Kampar	10.99%	1,051,812	100,000	105,181,200,000
4.	Kabupaten Bengkalis	12.71%	1,216,062	100,000	121,606,200,000
5.	Kabupaten Indragiri Hulu	0.67%	64,007	100,000	6,400,700,000
6.	Kabupaten Indragiri Hilir	3.54%	339,102	100,000	33,910,200,000
7.	Kabupaten Siak Sri Indrapura	3.42%	327,110	100,000	32,711,000,000
8.	Kota Dumai	0.54%	52,030	100,000	5,203,000,000
9.	Kabupaten Pelalawan	3.34%	319,668	100,000	31,966,800,000
10.	Kabupaten Rokan Hulu	0.87%	82,807	100,000	8,280,700,000
11.	Kabupaten Rokan Hilir	3.88%	371,351	100,000	37,135,100,000
12.	Kabupaten Kuantan Singingi	1.59%	152,086	100,000	15,208,600,000
13.	Kabupaten Bintan	3.14%	300,789	100,000	30,078,900,000
14.	Kota Batam	0.74%	70,596	100,000	7,059,600,000
15.	Kabupaten Karimun	0.75%	71,900	100,000	7,190,000,000
16.	Kabupaten Natuna	1.90%	181,546	100,000	18,154,600,000
17.	Kota Tanjung Pinang	0.88%	83,913	100,000	8,391,300,000
18.	Kabupaten Kep. Meranti	3.13%	300,000	100,000	30,000,000,000
19.	Kabupaten Lingga	0.52%	50,000	100,000	5,000,000,000
20.	Provinsi Kepulauan Riau	1.25%	120,000	100,000	12,000,000,000
21.	Kabupaten Anambas	0.78%	75,000	100,000	7,500,000,000
	Jumlah / Amount to	100.00%	9,571,461		957,146,100,000

B. Nama-nama Pemiliki Saham

Provinsi Riau

Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 No. 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 No. 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1646) ("UU No. 61/1958"). Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 61/1958, wilayah Daerah Tingkat I Riau dibagi menjadi 5 Daerah Swatantra Tingkat II yaitu Bengkalis, Kampar, Inderagiri, Kepulauan Riau, dan Kotapraja Pakanbaru. Sampai dengan tanggal 23 Juni 2011, wilayah Propinsi Riau terdiri dari 10 (sepuluh) Kabupaten, yaitu Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, dan Kabupeten Meranti, serta 2 (dua) Kota, yaitu Kota Pekanbaru, Kota Dumai,

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, Propinsi Riau dipimpin oleh:
Plt. Gubernur : Arsyadjuliandi Rachman

Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 19). Kota Pekanbaru terdiri dari 12 (dua belas) cakupan wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Sail, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan

Sukajadi, Kecamatan Senapelan, Kecamatan Rumbai dan Kecamatan Rumbai Pesisir.
Sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, Kota Pekanbaru dipimpin oleh:
Walikota : H. Firdaus, MT.
Wakil Walikota : H. Ayat cahyadi S.Si

Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 No. 25). Ibukota Kabupaten Kampar berkedudukan di Bangkinang. Kabupaten Kampar terdiri dari 20 (dua puluh) cakupan wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Bangkinang, Kecamatan Bangkinang Barat, Kecamatan Bangkinang Seberang, Kecamatan Gunung Sahilan, Kecamatan Kampar, Kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kecamatan Rumbio Jaya, Kecamatan Salo, Kecamatan Siak Hulu, Kecamatan Tambang, Kecamatan Tapung, Kecamatan Tapung Hilir, Kecamatan Tapung Hulu, dan Kecamatan XIII Koto Kampar.
Sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, Kabupaten Kampar dipimpin oleh:
Bupati : H Jefry Noer SH
Wakil Bupati : H Ibrahim Ali SH

Kabupaten Bengkalis

Kabupaten Bengkalis dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 No. 25). Ibukota Kabupaten Bengkalis berkedudukan di Bengkalis. Kabupaten Bengkalis terdiri dari 8 (delapan) wilayah cakupan kecamatan, yaitu Kecamatan Mandau, Kecamatan Pinggir, Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Siak Kecil, Kecamatan Bantan, Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Rupat, dan Kecamatan Rupat Utara.
Sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, Kabupaten Bengkalis dipimpin oleh:
Bupati : Ir. H. Herliyan Saleh, M.Sc.
Wakil Bupati : Drs. Suayatno

Kabupaten Indragiri Hulu

Kabupaten Indragiri Hulu dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 No.25) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 No. 6). Ibukota Kabupaten Indragiri Hulu berkedudukan di Rengkat. Kabupaten Indragiri Hulu terdiri dari 14 (empat belas) cakupan wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Batang Cenaku, Kecamatan Batang Gansal, Kecamatan Batang Peranap, Kecamatan Kelayang, Kecamatan Kuala Cenaku, Kecamatan Lirik, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kecamatan Pasir Penyu, Kecamatan Peranap, Kecamatan Rakit Kulim, Kecamatan Rengat, Kecamatan Rengat Barat, Kecamatan Siberida, dan Kecamatan Sungai Lala.
Sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, Kabupaten Indragiri Hulu dipimpin oleh:
Bupati : Yopi Arianto, S.E.
Wakil Bupati : Harman Harmaini, S.H., M.M.

Kabupaten Indragiri Hilir

Kabupaten Indragiri Hilir dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 No. 6). Ibukota Kabupaten Indragiri Hilir berkedudukan di Tembilahan. Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari 20 (dua puluh) cakupan wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Batang Tuaka, Kecamatan Concong, Kecamatan Enok, Kecamatan Gaung, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kecamatan Kateman, Kecamatan Kempas, Kecamatan Kemuning, Kecamatan Keritang, Kecamatan Kuala Indragiri, Kecamatan Mandah, Kecamatan

Pelangiran, Kecamatan Pulau Burung, Kecamatan Reteh, Kecamatan Sungai Batang, Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Teluk Belengkong, Kecamatan Tembilahan, Kecamatan Tembilahan Hulu, dan Kecamatan Tempuling.
Sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, Kabupaten Indragiri Hilir dipimpin oleh:
Bupati : HM. Wardan, MP
Wakil Bupati : Rosman Malomo, B.Sc

Kabupaten Siak

Kabupaten Siak dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3902). Ibukota Kabupaten Siak berkedudukan di Siak Sri Indrapura. Kabupaten Siak terdiri dari 14 (empat belas) cakupan wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Bunga Raya, Kecamatan Dayun, Kecamatan Kandis, Kecamatan Kerinci Kanan, Kecamatan Koto Gasib, Kecamatan Lubuk Dalam, Kecamatan Mempura, Kecamatan Minas, Kecamatan Pusako, Kecamatan Sabak Auh, Kecamatan Siak, Kecamatan Sungai Apit, Kecamatan Sungai Mandau, dan Kecamatan Tualang.
Sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, Kabupaten Siak dipimpin oleh:
Bupati : Drs H Syamsuar MSi
Wakil Bupati : Drs H Alfedri

Kabupaten Pelalawan

Kabupaten Pelalawan dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3902). Ibukota Kabupaten Pelalawan berkedudukan di Pangkalan Kerinci. Kabupaten Pelalawan terdiri dari 12 (dua belas) cakupan wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Bandar Petalangan, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kecamatan Bunut, Kecamatan Kerumutan, Kecamatan Kuala Kampar, Kecamatan Langgam, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kecamatan Pelalawan, Kecamatan Teluk Meranti, dan Kecamatan Ukui.
Sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, Kabupaten Pelalawan dipimpin oleh:
Bupati : HM Harris
Wakil Bupati : Drs.H. Marwan Ibrahim,

Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3902). Ibukota Kabupaten Kuantan Singingi berkedudukan di Teluk Kuantan. Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 12 (dua belas) cakupan wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Benai, Kecamatan Cerenti, Kecamatan Gunung Toar, Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Inuman, Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kecamatan Pangean, Kecamatan Singingi, dan Kecamatan Singingi Hilir.
Sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, Kabupaten Kuantan Singingi dipimpin oleh:
Bupati : H. Sukarmis
Wakil Bupati : Drs. H. Zulkifli, M.Si

Kabupaten Rokan Hulu

Kabupaten Rokan Hulu dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3902). Ibukota Kabupaten Rokan Hulu berkedudukan di Pasir Pengaraian. Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 16 (enam belas) cakupan wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Bangun Purba, Kecamatan Bonai Darussalam, Kecamatan Kabun,

Kecamatan Kepenuhan, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kecamatan Kunto Darussalam, Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, Kecamatan Pendalian V Koto, Kecamatan Rambah, Kecamatan Rambah Hilir, Kecamatan Rambah Samo, Kecamatan Rokan IV Koto, Kecamatan Tambusai, Kecamatan Tambusai Utara, Kecamatan Tandun, dan Kecamatan Ujung Batu. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, Kabupaten Rokan Hulu dipimpin oleh:

Bupati : Drs. H. Achmad, M.Si
Wakil Bupati : Ir. H. Hafith Syukri, MM

Kabupaten Rokan Hilir

Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3902). Ibukota Kabupaten Rokan Hilir berkedudukan di Bagansiapiapi. Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari 13 (tiga belas) cakupan wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Bagan Sinembah, Kecamatan Bangko, Kecamatan Bangko Pusaka/ Pusako, Kecamatan Batu Hampar, Kecamatan Kubu, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kecamatan Pujud, Kecamatan Rantau Kopar, Kecamatan Rimba Melintang, Kecamatan Simpang Kanan, Kecamatan Sinaboi, Kecamatan Tanah Putih, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, Kabupaten Rokan Hilir dipimpin oleh:

Bupati : H. Suyatno
Wakil Bupati : Erianda

Kota Dumai

Kota Dumai didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 50, Tambahan Lembaran Negara No. 3829).Kota Dumai terdiri atas 5 (lima) cakupan wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Bukit Kapur, Kecamatan Dumai Barat, Dumai Timur, Kecamatan Medang Kampai, dan Kecamatan Sungai Sembilan.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, Kota Dumai dipimpin oleh:

Walikota : H. Khairul Anwar, S.H.
Wakil Walikota : Dr. H. Agus Widayat

Kabupaten Kepulauan Meranti

Kabupaten Kepulauan Meranti didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4968). Ibu kota Kabupaten Kepulauan Meranti berkedudukan di Selat Panjang Kecamatan Tebing Tinggi. Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri atas 5 (lima) cakupan wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Rangsang Barat, Kecamatan Rangsang, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, dan Kecamatan Merbau.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, Kabupaten Kepulauan Meranti dipimpin oleh:

Bupati : Drs. Irwan Nasir, M.Si
Wakil Bupati : Drs. Masrul Kasmy, M.Si

Provinsi Kepulauan Riau

Provinsi Kepulauan Riau terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2002 merupakan Provinsi ke-32 di Indonesia yang mencakup Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Lingga. Secara keseluruhan Wilayah Kepulauan Riau terdiri dari 4 Kabupaten dan 2 Kota, 42 Kecamatan serta 256 Kelurahan/Desa dengan jumlah 2.408 pulau besar dan kecil dimana 40% belum bernama dan berpenduduk. Adapun luas wilayahnya sebesar 252.601 Km2, di mana 95% - nya merupakan lautan dan hanya 5% merupakan wilayah darat.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, Provinsi Kepulauan Riau dipimpin oleh:

Gubernur : Drs.H. Muhammad Sani
Wakil Gubernur : Dr.HM. Soerya Respationo, SH.MH.

Kota Batam

Kota Batam didirikan berdasarkan Undang-undang No. 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3902). Kota Batam terdiri atas 12 (dua belas) cakupan wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Batam Kota, Kecamatan Batu Aji, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Belakang Padang, Kecamatan Bengkong, Kecamatan Bulang, Kecamatan Galang, Kecamatan Lubuk Baja, Kecamatan Nongsa, Kecamatan Sei Beduk, dan Kecamatan Sekupang.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, Kota Batam dipimpin oleh:

Walikota : Drs. H. Ahmad Dahlan, MH

Wakil Walikota : H. Rudi, SE.,MM

Kota Tanjung Pinang

Kota Tanjung Pinang didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjung Pinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No. 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4112). Kota Tanjung Pinang terdiri atas 4 (empat) cakupan wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kecamatan Tanjung Pinang Kota, Kecamatan Bestari dan Kecamatan Tanjung Pinang Timur.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, Kota Tanjung Pinang dipimpin oleh:

Walikota : H. Lis Darmansyah, SH

Wakil Walikota : H Syahrul, S.Pd

Kabupaten Bintan

Kabupaten Bintan didirikan dengan nama Kabupaten Kepulauan Riau berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Kepulauan Riau dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 No. 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3896). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 5 Tahun 2006 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4605) nama Kabupaten Kepulauan Riau diganti menjadi Kabupaten Bintan. Perubahan nama ini dimaksudkan agar tidak timbul kerancuan antara Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Kepulauan Riau dalam hal administrasi dan korespondensi. Ibukota Kabupaten Bintan berkedudukan di Bandar Seri Bentan. Kabupaten Bintan terdiri dari 10 (sepuluh) cakupan wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Bintan Pesisir, Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Gunung Kijang, Kecamatan Mantang, Kecamatan Sri Lobam, Kecamatan Tambelan, Kecamatan Teluk Bintan, Kecamatan Teluk Sebong, dan Kecamatan Toapaya.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, Kabupaten Bintan dipimpin oleh:

Bupati : H. Anshar Ahmad, SE, MM

Wakil Bupati : Drs. Khazalik

Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3902). Ibukota Kabupaten Karimun berkedudukan di Tanjung Balai Karimun. Kabupaten Karimun terdiri dari 9 (sembilan) cakupan wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Buru, Kecamatan Durai, Kecamatan Karimun, Kecamatan Kundur, Kecamatan Kundur Barat, Kecamatan Kundur Utara, Kecamatan Meral, Kecamatan Moro, dan Kecamatan Tebing.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, Kabupaten Karimun dipimpin oleh:

Bupati : H. NURDIN BASIRUN, S.Sos

Wakil Bupati : H. AUNUR RAFIQ, S.Sos, M.Si.

Kabupaten Natuna

Kabupaten Natuna dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3902). Ibukota Kabupaten Natuna berkedudukan di Ranai. Kabupaten Natuna terdiri dari 12 (dua belas) cakupan wilayah kecamatan, yaitu: Kecamatan Midai, Kecamatan Bunguran Barat, Kecamatan Bunguran Utara, Kecamatan Pulau Laut, Kecamatan Pulau Tiga, Kecamatan Bunguran Timur, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kecamatan Bunguran Tengah, Kecamatan Bunguran Selatan, Kecamatan Serasan, Kecamatan Subi, Kecamatan Serasan Timur.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, Kabupaten Natuna dipimpin oleh:

Bupati : Drs. H. Ilyas Sabli, M.Si

Wakil Bupati : Imalko, S.Sos

Kabupaten Lingga

Kabupaten Lingga didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4341). Ibu kota Kabupaten Lingga berkedudukan di Daik. Kabupaten Lingga terdiri atas 5 (lima) cakupan wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Lingga, Kecamatan Lingga Utara, Kecamatan Senayang, Kecamatan Singkep, dan Kecamatan Singkep Barat.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, Kabupaten Lingga dipimpin oleh:

Bupati : Drs. H. Daria

Wakil Bupati : Drs. Abu Hasim, MM

Kabupaten Kepulauan Anambas

Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebuah kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Ibukotanya adalah Terempa. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Natuna. Kabupaten Kepulauan Anambas berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Natuna yang terdiri atas cakupan 7 wilayah Kecamatan: Kecamatan Siantan, Kecamatan Palmatak, Kecamatan Siantan Timur, Kecamatan Siantan Tengah, Kecamatan Siantan Selatan, Kecamatan Jemaja Timur, Kecamatan Jemaja.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, Kabupaten Kepulauan Meranti dipimpin oleh:

Bupati : Drs. T. MUKHTARUDDIN

Wakil Bupati : ABDUL HARIS, SH

Penghargaan & Sertifikasi di Tahun 2014

Di tahun 2014, Bank Riau Kepri telah meraih penghargaan Riau Pesisir Pos sebagai bentuk penghargaan atas bukti karya nyata seluruh insan di PT. Bank Riau Kepri.



Rangkaian Kegiatan Penting Selama Tahun 2014



LAUNCHING PILOT PROJECT, BANK RIAU KEPRI SERIUS MENINGKATKAN PELAYANAN DAN BUDAYA PERUSAHAAN (18 FEBRUARI 2014)

Sudah menjadi rahasia umum bahwa perusahaan yang kuat, memiliki daya saing tinggi, mampu menciptakan kreativitas dan inovasi pasti dihasilkan melalui landasan yang kokoh. Landasan kokoh ini dapat diperoleh dari budaya perusahaan yang bertindak sebagai gambaran nyata yang mampu memberikan dampak pada intern dan ekstern perusahaan. Hal inilah yang disadari oleh seluruh insan di Bank Riau Kepri. Melalui Tim Desk Service Quality, Bank Riau Kepri merumuskan Budaya Perusahaan yang mampu membawa Bank Riau Kepri menjadi perusahaan yang kuat dan kokoh serta mencapai tujuan sebagai Regional Champion. Adapun nilai budaya Bank Riau Kepri tersebut adalah Integrity, Synergy, Customer Focus, Professionalism, dan Excellence.



NASABAH BANK RIAU KEPRI CABANG PEMBANTU SENAPELAN RAIH RP 1 MILIAR (11 MARET 2014)

Bank Riau Kepri menggelar penarikan undian Tabungan Sinar Tebar Miliar di halaman kantor Gubernur Riau. Hadiah Rp.1 Miliar diperoleh nasabah Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Senapelan. Penarikan undian dilakukan langsung oleh Gubernur Riau, H Annas Ma'amun, yang disaksikan oleh pihak notaris, kepolisian, dan perwakilan nasabah. Gubernur Riau, H Annas Ma'amun, memberikan pandangan positif terhadap Bank Riau Kepri dengan melakukan penarikan undian tersebut. Menurut Annas Ma'amun, program undian itu bisa menarik masyarakat untuk menabung dan menabung itu itu sangat baik.



PEMDA RIAU DAN KEPULAUAN RIAU TEKEN MOU DENGAN BPK DAN BANK RIAU KEPRI (17 Apr 2014)

Pemda Riau dan Kepulauan Riau menandatangani kesepakatan (MoU) dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Bank Riau Kepri tentang akses data transaksi rekening pemerintah provinsi/kabupaten/kota se-Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau secara online pada Bank Riau Kepri. Hal itu berguna dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah. Penandatanganan itu dilakukan di Auditorium Kantor Pusat BPK, Jakarta. Penandatanganan dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Riau, Widiyatmantoro, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kepulauan Riau, Drs Parna MM, dengan Wakil Gubernur Riau, H. Arsyadjuliandi Rachman, Gubernur Kepulauan Riau, H.M. Sani, dan Direktur Operasional Bank Riau Kepri, H. Wan Marwan. Turut juga hadir, bupati dan wali kota dari Provinsi Riau dan Kepulauan Riau serta Direktur Kepatuhan dan Manajemen Resiko Bank Riau Kepri, H. Eka Afriadi.



LAUNCHING KPE PNS, KINi GAJI PNS INHIL MELALUI BANK RIAU KEPRI (06 May 2014)

Bupati Kabupaten Indragiri Hilir, HM Wardan, menghadiri launching Kartu Pegawai Elektronik (KPE) di Balai Utama Kantor Bupati, Inhil, Jalan Akasai Tembilahan, Senin (21/4) pagi. Setelah launching, Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemkab Inhil sudah bisa melakukan update data personal secara online. Sebab, lebih dua ribu PNS setempat sudah memiliki KPE.

Bupati menyebutkan sangat banyak kemudahan dalam penggunaan kartu itu. Selain bisa mengakses data-data para PNS secara akurat, KPE juga dapat dipergunakan untuk keperluan transaksi perbankan, sehingga efisien waktu semakin baik. KPE ini merupakan database, dimana tingkat keotentikannya cukup akurat. Sebab, data-data ini tak saja terhimpun di daerah tetapi juga di tingkat pusat.

Bupati mengharapkan secara bertahap layanan KPE dapat dimanfaatkan oleh seluruh PNS. Pasalnya, sebagian besar PNS berada ditingkat desa.



KANTOR BANK RIAU KEPRI KEDAI MERAL DIRESMIKAN (07 May 2014)

Kantor Bank Riau Kepri Kedai Meral untuk wilayah Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, diresmikan Wakil Bupati Karimun, Aunur Rafiq, Rabu (30/4/2014) lalu. Acara peresmian tersebut dihadiri oleh Komisaris Bank Riau Kepri, Direktur Operasional Bank Riau Kepri, Pemimpin Divisi Bank Riau Kepri, pemimpin cabang Bank Riau Kepri, Unsur FKDKP Kabupaten Karimun, nasabah dan tamu undangan lainnya.

Direktur Operasional Bank Riau Kepri, Wan Marwan mengatakan, dengan diresmikan Kedai Meral ini merupakan jaringan ke 29 dari seluruh Kedai yang dimiliki Bank Riau Kepri. Selain itu sebagai ga pada jaringan urutan ke 128 yang tersebar diwilayah Provinsi Riau maupun Provinsi Kepri. Kemudian ditahun 2014 ini akan ditambahkan lagi sebanyak 10 kedai serupa, sehingga pada akhir tahun nanti jumlah kedai di wilayah Provinsi Riau serta Kepri berjumlah 142 unit. 'Dengan akan dilakukan penambahan dapat melayani seluruh lapisan masyarakat mulai dari kalangan pengusaha atas, menengah sampai kepada pengusaha ekonomi mikro dan kecil, yang bukan hanya untuk didua provinsi tersebut, bahkan keluar ke provinsi lainnya.



MALAM ANUGERAH UMKM AWARDS BANK RIAU KEPRI KE 6 (23 Oct 2014)

Bank Riau Kepri telah memberikan penghargaan kepada 15 pelaku usaha kecil mikro dan menengah di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau (kepri) pada acara UMKM Award ke 6. Apresiasi kepada UMKM yang merupakan debitur Bank Riau Kepri sebagai wujud komitmen bank pembangunan daerah ini untuk mengembangkan UMKM. Sesuai dengan mottonya, Tumbuh Kembangkan Usaha.

UMKM Award adalah motivasi bagi debitur UMKM. kami memberikan apresiasi kepada debitur yang konsisten dan berhasil dalam usahanya.

Afrial mengatakan, sejak program ini digulirkan, BRK sudah menyalurkan kredit UMKM sebesar Rp 1,8 triliun di Provinsi Riau dan Kepri. Dia berharap, ada banyak lagi pelaku UMKM yang terbantu usahanya melalui program kredit tersebut.



BANK RIAU KEPRI BERIKAN 4 AMBULANCE DAN LAUNCHING KPE SAAT UPACARA HKN KE 50 DI BENGKALIS (24 Nov 2014)

Di peringatan emas HKN tersebut ada kado istimewa dari Bank Riau Kepri dengan diberikannya 4 unit mobil ambulance kepada Kabupaten Bengkalis sebagai wujud program Corporate Social Responsibity (CSR) Bank Riau Kepri. Selain itu juga dilaksanakan launching Kartu Pegawai Elektronik (KPE) untuk seluruh pegawai negeri sipil di Bengkalis

Dalam Pidato yang disampaikan oleh Herliyan menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Bank Riau Kepri yang peduli dengan masyarakat Bengkalis terutama di bidang kesehatan dan telah memberikan bantuan CSR berupa 4 unit mobil ambulance yang nantinya akan disebar keseluruh wilayah Bengkalis dan berharap dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Bengkalis.





Laporan Dewan Komisaris

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Alhamdullilah hirobbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya, di tahun 2014, kinerja Bank Riau Kepri terus tumbuh, meskipun pertumbuhan ekonomi domistik dan regional mengalami perlambatan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan sahabat-sahabatnya, yang atas tuntunannya membawa kita semua menjadi umat yang terbaik sampai akhir zaman. Amin Ya Rabbal Alamin

> Kondisi Portofolio Kredit Bermasalah (Non Performing Loan / NPL) periode per 31 Desember 2014 menurun sedikit menjadi 2,79%.

Tinjauan Kinerja

Tahun 2014 adalah tahun politik, yang sedikit banyak berdampak pada pertumbuhan ekonomi domistik menjadi tidak mudah, ekonomi Indonesia hanya mampu tumbuh sebesar 5,1% (yoy), lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar 5,78%. Meskipun ditengah pertumbuhan ekonomi yang mengalami perlambatan, serta di situasi persaingan industri perbankan yang semakin sengit, Alhamdullilah hirobbil alamin, bank mencatat pertumbuhan kinerja cemerlang dengan pencapaian-pencapaian target yang terealisasi. Bank membukukan pertumbuhan laba sebelum pajak melebihi target yang telah ditetapkan dalam rencana bisnis Bank sebesar Rp640,056juta, yakni tercapai sebesar Rp690.000 juta atau realisasi pencapaian sebesar 107.80%.

Upaya yang dilakukan manajemen dalam menghadapi peluang usaha di kondisi perekonomian yang sulit, Dewan Komisaris menilai pencapaian pertumbuhan kinerja cukup signifikan. Hal ini terlihat dari meningkatnya aset dari Rp19.459.918 juta pada akhir Desember tahun 2013 menjadi sebesar Rp 22,951,146 juta pada akhir tahun 2014, dan Dana Pihak Ketiga Rp13.220.519 juta pada akhir tahun 2013 menjadi sebesar Rp16,927,291juta pada akhir tahun 2014, serta penyaluran kredit yang diberikan hingga akhir tahun 2013 mencapai sebesar Rp11,951,592 juta, menjadi sebesar Rp 13,156,173 juta di tahun 2014. Sedangkan target NPL bank juga membaik menjadi 2.78% pada akhir tahun 2014 yang sebelumnya 2.81% pada akhir 2013. Sementara itu, pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerjanya Anggran Tahunan dan Rencana Bisnis Bank di tahun 2014 secara umum tercapai dengan trend kinerja keuangan yang meningkat.

Kondisi Portofolio Kredit Bermasalah (Non Performing Loan / NPL) periode per 31 Desember 2014 menurun sedikit menjadi 2,79% dari posisi per 31 Desember 2013 sebesar 2,81%, posisiNon Performing Loan tersebut senantiasa menjadi perhatian Dewan Komisaris, agar manajemen melakukan langkah-langkah perbaikan pengelolaan portofolio kredit dengan antara lain :

a. Intensifkan penagihan dengan menurunkan personil Divisi Penanganan Kredit Bermasalah (PKB) dalam membantu upaya penagihan ke unit kerja yang memiliki kredit bermasalah dan kredit hapus buku. Permasalahan dalam penagihan tersebut diklasifikasikan untuk usulan penanganan kredit bermasalah, yang antara lain :
   1. Restrukturisasi kredit
   2. Penjualan agunan, baik secara sukarela maupun eksekusi lelang
   3. Penghapusbukuan
   4. Dan lain-lain dianggap patut

b. Meningkatkan pengawasan aktif terhadap portfolio kredit sehingga dapat mengendalikan peningkatan Non Performing Loan (NPL).
c. Melaksanakan mapping potensi agunan untuk pengembalian kredit bermasalah dan kredit hapus buku sehingga dimungkinkan melakukan penjualan agunan secara di bawah tangan maupun melalui lelang eksekusi oleh KPKNL.
d. Dalam rangka percepatan penjualan agunan baik secara di bawah tangan maupun lelang eksekusi, Divisi PKB berencana akan membuat website Penjualan Agunan yang bertujuan untuk memberikan informasi secara rinci mengenai agunan yang akan dijual.
e. Menjalin kerja sama dengan SBU Komersial, Konsumer/ Mikro dan Unit Usaha Syariah untuk melakukan pengendalian kredit dengan kualitas lancer agar tidak turun menjadi kredit bermasalah.

Penilaian Terhadap Kinerja Direksi

Berdasarkan amanat yang diberikan kepada Dewan Komisaris sebagaimana diatur didalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan atas kebijakan pengurusan,

jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, Dewan Komisaris menilai bahwa selama tahun 2014, Direksi telah menunjukkan upaya maksimal untuk mencapai kinerja terbaik dan merealisasikan rencana bisnis. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian kinerja keuangan 2014. Direksi telah menunjukkan upaya maksimal dalam mencapai target kinerja yang terbaik dan merealisasikan rencana bisnis bank yang telah ditetapkan dan Bank berhasil mencatat "Kinerja yang Cemerlang di tahun 2014".

Di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, Manajemen secara disiplin telah mengelola likuiditas dengan baik dan selektif mengembangkan bisnis. Manajemen juga berupaya meningkatkan fasilitas layanan bagi nasabah dengan memperbaiki sarana-sarana pendukung guna memberikan kemudahan dan kenyaman bagi nasabah serta memberikan solusi layanan IT yang lebih update guna mendekatkan bank dengan nasabah. Selain itu, untuk peningkatan kinerja di dalam organisasi, Manajemen telah membuat program pengembangan Sumber Daya Manusia yang berbasis kompetensi, peningkatanan budaya manajemen risiko, dan anti Fraud bagi seluruh unit kerja dalam organisasi perusahaan. Bank juga telah melakukan optimalisasi fungsi internal kontrol oleh SKAI sebagai perpanjangan tangan Direksi, khususnya pada operasional cabang. Dengan berbagai usaha tersebut, Dewan Komisaris meyakini pertumbuhan bisnis dapat terus berkembang secara berkelanjutan.

Meskipun demikian, Dewan Komisaris memberikan catatan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian manajemen sebagai berikut:

a. Secara umum PT Bank Riau Kepri pada Tahun 2014 telah menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam kisaran target yang telah ditentukan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2014, hal ini dapat dilihat dari pencapaian kinerja keuangan 2014, dan dimasa yang akan datang dapat lebih ditingkatkan.
b. Meskipun masih terbatas, Bank telah melakukan penambahan Jaringan Layanan di beberapa daerah dan Kegiatan Pelayanan Kas diantaranya, 5 Kantor Cabang Pembantu, 1 Kantor Kas, 9 Mesin ATM.
c. Upaya peningkatan aktivitas fee-based serta peningkatan efisiensi usaha telah dilakukan hingga mencapai BOPO yang sangat baik sebesar 69,77%.
d. Sesuai dengan hasil self assessment, tingkat Kesehatan Bank Riau Kepri berada pada peringkat Komposit 2 yang berarti bahwa Bank berada dalam kondisi yang "sehat" dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan.
e. Penghimpunan dana masyarakat non Pemerintah Daerah antara lain : Lembaga Pendidian Tinggi, Perusahaan Asuransi Pemerintah maupun Perusahaan Penjaminan perlu ditingkatkan dalam rangka memperbaiki kualitas struktur pendanaan Bank dan pengaturan cash flowyang diyakini memiliki likuiditas baik.
f. Penambahan modal dari Pemerintah Provinsi Riau sebesar Rp 300 miliar dan penerbitan obligasi sebesar Rp 1 triliun dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan bank dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi.
g. Melakukan ekspansi untuk sektor ekonomi yang potensial di Provinsi Riau dan Provinsi Kepri khususnya untuk sektor maritim dan perikanan yang menjadi andalan pembangunan ekonomi pemerintah saat ini.
h. Meningkatkan intensifikasi penagihan (collection) dan melakukan langkah-langkah penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah untuk menurunkan tingkat Non Performing Loan (NPL).
i. Dalam upaya meningkatkan peran intermediasi perbankan, hendaknya rencana penyaluran dana dengan memperhatikan pemberian kredit pada UMKM dan linkage program, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian (prudential banking), sehingga rasio NPL dapat dipelihara pada tingkat yang rendah.
j. Meningkatkan volume usaha unit usaha syariah, dan merealisasikan langkah-langkah sesuai dengan road map yang telah di susun dalam rangka rencana spin off unit usaha syariah menjadi Bank Umum Syariah.
k. Menetapkan rencana dan target pengembangan SDM Bank yang disesuaikan dengan rencana startegis penguatan dan pengembangan SDM berdasarkan corporate plan BPD, termasuk SDM dan elemen pendukung lainnya yang berkaitan dengan percepatan dan penguatan rencana spin off UUS.
l. Mengoptimalkan kinerja sebagai Bank Devisa dengan meningkatkan eksposur valuta asing dengan memperhatikan risiko pasar dan aspek sensitivity to market risk.

Prospek Usaha Perusahaan

Perkembangan ekonomi Riau maupun Kepulauan Riau pada Tahun 2015 akan tumbuh relatif tidak berbeda dengan tahun sebelumnya, diperkirakan akan mencapai kisaran7,4% s/d 7,9% (YOY), bahkan pertumbuhan ekonomi Propinsi Kepulauan Riau

akan lebih tinggi sedikit dari pertumbuhan ekonomi Riau, sedangkan perekonomian Nasional di perkirakan akan tumbuh hanya sekitar 5,4% s/d 5,8%, sedangkan tingkat inflasi akan tetap terkendali sehingga inflasi pada Tahun 2015 akan berada dalam kisaran sasaran yang ditetapkan yaitu 4,5 ± 1 persen (4,5% plus minus 1%).

Memperhatikan indikator ekonomi tersebut, Dewan Komisaris optimis peran Bank Riau Kepri untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah dan melaksanakan fungsi intermediasi dapat dilaksanakan dengan baik. Momentum tersebut juga dapat mendukung Bank Riau Kepri untuk melaksanakan berbagai program kerja sesuai dengan rencana bisnis. Pada Tahun 2015 Bank Riau Kepri akan meningkatkan penghimpunan dana milik lembaga selain Pemda yang diyakini memliki likuiditas baik, antara lain: Lembaga Pendidikan Tinggi, Perusahaan Asuransi, Pemerintah maupun Perusahaan Penjaminan. Bank Riau Kepri juga akan melakukan ekspansi ke Jakarta dengan rencana pembukaan Kantor Cabang pada Tahun 2015.Untuk memperkuat permodalan maka Pemerintah Provinsi Riau selaku Pemegang Saham Mayoritas akan menambah setoran modal.

Disamping itu, sesuai dengan saran OJK (Otoritas Jasa Keuangan) maka Bank Riau Kepri juga akan menyatukan platform teknologi informasi, sumber daya manusia, produk dan layanan serta manajemen risiko mengacu kepada Transformasi BPD, sehingga menjadikan Bank Riau Kepri Regional Champion, yaitu menjadi tuan di rumah sendiri.

Dengan komitmen untuk selalu mengedepankan professional yang didukung dengan potensi dari internal bank, dan juga dukungan dari seluruh stakeholder utamanya pemegang saham, serta berbagai potensi di daerah yang sangat besar, Dewan Komisaris optimis prospek usaha perusahaan akan terus berkembang.

Susunan Dewan Komisaris

Pada Desember 2014 beberapa Dewan Komisaris PT Bank Riau Kepri telah berakhir masa tugasnya antara lain:

- Abdul Rivaie Rachman : Komisaris Independen
- H. Chairisman Rasahan : Komisaris Independen

Perpanjangan sementara masa jabatan Komisaris Independen berdasarkan surat OJK No. SR-50/KO.5411/2014 tanggal 13 Desember 2014 dan telah dicatat dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan berlaku sejak berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan pada tanggal 28 Desember 2014, hingga ditetapkannya Komisaris secara definitif oleh RUPS atau selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 2015.
Sementara itu, proses penggantian Komisaris telah dilakukan seleksi dan telah diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 8 Nopember 2014 dan telah dicatatkan pada Akta No.7 Notaris Fery Bakti, SH, dan pada tanggal 13 Februari 2015 telah dilakukan Fit and Proper Test terhadap H.R. Mambang Mit (Calon Komisaris Utama),
Surat Keputusan Fit and Proper Test dari OJK No.25/D.03/2015 tanggal 23 Februari 2015 menyatakan bahwa Sdr. H.R.Mambang Mit disetujui pencalonannya sebagai Komisaris Utama PT.Bank Riau Kepri untuk ditetapkan sebagai Komisaris Utama Efektif.

Pelaksanaan Tata Kelola

Secara konsisten Bank Riau Kepri berkomitmen untuk melaksanakan dan menerapkan prinsip tata kelola perusahan yang baik dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang berkesinambungan.

Pelaksanaan implementasi Good Corporate Governance di Bank Riau Kepri telah berjalan cukup baik dan senantiasa akan disempurnakan guna memperoleh hasil yang lebih baik.
Upaya-upaya untuk menyempurnakan pelaksanaan praktek GCG diseluruh tingkatan organisasi secara optimal, Dewan Komisaris mencatat beberapa hal sebagai berikut :

a. Melakukan penilaian (self assesment) atas pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada tahun 2014 dengan hasil nilai komposit : 3 (tiga) dengan predikat cukup baik.
b. Penilaian tingkat kesehatan Bank secara self assesment per 31 Desember 2014 dengan hasil menunjukkan peringkat komposit 2 (dua) dengan predikat "sehat".
c. Memantau dan menelaah laporan Risk Profile Bank dalam rangka penerapan manajemen risiko per 31 Desember 2014 dengan kesimpulan peringkat risiko keseluruhan Low, sistem pengendalian risiko Acceptable dan risiko komposit Low to Moderat.
d. Laporan Keuangan PT Bank Riau Kepri Tahun Buku 2014 telah dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjo, Machdjud Madupuro & Rekan dengan opini bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar (Wajar Tanpa Pengecualian).
e. Melalui penerapan tata kelola perusahaan yang baik, Dewan Komisaris berkomitmen mengawal pertumbuhan Bank Riau Kepri melalui praktik perbankan yang jujur dan berintegritas tinggi, guna menjadikan perusahaan sebagai bank yang berkembang dengan kualitas baik dan bersih.

Dewan Komisaris senantiasa mendukung upaya manajemen untuk memenuhi ketentuan Tata Kelola Perusahaan yang baik, pengendalian internal, penerapan manajemen risiko sehingga Bank Riau Kepri dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan sehat seiring dengan pertumbuhan ekonomi terutama di Propinsi Riau dan Propinsi Kepulauan Riau.

Tidak dapat dipungkiri, dalam upaya menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik/ Good Corporate Governance (GCC), Dewan Komisaris dibantu oleh tiga komite yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi, serta Unit kerja Sekretariat Dewan Komisaris. Organ-organ di bawah Dewan Komisaris ini telah memberikan dukungan yang maksimal sehingga Dewan Komisaris dapat menjalankan tugas dan fungsinya mengawasi pengelolaan Bank Riau Kepri di tahun 2014 sebagaimana mestinya. Komite-komite secara rutin menyampaikan laporan tugas dan peran aktif yang telah dijalankan selama tahun buku 2014. Disamping itu juga, Satuan Kerja Audit Intern juga membantu memberikan lapran-laporan audit berkala dan laoporan audit khususnya kepada Dewan Komisaris.

Kesemua laporan dan tugas dari komite-komite dan Satuan Kerja Audit Intern bank, sangat membantu Dewan Komisaris dalam memberikan arahan maupun rekomendasi kepada Direksi, sehingga pengelolaan dan penerapan praktik tata kelola perusahaan yang baik tetap terjaga sesuai prinsip-prinsipnya.

Penghargaan dan Terima kasih

Atas dukungan yang diberikan masyarakat Riau dan Kepri, khususnya para Pemegang Saham, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih yang sebesar-besarnya juga kami sampaikan kepada para nasabah dan para mitra yang telah mendukung dan menaruh kepercayaan kepada Bank Riau Kepri dalam setiap transaksinya. Dengan dukungan seluruh pihak ini, akan membawa Bank Riau Kepri menjadi lebih baik lagi.

Atas semua pencapaian di tahun 2014 ini, kami seluruh jajaran Dewan Komisaris memberikan penghargaan sebesar-besarnya kepada Direksi, anggota Komite di bawah Dewan Komisaris, serta kepada jajaran Divisi, Pemimpin Cabang, Pemimpin Cabang Pembantu, dan Pemimpin Kedai, dan karyawan-karyawati Bank Riau Kepri atas kerja keras membawa Bank Riau Kepri menjadi "Gilang, Gemilang, dan Terbilang".

Wabillahi taufiq wal hidayah
Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

A. Rivaie Rachman
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Chairisman Rasahan
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Sarjono Amnan
Komisaris Independen
Independent Commissioner





Laporan Direksi

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Alhamdullilah hirobbil alamin, Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, pencapian kinerja Bank Riau Kepri ditahun 2014 terjadi peningkatan dan pertumbuhan usaha yang menggembirakan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Baginda Rasulullah, Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikut beliau yang telah menghantarkan kita menjadi umat terbaik dalam bimbingan Islam sampai akhir zaman. Amiin…

> Loan to Deposit Ratio (LDR) meningkat sebesar 75,6% lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 74,2%.

Kinerja Perusahaan

Pertumbuhan ekonomi Indoensia di tahun 2014 juah dari kinerja tahun 2013 yang tumbuh sebesar 5,78%, bahkan meleset dari target APBN-P 2014 sebesar 5,5%. Pertumbuhan ekonomi Indoensia pada tahun 2014 hanya 5,02% (yoy). Penyesuaian harga BBM di tengah pelemahan harga minyak dunia bagai pisau bermata dua. Satu sisi berdampak melebarnya ruang fiscal, tetapi berpotensi menekan pertumbuhan. Kenaikan harga BBM mendongkrak inflasi dari 4,83% (bulan Oktober) menjadi 6,23% (November).

Segera setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM, Bank Indonesia langsung menaikan suku bunga acuan BI rate dari 7,50% menjadi 7,75%. Inilah BI Rate paling tinggi selama lima tahun terakhir. Kenaikan ini didorong oleh ancaman inflasi 2,6% sehingga inflasi diprediksi makin tinggi menjadi 7,7% pada desember 2014. BI juga menaikan suku bunga lending facility sebesar 50bp menjadi 8,00%. Namun suku bunga deposito facility tetap bertahan 5,75%. Meskipun demikian, stabilitas sistem keuangan secara nasional tetap terjaga dengan dukungan ketahanan industri perbankan yang tetap solid di tengah berbagai tekanan. Ini ditandai dengan kinerja bank-bank yang mencatat pertumbuhan positif.

Sementara itu pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau pada triwulan IV 2014 dari sisi penggunaan ditopang oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang tercatat meningkat dibandingkan triwulan III 2014, yakni dari 7,11% (yoy) menjadi 8,59% (yoy). Begitu pula dengan Provinsi Kepri, pertumbuhan perekonomian pada triwulan IV-2014 sebesar 7,77% (yoy), lebih tinggi dibanding 2013 sebesar 7,11% (yoy) dan pertumbuhan nasional 2014 sebesar 5,02% (yoy). Pada triwulan IV 2014, Kepri tumbuh 7,77% didorong oleh sektor perdagangan dan sektor pertambangan dan penggalian.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi Riau, kinerja perbankan Riau juga relatif lebih baik bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dapat terlihat dari pertumbuhan aset perbankan Riau yang mencapai Rp86,81 triliun atau meningkat dari 7,27% (yoy) menjadi 11,43% (yoy). Sejalan dengan pertumbuhan aset, kredit perbankan Riau juga tumbuh membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu dari 7,22% (yoy) menjadi 7,31% (yoy), atau secara nominal mencapai Rp53,12 triliun. Dana Pihak Ketiga (DPK) bank umum di provinsi Riau pada triwulan IV tercatat tumbuh sebesar 15,52% (yoy) menjadi Rp64,14 triliun, meningkat jika dibandingkan triwulan III yang tumbuh sebesar 11,44 % (yoy). Loan to Deposit Ratio (LDR) bank umum di Provinsi Riau pada triwulan laporan tercatat mengalami peningkatan dari 80,43% pada triwulan III 2014 menjadi 81,78%. NPLs kredit bank umum pada periode pelaporan menunjukkan penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu dari 3,57% menjadi 3,23%.

Namun, pertumbuhan perbankan di Riau tidak diikuti oleh perbankan di Kepri. Pada triwulan IV 2014, kinerja bank umum di Kepri mengalami perlambatan yang tercermin dari pertumbuhan aset, dana, dan kredit. Aset tercatat sebesar Rp46.158 miliar atau hanya tumbuh 4,7% (yoy), dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 11,5% (yoy). Kemudian DPK tercatat sebesar Rp39.455 miliar atau tumbuh 2,8% (yoy) lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya sebesar 12,4% (yoy). Selanjutnya, kredit tercatat sebesar Rp29.832 miliar atau tumbuh 5,7% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya sebesar 12,1% (yoy). Sementara itu, dari sisi kualitas kredit bank umum di Kepri menunjukkan perbaikan pada triwulan IV 2014. Tingkat Non Performing Loan (NPL) tercatat sebesar 1,6% lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya sebesar 1,7%. Dari sisi fungsi intermediasi perbankan, Loan to Deposit Ratio (LDR) meningkat sebesar 75,6% lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 74,2%.

Dengan kondisi pertumbuhan ekonomi dan perbankan Riau dan Kepri seperti diatas, Alhamdulillah, patut disyukuri, kinerja keuangan di Bank Riau Kepri mencatat peningkatan yang cukup signifikan. Total Asset Bank Riau Kepri per 31 Desember 2014 sebesar Rp22,95 triliun. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2013 yang tercatat sebesar Rp19,56 triliun maka terjadi peningkatan sebesar Rp3,39 triliun. Outstanding Asset yang ditargetkan Bank Riau Kepri per 31 Desember 2014

sebesar Rp21,05 triliun dengan pertumbuhan Rp1,49 triliun, sedangkan outstanding per Desember 2014 sebesar Rp22,95 triliun sehingga telah melebihi target sebesar Rp1,90 triliun.

Kinerja cemerlang juga ditunjukkan pada dana yang dihimpun. Dana yang dihimpun Bank Riau Kepri per 31 Desember 2014 berupa Dana Masyarakat, Dana Pinjaman, dan Dana Sendiri (Ekuitas) tercatat sebesar Rp22,65 triliun. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2013 yang tercatat sebesar Rp19,57 triliun maka terjadi peningkatan sebesar Rp3,08 triliun. Outstanding Penghimpunan Dana yang ditargetkan Bank Riau Kepri per 31 Desember 2014 sebesar Rp21,21 triliun dengan pertumbuhan Rp1,64 triliun, sedangkan outstanding per Desember 2014 sebesar Rp22,65 triliun sehingga telah melebihi target sebesar Rp1,43 triliun. Dana masyarakat yang terdiri dari giro, tabungan dan deposito per 31 Desember 2014 tercatat sebesar Rp16,93 triliun. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2013 yang tercatat sebesar Rp13,64 triliun maka terjadi peningkatan sebesar Rp3,28 triliun. Jika dibandingkan dengan target 31 Desember 2014 sebesar Rp15,80 triliun sehingga telah melebihi target sebesar Rp1,13 triliun.

Sementara itu, penyaluran Kredit Bank Riau Kepri per 31 Desember 2014 telah mencapai angka sebesar Rp13,16 triliun. Dibanding Kredit pada posisi per 31 Desember 2013 sebesar Rp11,95 triliun, kredit bank tumbuh sebesar Rp1,20 triliun (10,08%). Target Kredit Bank Riau Kepri per 31 Desember 2014 adalah Rp13,60 triliun, yakni tumbuh sebesar Rp1,65 triliun dari tahun 2013. Realisasi pencapaian pertumbuhan Kredit adalah 72,91% dari target pertumbuhan. NPL Bank Riau Kepri per 31 Desember 2014 tercatat sebesar 2,78%, lebih rendah dari NPL per 31 Desember 2013 sebesar 2,81% dan lebih tinggi jika dibandingkan dengan target NPL tahun 2014 sebesar 2,75%.

Dengan kinerja cemerlang, total pendapatan tanpa memperhitungkan rekening antar kantor yang diperoleh Bank Riau Kepri s.d 31 Desember 2014 tercatat sebesar Rp2,34 triliun atau lebih besar jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2013 sebesar Rp2,10 miliar. Jika dibandingkan dengan pencapaian target tahun 2014 sebesar Rp2,21 triliun maka Pendapatan tercapai 106,11% dan lebih besar dari pencapaian target seharusnya (100%). Sedangkan, total biaya tanpa memperhitungkan rekening antar kantor yang dikeluarkan Bank Riau Kepri s.d 31 Desember 2014 tercatat sebesar Rp1,65 triliun atau lebih besar jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2013 sebesar Rp1,46 triliun. Jika dibandingkan dengan pencapaian target tahun 2014 sebesar Rp1,57 triliun maka Biaya tercapai 104,92% dan lebih besar dari pencapaian target seharusnya (100%).

Pertumbuhan yang menggembirakan di tahun 2014 adalah pencapaian laba. Bank mencatat pertumbuhan laba sebelum pajak yang diperoleh Bank Riau Kepri sampai dengan 31 Desember 2014 adalah Rp 690,14 miliar. Dibanding laba pada posisi per 31 Desember 2013 sebesar Rp633,25 miliar, laba bank tumbuh 10,19%. Target laba tahun 2014 sebesar Rp640,06 miliar terjadi capaian Laba sebesar 109,02%. Bank Riau Kepri mencatat laba bersih sebesar Rp500,57 miliar, sedangkan tahun 2013 bank hanya mencatat laba bersih sebesar Rp 423,12 miliar.

Prospek Usaha

Perubahan kondisi ekonomi makro berdampak kurang signifikan terhadap kondisi Bank Riau Kepri, mengingat sebagian besar debiturnya adalah Pegai Negri Sipil, sedangkan disisi sumber dana sebagian besar berasal dari dana milik Pemerintah Daerah. Pangsa pasar aset Bank Riau Kepri dibandingkan seluruh BPD baru mencapai 4,80, sedangkan untuk rata-rata laba, kredit dan DPK hanya sebesar 4,61%. Untuk itu Bank Riau Kepri akan lebih meningkatkan posisi Bank di pasar dan keunggulan kompetitif yang dimiliki baik terhadap peer group maupun industri perbankan secara keseluruhan.

Efisiensi dalam melaksanakan kegiatan usaha bank cukup optimal, dimana BOPO Bank Riau Kepri sebesar 69,77% atau lebih rendah dari rata-rata BOPO seluruh BPD yakni 75,98%. Disamping itu, produk, kegiatan usaha dan cakupan wilayah operasional Bank Riau Kepri cukup terdiversifikasi.

Hal utama lainnya adalah pencapaian untuk kinerja keuangan dibanding Rencana Bisnis Bank (RBB) secara rata-rata cukup memadai sebesar 108,78%, yang dilihat dari pencapaian laba sampai dengan periode Desember 2014 sebesar 109,02%.

Praktik Tata Kelola

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/(GCG) Bank Riau Kepri pada tahun 2014 berada pada peringkat 3, yang artinya penerapan GCG secara umum cukup baik, yang tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip GCG tersebut. Meskipun demikian, kelemahan yang ada secara umum memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank. Kondisi Bank Riau Kepri secara umum Sehat dengan Peringkat Komposit TKB 2 (dua), sehingga mampu menghadapi pengaruh negatif yang kurang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

Bersama dengan Dewan Komisaris, Direksi terus melakukan peningkatan GCG dengan mengevaluasi kebijakan-kebijakan dan aktivitas bank agar selalu memenuhi ketentuan dan peraturan sebagaimana disayaratkan dalam prinsip-prinsip GCG (transparansi, akuntabilitas, pertanggung-jawaban, independensi, dan kewajaran.

Memberikan sosialisasi tentang anti korupsi dan gratifikasi kepada seluruh jajaran Pimpinan Divisi dan Cabang. Disamping itu juga baik formal maupun informal dilakukan sosialisasi tentang pemahaman dan praktek Budaya Risiko, Code of conduct, Kebijakan Anti Fraud dalam setiap kegiatan dan aktivitas bisnis Bank, baik melalui media internal (mailing list, Website, Majalah, Buku Saku), maupun dalam setiap Rapat Evaluasi Kinerja. Ditahun 2013 ini, Bank Riau Kepri gencar-gencarnya mensosialisasikan penerapan nilai-nilai budaya perusahan (corporate culture) yang baru, yakni: integritas, sinergi, focus pada pelanggan, professional, dan unggul.

Dengan terus mensosialisasikan penerapan nilai-nilai budaya perusahan (corporate culture), Code of conduct dan Kebijakan Anti Fraud, dan praktek Budaya Risiko, kami yakin dapat mencegah perilaku yang tidak diinginkan yang dapat merugikan perusahaan. Praktek-praktek pelanggaran atau perbuatan melawan hukum, meliputi tindakan korupsi, gratifikasi yang dianggap suap, benturan kepentingan, pencurian, kecurangan, pelanggaran pedoman etika perusahaan, dan perbuatan lain yang menimbulkan kerugian bagi Bank tentunya dapat diminimalisir bahkan dihindari.

Hal penting lainnya, komunikasi yang baik diantara Dewan Komisaris bersama Direksi menghasilkan harmoniasi yang baik, sehingga menghasilkan berbagai keputusan strategis yang baik pula, demi kemajuan perusahaan. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik ini dilakukan dengan menyelenggaraan rapat-rapat rutin dengan Dewan Komisaris bersama Direksi, maupun antar sesama Direksi dan atau dengan komite-komite yang berada di bawah Direksi serta Pimpinan Divisi.

Selain itu, penerapan tata kelola perusahaan yang baik lainnya juga dilakukan dengan peningkatan profesionalisme Satuan Kerja Audit Internal (SKAI). Kami sangat menyadari bahwa fungsi dan tugas Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) memiliki peranan penting. Untuk itu dilakukan Review Intern terhadap Auditor SKAI secara berkesinambungan atas kualitas pekerjaan audit yang mereka hasilkan. Dalam menjaga mutu kegiatan audit dan mempertahankan independensi serta obyektifitas atas pelaksanaan audit, SKAI telah melakukan tugas Quality Assurance(QA), pada hasil audit yang dilakukan oleh Internal Control Cabang dan Kantor Pusat Selain melaksanakan QA untuk menjaga mutu Audit, SKAI juga melakukan Edukasi dalam rangka mempercepat penyelesaian tindak lanjut hasil audit baik intern maupun ekstern.

Program CSR

Keberhasilan mencatat kinerja cemerlang, tidak menutup kewajiban perusahaan terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan sekitar. Tanggung jawab ini dituangkan dalan bentuk kepedulian Bank Riau Kepri dengan menyediakan dana bagi kepentingan pembangunan manusia (people) dan lingkungan (planet) secara berkelanjutan berdasarkan prosedur (procedure) yang tepat dan profesional.

Di tahun 2014, Bank Riau Kepri telah menyalurkan dana sebesar Rp4,111 miliar dari Program Kemitraan dan Rp1,113 miliar dari dana Bantuan Masyarakat untuk program Corporate Social Responsibility (CSR)nya, yang rinciannya dapat dilihat didalam laporan ini. Program CSR Bank Riau Kepri dilaksanakan dalam dua bentuk program, yakni: Program Bantuan Kemitraan dan Program Bantuan Kemasyarakatan. Kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang dijalankan Bank Riau Kepri di tahun 2014 tetap fokus pada 4 pilar utama yakni: 1.Sosial Kemasyarakatan, yang terdiri dari: Bantuan Pendidikan, Bantuan Keagamaan, Bantuan Kesehatan, Bantuan Kepemudaan dan Olahraga, Bantuan Seni dan Budaya, Bantuan Kegiatan Sosial, 2. Lingkungan Hidup, 3. Ketenaga Kerjaan/Keselamatan Kerja, 4. Perlindungan Nasabah

Melalui Program CSR Bank Riau Kepri yang difokuskan pada 4 pilar utama tersebut, tentunya dapat mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Riau dan Kepri. Bank Riau Kepri percaya bahwa dengan melakukan hal yang baik, bagi masyarakat sekitar adalah bagian dari investasi untuk mendukung perusahaan tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

Susunan Direksi

Pada Desember 2014, H. Wan Marwan, Direktur Operasional PT Bank Riau Kepri telah berakhir masa tugasnya. Perpanjangan sementara masa jabatan Direktur Operasional berdasarkan surat OJK No. SR-50/KO.5411/2014 tanggal 13 Desember 2014 dan telah dicatat dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan berlaku sejak berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan pada tanggal 28 Desember 2014 hingga ditetapkannya Direktur Operasional secara definitif oleh RUPS atau selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 2015.

Proses penggantian Pengurus telah dilakukan seleksi dan telah diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 8 Nopember 2014 dan telah dicatatkan pada Akta No.7 Notaris Fery Bakti, SH menetapkan calon antara lain :

- Irvandi Gustari : Calon Direktur Utama
- Sonni Triandalarso : Calon Direktur Utama

Sedangkan untuk calon Direktur Operasional, akan ditetapkan pada RUPS-LB berikutnya.

Pada tanggal 13 Februari 2015 telah dilakukan Fit and Proper Test terhadap 2 calon Direktur Utama yaitu Irvandi Gustari (Calon Direktur Utama) dan Sonni Triandalarso (Calon Direktur Utama).

Surat Keputusan Fit and Proper Test dari OJK No.24/D.03/2015 tanggal 23 Februari 2015 menyatakan bahwa Sdr. Sonni Triandalarso dan Sdr. Irvandi Gustari disetujui pencalonannya sebagai Direktur Utama PT. Bank Riau Kepri untuk ditetapkan masing-masing sebagai Komisaris Utama Efektif dan Direktur Utama efektif.

Prospek 2015

Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan membaik pada tahun 2015, sehingga dapat menopang ekonomi Indonesia ke depan, baik dari jalur perdagangan maupun jalur finansial. Begitupula halnya dengan pertumbuhan ekonomi di Riau dan Kepri. Pertumbuhan ekonomi Riau dan Kepri di tahun 2015 diperkirakan akan lebih baik dari tahun 2014, meskipun dibayang-bayangi inflasi di daerah-darah terpencil yang memiliki akses transportasi terbatas.

Berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2015 dan sektor perbankan pada tahun 2020 menjadi tantangan besar bagi seluruh bank termasuk Bank Riau Kepri. Melalui Pokja di Asbanda dan OJK, Bank Riau Kepri optimis platform transformasi BPD menuju Regional Champion (BRC) akan dapat mengimbangi tantangan tersebut. Dengan terus melahirkan inovasi dan kreativitas dari berbagai aspek, baik dari sisi pelayanan, sarana, fasilitas, serta perkembangan teknologi, Bank Riau Kepri berbenah diri untuk sambut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Penghargaan Dan Terima Kasih

Kami atas nama Direksi Bank Riau Kepri mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada para nasabah, Pemegang Saham, Pemerintah, Bank Indonesia, serta semua pihak yang terus memberikan dukungan demi kemajuan Bank Riau Kepri. Kami juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Dewan Komisaris dan komite-komite atas dedikasinya dalam melaksanakan pengawasan terhadap jalannya bank ini, sehingga Bank Riau Kepri dapat terus tumbuh dengan tetap mengedepankan integritas yang tinggi.

Tak lupa juga, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Pimpinan, Staf, serta seluruh pegawai Bank Riau Kepri yang dengan kerja keras dan dedikasi tinggi berhasil mencatat "Kinerja yang Cemerlang". Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi kerja keras dan niat baik kita guna meraih keberhasilan lebih lagi ditahun-tahun mendatang. Aamiin.

Wabillahi taufiq wal hidayah
Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Wan Marwan	Nizam Putih	Afrial Abdullah	Eka Afriadi
Dir. Operasional	Dir. Dana&Jasa	Dir. Kredit&Syariah	Dir. Kpthn&Mgt Risiko





ANALISA DAN PEMBAHASAN KINERJA BANK OLEH MANAJEMEN

"Kerja Keras dan Dedikasi seluruh Insan di Bank Riau Kepri, berbuah kesuksesan dengan mencatat Kinerja Cemerlang".

Kondisi Perekonomian Indonesia Tahun 2014

Pertumbuhan ekonomi Indoensia pada tahun 2014 hanya 5,02% (yoy). Angka terendah dalam lima tahun terakhir. Secara spasial, perekonomian 2014 didorong aktivitasperekonomian di Jawa yang tumbuh 5,59% dan Sumatera 4,66%. Jatuhnya harga komoditas primer di pasar dunia menyebabkan perolehan ekspor di luar Jawa Merosot.

Pertumbuhan ekonomi sepanjang 2014 ini masih sejalan dengan perkiraan bank Sentral. Selain itu, angka itu masih seiring dengan langkah pengelolaan stabilitas makroekonomi yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan pemerintah, terutamauntuk mengendalikan inflasi dan deficit transaksi berjalan.

Meski demikian, BI tetap optimis tahun 2015 pertumbuhan ekonomi akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun lalu. Bank sentral meyakini ekonomi akan tumbuh berkisar 5,4%-5,8% dengan batas tengah 5,6%. Keyakinan ini sejalan dengan ruang fiscal yang lebih lebar.

Tahun lalu, pemerintah harus menjaga defisit fiscal lantaran menanggung beban subsidi energy yang besar. Kini dengan dikeluarkannya kebijakan baru tentang subsidi BBM ini, tentunya memberikan ruang fiscal lebih longgar. Hal ini diperkirakan mampu mendorong pertumbuhan jauh lebih tinggi.

Peningkatan konsumsi dan investasi pemerintah ditambah konsumsi swasta diharapkan bisa mendorong keyakinan dalam kegiatan perekonomian. Kesempatan pemerintah memangkas subsidi BBM dan dialokasikan ke sector-sektor produktif turut mendorong denyut perekonomian. Investasi pemerintah menjadi kunci penopang pertumbuahn serining dengan naiknya anggaran belanja infrastuktur dalam APBNP 2015. Beberapa pembangunan yang diprioritaskan sifatnya padat karya dan padat modal.Mulai pulihnya perekonomian Amreika Serikat juga mendorong perbaikan kinerja ekspor dan investasi di dalam negri, meskipun pelaku pasar masih was-was dengan kemungkinan the Fed menaikan suku bunga.

Proyeksi angka tersebut memberikan sinyal bahwa perekonomian nasional tetap diselimuti optimisme.

Kondisi Perekonomian Daerah Riau dan Kepulauan Riau Tahun 2014

Perekonomian Riau Tahun 2014

Kinerja ekonomi Riau pada tahun 2014 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2013. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau pada tahun 2014 mencapai 2,62% (yoy), meningkat dibandingkan tahun 2013 yang tercatat sebesar 2,49% (yoy). Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau secara triwulanan pada triwulan IV 2014 mengalami perlambatan dibandingkan triwulan III 2014, yaitu dari 2,67% (yoy) menjadi 1,05% (yoy).

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau pada triwulan IV 2014 juga didorong oleh pertumbuhan sektor pertanian. Sementara pertumbuhan sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, dan sektor konstruksi mengalami perlambatan. Di sisi lain, kinerja sektor pertambangan mengalami kontraksi yang lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya. Dari sisi penggunaan, peningkatan ekonomi utamanya disebabkan oleh masih kuatnya perekonomian domestik yang tercermin dari meningkatnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Sementara pertumbuhan investasi masih tercatat positif meskipun cenderung mengalami perlambatan. Dari sisi eksternal, membaiknya kinerja ekspor dan menurunnya impor memberikan kontribusi yang positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau.

Inflasi Riau pada triwulan IV 2014 (yoy) tercatat sebesar 8,65%, meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 5,81%. Kondisi ini sejalan dengan perkembangan inflasi nasional yang juga menunjukkan peningkatan dari 4,53% pada triwulan III 2014 menjadi 8,36% pada triwulan IV 2014. Namun demikian, bila dibandingkan dengan rata-rata historisnya sejak 2009-2013, inflasi Riau pada triwulan IV 2014 masih tercatat lebih rendah. Dengan perkembangan tersebut, inflasi Riau pada triwulan IV 2014 masih berada di luar sasaran inflasi nasional tahun 2014 yang ditetapkan sebesar 4,5% ± 1%. Secara tahunan, peningkatan inflasi Riau disebabkan oleh tekanan dari kelompok administered price. Faktor yang menyebabkan tingginya inflasi pada kelompok administered price, antara lain kenaikan harga BBM bersubsidi yang terjadi pada November 2014. Kenaikan tarif dasar listrik (TTL) yang terjadi pada November 2014 dan penyesuaian harga LPG pada September 2014 lalu juga memberi tekanan terhadap inflasi kelompok administered price.

Perekonomian Daerah Kepulauan Riau (Kepri) Tahun 2014

Pada 2014 Kepri mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,32% (yoy), lebih tinggi dibanding 2013 sebesar7,11%(yoy) dan pertumbuhan nasional 2014 sebesar 5,02% (yoy). Pada triwulan IV 2014, Kepri tumbuh 7,77% didorong oleh sektor perdagangan dan sektor pertambangan dan penggalian.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Kepri 2014 disumbang oleh konsumsi rumah tangga dan investasi (PMTB), masing-masing dengan andil pertumbuhan sebesar 2,51% dan 2,41%. Konsumsi rumah tangga menguat didorong oleh sejumlah faktor yaitu, daya beli masyarakat yang terjaga baik, penyelenggaraan sejumlah event nasional dan internasional di Kepri, realisasi belanja pemerintah yang mencapai 86,9%, serta penyelenggaraan Pemilu 2014.

Sementara investasi, pada 2014 pertumbuhannya melambat menjadi 5,94% (yoy) lebih rendah dibanding pertumbuhan 2013 sebesar 6,85% (yoy) namun masih menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Kepri terbesar kedua setelah konsumsi rumah tangga.

Sektor industri pengolahan tumbuh melambat pada 2014 dipengaruhi oleh penurunan permintaan sejumlah komoditas utamanya antara lain produk elektronik, produk dari besi baja, serta kapal dan konstruksi terapung. Pada triwulan IV 2014 industri pengolahan tumbuh 8,47% (yoy), secara tahunan industri pengolahan tumbuh 7,91% (yoy), lebih rendah dibanding 2013 sebesar 8,17% (yoy). Sektor konstruksi juga melambat pada 2014 akibat dampak kebijakan stabilisasi Bank Indonesia yaitu kebijakan loan to value (LTV) dan suku bunga yang menekan permintaan dan penyaluran kredit di sektor konstruksi. Sebaliknya, penguatan sektor pertambangan dan penggalian pada 2014, ditopang oleh peningkatan lifting gas yang tumbuh 8,5% (yoy) serta menguatnya pertumbuhan

lifting minyak. Sektor perdagangan mencatatkan peningkatan pertumbuhan dipengaruhi oleh penguatan konsumsi masyarakat serta peningkatan jumlah wisatawan.

Pengalihan subsidi yang berdampak pada kenaikan harga BBM dan mendorong kenaikan tarif angkutan menjadi penyebab utama meningkatnya realisasi inflasi Kepri 2014. Meskipun demikian, inflasi tahunan Kepri tercatat sebesar 7,59% (yoy), lebih rendah dibanding inflasi tahun sebelumnya dan inflasi nasional masing-masing sebesar 8,24% (yoy) dan 8,36% (yoy). Berdasarkan disagregasi inflasi, pendorong utama inflasi 2014 bersumber dari inflasi kelompok administered price, dan kelompok volatile food sebagai penyumbang terbesar keduakhususnya komoditas beras, bayam, dan cabai.Secara triwulanan, inflasi Kepri sebesar 4,48% (qtq) lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya sebesar 2,14% (qtq).

Realisasi belanja daerah 2014 sebesar Rp11.103 miliar atau mencapai 86,9% dari total anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp12.771 miliar. Sementara itu, realisasi pendapatan 2014 sebesar Rp9.178 miliar atau 82,0% dari total anggaran pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp11.184 miliar. Sementara anggaran APBN infastruktur 2014 belum terserap optimal (67,2%) akibat rendahnya realisasi infastruktur pelabuhan laut sebesar Rp25 miliar atau 7,8% dari total anggaran Rp326 miliar. Jumlah pengangguran pada Agustus 2014 meningkat menjadi 6,7% (yoy). Peningkatan pengangguran terjadi karena pertumbuhan jumlah angkatan kerja sebesar 2,84% (yoy) tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan akibat masih lesunya kondisi global yang menyebabkan melemahnya permintaan produk. Sementara itu, imbas tingginya inflasi pada triwulan laporan menyebabkan menurunnya nilai tukar petani (NTP) sebesar 2% dari 101,91 menjadi 99,86 pada triwulan laporan.

Perlambatan perekonomian akan dipengaruhi oleh masih rendahnya konsumsi masyarakat di awal tahun, masih terbatasnya belanja pemerintah serta kinerja ekspor yang relatif masih rendah di awal tahun. Berdasarkan data historis dan perkembangan beberapa indikator terkini, pertumbuhan ekonomi Kepri pada triwulan I 2015 diprakirakan pada kisaran 7,3% - 7,5% (yoy), sementara untuk keseluruhan 2015 perekonomian Kepri diprakirakan tumbuh pada kisaran 7,5%-7,7% (yoy). Dari sisi eksternal, secara keseluruhan 2015 ekonomi global diperkirakan tumbuh 3,6% (yoy), dibanding pertumbuhan 2014 sebesar 3,3% (yoy).

Laju inflasi diyakini melambat pada triwulan I 2015. Demikian juga secara keseluruhan 2015, laju inflasi diperkirakan akan lebih rendah dibanding 2014. Perlambatan laju inflasi pada triwulan pertama akan bersumber dari kelompok administered price dan volatile food, sementara laju inflasi kelompok inti diperkirakan relatif stabil. Memperhatikan hal-hal tersebut, maka laju inflasi Kepri pada triwulan I 2015 diprakirakan berada pada kisaran 5,9%-6,1% (yoy). Target inflasi keseluruhan tahun 2015 sebesar 4,0±1%. Proyeksi inflasi tersebut lebih rendah dibanding angka inflasi periode yang sama tahun lalu sebesar 7,75% (yoy).

Perbankan di Riau

Kinerja perbankan Riau pada triwulan laporan relatif lebih baik bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Hal ini dapat terlihat dari pertumbuhan aset perbankan Riau yang mencapai Rp86,81 triliun atau meningkat dari 7,27% (yoy) menjadi 11,43% (yoy). Sejalan dengan pertumbuhan aset, kredit perbankan Riau juga tumbuh membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu dari 7,22% (yoy) menjadi 7,31% (yoy), atau secara nominal mencapai Rp53,12 triliun. Dana Pihak Ketiga (DPK) bank umum di provinsi Riau pada triwulan IV tercatat tumbuh

sebesar 15,52% (yoy) menjadi Rp64,14 triliun, meningkat jika dibandingkan triwulan III yang tumbuh sebesar 11,44 % (yoy). Loan to Deposit Ratio (LDR) bank umum di Provinsi Riau pada triwulan laporan tercatat mengalami peningkatan dari 80,43% pada triwulan III 2014 menjadi 81,78%. NPLs kredit bank umum pada periode pelaporan menunjukkan penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu dari 3,57% menjadi 3,23%.

Total kredit yang disalurkan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) oleh bank umum di Provinsi Riau mencapai Rp20,03 triliun pada triwulan IV 2014, jumlah ini tumbuh meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu dari 13,51% (yoy) menjadi 13,73% (yoy). Porsi kredit yang diserap UMKM dari total kredit yang diberikan bank umum di Provinsi Riau tercatat stabil dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu sebesar 38,32%. NPL tertinggi pada Kredit UMKM berada pada sektor konstruksi yaitu sebesar 8,53% yang diikuti oleh sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 6,46% dan sektor jasa-jasa sebesar 5,69%.

Kinerja perbankan syariah pada triwulan IV 2014 di Provinsi Riau menunjukkan penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan aset dan dana masih menunjukkan arah negatif dibandingkan periode yang sama pada tahun

> "**Kinerja perbankan Riau** pada triwulan laporan relatif **lebih baik** bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya"

lalu, namun pembiayaan masih tercatat tumbuh positif serta meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan IV 2014 aset perbankan syariah terkontraksi sebesar 4,34% (yoy) sehingga menjadi Rp 4,89 triliun. Share asset bank umum syariah terhadap aset perbankan secara keseluruhan pada triwulan IV 2014 di Provinsi Riau adalah sebesar 5,63%, turun jika dibandingkan dengan kondisi triwulan sebelumnya yang mencapai 5,85%. Jumlah bank syariah maupun kantor cabang bank syariah di Provinsi Riau tidak berubah dibandingkan dengan periode yang lalu, tercatat beroperasi 13 bank syariah di lingkup wilayah Provinsi Riau yaitu 11 bank umum dan 2 BPR. Pada triwulan laporan, aset BPR/S tercatat tumbuh meningkat dari 4,00% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi 7,84% (yoy). Peningkatan pertumbuhan aset didorong oleh adanya peningkatan pada pertumbuhan dana yang dihimpun yaitu dari 9,66% (yoy) menjadi 12,26% (yoy). DPK yang dihimpun BPR/S pada triwulan IV 2014 mencapai Rp809,75 miliar. Jumlah kredit yang disalurkan mencapai Rp836,11 miliar atau tumbuh 11,35% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 7,68% (yoy).

Perbankan di Kepri

Pada triwulan IV 2014, kinerja bank umum mengalami perlambatan yang tercermin dari pertumbuhan aset, dana, dan kredit. Aset tercatat sebesar Rp46.158 miliar atau hanya tumbuh 4,7% (yoy), dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 11,5% (yoy). Kemudian DPK tercatat sebesar Rp39.455 miliar atau tumbuh 2,8% (yoy) lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya sebesar 12,4% (yoy). Selanjutnya, kredit tercatat sebesar Rp29.832 miliar atau tumbuh 5,7% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya sebesar 12,1% (yoy). Sementara itu, dari sisi kualitas kredit bank umum di Kepri menunjukkan perbaikan pada triwulan IV 2014. Tingkat Non Performing Loan (NPL) tercatat sebesar 1,6% lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya sebesar 1,7%. Dari sisi fungsi intermediasi perbankan, Loan to Deposit Ratio (LDR) meningkat sebesar 75,6% lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 74,2%.

Sampai dengan triwulan IV 2014, aset bank umum masih tumbuh melambat. Total aset sebesar Rp46.158 miliar, tumbuh 4,8% (yoy) lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya sebesar 11,5% (yoy). Berdasarkan kelompok bank, perlambatan terjadi pada bank swasta dan bank asing campuran yang mengalami kontraksi masing-masing sebesar 4,6% (yoy) dan 10,6% (yoy) menurun dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 13,7% (yoy) dan 6,0% (yoy). Sementara kelompok bank pemerintah masih tumbuh sebesar 20,8% (yoy) meningkat dari triwulan sebelumnya sebesar 9,74% (yoy).

Dari sebaran aset perbankan di Kepri, bank umum di Batam masih mendominasi jumlah aset dengan pangsa/share sebesar 79,0%, diikuti oleh Tanjungpinang dengan sebesar 17,7%, dan 3,3% (yoy) tersebar di wilayah Dati II lainnya. Aset bank umum di Batam dan Dati II lainnya masing-masing tercatat tumbuh melambat sebesar 6,8% (yoy) dan 0,6% (yoy) dibanding triwulan sebelumnya sebesar 12,9% (yoy) dan 29,7% (yoy). Sementara kontraksi terjadi pada aset di Tanjungpinang sebesar 2,7% (yoy) lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 3,6% (yoy).

DPK bank umum masih melanjutkan tren perlambatan pada triwulan IV 2014. DPK tumbuh sebesar 2,8% (yoy) melambat dibanding triwulan sebelumnya sebesar 12,4%(yoy). Berdasarkan komposisi DPK, tabungan masih memiliki porsi terbesar yaitu mencapai 43,6% dari total DPK atau mencapai Rp17.201 miliar. Diikuti oleh giro dan deposito masing-masing sebesar 31,1% atau sebesar Rp12.258 miliar dan 25,3% atau sebesar Rp9.995 milyar. Melambatnya DPK bank umum juga tercermin dari komposisinya yang juga mengalami perlambatan. Jenis simpanan tabungan dan deposito masing-masing tumbuh sebesar 5,9% (yoy) dan 23,1% (yoy) melambat dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 10,1% (yoy) dan 23,1% (yoy). Sementara itu, giro mengalami kontraksi sebesar 12,6% (yoy) lebih rendah dibanding triwulan lalu yang tumbuh sebesar 0,1% (yoy).

Sejalan dengan perlambatan aset dan DPK, pertumbuhan kredit bank umum juga melambat pada triwulan laporan.Total kredit perbankan umum mencapai Rp29.832 miliar atau tumbuh 5,7% (yoy) pada triwulan laporan lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya sebesar 12,1% (yoy). Berdasarkan jenis

penggunaan, porsi terbesar kredit digunakan untuk kredit konsumsi (36,7%), modal kerja (33,2%) dan investasi (30,1%).

Pertumbuhan kredit konsumsi, modal kerja maupun investasi mengalami perlambatan. Kredit konsumsi dan investasi masing-masing tumbuh 13,7% (yoy) dan 14,3% (yoy) melambat dibanding triwulan lalu sebesar 14,4% (yoy) dan 21,0% (yoy). Sementara kredit modal kerja menurun sebesar 7,9% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan lalu yang tumbuh 3,2% (yoy). Melambatnya pertumbuhan kredit merupakan dampak kebijakan likuiditas ketat yang dilakukan oleh Bank indonesia (kenaikan BI rate) yang berdampak melambatnya penyaluran kredit. Menurunnya DPK bank umum mendorong semakin ketatnya likuiditas yang menyebabkan bank menurunkan laju penyaluran kreditnya.

Sementara ditengah melambatnya pertumbuhan kredit konsumsi, kredit kepemilikan rumah (KPR) dan kredit multiguna tumbuh berturut-turut sebesar 11,5% (yoy) dan 39,8% (yoy) meningkat dibanding triwulan sebelumnya sebesar 11,1% (yoy) dan 33,8% (yoy). Meskipun kredit kendaraan bermotor (KKB) masih mengalami kontraksi sebesar 5,6% (yoy), cenderung lebih baik dibanding triwulan lalu yang juga mengalami kontraksi mencapai 10,3% (yoy). Pertumbuhan KPR terutama didorong oleh pertumbuhan KPR untuk Rumah Tinggal tipe 22 sampai dengan 70 yang memiliki pangsa/ share sebesar 65,2% terhadap total KPR. Peningkatan KKB roda empat yang cukup signifikan pada triwulan laporan turut mendorong pertumbuhan KKB. Sedangkan pertumbuhan kredit multiguna disebabkan meningkatnya konsumsi masyarakat pada triwulan laporan berkenaan dengan momen perayaan Natal dan Tahun Baru serta liburan sekolah.



STRATEGI BISNIS 2014

Target BPD Regional Champion (Brc)

Untuk mendukung tercapainya sasaran PT. Bank Riau Kepri sebagai regional champion, maka dalam setiap tahapan implementasinya mengacu pada tiga pilar penopang. Ketiga pilar tersebut adalah:

1. Ketahanan kelembagaan yang kuat;
2. Kemampuan sebagai Agent of Regional Development; dan
3. Kemampuan melayani kebutuhan masyarakat.

Ketiga pilar tersebut tentunya berdiri di atas landasan yang kokoh, yaitu berupa penerapan manajemen risiko yang sesuai best practices dan implementasi tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. Sedangkan visi BPD sebagai Regional Champion (BRC) adalah "Menjadi bank terkemuka di daerah melalui produk dan layanan kompetitif dengan jaringan luas yang dikelola secara profesional dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi regional". Ketiga pilar di atas merupakan acuan untuk mengukur sejauh mana Bank Riau Kepri telah dinyatakan sebagai regional champion.

Pencapaian usaha Bank Riau Kepri berdasarkan indikator BRC sebagai berikut :
Pencapaian kinerja pilar 1 yang tercapai yaitu CAR 17,90% sedangkan target BRC (BPD Regional Champion) 15%, BOPO 69,77% target BRC 75%, ROA 3,39% target BRC 2,50%, namun untuk NIM masih diatas target BRC yaitu 7,55 target BRC 5,5 %.

Pada pilar 2 yang belum tercapai antara lainportofolio kredit produktif dan dana masyarakat diluar pemda. Namun dari hasil evaluasi terhadap seluruh program BRC yang ditargetkan akan tercapai pada tahun 2014, ternyata hampir sebagian besar belum tercapai. Beberapa indikator yang belum tercapai antara lain pertumbuhan kredit minimum 20%, Portfolio kredit produktif minimum 40%, LDR berkisar 78%-100%, Dana Pihak Ketiga (DPK) non Pemda minimum 70%, NIM 7,5%. Melayani kebutuhan masyarakat untuk mempermudah akses layanan keuangan kepada masyarakat kecil, memperluas jaringan kantor hingga kecamatan dan memaksimalkan peran BPD sebagai konsultan keuangan bagi PEMDA.

Meskipun perkembangan kinerja industri BPD (Bank Pembangunan Daerah) cukup baik, namun sasaran BRC belum tercapai sesuai harapan. Implementasi program BRC lebih berorientasi pada pencapaian target bisnis sehingga cenderung mengambil risiko melebihi kapasitas (excessive risk taking) dan mengesampingkan prioritas pembenahan kelemahan struktural kelembagaan dan kurangnya daya saing, khususnya kecukupan SDM dan business process/ internal governance (antara lain kebijakan dan SOP, manajemen risiko, internal control), serta infrastruktur. Sebagai dampaknya terjadi kenaikan NPL secara agregat dan cukup signifikan pada beberapa BPD terutama pada segmen kredit produktif sehingga juga mengakibatkan tekanan terhadap rentabilitas.

Sesuai hasil evaluasi Pokja BRC (BPD, Asbanda & OJK) ada tiga akar permasalahan (root cause) yang terjadi di BPD yakni:
1) Kelemahan GCG
2) Kelemahan Daya Saing
3) Keterbatasan Penguatan Permodalan

Ketiga permasalahan mendasar tersebut saling terkait sehingga perlu diatasi secara holistik dan terstruktur melalui suatu program transformasi yang lebih holistik dan seimbang, selain aspek bisnis, juga menekankan pentingnya fondasi (termasuk GCG) dan aspek pendukung (SDM dan infrastruktur). Lalu program transformasi tersebut diimplementasikan kedalam komitmen dan dukungan penuh untuk pemberdayaan Asbanda sebagai strategic holding untuk memfasilitasi program transformasi BPD untuk mendorong pertumbuhan bisnis agar menjadi "tuan" di daerah sendiri.

Pangsa Pasar/Market Share

Dari sisi total aset per 31 Oktober 2014, Bank Riau Kepri menguasai 16.77% pangsa pasar aset perbankan di Riau dan Kepri, lebih tinggi 1,24% dari penguasaan market share aset pada akhir Desember tahun 2013 yakni sebesar 15,53%. Begitu pula dengan Dana Pihak Ketiga, dari total Dana Pihak Ketiga per 31 Oktober 2014, Bank Riau Kepri menguasai 17.35% pangsa pasar Dana Pihak Ketiga perbankan di Riau dan Kepri, lebih tinggi 3,37% dari penguasaan market share Dana Pihak Ketiga pada akhir Desember tahun 2013 yakni sebesar 14.16%. Sedangkan kredit, dari total kredit per 31 Oktober 2014, Bank Riau Kepri menguasai 11.67% pangsa pasar kredit perbankan di Riau dan Kepri, naik 0,63% dari penguasaan market share kredit pada akhir tahun 2013 yakni sebesar 11.04%. Market Share Bank Riau Kepri dari tahun 2010 sampai dengan 2014 tergambar pada tabel dibawah ini.

Rp Juta

No	Aspek	Outstanding				
		Des 2010	Des 2011	Des 2012	Des 2013	Okt 2014
I	Propinsi Riau					
	Asset	44,992,904	60,743,382	73,387,482	77,924,132	86,355,577
	Dana	36,736,826	44,881,545	52,405,218	55,838,684	60,287,740
	- Giro	8,768,915	10,606,244	13,807,596	13,155,227	12,498,823
	- Tabungan	18,391,085	22,370,379	25,600,775	28,803,200	26,050,565
	- Deposito	9,576,826	11,904,925	12,996,846	13,880,257	21,738,353
	Kredit (berdasarkan proyek)	42,117,707	51,090,943	60,029,878	67,760,769	71,264,434
	LDR	114.65%	113.84%	114.55%	121.35%	118.21%
II	Propinsi Kepulauan Riau					
	Asset	25,147,794	33,122,949	37,928,567	48,030,750	50,361,292
	Dana	20,653,592	26,169,812	31,017,431	40,488,990	41,285,056
	- Giro	6,660,400	8,657,167	10,392,123	13,402,872	12,312,317
	- Tabungan	5,293,848	10,745,429	12,740,632	16,568,313	16,792,523
	- Deposito	8,699,344	6,767,217	7,884,676	10,517,806	12,180,216
	Kredit (berdasarkan proyek)	16,252,846	24,389,140	33,057,737	40,544,088	41,248,291
	LDR	78.69%	93.20%	106.58%	100.14%	99.91%
III	Total Riau + Kepri					
	Asset	70,140,698	93,866,331	111,316,049	125,954,882	136,716,869
	Dana	57,390,418	71,051,357	83,422,648	96,327,674	101,572,796
	- Giro	15,429,315	19,263,411	24,199,719	26,558,098	24,811,140
	- Tabungan	23,684,933	33,115,804	38,341,408	45,371,513	42,843,088
	- Deposito	18,276,170	18,672,142	20,881,522	24,398,062	33,918,569
	Kredit (berdasarkan proyek)	58,370,553	75,480,083	93,087,615	108,304,857	112,512,726
	LDR	101.71%	106.23%	111.59%	112.43%	110.77%
IV	Bank Riau Kepri					
	Asset	12,918,692	16,983,605	19,841,497	19,563,855	22,933673
	% Market Share Aset	18.42%	18.20%	17.82%	15.53%	16.77%
	Dana	9,624,646	13,220,519	15,352,878	13,642,708	17,623,999
	- Giro	4,909,768	6,247,578	8,442,539	7,148,857	7,041,095
	- Tabungan	2,711,782	3,566,602	3,721,147,	4,579,235	3,536,424
	- Deposito	2,003,096	3,406,339	3,189,192	1,914,616	7,046,480
	% Market Share Dana	16.77%	18.61%	18.40%	14.16%	17.35%
	Kredit	7,259,317	8,691,732	10,208,592	11,951,592	13,125,261
	% Market Share Kredit	12.44%	11.52%	10.97%	11.04%	11.67%
	LDR	75.42%	65.74%	66.49%	87.60%	74.47%

Sumber : Data Statistik Keuangan Daerah BI Provinsi Riau & Kepri

Perbandingan Antara Target Awal Tahun Buku Dengan Realisasi Tahun 2014 Dan Proyeksi Tahun 2015

Untuk membandingkan kinerja perusahaan secara menyeluruh dari tahun sebelumnya (2013), proyeksi target 2014 dibandingkan realisasi kinerja tahun 2014, serta proyeksi target pada tahun berikutnya (2015) disajikan pada tabel data berikut ini:

Indikator Utama:

	Indikator	Real Des 2013	Real Sep 2014	ANGGARAN TAHUN 2015			
				Estimasi Des 2014	Proyeksi Des 2015	Growth 2014 - 2015	
						Nominal	%
1	Asset	19,646,464,309	203,950,406,979	20,978,914,000	23,904,221,000	2,925,307,000	14%
2	DPK	13,642,707,309	19,133,431,558	16,020,397,000	17,737,596,000	1,717,199,000	11%
	- Giro	7,148,856,694	8,588,232,520	7,663,837,000	8,226,823,000	562,986,000	7%
	- Tabungan	4,579,235,307	3,533,754,397	4,809,027,000	5,202,457,000	393,430,000	8%
	- Deposito	1,914,615,851	7,011,444,641	3,547,533,000	4,308,316,000	760,783,000	21%
3	Kredit	11,951,591,940	12,981,211,889	13,588,334,000	15,406,663,000	1,818,329,000	13%
	- Komersial	581,645,032	717,844,155	617,719,000	731,000,000	113,281,000	18%
	- Mikro dan Kecil	1,663,354,922	1,824,450,256	1,966,697,000	2,349,470,000	382,773,000	19%
	- Konsumer	9,087,566,095	9,655,138,682	10,214,892,000	11,336,394,000	1,121,502,000	11%
	- Syariah	619,025,891	783,778,796	789,026,000	989,799,000	200,773,000	25%
4	Laba	633,251,344	507,067,858	641,319,000	675,136,000	33,817,000	5%

Rasio-Rasio	Deal Des 2013	Real Sep 2014	Estimasi Des 204	Anggaran Tahun 2015	Kewajaran
CAR	18.69%	17.17%	18.19%	18.18%	Min 8%
ROA	3.00%	3.41%	3.06%	2.82%	Min 2,5%
ROE	23.50%	24.55%	22.93%	22.24%	Min 12.5%
NIM	7.49%	7.89%	7.97%	7.94%	Min 2%
BOPO	69.12%	69.21%	70.30%	72.26%	Max 75%
LDR	87.60%	67.84%	84.82%	86.86%	78% - 92%
NPL Gross	2.81%	2.96%	2.75%	2.70%	Max 5%

URAIAN KINERJA KEUANGAN 2014

TINJAUAN KEUANGAN TAHUN 2014 (FINANCIAL REVIEW)

Perekonomian Indonesia Tahun 2014

Selama 2014, di tengah tingginya sejumlah tantangan global dan domestik, kinerja perekonomian Indonesia relatif cukup baik dengan stabilitas makro ekonomi yang terjaga dan proses penyesuaian ke arah yang lebih sehat sejalan dengan kuatnya fundamental ekonomi dan berbagai kebijakan stabilisasi ekonomi dan reformasi struktural yang ditempuh Bank Indonesia dan Pemerintah. Bank Indonesia terus mengarahkan capaian sasaran inflasi, mengelola defisit transaksi berjalan yang sehat, serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Untuk itu, Bank Indonesia akan terus memperkuat bauran kebijakan moneter dan makroprudensial, dan sistem pembayaran, serta memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dalam pengendalian inflasi dan defisit transaksi berjalan serta mendorong berlanjutnya reformasi struktural untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2014 hanya 5,02% (yoy). Angka terendah dalam lima tahun terakhir. Secara spasial, perekonomian 2014 didorong aktivitas perekonomian di Jawa yang tumbuh 5,59% dan Sumatera 4,66%. Jatuhnya harga komoditas primer di pasar dunia menyebabkan perolehan ekspor di luar Jawa Merosot. Pertumbuhan ekonomi sepanjang 2014 ini masih sejalan dengan perkiraan bank Sentral. Selain itu, angka itu masih seiring dengan langkah pengelolaan stabilitas makro ekonomi yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan pemerintah, terutama untuk mengendalikan inflasi dan defisit transaksi berjalan.

Inflasi di bulan Desember 2014 meningkat dari perkiraan Bank Indonesia dimana secara tahunan inflasi terjadi sebesar 8,36% (yoy). Tingginya tingkat inflasi ini terutama terjadi pada kelompok bahan-bahan makanan akibat gejolak harga komoditas beras dan bahan pokok lainnya yang terjadi hingga dipenghujung tahun 2014. Namun demikian, inflasi sepanjang tahun 2014 tetap terkendali ditengah tingginya tekanan inflasi yang bersumber dari kenaikan harga BBM bersubsidi, perubahan tarif listrik dan kenaikan harga LPG 12 kg. Hal ini tidak terlepas dari peran kebijakan Bank Indonesia dalam mengelola permintaan domestik, menjaga stabilitas nilai tukar, dan mengarahkan ekspektasi inflasi, serta semakin baiknya koordinasi kebijakan pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah.

Nilai tukar Rupiah di 2014 mengalami depresiasi terhadap dolar AS namun mencatat apresiasi terhadap mata uang mitra dagang utama lainnya. Depresiasi Rupiah terhadap dolar AS terjadi pada triwulan IV-2014 dikarenakan kuatnya apresiasi dolar AS terhadap hampir seluruh mata uang utama sejalan dengan rilis data perbaikan ekonomi AS dan rencana kenaikan suku bunga Fed Fund Rate. Terhadap dolar AS, Rupiah secara point-to-point melemah 1,74% (yoy) selama tahun 2014 ke level Rp12.385 per dolar AS. Sementara itu, terhadap mata uang lainnya termasuk Yen Jepang, dan Euro, Rupiah mengalami apresiasi yang cukup tinggi, walaupun masih cukup kompetitif dibandingkan dengan negara mitra dagang. Bank Indonesia selaku otoritas moneter terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan nilai fundamentalnya sehingga dapat mendukung stabilitas makroekonomi dan penyesuaian ekonomi ke arah yang lebih sehat dan berkesinambungan.

Kinerja Sektor Perbankan Tahun 2014

Stabilitas sistem keuangan tetap terkendali, ditopang oleh ketahanan perbankan yang tetap terjaga dan kinerja pasar keuangan yang membaik di 2014. Ketahanan industri perbankan tetap kuat dengan risiko kredit, likuiditas dan pasar yang cukup terjaga, serta dukungan modal yang kuat. Pada November 2014, rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) masih tinggi, sebesar 19,6%, jauh di atas ketentuan minimum 8%, sedangkan rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) tetap rendah dan stabil di kisaran 2,0%. Pertumbuhan kredit diprakirakan sebesar 11,9% (yoy) pada November 2014, lebih rendah dari pertumbuhan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 22,2%(yoy). Bank Indonesia menilai perlambatan kredit tersebut sejalan dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, pertumbuhan DPK pada November 2014 tercatat sebesar 13,8% (yoy) relatif tidak berubah dari tahun lalu. Di sisi lain, kondisi likuiditas perbankan membaik seiring dengan operasi keuangan pemerintah yang lebih ekspansif. Kedepan, sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan DPK dan kredit diperkirakan akan meningkat sehingga mencapai, masing-masing, sebesar 14-16% dan 15-17%. Sementara itu, kinerja pasar modal juga membaik, tercermin pada IHSG yang meningkat 22,3% dibandingkan tahun lalu. Di sisi lain, yield SBN menunjukkan penurunan.

Informasi Keuangan Perusahaan

Pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang melambat pada tahun 2014, menyebabkan semakin meningkatnya persaingan perbankan. Namun, patut disyukuri bahwa kinerja Bank Riau Kepri di tahun 2014 masih mengalami pertumbuhan. Dapat dilihat dari kinerja keuangan dimana total penyaluran kredit tumbuh 10,08% YoY menjadi Rp 13,156 triliun sedangkan DPK mengalami pertumbuhan sebesar 24,08% YoY menjadi Rp 16,927 triliun. Laba bersih tumbuh cukup signifikan mencapai Rp 500,570 miliar atau tumbuh 18,30%.

Berikut disampaikan pencapaian kinerja Bank Riau Kepri dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2014 sebagai berikut:

kredit pada akhir tahun 2013 yakni sebesar 11.04%. Market Share Bank Riau Kepri dari tahun 2010 sampai dengan 2014 tergambar pada tabel dibawah ini.

No	Uraian	Target (Rp Juta)	Realisasi (Rp Juta)	Pencapaian (%)
1	Dana Pihak Ketiga	15,795,545	6,927,291	107.16%
2	Kredit Yang Diberikan	13,603,728	3,156,173	96.71%
3	Laba Sebelum Pajak	640,056	690,141	107.83%
	- Pendapatan Bunga Kredit	1,835,820	1,804,580	98.30%
	- Pendapatan Bunga Penempatan	177,296	230,381	230,381
	- Pendapatan Bunga Lainnya	83,500	119,713	143.37%
	- Pendapatan selain Pendapatan Bunga	988,333	845,556	85.55%
	- Pendapatan Non Operasional	4,405	31,104	706.17%
	- Beban Bunga	645,778	817,856	126.65%
	- Beban selain beban Bunga	1,775,400	1,469,831	82.79%
	- Beban Non Operasional	28,119	28,845	102.58%
4	Rasio-rasio Keuangan	%	%	
	- ROA	3.04	3.37	110.86%
	- ROE	21.50	24.96	116.09%
	- NIM	8.21	7.54	91.84%
	- CAR	19.66	18.27	92.93%
	-NPL Gross	2.75	2.79	101.45%

Kinerja Bank Riau Kepri 2014

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil Syariah	1,513,722	1,550,761	1,739,028	1,959,591	2,174,999
Beban Bunga dan Bagi Hasil Syariah	487,780	649,373	679,156	652,254	817,856
Pendapatan Bunga Bersih	1,025,942	901,388	1,059,873	1,307,337	1,357,143
Pendapatan Operasional Lainnya	57,975	77,005	97,600	120,946	163,554
Beban Operasional Lainnya	530,430	508,287	601,611	732,715	805,446
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	472,455	431,283	504,011	611,769	641,892
Pendapatan Non Operasional	7,993	6,895	5,775	9,764	31,104
Beban Non Operasional	17,493	14,584	15,080	48,352	28,845
Laba Sebelum Pajak	460,531	396,739	453,462	603,875	690,141
Pajak Penghasilan	133,166	105,451	135,386	180,754	189,571
Laba Bersih Tahun Berjalan	327,365	291,288	318,076	423,120	500,570

Kinerja Tahun 2014

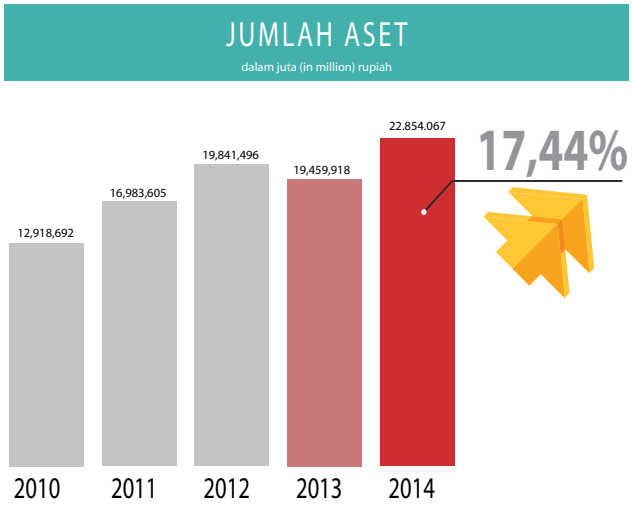
Dengan kondisi ketatnya persaingan perbankan saat ini, kinerja Bank Riau Kepri menunjukan pertumbuhan yang cukup baik. Perolehan laba pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 18,30% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pencapaian laba ini disebabkan karena peningkatan pendapatan bunga dan disamping itu juga terjadinya efisiensi biaya overhead ditambah lagi dengan perbaikan tingkat NPL.

Pertumbuhan asset Bank Riau Kepri didorong oleh peningkatan Dana Pihak Ketiga sebesar 24,08% terutama pada Deposito sebesar 187,83%. Selain itu pertumbuhan asset Bank Riau Kepri juga didorong oleh peningkatan kredit yang diberikan sebesar 10,08%. Peningkatan kredit merupakan upaya pengelolaan asset produktif untuk menghasilkan imbal hasil dan melaksanakan fungsi intermediasi sehingga bisnis perusahaan berjalan dengan baik selama tahun 2014. Peningkatan asset yang dilakukan oleh Bank Riau Kepri tidak hanya terfokus pada pertumbuhan Dana Pihak Ketiga saja namun juga dilakukan perbaikan terhadap komposisi Dana Pihak Ketiga itu sendiri dimana Dana Pihak Ketiga Pemda sebesar 50,51% dan Dana Pihak Ketiga Non Pemda sebesar 49,49%.

Perkembangan Pengelolaan Aset

Tabel berikut menunjukan komposisi aset Bank Riau Kepri per 31 Desember 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014.

Keterangan	31 Desember				
	2010	2011	2012	2013	2014
Kas	392.483	378.128	564.847	573.070	775.964
Giro pada Bank Indonesia	857.422	1.479.547	1.421.066	1.214.021	1.289.270
Giro pada Bank Lain - bersih	31.033	35.350	49.384	98.471	69.643
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain - bersih	1.595.355	2.478.514	6.846.364	4.636.122	5.872.157
Surat Berharga - bersih	2.751.878	3.927.088	832.483	1.033.223	1.419.899
Kredit yang diberikan - bersih	7.053.097	8.422.042	9.848.094	11.537.988	12.764.751
Penyertaan - bersih	1.656	1.656	500	500	500
Aset Tetap - bersih	149.300	164.782	163.899	177.642	416.123
Aset Pajak Tangguhan	30.915	18.676	20.435	23.367	17.101
Aset Lain-lain	55.554	77.822	94.424	165.513	228.659
Jumlah Aset	12.918.692	16.983.605	19.841.496	19.459.918	22.854.067



Aset

Jumlah aset Bank Riau Kepri pada tahun 2014 adalah sebesar Rp 22.854.067 juta meningkat sebesar Rp 3.394.149 juta atau naik 17,44% dibandingkan jumlah aset tahun 2013 yang sebesar Rp 19.459.918 juta. Kenaikan jumlah aset ditopang oleh meningkatnya jumlah dana pihak ketiga terutama deposito berjangka pemerintah daerah.

Aset Likuid

Aset likuid dimaksudkan untuk memenuhi komitmen kepada nasabah dan pihak lainnya, baik untuk kebutuhan uang tunai (transaksi melalui ATM), pembayaran kembali dana pihak ketiga, pemberian pinjaman dan memenuhi kebutuhan likuiditas lainnya. Adapun komposisi aset likuid Perseroan terdiri dari kas, Giro BI, SBI,FASBI, Giro pada bank lain dan penempatan antar bank dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Keterangan	31 Desember				
	2010	2011	2012	2013	2014
Aset Likuid < 1 bulan					
Kas	392,483	378,128	564,847	573,070	775,964
Giro pada Bank Indonesia	857,422	1,479,547	1,421,066	1,214,021	1,289,270
SBI	2,751,878	3,927,088	832,483	1,033,223	1,419,899
Antar Bank Aset (Giro, DOC, call money)					
Jumlah Aset Likuid	4,001,783	5,784,763	2,818,396	2,820,314	3,485,133

Aset Produktif

Aset produktif terdiri atas Giro pada bank lain – bersih, Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain, Surat berharga – bersih, Kredit yang diberikan – bersih, Penyertaan – bersih. Berikut adalah perkembangan jumlah aset produktif per 31 Desember 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014:

Keterangan	31 Desember				
	2010	2011	2012	2013	2014
Aset Produktif					
Giro Pada Bank Lain - bersih	31,033	35,350	49,384	98,471	69,643
Penempatan Pada Bank Indonesia dan Bank Lain - bersih	1,595,355	2,478,514	6,846,364	4,636,122	5,872,157
Surat Berharga - bersih	2,751,878	3,927,088	832,483	1,033,223	1,419,899
Kredit yang diberikan - bersih	7,053,097	8,422,042	9,848,094	11,537,988	12,764,751
Penyertaan - bersih	1,656	1,656	500	500	500
Jumlah Aset Produktif	11,433,019	14,864,649	17,576,825	17,306,306	20,126,950

Kredit Yang Diberikan

Total kredit yang diberikan Bank Riau Kepri pada tanggal 31 Desember 2010,2011, 2012, 2013 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember				
	2010	2011	2012	2013	2014
Kredit yang diberikan - Gross	7,259,317	8,691,732	10,208,592	11,951,592	13,156,173
Dikurangi penyisihan kerugian	(206,220)	(269,690)	(360,498)	(413,604)	(391,422)
Kredit yang diberikan - Bersih	7,053,097	8,422,042	9,848,094	11,537,988	12,764,751

Posisi kredit yang diberikan – Gross tahun 2014 sebesar Rp 13.156.173 juta, meningkat sebesar Rp 1.204.581 juta atau 10,08% dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar Rp 11.951.592 juta. Peningkatan ini seiring dengan strategi perusahaan untuk meningkatkan jumlah penyaluran dalam bentuk kredit.

Penyebaran kredit yang diberikan – bersih berdasarkan sektor ekonomi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Keterangan	31 Desember				
	2010	2011	2012	2013	2014
Pertanian, perburuhan dan sarana pertanian	536,363	566,882	778,277	967,110	1,189,175
Pertambangan	1,109	2,123	2,001	1,190	1,552
Industri Pengolahan	28,749	31,381	30,549	37,180	43,094
Listrik, Gas dan Air	56,587	95,172	89,158	90,886	93,171
Konstruksi	121,085	131,330	176,866	225,568	183,716
Perdagangan, Restoran dan Hotel	669,924	742,812	768,056	919,514	946,007
Pengangkutan, Pergudangan dan Komunikasi	5,632	5,502	4,729	9,756	10,593
Jasa Dunia Usaha	48,005	21,583	25,775	29,984	17,293
Jasa Sosial dan Masyarakat	36,578	46,580	53,975	80,484	84,753
Lain-lain	5,755,285	7,048,368	8,279,206	9,589,920	10,586,819
Jumlah	7,259,317	8,691,732	10,208,592	11,951,592	13,156,173
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(206,220)	(269,690)	(360,498)	(413,604)	(391,422)
Jumlah Kredit Yang Diberikan (Bersih)	7,053,097	8,422,042	9,848,094	11,537,988	12,764,751

Kolektibilitas Kredit Yang Diberikan

Tingkat kolektibilitas atas kredit yang diberikan Bank Riau Kepri pada tanggal 31 Desember 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Lancar	6,434,784	6,832,622	8,198,465	9,645,295	11,317,622	12,413,188
Dalam Perhatian Khusus	202,540	249,091	269,894	262,575	297,833	375,856
Kurang Lancar	15,256	25,430	15,388	18,644	14,240	19,382
Diragukan	15,529	24,317	15,942	20,255	12,616	14,940
Macet	61,996	127,857	192,043	261,823	309,281	332,807
Jumlah Kredit yang diberikan - Gross	6,730,104	7,259,317	8,691,732	10,208,592	11,951,592	13,156,173
Penyisihan Kerugian	(138,164)	(206,220)	(269,690)	(360,498)	(413,604)	(391,422)
Jumlah Kredit yang diberikan - bersih	6,591,940	7,053,097	8,422,042	9,848,094	11,537,988	12,764,751

Kolektibilitas kredit yang diberikan yang dikategorikan sebagai Non Performing Loan (NPL), adalah kredit yang diberikan dengan kategori kurang lancar, diragukan dan macet sebagaimana yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia menetapkan batas maksimum NPL - Netto untuk bank-bank di Indonesia adalah 5,0%. Adapun NPL Bank Riau Kepri pada tanggal 31 Desember 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember				
	2010	2011	2012	2013	2014
NPL - Gross	177,604	223,373	300,722	336,137	367,129
Rasio NPL - Gross	2,45%	2,57%	2,95%	2,81%	2,79%
Rasio NPL - Netto	0,68%	0,60%	0,19%	0,19%	0,28%
Jumlah Kredit yang diberikan - Gross	7,259,317	8,691,732	10,208,592	11,951,592	13,156,173

Tingkat Kolektibilitas Piutang

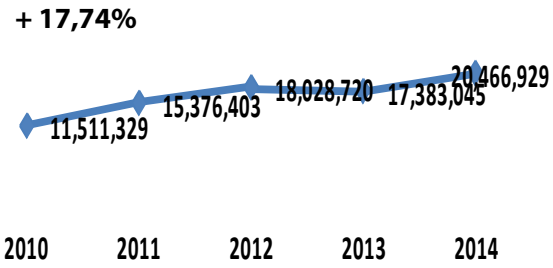
Rasio NPL (Gross) Bank Riau Kepri pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar 2,79% sedangkan rasio NPL (Netto) Bank Riau Kepri adalah sebesar 0,28%. Lebih kecil jika dibandingkan NPL (Netto) pada tanggal 31 Desember 2013 yang mencapai 2,81% atau turun sebesar 0,02%.

Keterangan	31 Desember				
	2010	2011	2012	2013	2014
Lancar	6,832,622	8,198,465	9,645,295	11,317,622	12,413,188
Dalam Perhatian Khusus	249,091	269,894	262,575	297,833	375,856
Kurang Lancar	25,430	15,388	18,644	14,240	19,382
Diragukan	24,317	15,942	20,255	12,616	14,940
Macet	127,857	192,043	261,823	309,281	332,807
Jumlah	7,259,317	8,691,732	10,208,592	11,951,592	13,156,173
NPL	2.45%	2.57%	2.95%	2.81%	2.79%

Pengelolaan Kewajiban

Tabel berikut memperlihatkan komposisi kewajiban Bank Riau Kepri pada tanggal 31 Desember 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014:

Keterangan	31 Desember				
	2010	2011	2012	2013	2014
Kewajiban Segera	284,445	355,247	747,086	1,258,387	840,737
Giro	4,909,768	6,247,579	8,442,539	7,148,857	7,099,934
Tabungan	2,711,782	3,566,602	3,721,147	4,579,235	4,316,428
Deposito Berjangka	2,003,096	3,406,338	3,189,192	1,914,616	5,510,929
Simpanan dari Bank Lain	1,418,646	1,147,820	1,301,420	1,856,698	1,810,746
Obligasi yang Diterbitkan	-	499,459	499,688	499,785	499,894
Pinjaman yang Diterima	17,565	2,377	3,165	4,296	311,373
Estimasi kerugian Komitmen dan Kontijensi	7,745	-	-	-	-
Hutang Pajak	49,508	3,181	21,468	67,538	9,139
Kewajiban Lain-lain	108,774	147,800	103,015	53,634	67,749
Jumlah Kewajiban	11,511,329	15,376,403	18,028,720	17,383,045	20,466,929



Jumlah Kewajiban

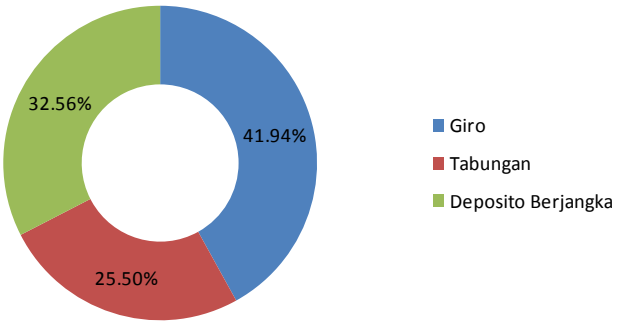
Jumlah kewajiban Bank Riau Kepri pada tahun 2014 adalah sebesar Rp 20.466.929 juta meningkat sebesar Rp 3.083.884 juta atau naik 17,74% bila dibandingkan dengan jumlah kewajiban Bank Riau Kepri untuk tahun 2013 sebesar Rp17.383.045 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah giro pemerintah daerah dan deposito berjangka dari Pemerintah Daerah.

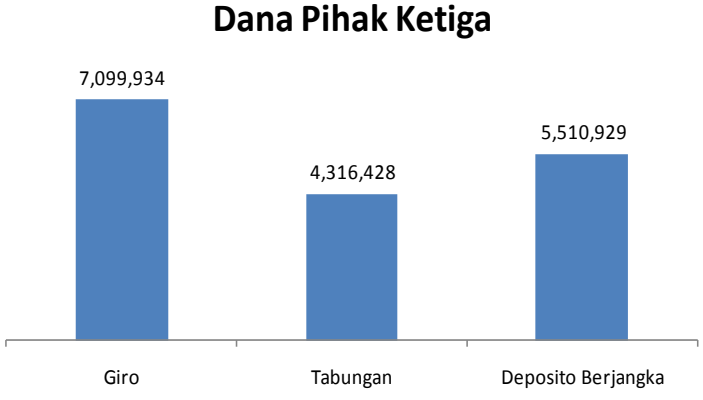
Dana Pihak Ketiga

Bank Riau Kepri mencatat total dana nasabah sebesar Rp 16.927.291 juta atau meningkat sebesar 24,08% dari tahun 2013 sebesar Rp 13.642.708 juta. Adapun komposisi dana nasabah adalah 41,94% dalam bentuk giro, 25,50% dalam bentuk tabungan dan 32,56% dalam bentuk deposito berjangka.

Komposisi dana murah masih lebih besar jika dibandingkan dengan dana mahal yaitu 67,44% dana murah dan 32, 56% dana mahal. Namun jika dibandingkan tahun sebelumnya rasio dana murah jauh lebih besar dari dana mahal yaitu komposisi masing-masing 85,97% dan 14,03%. Kedepan menjadi langkah strategi perusahaan untuk terus meningkatkan komposisi dana murah tersebut.

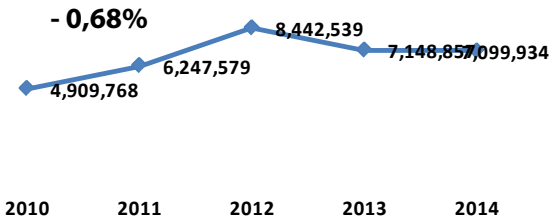
Jumlah Giro, Tabungan & Deposito Berjangka





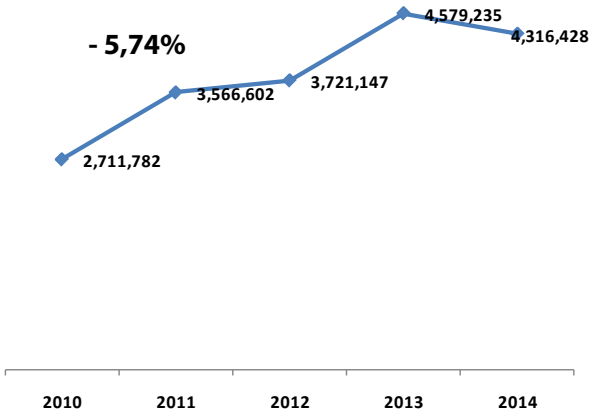
Giro

Pada tahun 2014, Bank Riau Kepri telah berhasil menghimpun simpanan nasabah dalam bentuk giro sebesar Rp 7.099.934 juta, menurun sebesar Rp48.923 juta atau 0,68% dibandingkan tahun 2013 sebesar Rp 7.148.857 juta. Penurunan giro terjadi pada giro swasta perorangan yang disebabkan akibat pelunasan kredit konstruksi diakhir tahun.



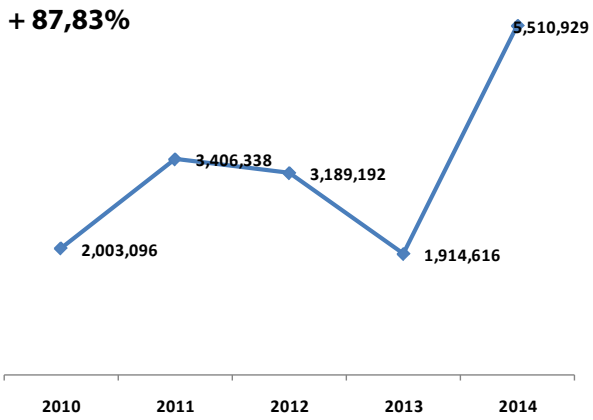
Tabungan

Pada tahun 2014, Bank Riau Kepri telah berhasil menghimpun simpanan nasabah dalam bentuk tabungan sebesar Rp 4.316.428 juta, menurun sebesar Rp 262.807 juta atau 5,74% dibandingkan tahun 2013 sebesar Rp 4.579.235 juta..



Deposito Berjangka

Pada tahun 2014, Bank Riau Kepri telah berhasil menghimpun simpanan nasabah dalam bentuk deposito berjangka sebesar Rp 5.510.929 juta atau mengalami peningkatan sebesar Rp3.596.313 juta atau naik 187,83% dibandingkan tahun 2013 sebesar Rp1.914.616 juta. Peningkatan terbesar terjadi pada deposito Pemerintah Daerah.



Obligasi

Tabel berikut memperlihatkan jumlah obligasi yang diterbitkan dengan memperoleh peringkat obligasi dari PT. Fitch Ratings Indonesia per tanggal 31 Desember 2014 adalah A(idn).

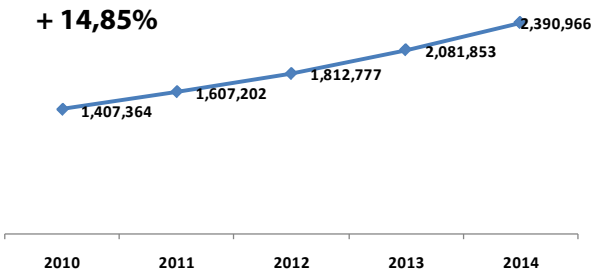
Obligasi	Nominal	Tanggal Pencatatan di	Peringkat
Obligasi I	Rp 500.000 Juta	11 Juli 2011	A (idn)

Bank telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Fitch Ratings Indonesia. Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang sesuai dengan surat No. RC118/DIR/II/2015 tanggal 6 Februari 2015, Obligasi I Bank Riau Kepri tahun 2011 telah mendapat peringkat A (idn).
Bank menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan PT Fitch, baik langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi "Afiliasi" dalam UUPM. Sesuai Peraturan Bapepam-LK No.IX.C.11, Bank akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan setiap 1 tahun sekali selama kewajiban atas efek belum lunas.

Perkembangan Ekuitas

Tabel berikut memperlihatkan komposisi ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014:

Keterangan	31 Desember				
	2010	2011	2012	2013	2014
EKUITAS					
Modal disetor	747,944	826,874	894,875	957,146	976,788
Tambahan Modal disetor	82,215	70,086	64,357	21,727	64,500
Saldo Laba					
Telah ditentukan peggunaannya	209,942	354,123	478,383	605,613	774,862
Belum ditentukan peggunaannya	367,262	356,118	375,162	497,366	574,816
Jumlah Ekuitas	1,407,364	1,607,202	1,812,777	2,081,853	2,390,966



Jumlah Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas Bank Riau Kepri pada tahun 2014 adalah sebesar Rp2.390.966 juta, meningkat sebesar Rp 309.113 juta atau meningkat sebesar 14,85 % bila dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar Rp2.081.853 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan karena peningkatan modal disetor tahun 2014.

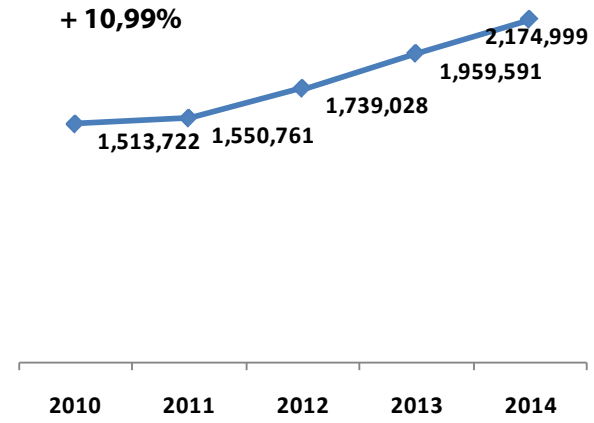
Hasil-hasil Usaha

Tabel berikut menunjukkan komposisi pendapatan dan beban Bank Riau Kepri untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014.

Keterangan	31 Desember				
	2010	2011	2012	2013	2014
Pendapatan Bunga dan Syariah	1,513,722	1,550,761	1,739,028	1,959,591	2,174,999
Beban Bunga dan Bagi Hasil Syariah	487,780	649,373	679,156	652,254	817,856
Pendapatan Bunga dan Syariah Bersih	1,025,942	901,388	1,059,873	1,307,337	1,357,143
Pendapatan Operasional Lainnya	57,975	77,005	97,600	120,946	163,554
Beban Operasional Lainnya	530,430	508,287	601,611	732,715	805,446
Laba Operasional	470,031	404,428	462,767	642,462	687,882
Laba sebelum Beban Pajak Penghasilan	460,531	396,739	453,462	603,875	690,141
Laba Bersih	327,365	291,288	318,076	423,120	500,570

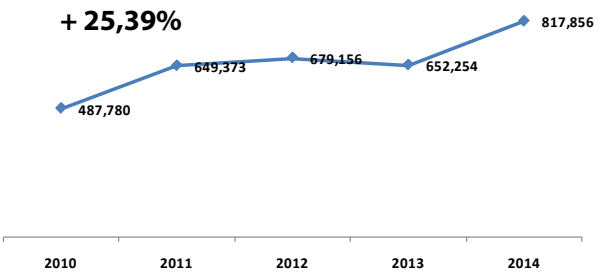
Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil Syariah

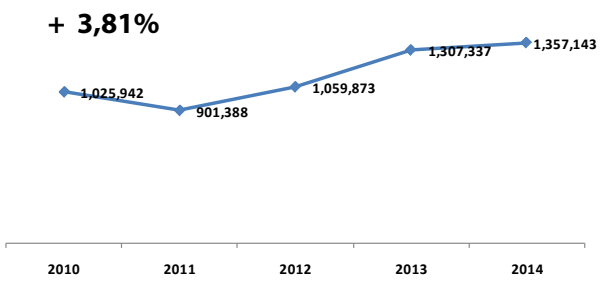
Pendapatan bunga dan bagi hasil syariah Bank Riau Kepri tahun 2014 adalah sebesar Rp 2.174.999 juta meningkat 10,99% atau sebesar Rp 215.408 juta jika dibandingkan pendapatan bunga dan bagi hasil syariah pada tahun 2013 sebesar Rp 1.959.591 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan bunga kredit sebesar Rp 177.488 juta atau 11,51% dan juga peningkatan pada pendapatan bunga SBI sebesar Rp 32.371 juta atau 40,35%. Peningkatan ini seiring dengan strategi ekspansi kredit/ pembiayaan yang terus dijalankan oleh Bank Riau Kepri dan seiring dengan besarnya peningkatan terhadap penempatan antar bank dan SBI.



Beban Bunga dan Bagi Hasil Syariah

Beban bunga dan bagi hasil syariah pada tahun 2014 adalah sebesar Rp 817.856 juta. Beban bunga dan bagi hasil syariah ini mengalami peningkatan sebesar Rp 165.602 juta atau 25,39% dibandingkan dengan beban bunga dan bagi hasil syariah selama tahun 2013 sebesar Rp 652.254 juta. Peningkatan beban bunga dan bagi hasil syariah pada tahun 2014 tersebut didorong oleh besarnya simpanan dalam bentuk deposito yaitu naik sebesar Rp 104.098 juta atau 45,54% dari beban bunga deposito di tahun sebelumnya.





Pendapatan Bunga dan bagi hasil Syariah Bersih

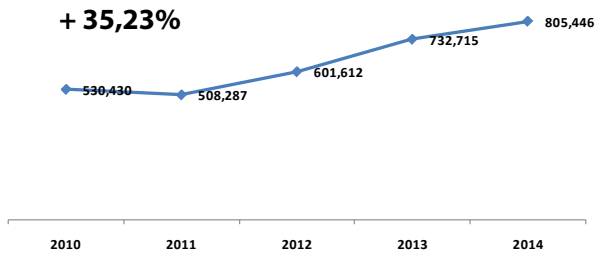
Pendapatan bunga dan bagi hasil Syariah bersih Bank Riau Kepri tahun 2014 adalah sebesar Rp 1.357.143 juta meningkat sebesar Rp 49.806 juta atau 3,81% dibandingkan pendapatan bunga bersih pada tahun 2013 sebesar Rp 1.307.337. Peningkatan pendapatan bunga dan bagi hasil syariah bersih tahun 2014 disebabkan oleh adanya kenaikan pada pendapatan bunga yang bersumber dari pendapatan bunga kredit/pembiyaan dan pendapatan dari surat berharga, meskipun terdapat peningkatan eban bunga simpanan dan obligasi.

Pendapatan Operasional Lainnya

Pendapatan operasional lainnya merupakan pendapatan non bunga yang berasal dari pendapatan provisi dan komisi selain dari kredit, pendapatan restitusi biaya, pendapatan administrasi, keuntungan penjualan obligasi, pendapatan fee, laba selisih kurs, pendapatan dividen, dan operasional lainnya.

Tabel berikut memperlihatkan perbandingan pendapatan operasional lainnya Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014.

Keterangan	31 Desember				
	2010	2011	2012	2013	2014
Provisi dan komisi selain kredit	17,468	25,701	32,127	32,467	30,252
Pendapatan restitusi biaya	13,158	16,513	16,895	19,244	16,785
Pendapatan administrasi	26,608	34,478	45,705	44,332	43,762
Pendapatan fee	195	197	230	457	522
Laba selisih kurs	501	115	-	-	-
Pendapatan dividen	44	-	-	-	-
Operasional Lainnya	-	-	2,643	24,446	72,232
Jumlah	57,975	77,005	97,601	120,946	163,553

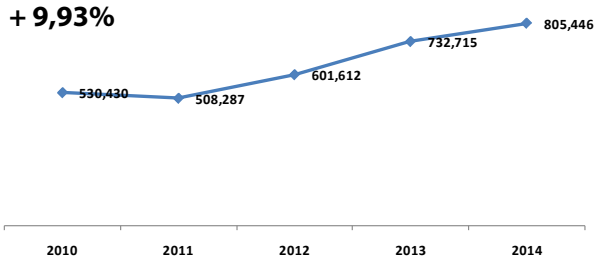


Pendapatan operasional lainnya Bank Riau Kepri pada tahun 2014 adalah sebesar Rp 163.553 juta mengalami kenaikan sebesar Rp 42.607 juta dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar Rp 120.946 juta atau 35,23%. Kenaikan pendapatan operasional Bank Riau Kepri pada tahun 2014 terutama disebabkan adanya peningkatan pada pendapatan fee dan pendapatan pemulihan CKPN kredit yang diberikan.

Beban Operasional Lainnya

Keterangan	31 Desember				
	2010	2011	2012	2013	2014
Beban Umum dan Administrasi	119,906	129,267	131,061	155,987	176,754
Beban Tenaga Kerja	367,801	329,870	340,686	424,521	485,134
Beban Operasional Lainnya	42,723	49,150	129,865	152,208	143,558
Jumlah	530,430	508,287	601,612	732,715	805,446

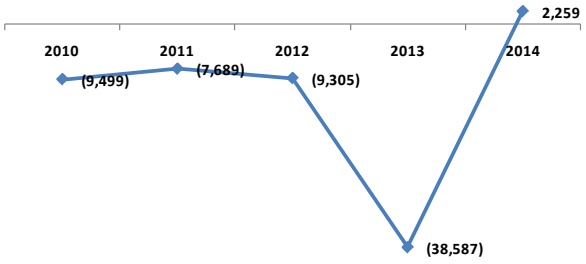
Beban operasional lainnya pada tahun 2014 adalah sebesar Rp 805.446 juta, meningkat sebesar Rp 72.731 juta atau 9,93% dibandingkan beban operasional lainnya pada tahun 2013 sebesar Rp 732.715 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pada beban tenaga kerja sebesar Rp 60.613 juta atau 14,28%, kenaikan beban umum dan administrasi sebesar Rp 20.767 juta atau 13,31%. Kenaikan beban operasional ini sejalan dengan ekspansi usaha yang dilakukan oleh Bank Riau Kepri.



Pendapatan (Beban) Non Operasional

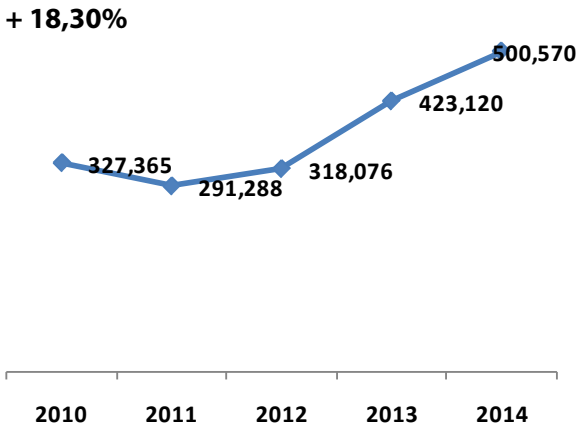
Keterangan	31 Desember				
	2010	2011	2012	2013	2014
Pendapatan Non Operasional	7,993	6,895	5,775	9,764	31,104
Beban Non Operasional	(17,493)	(14,584)	(15,080)	(48,352)	(28,845)
Jumlah	(9,499)	(7,689)	(9,305)	(38,587)	2,259

Pendapatan non operasional Bank Riau Kepri pada tahun 2014 adalah mengalami peningkatan sebesar Rp 21.340 juta atau 218,54% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya , sedangkan Beban Non Operasional mengalami penurunan sebesar Rp 19.507 Juta atau 40,34% dari tahun 2013.



Laba Bersih

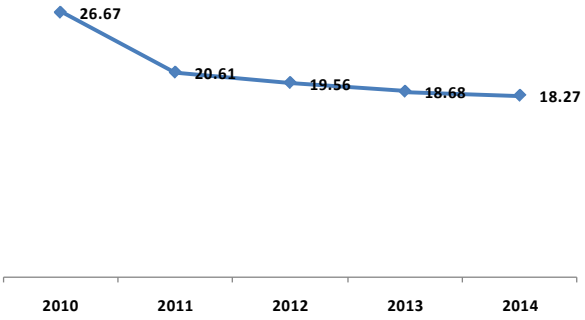
Laba bersih Bank Riau Kepri pada tahun 2014 adalah sebesar Rp 500.570 juta mengalami peningkatan sebesar Rp 77.450 juta atau 18,30% dibandingkan dengan laba bersih tahun 2012 sebesar Rp 423.120 juta. Peningkatan laba bersih tahun 2014 disebabkan oleh peningkatan pendapatan bunga dan bagi hasil syariah sebesar Rp 215.408 juta atau 10,99% dan pendapatan operasional lainnya meningkat sebesar Rp 42.608 juta atau sebesar 35,23%, peningkatan ini terutama terjadi karena peningkatan pendapatan bunga kredit/pembiayaan seiring dengan ekspansi kredit dan pendapatan surat berharga.



Rasio- rasio Keuangan

Berikut tabel yang menunjukan rasio keuangan Bank Riau Kepri pada tanggal 31 Desember 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014 menurut ketentuan Bank Indonesia:

Keterangan	31 Desember				
	2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)
Rasio KPMM	26,67	20,61	19,56	18,68	18.27
ROA	3,83	2,62	2,95	3,00	3.37
ROE	28,96	20,71	19,91	23,56	24.96
NIM	9,43	7,23	6,72	7,49	7.54
NPL GROSS	2,45	2,57	2,95	2,81	2.79
NPL NET	0,68	0,84	0,19	0,19	0.28
BOPO	70,09	75,15	75,07	69,12	70.59
LDR	75,42	65,74	66,49	87,60	77.72
Aktiva Produktif Bermasalah terhadap Total Aktiva Produktif	1,63	1,77	1,85	1,92	1.8
PPAP yang telah dibentuk terhadap PPAP yang wajib dibentuk	103,54	100,29	112,04	89,23	76.19



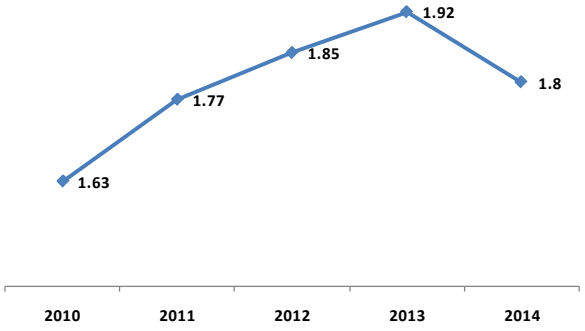
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)

Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) adalah rasio modal terhadap Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 3/21/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001, hingga perubahan terakhir Peraturan Bank Indonesia No. 14/18/PBI/2012 tanggal 28 November 2012 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, dimana jumlah modal terdiri dari modal inti dan modal pelengkap dikurangi penyertaan saham dan Bank Riau Kepri berhasil mencapai rasio KPMM pada tanggal 31 Desember 2010 ,2011, 2012, 2013 dan 2014 melebihi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu masing-masing 26,67%, 20,61%, 19,56%, 18,68% dan 18,27%. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) pada tahun 2014 turun sebesar 0,41% menjadi 18,27% dari 18,68% pada tahun 2012. Penurunan rasio KPMM dipengaruhi oleh meningkatnya Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk risiko kredit terkait dengan semakin meningkat kredit bermasalah yang ada pada Bank Ria Kepri.

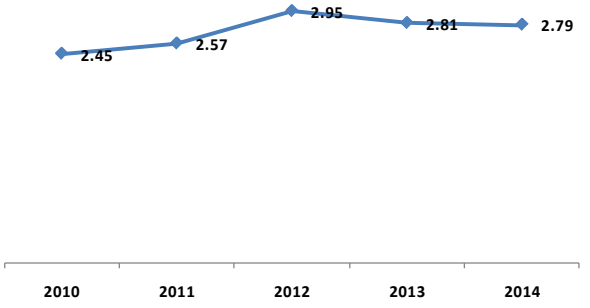
Kualitas Aset

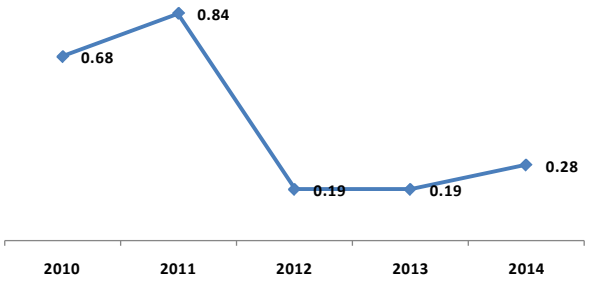
Kualitas aset dinilai berdasarkan rasio- rasio berikut:

a. Rasio kualitas aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif pada 31 Desember 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014 adalah sebesar 1,63%, 1,77%, 1,85%, 1,92% dan 1,80%.

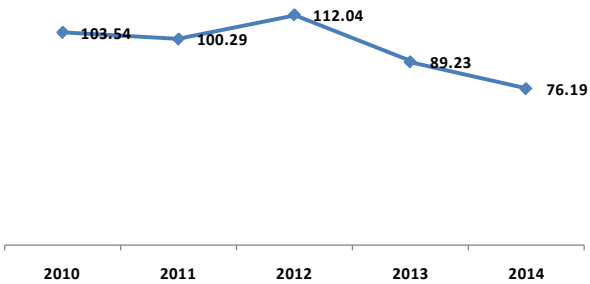


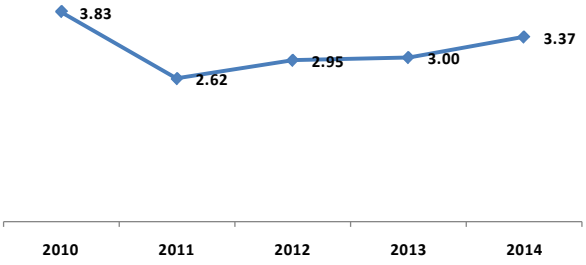
b. Rasio Non Performing Loan (NPL) gross Perseroan pada tanggal 31 Desember 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014 adalah sebesar 2,45%, 2,57%, 2,95%, 2,81% dan 2,79%. Sedangkan rasio NPL netto Perseroan pada pada tanggal 31 Desember 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014 adalah masing-masing sebesar 0,68%, 0,84%, 0,19%, 0,19% dan 0,28%. Terjadi penurunan pada rasio NPL Gross yang dipengaruhi oleh peningkatan kualitas kredit sebesar 0,02%.





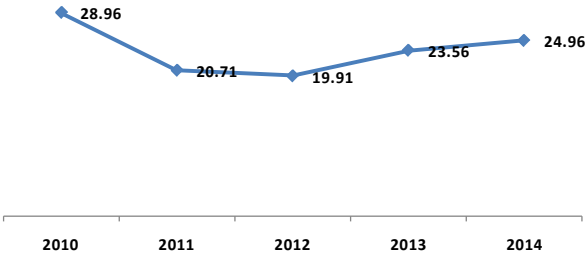
c. Rasio pemenuhan PPAP pada 31 Desember 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014 masing-masing sebesar 100,10%, 103,54%, 100,29%, 112,04%, 89,23% dan 76,19%.



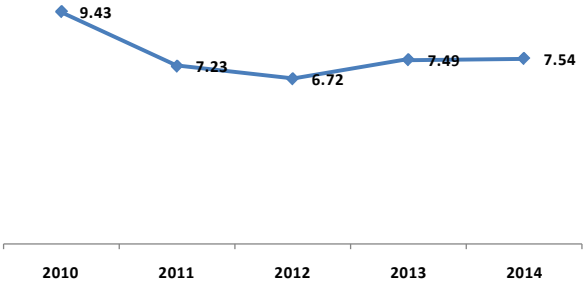


Rasio Rentabilitas

Rasio (ROA) pada tanggal 31 Desember 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014 masing-masing adalah sebesar 3,83%, 2,62%, 2,95%, 3,00% dan 3,37%. Terjadi peningkatan yang disebabkan karena naiknya laba Bank Riau Kepri tahun 2014.

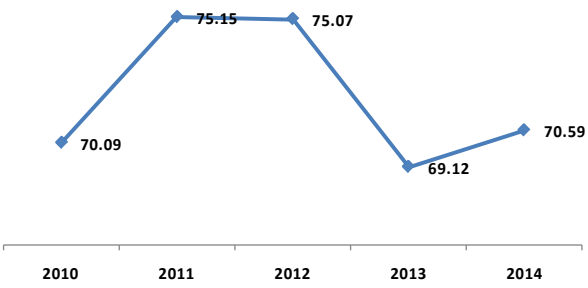


Rasio (ROE) pada tanggal 31 Desember 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014 adalah sebesar 28,96%, 20,71%, 19,91%, 23.56% dan 24.96%. Peningkatan ROE disebabkan terjadi peningkatan laba bersih di tahun 2014.



Rasio Net Interest Margin (NIM)

Net Interest Margin (NIM) Perseroan pada tanggal 31 Desember 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014 masing-masing sebesar 9,43%, 7,23%, 6,72%, 7,49% dan 7,54%. Rasio ini mengalami peningkatan dari tahun 2012 yang didorong oleh kenaikan pendapatan bunga yang cukup tinggi dan aktiva produktif, untuk itu Bank Riau Kepri terus berupaya meningkatkan sumber pendanaan yang murah untuk mengurangi beban bunga Perusahaan.

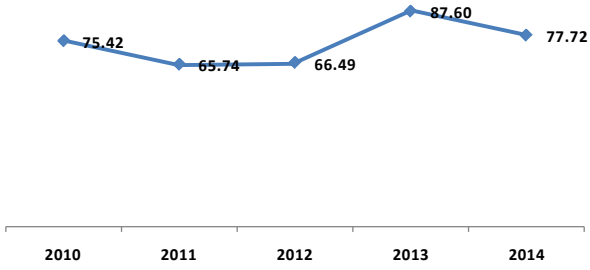


Rasio BOPO

Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) termasuk anak perusahaan adalah rasio untuk mengukur tingkat efsiensi yang dicapai. BOPO per 31 Desember 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014 berturut-turut adalah sebesar 70,09%, 75,15%, 75,07%, 69,12% dan 70,59%. Pada tahun 2014 terjadi peningkatan rasio BOPO namun masih dalam batas normatif maksimal 75%.

Likuiditas

Likuiditas merupakan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban sewaktu-waktu melalui pengelolaan simpanan dan hutang lainnya untuk dijadikan aset produktif. Bank Indonesia menetapkan bahwa salah satu idkator dari tingkat kesehatan bank umum adalah likuiditas, dimana salah satu ukuran dari likuiditas adalah LDR (rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana pihak ketiga). Adapun LDR Perseroan pada tanggal 31 Desember 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014 adalah masing-masing sebesar 75,42% , 65,74%, 66,49%, 87,60% dan 77,72%



Tingkat LDR tersebut menunjukan bahwa kondisi likuiditas Perseroan masih dalam kondisi baik dimana tingkat LDR tersebut masih dibawah batas maksimal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 92%. Selain itu tingkat LDR yang cenderung meningkat juga memberikan gambaran bahwa Perseroan berhasil mengoptimalkan dana-dana yang dihimpun dari masyarakat serta semakin mengoptimalkan fungsi Perseroan sebagai lembaga intermediasi keuangan.

Beberapa upaya yang saat ini dilakukan Perseroan dalah :

1. Meningkatkan kualitas monitoring likuiditas (GWM)
2. Meningkatkan aksesibilitas pada pasar uang
3. Meningkatkan pengerahan dana jangka panjang
4. Meningkatkan hubungan baik dengan nasabah khususnya nasabah Pemerintah Daerah (Pemda) dan Korporasi.

URAIAN DAN INFORMASI KEUANGAN LAINNYA

A. KEPATUHAN BMPK

Menurut laporan BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit) pada tanggal 31 Desember 2014 kepada Bank Indonesia tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan, baik pihak yang berelasi maupun pihak yang tidak berelasi.

Sesuai dengan peraturan BI No. 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, batas maksimum penyediaan dana kepada pihak berelasi, satu peminjam yang bukan pihak berelasi, satu peminjam yang bukan pihak berelasi dan satu kelompok peminjam yang bukan pihak berelasi masing-masing tidak melebihi 10%, 20% dan 25% dari modal Bank.

B. IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

Aset tetap berupa gedung, kendaraan dan inventaris tertentu lainnya diasuransikan atas kemungkinan risiko kebakaran, kecelakaan dan risiko lain. Besarnya nilai pertanggungan per 31 Desember 2014 sebesar Rp 92.807.512.100 diasuransikan kepada PT Askrida, Bumiputera, Bumida, Tripakarta, Bumiputramuda, Jasindo, Parolamas dan Takaful. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut telah memadai untuk menutup kemungkinan terjadinya kerugian dari kebakaran dan gempa bumi. Manajemen Bank berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset tetap yang diasuransikan.

Pengeluaran Investasi Lainnya

Tabel dibawah ini menyajikan rincian pengeluaran investasi lainnnya per 31 Desember 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014.

Keterangan	31 Desember				
	2010	2011	2012	2013	2014
Tanah	78,143	78,287	79,487	81,954	82,789
Bangunan	22,915	25,216	39,726	55,162	61,749
Mesin & Peralatan Kantor	95,705	108,310	116,635	124,315	133,824
Kendaraan	4,927	6,077	6,282	5,426	11,467
Aset dalam Penyelesaian	11,467	24,737	12,864	9,454	237,507
Jumlah	210,565	242,628	254,994	276,311	527,336

C. INFORMASI KEUANGAN LUAR BIASA DAN JARANG TERJADI

Penyelesaian Masalah Gedung Menara Bank Riau Kepri

Samapi dengan akhir Desember 2014, Gedung Menara Bank Riau Kepri belum diserah-terimakan dari pelaksana pembagunan (PT. Waskita Karya) kepada Bank Riau Kepri, meskipun pembangunan gedung sudah rampung. Berdasarkan Keputusan Badan Abritase Nasional Indonesia (BANI) No.525/V/ARB-BANI/2014 diputuskan bahwa:

1. PT. Waskita Karya harus menyelesaikan 27 item pekerjaan pemasangan peralatan-peralatan penunjang yang belum terpasang;
2. PT. Waskita Karya harus menyelesaikan 38 item pekerjaan penyempurnaan fungsi-fungsi peralatan;
3. PT. Bank Riau Kepri harus membayar dana sebesar 95% dari nilai kontrak yakni sebesar Rp214,9 Miliar

Sampai dengan akhir Desember 2014, proses ini masih berjalan dan diperkirakan akan diselesai dan diserahterimakan pada pertengahan tahun 2015.

D. INFORMASI KEUANGAN YANG TELAH DILAPORKAN YANG MENGANDUNG KEJADIAN YANG SIFATNYA LUAR BIASA DAN JARANG TERJADI

Selama tanggal pelaporan di tahun 2014 tidak terdapat kejadian yang bersifat luar biasa dan jarang terjadi yang berdampak pada kinerja keuangan 2014.

E. KOMPONEN SUBSTANSI DARI PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN

Selama rentang waktu tahun 2014, tidak ada komponen substansial pada Pendapatan dan Beban Lain-lain yang menyebabkan adanya fluktuasi tajam, baik kenaikan maupun penurunan, selain sebagaimana yang diungkap dalam laporan

Kantor Akuntan Publik (KAP) Perseroan sebagaimana terlampir.

F. MATERIALITAS PENINGKATAN PENDAPATAN USAHA

Selama tahun 2014, peningkatan pendapatan usaha terbesar secara nominal diperoleh dari Pendapatan bunga surat berharga sebesar Rp112.594 juta atau meningkat 40,35% dari tahun 2013, sedangkan bisnis non inti yang merupakan Pendapatan Operasional lainnya meningkat sebesar Rp42.607 juta atau meningkat 35,23% dari jumlah Pendapatan Operasional Lainnya tahun 2013, kenaikan ini disebabkan adanya peningkatan pada pendapatan fee dan pendapatan pemulihan CKPN kredit yang diberikan.

G. DAMPAK PERUBAHAN HARGA TERHADAP PENDAPATAN USAHA

Selama tahun 2013-2014 tidak terdapat dampak signifikan perubahan harga (pricing) terhadap pendapatan usaha atau pendapatan bersih Bank Riau Kepri serta laba operasional perusahaan selama 2 tahun terakhir, selain sebagaimana yang diungkap dalam laporan Kantor Akuntan Publik (KAP) Perseroan sebagaimana terlampir.

H. INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Pada RUP-LB tanggal 8 November 2014, Pemerintah Kota Batam menyetorkan modal sebesar Rp 42.940.400.000 namun setoran modal Pemko Batam belum dapat diakui sebagai modal setor pada tahun 2014 dikarenakan belum memenuhi persyaratan administrasi. Pada tanggal 3 Februari 2015 modal setor Pemko Batam telah tercatat di neraca Bank Riau Kepri sehingga total modal disetor Bank Riau Kepri menjadi Rp 1.029.728 juta.

I. REALISASI PEROLEHAN DAN PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Bank Riau Kepri tidak lagi menerbitkan Saham dan Surat hutang atau obligasi, setelah obligasi tahap satu di tahun 2011. Sehingga, sampai dengan 31 Desember 2014, bank tidak memperoleh dana hasil penawaran umum melalui penerbitan surat hutang atau obligasi berikutnya.

J. BUY BACK SHARES DAN BUY BACK OBLIGASI

Sampai dengan akhir tahun 2014, Bank Riau Kepri tidak melakukan Pembelian Kembali Saham (Buy Back Shares) nya dan juga tidak melakukan Pembelian Kembali Obilagsi (Buy Back Obligasi) yang diterbitkannya.

K. INFORMASI MATERIAL MENGENAI EKSPANSI, DIVESTASI, AKUISISI, DAN RESTRUKTURISASI

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, Bank Riau Kepri belum pernah melakukan ekspansi, divestasi, akuisisi, dan restrukturisasi yang berdampak terhadap struktur Bank Riau Kepri.

L. TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Selama tahun 2014 tidak terdapat informasi material yang mengandung benturan kepentingan dalam transaksi yang material dengan pihak afiliasi. Semua jenis transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi, baik yang dilaksanakan dengan ataupun tidak dilaksanakan dengan syarat serta kondisi normal yang sama untuk pihak yang tidak berelasi, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

M. UPAYA UNTUK PENGENDALIAN BOPO (EFISIENSI)

Dengan semakin besarnya usaha bank maka akan berdampak pada semakin besarnya biaya operasional yang dikeluarkan. Untuk itu perlu dilakukan pengendalian yang ketat agar pencapaian efisiensi masih berada pada kondisi normatif. Pada tahun 2014 PT. Bank Riau Kepri telah memproyeksikan rasio efisiensi (BOPO) sebesar 70,59% dan terus dipertahankan di bawah angka normatif hingga tiga tahun ke depan.

N. KEBIJAKAN AKUNTANSI PERUSAHAAN

Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan keuangan disajikan dengan menggunakan praktek yang lazim berlaku dalam industri perbankan dan standar akuntansi keuangan lainnya yang terkait dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan peraturan Bapepam dan LK No. VIII.G.7 lampiran keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

Laporan keuangan Unit Usaha Syariah yang beroperasi dalam bidang perbankan dengan prinsip syariah menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang menggunakan prinsip akuntansi syariah.

Bank menggunakan pedoman akuntansi syariah sesuai dengan

PSAK 101, "Penyajian Laporan Keuangan Syariah", PSAK 102, "Akuntansi Murabahah", PSAK 105 "Akuntansi Mudharabah",

PSAK 106, "Akuntansi Musyarakah", dan PSAK 107 "Akuntansi Ijarah" yang menggantikan PSAK No. 59 tentang "Akuntansi Perbankan Syariah" yang berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan terhadap topik-topik tersebut dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan Ikatan Akuntan Indonesia.

Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan "Bank" disajikan berdasarkan nilai historis, kecuali disebutkan lain dan disusun dengan basis akrual tagihan bunga atas aset produktif yang digolongkan sebagai non-

performing dicatat berdasarkan basis kas.

Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung yang di modifikasi dengan mengelompokkan arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, kecuali untuk beberapa arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan yang disusun dengan menggunakan metode tidak langsung. Sejak 1 Januari 2010, untuk keperluan laporan arus kas yang termasuk kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada Bank lain, penempatan pada bank lain dan Sertifikat Bank Indonesia yang jatuh tempo dalam waktu 3 bulan sejak tanggal perolehan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima serta tidak dibatasi penggunaanya.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp). Angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan, kecuali dinyatakan lain, disajikan dalam Rupiah penuh.

O. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN DAMPAK BAGI PERUSAHAAN

Selama sampai dengan akhir Desember tahun 2014 terjadi perubahan atau penyempurnaan PSAK, sebagimana table dibawah ini.

No	Stamdar Akuntansi Keuangan	Dampak
1	PSAK 46 (2014): Pajak Penghasilan	Berlaku efektif 1 Januari 2015
2	PSAK 48 (2014): Penurunan Nilai Aset	Berlaku efektif 1 Januari 2015
3	PSAK 50 (2014): Instrumen Keuangan: Penyajian	Berlaku efektif 1 Januari 2015
4	PSAK 55 (2014): Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran,	Berlaku efektif 1 Januari 2015
5	PSAK 60 (2014): Instrumen Keuangan: Pengungkapan	Berlaku efektif 1 Januari 2015
6	ISAK 26 (2014): Penilaian Kembali Derivatif Melekat	Berlaku efektif 1 Januari 2015

P. KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM

Bank Riau Kepri selama tahun 2014 telah menyediakan modal minimum melebihi yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia sebesar minimal 8%. Realisasi KPMM Bank Riau Kepri selama tahun 2014 adalah sebesar 18,27%.

Q. KEBIJAKAN PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Berdasarkan Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri, laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya. Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya. Laba dipergunana antaranya: cadangan umum, cadangan tujuan dan pembagian deviden.

Pembagian deviden untuk tahun buku 2014 akan dibagikan pada tahun 2015 setelah mendapatkan persetujuan RUPS tahunan. Berikut ini tergambar pada tabel pembagian deviden atas laba tahun buku 2012 dibagikan tahun 2013 dan laba tahun buku 2013 yang dibagikan pada tahun 2014:

No	Aspek	DIVIDEN YANG DITERIMA PEMEGANG SAHAM PADA TAHUN				
		2010	2011	2012	2013	2014
I	Pemerintah di Prov. Riau					
	1. Prov. Riau	82,516,754,711	100,261,413,883	84,370,394,812	9,394,010,061	111,179,619,028
	2. Kab. Bengkalis	13,717,484,632	25,330,248,976	19,446,515,726	21,669,071,425	32,254,667,667
	3. Kab. Kampar	31,601,294,348	28,958,090,865	22,231,679,204	22,431,494,686	27,898,122,388
	4. Kab. Kepulauan Meranti	-	-	1,056,827,608	3,198,978,718	7,957,160,326
	5. Kab. Indragiri Hilir	7,063,354,858	6,889,816,048	5,916,903,003	6,631,205,637	8,994,296,603
	6. Kab. Rokan Hilir	6,030,483,114	6,630,826,076	5,982,849,046	7,026,492,774	9,849,664,814
	7. Kab. Siak Sri Indrapura	2,426,488,967	3,499,544,529	6,660,338,952	6,976,119,522	8,676,222,381
	8. Kab. Pelalawan	5,409,698,011	7,666,675,839	5,885,853,408	5,938,754,704	8,478,831,757
	9. Kab. Kuantan Singingi	3,233,618,989	3,510,612,241	2,695,164,039	3,243,465,848	4,033,908,951
	10. Kota Pekanbaru	2,437,188,702	2,656,003,149	2,399,653,904	2,421,221,685	3,978,580,163
	11. Kab. Rokan Hulu	2,487,905,045	2,279,811,060	1,750,254,475	1,765,985,538	2,196,361,917
	12. Kab. Indragiri Hulu	1,923,066,144	1,762,216,558	1,352,887,294	1,365,046,872	1,697,713,203
	13. Kota Dumai	1,563,221,702	1,432,470,316	1,099,734,809	1,109,619,085	1,380,036,839
	Total	160,410,559,223	190,877,729,540	160,849,056,280	173,171,466,555	228,575,186,037
II	Pemerintah di Prov. Kepulauan Riau					
	1. Prov. Kepulauan Riau	-	-	-	2,559,182,974	3,182,864,130
	2. Kab. Bintan	5,225,654,281	5,252,730,714	4,666,718,216	5,561,723,072	7,978,087,657
	3. Kab. Natuna	4,506,693,356	4,129,743,366	3,837,256,499	3,871,745,269	4,815,302,095
	4. Kota Tanjung Pinang	1,723,299,450	1,579,158,800	1,773,631,502	1,789,572,674	2,225,697,315
	5. Kab. Kepulauan Anambas	-	-	-	-	1,989,290,081
	6. Kab. Karimun	2,160,208,349	1,979,523,654	1,519,718,101	1,533,377,132	1,907,066,091
	7. Kota Batam	1,693,254,828	1,551,627,178	1,492,156,037	1,505,567,344	1,872,478,968
	8. Kab. Lingga	308,377,457	550,632,449	634,096,565	853,060,991	1,326,193,388
	Total	15,617,487,721	15,617,487,721	13,923,576,920	17,674,229,456	25,296,979,725
	Total Dividen (I + II)	176,028,046,944	176,028,046,944	174,772,633,200	190,845,696,011	253,872,165,762

R. PERUBAHAN-PERUBAHAN PENTING YANG TERJADI

Selama tanggal pelaporan di tahun 2014 tidak terdapat perubahan-perubahan penting yang terjadi.

S. FAKTA MATERIAL SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Selama tanggal pelaporan di tahun 2014 tidak terdapat fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan Akuntan.

T. PERISTIWA PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Pemegang saham Bank Riau Kepri telah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa, pada tanggal 23 April 2015 di Batam Provinsi Kepri, dengan keputusan menyetujui Mambang Mit sebagai Komisaris Utama, dan Irvandi Gustari sebagai Direktur Utama, serta menyetujui pengakhiran perpanjangan sementara masa jabatan Komisaris Independen, Chairisman Rasahan terhitung tanggal 23 April 2015.

U. PERUBAHAN PERATURAN ATAU PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP PERUSAHAAN

1. Perubahan Ketentuan Kredit Komersil PT. Bank Riau Kepri:

No	SK/SE/INSTRUKSI	PERIHAL	TANGGAL TERBIT
1	42/KEPDIR/2014	Pedoman Refinancing Bank Riau Kepri dengan Indonesia Exim Bank	16 Juni 2014
2	44 A/KEPDIR/2014	Pedoman Pemberian Fasilitas Pembukaan SKBDN	25 Juni 2014
3	44 B/KEPDIR/2014	Pedoman Pemberian Fasilitas Pembukaan L/C Impor	25 Juni 2014
4	44 C/KEPDIR/2014	Pedoman Pemberian Kredit Ekspor	25 Juni 2014
5	103/KEPDIR/2014	"Kriteria dan Persyaratan Debitur yang Wajib Menyampaikan Laporan Keuangan yang Telah di Audit Akuntan Publik dan Menyerahkan Laporan Penilaian Independen dari Penilai Publik"	22 Desember 2014

2. Perubahan Ketentuan Kredit Konsumer & Mikro
   PT. Bank Riau Kepri

No	SK/SE/INSTRUKSI	PERIHAL	TANGGAL TERBIT
1	42/KEPDIR/2014	Pedoman Refinancing Bank Riau Kepri dengan Indonesia Exim Bank	16 Juni 2014
2	23/SE/2014	Perubahan Surat Edaran Direksi No.29/SE/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Keputusan Direksi No.106/KEPDIR/13 Tentang Pedoman Pemberian Kredit Aneka Guna	26 Agustus 14
3	27/SE/2014	Perubahan Lampiran (Tabel 1B) Surat Edaran Direksi Nomor.29/SE/13 Tentang Petunjuk Pelaksanaan SK Direksi No.106/KEPDIR/13 Tentang Pedoman Kredit Aneka Guna	16 Oktober 14
4	75/KEPDIR/2014	Perubahan Pertama Surat Keputusan Direksi No.106/KEPDIR/2013 Tentang Pedoman Pemberian Kredit Aneka Guna	27 Oktober 14
5	76/KEPDIR/2014	Aplikasi Loan Origination System (LOS)	27 Oktober 14
6	104A/KEPDIR/2014	Perubahan Kedua Surat Keputusan Direksi N0.106/KEPDIR/2013 Tentang Pedoman Pemberian Kredit Aneka Guna	29 Desember 14

3. Perubahan Ketentuan Pembiayaan Syariah PT. Bank Riau

No	SK/SE/INSTRUKSI	PERIHAL	TANGGAL TERBIT
1	09/KEPDIR/2014	BPP Pedoman DPS PT. Bank Riau Kepri	11 Maret 2014
2	14/KEPDIR/2014	Giro iB	27 Maret 2014
3	06/SE/2014	Giro Online	27 Maret 2014
4	38/KEPDIR/2014	Perubahan Pertama SK Direksi Nomor 59/KEPDIR/2011 tentang SOP Deposito iB	06 Juni 2014
5	44/KEPDIR/2014	Intercity Clearing	20 Juni 2014
6	22/SE/2014	Spesial NisbahDeposito iB Mudharabah (dicabut)	05 Agustus 2014
7	59/KEPDIR/2014	Deposit On Call	27 Agustus 2014
8	67/KEPDIR/2014	Tabungan iB Sinar yang disempurnakan	30-Sep-14
9	25/SE/2014 tgl	Perubahan SE Direksi Nomor 26/SE/2013 tgl 30 Oktober 2013 tentang Pedoman Pembiayaan Aneka Guna BRK UUS	30-Sep-14
10	29/SE/2014 tgl	Spesial NisbahDeposito iB Mudharabah (berlaku)	24-Nov-14
11	86/KEPDIR/2014	Implementasi Distribusi Imbalan Antar Kantor	05 Desember 2014

V. URAIAN TENTANG PROSPEK USAHA PERUSAHAAN

Prospek Usaha Dan Target Di Tahun 2014

Pertumbuhan ekonomi tahun 2014 diperkirakan membaik di kisaran 5,8%-6,2%. Prospek ini ditopang oleh perbaikan ekspor sejalan dengan membaiknya ekonomi global dan permintaan domestik. Namun demikian, proyeksi neraca transaksi berjalan dan potensi downside risk, pertumbuhan ekonomi tetap perlu mendapat perhatian mengingat proses perlambatan ekonomi global hingga saat ini masih terus berlangsung. Dari sisi harga, diperkirakan inflasi pada tahun 2014 akan kembali terkendali pada kisaran target 4,5±1%. Ini dipengaruhi oleh dampak positif dari berbagai kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia.

Prospek Usaha

Provinsi Riau dan Kepri adalah dua provinsi penghasil migas terbesar di Indonesia. Selain itu, Provinsi Riau juga sentra perkebunan sawit terbesar di Sumatera. Bahkan, potensi industri kelapa sawit di Riau telah mendunia. Industri migas, perkebunan sawit, perikanan, dan pariwisata menyebabkan roda perekonomian terus berputar dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang berfek pada memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha.

Geliat pertumbuhan ekonomi dan usaha di Riau dan Kepri, juga ditunjung dengan meningkatnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun 2015 bagi Provinsi Riau dan Kepri. Sejalan dengan pertumbuahan daerah dan pembangunan infrastuktur dengan anggaran yang besar yang menjadi salah satu pemicu meningkatnya kebutuhan transaksi di perbankan.

Prospek ini tentunya akan menjadi peluang dan tantangan besar bagi segenap insan di Bank Riau Kepri untuk meningkatkan kinerjanya ditahun 2015. Beberapa isu penting yang akan diupayakan diantaranya:

1. Peningkatan Dana Non Pemerintah Daerah (Pemda)

Besarnya dana yang beredar di Provinsi Riau dan Kepri dengan adanya industri-industri bersakala besar menjadi peluang Bank Riau Kepri untuk meningkatkan Dana Non Pemdanya dengan melakukan strategi sebagai berikut:

- Bank Riau Kepri akan lebih meningkatkan usaha untuk memperoleh dana pihak ketiga selain pemda dengan cara meningkatkan kualitas produk dan layanan diiringi dengan peningkatan brand awareness produk dan layanan Bank Riau Kepri;
- Peningkatan kualitas produk dan layanan terus dilakukan dengan cara memperkuat struktur IT Bank Riau Kepri agar lebih support terhadap fitur-fitur yang telah tersedia maupun yang akan disiapkan, dan diiringi dengan peningkatan service quality dimensi lainnya (tangible and intangible);
- Peningkatan brand awareness produk dan layanan terus dilakukan melalui promosi di media massa (koran,

radio, televisi, internet);
- Membentuk tim khusus penghimpun dana (funding officer) untuk melakukan pendekatan kepada nasabah potensial (merebut nasabah kaya);

2. Peningkatan Permodalan

Untuk meningkatkan ekspansi usaha, Bank Riau Kepri berupayaa agar pemegang saham yang mayoritas adalah Pemerintah Daerah di Riau dan Kepri mau menambahkan modalnya, diantaranya:
- Pemprov. Riau berencana menambah modal disetor sebesar Rp 750 miliar yang akan ditetapkan ke dalam perda (5 tahun). Pada tahun pertama (tahun 2015), rencana tambahan modal disetor sebesar Rp 300 miliar dan sisanya disetor pada tahun kedua hingga kelima.
- Pemkab. Kepulauan Meranti direncanakan akan menambah modal disetor sebesar Rp 10 miliar setiap tahunnya
- Titipan modal disetor dari Pemkab. Inhil tahun 2015 sebesar Inhil Rp 5,475 miliar dan Pemkab. Bintan sebesar Rp 4 miliar
- Modal Disetor per Feb 2015 sebesar Rp 1.029.728.300.000,-
- Adanya rencana penerbitan Saham Seri B sebesar Rp 25 miliar
- Sehingga modal disetor tahun 2015 di rencanakan menjadi sebesar Rp1.464.203.300.000,-

3. Penyaluran Kredit Sektor Perikanan/Maritim

Besarnya dukungan pemerintah pusat akan peningkatan industri perikanan/maritim juga menjadi peluang usaha Bank Riau Kepri. Untuk hal ini, beberapa strategi yang akan dilakaukan diantaranya:
- Bank Riau Kepri akan berupaya meningkatkan penyaluran kredit sektor perikanan/maritim secara bertahap dengan tetap mengacu kepada prinsip prudential banking
- Untuk itu Bank Riau Kepri akan meningkatkan pengetahuan dan kapabilitas analisa pembiayaan di sektor perikanan/maritim agar putusan-putusan kredit lebih berkualitas

W. URAIAN TENTANG ASPEK PEMASARAN

Bank Riau Kepri memandang aspek pemasaran dan promosi merupakan faktor penting dalam menunjung peningkatan usaha perusahaan, khususnya dalam menawarkan produk baik funding maupun lending. Strategi pemasaran dan promosi produk yang dilakukan Bank Riau Kepri dengan menggunakan strategi Above The Line dan juga Below The Line. Langkah-langkah strategis yang dilakukan Bank Riau Kepri dibagi kepada beberapa aspek, dengan urian sebagai berikut:

Strategi pemasaran dan promosi produk dengan strategi Above The Line

Stretegi ini menggunakan media lini atas (Above the line media), yakni iklan-iklan yang dimuat pada media cetak, elektronik (radio, televisi, internet) dan media luar ruang.

1. Media Cetak

Ditahun 2014, Bank Riau Kepri tetap menjalin kerjasama dengan beberapa media cetak besar di Riau dan Kepri guna menerbitkan iklan promosi produk diantaranya:
1. Riau Pos.
2. Haluan Riau.
3. Tribun Pekanbaru.
4. Metro Riau.
5. Pekanbaru Pos.
6. Koran Riau.
7. Rakyat Riau.
8. Tribun Batam.
9. Haluan Kepri.

2. Media Elektronik

Ditahun 2014, Bank Riau Kepri tetap menjalin kerjasama dengan beberapa media Elektronik di Riau dan Kepri guna menerbitkan iklan promosi produk diantaranya:
1. RTV (Riau TV)
2. Smart FM
3. Bharabas FM
4. Aditya FM
5. Robbani
6. Cendana FM

3. Website

Ditahun 2014, Bank Riau Kepri tetap menjalin kerjasama dengan beberapa media internet di Riau dan Kepri guna menerbitkan iklan promosi produk diantaranya:
1. Riauterkini.com
2. Riaupeople.com
3. Riautrust.com
4. Media Luar Ruang

Ditahun 2014, Bank Riau Kepri tetap menjalin kerjasama dengan beberapa media luar ruang di Riau dan Kepri guna menerbitkan iklan promosi produk diantaranya:
1. Halte bus di dua titik jalan kota Pekanbaru

2. Iklan di Bus Kota

Strategi pemasaran dan promosi produk dengan strategi Below The Line

Strategi Media lini bawah (Below the line media) adalah strategi pemasaran dan promosi dengan menggunakan seluruh media yang langsung atau pun dalam bentuk kegiatan-kegiatan seperti: Direct Mail, pameran, Point of Sale, Display, Kalender, agenda, gantungan kunci, atau tanda mata, dan presentasi. Di tahun 2014, beberapa strategi promosi yang tetap diterapkan Bank Riau Kepri melalui strategi Below The Line diantaranya:

1. Program Hadiah Sinar Tebar Milyar

Ditahun 2014 masih tetap dijalankan program merketing communications yang disebut Program Sinar Tebar Milyar. Program Sinar Tebar Milyar adalah program promosi Bank Riau Kepri yang diperuntukkan kepada nasabah Tabungan Sinar, Sinar Delima, Sinar Belia, Sinar Pendidikan, Sinar KPE, Sinar Comunity dan Tabungan IB Sinar Bank Riau Kepri Syariah yang diadakan dua periode setiap tahunnya. Program ini menyediakan hadiah uang tunai dengan total Rp 6 milyar yang terdiri atas 2 grand prize masing-masing Rp1 milyar, 8 pemenang masing-masing Rp 100 juta, 38 pemenang masing-masing Rp 50 juta, 76 pemenang masing-masing Rp 10 juta, 152 pemenang masing-masing Rp 2 juta dan 236 pemenang masing-masing Rp1 juta. Ditahun 2014, Bank Riau Kepri kembali menjadikan nasabahnya menjadi Milyader melalui program Sinar Tebar Milyarnya, yakni nasabah Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang dan Pangkalan Krinci.

2. Pameran

Ditahun 2014, Bank Riau Kepri memanfaatkan beberapa agenda pameran tahunan yang diadakan pemerintah daerah untuk turut mempromosi produk. Agenda pameran itu diantaranya:

a. Pameran Riau Expo 2014 yang digelar di Bandar Seni Raja Ali Haji Purna MTQ Pekanbaru.
b. Pameran Batam Expo 2014 yang digelar di Batam Center, Kota Batam.
c. Pameran Riau Expo 2014 yang digelar di Bandar Seni Raja Ali Haji Purna MTQ Pekanbaru.

3. Seminar dan Presentasi

Ditahun 2014, Bank Riau Kepri mengagendakan beberapa seminar dan pelatihan khusus untuk turut mempromosi produk. Agenda seminar dan presentasi itu diantaranya:

a. Pelatihan dan Konsultasi bagi Debitur Sukses binaan PT. Bank Riau Kepri di Provinsi Riau.
b. Pelatihan dan Konsultasi bagi Debitur Sukses binaan PT. Bank Riau Kepri di Provinsi Kepri
c. Bank Riau Kepri kembali menggelar Customer Gathering bersama nasabah, debitur serta mitra binaan Bank Riau Kepri untuk wilayah Pekanbaru.
d. Bank Riau Kepr kembali menggelar Customer Gathering bersama nasabah, debitur serta mitra binaan Bank Riau Kepri untuk wilayah Tanjung Pinang.

4. Display

Ditahun 2014, Bank Riau Kepri juga mencetak beberapa display dan souvenir promosi untuk dibagikan kepada nasabah, diantaranya: Booklet, Brochur, Leaflet Display, Kalender, agenda, gantungan kunci, dan tanda mata.

Biaya Promosi ditahun 2014

Pengelolaan kegiatan promosi di Bank Riau Kepri selalu dilakukan dengan efektif dan efisien. Ditahun 2014, untuk kegiatan promosi Bank Riau Kepri telah mengeluarkan dana sebesar Rp 23,553 juta, sedangkan ditahun 2013 reaslisasi dana promosi sebesar Rp27.784 juta. Dana promosi ini digunakan untuk memicu peningkatan aktifitas bisnis pada sisi penghimpinan dana, penyaluran kredit, serta feebase income.

Peningkatan Kualitas Pelayanan

Manajemen Bank Riau Kepri memandang perlu untuk senantiasa memberikan motivasi kepada seluruh pegawainya, agar dapat meningkatkan pelayanan yang prima kepada seluruh nasabah. Guna meningkatkan pelayanan yang prima tersebut, Bank menetapkan beberapa program diantaranya:

1. Service Excellence Award

Dalam upaya memotivasi karyawan-karyawati untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabahnya, Bank Riau Kepri ditahun 2014 kembali mengadakan Service Excellence Award, yakni program penghargaan bagi kantor cabang-cabang yang mendapatkan penilaian tertingi untuk pelayanannya kepada nasabah.

2. Kontes Frontliner

Untuk meningkatkan service serta pelayanan bagi para nasabah, Bank Riau Kepri di tahun 2014 kembali mengadakan kontes Frontliner. Penghargaan ini diberikan dalam rangka memberikan apresiasi yang tinggi atas penilaian kinerja para frontliner dalam memberikan pelayanan kepada para nasabah. Selain itu, dengan penghargaan ini juga diharapkan mampu memotivasi dan meningkatkan kinerja para frontliner untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Bank Riau Kepri.

STRUKTUR MODAL

Guna meningkatkan ketahanan kelembagaan yang kuat, serta bertujuan untuk meningkatkan daya saing bank pada tingkat nasional sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/PBI/2012 terkait kegiatan usaha jaringan kantor berdasarkan modal inti bank, dimana minimal modal inti sebesar Rp1 Triliun, maka Bank Riau Kepri terus berupaya agar modal bank dapat terus meningkat.

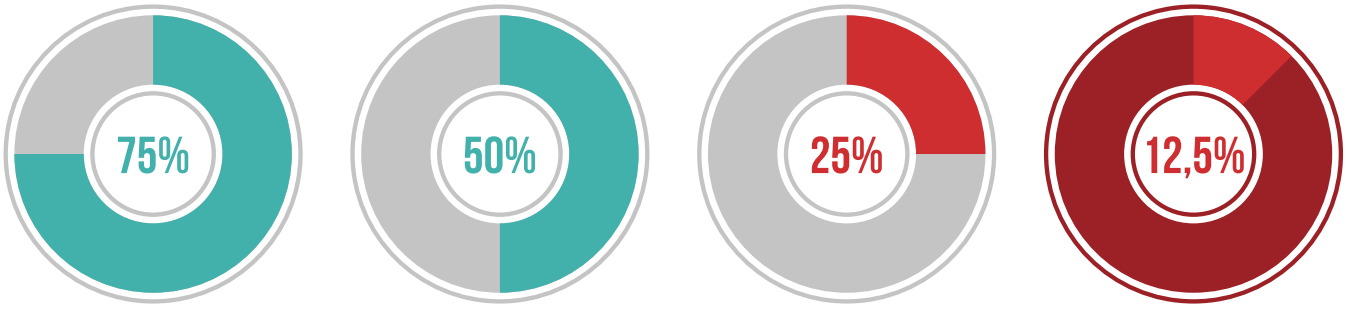
Sampai dengan tahun 2014 jumlah modal Bank Riau Kepri sebesar Rp2.116.617 juta, meningkat 11,54% dibandingkan dengan tahun 2013 yang realisasi sebesar Rp1.897.690 juta. Pertumbuhan modal inti sampai dengan tahun 2014 sebesar Rp203.821 juta meningkat 11,34% menjadi Rp2.000.486 dari Rp1.796.665 di tahun 2013. Pertumbuhan Modal Bank Riau Kepri tergambar pada table dibawah ini.

PERKEMBANGAN MODAL BANK RIAU KEPRI TAHUN 2010 S/D 2014

Keterangan	2011	2012	2013	2014
Modal Inti	1,466,849	1,633,303	1,796,665	2,000,486
Modal Pelengkap	71,976	87,545	101,025	116,131
Total Modal	1,538,825	1,720,848	1,897,690	2,116,617

Keterangan	2011	2012	2013	2014
ATMR Kredit	5,824,322	7,003,630	8,081,990	9,290,464
ATMR Operasional	1,632,001	1,780,811	2,010,761	2,204,885
ATMR Pasar	8,890	14,347	67,694	89,186
Jumlah ATMR	7,465,213	8,798,788	10,160,445	11,584,535

Agar modal inti Bank Riau Kepri mencapai Rp1 triliun pada tahun 2015, Manajemen akan melakukan beberapa upaya dan pendekatan kepada para pemegang saham untuk terus menambah setoran modalnya. Meskipun ada wacana untuk IPO, namun hal ini masih belum mendapat lampu hijau dari Pemegang Saham. Melalui pendekatan kepada Pemegang saham tentang arti penting tambahan setoran modal tersebut, maka sebagai bank yang sehat, Bank Riau Kepri akan mampu menghadapi persaingan pada di Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan Asean Banking Integration Framework (ABIF).



RENCANA KERJA 2015

Beberapa sasaran kualitatif yang ditetapkan Bank Riau Kepri untuk rencana kerja di tahun 2015 diantaranya:

- Bank Riau Kepri akan tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit serta senantiasa melakukan monitoring kredit;
- Bank Riau Kepri akan terus memperkuat pengelolaan risiko bank;
- Bank Riau Kepri tetap berkomitmen penuh untuk melakukan perbaikan atas temuan-temuan pemeriksaan baik internal maupun eksternal;
- Bank Riau Kepri akan menciptakan budaya kerja berbasis risiko (risk culture) yang dapat mendorong terciptanya tata kelola bank yang sehat dan penerapan manajemen risiko yang efektif pada seluruh jajaran unit kerja;

Untuk mencapai sasaran tersebut, beberapa strategi ditetapkan manajemen pada tahun 2015 diantaranya:

A. Strategi Penetrasi Pasar (Market Penetration)

Untuk kinerja penghimpunan Dana

- Peningkatan kualitas layanan melalui layanan priority banking dan dukungan IT yang handal sehingga mampu meningkatkan perolehan DPK

Untuk kinerja Kredit

- Fokus pada Kredit Mikro & Kecil dan mempertahankan Kredit Konsumer
- Mengoptimalkan potensi Kredit Konstruksi dan Agribisnis

B. Strategi Pengembangan Pasar (Market Development)

- Melakuka pengembangan bisnis consumer banking baik dalam bentuk mobilisasi dana, jasa perbankan, maupun kredit konsumer (termasuk kartu kredit), mengembangkan layanan prioritas, dengan menerapkan strategi marketing yang tepat serta didukung oleh SDM yang profesional, IT yang handal, dan customer relationship management (CRM)
- Penambahan delivery channel (kantor layanan, ATM, electronic channel lainnya)

C. Strategi Pengembangan SDM sebagai Human Capital

- Penyempurnaan sistem talent management, sistem pengembangan karir dan sistem penilaian kinerja.

D. Strategi Pengembangan Produk (Product Development)

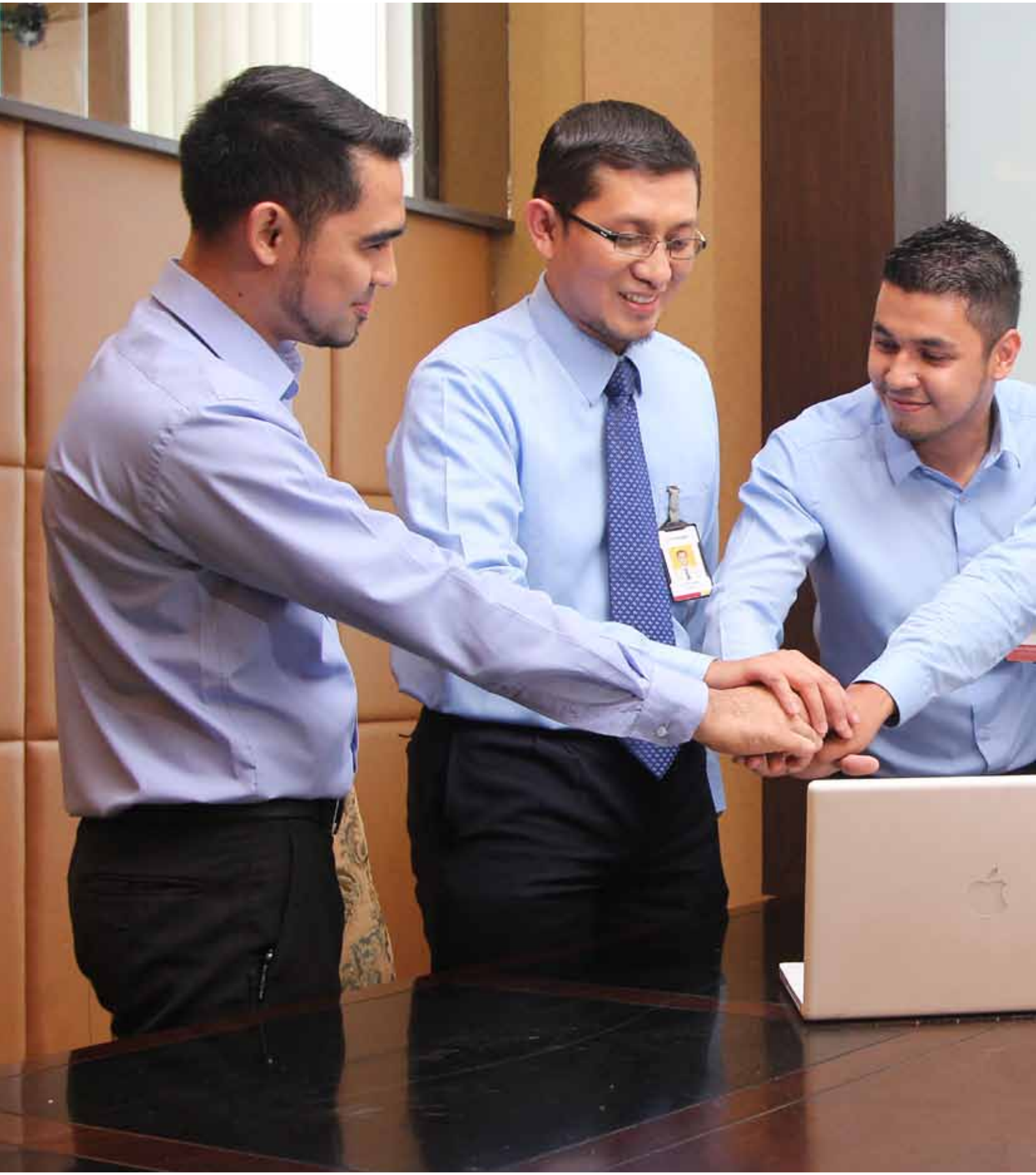
- Menciptakan produk dan aktivitas baru guna menunjang pertumbuhan bisnis, antara lain berupa Pembiayaan MMQ (Musyarakah Mutanaqishah), Tabungan Pendidikan iB, Save Deposit Box (SDB), Priority Banking, Cash Management System, Co-Branding ATM BPR, Branchless Banking, SMS Banking Berbasis USSD (Unstructured Supplementary Service Data)
- Terus mengembangkan fitur-fitur baru untuk memenuhi kebutuhan nasabah sehingga mampu meningkatkan jumlah transaksi dan rasio penggunaan produk per nasabah yang pada gilirannya dapat meningkatkan fee-based income

E. Strategi Komunikasi Pemasaran (Marketing Communication)

- Menggiatkan kegiatan komunikasi pemasaran untuk setiap produk dan jasa sehingga dapat meningkatkan penjualan dan membentuk Corporate Image di mata masyarakat

F. Rencana Pengembangan & Perubahan Jaringan Kantor Tahun 2015

- 1 Kantor Cabang
- 4 Kantor Cabang Pembantu
- 7 Kantor Kedai
- 5 Kantor Kas
- 1 Payment Point
- 1 Unit Layanan Syariah
- 10 Mini Oto Banking
- 58 ATM, termasuk ATM, CDM, Kios ATM Non Tunai, ATM drive Thru
- Relokasi :
  - 1 Kantor Pusat
  - 3 Kantor Cabang
  - 4 Kantor Cabang Pembantu
  - 9 ATM





TINJAUAN BISNIS PERSEGMEN USAHA

"PENINGKATAN KINERJA DI SETIAP UNIT USAHA DAN BISNIS DI BANK RIAU KEPRI MEMBERIKAN DAMPAK SANGAT BESAR BAGI PERTUMBUHAN KINERJA BANK YANG CEMERLANG"

PENGGUNAAN DANA

Penggunaan Dana berupa Aktiva Produktif (Kredit, Penempatan, Surat-surat berharga dan Penyertaan) per 31 Desember 2014 tercatat sebesar Rp20,52 triliun. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2013 yang tercatat sebesar Rp17,72 triliun maka terjadi peningkatan sebesar Rp2,80 triliun.

Outstanding Penggunaan Dana yang ditargetkan Bank Riau Kepri per 31 Desember 2014 sebesar Rp16,85 triliun dengan penurunan Rp870,35 triliun, sedangkan outstanding per Desember 2014 sebesar Rp20,52 triliun sehingga telah melebihi target sebesar Rp3,67 triliun. Data tentang Penggunaan Dana Bank Riau Kepri tergambar pada tabel dibawah ini:

Item	2013	Target 2014	Realisasi2014
Penggunaan Dana	17,722,611	16,852,259	20,520,797
a. Kredit	11,951,592	13,603,728	13,156,173
b. Penempatan Dana	4,916,846	2,047,376	5,948,760
c. Penggunaan Dana Lainnya	854,173	1,201,155	1,415,864

- Penyaluran Kredit per 31 Desember 2014 tercatat sebesar Rp13,16 triliun. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2013 yang tercatat sebesar Rp11,95 triliun maka terjadi peningkatan sebesar Rp1,20 triliun. Jika dibandingkan dengan target 31 Desember 2014 sebesar Rp13,60 triliun sehingga masih terdapat gap sebesar Rp447,56 miliar.

- Penempatan Dana Pada Bank Lain berupa Giro, Deposit On Call, Tabungan, Simpanan Berjangka, Call Money, Penyertaan dan Surat-surat Berharga per 31 Desember 2014 tercatat sebesar Rp5,95 triliun. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2013 yang tercatat sebesar Rp4,92 triliun, maka terjadi peningkatan sebesar Rp1,03 triliun. Jika dibandingkan dengan target 31 Desember 2014 sebesar Rp2,05 triliun sehingga telah melebihi target sebesar Rp3,90 triliun.

- Penggunaan Dana Lainnya berupa Sertifikat Bank Indonesia, FASBI, FTC (Fine Tune Construction) dan Surat-surat Berharga Non Bank per 31 Desember 2014 tercatat sebesar Rp1,42 triliun. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2013 yang tercatat sebesar Rp854,17 triliun maka terjadi peningkatan sebesar Rp561,69 miliar. Jika dibandingkan dengan target 31 Desember 2014 sebesar Rp1,20 triliun sehingga telah melebihi target sebesar Rp214,71 miliar.

KREDIT & PEMBIAYAAN

Komitmen besar sebagai penggerak pertumbuhan perekonomian daerah, Bank Riau Kepri senantiasa berupaya untuk memenuhi visi dan misinya tersebut. Dengan berbagai skim produk kredit dan pembiayaan yang ditawarkan, Bank Riau Kepri mengoptimalkan potensi-potensi daerah yang ada dengan fokus kepada pertumbuhan kredit UMKM dan Pembiayaan Syariah.

Kredit Yang Diberikan Bank Riau Kepri Konvensional per 31 Desember 2014 tercatat sebesar Rp12,33 triliun. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2013 yang tercatat sebesar Rp11,33 triliun maka terjadi peningkatan sebesar Rp992,98 miliar.

Outstanding Kredit yang ditargetkan per 31 Desember 2014 sebesar Rp12,81 triliun dengan pertumbuhan Rp1,48 triliun, sedangkan outstanding per Desember 2014 sebesar Rp12,33 triliun sehingga masih terdapat gap sebesar Rp489,15 miliar.

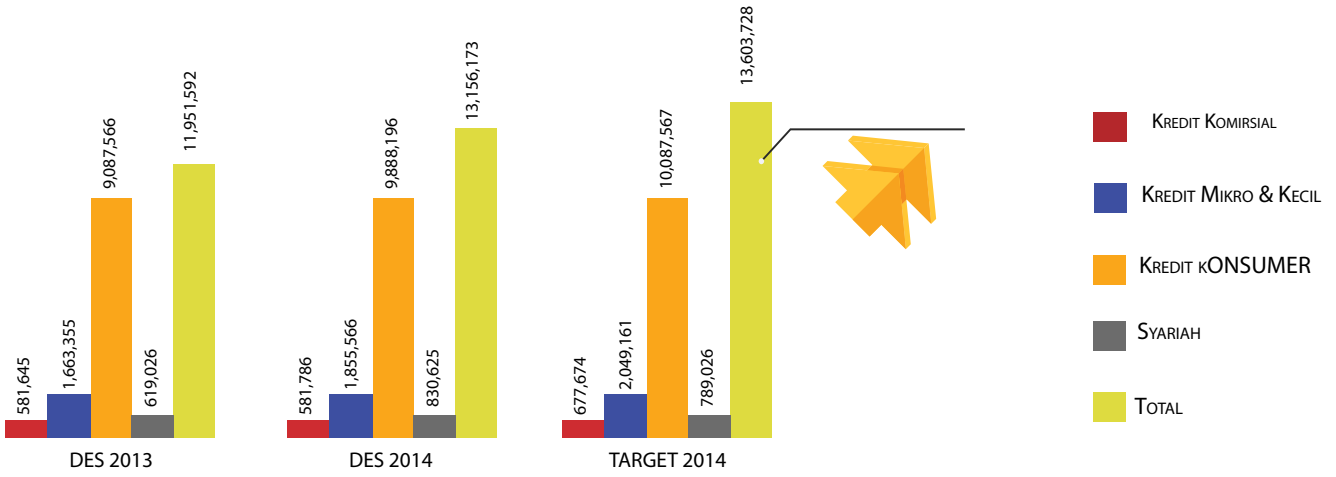
Outstanding kredit Bank Riau Kepri dari tahun 2011 sampai 2014 tergambar pada tabel dan grafik sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Outstanding Kredit (Rp Juta) Tahun 2010 – 2014

Rp Juta

Item	2010	2011	2012	2013	Des 2014	Target 2014
Outstanding	7,259,317	8,691,732	10,208,592	11,951,592	13,156,173	13,603,728
Growth (Nominal)	529,213	1,432,415	1,516,860	1,743,000	13,156,173	1,652,136
Growth (%)	7.86%	19.73%	17.45%	17.07%	10.08%	13.82%

Selama tahun 2014, realisasi pertumbuhan kredit dan pembiayaan tergambar pada grafik dibawah ini:



Sebagaimana tergambar pada grafik diatas, produk skim krdit dan pembiayaan dikelompokkan dalam beberapa jenis per segmen, antara lain:

1. Kredit Komersial
2. Kredit Mikro dan Kecil
3. Kredit Konsumer
4. Pembiayaan Syariah

KREDIT KOMERSIAL

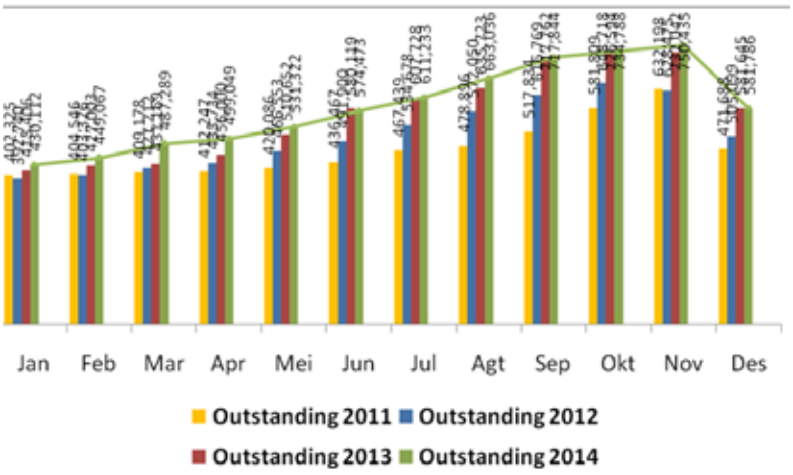
Kredit Komersial Bank Riau Kepri Konvensional per 31 Desember 2014 tercatat sebesar Rp581,79 miliar. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2013 yang tercatat sebesar Rp581,65 miliar maka terjadi peningkatan sebesar Rp141 juta. Outstanding Kredit Komersial yang ditargetkan per 31 Desember 2014 sebesar Rp677,97 miliar dengan pertumbuhan Rp96,33 miliar, sedangkan outstanding per Desember 2014 sebesar Rp581,79 miliar sehingga masih terdapat gap sebesar Rp96,19 miliar.

Perkembangan Kredit Komersial Bank Riau Kepri Konvensional yang disalurkan kepada masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut ini.

(Rp.Juta)

Items	Des 2013	Revisi Target 2014		Des 2014	Growth s.d Des 2014	
		Outstanding	Growth		Nominal	%
Konstruksi	218,866	162,323	(54,543)	19,903	(23,963)	157.62%
Kredit Konstruksi Pengembang	-	31,467	31,467	-	-	0.00%
Sindikasi/Co-Financing	88,089	70,000	(18,089)	91,064	2,975	216.44%
Rekening Koran	141,096	184,160	43,064	141,367	271	0.63
Berjadwal	40, 922	71,423	31,501	48,149	7,227	22.94%
Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Export/ Import	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Ex Trust Reciept	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Shipping Guarantee	-	-	-	-	-	#DIV/0!
SKBDN	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Kredit Investasi	92,672	157,601	64,929	106,631	13,631	20.99%
Total	581,647	677,974	96,329	581,786	141	0.15%

Pertumbuhan kredit Komersil dalam bulanan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 dibawah ini.



Sebagaimana biasanya, pertumbuhan kredit komersial meningkat pada bulan Juni sampai dengan bulan November setiap tahunnya, namun akan menurun diakhir tahun dan awal tahun berikutnya. Pergerakan ini, lebih banyak disebabkan penyaluran kredit yang dominan pada rekanan kontraktor yang mendapatkan proyek pemerintah daerah di setriap pertengahan tahun guna membiayai proyek-proyek tersebut.

Sebagai pengelola segmen kredit Komersil, Divisi Komersial ditahun 2014 melakukan berbagai upaya guna menumbuhkan kredit komersial dan korporasi. Sebagai mitra Pemerintah Daerah, Bank Riau Kepri memfokuskan segmen komersil pada pembiayaan sektor-sektor produktif pembiyaan proyek-proyek pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, gedung kantor, fasilitas umum dan sosial oleh rekanan yang mendapat kontrak kerja dari Pemerintah Daerah. Dominasi kredit konstruksi ini, membuat outstanding kredit diakhir tahun terjadi penurunan, dikarenakan telah banyaknya proyek-proyek rekanan yang telah selesai.

Kendala

Beberapa faktor kendala dalam ekspansi kredit komersil diantaranya:

- Penyaluran Kredit Komersial masih terkonsentrasi pada kredit konstruksi sehingga penyaluran kredit komersial lainnya kurang/nyaris tidak tumbuh.
- Terbatasnya jumlah SDM dalam rangka menjaga hubungan baik dengan debitur serta dalam mencari calon nasabah dan debitur baru yang potensial karena masih bersifat pasif.
- Terbatasnya jumlah SDM yang memiliki kompetensi dalam memproses permohonan kredit segmen usaha Komersial, khususnya dalam memahami sektor-sektor yang sedang berkembang, termasuk pemahaman dan penerapan manajemen risiko.

Upaya dan Strategi

Guna memenangkan persaingan di segmen ini, ini, Bank Riau Kepri menyiapkan beberapa strategi pemasaran diantaranya:

- Menambah jumlah SDM khusus dalam rangka ekspansi kredit momersil.
- Meningkatkan kompetensi SDM khususnya dalam memahami sektor-sektor yang sedang berkembang.
- Kedekatan dengan Pemerintah Daerah digunakan secara optimal untuk memperbesar pangsa pasar kredit korporasi.
- Menjalin kerjasama dengan ASBANDA dan bank lainnya untuk ekspansi kredit sinsikasi.

Peluang Usaha dan Target 2015

Kekuatan hubungan yang baik serta kedekatan Bank Riau Kepri dengan seluruh Pemerintah Daerah di Riau dan Kepri menjadi modal kuat bagi pengembangan bisnis untuk segemntasi Kredit Komersil ditahun 2015. Kedekatan dengan Pemda dapat digunakan secara optimal untuk memperbesar pangsa pasar kredit untuk proyek-proyek yang terkait dengan Pemerintah Daerah, khususnya di bidang infrastruktur. Untuk tahun 2015, Bank Riau Kepri menargetkan pertumbuhan kredit komersial sebesar Rp113,282 juta, atau naik sebesar 19.47% dari total outstanding 2014

KREDIT MIKRO DAN KECIL

Kredit Mikro & Kecil Bank Riau Kepri Konvensional per 31 Desember 2014 tercatat sebesar Rp1,86 triliun. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2013 yang tercatat sebesar Rp1,66 triliun maka terjadi peningkatan sebesar Rp192,21 miliar.

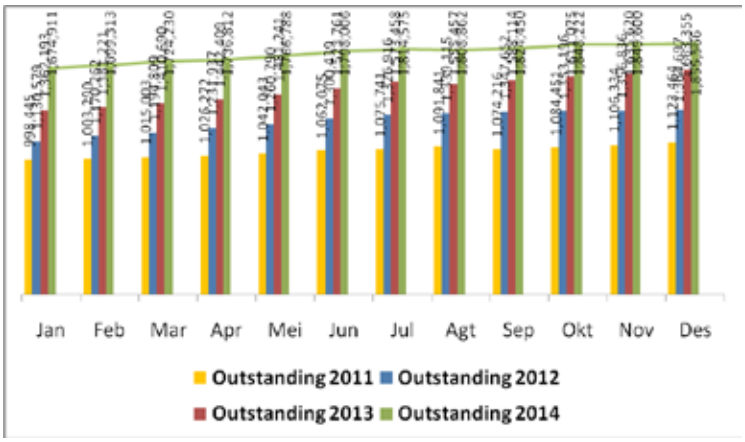
Outstanding Kredit Mikro & Kecil yang ditargetkan per 31 Desember 2014 sebesar Rp2,05 triliun dengan pertumbuhan Rp385,81 miliar, sedangkan outstanding per Desember 2014 sebesar Rp1,86 triliun sehingga masih terdapat gap sebesar Rp193,60 miliar.

Perkembangan Kredit Mikro dan Kecil Bank Riau Kepri Konvensional yang disalurkan kepada masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut ini.

(Rp. Juta)

Items	Des 2013	Revisi Target 2014		Des 2014	Growth s.d Des 2014	
		Outstanding	Growth		Nominal	%
Pengusaha Kecil	1,176,888	1,901,605	724,717	1,546,847	369,959	51.05%
Mikro	400,504	-	(400,504)	207,457	(193,047)	151.80%
Ketahanan Pangan	39,594	56,585	16,991	35,753	(3,841)	-22.61%
Bank Riau Peduli	343	359	16	362	19	120.28%
KUMK SUP 005	2,626	3,064	438	1,999	(627)	-143.34%
Linkage Program	990	5,056	4,066	374	(616)	-15.14%
Agribisnis	8,678	16,502	7,824	6,800	(1,877)	-23.99%
Kredit Usaha Rakyat (KUR)	33,733	65,990	32,257	55,973	22,241	68.95%
Total	**1,663,355**	**2,049,161**	**385,806**	**1,855,566**	**192,211**	**49.82%**

Pertumbuhan kredit mikro dan kecil setiap bulannya dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 tergambar pada grafik dibawah ini.



Produk Segmen Mikro dan Kecil

Pertumbuhan yang menggembirakan tersebut tidak lepas dari familiarnya masyarakat Riau dan Kepri akan skim Kredit Pengusaha Kecil yang mudah dan cepat serta didukung oleh pembukaan beberapa Kedai Bank Riau Kepri yang tersebar ke sentra-sentra pelaku usaha kecil sebagai ujung tombak pemasaran kredit produktif bagi segmen UMK (Usaha Mikro dan Kecil).

Bank Riau Kepri menyediakan beberapa produk untuk kredit Mikro dan Kecil, diantaranya:

1. Kredit Pengusaha Kecil (Plafond Rp 50-500juta)
   Kredit yang diberikan kepada pengusaha kecil secara perorangan, perusahaan dan koperasi dengan tujuan untuk usaha produktif, baik untuk modal kerja maupun investasi.
2. Kredit Pengusaha Mikro (Plafond s/d Rp 50juta)
   Kredit yang diberikan kepada Pengusaha Mikro secara perorangan dengan tujuan untuk usaha produktif, baik untuk modal kerja maupun investasi.
3. Kredit Ketahanan Pangan & Energi (KKPE)
   Penyaluran KKPE didasarkan atas Perjanjian Kerjasama dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan RI No.PKP-21/KKP-E/DSMI/2009 tanggal 7 Juli 2009 dan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-1297/MK.5/2009 tanggal 13 Maret 2009.
4. Kredit BPD Peduli (Plafond s/d Rp 5 Juta)
   Kredit yang diberikan kepada masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Usaha Kecil Berbasis Kerakyatan (UKBK) yang dibina dengan metodologi BPD Peduli oleh pihak bank dan/atau oleh pihak lain yang telah bekerjasama dengan bank, tanpa ada Jaminan dan biaya provisi & administrasi.
5. Kredit KUMK SUP 005
   Kredit yang diberikan kepada masyarakat pelaku ekonomi yang bersifat produktif baik untuk modal kerja maupun investasi untuk pengembangan usaha di sektor perdagangan, pertanian perindustrian, jasa dan sektor produktif lainnya.
6. Kredit Kepada BPR
   Kredit BPR adalah kredit yang diberikan kepada Bank Perkreditan Rakyat untuk membiayai usaha mikro dan kecil.
7. Kredit Agribisnis
   Kredit Agribisnis adalah kredit yang bertujuan untuk membantu usaha perseorangan maupun perusahaan yang bergerak dibidang agribisnis dalam mendapatkan modal kerja dan atau kredit investasi untuk kepentingan pengembangan usaha baru, pembelian (refinancing), peremajaan, dan rehabilitasi perkebunan.
8. Kredit Kedai Bank Riau Kepri
   Kredit pada kedai Bank Riau Kepri adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha atau pedagang mikro dan kecil yang berlokasi disekitar kantor dengan tujuan untuk usaha produktif baik untuk modal kerja maupun investasi.
9. Kredit Koperasi/LKM
   Kredit Kepada Koperasi/LKM adalah pinjaman yang diberikan kepada Unit Simpan Pinjam Koperasi/Lembaga Keuangan Mikro untuk modal kerja dan atau investasi yang penggunaannya diutamakan untuk disalurkan kepada anggota dalam bentuk pinjaman
10. Kredit Usaha Rakyat
    Kredit Usaha Rakyat atau KUR adalah jenis pembiayaan atau kredit modal kerja dan atau investasi bagi Usaha Mikro, kecil, menengah dan Koperasi (UMKMK) dibidang usaha yang produktif yang layak namun belum bankable, dengan plafond kredit sampai dengan Rp. 500.000.000, yang dijamin oleh perusahaan penjaminan yang di tunjuk pemerintah serta di jalankan oleh Bank Pelaksana atau Lembaga Penghubung Linkage

Kendala

Faktor kendala utama dalam ekspansi kredit Mikro dan kecila adalah::

- Segmen UMKM merupakan segmen yang paling banyak diminati oleh seluruh bank sehingga persaingan relatif ketat, hal ini disebabkan karena sebaran risikonya yang merata dan memiliki daya tahannya terhadap guncangan krisis ekonomi.

Upaya dan Strategi

Guna memenangkan persaingan di segmen ini, Bank Riau Kepri menyiapkan beberapa strategi pemasaran diantaranya:

- Telah terjalin kerjasama UED-SP diseluruh pemkab/pemko diseluruh Propinsi Riau.
- Sebagai koordinator APEX Bank di Propinsi Riau

Peluang Usaha dan Target 2015

Segemen usaha kecil dan mikro merupakan segmen pasar yang paling cepat berkembang sejalan dengan kemajuan perekonomian nasional. Disamping itu, usaha kecil dan mikro merupakan segmen yang selalu didorong oleh pemerintah untuk terus berkembang, karena merupakan segmen yang paling banyak menyerap tenaga kerja, dan terbukti paling tahan terhadap krisis.

Peluang yang besar ini, menjadi tantangan untuk Bank Riau Kepri. Untuk tahun 2015, Bank Riau Kepri menargetkan pertumbuhan kredit mikro dan kecil sebesar Rp382,773 juta, atau naik sebesar 20.63% dari outstanding 2014 sebesar Rp 1,855,566 juta menjadi sebesar Rp2,238,339 juta pada tahun 2015.

KREDIT KONSUMER

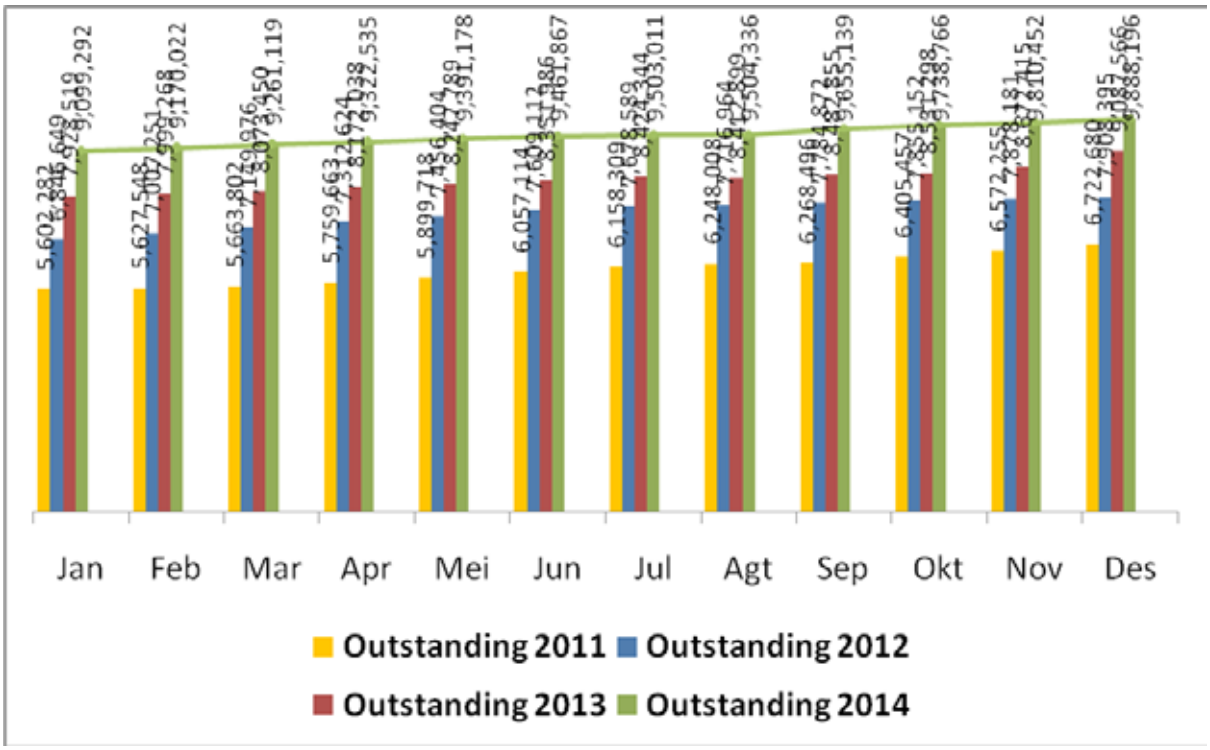
Kredit Konsumer Bank Riau Kepri Konvensional per 31 Desember 2014 tercatat sebesar Rp9,89 triliun. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2013 yang tercatat sebesar Rp9,09 triliun maka terjadi peningkatan sebesar Rp800,63 miliar.
Outstanding Kredit Konsumer yang ditargetkan per 31 Desember 2014 sebesar Rp10,09 triliun dengan pertumbuhan Rp1,00 triliun, sedangkan outstanding per Desember 2014 sebesar Rp9,89 triliun sehingga masih terdapat gap sebesar Rp199,37 miliar.

Perkembangan Kredit Konsumer Bank Riau Kepri Konvensional yang disalurkan kepada masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut ini.

(Rp. Juta)

Items	Des 2013	Revisi Target 2014		Des 2014	Growth s.d Des 2014	
		Outstanding	Growth		Nominal	%
Aneka Guna	8,355,997	9,192,403	836,406	9,160,087	804,089	96.14%
Kendaraan Bermotor	25,591	33,414	7,823	18,051	(7,540)	-96.38%
Kepemilikan Rumah	500,227	648,676	148,449	504,006	3,779	2.55%
Kredit Pegawai BPD Riau	204,510	211,628	7,118	204,897	387	5.44%
Kredit Eks Kartu Kredit	1,241	1,446	205	1,154	(86)	-41.99%
Total	**9,087,566**	**10,087,567**	**1,000,001**	**9,888,196**	**800,630**	**80.06%**

Sedangkan Pertumbuhan kredit Konsumer setiap bulannya dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 tergambar pada grafik dibawah ini.



Pertumbuhan yang dicapai segmen kredit konsumer ini terutama dikarenakan bank dapat memaksimalkan pemasaran produk-produk perbankan konsumer di kalangan pegawai pemerintahan. Dari beberapa skim kredit di segmen konsumer, skim kredit Aneka Guna menjadi produk primadona, karena menjadi solusi mudah bagi pegawai negri sipil memenuhi kebutuhan dananya.

Produk Segmen Konsumer

Produk-produk pada segmen konsumer Bank Riau Kepri dikembangkan dan dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk produk pembiayaan konsumer, bank memiliki beberapa produk yaitu:

1. KAG (Kredit Aneka Guna),
   Kredit Aneka Guna (KAG), merupakan kredit yang diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan debitur yang bersifat konsumtif di luar KPR dan KKB, diberikan secara kolektif maupun non kolektif. Kredit Konsumer Bank Riau Kepri dalam bentuk produk Kredit Aneka Guna (KAG) ini mayoritas disalurkan dan diminati oleh PNS dan karyawan swasta lainnya yang pembayaran gajinya dilakukan melalui Bank Riau Kepri.
2. KPR (Kredit Kepemilikan Rumah),
   Kredit Pemilikan Rumah (KPR), merupakan kredit yang diberikan kepada perorangan yang berpenghasilan tetap/ tidak tetap untuk membeli tanah dan atau bangunan rumah tinggal, rumah toko, rumah susun, apartemen atau melakukan renovasi rumah milik swadaya.
3. KKB (Kredit Kendaraan Bermotor),
   Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) Bank Bank Riau Kepri adalah fasilitas kredit yang menawarkan kredit pembelian kendaraan bermotor mobil dan sepeda motor .
4. Kredit Karyawan Bank Riau Kepri
   Kredit Karyawan Bank Riau Kepri merupakan fasiltas kredit yang diberikan kepada seluruh pegawai sebagai bagian dari fasilitas untuk memenuhi kebutuhan penunjang seperti rumah dan kendaraan, dengan harapan dapat memotivasi serta meningkatkan loyalitas pegawai.
5. Kartu Kredit Bank Riau Kepri Visa
   Kartu Kredit Bank Riau Kepri bekerjasama dengan Bank Mega, merupakan alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai yang dapat digunakan pemegang kartu untuk transaksi pembelanjaan dan penarikan uang tunai sesuai limit kredit.

Kendala dan Masalah

Faktor kendala dalam menignkatkan segmen kredit Konsumer adalah pola pemasaran dan program promosi yang masih belum dikelola dengan baik menyebabkan penjualan kurang efektif.

Upaya dan Strategi

Meskipun factor kendala itu cukup mempengaruhi, namun beberapa upaya dan strategi yang diantaranya:

- SDM Bank Riau Kepri memiliki kompetensi dan pengalaman yang cukup baik untuk melayani Kredit Aneka Guna (KAG).
- Hubungan emosional antara masyarakat dan Bank Riau Kepri terjalin dengan kuat sehingga proses adaptasi sangat mudah dilakukan.
- Proses pengambilan keputusan dalam merespon dan melakukan diversifikasi dan diferensiasi produk-produk konsumer dapat dilakukan dengan relatif cepat.

dapat menjadikan segmen Konsumer mencatat pertumbuhan pendapatan yang sangat signifikan pada tahun 2014.

Peluang Usaha dan Target 2015

Pangsa pasar segmen konsumer menjadi sangat potensial untuk dikembangkan pada tahun 2015, karena:

- Pasar usaha Konsumer terus berkembang pesat sesuai dengan perkembangan perekonomian nasional, termasuk di Riau dan Kepri
- Kelompok pegawai Pemda dan swasta di Riau dan Kepri relatif menjadi "captive market" sehingga dapat menjadi basis yang baik untuk pengembangan segmen konsumer, baik dana maupun kredit.
- Pasar masih cukup terbuka untuk produk kredit konsumer lain (KPR, kartu kredit, kredit aneka guna, dll.)
- Sumber pendapatan yang berasal dari fee-based belum dimanfaatkan secara maksimal.

Untuk tahun 2015, Bank Riau Kepri menargetkan pertumbuhan kredit konsumer sebesar Rp 1,121,502 juta, atau naik sebesar 11.34% dari total outstanding.

PENANGANAN KREDIT BERMASALAH

Sesuai dengan Rencana Bisnis Bank, target Ekspansi kredit bank tidak hanya fokus pada besarnya target penyaluran kredit, namun juga memperhatikan resiko kredit bermasalah. Melalui Divisi Penanganan Kredit Bermasalah, Bank Riau Kepri menfokuskan strategi menurunkan tingkat NPL atau kredit bermasalah (recovery kredit bermasalah).

Kolektibilitas kredit (Non Performing Loan) gross Bank Riau Kepri Konvensional per 31 Desember 2014 tercatat sebesar 2,73%, membaik jika dibandingkan periode yang sama tahun 2013 sebesar 2,84%. Namun terdapat peningkatan nominal NPL dari Rp321,69 miliar pada 31 Desember 2013 menjadi Rp335,97 miliar pada 31 Desember 2014. Rincian kolektibilitas kredit yang telah disalurkan sampai dengan Desember 2014 dan perbandingannya dengan posisi periode yang sama pada tahun sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini.

Tabel 4. Kolektibiliti Kredit

(Rp. Juta)

Kolektibiliti	Des-13		Des-14	
	Nominal	%	Nominal	%
Golongan I	10,732,771	94.71%	11,646,264	94.49%
Golongan II	278,106	2.45%	343,311	2.79%
Golongan III	10,774	0.10%	8,972	0.07%
Golongan IV	11,916	0.11%	11,090	0.09%
Golongan V	299,000	2.64%	315,911	2.56%
Jumlah / NPL	**11,332,566**	**2.84%**	**12,325,548**	**2.73%**

Untuk memperbaiki kredit bermasalah tersebut, strategi yang dilakukan dalam rangka menurunkan NPL antara lain :

- Penagihan oleh kantor cabang kepada debitur NPL. Jika diperlukan, kantor cabang dapat meminta Divisi Penanganan Kredit Bermasalah untuk mendampingi penagihan kepada debitur NPL.
- Restrukturisasi kredit terhadap rekening yang masih mempunyai prospek bisnis yang baik dan cashflow yang relatif terjaga.
- Penjualan agunan kredit dilakukan terhadap kredit yang sudah tidak produktif untuk ditagih dan masih memiliki agunun yang marketable, akan dilakukan penjualan agunan baik secara sukarela maupun melalui lelang eksekusi.
- Penghapusbukuan debitur yang telah jatuh tempo, dengan tetap melakukan penagihan dan penjualan agunan kredit.

Target Di Tahun 2015

Dengan upaya-upaya yang dilakukan di atas, maka PT. Bank Riau Kepri akan melakukan perbaikan NPL dengan menargetkan pada tahun 2015 NPL Gross sebesar 2.70% dan NPL Netto sebesar 0.26%.

TREASURY & INTERNASIONAL

Kinerja Treasury dan Internasional berhasil mencatat beberapa pencapaian yang cukup baik ditahun 2014.

Di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi yang sulit Divisi Internasional dan Treasury Bank Riau Kepri yang mengelola kinerja Treasury dan Internasional, berhasil mencatat pertumbuhan melebihi target yang meliputi transaksi trade finance, remitansi, dan guarantee (based on counter guarantee bank to bank). Keberhasilan tersebut antara lain diraih melalui pemasaran yang intensif atas produk-produk yang ada. Sumber pendapatan utama adalah berupa penempatan dan surat-surat bergarga.

Dari sisi pengelolaan dana, Divisi Treasury telah menghasilkan pendapatan yang cukup signifikan yakni sebsar Rp Rp378 Miliar dengan rincian dana yang dikelola sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

(Rp Juta)

Item	Des 2013	Target 2014		Realisasi Des 2014	Pencapaian Growth s.d Des 14	
		Outstanding	Growth		Nominal	%
Penempatan dan Surat-surat Berharga	5,771,019	3,248,531	(2,522,488)	7,364,624	1,593,605	263.18%
a Giro Pada Bank Lain	98,471	83,820	(14,652)	69,643	(28,829)	3.24%
b Penempatan Pada Bank Lain	4,818,375	1,963,556	(2,854,818)	5,879,117	1,060,742	237.16%
- Deposito On Call	2,450,000	700,000	(1,750,000)	2,000,000	(450,000)	174.29%
- Call Money	1,360,000	800,000	(560,000)	1,940,000	580,000	303.57%
- Tabungan	1,308	5,456	4,148	1,347	38	0.92%
- Sertifikat Deposito	-	-	-	-	-	-
- Deposito Berjangka	826,360	407,600	(418,760)	1,742,140	915,780	418.69%
- Surat-surat Berharga	180,206	50,000	(130,206)	195,130	14,924	211.46%
- Penyertaan	500	500	-	500	-	-
c Efek-efek	853,017	1,200,000	346,983	1,414,708	561,691	161.88%
- SBI/ FASBI/FTC	853,017	1,000,000	146,983	1,414,708	561,691	382.15%
- Surat-surat Berharga Non Bank	-	200,000	200,000	-	-	0.00%
d Penyertaan Non Bank	1,155	1,155	-	1,155	-	-

PENGHIMPUNAN DANA

Dana yang dihimpun Bank Riau Kepri per 31 Desember 2014 berupa Dana Masyarakat, Dana Pinjaman, dan Dana Sendiri (Ekuitas) tercatat sebesar Rp22,65 triliun. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2013 yang tercatat sebesar Rp19,57 triliun maka terjadi peningkatan sebesar Rp3,08 triliun.

Outstanding Penghimpunan Dana yang ditargetkan Bank Riau Kepri per 31 Desember 2014 sebesar Rp21,21 triliun dengan pertumbuhan Rp1,64 triliun, sedangkan outstanding per Desember 2014 sebesar Rp22,65 triliun sehingga telah melebihi target sebesar Rp1,43 triliun. Data tentang Penghimpunan Dana Bank Riau Kepri tergambar pada tabel dibawah ini:

Item		2013	Target 2014	Realisasi2014	Capaian (%)
Penghimpunan Dana		19,569,431	21,213,676	22,645,350	187.07%
a.	Dana Masyarakat	13,642,708	15,795,545	16,927,291	152.57%
b.	Dana dari Bank Lain	1,856,698	1,703,984	1,810,746	30.09
c.	Pinjaman yang diterima	3,227	204,109	664	-1.28%
d.	Dana Sendiri	2,270,257	2,416,706	2,523,700	173.06%
e.	Dana Lainnya	1,796,541	1,093,333	1,382,948	58.82%

- Dana masyarakat yang terdiri dari giro, tabungan dan deposito per 31 Desember 2014 tercatat sebesar Rp16,93 triliun. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2013 yang tercatat sebesar Rp13,64 triliun maka terjadi peningkatan sebesar Rp3,28 triliun. Jika dibandingkan dengan target 31 Desember 2014 sebesar Rp15,80 triliun sehingga telah melebihi target sebesar Rp1,13 triliun.
- Penempatan dana dari bank lain ke Bank Riau Kepri per 31 Desember 2014 tercatat sebesar Rp1,81 triliun. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2013 yang tercatat sebesar Rp1,86 triliun maka terjadi penurunan sebesar Rp45,95 miliar. Jika dibandingkan dengan target 31 Desember 2014 sebesar Rp1,70 triliun sehingga telah melebihi target sebesar Rp106,77 miliar.
- Pinjaman yang diterima yang berasal dari Pinjaman Bank Indonesia dan Pinjaman Lainnya per 31 Desember 2014 tercatat sebesar Rp664 juta. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2013 yang tercatat sebesar Rp3,23 miliar maka terjadi penurunan sebesar Rp2,56 miliar. Jika dibandingkan dengan target 31 Desember 2014 sebesar Rp204,11 miliar sehingga masih terdapat gap sebesar Rp203,44 miliar.
- Dana Sendiri berupa Modal Setor, Cadangan dan Laba Rugi Tahun Berjalan tercatat per 31 Desember 2014 tercatat sebesar Rp2,52 triliun. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2013 yang tercatat sebesar Rp2,27 triliun maka terjadi peningkatan sebesar Rp253,44 miliar. Jika dibandingkan dengan target 31 Desember 2014 sebesar Rp2,42 triliun sehingga telah melebihi target sebesar Rp106,77 miliar.
- Dana Lainnya berupa Surat Berharga Yang Diterbitkan, Kewajiban Segera Lainnya, Beban Yang Masih Harus Dibayar, Dana Lainnya dan Rupa-Rupa Kewajiban per 31 Desember 2014 tercatat sebesar Rp1,38 triliun. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2013 yang tercatat sebesar Rp1,80 triliun maka terjadi penurunan sebesar Rp413,59 miliar. Jika dibandingkan dengan target 31 Desember 2014 sebesar Rp1,09 triliun sehingga telah melebihi target sebesar Rp289,62 miliar.

Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK)

Upaya untuk menghimpun dana-dana yang bersumber dari masyarakat, nasabah korporasi, instansi, maupun komunitas menunjukkan pertumbuhan yang sangat mengembirakan. Dana Pihak Ketiga Bank Riau Kepri, khusus tabungan masyarakat terealisasi melebihi target yang ditetapkan dalam rencana bisnis bank di tahun 2014.

Dana Pihak Ketiga Bank Riau Kepri per 31 Desember 2014 tercatat sebesar Rp16,93 triliun. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2013 yang tercatat sebesar Rp13,64 triliun maka terjadi peningkatan sebesar Rp3,28 triliun. Jika dibandingkan dengan target 31 Desember 2014 sebesar Rp15,80 triliun sehingga telah melebihi target sebesar Rp1,13 triliun.

Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga bank dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 tergambar pada grafik dibawah ini.



Dari produk pendanaan yang ada, yakni tabungan, deposito, dan giro, mencatat pertumbuhan yang sangat signifikan. Gambaran kondisi dana pihak ketiga dari masing-masing produk, dijelaskan sebagai berikut:

TABUNGAN

Tabungan yang dihimpun Bank Riau Kepri Konvensional per 31 Desember 2014 tercatat sebesar Rp3,91 triliun. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2013 yang tercatat sebesar Rp4,20 triliun maka terjadi penurunan sebesar Rp292,31 miliar.

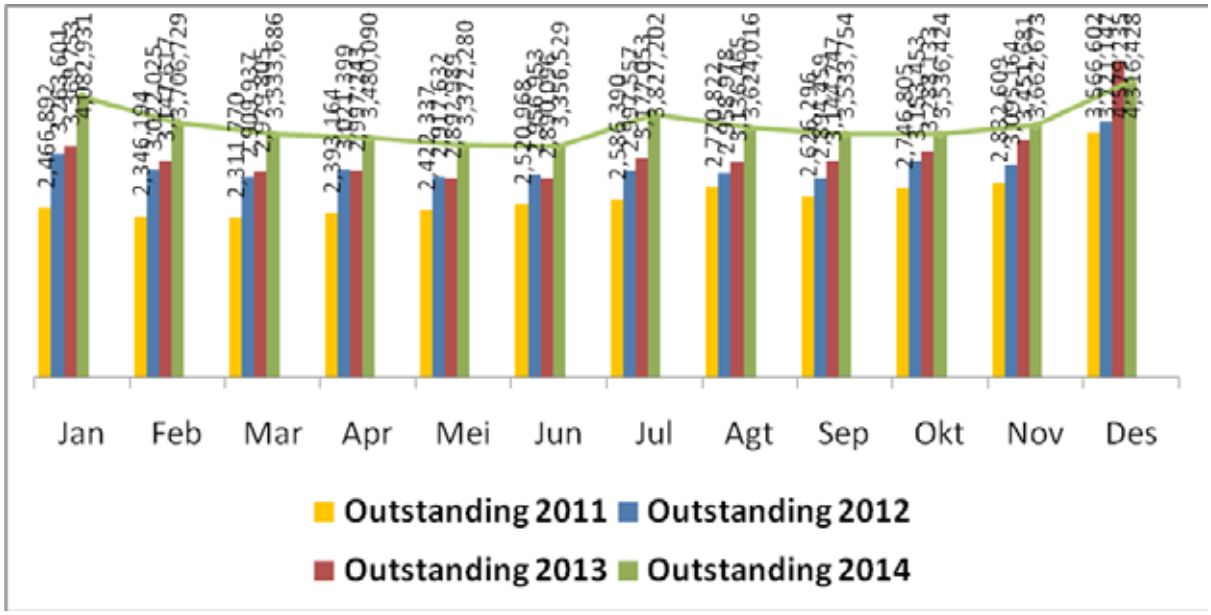
Outstanding Tabungan yang ditargetkan per 31 Desember 2014 sebesar Rp4,39 triliun dengan pertumbuhan Rp188,91 miliar, sedangkan outstanding per Desember 2014 sebesar Rp3,91 triliun sehingga masih terdapat gap sebesar Rp481,22 miliar.

Pertumbuhan tabungan ini tergambar pada tabel dibawah ini

				Dlm Juta
Item	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**
Tabungan	3,566,602	3,721,147	4,579,235	4,821,235

Pertumbuhan tabungan yang sangat signifikan terjadi pada bulan Desember 2014. Pertumbuhan ini dikarenakan maksimalnya uapa bank untuk meningkatkan kompisisi dana pihak ketiganya sesuai dengan target yang ditetapkan pada kahir tahun 2014.

Pertumbuhan Tabungan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 tergambar pada grafik dibawah ini



Produk Tabungan

Guna memenuhi kebutuhan masyarakat, bank memiliki dan mengembangkan beberapa produk tabungan yaitu:

1) Tabungan Simpanan Pembangunan Daerah (Simpeda), yang merupakan produk tabungan bersama yang dikeluarkan oleh BPD seluruh Indonesia. Tabungan ini memiliki fasilitas jaringan BPD Net-Online, yang dapat melakukan transaksi tarik tunai, transfer antar Bank melalui Fasilitas jaringan ATM Bersama dan/atau jaringan ATM Prima, dapat dijadikan agunan kredit, fasilitas kartu ATM berfungsi sebagai kartu debit (Prima Debit) dengan transaksi sampai Rp10 juta, dan dapat melakukan pembayaran berbagai tagihan, serta suku bunga harian yang kompetitif.
2) Tabungan Simpanan Amanah Riau (Sinar), yang merupakan produk andalan bank dengan mengangkat konsep budaya Riau dan Kepulauan Riau. Tabungan dilengkapi dengan Kartu ATM dengan fasilitas yang sama dengan tabungan Simpeda.
3) Tabungan Sinar Belia, Tabungan bagi pelajar dan mahasiswa yang masih berstatus aktif atau masih dalam usia sekolah maksimal 28 tahun. Dengan setoran awal dan biaya administrasi bulanan yang ringan. Gratis biaya tarik tunai di jaringan ATM Bank Riau Kepri, Jaringan ATM bersama dan ATM Prima (ATM BCA). Selain itu, kartu ATM Tabungan dapat menjadi kartu pelajar atau kartu mahasiswa untuk sekolah/universitas yang memiliki kerjasama khusus.
4) Tabungan Sinar Pendidikan, Tabungan bagi demi masa depan pendidikan anak-anak, selain berhadiah puluhan beasiswa pendidikan juga mendapatkan proteksi Asuransi Jiwa Tabungan Sinar Pendidikan dari AIA Indonesia, sehingga nasabah akan tetap memperoleh target dana yang diinginkan, meskipun sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Jangka waktu kepesertaan yang fleksibel 1-10 tahun di seluruh jaringan cabang Bank Riau Kepri dan suku bunga tabungan tinggi, serta biaya administrasi yang ringan.
5) Tabungan Sinar Delima, Tabungan yang sangat cocok bagi pengusaha muda, selain bisa menarik tunai dan transfer antar bank di ATM bersama se-Indonesia tanpa biaya. Kartu ATM Tabungan Sinar Delima bisa melakukan penarikan tunai di jaringan ATM MEPS di Malaysia.
6) Tabungan Tabunganku, tabungan yang diperuntukkan bagi masyarakat kecil dan kaum pelajar. Produk ini didesign oleh Bank Indonesia untuk dipasarkan oleh bank-bank di seluruh Indonesia, dengan keunggulannya para nasabah dibebaskan dari biaya apapun.
7) Tabungan Sinar KPE, Tabungan yang khusus yang disediakan bagi PNS, dengan fasilitas khusus, yakni kartu ATM yang juga sebagai kartu tanda pegawai yang terintegrasi dengan data kepegawaian. Tabungan dilengkapi dengan Kartu ATM dengan fasilitas yang sama dengan tabungan Simpeda dan tabungan Sinar.
8) Tabungan Sinar Dana BOS, Tabungan yang khusus yang disediakan untuk kepentingan penampungan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah).
9) Tabungan Sinar Community, Tabungan yang khusus yang disediakan untuk komunitas tertentu.
10) Tabungan Dhuha, Tabungan yang khusus yang disediakan untuk kepentingan penampungan dana haji dan umroh.

Kendala Dan Masalah

Bank-bank pesaing memiliki produk yang sama bahkan lebih beragam, serta dengan fitur layanan yang update. Persaingan yang cukup ketat ini diikuti pula dengan pesatnya perkembangan produk-produk konsumer banking berbasis teknologi yang sudah dimiliki oleh bank pesaing.

Upaya dan Strategi

Sebagai bank daerah, Bank Riau Kepri tetap konsisten dengan komitmennya untuk membuka cabang-cabang kecil (Kedai Bank Riau Kepri) yang efektif dan efisien menjaungkau sentra-sentra ekonomi dan pelaku usaha.

Tidak hanya itu, untuk mengimbangi produk-produk pesaing, Bank Riau Kepri ditahun 2014 terus mengembangkan produk-produk baru berbasis teknologi, seperti mobile banking (M-Banking), SMS Banking yang berbasis handphone yang tentunya sangat memudahkan nasabah, karena keberadaan handphone sudah sangat familiar dan mudah digunakan kapanpun dan dimanapun.

Disamping itu, strategi branding melalui program hadiah Sinar Tebar Milyar yang menyediakan hadiah sebesa Rp1 Milyar, memberikan dampak signifikan untuk meningkatkan jumlah dana tabungan dan jumlah nasabah. Program ini diadakan dua kali dalam setiap tahunnya.

Peluang Usaha dan Target 2015

Tekanan likuiditas di industri perbankan belum akan reda pada tahun 2015. Bermacam cara ditempuh untuk memupuk likuiditasnya. Dari cara-cara generik, seperti menggelar program promosi berhadiah, hingga jurus ampuh seperti priority banking. Fasilitas-fasilitas mewah yang notabene cermin gaya hidup kelas atas, seperti executive lounge, ditawarkan Bank Riau Kepri lewat servis priority banking. Nasabah yang masuk

katagori priority (prioritas) adalah mereka yang menitipkan dananya ke bank sebesar Rp500 juta keatas.

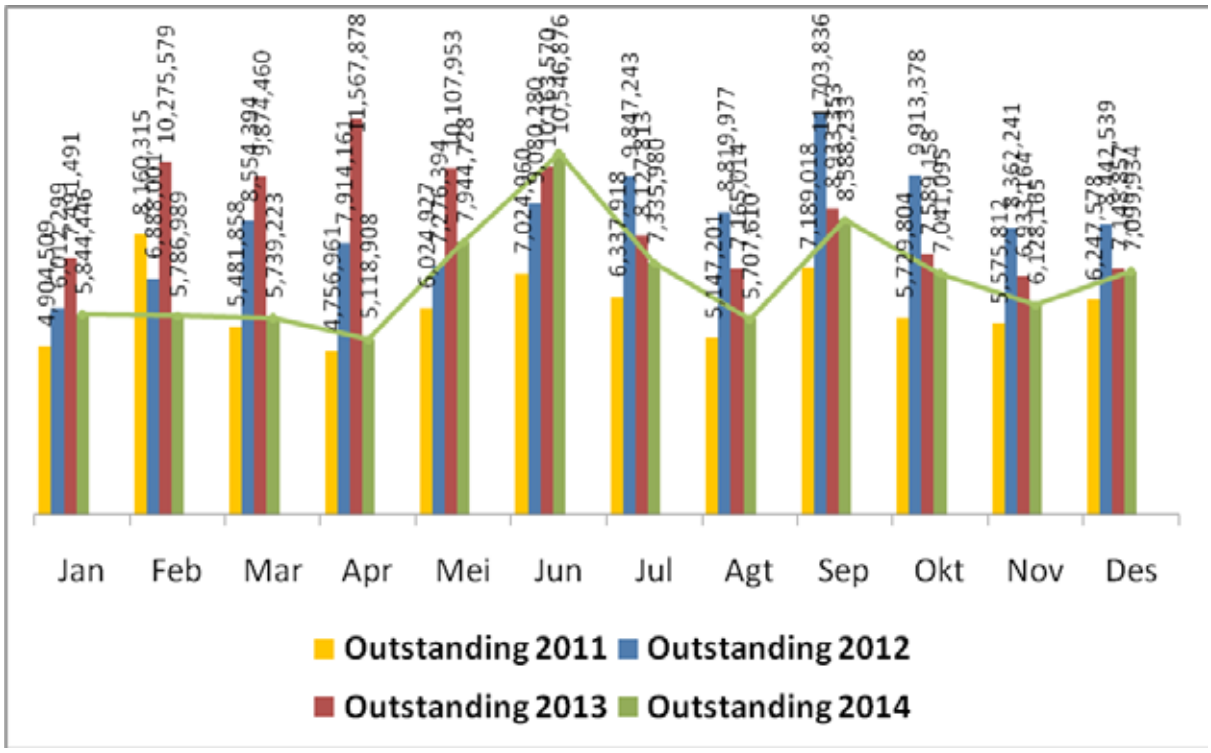
Kekuatan utama Bank Riau Kepri adalah memiliki pemahaman terhadap kultur budaya, perilaku konsumen, dan situasi pasar khusus di Riau dan Kepri. Hal ini karena adanya hubungan emosional antara masyarakat dengan insane di Bank Riau Kepri yang terjalin dengan kuat, sehingga proses adaptasi sangat mudah dilakukan, dan proses pengambilan keputusan dalam merespon dan melakukan diversifikasi dan diferensiasi produk-produk konsumer dapat dilakukan dengan relatif cepat. Dengan kekuatan ini, di tahun 2015 Bank Riau Kepri menargetkan tabungan tumbuh sebesar 9.11%

GIRO

Giro yang dihimpun Bank Riau Kepri Konvensional per 31 Desmber 2014 tercatat sebesar Rp7,06 triliun. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2013 yang tercatat sebesar Rp7,09 triliun maka terjadi penurunan sebesar Rp31,30 miliar.

Outstanding Giro yang ditargetkan per 31 Desember 2014 sebesar Rp7,53 triliun dengan pertumbuhan Rp443,04 triliun sedangkan outstanding per Desember 2014 sebesar Rp7,06 triliun sehingga masih terdapat gap sebesar Rp474,34 miliar.

Pertumbuhan Giro dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 tergambar pada grafik dibawah ini.



Pertumbuhan yang cukup signifikan sempat terjadi di bulan Juni, namun kemudian turun di akhir Desember. Ditahun 2014, Giro pemerintah menunjukkan pertumbuhan menjadi Rp5,224,212juta, dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp5,008,996 juta. Namun penurun juga terjadi pada giro swasta/perorangan yakni sebesar Rp1,722,415 juta pada tahun 2014, dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 2,139,861 juta

Rp Juta

Item	2010	2011	2012	2013	2014
Giro	4,909,768	6,247,579	8,442,539	7,148,857	7,099,934
- Pemerintah	3,967,078	4,809,878	4,497,420	5,008,996	5,377,519
- Swasta/Perorangan Lainnya	942,689	1,437,701	3,945,119	2,139,861	1,722,415

Kendala Dan Masalah

Sampai akhir Desember 2014, Giro Bank Riau Kepri mencatat pertumbuhan negatif -10.87%. Penurunan ini dikarenakan banyaknya kabupaten dan kota di Provinsi Riau dan Kepri yang belum mengesahkan APBD nya sampai dengan akhir desember 2014. Hal ini berdampak dengan menurunnya outsatnding giro rekanan kontraktor swasta dan perorangan, yang ditarik untuk digunakan membiayai proyek-proyek yang berjalan, namun belum mendapat termin pembayaran dari Pemerintah Daerah.

Upaya dan Strategi

Guna meningkatkan pertumbuhan giro Bank Riau Kepri di tahun 2014, dilakukan promosi dan sosialisasi fasilitas Intercity Clearing (Kliring Antar Wilayah), dimana fasilitas ini menjadi salah satu fasilitas yang memudahkan nasabah. Kliring antar wilayah ini merupakan penyelenggaraan kliring debet atas cek dan bilyet giro yang diterbitkan oleh kantor bank yang bukan peserta di wilayah kliring di mana cek dan bilyet giro tersebut dikliringkan. Dengan adanya kliring antar wilayah ini, jika ada nasabah asal satu kota yang membawa cek atau bilyet giro Bank Riau Kepri ke cabang Bank Riau Kepri di kota lain, maka tidak perlu inkaso lagi, tapi bisa langsung dikliringkan dan bisa ditarik keesokan harinya, jadi mempercepat waktu

Peluang Usaha dan Target 2015

Potensi ekonomi yang besar di Provinsi Riau dan Kepri, khususnya daerah-daerah penghasil migas seperti Riau dan Kepri mendapat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Pemda) yang cukup besar sampai saat ini maupun untuk masa yang akan datang, masih tetap berpotensi untuk menjadi salah satu sumber dana yang dapat diandalkan. Disamping itu, melalui kerja sama dengan berbagai instansi pemerintahan baik pusat maupun didaerah, diyakini menjadi peluang pertumbuhan giro.

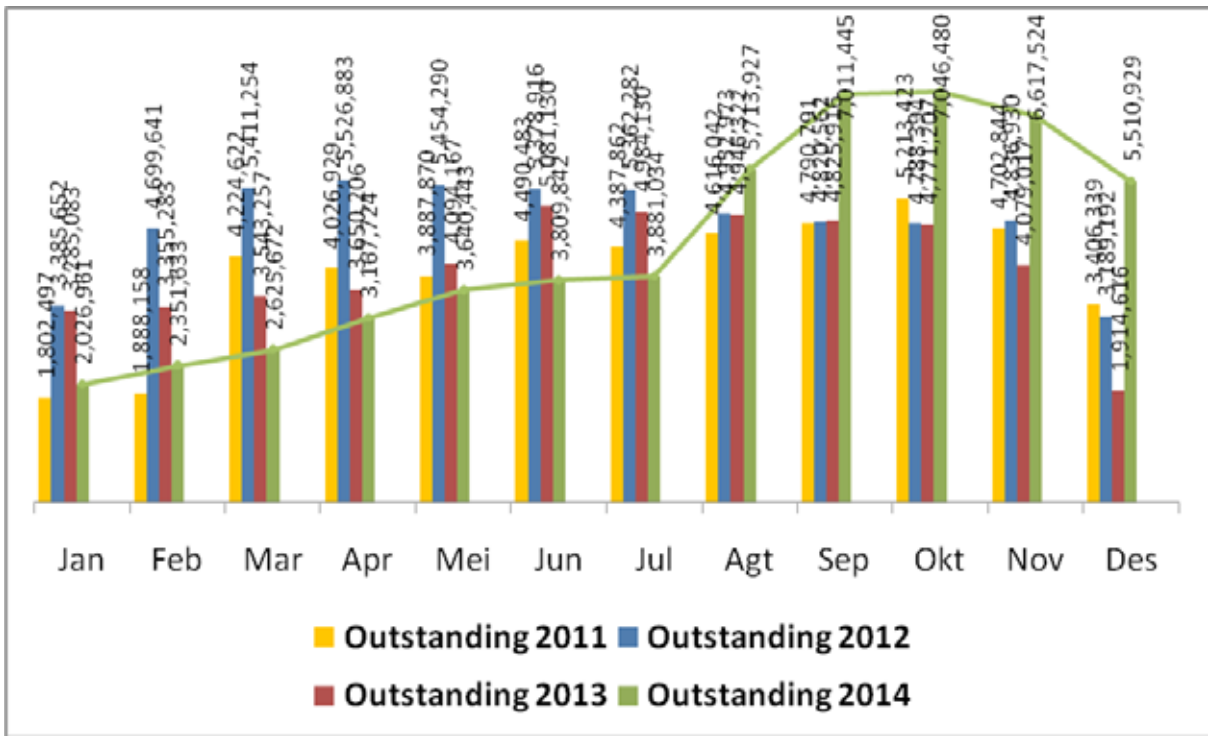
Melihat potensi tersebut, serta hubungan yang baik dan dekat antara Bank Riau Kepri dengan Pemerintah Daerah se-Riau dan Kepri, menjadi peluang yang prospektif untuk pertumbuhan giro. Untuk itu Bank Riau Kepri menargetkan pertumbuhan giro sebesar 7.93% di tahun 2015.

DEPOSITO

Deposito yang dihimpun Bank Riau Kepri Konvensional per 31 Desember 2014 tercatat sebesar Rp5,29 triliun. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2013 yang tercatat sebesar Rp1,76 triliun, maka terjadi peningkatan sebesar Rp3,53 triliun.

Outstanding Deposito yang ditargetkan per 31 Desember 2014 sebesar Rp3,20 triliun dengan pertumbuhan Rp1,44 triliun, sedangkan outstanding per Desember 2014 sebesar Rp5,29 triliun sehingga telah melebihi target sebesar Rp2,09 triliun.

Pertumbuhan deposito dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 tergambar pada grafik dibawah ini.



Pertumbuhan yang cukup signifikan terjadi di bulan agustus sampai dengan bulan oktober 2014, namun turun sedikit di akhir Desember 2014. Peetumbuhan terbesar terjadi pada Deposito Pemerintah yakni sebesar Rp3,423,401 juta, sehingga outstanding deposito pada akhir tahun 2014 tumbuh menjadi Rp4,568,344 juta, yang sebelumnya Rp1,144,943juta pada tahun 2013. Begitu pula dengan Deposito Swasta/perorangan, terjadi pertumbuhan yakni sebesar Rp172,912juta, sehingga outstanding deposito pada akhir tahun 2014 tumbuh menjadi Rp942,584juta, yang sebelumnya Rp769,672 pada tahun 2013. Pertumbuhan Deposito dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 tergambar pada tabel dibawah ini.

Rp Juta

Item	2010	2011	2012	2013	2014
Deposito	2,003,096	3,406,338	3,189,192	1,914,616	5,510,929
- Sektor Pemerintah	1,305,526	2,557,573	2,088,981	1,144,943	4,568,344
- Sektor Non Pemerintah	697,570	848,765	1,100,211	769,672	942,584

Upaya dan Strategi

Pertumbuhan Deposito pada tahun 2014 mencatat pertumbuhan yang sangat signifikan dibandingkan pertumbuhan pada tahun-tahun sebelumnya. Gencar Bank Riau Kepri menjalin kerjasama dengan berbagai instansi, lembaga pendidikan, koperasi, dan pelaku usaha swasta lainnya dengan memberikan suku bunga yang sangat bersaing menjadi faktor utama pertumbuhan Deposito Bank Riau Kepri.

Peluang Usaha dan Target 2015

Meskipun tekanan likuiditas di industri perbankan belum akan reda pada tahun 2015, namun kondisi pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau dan Kepri yang diprediksi akan tumbuh positif. Potensi yang besar dan terus tumbuhnya pelaku usaha dan indsutri yang bisa menjadi prospek nasabah deposito Bank Riau Kepri. Disamping itu, Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Pemda) yang cukup besar, masih tetap berpotensi untuk menjadi salah satu sumber dana yang dapat diandalkan. Bank Riau Kepri menargetkan pertumbuhan deposito sebesar 13.80% pada tahun 2015.

PERBANKAN SYARIAH

Sebagian besar masyarakat Indonesia kini telah bersedia menerima prinsip syariah. Pemahaman akan keberadaan bank dengan prinsip syariah, sudah semakin familiar di masyarakat. Hal ini ditunjukan indikator perbankan yang sejalan dengan meningkatnya pangsa pasar perbankan syariah terhadap total perbankan nasional. Kondisi industri perbankan syariah semakin membaik di tahun 2013 ini, membuka peluang bagi perbankan syariah sebagai alternatif perbankan konvensional.

Mengambil peluang ini, Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah terus berupaya meningkatkan layanannya dengan mengembangkan produk dan layanan perbankan yang dapat diberikan kepada masyarakat Riau dan Kepri yang mayoritas umat muslim.

A. PENGHIMPUNAN DANA

Dana yang dihimpun Bank Riau Kepri Syariah berupa Dana Masyarakat, Dana Antar Bank, Dana Sendiri, dan Dana Lainnya per 31 Desember 2014 tercatat sebesar Rp791,06 miliar. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2013 yang tercatat sebesar Rp619,90 miliar maka terjadi peningkatan sebesar Rp171,16 miliar.

Outstanding Penghimpunan Dana yang ditargetkan Bank Riau Kepri Syariah per 31 Desember 2014 sebesar Rp1,01 triliun dengan pertumbuhan Rp385,18 miliar, sedangkan outstanding sampai dengan Desember 2014 sebesar Rp791,06 miliar sehingga masih terdapat gap sebesar Rp214,01 miliar. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 9 berikut ini:

Tabel 9. Perkembangan Jumlah Penghimpunan Dana Bank Riau Kepri Syariah
per 31 Desember 2014

(Rp Ribu)

No.	Jenis Penghimpunan Dana	Des 2013		Revisi Target 2014		Posisi	Growth s.d Des 2014	
		Outstanding	Growth	Outstanding	Growth	Des 2014	Nominal	%
1	Dana Masyarakat	586,874,919	126,392,055	669,373,700	82,498,781	669,644,883	82,769,964	100.33%
	a. Giro iB	58,017,775	6,598,296	64,980,000	6,962,225	40,397,515	(17,620,259)	-253.08%
	b. Tabungan iB	379,222,679	55,340,721	432,314,000	53,091,321	408,727,372	29,504,693	55.57%
	c. Deposito iB	149,634,466	64,453,039	172,079,700	22,445,234	220,519,995	70,885,530	315.82%
2	Dana Antar Bank	-	-	-	-	80,000,000	-	#DIV/0!
	a. Giro	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	b. Tabungan	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	c. Deposito					80,000,000		
3	Dana Sendiri	30,398,012	9,583,066	334,679,500	304,281,488	37,248,557	6,850,545	2.25%
4	Dana Lainnya	2,624,752	296,096	1,022,300	(1,602,452)	4,167,997	1,543,244	296.31%
Jumlah		619,897,683	136,271,218	1,005,075,500	385,177,817	791,061,436	91,163,753	23.67%

1. Dana Masyarakat

a. Giro iB

Giro iB yang dihimpun Bank Riau Kepri Syariah per 31 Desember 2014 tercatat sebesar Rp40,40 miliar. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2013 yang tercatat sebesar Rp58,02 miliar maka terjadi peningkatan sebesar Rp17,16 miliar.

Outstanding Giro iB yang ditargetkan per 31 Desember 2014 sebesar Rp64,98 miliar dengan pertumbuhan sebesar Rp6,96 miliar sedangkan outstanding per Desember 2014 sebesar Rp40,40 miliar sehingga masih terdapat gap sebesar Rp24,58 miliar.

b. Tabungan

Tabungan yang dihimpun Bank Riau Kepri Syariah per 31 Desember 2014 tercatat sebesar Rp408,73 miliar. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2013 yang tercatat sebesar Rp379,22 miliar maka terjadi peningkatan sebesar Rp29,50 miliar.

Outstanding Tabungan yang ditargetkan per 31 Desember 2014 sebesar Rp432,31 miliar dengan pertumbuhan Rp53,09 miliar, sedangkan outstanding per Desember 2014 sebesar Rp408,73 miliar sehingga masih terdapat gap sebesar Rp23,59 miliar.

c. Deposito iB

Deposito iB yang dihimpun Bank Riau Kepri Syariah per 31 Desember 2014 tercatat sebesar Rp220,52 miliar. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2013 yang

tercatat sebesar Rp149,63 miliar maka terjadi peningkatan sebesar Rp70,89 miliar.

Outstanding Deposito iB yang ditargetkan per 31 Desember 2014 sebesar Rp172,08 miliar dengan pertumbuhan Rp22,45 miliar, sedangkan outstanding per Desember 2014 sebesar Rp220,52 miliar sehingga telah melebihi target sebesar Rp48,44 miliar.

2. Dana Antar Bank

Belum ada penempatan dana dari Bank Lain ke Bank Riau Kepri Syariah. Sehingga posisi Dana Antar Bank per 31 Desember 2014 tercatat sebesar Rp0. Periode yang sama tahun 2013 juga tercatat sebesar Rp0.

Outstanding Dana Antar Bank yang ditargetkan per 31 Desember 2014 sebesar Rp0 dengan pertumbuhan Rp0.

3. Dana Sendiri

Dana sendiri Bank Riau Kepri Syariah berupa Modal Setor, Cadangan dan Laba Rugi Tahun Berjalan tercatat per Desember 2014 sebesar Rp37,25 miliar. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2013 yang tercatat sebesar Rp30,40 miliar maka terjadi peningkatan sebesar Rp6,85 miliar.

Outstanding Dana Sendiri yang ditargetkan per 31 Desember 2014 sebesar Rp334,28 miliar dengan pertumbuhan Rp304,28 miliar, sedangkan outstanding per Desember 2014 sebesar Rp37,25 miliar sehingga masih terdapat gap sebesar Rp297,43 miliar.

4. Dana Lainnya

Dana Lainnya Bank Riau Kepri Syariah berupa Surat Berharga Yang Diterbitkan, Kewajiban Segera Lainnya, Beban Yang Masih Harus Dibayar, Dana Lainnya dan Rupa-Rupa Kewajiban per 31 Desember 2014 tercatat sebesar Rp4,17 miliar. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2013 yang tercatat sebesar Rp2,62 miliar maka terjadi peningkatan sebesar Rp1,54 miliar.

Outstanding Dana Lainnya yang ditargetkan per 31 Desember 2014 sebesar Rp1,02 miliar dengan penurunan Rp1,60 miliar, sedangkan outstanding per Desember 2014 sebesar Rp4,17 miliar sehingga telah melebihi target sebesar Rp3,15 miliar.

B. PENGGUNAAN DANA

Dana yang disalurkan Bank Riau Kepri Syariah berupa Pembiayaan Syariah, Penempatan, Surat-surat berharga dan Penyertaan per 31 Desember 2014 tercatat sebesar Rp957,56 miliar. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2013 yang tercatat sebesar Rp773,65 miliar maka terjadi peningkatan sebesar Rp183,91 miliar.

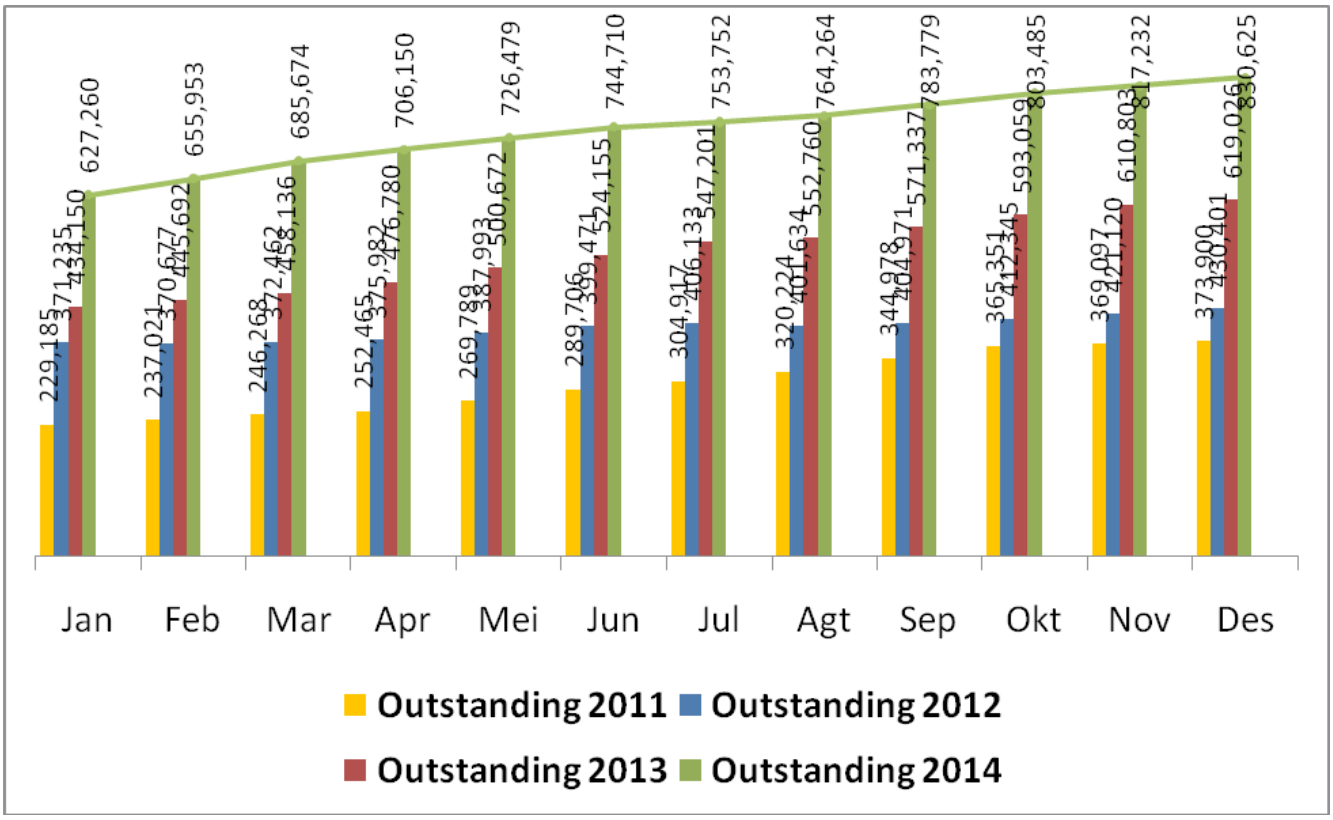
Outstanding Penggunaan Dana yang ditargetkan per 31 Desember 2014 sebesar Rp899,03 miliar dengan pertumbuhan Rp125,38 miliar, sedangkan outstanding sampai dengan Desember 2014 sebesar Rp957,56 miliar sehingga telah melebihi target sebesar Rp58,54 miliar. Selengkapnya penggunaan dana per 31 Desember 2014 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Perkembangan Jumlah Penggunaan Dana Bank Riau Kepri Syariah
31 Desember 2014

(Rp Ribu)

No.	Jenis Penggunaan Dana	Des 2013		Revisi Target 2014		Posisi	Growth s.d Des 2014	
		Outstanding	Growth	Outstanding	Growth	Des 2014	Nominal	%
1	Pembiayaan Syariah	619,025,891	188,624,851	789,026,000	170,000,109	830,625,049	211,599,158	124.47%
2	Penempatan	154,624,304	(69,332,675)	110,000,000	(44,624,304)	126,939,114	(27,685,191)	137.96%
	a. Giro	13,350,336	13,350,336	1,050,000	(12,300,336)	13,627,842	277,506	202.26%
	b. Deposit on Call	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	c. Call Money	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	d. Tabungan	1,273,969	(11,183,011)	1,350,000	76,031	1,311,272	37,303	49.06%
	d. Sertifikat Deposito	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	e. Deposito Berjangka	140,000,000	(71,500,000)	107,600,000	(32,400,000)	112,000,000	(28,000,000)	113.58%
	f. Surat-surat Berharga	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	g. Penyertaan	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
3	Penggunaan Dana Lainnya	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Jumlah		773,650,195	119,292,175	899,026,000	125,375,805	957,564,163	183,913,968	146.69%

Sedangkan Pertumbuhan Pembiayaan Syariah setiap bulannya dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 tergambar pada grafik dibawah ini.



Dari seluruh produk pembiayaan syariah yang dimiliki PT. Bank Riau Kepri sampai dengan 31 Desember 2014 masing-masing telah disalurkan sebagai berikut:

(Rp. Juta)

Items	Des 2013	Revisi Target 2014		Des 2014	Growth s.d Des 2014	
		Outstanding	Growth		Nominal	%
Pembiayaan	7,237	5,000	(2,237)	5,689	(1,549)	130.79%
- Mudharabah	615	500	(115)	486	(130)	87.51%
- Musyarakah	6,622	4,500	(2,122)	5,203	(1,419)	133.14%
- Lainnya	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Piutang	603,512	772,526	169,014	817,634	214,123	126.69%
- Murabahah	558,763	718,626	159,863	785,237	226,473	141.67%
- Salam	-	-	-	-	-	#DIV/0!
- Istishna	1,040	1,500	460	-	(1,040)	-226.09%
- Qardh	43,709	52,400	8,691	32,398	(11,311)	-130.14%
Aktiva Ijarah	8,277	11,500	3,223	7,302	(975)	-30.25%
Total	**619,026**	**789,026**	**170,000**	**830,625**	**211,599**	**124.47%**

1. Pembiayaan (mudharabah & musyarakah) per 31 Desember 2014 tercatat sebesar Rp5,69 miliar. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2013 yang tercatat sebesar Rp7,24 miliar maka terjadi penurunan sebesar Rp1,55 miliar.

   Outstanding Pembiayaan yang ditargetkan per 31 Desember 2014 sebesar Rp5,00 miliar dengan penurunan Rp2,24 miliar, sedangkan outstanding per Desember 2014 sebesar Rp7,24 miliar telah melebihi target sebesar Rp689 miliar.

2. Piutang per 31 Desember 2014 tercatat sebesar Rp817,63

miliar. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2013 yang tercatat sebesar Rp603,51 miliar maka terjadi peningkatan sebesar Rp214,12 miliar.

Outstanding Piutang yang ditargetkan per 31 Desember 2014 sebesar Rp772,53 miliar dengan pertumbuhan Rp169,01 miliar, sedangkan outstanding per Desember 2014 sebesar Rp817,63 miliar sehingga telah melebihi target sebesar Rp45,11 miliar.

3. Ijarah per 31 Desember 2014 tercatat sebesar Rp7,30 miliar. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2013 yang tercatat sebesar Rp8,28 miliar maka terjadi penurunan sebesar Rp975 juta.

Outstanding Ijarah yang ditargetkan per 31 Desember 2014 sebesar Rp11,50 miliar dengan pertumbuhan Rp3,22 miliar, sedangkan outstanding per Desember 2014 sebesar Rp7,30 miliar sehingga masih terdapat gap sebesar Rp4,20 miliar.

C. PENDAPATAN, BIAYA DAN LABA

1. Pendapatan

Total Pendapatan Bank Riau Kepri Syariah yang diperoleh s.d 31 Desember 2014 tercatat sebesar Rp102,47 miliar, atau lebih besar jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2013 sebesar Rp79,51 miliar. Jika dibandingkan dengan pencapaian target tahun 2014 sebesar Rp91,12 miliar maka Pendapatan Bank Riau Kepri Syariah tercapai 112,45% dari target. Untuk lebih jelasnya jumlah Pendapatan dapat dilihat pada Tabel 12 di bawah ini.

Tabel 12. Pencapaian Jumlah Pendapatan Bank Riau Kepri Syariah s.d 31 Desember 2014

(Rp Ribu)

No.	Jenis Pendapatan	Des 2013	Revisi Target 2014	Pencapaian s.d Des 2014	
				Nominal	%
1	Pendapatan Bagi Hasil	67,494,317	81,257,600	85,066,795	104.69%
	a. Pendapatan Pembiayaan	57,192,283	70,672,100	77,269,972	109.34%
	b. Bagi Hasil Penempatan	10,302,034	10,585,500	7,796,824	73.66%
	- Jasa Giro	95,161	105,900	296,175	279.67%
	- Deposit on Call	-	-	-	#DIV/0!
	- Call Money	-	-	-	#DIV/0!
	- Tabungan	67,208	30,200	43,929	145.46%
	- Sertifikat Deposito	-	-	-	#DIV/0!
	- Deposito	10,139,665	10,449,400	7,456,719	71.36%
	- Surat Berharga	-	-	-	#DIV/0!
	- Dividen Penyertaan	-	-	-	#DIV/0!
	c. Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	#DIV/0!
2	Provisi/Komisi Pembiayaan	-	-	-	#DIV/0!
3	Provisi/Komisi Lainnya	373,233	262,200	425,711	162.36%
4	Pendapatan Operasional Lain	6,832,462	6,522,600	14,236,348	218.26%
3	Pendapatan Non Operasional	4,811,067	3,075,800	2,736,263	88.96%
Jumlah		79,511,078	91,118,200	102,465,116	112.45%

2. Biaya

Total Biaya Bank Riau Kepri Syariah s.d 31 Desember 2014 tercatat sebesar Rp65,22 miliar atau lebih besar jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2013 sebesar Rp49,11 miliar. Jika dibandingkan dengan target tahun 2014 sebesar Rp56,44 miliar maka realisasi Biaya sebesar 115,55% dari target. Rincian Biaya s.d tanggal 31 Desember 2014 tersaji pada Tabel 13 di bawah ini.

Tabel 13. Pencapaian Jumlah Biaya Bank Riau Kepri Syariah
s.d 31 Desember 2014

(Rp Ribu)

No.	Jenis Biaya	Des 2013	Revisi Target 2014	Pencapaian s.d Des 2014	
				Nominal	%
1	Biaya Bagi Hasil	16,688,944	18,950,900	20,672,350	109.08%
2	Biaya Penghimpunan Dana	-	-	-	#DIV/0!
3	Biaya Umum & Adm	11,167,042	12,623,500	15,928,918	126.18%
4	Biaya Personalia	18,641,264	22,224,900	18,908,183	85.08%
5	Biaya Operasional Lain	2,032,552	2,025,600	9,170,360	452.72%
6	Biaya Non Operasional	583,265	613,800	536,748	87.45%
Jumlah		49,113,067	56,438,700	65,216,560	115.55%

3. Laba

Laba yang diperoleh Bank Riau Kepri Syariah s.d 31 Desember 2014 tercatat sebesar Rp37,25 miliar, atau lebih besar jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2013 sebesar Rp30,40 miliar. Jika dibandingkan dengan pencapaian target tahun 2014 sebesar Rp34,68 miliar maka Laba tercapai 107,41% dari target dan lebih besar dari pencapaian target seharusnya 100%.

Ringkasan Pendapatan, Biaya dan Laba sampai dengan akhir Desember 2014 dibandingkan dengan posisi Desember 2013 dapat dilihat pada Tabel 14 berikut ini:

Tabel 14. Pencapaian Laba Rugi Bank Riau Kepri Syariah
s.d 31 Desember 2014

(Rp Ribu)

No.	Jenis Biaya	Des 2013	Revisi Target 2014	Pencapaian s.d Des 2014	
				Nominal	%
1	Pendapatan	79,511,078	91,118,200	102,465,116	112.45%
2	Biaya	49,113,067	56,438,700	65,216,560	115.55%
3	Laba / Rugi	30,398,012	34,679,500	37,248,557	107.41%

Ket : Pendapatan dan biaya dengan memperhitungkan Rekening Antar Kantor

NPF DAN FDR

Kolektibiliti pembiayaan bermasalah (NPFs) gross Bank Riau Kepri Syariah per 31 Desember 2014 tercatat sebesar 3,65 % lebih besar jika dibandingkan NPF gross 31 Desember 2013 sebesar 2,23%. Dan terdapat peningkatan nominal NPF secara agregat dari Rp13,78 miliar pada 31 Desember 2013 menjadi Rp30,36 miliar pada 31 Desember 2014. Untuk lebih jelasnya mengenai kolektibiliti pembiayaan yang telah disalurkan sampai dengan Desember 2014 dan perbandingannya dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Kolektibiliti Pembiayaan Syariah
Per 31 Desember 2014

(Rp. Juta)

Kolektibiliti	Des-13		Des-14	
	Nominal	%	Nominal	%
Golongan I	589,256	95.19%	770,999	92.82%
Golongan II	15,992	2.58%	29,270	3.52%
Golongan III	1,726	0.28%	9,573	1.15%
Golongan IV	700	0.11%	3,851	0.46%
Golongan V	11,351	1.83%	16,932	2.04%
Jumlah / NPF	**619,026**	**2.23%**	**830,625**	**3.65%**

Sedangkan untuk rasio FDR sampai dengan Desember 2014 dan perbandingannya dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

2013		2014	
Pembiayaan	619.026	Pembiayaan	830.625
DPK	586.875	DPK	669.645
FDR	105,4%	FDR	124%

DANA QORDH DAN ZIS (ZAKAT INFAQ DAN SEDEKAH)

Dana Qordh

Dana Qordh sejak tahun 2014 telah disalurkan dalam bentuk pinjaman Al-qardh al-hasan kepada setiap Cabang Syariah dibawah Divisi Unit Usaha Syariah. Pinjaman Al-qardh al-hasan ditujukan kepada pengusaha mikro dan kecil sebagai andil Bank Riau Kepri Syariah dalam pengembangan ekonomi sektor Usaha Mikro.

Pinjaman Al-qardh al-hasan dibagi menjadi dua dimana calon nasabah peminjam dapat berasal dari perorangan atau kelompok. Dalam hal persyaratan pengajuan pinjaman Al-qardh al-hasan, Bank memberikan kemudahan kepada pemohon, namun Bank tetap memperhatikan unsur kehati-hatian (prudential). Dalam konteks pinjaman qordh ini, bank tidak dibenarkan mengambil margin. Nasabah sebagai peminjam wajib mengembalikan dana qordh kepada Bank meskipun Bank mempunyai opsi memberikan kelonggaran pembayaran kepada nasabah yang benar-benar tidak mampu dalam membayar angsurannya. Tabel dibawah ini mengambarkan perekembangan dana Qordh:

(dalam ribuan)

Dana Qordh	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Saldo Dana Qordh	84.388	137.844	206.975	288.226	393.997	473.029
Penggunaan Dana Qordh (-)	-	-	-	-	48.650	153.550
Saldo Ahkhir Dana Qordh	84.388	137.844	206975	288.226	345.347	319.479

Zakat Infaq dan Sedekah

Sumber dana Zakat Infaq dan Sedekah dapat berasal dari (zakat dari bank, zakat dari pihak luar bank serta infaq dan sedekah). Pada tahun 2014, Bank Riau Kepri Syariah telah melimpahkan seluruh dana ZIS kepada Badan Amil Zakat Provinsi Riau untuk disalurkan kepada yang berhak. Dalam hal ini Bank Riau Kepri syariah hanya ditunjuk sebagai UPZ (unit pengumpul zakat). Tabel dibawah ini mengambarkan perekembangan dana Zakat Infaq dan Sedekah:

(dalam ribuan)

ZIS	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Saldo Dana ZIS	107.019	116.490	145.845	170.523	45.373	64.455
Penggunaan Dana ZIS (-)	12.000	-	-	145.845	-	-
Saldo Akhir Dana ZIS	95.019	116.490	145.845	24.678	45.373	64.455







Tinjauan Pendukung Bisnis

"Sebagai Unit Kerja Pendukung, dengan memberikan dedikasi yang tinggi guna mendukung Unit Kerja Bisnis menjadikan teamwork yang solid dengan Kinerja yang Cemerlang".

URAIAN TENTANG SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia merupakan aset terpenting untuk bank, karena pertumbuhan bisnis Bank akan selalu diikuti dengan ketersediaan sumber daya manusia, baik dari segi jumlah maupun kualitasnya. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi perusahaan, Bank Riau Kepri telah mencanangkan program pengembangan kualitas sumber daya manusia profesional secara konsisten melalui sistem pengelolaan sumber daya manusia secara terpadu untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja secara berkelanjutan.

Strategi Pengembangan SDM

Hal-hal yang akan dijadikan capaian sasaran penerapan manajemen kompetensi:

1. Talent ;
2. Performance ;
3. Reward ;
4. Development, dan Recruitment & selection

Untuk menerapkan manajemen kompetensi tersebut, tahapan sistem pengembangan Sumber Daya yang berbasis kompetensi yang dilakukan yakni:

- Menghubungkan kompetensi pegawai dengan strategi, visi dan misi organisasi;
- Menjadi dasar dalam proses rekrutmen pegawai dan suksesi dalam rangka promosi pegawai dengan dasar yang jelas dan obyektif;
- Mendorong pencapaian kinerja individu dengan mengidentifikasi dan mengembangkan kompetensi yang dibutuhkan pegawai yang dihubungkan dengan sistem reward atas kinerja kelompok maupun individu;
- Mengevaluasi kebutuhan dan menyelenggarakan training pegawai sesuai dengan kebutuhan unit kerja;
- Menyelaraskan kompensasi dengan prestasi kerja;
- Mengembangkan sistem pembelajaran yang berkesinambungan;
- Mendukung pengelolaan manajemen kepegawaian melalui pengembangan Sistem Human Resources yang terintegrasi

  Berikut ini adalah beberapa program pengembangan SDM yang telah dilakukan selama tahun 2014:
- Implementasi CPM
- Membentuk Learning Center dan pengembangan E-Learning
- Pemberlakuan program pensiun dini bagi pegawai yang kurang produktif dan mempersiapkan jalur pengajuan pengunduran sukarela dengan kompensasi.
- Pengembangan database kepegawaian
- Memberlakukan ketentuan mengenai batas maksimum usia kerja sesuai dengan jabatan dengan pemberian kompensasi dan pesangon yang wajar kepada pegawai yang telah melebihi batas maksimum usia kerja di jabatan tersebut, untuk tahap awal frontliner batas usia kerja 36 tahun.
- Memberlakukan kontrak kerja berdasarkan target/kinerja untuk pengisian posisi Pimpinan Cabang/Capem
- Sistem reward bagi pegawai diberlakukan sesuai dengan kinerja/target masing-masing unit
- Untuk pengkaderan akan dilaksanakan pelatihan terpadu Officer Development Program (ODP), untuk kader manajer lini melalui Staff Development Program (SDP) dan untuk kader manajer melalui Manager Development Program (MDP).

a. Metode pelatihan

Metode pelatihan dan pengembangan dalam pengelolaan pelatihan dan pengembangan Human Capital dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Analisis kebutuhan
2. Penetapan Tujuan
3. Pengembangan Metode Pelatihan
4. Pengembangan Materi Pelatihan
5. Pelaksanaan Pelatihan
6. Evaluasi Pelatihan

Pelatihan berfokus pada tugas, pekerjaan, atau posisi yang spesifik yang membuat seseorang menyelesaikan pekerjaannya. Oleh sebab itu, topik pelatihan ditentukan oleh tingkat kepentingannya.

Setiap pegawai mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan kebutuhan karir pegawai itu sendiri. Pegawai akan mengikuti program pelatihan baik dalam rangka meningkatkan keterampilan maupun dalam melaksanakan tugas-tugasnya sekarang dan antisipasi pengembangan tugas kedepan. Dalam hal ini, proses belajar tidak ada hentinya, baik yang dilakukan secara sendiri (Self Learning) maupun bersama-sama (Classroom learning).

Pegawai juga harus siap menghadapi setiap perubahan yang mungkin terjadi dan wajib berbagi serta mentransfer ilmu pengetahuan yang dimilikinya kepada pegawai lainnya terutama di unit kerja masing-masing.

b. Rekrutmen

Rekrutmen di tahun 2014 sebanyak 202 orang Tenaga PTT dengan rincian :

> **Sebagai Unit Kerja Pendukung,** dengan memberikan **dedikasi** yang **tinggi** guna mendukung **Unit Kerja Bisnis** menjadikan **teamwork** yang **solid** dengan Kinerja yang **Cemerlang**

- PTT Administrasi : 6 orang
- PTT Customer Service : 15 orang
- PTT Cust. Service ULS : 12 orang
- PTT Pemasar : 16 orang
- PTT Teller : 74 orang
- PTT Cleaning Service : 20 orang
- PTT Petugas Ekspedisi : 1 orang
- PTT Pembantu RT Direksi : 2 orang
- PTT Satpam : 35 orang
- PTT Supir : 13 orang
- PTT Replenishment ATM : 8 orang

c. Pengelolaan Kinerja

Pengelolaan kinerja di Bank Riau Kepri diaplikasikan dalam 2 (dua) macam bentuk Penilaian Kinerja sebagai berikut :

1. Penilaian Kinerja Key Performance Indicator (KPI), yakni suatu sistem penilaian yang diperuntukan bagi unit kerja yang membuat sasaran kinerja. Instrumen/alat yang digunakan dalam pelaksanaan penilaian ini adalah Lembaran Penilaian KPI.

2. Penilaian Sasaran Kinerja Individu (SKI), yakni suatu sistem penilaian yang diperuntukan bagi para pegawai Bank. Instrumen/alat yang digunakan dalam pelaksanaan penilaian ini adalah Lembaran Penilaian SKI.

   Penilaian kinerja ini telah diberlakukan sejak tahun 2009 secara bertahap dengan terus melakukan penyempurnaan. Penilaian kinerja ini berbasis Balanced Scorecard dengan menggunakan 4 perspektif yaitu Financial, Customer Focus, Internal Process, dan Learning & Growth.

d. Pengembangan Kompetensi

Selama tahun 2014, Bank Riau Kepri telah mengembangkan program pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi sesuai kebutuhan organisasi berdasarkan Training Needs Analysis, sebagai berikut :

1. Program Sertifikasi Manajemen Risiko Memenuhi Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/25/PBI/2005 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/9/PBI/2006, maka program sertifikasi manajemen risiko merupakan standar kompetensi dan keahlian minimal yang harus dipenuhi oleh Pengurus dan Pejabat Bank. Dalam rangka untuk memenuhi ketentuan tersebut, Bank Bank Riau Kepri secara bertahap mengikutsertakan pengurus dan pejabat dalam program Sertifikasi Manajemen Risiko, dengan pemenuhan level sertifikasi sebagai berikut :

Tingkat/Level	Jumlah
Level I	153 Orang
Level II	136 Orang
Level III	41 Orang
Level IV	14 Orang
Level V	6 Orang
Jumlah	350 Orang

2. Program Pendidikan dan Pelatihan lainnya selama tahun 2014, sebanyak 308 jenis kegiatan pendidikan dan pelatihan telah dilaksanakan dengan jumlah peserta sebanyak 5713 orang yang dikelompokkan sebagai berikut :
   1) Pengurus
   2) Manajemen Puncak
   3) Manajerial
   4) Pendidikan dan Pelatihan Keahlian

e. Pelatihan yang sudah dilaksanakan

Selama tahun 2014, melalui Divisi HC, Bank Riau Kepri telah melaksanakan beberapa pelatihan in-house dan mengirim beberpa pegawai untuk mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh vendor. Berikut ini adalaha Rekapitulasi Diklat Per Desember 2014

NO	JENIS DIKLAT	JUMLAH 2012	JUMLAH 2013	JUMLAH 2014
1	In-House Training	302	154	127
2	Pelatihan Ekstern Dalam Negeri	101	187	181
3	Pelatihan Ekstern Luar Negeri	0	0	0
	Total	403	341	308

f. Unit Penunjang Layanan SDM

Sejak tahun 2010 telah dibuka Unit Konsultasi Pegawai yang bertujuan untuk melakukan fungsi coaching & counseling kepada pegawai-pegawai yang memiliki problem dalam pekerjaannya sehari-hari atau masalah dalam kehidupan pribadi atau rumah tangga sehingga tidak mempengaruhi kinerjanya. Unit Konsultasi Pegawai dikelola dan dibawahi langsung oleh Divisi Human Capital.

Pada tahun 2014 sebanyak 14 orang pegawai yang bermasalah telah di coaching & counseling oleh Unit Konsultasi Pegawai, dan saat ini telah terlihat perubahan peningkatan kinerja mereka.

g. Jumlah Karyawan Berdasarkan Level jabatan

No	Keterangan	2012			2013			2014		
		PEGAWAI TETAP	PEGAWAI TIDAK TETAP	TOTAL	PEGAWAI TETAP	PEGAWAI TIDAK TETAP	TOTAL	PEGAWAI TETAP	PEGAWAI TIDAK TETAP	TOTAL
1	PEMIMPIN DIVISI	15	0	15	13	0	13	15	0	15
2	STAF AHLI DIREKSI	0	0	0	3	0	3	6	3	6
3	PEMIMPIN BAGIAN KANTOR PUSAT	33	0	33	23	0	23	27	0	27
4	PEMIMPIN CABANG KONVEN-SIONAL	17	0	17	17	0	17	17	0	17
5	PEMIMPIN CABANG SYARIAH	2	0	2	2	0	2	2	0	2
6	WAKIL PEMIMPIN CABANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	PEMIMPIN CABANG PEM-BANTU	37	0	37	38	0	38	38	0	38
8	PEMIMPIN BAGIAN CABANG UTAMA / SETINGKAT	6	0	6	5	0	5	4	0	4
9	PEMIMPIN SEKSI / STAF / SETINGKAT	245	0	245	253	0	253	269	0	269
10	PELAKSANA	645	0	645	629	0	629	572	0	572
11	PEGAWAI MPP KANTOR PUSAT	0	0	0	0	0	0	6	0	6
12	TELLER/CUSTOMER SERVICE/ PEMASAR	0	335	335	0	390	390	0	448	448
13	SUPIR	21	62	83	20	68	88	19	85	104
14	SATPAM	39	244	283	38	263	301	35	294	329
15	PEGAWAI ADMINISTRASI	0	2	2	0	5	5	0	11	11

No	Keterangan	2012			2013			2014		
		PEGAWAI TETAP	PEGAWAI TIDAK TETAP	TOTAL	PEGAWAI TETAP	PEGAWAI TIDAK TETAP	TOTAL	PEGAWAI TETAP	PEGAWAI TIDAK TETAP	TOTAL
17	OPERATOR GENSET	0	10	10	0	10	10	0	10	10
18	PETUGAS EKSPEDISI	0	4	4	0	5	5	0	5	5
19	PEMBANTU RUMAH TANGGA	0	3	3	0	6	6	0	7	7
20	PETUGAS JAGA MALAM	0	11	11	0	11	11	0	10	10
21	PETUGAS KEBERSIHAN	0	99	99	0	105	105	0	115	115
22	TENAGA REPLENISHMENT ATM	0	0	0	0	0	0	0	9	9
	JUMLAH	1060	772	1832	1041	865	1906	1010	996	2006

h. Pegawai Tetap Berdasarkan Masa Kerja

Tabel berikut ini menggambarkan pegawai berdasarkan masa kerja sampai dengan 2014.

NO	MASA KERJA	JUMLAH 2012	JUMLAH 2013	JUMLAH 2014
1	> 30	48	39	38
2	25 - 30	74	72	63
3	20 - 25	25	24	25
4	15 - 20	78	76	69
5	10 - 15	63	61	98
6	5 - 10	363	362	554
7	< 5	409	407	163
	Total	1060	1041	1010

i. Pegawai Berdasarkan Usia

Tabel berikut ini menggambarkan pegawai berdasarkan masa kerja sampai dengan 2014.

NO	USIA PEGAWAI	JUMLAH 2012	JUMLAH 2013	JUMLAH 2014
1	50 – 55	97	105	91
2	40 - 49	164	174	167
3	30 - 39	698	828	818
4	23 - 29	804	730	768
5	< 23	69	69	162
	Total	1832	1906	2006

j. Pegawai Berdasarkan Pendidikan

a) Komposisi Pegawai Per Desember 2013

NO	KETERANGAN	PEGAWAI TETAP	PEGAWAI TIDAK TETAP	JUMLAH	KOMPOSISI
1	DOKTOR	1	0	1	0.05%
2	PASCA SARJANA	25	0	25	1.31%
3	SARJANA	705	296	1001	52.52%
4	SARJANA MUDA	197	95	292	15.32%
5	SLTA	101	449	550	28.86%
6	SLTP	5	24	29	1.52%
7	SD	7	1	8	0.42%
	JUMLAH	1041	865	1906	100%

b) Komposisi Pegawai Per Desember 2014

NO	KETERANGAN	PEGAWAI TETAP	PEGAWAI TIDAK TETAP	JUMLAH	KOMPOSISI
1	DOKTOR	1	0	1	0.05%
2	PASCA SARJANA	39	0	39	1.94%
3	SARJANA	689	358	1047	52.19%
4	SARJANA MUDA	179	106	285	14.21%
5	SLTA	93	506	599	29.86%
6	SLTP	4	25	29	1.45%
7	SD	5	1	6	0.30%
	JUMLAH	1010	996	2006	100%

k. Kesempatan kerja yang sama

Bank Riau Kepri memberikan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya kepada setiap pegawai dalam meningkatkan kompetensi dan mencapai jenjang karir tertinggi berdasarkan penilaian kinerja dan performa tanpa ada perbedaan maupun diskriminasi.

l. Reward & Punishment

Dengan memberikan penghargaan kepada pegawai, Bank berusaha memberikan apresiasi dan perhatian kepada pegawainya untuk terus berprestasi dan penghargaan bagi pegawai yang mempunyai masa kerja tertentu. Hal ini adalah salah satu upaya Bank untuk memotivasi dan meningkatkan kualitas SDM guna membangun hubungan dan menumbuhkan rasa memiliki (sense of belonging) pegawainya terhadap perusahaan.

Selama tahun 2014, reward & punishment yang diberikan adalah:

- Pemberian Penghargaan Masa Bakti kepada 29 orang pegawai dengan rincian:
  - Masa Bakti 30 tahun sebagai pegawai Bank Riau Kepri diberikan kepada 19 orang pegawai.
  - Masa Bakti 25 tahun sebagai pegawai Bank Riau Kepri diberikan kepada 2 orang pegawai.
  - Masa Bakti 20 tahun sebagai pegawai Bank Riau Kepri diberikan kepada 5 orang pegawai.
  - Masa Bakti 15 tahun sebagai pegawai Bank Riau Kepri diberikan kepada 3 orang pegawai.
- Menjatuhkan sanksi administrasi ringan dan berat kepada 32 orang pegawai dengan rincian:
  - Sanksi administrasi ringan dijatuhkan kepada 30 orang pegawai.
  - Sanksi administrasi berat dijatuhkan kepada 2 orang pegawai.

m. Beban Tenaga Kerja

Total beban tenaga kerja Bank Riau Kepri tahun 2014 adalah sebesar Rp485.134 juta sedangkan tahun 2013 sebesar Rp 428.416 juta. Tabel berikut ini menggambarkan beban tenaga kerja 2014 dan 2013.

Uraian	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Imbalan kerja dan tunjangan direksi	3,369,600,000	2,948,400,000
Imbalan kerja dan tunjangan pegawai	126,421,901,473	124,772,954,689
Honor dewan komisaris	2,549,760,000	2,574,560,000
Beban lembur	4,077,013,794	1,704,933,038
Perawatan kesehatan	11,962,336,135	9,908,566,694
Beban cuti	12,649,254,492	14,522,198,650
Iuran pensiun, astek dan THT	19,542,984,307	19,104,303,716
Jasa produksi	100,114,089,890	84,624,055,254
Tantiem pengurus	25,028,522,472	21,156,013,813
Pendidikan dan pelatihan	21,504,078,468	16,680,880,966
Penghargaan dan Jasa Masa Bakti	10,157,881,665	12,467,336,535
Insentif bonus	29,585,775,096	20,165,935,037
Olah Raga	1,807,576,779	4,232,067,639
Pakaian Dinas	11,137,341,000	10,806,316,000
Tunjangan Hari raya	32,381,078,400	32,167,379,000
Uang Makan Pegawai	13,987,088,750	13,073,396,550
Seleksi Calon Pegawai	683,000	7,260,500
Tunjangan PPh pasal 21	29,140,983,327	30,016,538,677
Ibadah Haji	97,575,372	35,221,000
Beban imbalan pasca kerja	23,940,931,485	-
Beban Makan Siswa Magang	630,775,000	-
Tenaga Kerja lainnya	5,047,089,903	3,552,359,812
JUMLAH	485,134,320,808	424,520,677,570

n. Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2015

Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan komponen penting dalam membangun pondasi perusahaan untuk terus tumbuh. Program kerja dalam rangka pengembangan fungsi Human Capital di tahun 2015 adalah:

- Penyempurnaan ketentuan tentang jenjang karir dengan membangun Sistem Talent Management
- Pengukuran kinerja yang objektif yang dibarengi dengan ketentuan reward & punishment yang dapat memberikan motivasi bagi pegawai agar dapat meningkatkan kinerja
- Pengembangan penilaian secara individual pegawai terintegrasi melalui aplikasi sistem yang dapat dipantau dan dievaluasi di setiap penilaian kinerja.
- Pengembangan sistem E-learning,
- Melanjutkan pengembangan Database kepegawaian
- Melaksanakan sistem Multi Level Entry untuk mendapatkan tenaga-tenaga kerja yang handal dan siap menghadapi persaingan perbankan pada saat ini.
- Melakukan kajian Job Evaluation demi kepuasan pegawai sehingga nantinya akan didapat persepsi keadilan atas kompensasi sesuai dengan Job Evaluation yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.
- Pemberlakuan sistem reward bagi pegawai sesuai dengan kinerja/target masing-masing unit yang tercapai serta dipadukan dengan capaian masing-masing target individu.

URAIAN TENTANGTEKNOLOGI DAN SISTEM INFORMASI

Di era globalisasi ini, kehidupan manusia tidak dapat terlepas dari arus komunikasi dan informasi telah menjelma menjadi suatu kekuatan tersendiri dalam persaingan global yang semakin kompetitif. Kehadiran teknologi online, seperti: teknologi berbasis internet sebagai sebuah fenomena kemajuan teknologi menyebabkan terjadinya percepatan globalisasi dan lompatan besar bagi penyebaran informasi dan komunikasi di seluruh dunia. Begitupula halnya dengan dunia perbankan, peran teknologi dan sistem informasi sangatlah mutlak, dimana kemajuan suatu sistem perbankan sudah barang tentu ditopang oleh peran besar teknologi dan sistem informasi.

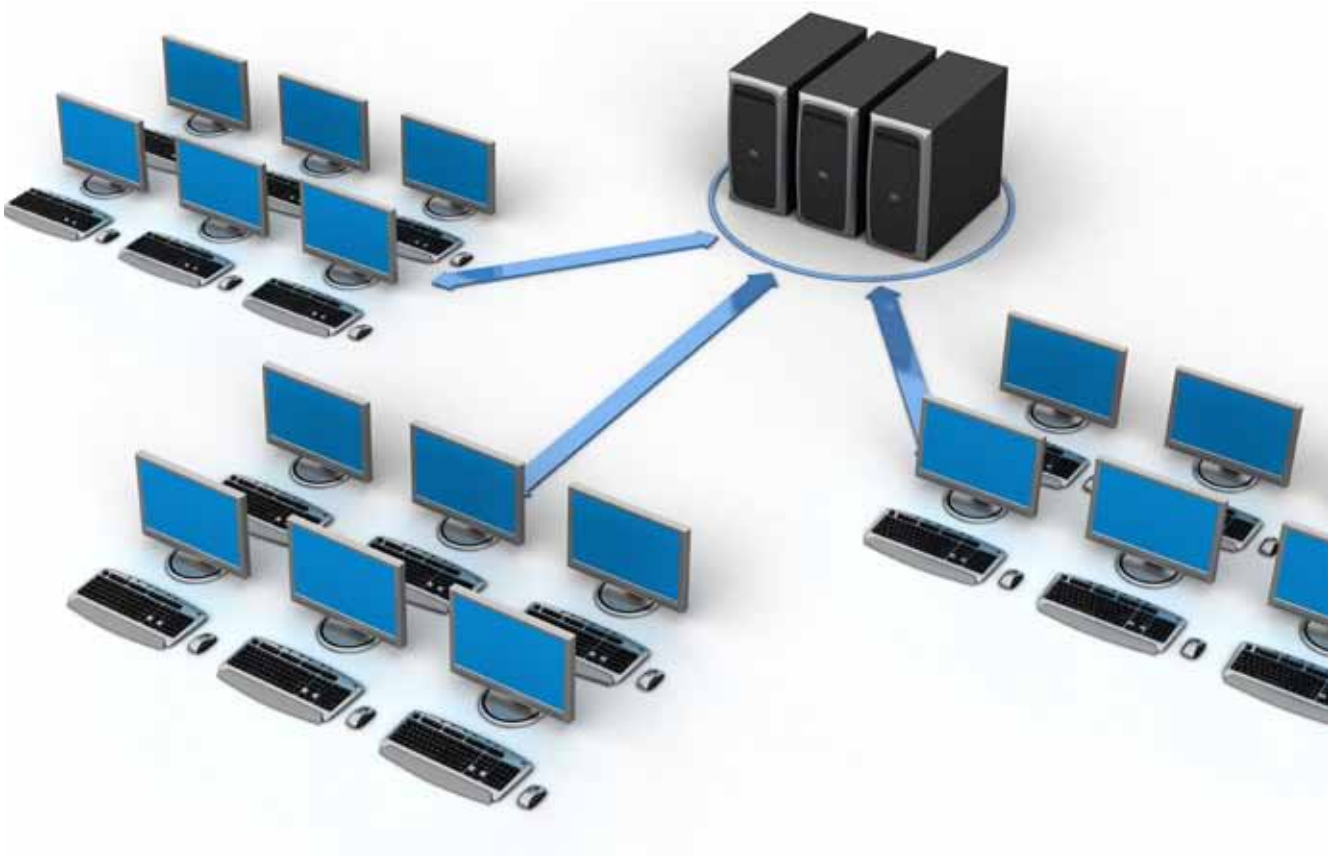
Semakin berkembang dan kompleksnya fasilitas yang diterapkan perbankan untuk memudahkan pelayanan, itu berarti semakin beragam dan kompleks pula adopsi teknologi yang dimiliki oleh bank tersebut. Tidak dapat dipungkiri, dalam setiap bidang termasuk perbankan penerapan teknologi dan sistem informasi bertujuan selain untuk memudahkan pelayanan terhadap nasabah, juga bertujuan untuk semakin memudahkan operasional internal perusahaan. Apalagi untuk saat ini, dalam dunia perbankan hampir semua produk yang ditawarkan kepada nasabah hampir serupa, sehingga persaingan yang terjadi dalam dunia perbankan adalah bagaimana memberikan produk yang serba mudah dan serba cepat.

Hal ini tentunya manjadi tuntutan bagi perbankan, karena mau tidak mau bank yang mempunyai ruang lingkup kerja yang luas, ditambah dengan operasional-operasional yang sangat banyak harus ditunjang dengan suatu teknologi untuk memudahkan, mengefisienkan dan mengefektifkan kinerja bank. Melalui pemanfaatan teknologi dan sistem informasi yang terintegrasi, maka waktu dan tempat bukanlah menjadi penghalang untuk melakukan transaksi perbankan.

Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi

Beberapa program pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi yang dilaksanakan di tahun 2014 antara lain:

- Me-maintenance aplikasi-aplikasi bisnis bank yang sudah ada.
- Pengembangan atau me-replace aplikasi yang dibutuhkan



bank sesuai dengan kebutuhan bisnis, seperti mendukung pengembangan pruduk dan layanan baru.
- Pengembangan infrastruktur dan jaringan komunikasi (LAN, WAN) untuk men-support pertumbuhan bank.
- Pembuatan data center di gedung Dang Merdu Bank Riau Kepri
- Upgrade infrastruktur (kartu ATM chip)
- Penambahan keamanan dan monitoring akses ke core banking (BSAVE)
- Pengembangan aplikasi CRC (Contact Respond Centre) pendataan seluruh komplain dan tracing complain
- Pengembangan MIS, Digital Dashboard

Realisasi Dana

Dari berbagai program pengembangan IT di Bank Riau Kepri, Divisi IT sebagai unit pengelola telah merealisasikan dana pengembangan IT sebesar Rp31.146juta, dengan riancian sebagai berikut:

No	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Infranstruktur Data Center DMBRK	6,045,000,000	Pembuatan Data Center di Gedung DMBRK
2	Perangkat Pendukung KPS-DMBRK	3,022,000,000	Pembelian Perangkat Pendukung untuk KPS di DMBRK
3	Server Consolidation	1,663,000,000	Pembelian Blade Server untuk Efisiensi Server
4	Pengembangan Aplikasi (CR)	4,292,000,000	Antisipasi Penambahan Fitur untuk Pengembangan Bisnis
5	Spool Management	661,000,000	Aplikasi pengarsipan Spool File untuk backup Data Spool
6	HWMA/SWMA	3,010,000,000	Maintenance Hardware AS/400
7	HWMA/SWMA	1,900,500,000	Penambahan Lisensi untuk 2014
8	ATS Xlink	550,000,000	Maintenance Switching
9	Backup Switching	1,921,500,000	Pengadaan Backup Online Backup Switching
10	Upgrade Infrastruktur (Kartu ATM Chip)	6,128,041,974	Infrastruktur Kartu ATM CHIP sesuai regulasi BI
11	ATS Mimix	500,000,000	Maintenance/ATS Mimix System
12	BSAVE (Security BV)	370,500,000	Penambahan Proteksi Keamanan dan Monitoring Akses ke C/B
13	CRC (Contact Respond Center)	818,041,974	Aplikasi Pendataan Seluruh Complain dan Tracing Compalin
14	Tape Backup	115,000,000	Media Backup untuk Proses EOD/EOM/EOY
15	Token SMS Notifikasi	150,000,000	Token SMS Notifikasi
	Total	31,146,583,948	

Mitra Bank Riau Kepri untuk Pengembangan System Teknologi Informasi

Pengembangan produk dan layanan yang berbasis teknologi dan sistem informasi yang menjadi fokus Bank Riau Kepri, dapat dipenuhi dengan mengandeng beberapa mitra kerja. Kendala yang dialami oleh bank dengan penerapan teknologi informasi ini adalah sangat kompleks serta mahalnya teknologi informasi tersebut. Dengan kerjasama yang terjalin baik dengan beberapa mitra, tentunya Bank Riau Kepri dapat lebih mengefisienkan biaya investasi. Berikut ini beberapa mitra Bank Riau Kepri dalam pengembangan teknologi dan sistem informasi:



Implikasi Kepada Perusahaan

Dalam pengembangan bisnis perbankan, tujuan utama penerapan teknologi dan sistem informasi selain untuk semakin memudahkan pelayanan terhadap nasabah, juga untuk memudahkan operasional internal perusahaan. Beberapa indikator yang dapat dilihat adalah seperti:

1. Peluncuran layanan dan fasilitas terbaru yakni mobile banking (M-Banking) dari Bank Riau Kepri ini.
2. Peluncuran layanan Cash Deposit Machine (CDM) atau biasa disebut ATM Setor Tunai, dimana nasabah dapat menyetorkan uangnya ke tabungan selama 24 jam dan 7 hari tanpa libur.
3. Bank Riau Kepri meluncurkan kliring antar wilayah (intercity clearing)
4. Penggunaan sistem Aplikasi E-Dana Pensiun
5. Pengembangan Digital Dashboard

Beberapa produk dan layanan terbaru berbasis teknologi dan sistem informasi yang dikembangkan Bank Riau Kepri telah meningkatkan jumlah nasabah dan meningkatkan loyalitas nasabah. Sedangkan pengembangan digital Dashboard sebagai sebuah solusi bagi knowledge worker dengan menggabungkan berbagai sumber informasi untuk menampilkan informasi penting sesuai dengan kebutuhan hanya dalam satu layar. Informasi ini ditampilkan dalam web sehingga memudahkan pemakai dalam mengakses data yang diperlukan, karena hingga saat ini banyak pegawai yang mengalami kesulitan dalam krisis waktu, informasi yang tidak akurat mengenai kondisi industri, perusahaan, dan juga keadaan organisasi.

Digital Dashboard dirancang untuk memungkinkan pegawai untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, sehingga dapat meningkatkan produktifitas dan efisiensi. Disisi lain akan membantu pegawai untuk lebih fokus pada pekerjaannya khususnya dalam membuat keputusan berdasarkan informasi yang tepat.

Rencana Pengembangan Sistem Informasi Manajemen 2015

Persaingan bisnis perbankan akan didominasi oleh penguasaan akses teknologi yang uptode dan user friendly, sehingga untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Riau Kepri menetapkan strategi agar sejajar dengan bank-bank lain. Strategi yang digunakan untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan perangkat lunak aplikasi Rekonsiliasi Transaksi ATM sentralisasi.
2. Pemanfaatan Database Kependudukan yang ada pada E-KTP dengan Direktorat Jendral Kependudukan dan catatan sipil.
3. Penyempurnaan Aplikasi Inhouse Development.
4. Upgrade switching untuk implementasi kartu ATM Chip.
5. Implementasi MPN G-2 di ATM dan EDC.
6. Pengembangan Aplikasi penyelesaian keluhan ATM.
7. Implementasi SKN BI-NG 2.
8. Pemeliharaan Jaringan, website, dan email server.

URAIAN TENTANG MANAJEMEN RISIKO

Dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat dan mampu berkembang serta bersaing secara nasional maupun internasional, maka Bank perlu meningkatkan kemampuan untuk menyerap risiko yang disebabkan oleh kondisi kritis dan/atau pertumbuhan kredit aktiva produktif perbankan yang berlebihan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas permodalan Bank sesuai dengan standar yang berlaku yaitu Basel. Pengelolaan 8 (delapan) jenis risiko pada Bank Riau Kepri terus diupayakan agar sejalan dengan Road Map Basel I, Basel II dan kerangka Basel III secara bertahap sesuai dengan regulasi.

Penerapan manajemen risiko di Bank Riau Kepri ditujukan untuk menjaga permodalan Bank, mendukung proses pengambilan keputusan, mengoptimalkan pertumbuhan bisnis dalam mencapai laba, meningkatkan nilai perusahaan dan melindungi reputasi Bank. Risiko adalah bagian dari bisnis Bank Riau Kepri, sehingga dalam mendukung penerapan manajemen risiko Bank menggunakan pendekatan pengelolaan risiko melalui permodalan dan pengelolaan risiko melalui aktivitas operasional. Hal ini dilakukan Bank dengan cara mengidentifikasi, menilai, mengawasi dan mengelola setiap jenis risiko yang sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Bank Riau Kepri. Pengelolaan risiko melalui permodalan disesuaikan dengan rencana strategis dan bisnis jangka panjang, serta kebijakan alokasi modal secara efisien sesuai dengan segmen bisnis yang memiliki profil risk-return yang optimal. Hal ini bertujuan untuk memenuhi ekspektasi stakeholder, investor dan regulator.

Perkembangan industri perbankan juga memberi andil dalam perubahan pendekatan penilaian yang mengarah kepada pendekatan pengawasan berdasarkan risiko, yaitu peningkatan eksposur risiko dan profil risiko serta penerapan metode pengawasan berbasis risiko (Risk Based Audit) tersebut selanjutnya akan mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan Bank. Penerapan manajemen risiko di Bank Riau Kepri mengacu pada ketentuan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.11/25/PBI/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, PBI Nomor 13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Surat Edaran (SE) Bank Indonesia No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, SE BI No.13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Perubahan Atas Surat Edaran No.5/21/DPNP perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Ketentuan ini dalam rangka meningkatkan efektivitas penilaian tingkat kesehatan bank dengan pendekatan berdasarkan risiko dan menggunakan 4 faktor pengukuran yaitu :

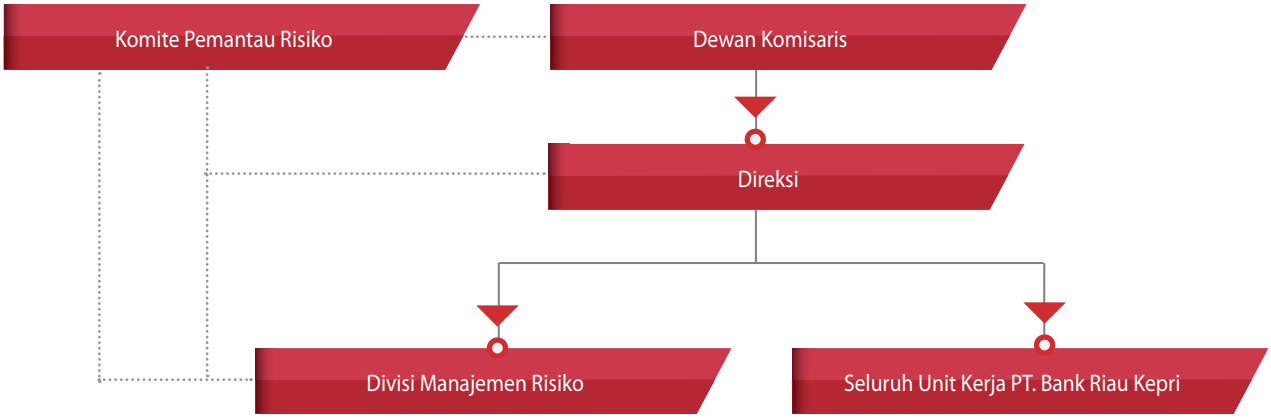
1. Profil Risiko (Risk Profile)
2. Good Corporate Governance (GCG)
3. Rentabilitas (Earnings)
4. Permodalan (Capital)

KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO

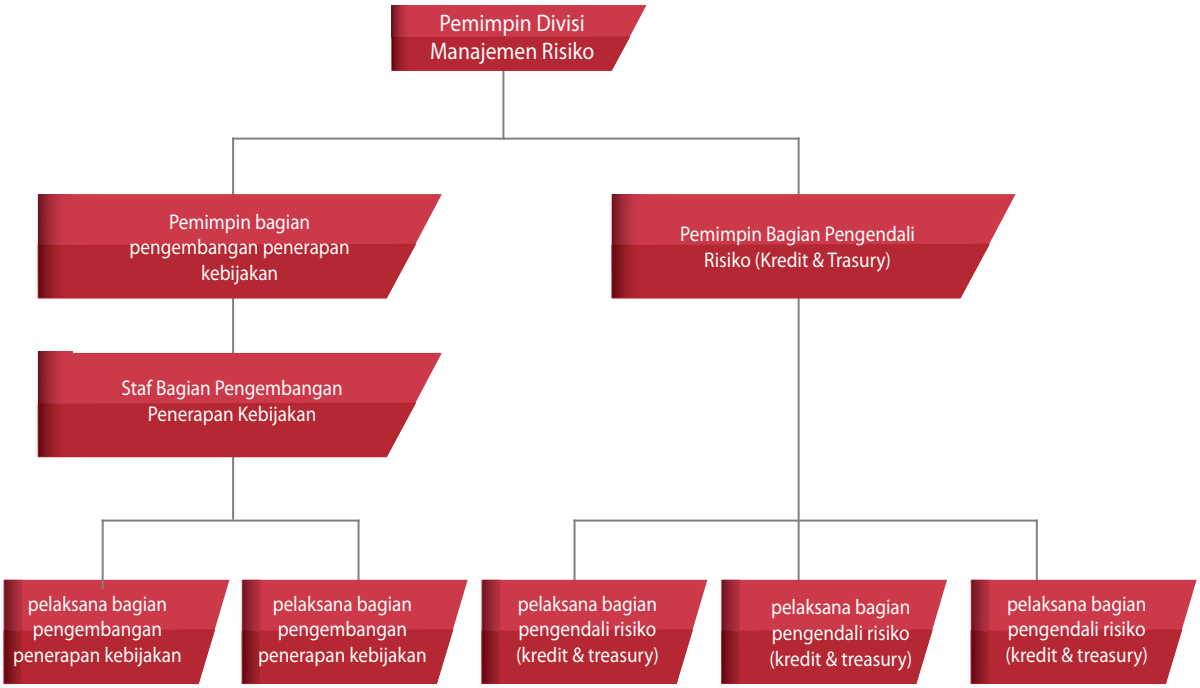
Seiring dengan pertumbuhan bisnis, Direksi secara berkala telah melakukan penyempurnaan atas kebijakan, infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia secara periodik dengan tetap mengacu pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan ketentuan Basel II serta international best practices, khususnya pada pengelolaan risiko kredit, pasar dan operasional dengan menerapkan proses manajemen risiko yang ideal di setiap lini bisnis. Hal ini dilakukan Bank Riau Kepri dengan senantiasa meningkatkan Risk Awarness dalam penerapan budaya peduli risiko yang terus diimplementasikan kepada seluruh pegawai Bank Riau Kepri pada setiap jenjang pada setiap pelaksanaan aktivitas operasional dan non operasional perbankan.

Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko dan Direksi melalui Executive Committee yakni Asset & Liability Committee (ALCO) dan Komite Manajemen Risiko, secara aktif melakukan proses pengelolaan risiko. Direksi juga memiliki Divisi Manajemen Risiko yang berdasarkan Struktur Organisasi Bank Riau Kepri berada di bawah Direktorat Kepatuhan dan Manajemen Risiko sehingga pengelolaan risiko yang dilakukan lebih menyeluruh, terpadu, terukur dan terkendali. Dalam melaksanakan aktivitas operasionalnya, Divisi Manajemen Risiko dibagi menjadi 2 (dua) bagian besar, yaitu Bagian Pengendali Risiko (Kredit & Treasury) yang melakukan strategi manajemen risiko dan pengelolaan risiko yang terjadi di Bank Riau Kepri dan Bagian Pengembangan dan Penerapan Kebijakan yang berfungsi melakukan review terhadap kebijakan yang terkait dengan risiko dan aktivitas operasional Bank serta produk dan aktivitas baru.

INFRASTRUKTUR MANAJEMEN RISIKO



STRUKTUR ORGANISASI DIVISI MANAJEMEN RISIKO



Bank Riau Kepri telah memiliki Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko yang secara berkala di-review sesuai dengan perubahan Peraturan Bank Indonesia. Kebijakan ini dijadikan acuan dalam pengelolaan risiko sehingga menjadi lebih detail dan spesifik. Divisi Manajemen Risiko bertanggung jawab dalam pengelolaan risiko-risiko yang dihadapi Bank, termasuk mengembangkan tools yang mendukung. Pembentukan organisasi manajemen risiko pada Bank Riau Kepri didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia mengenai Penerapan Manajemen Risiko, penerapan Basel II dan Surat Keputusan Direksi Nomor 69/KEPDIR/2013 tanggal 31 Juli 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direksi Nomor 79/KEPDIR/2008 tentang Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Riau, serta kebutuhan pengelolaan risiko yang lebih baik. Sesuai Keputusan Komisaris Nomor 001/KEPDKS/2011 tanggal 28 Maret 2011 tentang Pedoman Kerja Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi Bank Riau Kepri dibentuk bertujuan untuk melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, guna memberikan rekomendasi dan saran atas berbagai kegiatan perusahaan sehingga perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan terhadap Direksi. Anggota dari Komite Pemantau Risiko pada Bank Riau Kepri beranggotakan Komisaris dan Anggota Independen dengan keahlian di bidang manajemen risiko dan keuangan. Komite Manajemen Risiko (RMCO) berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 093A/KEPDIR/ tanggal 17 Desember 2014 beranggotakan Direksi dan Pemimpin Divisi yang merupakan Anggota Tetap maupun Anggota Tidak Tetap, yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Bertanggung jawab atas penerapan manajemen risiko yang efektif pada Bank Riau Kepri
2. Menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko
3. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko
4. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi seluruh peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penerapan manajemen risiko
5. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku mengenai penerapan manajemen risiko
6. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia yang menyangkut penerapan manajemen risiko.
7. Mengembangkan budaya risiko pada seluruh jenjang organisasi
8. Menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal
9. Berwenang dan bertanggungjawab terhadap perbaikan atau penyempurnaan penerapan manajemen risiko yang dilakukan secara berkala, sebagaimana diatur/dipersyaratkan di dalam Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum
10. Menjalankan dan memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank dalam setiap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab

TATA KELOLA MANAJEMEN RISIKO

Sasaran kebijakan manajemen risiko Bank Riau Kepri adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya aktivitas/ kegiatan usaha Bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi dan berkesinambungan. Sehingga manajemen risiko berfungsi sebagai pemberi peringatan dini (early warning system) terhadap kegiatan usaha Bank Riau Kepri.

Bank Riau Kepri menerapkan manajemen risiko yang efektif adalah salah satu elemen penting dari tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Perbankan harus secara proaktif memastikan dapat dicapainya kesinambungan, pelayanan masyarakat dan pengembangan tujuan organisasi yang sejalan dengan visi dan misi dalam perspektif memenuhi ekspektasi para stakeholder-nya.

Salah satu kunci sukses pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen risiko yaitu adanya risk awareness dan kemampuan teknis yang memadai pada seluruh unit kerja di Bank Riau Kepri, yang menjadi tanggung jawab dan melibatkan seluruh unit kerja di Bank Riau Kepri. Untuk itu diselenggarakan pelatihan internal maupun eksternal secara rutin, baik bagi pegawai dilingkungan Divisi Manajemen Risiko maupun unit kerja lain. Selain itu juga rutin dilaksanakan sosialisasi program manajemen risiko termasuk budaya peduli risiko yang sejalan dengan internalisasi budaya perusahaan.

Penerapan Budaya Peduli Risiko bagi Perusahaan bertujuan untuk :

1. Perwujudan praktek tata kelola Bank yang sehat (good corporate governance)
2. Menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam meningkatkan daya saing Bank.

3. Mengamankan aset bank maupun Dana Pihak Ketiga di Bank yang dapat dimanfaatkan oleh setiap level pada organisasi Bank.
4. Menjadi sistem deteksi dini yang efisien dalam memitigasi praktek perbankan yang tidak sehat.

Penerapan Budaya Peduli Risiko bagi Pegawai bertujuan untuk :

1. Memberi arah yang jelas dalam bersikap dan berperilaku di dalam perusahaan.
2. Menumbuhkan kesadaran pegawai (employee awareness) atas penyebab dan dampak Fraud
3. Meningkatkan kewaspadaan pegawai terhadap risiko dalam setiap kegiatan bisnis bank.

Sejalan dengan upaya menumbuhkan budaya manajemen risiko, Bank Riau Kepri telah menerapkan nilai-nilai budaya peduli Risiko yang disingkat RISK.









Pedoman penerapan standar manajemen risiko Bank Riau Kepri berdasarkan pada :

1. Penerapan manajemen risiko secara umum, yang mencakup mengenai pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi; kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit; kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko; dan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
2. Penerapan manajemen risiko untuk masing-masing risiko, yang mencakup penerapan manajemen risiko yang meliputi 8 (delapan) risiko.
3. Penilaian profil risiko, yang mencakup penilaian terhadap risiko inheren dan penilaian terhadap kualitas penerapan manajemen risiko yang mencerminkan sistem pengendalian risiko (risk control system), baik untuk bank secara individual maupun untuk bank secara konsolidasi.

PENGELOLAAN RISIKO PADA AKTIVITAS OPERASIONAL

Pengelolaan risiko melalui aktivitas operasional bank ditujukan untuk mengelola 8 (delapan) risiko yang ada, namun lebih ditekankan pada pengelolaan risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/12/PBI/2013 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum tanggal 12 Desember 2013. Bank Riau Kepri menerapkan risk appetite dan risk tolerance dalam bentuk Kebijakan Direksi yang mengatur kebijakan dan sistem limit yang disusun dan diusulkan unit bisnis dan Divisi Manajemen Risiko dan disetujui oleh Komite Manajemen Risiko.

Kebijakan limit tidak saja berfungsi dalam proses pengendalian risiko namun juga mendorong strategi bisnis dan ekspansi bisnis ke dalam koridor pertumbuhan dengan profil risk-reward yang optimal. Sasaran-sasaran strategis dalam penetapan limit melalui pencapaian ROE sebesar 22% secara konsisten meliputi :

1. Pertumbuhan Laba sebelum pajak
2. Net Interest Margin
3. Pendapatan fee terhadap total pendapatan operasional
4. Tingkat pertumbuhan DPK
5. Tingkat pertumbuhan modal
6. Penurunan NPL bruto
7. Rasio BOPO
8. Optimalisasi fungsi SBU
9. Optimalisasi sarana pendukung
10. Perluasan jaringan distribusi
11. Peningkatan kualitas layanan

Bank Riau Kepri juga menyusun Laporan Profil Risiko sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum pasal 24, yaitu Bank wajib menyampaikan Laporan Profil Risiko kepada Bank Indonesia secara triwulanan untuk posisi bulan Maret, Juni, September dan Desember. Namun dengan telah dikeluarkannya Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia No.5/21/DPNP Perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, maka penilaian profil risiko menjadi bagian dari Laporan Tingkat Kesehatan Bank. Penilaian Profil Risiko mencakup penilaian terhadap risiko inheren dan penilaian terhadap kualitas penerapan manajemen risiko yang mencerminkan sistem pengendalian risiko (risk control system).

Bank Riau Kepri berinisiatif untuk melakukan penyempurnaan Laporan Profil Risiko baik pada kebijakan dan sistem, maupun tools yang digunakan. Profil risiko disusun berdasarkan risk self assessment, dimana secara umum portofolio yang dimiliki Bank Riau Kepri masih dalam batas yang masih dapat diantisipasi risikonya. Hal ini tercermin dari rasio kecukupan modal yang berada di atas ketentuan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan masih memadai untuk meng-cover risiko-risiko yang akan terjadi.

PROFIL RISIKO BANK RIAU KEPRI

Profil Risiko	2014	2013	2012
Peringkat Tingkat Risiko	*Low to Moderate*	*Low to Moderate*	*Low to Moderate*
Risiko Inheren	*Low to Moderate*	*Low to Moderate*	*Low to Moderate*
Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	*Satisfactory*	*Fair*	*Fair*

Risiko yang sering dihadapi dalam pelaksanaan aktivitas usaha Bank Riau Kepri antara lain :

1. **Risiko Kredit (Credit Risk)**

   Pengelolaan risiko kredit bertujuan untuk mengukur, mengantisipasi dan meminimalisir kerugian akibat kegagalan nasabah atau debitur atau pihak lawan (counterparty) memenuhi kewajibannya. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti perkreditan (penyediaan dana), treasury dan investasi dan pembiayaan perdagangan, yang tercatat dalam banking book maupun trading book, termasuk transaksi komitmen dan kontijensi nasabah.

Kebijaksanaan Perkreditan

Sebagai pedoman dalam pengelolaan kredit Bank Riau Kepri memiliki pedoman Kebijaksanaan Perkreditan Bank sesuai SK Nomor 22/KEPDIR/2013 tanggal 25 Februari 2013, termasuk di dalamnya visi dan misi perkreditan Bank Riau Kepri, kebijaksanaan pokok dalam perkreditan, profesionalisme dan integritas pejabat perkreditan dan kode etik pejabat perkreditan. Bank Riau Kepri menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian kredit secara "4 eyes principle" dan penerapan manajemen risiko (identifikasi, pengukuran, pengendalian dan monitoring) guna memitigasi risiko yang akan timbul dari kegiatan perkreditan tersebut.

Proses Persetujuan Kredit



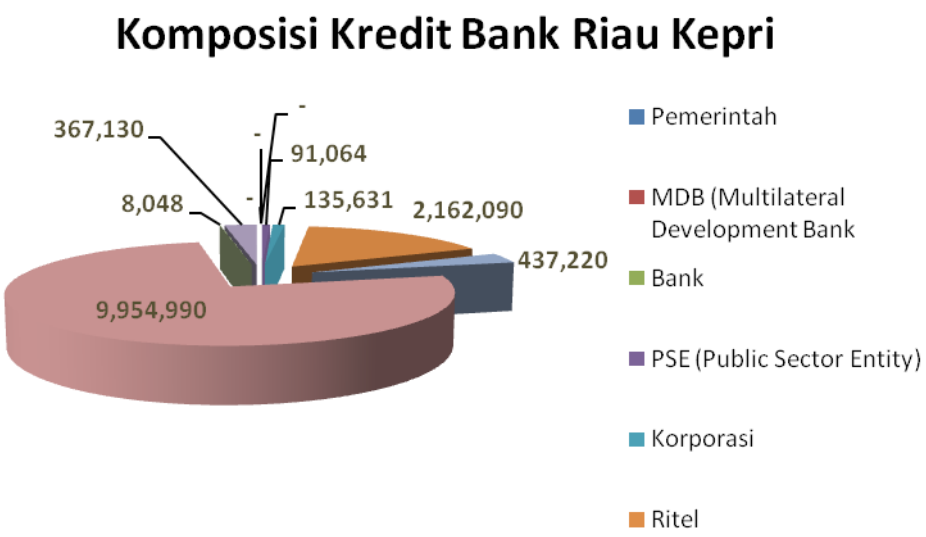
Profil Risiko Kredit

Profil Risiko Kredit			
Keterangan	**2014**	**2013**	**2012**
Profil Risiko	*Low to Moderate*	*Moderate*	*Low to Moderate*
Risiko Inheren	*Low to Moderate*	*Moderate*	*Low to Moderate*
Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	*Satisfactory*	*Fair*	*Fair*

Profil risiko kredit Bank Riau Kepri tahun 2014 berada pada tingkat low to moderate dengan risiko inheren low to moderate dan kualitas penerapan manajemen Risiko satisfactory. Pada tahun 2014 nominal kredit bermasalah Bank Riau Kepri mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pada triwulan pertama tahun 2014 NPL Gross tercatat sebesar 2,90% dan pada akhir tahun turun menjadi 2,79% atau terjadi perbaikan sebesar 0,11%. Kredit kualitas rendah juga perlu mendapat perhatian Bank. Per akhir Desember 2014, rasio kredit kualitas rendah sebesar 5,65% dari total kredit. Bank telah menyediakan CKPN yang memadai, baik untuk kredit kualitas rendah maupun kredit bermasalah (NPL).

Untuk pengelolaan risiko kredit pada kredit komersial dan kredit konsumer & mikro, bank telah melakukan pengembangan loan scoring dan rating debitur yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan pengukuran risiko gagal bayar dari setiap debitur sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/6/DPNP tanggal 18 Februari 2012 perihal Pedoman Perhitungan Aset Tertimbangan Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan. Sedangkan pada tingkat portofolio penempatan dana bank counterparty melakukan pengukuran dan pemantauan tingkat kesehatan bank secara keseluruhan serta perkembangan usaha bank.

Komposisi Kredit Bank Riau Kepri Berdasarkan Kategori Portofolio



Secara umum portofolio penyediaan dana terdiversikasi secara baik bila dilihat dari aspek konsentrasi per akun aset maupun konsentrasi kredit kepada debitur inti. Namun yang perlu perhatian adalah adanya konsentrasi kredit dilihat dari persektor ekonomi atau sektor industri Lainnya (Konsumer) serta kredit kepada pegawai/pensiunan. Kredit pada pegawai/pensiunan dilihat dari kategori portofolio mencapai 75,67% dari total kredit sebesar Rp13.156.173 juta per akhir Desember 2014. Adanya konsentrasi kredit yang tinggi tersebut dapat meningkatkan risiko kredit pada saat terjadi krisis ekonomi, terutama bila terjadi penurunan daya beli pegawai/pensiunan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Beberapa langkah yang dilakukan Bank Riau Kepri dalam menunjang pengelolaan, mitigasi risiko kredit serta kualitas penerapan manajemen risiko adalah :

- Melakukan pemantauan dan peningkatan pengawasan terhadap portofolio kredit yang telah disalurkan serta memberikan saran dan rekomendasi kepada manajemen.
- Melakukan proses manajemen risiko kredit yang cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko kredit.
- Monitoring terhadap kualitas penyaluran kredit telah dilakukan secara berkala setiap bulannya melalui laporan pemantauan portofolio kredit yang dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko untuk disampaikan kepada Direksi dan diteruskan ke unit kerja terkait untuk segera ditindaklanjuti sesuai dengan disposisi Direksi.
- Dalam rangka pengendalian risiko kredit, Divisi Manajemen Risiko bersama Divisi Komersial, Divisi Konsumer & Mikro, Divisi Unit Usaha Syariah, SKAI maupun Divisi Penanganan Kredit Bermasalah membahas tentang NPL secara rutin yang sudah dimulai pada tahun 2015.
- Divisi Komersial, Divisi Konsumer dan Pimpinan Cabang melakukan peninjauan langsung kredit bermasalah pada beberapa jaringan kantor untuk segera mencari solusi dan tindak lanjut penyelesaian kredit bermasalah.
- Direksi terutama Direktur Kredit & Syariah secara rutin melakukan rapat evaluasi dan monitoring NPL bersama Divisi Komersial, Divisi Konsumer & Mikro, Staf Direksi dan Pimpinan Cabang, untuk membahas pencapaian penurunan NPL sesuai target yang telah ditetapkan.
- Budaya manajemen risiko telah cukup kuat dan telah disosialisasikan kepada seluruh level organisasi.
- Dalam proses pembiayaan kredit berskala besar, Divisi Manajemen Risiko juga berkontribusi dalam kapasitasnya memberikan rekomendasi/ saran dari sudut pandang manajemen risiko terkait analisis identifikasi risiko beserta mitigasinya sebagai upaya meminimalisasi potensi risiko kredit.

2. Risiko Pasar (Market Risk)

Risiko pasar merupakan risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar dari portofolio yang dimiliki oleh Bank, yang dapat merugikan Bank (adverse movement). Yang dimaksud dengan variabel pasar adalah suku bunga dan nilai tukar, termasuk transaksi derivatif seperti options. Dalam menghitung risiko pasar bank masih menggunakan Metode Standar (Standard Method) sesuai Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/33/DPNP tanggal 18 Desember 2007 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/21/DPNP tanggal 18 Juli 2012 perihal Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/33/DPNP Tanggal 18 Desember 2007 perihal Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar.

Pengelolaan risiko pasar agar dapat terintegrasi dengan kegiatan treasury merupakan hal yang mutlak agar risiko pasar dapat dikelola secara harian sesuai dengan karakteristik risiko pasar yang cepat dan fluktuatif.

Profil Risiko Pasar

Profil Risiko Pasar			
Keterangan	2014	2013	2012
Profil Risiko	*Low to Moderate*	*Low to Moderate*	*Low to Moderate*
Risiko Inheren	*Low to Moderate*	*Low to Moderate*	*Low to Moderate*
Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	*Satisfactory*	*Fair*	*Fair*

Profil risiko pasar Bank Riau Kepri pada tahun 2014 terjaga stabil berada pada peringkat low to moderate dengan risiko inheren low to moderate dan kualitas penerapan manajemen risiko satisfactory.

Eksposur risiko pasar dari aktivitas trading tidak signifikan. Pada periode penilaian, Bank memiliki eksposur seperti surat berharga kategori AFS dan nilai wajar sebesar Rp68.160 juta dengan rasio 0,29% dari total aset yang dimiliki, namun untuk transaksi derivatif dan structured product pada periode penilaian tidak ada. Instrumen trading yang ditransaksikan relatif sederhana, market share trading bank sangat kecil, namun nasabah utama Bank adalah Bank yang sangat sensitif terhadap perubahan faktor pasar.

Rasio eksposur risiko pasar dari posisi valas (PDN) relatif kecil

yaitu sebesar 4,21%, di mana sesuai ketentuan Bank Indonesia secara keseluruhan Bank wajib mengelola dan memelihara rasio PDN secara keseluruhan paling tinggi 20% dari modal.

Pengelolaan Risiko Pasar Bank Riau Kepri dan penerapan kualitas manajemen risiko meliputi :

- Risiko nilai tukar dengan cara mempertahankan Posisi Devisa Neto jauh di bawah batas maksimum 20% yang ditetapkan oleh Bank Indonesia serta untuk perhitungan capital charge sebagai cadangan untuk meng-cover fluktuasi nilai tukar.
- Pengendalian risiko pasar juga dilakukan melalui penetapan limit kepada masing-masing dealer untuk limit transaksi.
- Budaya manajemen risiko pasar cukup kuat dan telah disosialisasikan kepada seluruh level organisasi.
- Melakukan review terhadap kebijakan dan prosedur manajemen risiko pasar dan disosialisasikan agar dipahami dan atau dilaksanakan secara konsisten.
- Proses manajemen risiko pasar yang cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko pasar yang dilakukan secara harian.
- Sistem pengendalian internal yang cukup efektif dalam mendukung manajemen risiko pasar.

3. Risiko Likuiditas (Liquidity Risk)

Risiko likuiditas adalah risiko yang antara lain disebabkan Bank tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendek dan atau kewajiban yang telah jatuh waktu. Likuiditas Bank dipengaruhi oleh struktur pendanaan, likuiditas aset, kewajiban kepada counterparty dan komitmen kredit kepada debitur.

Risiko likuiditas Bank diukur melalui beberapa indikator, antara lain Primary Reserve Ratio (rasio Giro Wajib Minimum dan Kas), Secondary Reserve (cadangan likuiditas) dan Loan to Deposit Ratio (LDR). Pengendalian risiko likuiditas dilakukan dengan menetapkan limit - limit yang mengacu pada ketentuan regulator maupun internal. Per 31 Desember 2014, posisi GWM primer rupiah adalah sebesar 8% dari total dana pihak ketiga rupiah, sedangkan GWM sekunder rupiah adalah sebesar 4% dari total dana pihak ketiga rupiah. Sementara untuk valuta asing, Bank memelihara GWM sebesar 8% dari total dana pihak ketiga valuta asing. Realisasi GWM rupiah dan valuta asing tersebut sesuai ketentuan regulasi dan limit internal.

Profil Risiko Likuiditas

Profil Risiko Likuiditas			
Keterangan	**2014**	**2013**	**2012**
Profil Risiko	*Low to Moderate*	*Low to Moderate*	*Low to Moderate*
Risiko Inheren	*Low to Moderate*	*Low to Moderate*	*Low to Moderate*
Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	*Satisfactory*	*Fair*	*Fair*

Profil risiko likuiditas Bank Riau Kepri terjaga stabil peringkat low to moderate dengan risiko inheren low to moderate dan kualitas penerapan manajemen risiko satisfactory. Bank memiliki aset likuid primer dan sekunder yang cukup memadai. Per akhir Desember 2014, besarnya aset likuid primer dan sekunder sebesar 32,93% dari total aset bank. Untuk aset likuid primer dan sekunder dibandingkan pendanaan jangka pendek diperoleh rasio sebesar 44,98%. Pendanaan jangka pendek yang dimiliki pada Desember 2014 sebesar Rp16.922.105 juta. Per 31 Desember 2014, cadangan likuiditas berada di atas safety level, sedangkan LDR Bank sebesar 77,72%. Bank memiliki aset berkualitas yang memadai untuk menutup kewajiban jatuh waktu, dimana aset likuid primer dan sekunder dapat meng-cover pembayaran yang jatuh tempo dalam bentuk bunga DPK, bunga obligasi dan pencairan terhadap nominal deposito yang akan jatuh tempo.

Bank mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun pada skenario krisis yang dapat dilihat dari pemenuhan GWM primer sebesar Rp1.214.748 juta maupun GWM Sekunder yang ada di Bank Indonesia untuk meng-cover kebutuhan likuiditas jika terjadi krisis.

Untuk saat ini pengelolaan risiko likuiditas Bank Riau Kepri dan penerapan kualitas manajemen risiko meliputi :

- Pemantauan likuiditas untuk memenuhi setiap kewajiban

yang jatuh tempo dan menjaga tingkat likuiditas yang optimal.

- Melakukan stress testing terhadap skenario yang mungkin terjadi dari simulasi profil jatuh tempo dalam kondisi normal, kondisi spesifik dan kondisi krisis.
- Budaya manajemen risiko likuiditas cukup kuat dan telah disosialisasikan kepada seluruh level organisasi tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten.
- Kebijakan dan prosedur manajemen risiko likuiditas yang cukup memadai.
- Melakukan proses manajemen risiko likuiditas yang memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko likuiditas.
- Sistem pengendalian internal yang cukup efektif mendukung manajemen risiko likuiditas. Untuk menjaga likuiditas, selain menjaga primary reserves bank juga menjaga secondary reserves yang tertuang dalam laporan pemantauan likuiditas setiap bulannya, dimana dari hasil analisis dan penilaian terhadap laporan tersebut Direksi meminta kepada unit kerja terkait untuk segera menindaklanjutinya.

4. Risiko Operasional (Operational Risk)

Risiko Operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. Tujuan pengendalian risiko operasional adalah untuk memastikan bahwa Bank Riau Kepri memiliki kebijakan, mekanisme dan praktik yang tepat untuk menghindari atau meminimalkan kegagalan atau kerugian serta memastikan penerapan peluang bisnis baru secara tepat di bawah kendali manajemen risiko. Pemetaan risiko operasional dilaksanakan terhadap berbagai kegiatan operasional perbankan seperti produk dan layanan, jaringan kantor dan pengembangannya, serta perkembangan teknologi informasi.

Manajemen risiko operasional yang efektif dapat menekan kerugian akibat risiko operasional. Untuk saat ini Bank masih menggunakan metode Pendekatan Indikator Dasar (PID) dalam menghitung ATMR Risiko Operasional. Sebagai output dari proses manajemen risiko operasional, Divisi Manajemen Risiko telah mengembangkan aplikasi penilaian risiko operasional dimana setiap unit kerja telah melakukan self asessment terhadap risk event yang terjadi di unit kerja masing-masing, yang akan dijadikan dasar dalam pembuatan profil risiko operasional Bank. Laporan asessment risiko operasional wajib disampaikan oleh unit kerja kepada Divisi Manajemen Risiko setiap bulannya dan kemudian hasil analisis tersebut disampaikan ke Manajemen

Bank Riau Kepri juga telah menerbitkan buku Budaya Peduli Risiko yang telah disahkan dengan Keputusan Direksi Nomor 065/KEPDIR/2014 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko tanggal 19 September 2014, yang menjadi pedoman bagi setiap pegawai dalam meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko dalam setiap kegiatan bisnis bank.

Profil Risiko Operasional

Profil Risiko Operasional			
Keterangan	**2014**	**2013**	**2012**
Profil Risiko	*Moderate*	*Moderate*	*Low to Moderate*
Risiko Inheren	*Moderate*	*Moderate*	*Low to Moderate*
Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	*Fair*	*Fair*	*Fair*

Profil risiko operasional Bank Riau Kepri stabil peringkat moderate dengan risiko inheren moderate dan kualitas penerapan manajemen risiko fair.

Bank memiliki karakteristik usaha yang cukup kompleks. Produk dan jasa bank cukup bervariasi, struktur organisasi bank cukup kompleks yang terdiri dari 15 Divisi dengan 135 kantor yang tersebar di seluruh Daerah tingkat I/II Provinsi Riau dan Kepri. Bank mengembangkan cukup banyak produk dan aktivitas baru. Selain itu, Bank melakukan outsourcing aktivitas yang kritikal yaitu TI (core banking).

Frekuensi kegagalan karena faktor manusia (Human Error) pada periode laporan cukup tinggi, namun tidak mengakibatkan kerugian material yang besar (low impact). Terkait dengan kegagalan yang disebabkan oleh human error, Bank selalu

melakukan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan kepada seluruh pegawai untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan. Frekuensi dan materialitas fraud internal cukup tinggi dan cenderung meningkat termasuk dalam aktivitas perkreditan. Sementara itu, frekuensi dan materialitas fraud eksternal relatif jarang terjadi.

Mitigasi risiko operasional dan penerapan kualitas manajemen risiko meliputi :

- Meningkatkan kualitas dan proses kontrol internal.
- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui berbagai pelatihan, sertifikasi dan seminar serta peningkatan layanan perbankan.
- Budaya manajemen risiko operasional cukup kuat dan telah disosialisasikan kepada seluruh level organisasi.
- Penyempurnaan kebijakan dan prosedur manajemen risiko operasional perlu termasuk penetapan limit-limit risiko operasional.
- Penyempurnaan proses manajemen risiko operasional terutama proses pengukuran, pemantauan, pelaporan dan mengendalikan risiko operasional.
- Mereview sistem informasi manajemen risiko operasional termasuk validasi data dan model pengukuran serta pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi
- Sistem pengendalian intern yang cukup efektif mendukung manajemen risiko operasional.

Business Continuity Management (BCM)

Untuk menjamin kelangsungan bisnis dan operasional Bank dalam kondisi bencana, Bank memiliki rencana komprehensif yang terdokumentasi, teruji dan tercakup dalam Business Continuity Management (BCM), sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 098/KEPDIR/2014 tanggal 22 Desember 2014. BCM meliputi Disaster Recovery Plan (DRP) dan Business Continuity Plan (BCP).

BCP adalah kebijakan dan prosedur yang memuat rangkaian kegiatan yang terencana dan terkoordinir mengenai langkah-langkah pengurangan risiko, penanganan dampak gangguan/ bencana dan proses pemulihan agar kegiatan operasional Bank dan pelayanan kepada nasabah tetap dapat berjalan. Tujuan penyusunan atau penerapan BCP dimaksudkan untuk membantu manajemen Bank dalam mengambil tindakan secara efektif dan efisien pada saat kondisi darurat atau bencana, antara lain :

1. Memperkecil pengaruh dari bencana terhadap layanan kepada segenap pemangku kepentingan (Stakeholder).
2. Memastikan berjalannya kembali bisnis kritikal secara tepat waktu.
3. Melindungi jiwa dan keselamatan pegawai dan pihak-pihak yang berkepentingan.
4. Mempersingkat jumlah keputusan yang harus dibuat pada saat terjadinya kondisi darurat atau gangguan usaha.
5. Menurunkan ketergantungan seluruh unit kerja terhadap individu atau kelompok tertentu pada saat proses pemulihan (recovery) dan proses pengembalian (resumption).
6. Menghindari kondisi krisis pada manajemen yang akan menyebabkan keterlambatan / penundaan pengambilan keputusan dan kekacauan dalam proses penanganan kondisi darurat.
7. Mengurangi risiko kerugian keuangan dan memperkecil biaya yang berhubungan dengan pemulihan kembali bisnis kritikal.

DRP adalah dokumen yang mendefinisikan sumber daya, tindakan, tugas dan data yang dibutuhkan untuk mengelola upaya pemulihan teknologi serta digunakan sebagai tanggapan bagi layanan IT kritikal yang apabila terkena dampaknya juga akan mempengaruhi operasional dan bisnis Bank secara keseluruhan serta mengakibatkan timbulnya risiko operasional dan risiko reputasi. Disaster Recovery Plan (DRP) bertujuan untuk :

1. Mengamankan infrastruktur teknologi informasi bank dan fasilitasnya
2. Menjaga reputasi bank
3. Melanjutkan organisasi dan operasional bank dalam kondisi kritikal dalam periode tertentu.

5. Risiko Hukum

Risiko Hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis yang antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sah kontrak dan pengikatan agunan tidak Sempurna. Bank Riau Kepri melakukan pengukuran risiko hukum dengan menggunakan 3 parameter yakni faktor litigasi, kelemahan perikatan dan faktor ketiadaan dan atau adanya perubahan peraturan, perundang-undangan atau ketentuan yang berlaku.

Profil Risiko Hukum

Profil Risiko Hukum			
Keterangan	2014	2013	2012
Profil Risiko	*Low to Moderate*	*Low to Moderate*	*Low to Moderate*
Risiko Inheren	*Low to Moderate*	*Low to Moderate*	*Low*
Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	*Satisfactory*	*Fair*	*Fair*

Profil risiko hukum Bank Riau Kepri terjaga stabil peringkat komposit low to moderate dengan risiko inheren low to Moderate dan kualitas penerapan manajemen risiko satisfactory.

Sepanjang tahun 2014 Bank mempunyai beberapa perkara yang sedang dalam proses putusan banding di tingkat Pengadilan Negeri/Tinggi dan Mahkamah Agung dengan nominal gugatan yang diajukan atau estimasi kerugian yang mungkin akan dialami sebesar Rp4.970 juta atau 0,23% dibandingkan modal Bank. Seluruh aktivitas dan produk Bank telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengacu kepada best practice, tidak terdapat aktivitas dan produk Bank yang belum di atur atau bertentangan dengan perundang-undangan.

Mitigasi risiko hukum dan kualitas penerapan manajemen risiko antara lain:

- Meningkatkan komitmen untuk menegakkan peraturan yang berlaku atas pelanggaran yang dilakukan dan menjalankan operasional perbankan sesuai dengan standar dan prosedur.
- Budaya manajemen risiko hukum yang cukup kuat dan telah disosialisasikan kepada seluruh level organisasi.
- Kebijakan & prosedur manajemen risiko hukum cukup memadai dan telah tersedia.
- Telah memadainya proses manajemen risiko hukum dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko hukum.
- Sistem informasi manajemen risiko hukum yang cukup memadai termasuk pelaporan risiko hukum kepada Dewan Komisaris dan Direksi.
- Sumberdaya manusia memiliki kompetensi yang memadai dalam menangani risiko hukum.

6. Risiko Strategik (Strategic Risk)

Risiko Strategik adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi Bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya Bank terhadap perubahan eksternal. Bank Riau Kepri mengelola risiko stratejik antara lain melalui pengumpulan informasi strategis, pemantauan pasar, ekonomi daerah dan melalui proses pertimbangan dan pengambilan keputusan secara menyeluruh.

Profil Risiko Stratejik

Profil Risiko Stratejik			
Keterangan	2014	2013	2012
Profil Risiko	*Low to Moderate*	*Moderate*	*Moderate*
Risiko Inheren	*Moderate*	*Moderate*	*Moderate*
Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	*Satisfactory*	*Fair*	*Fair*

Profil risiko stratejik Bank Riau Kepri mengalami perubahan yang membaik dengan peringkat komposit low to moderate, dengan risiko inheren moderate dan kualitas penerapan manajemen risiko satisfactory.

Kesesuaian strategi bank dengan kondisi lingkungan bisnis cukup memadai namun sebagian diantaranya kurang applicable sehingga perlu direview. Strategi berisiko tinggi hanya mencapai 33% sedangkan sisanya merupakan strategi berisiko rendah. Hal ini sesuai dengan strategi pengembangan bisnis yang akan diterapkan Bank Riau Kepri pada tahun 2014 yang fokus pada pengembangan produk/ aktivitas

dan pelayanan prima yang berbudaya kepada nasabah, fokus kepada kredit produktif dan menjadi Bank pilihan bertransaksi. Maka untuk mencapai tujuan usaha bank yang telah ditetapkan dilakukan beberapa inovasi produk yang tersegmen, diperlukan strategi persaingan yang tepat melalui diferensiasi, penyempurnaan infrastruktur dan budaya kerja yang berkualitas tinggi. Produk, kegiatan usaha dan cakupan wilayah operasional Bank Riau Kepri cukup terdiversifikasi.

Mitigasi risiko strategis dan kualitas penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh Bank Riau Kepri adalah :

- Menyusun dan menetapkan strategi bisnis Bank dalam rencana bisnis Bank pada suatu analisa kajian yang komprehensif.
- Kebijakan dan prosedur manajemen risiko stratejik cukup memadai dan telah tersedia
- Fungsi manajemen risiko stratejik cukup independen dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas serta telah berjalan dengan baik.
- Proses manajemen risiko stratejik yang cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko stratejik.
- Sistem informasi manajemen risiko stratejik yang cukup memadai termasuk pelaporan risiko stratejik kepada Dewan Komisaris, Direksi.

7. Risiko Kepatuhan (Compliance Risk)

Risiko kepatuhan merupakan risiko yang disebabkan Bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Divisi Kepatuhan secara teratur membantu dan meninjau ulang kembali aspek kepatuhan bank, khususnya transaksi-transaksi yang mencurigakan atau tidak wajar. Bank sepenuhnya mematuhi Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Kebijakan APU & PPT. Ketentuan-ketentuan lain yang harus dipatuhi terutama yang terkait risiko seperti Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), Kualitas Aktiva Produktif, Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan Posisi Devisa Neto (PDN.)

Profil Risiko Kepatuhan

Keterangan	2014	2013	2012
Profil Risiko	*Low to Moderate*	*Low to Moderate*	*Low to Moderate*
Risiko Inheren	*Low to Moderate*	*Low to Moderate*	*Low to Moderate*
Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	*Satisfactory*	*Fair*	*Fair*

Profil risiko kepatuhan terjaga stabil dengan peringkat low to moderate dan risiko inheren low to moderate serta kualitas penerapan manajemen risiko satisfactory.

Terdapat pelanggaran yang menimbulkan denda sebesar Rp82 juta dalam periode penilaian. Terdapat jenis dan frekuensi pelanggaran yang sama (berulang) setiap tahunnya dalam 2 (dua) tahun terakhir yang terkait denda akibat tidak tercapainya penyaluran kartu kredit, dan denda LBU. Masih terdapat beberapa penemuan eksternal yang masih belum terselesaikan dan harus segera ditindaklanjuti.

Mitigasi risiko kepatuhan dan kualitas penerapan manajemen risiko meliputi :

- Dewan Komisaris dan Direksi memiliki awareness dan pemahaman yang cukup kuat mengenai manajemen risiko kepatuhan.
- Budaya manajemen risiko kepatuhan cukup kuat dan telah disosialisasikan kepada seluruh level organisasi.
- Komitmen seluruh jajaran manajemen dan pegawai untuk menegakkan peraturan yang berlaku atas setiap pelanggaran yang dilakukan.
- Fungsi manajemen risiko kepatuhan cukup independen dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas serta telah berjalan dengan baik.
- Proses manajemen risiko kepatuhan cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko kepatuhan.
- Sistem informasi manajemen risiko kepatuhan cukup memadai termasuk pelaporan risiko kepatuhan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.
- Sumberdaya manusia memiliki kompetensi yang cukup memadai dalam menangani risiko kepatuhan

8. Risiko Reputasi (Reputation Risk)

Risiko reputasi adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Bank atau perspektif negatif terhadap bank.

Profil Risiko Reputasi			
Keterangan	2014	2013	2012
Profil Risiko	*Low to Moderate*	*Low to Moderate*	*Low to Moderate*
Risiko Inheren	*Low to Moderate*	*Low to Moderate*	*Low to Moderate*
Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	*Satisfactory*	*Fair*	*Fair*

Profil risiko reputasi terjaga stabil peringkat komposit low to moderate dan risiko inheren low to moderate serta kualitas penerapan manajemen risiko satisfactory.

Risiko reputasi dikelola dengan memperhatikan keluhan nasabah serta merespon setiap berita yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap Bank Riau Kepri. Bank Riau Kepri berusaha seoptimal mungkin dengan memberikan pelayanan terbaik. Untuk saat ini tidak terdapat pengaruh reputasi negatif dari pemilik bank. Sebagai bank yang dimiliki oleh PEMDA Tingkat I/II di Provinsi Riau dan Provinsi Kepri, Bank Riau Kepri memiliki kredibilitas yang kuat di mata nasabah. Tidak terjadi pelanggaran atau potensi pelanggaran etika bisnis.

Produk bank yang ditawarkan saat ini sudah mulai bervariasi mulai berupa produk konvensional sampai dengan Electronic Banking sehingga potensi timbulnya komplain harus mulai diantisipasi dari sekarang.

Mitigasi risiko reputasi dan kualitas penerapan manajemen risiko meliputi :

- Semakin meningkatkan pelayanan perbankan dan infrastruktur terhadap nasabah serta menyediakan media center.
- Kebijakan dan prosedur manajemen risiko reputasi memadai dan telah tersedia.
- Proses manajemen risiko reputasi cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko reputasi.
- Sistem informasi manajemen risiko reputasi cukup memadai termasuk pelaporan risiko reputasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi.
- Sumberdaya manusia memiliki kompetensi yang memadai dalam menangani risiko reputasi.
- Cakupan risiko reputasi cukup luas dan tidak terbatas hanya pada reputasi dari sebuah bank saja, namun dapat memicu risiko lainnya dan mempengaruhi kinerja bank secara menyeluruh.

TINGKAT KESEHATAN BANK

Prinsip-prinsip umum sebagai landasan penilaian Tingkat Kesehatan Bank Riau Kepri adalah :

1. Berorientasi risiko
   Penilaian tingkat kesehatan didasarkan pada risiko-risiko yang dihadapi Bank Riau Kepri dan dampak yang ditimbulkan pada kinerja Bank secara keseluruhan. Hal ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi faktor internal maupun eksternal yang dapat meningkatkan risiko atau mempengaruhi kinerja keuangan Bank pada saat ini dan di masa yang akan datang.
2. Proporsionalitas
   Penggunaan parameter/indikator dalam tiap faktor penilaian Tingkat Kesehatan Bank dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank Riau Kepri.
3. Materialitas dan Signifikansi
   Penentuan materialitas dan signifikansi tersebut didasarkan pada analisis yang didukung oleh data dan informasi yang memadai mengenai risiko dan kinerja keuangan Bank. Materialitas dan signifikansi faktor penilaian tingkat kesehatan bank adalah :
   1. Penilaian Profil Risiko
   2. Penilaian Good Corporate Governance (GCG)
   3. Penilaian Rentabilitas
   4. Penilaian Permodalan
   4. Komprehensif dan Terstruktur

Proses penilaian dilakukan secara menyeluruh dan sistematis serta difokuskan pada permasalahan utama Bank Riau Kepri. Analisis harus didukung oleh fakta-fakta pokok dan rasio-rasio yang relevan untuk menunjukkan tingkat, trend, dan tingkat permasalahan yang dihadapi oleh Bank.

Laporan Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Periode :
31 Desember 2014

No	Faktor-Faktor Penilaian	Peringkat				
		Individu				
1	Profil Risiko	-	2	-	-	-
2	Good Corporate Governance (GCG)	-	-	3	-	-
3	Rentabilitas	-	2	-	-	-
4	Permodalan	-	2	-	-	-
	Peringkat TKB Berdasarkan Risiko	-	2	-	-	-

Kondisi Bank Riau Kepri secara umum Sehat dengan Peringkat Komposit TKB 2 (dua), sehingga mampu menghadapi pengaruh negatif yang kurang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

Tetapi secara umum kelemahan yang ada kurang signifikan terhadap kelangsungan usaha Bank Riau Kepri. Kondisi kesehatan Bank Riau Kepri tersebut tercermin dari keempat faktor penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Risiko sebagai berikut :

1. **Profil Risiko : Peringkat 2**
   Dengan mempertimbangkan signifikansi, materialitas dan peringkat kedelapan risiko inheren serta kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit diperoleh kesimpulan bahwa Profil Risiko Bank Riau Kepri adalah low to moderate.

2. **Penerapan Good Corporate Governance (GCG) : Peringkat 3**
   Penerapan GCG secara umum cukup baik, yang tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip GCG tersebut. Kelemahan yang ada secara umum cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG		
Peringkat		Definisi Peringkat
Individual	3	Pelaksanaan dan penerapan Good Corporate Governance di Bank secara umum cukup baik, hal ini tercermin dari telah dipenuhinya beberapa prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam kegiatan operasional Bank. Namun secara keseluruhan penerapan GCG di Bank Riau Kepri perlu mendapat perhatian yang serius dari manajemen Bank, mengingat masih terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan baik di dalam Governance Structure, Governance Proses maupun pada Governance Outcome.

3. **Rentabilitas : Peringkat 2**
   Kondisi rentabilitas Bank Riau Kepri memadai dan pencapaian laba melebihi target pada periode Desember 2014. Kemampuan laba dalam meningkatkan permodalan dan prospek laba dimasa yang akan datang cukup baik.
   1. Kinerja Bank Riau Kepri dalam menghasilkan laba (rentabilitas) memadai :
      - ROA = 3,37% (peer group = 2,87%)
      - NIM = 7,54% (peer group = 8,19%)
      - Pencapaian laba bersih = 109,02% x target laba Desember 2014
   2. Pendapatan bunga bersih mencapai 6,59% dari rata-rata total aset (peer group = 7, 11%)
   3. Pendapatan operasional selain pendapatan bunga (net) = 0,79% dari rata-rata total aset (peer group = 1,43%)
   4. Manajemen rentabilitas Bank Riau Kepri memadai yang terlihat dari pertumbuhan laba yang cukup memadai pada posisi bulan laporan.

4. **Permodalan : Peringkat 2**
   Bank Riau Kepri memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang memadai relatif terhadap profil risikonya, yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang kuat

sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan skala usaha Bank Riau Kepri.

1. Kecukupan permodalan :
   - Bank Riau Kepri memiliki tingkat permodalan yang memadai di atas persyaratan minimum, mampu mengantisipasi seluruh risiko yang dihadapi dan mendukung usaha bank ke depan : Rasio KPMM = 18,27% melampaui KPMM minimum 8% .
   - Kualitas komponen permodalan pada umumnya baik, permanen, dapat menyerap kerugian :
   - jumlah aset produktif bermasalah dikurangi CKPN aset produktif sebesar 1,61% dari modal inti dan cadangan umum.
   - Jumlah aset kualitas rendah dikurangi CKPN aset kualitas rendah mencapai sebesar 16,84% dari modal inti dan cadangan umum.
   - Kecukupan modal Bank masih memadai untuk mengantisipasi potensi kerugian sesuai profil risiko bank yang berada pada peringkat low to moderate.

2. Pengelolaan Permodalan :
   - Bank Riau Kepri memiliki manajemen permodalan yang baik dan memadai, yang terlihat dari rasio kecukupan modal inti maupun rasio kecukupan total modal bank yang berada di atas rata-rata peer group.
   - Bank Riau Kepri memiliki akses yang memadai terhadap pemegang saham yaitu Pemerintah Daerah Tingkat I / II di Provinsi Riau dan Provinsi Kepri, sehingga bila diperlukan Bank dapat menambah modal dari pemegang saham yang ada tersebut.
   - Bank Riau Kepri juga berpengalaman menerbitkan instrumen pasar modal berupa obligasi.

PENERAPAN KEBIJAKAN DAN PROSES MANAJEMEN RISIKO

Sampai dengan tahun 2014 tahapan-tahapan manajemen risiko yang telah dilakukan Bank Riau Kepri terkait dengan sistem pengendalian risiko antara lain :

1. Sosialisasi budaya peduli risiko bagi seluruh petugas/ pejabat yang mengelola exposure risiko seperti kepedulian terhadap risiko yang melekat (inherent risk) pada aktivitas fungsional Bank.
2. Mengkampanyekan budaya risiko untuk seluruh jenjang pegawai, sehingga terjadi penekanan pemborosan biaya dan sekaligus secara tidak langsung peningkatkan pendapatan Bank.
3. Sosialisasi penerapan kebijakan manajemen risiko dan Strategi Anti Fraud, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan seluruh pegawai terhadap risiko-risiko yang ada di Bank.
4. Sosialisasi Buku Petunjuk Penilaian Risiko Operasional yang dapat digunakan sebagai salah satu sarana evaluasi efektivitas strategi yang telah ditetapkan dan penyempurnaan strategi usaha Bank di waktu yang akan datang terhadap tingkat risiko maupun dampak material yang merugikan bagi Bank.
5. Melakukan review terhadap BPP Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai PBI Nomor 15/12/PBI/2013 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dan SE BI Nomor 14/37/DPNP perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Berdasarkan Profil Risiko dan Pemenuhan Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA).
6. Melakukan review terhadap BPP Tingkat Kesehatan Bank Riau Kepri.
7. Menerbitkan Kebijakan tentang Risk Appetite Statement Bank Riau Kepri Tahun 2015.
8. Menerbitkan Pedoman Kriteria Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko.
9. Menyusun BPP tentang Business Continuity Management PT. Bank Riau Kepri
10. Laporan pemantauan portofolio kredit yang diberikan setiap bulannya yang secara rutin disampaikan kepada Direksi dan dibahas dalam Komite Manajemen Risiko (RMCO).
11. Laporan pemantauan likuiditas setiap bulannya yang secara rutin disampaikan kepada Direksi dan dibahas dalam Komite Manajemen Risiko (RMCO).
12. Laporan pemantauan risiko pasar setiap bulannya yang secara rutin disampaikan kepada Direksi yang akan menjadi pedoman treasury dalam melakukan transaksi.

STRATEGIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Bank terus berupaya mengembangkan dan meningkatkan kerangka sistem pengelolaan risiko dan struktur pengendalian internal yang terpadu dan komprehensif. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh informasi tentang adanya potensi risiko secara lebih dini dan untuk selanjutnya mengambil langkah-langkah guna meminimalkan dampak risiko.

Dalam rangka mendukung pertumbuhan bisnis dan mengantisipasi perubahan kondisi makroekonomi serta penerapan regulasi baru, Bank Riau Kepri secara berkelanjutan akan mengembangkan infrastruktur dan kapabilitas

manajemen risiko, antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Pengelolaan asset and liability untuk optimalisasi risiko dan pengelolaan risiko likuiditas berdasarkan Basel III. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank, Bank Riau Kepri berada dalam kategori BUKU II yang untuk sementara belum diwajibkan melakukan perhitungan Liquidity Coverage Ratio (LCR).
2. Pengelolaan risiko operasional melalui pengembangan dan penyempurnaan aplikasi pengukuran risiko operasional yang akan diimplementasikan keseluruh unit kerja

EVALUASI ATAS EFEKTIVITAS SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Sistem manajemen risiko dikembangkan untuk mendukung proses bisnis yang yang lebih efisien agar pengambilan keputusan dapat lebih cepat namun tetap mengacu prinsip kehati-hatian. Implemetasi manajemen risiko yang efektif adalah praktek sehat dan terbaik yang membuat Bank mampu mengidentifikasikan permasalahan secara dini, melakukan tindak lanjut perbaikan yang sesuai dan lebih cepat yang dapat digunakan untuk menilai risiko yang melekat pada instrumen atau kegiatan usaha Bank yang relatif kompleks serta menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya saing bank. Kunci sukses pelaksanaan manajemen risiko yaitu adanya risk awareness dan kemampuan teknis yang memadai pada seluruh unit kerja pada Bank Riau Kepri, di mana hal ini menjadi tanggung jawab dan melibatkan seluruh jajaran pada Bank Riau Kepri. Hasil-hasil yang dicapai dalam implementasi manajemen risiko pada Bank Riau Kepri yang memberikan pengaruh positif, antara lain :

1. Bank Riau Kepri memiliki kecukupan modal untuk meng-cover risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional, baik berdasarkan ketentuan regulasi (regulatory capital) maupun kebutuhan internal (economic capital), sehingga tingkat keyakinan stakeholder terhadap Bank masih terpelihara.
2. Bank Riau Kepri mengacu kepada regulasi Bank Indonesia (Basel II) dalam melakukan perhitungan kecukupan modal untuk risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional.
3. Terdapat peningkatan dan pelanggaran terhadap risiko operasional dalam proses operasional bank, namun pelanggaran yang terjadi tidak menganggu kegiatan operasional Bank.
4. Reputasi Bank yang masih terjaga dan terkendali dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan tidak terpengaruhnya aktivitas perusahaan secara keseluruhan akibat isu maupun pemberitaan negatif.
5. Peringkat komposit profil risiko dan tingkat kesehatan bank yang terjaga dengan baik, sehingga memberikan pandangan positif bagi otoritas pengawasan Bank.

STRATEGI ANTI FRAUD

Terbitnya Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) No.13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 perihal "Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum" menunjukkan bahwa BI sebagai regulator mempunyai perhatian khusus terhadap upaya pencegahan terjadinya kasus-kasus penyimpangan operasional pada perbankan, khususnya fraud yang dapat merugikan nasabah atau Bank.

PT Bank Riau Kepri sebagai bank umum yang beroperasi dengan lebih dari 100 unit kantor cabang, cabang pembantu dan kedai sangat menyadari bahwa potensi terjadinya fraud itu selalu ada, sehingga dengan penerbitan BPP Strategi Anti Fraud ini diharapkan dapat menjadi panduan yang efektif dalam upaya memerangi dan meminimalisir terjadinya fraud secara optimal. Tujuan penerapan Strategi Anti Fraud adalah :

a. Sebagai dasar tindakan yang diambil oleh Bank dalam melakukan pencegahan terhadap terjadinya suatu tindak kejahatan yang dapat merugikan Bank secara finansial maupun non finansial yang dapat mempengaruhi kinerja operasional Bank secara keseluruhan.
b. Penegasan dari Bank agar setiap level dalam organisasi Bank menyadari dan memahami bahwa fraud merupakan bentuk tindak kejahatan yang tidak dapat ditolerir dalam organisasi perbankan.
c. Memberikan arah kebijakan dalam pembudayaan tingkat kewaspadaan terhadap kemungkinan adanya fraud maupun kesadaran risiko dalam setiap aktivitas perbankan.

Dalam mendukung efektifitas penerapan Strategi Anti Fraud, maka Bank Riau Kepri membentuk Komite Anti Fraud dengan susunan keanggotaan terdiri dari :

1. Ketua : Pemimpin Divisi Manajemen Risiko
2. Sekretaris : Pemimpin Bagian Pengembangan dan Penerapan Kebijakan Divisi Manajemen Risiko
3. Anggota : Pemimpin SKAI Pemimpin Divisi Kepatuhan Pemimpin Divisi Hukum & Corporate Secretary Pemimpin Divisi Human Capital

Implementasi Strategi Anti Fraud dalam bentuk sistem pengendalian fraud dijabarkan melalui 4 (empat) pilar strategi pengendalian fraud yang saling berkaitan yaitu:

1. Pencegahan
   Pilar pencegahan memuat perangkat-perangkat yang ditujukan untuk mengurangi potensi terjadinya Fraud pada Bank Riau Kepri, yang paling kurang mencakup :
   a. Anti Fraud Awareness
   b. Identifikasi Kerawanan
   c. Know Your Employee

2. Deteksi
   Pilar deteksi memuat perangkat-perangkat yang ditujukan untuk mengidentifikasikan dan menemukan kejadian fraud, yang paling kurang mencakup :
   a. Kebijakan dan Mekanisme Whistleblowing
   b. Surprise Audit
   c. Surveillance System

3. Investigasi, Pelaporan dan Sanksi
   Pilar investigasi, pelaporan dan sanksi memuat perangkat-perangkat yang ditujukan untuk menggali informasi, sistem pelaporan termasuk pengenaan sanksi atas kejadian fraud yang terjadi di Bank Riau Kepri, yang pelaksanaan investigasi dibantu oleh SKAI.
4. Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut
   Pilar pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut memuat perangkat-perangkat yang ditujukan untuk memantau dan mengevaluasi kejadian fraud serta tindak lanjut yang diperlukan berdasarkan hasil evaluasi untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dan memperkuat sistem pengendalian intern agar dapat mencegah terulangnya kembali fraud karena kelemahan yang serupa.

ROADMAP PENGEMBANGAN MANAJEMEN RISIKO

Pada akhir tahun 2014 Bank Riau Kepri telah melakukan review, asessment dan kajian terhadap penerapan manajemen risiko eksisting di Bank Riau Kepri sesuai tata kelola risiko dan arah bisnis Bank ke depan yang tertuang dalam corporate plan Bank serta ekspektasi manajemen.

Hasil review memberikan rekomendasi terkait perbaikan/ penyempurnaan penerapan manajemen risiko sesuai ketentuan regulator, best practice dan karakteristik Bank terkait implementasi struktur tata kelola manajemen risiko, desain proses manajemen risiko yang dapat mendukung terciptanya kualitas outcome penerapan manajemen risiko.

Dari hasil review penerapan manajemen risiko Bank Riau Kepri, Bank merasa perlu menyusun roadmap penyempurnaan penerapan manajemen risiko sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pada Bank Riau Kepri dalam menyamakan langkah dan persepsi ke depan. Proses penyusunan roadmap penyempurnaan penerapan manajemen risiko diawali dengan melihat hasil review kondisi saat ini. Kondisi yang ada saat ini dibandingkan dengan prediksi mengenai kondisi dan arah bisnis Bank dan ketentuan regulator pada lima tahun mendatang. Jangka waktu lima tahun dipilih berdasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, perkembangan penerapan manajemen risiko yang sangat dinamis menyebabkan pembuatan roadmap dengan jangka yang terlalu panjang menjadi sangat sulit. Memprediksi perkembangan penerapan manajemen risiko dan kebutuhan Bank Riau Kepri di atas lima tahun ke depan sangat sulit. Kedua, jangka waktu lima tahun dipandang sebagai jangka waktu yang ideal untuk memperoleh kembali umpan balik bagi review penerapan manajemen risiko Bank berikutnya. Mekanisme umpan balik yang tidak terlalu lama diharapkan memperkecil potensi kesalahan.

Skala prioritas berdasarkan penyelesaian hasil review adalah :

1. Prioritas Primer (Utama)
   a) Kerangka manajemen risiko
   b) Struktur organisasi manajemen risiko
   c) Konfigurasi dan pengembangan SDM manajemen risiko
   d) Kebijakan dan prosedur manajemen risiko
   e) Identifikasi dan analisis risiko
   f) Pengukuran dan penilaian risiko
   g) Pengendalian risiko
   h) Pemantauan risiko
   i) Sistem pengendalian intern

2. Prioritas Sekunder
   a) Sistem informasi manajemen risiko
   b) Pelaksanaan stress testing

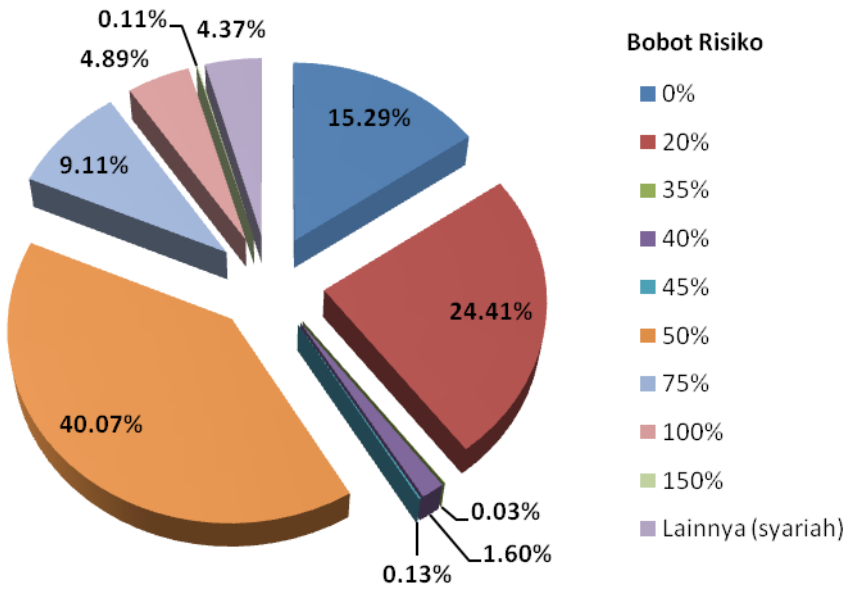
PENGUNGKAPAN PERMODALAN SERTA PENGUNGKAPAN EKSPOSUR RISIKO DAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pengelolaan risiko melalui permodalan di Bank Riau Kepri meliputi kebijakan diversifikasi sumber permodalan yang sinkron dengan rencana strategis jangka panjang, dan kebijakan alokasi modal secara efisien pada segmen bisnis yang memiliki profil risk-return yang optimal. Hal ini bertujuan untuk memenuhi ekspektasi stakeholder termasuk investor

dan regulator. Dalam rangka memberikan informasi penerapan manajemen risiko yang lebih transparan, Bank Riau Kepri mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/14/PBI/2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dan SE BI Nomor 14/35/DPNP perihal Laporan Tahunan Bank Umum dan Laporan Tertentu yang Disampaikan Kepada Bank Indonesia. Penerapan regulasi ini ditujukan untuk melakukan pengungkapan yang selaras dengan Implementasi Pilar 3 Basel II mengenai market discipline.

Beban modal untuk pengelolaan risiko kredit dengan pendekatan Standardized Approach posisi Desember 2014, memberikan komposisi aset berdasarkan risiko sebagai berikut :

Komposisi Aset Berdasarkan Bobot Risiko Kredit



Tabel 1.a : PENGUNGKAPAN KUANTITATIF STRUKTUR PERMODALAN BANK UMUM

dalam jutaan rupiah | in millions rupiah

KOMPONEN MODAL			31-Dec-14		31 Desember 2013	
			Bank	Konsolidasi	Bank	Konsolidasi
(1)		(2)	(3)	(4)	(3)	(4)
I	KOMPONEN MODAL					
	A	Modal Inti	2,000,486		1,796,665	
		1. Modal disetor	976,788		957,146	
		2. Cadangan Tambahan Modal	1,023,698		839,519	
		3. Modal Inovatif	-		-	
		4. Faktor Pengurang Modal Inti	-		-	
		5. Kepentingan Non Pengendali	-		-	
	B	Modal Pelengkap	116,131		101,025	
		1. Level Atas (Upper Tier 2)	116,131		101,025	
		2. Level Bawah (Lower Tier 2) maksimum 50 % Modal inti	-		-	
		3. Faktor Pengurang Modal Lengkap	-		-	
	C	Faktor Pengurang Modal Inti dan Modal Lengkap	-		-	
		Eksposure Sekuririsasi	-		-	
	D	Modal Pelengkap Yang Memenuhi Persyaratan (Tier 3)	-		-	
	E	MODAL PELENGKAP YANG DIALOKASIKAN UNTUKMENGANTISIPASI RISIKO PASAR	-		-	
II	TOTAL MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP (A + B - C)		2,116,617		1,897,690	
III	TOTAL MODAL INTI,MODAL PELENGKAP DAN MODAL YANG DIALOKASIKAN UNTUK MENGANTISIPASI RISIKO PASAR (A + B - C +E)		2,116,617		1,897,690	
IV	ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO KREDIT		9,290,464		8,081,990	
V	ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO OPERASIONAL		2,204,885		2,010,761	
VI	ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO PASAR		89,186		67,694	
	A	Metode Standar	89,186		67,694	
	B	Model Internal	-		-	
VII	RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM UNTUK RISIKO KREDIT,RISIKO OPERASIONAL,DAN RISIKO PASAR [III : (IV + V + IV)]		18.27%		18.68%	

Tabel 2.1.a : PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN WILAYAH - BANK SECARA INDIVIDUAL

dalam jutaan rupiah | in millions rupiah

NO	Kategori Portofolio	31 Desember 2014						31 Desember 2013					
		Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah						Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah					
		Wilayah 1	Wilayah 2	Wilayah 3	Wilayah 4	Wilayah 5	Total	Wilayah 1	Wilayah 2	Wilayah 3	Wilayah 4	Wilayah 5	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	2,715,091	-	-	-	-	2,715,091	2,104,077	-	-	-	-	2,104,077
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	148,070	148,070	-	-	-	-	237,223	237,223
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	3,346,522	-	-	36	2,348,023	5,694,580	2,900,509	-	1,398	35	1,679,573	4,581,515
5	Kredit Beragun Ruman Tinggal	160,426	74,774	163,019	14,418	78	412,715	144,789	81,626	163,733	13,449	-	403,597
6	Kredit Beragun Properti Komersial	1,202	6,416	1,021	-	-	8,639	36,461	5,485	11,216	-	-	53,162
7	Kredit Pegawai/ Pensiunan	1,963,376	904,859	5,483,516	1,038,355	-	9,390,106	1,824,844	806,763	5,027,655	931,985	-	8,591,247
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro,Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	267,554	83,622	1,666,392	123,064	-	2,140,632	287,454	74,297	1,498,111	122,568	305	1,982,735
9	Tagihan Kepada Korporasi	159,849	6,939	42,520	18,133	20,829	248,270	159,356	3,609	24,440	9,254	29,481	226,139
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	7,423	2,775	14,476	419	-	25,093	9,436	4,650	14,580	291	-	28,957
11	Aset Lainnya	984,938	146,297	508,792	36,865	-	1,676,892	547,901	186,733	388,457	11,249	-	1,134,340
12	Eksposure di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	262,138	318,869	316,654	16,324	112,000	1,025,985	204,300	238,599	265,173	11,909	110,000	829,981
	Total	9,868,519	1,544,550	8,196,390	1,247,613	2,628,999	23,486,072	8,219,128	1,401,762	7,394,764	1,100,740	2,056,582	20,172,976

Tabel 2.2.a : PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN SISA JANGKA WAKTU KONTRAK - BANK SECARA INDIVIDUAL

dalam jutaan rupiah | in millions rupiah

NO	Kategori Portofolio	31 Desember 2014						31 Desember 2013					
		Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah Jangka Waktu Kontrak						Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah Jangka Waktu Kontrak					
		< 1 tahun	> 1 tahun s.d 3 tahun	> 3 tahun s.d 5 tahun	> 5 tahun	Non-Kontraktual	Total	< 1 tahun	> 1 tahun s.d 3 tahun	> 3 tahun s.d 5 tahun	> 5 tahun	Non-Kontraktual	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	2,715,091				-	2,715,091	2,104,077	-	-	-	-	2,104,077
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	38,986	-	109,084	-	-	148,070	58,261	28,962	-	150,000	-	237,223
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	5,626,190	68,390	-	-	-	5,694,580	4,581,515	-	-	-	-	4,581,515
5	Kredit Beragun Ruman Tinggal	2,623	20,069	87,653	302,370	-	412,715	3,031	17,667	48,725	334,174	-	403,597
6	Kredit Beragun Properti Komersial	2,466	2,696	1,375	2,102	-	8,639	39,037	4,732	6,489	2,904	-	53,162
7	Kredit Pegawai/ Pensiunan	44,060	509,959	1,279,165	7,556,922	-	9,390,106	54,916	436,696	966,223	7,133,412	-	8,591,247
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro,Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	374,347	755,153	700,244	310,888	-	2,140,632	425,303	689,207	662,582	205,643	-	1,982,735

Tabel 2.2.a : PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN SISA JANGKA WAKTU KONTRAK - BANK SECARA INDIVIDUAL

dalam jutaan rupiah | in millions rupiah

NO	Kategori Portofolio	31 Desember 2014						31 Desember 2013					
		Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah Jangka Waktu Kontrak						Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah Jangka Waktu Kontrak					
		< 1 tahun	> 1 tahun s.d 3 tahun	> 3 tahun s.d 5 tahun	> 5 tahun	Non-Kontraktual	Total	< 1 tahun	> 1 tahun s.d 3 tahun	> 3 tahun s.d 5 tahun	> 5 tahun	Non-Kontraktual	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
12	Eksposure di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	156,233	33,719	108,338	645,700	81,995	1,025,985	191,687	54,160	536,105	1,122	46,907	829,981
	Total	9,181,560	1,433,613	2,291,132	8,820,881	1,758,887	23,486,072	7,627,470	1,271,085	2,228,174	7,864,999	1,181,247	20,172,976

Tabel 2.2.a : PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN SISA JANGKA WAKTU KONTRAK - BANK SECARA INDIVIDUAL

dalam jutaan rupiah | in millions rupiah

NO	Kategori Portofolio	31 Desember 2014						31 Desember 2013					
		Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah Jangka Waktu Kontrak						Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah Jangka Waktu Kontrak					
		< 1 tahun	> 1 tahun s.d 3 tahun	> 3 tahun s.d 5 tahun	> 5 tahun	Non-Kontraktual	Total	< 1 tahun	> 1 tahun s.d 3 tahun	> 3 tahun s.d 5 tahun	> 5 tahun	Non-Kontraktual	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	2,715,091				-	2,715,091	2,104,077	-	-	-	-	2,104,077
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	38,986	-	109,084	-	-	148,070	58,261	28,962	-	150,000	-	237,223
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	5,626,190	68,390	-	-	-	5,694,580	4,581,515	-	-	-	-	4,581,515
5	Kredit Beragun Ruman Tinggal	2,623	20,069	87,653	302,370	-	412,715	3,031	17,667	48,725	334,174	-	403,597
6	Kredit Beragun Properti Komersial	2,466	2,696	1,375	2,102	-	8,639	39,037	4,732	6,489	2,904	-	53,162
7	Kredit Pegawai/ Pensiunan	44,060	509,959	1,279,165	7,556,922	-	9,390,106	54,916	436,696	966,223	7,133,412	-	8,591,247
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro,Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	374,347	755,153	700,244	310,888	-	2,140,632	425,303	689,207	662,582	205,643	-	1,982,735

Tabel 2.2.a : PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN SISA JANGKA WAKTU KONTRAK - BANK SECARA INDIVIDUAL

dalam jutaan rupiah | in millions rupiah

NO	Kategori Portofolio	31 Desember 2014						31 Desember 2013					
		Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah Jangka Waktu Kontrak						Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah Jangka Waktu Kontrak					
		< 1 tahun	> 1 tahun s.d 3 tahun	> 3 tahun s.d 5 tahun	> 5 tahun	Non-Kontraktual	Total	< 1 tahun	> 1 tahun s.d 3 tahun	> 3 tahun s.d 5 tahun	> 5 tahun	Non-Kontraktual	Total
11	Aset Lainnya	-	-	-	-	1,676,892	1,676,892	-	-	-	-	1,134,340	1,134,340
12	Eksposure di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	156,233	33,719	108,338	645,700	81,995	1,025,985	191,687	54,160	536,105	1,122	46,907	829,981
	Total	9,181,560	1,433,613	2,291,132	8,820,881	1,758,887	23,486,072	7,627,470	1,271,085	2,228,174	7,864,999	1,181,247	20,172,976

Tabel 2.3.a : PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN SEKTOR EKONOMI - BANK SECARA INDIVIDUAL

dalam jutaan rupiah | in millions rupiah

No	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan Kepada Bank	Kredit Beragun Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit Pegawai/ Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro,Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan Kepada Korporasi	Tagihan Yang telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya	Eksposure di Unit Usaha Syariah (apabila ada)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	31 Desember 2014												
1	Pertanian,perburuan dan kehutanan	-	-	-	-	548.00	-	-	1,021,086.00	-	4,745.00	-	73,334.45
2	Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	15,617.00	31,208.00	73.00	-	
3	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-	-	-	525.00	-	54.00	-	1,867.19
4	Industri pengolahan	-	-	-	-	-	-	-	23,543.00	-	1,974.00	-	1,331.97
5	Listrik,Gas,dan Air	-	109,083.85	-	-	-	-	-	930.00	1,088.00	-	-	90.28
6	Konstruksi	-	-	-	-	-	1,021.00	-	125,972.73	116,368.50	3,480.00	-	9,616.14
7	Perdagangan besar dan eceran	-	-	-	-	-	5,659.00	1,773.00	796,886.00	5,649.00	7,432.00	-	31,658.53
8	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	-	-	-	-	168.00	1,438.00	-	42,053.00	-	221.00	-	
9	Transportasi,pergudangan dan komunikasi	-	-	-	-	-	-	-	8,379.00	-	23.00	-	1,228.92
10	Perantara keuangan	-	38,986.13	-	5,694,580.48	-	-	-	1,610.00	19,593.54	-	-	
11	Real estate,usaha persewaan dan jasa perusahaan	-	-	-	-	-	-	-	7,424.00	459.00	102.00	-	27,594.00
12	Administrasi Pemerintahan,pertahanan dan jaminan sosial wajib	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Jasa pendidikan	-	-	-	-	-	-	-	3,139.00	-	-	-	
14	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	-	-	-	-	-	-	-	6,222.00	1,655.00	-	-	
15	Jasa ke masyarakatan,sosial budaya,hiburan dan perorangan lainnya	-	-	-	-	-	521.00	-	60,169.00	7,229.00	2,100.00	-	3,655.35
16	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	-	-	-	-	-	-	-	357.00	-	2.00	-	6,257.09
17	Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Tabel 2.3.a : PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN SEKTOR EKONOMI - BANK SECARA INDIVIDUAL

dalam jutaan rupiah | in millions rupiah

No	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan Kepada Bank	Kredit Beragun Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit Pegawai/ Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro,Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan Kepada Korporasi	Tagihan Yang telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya	Eksposure di Unit Usaha Syariah (apabila ada)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
20	Lainnya	2,715,090.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,676,892.00	240,392.00
	Total	**2,715,090.74**	**148,069.98**	**-**	**5,694,580.48**	**412,715.00**	**8,639.00**	**9,390,106.00**	**2,140,631.73**	**248,269.54**	**25,093.00**	**1,676,892.00**	**1,025,985**
	31 Desember 2013												
1	Pertanian,perburuan dan kehutanan	-	-	-	-	-	1,502	-	861,913	801	3,228	-	39,759
2	Perikanan	-	-	-	-	-	1,805	-	7,620	5,251	212	-	
3	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-	-	-	687	-	34	-	
4	Industri pengolahan	-	6,082	-	-	-	-	-	18,181	-	3,431	-	564
5	Listrik,Gas,dan Air	-	173,287	-	-	-	-	-	2,988	-	6	-	
6	Konstruksi	-	52,000	-	-	304	31,012	-	167,465	95,840	5,878	-	12,465
7	Perdagangan besar dan eceran	-	-	-	-	-	10,874	2,347	770,561	4,839	7,565	-	48,914
8	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	-	-	-	-	-	-	-	34,926	-	180	-	3,173
9	Transportasi,pergudangan dan komunikasi	-	5,855	-	-	-	2,502	-	7,094	-	431	-	238
10	Perantara keuangan	-	-	-	4,581,515	-	-	-	3,197	29,481	1,010	-	
11	Real estate,usaha persewaan dan jasa perusahaan	-	-	-	-	-	-	-	8,176	938	44	-	35,610
12	Administrasi Pemerintahan,pertahanan dan jaminan sosial wajib	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Jasa pendidikan	-	-	-	-	-	-	-	2,912	-	-	-	
14	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	-	-	-	-	-	-	-	10,851	-	86	-	378
15	Jasa ke masyarakatan,sosial budaya,hiburan dan perorangan lainnya	-	-	-	-	138	5,427	-	55,439	8,234	675	-	
16	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	-	-	-	-	-	-	-	425	-	-	-	
17	Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	486,980
19	Bukan Lapangan Usaha	-	-	-	-	403,155	40	8,588,900	30,300	80,756	6,177	-	
20	Lainnya	2,104,077	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,134,340	201,900
	Total	**2,104,077**	**237,223**	**-**	**4,581,515**	**403,597**	**53,162**	**8,591,247**	**1,982,735**	**226,139**	**28,957**	**1,134,340**	**829,981**

Tabel 2.4.a : PENGUNGKAPAN TAGIHAN DAN PENCADANGAN BERDASARKAN WILAYAH - BANK SECARA INDIVIDUAL

dalam jutaan rupiah | in millions rupiah

No	Keterangan	31 Desember 2014						31 Desember 2013					
		Wilayah						Wilayah					
		Wilayah 1	Wilayah 2	Wilayah 3	Wilayah 4	Wilayah 5	Total	Wilayah 1	Wilayah 2	Wilayah 3	Wilayah 4	Wilayah 5	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
1	Tagihan	9,969,355	1,582,542	8,461,970	1,260,893	2,644,433	23,919,193	8,219,128	1,401,762	7,394,764	1,100,740	2,056,582	20,172,976
2	Tagihan yang mengalami penurunan nilai (Impaired)												
	a. Belum jatuh tempo	91,354	12,052	230,075	13,104	-	346,585	85,927	12,706	185,451	11,157	-	295,241
	b. Telah jatuh tempo	63,342	34,415	233,583	5,435	-	336,775	66,485	39,313	226,885	5,310	-	337,993
3	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Individual	-	16,371	6,887	-	-	23,258	-	18,988	7,387	-	-	26,375
4	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Kolektif	78,781	23,455	259,348	7,868	1,137	370,589	101,766	25,642	249,800	11,141	34	388,383
5	Tagihan yang dihapus buku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 2.5.a : PENGUNGKAPAN TAGIHAN DAN PENCADANGAN BERDASARKAN SEKTOR EKONOMI - BANK SECARA INDIVIDUAL

dalam jutaan rupiah | in millions rupiah

No	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Individual	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Kolektif	Tagihan yang dihapus buku
			Belum jatuh Tempo	Telah jatuh Tempo			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	31 Desember 2014						
1	Pertanian,Perburuan dan Kehutanan	1,160,368	59,400	56,203	-	67,726	-
2	Perikanan	57,568	2,677	2,474	-	5,036	-
3	Pertambangan dan penggalian	3,327	161	483	-	451	-
4	Industri pengolahan	47,279	1,867	18,596	16,371	2,333	-
5	Listrik,Gas dan Air	126,390	439	-	-	45	-
6	Konstruksi	320,045	8,688	36,376	6,887	32,900	-
7	Perdagangan besar dan eceran	955,597	117,119	79,729	-	90,711	-
8	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	46,763	6,615	2,347	-	2,721	-
9	Transportasi,pergudangan dan komunikasi	10,599	2,475	903	-	971	-
10	Perantara keuangan	5,756,609	449	684	-	685	-
11	Real estate,usaha persewaan dan jasa perusahaan	38,900	530	759	-	1,228	-
12	Administrasi Pemerintahan,pertahanan dan jaminan sosial wajib	-	-	-	-	-	-
13	Jasa pendidikan	3,152	192	-	-	30	-
14	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	8,745	360	-	-	99	-
15	Jasa ke masyarakatan,sosial budaya,hiburan dan perorangan lainnya	81,045	5,436	5,822	-	4,857	-
16	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	7,067	20	17	-	20	-
17	Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	-	-	-	-	-	-
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya	-	-	-	-	-	-
19	Bukan Lapangan Usaha	10,658,144	140,157	132,382	-	158,350	-
20	Lainnya	4,637,594	-	-	-	1,155	-
	Total	23,919,191	346,585	336,775	23,258	369,318	-
	31 Desember 2013						
1	Pertanian,Perburuan dan Kehutanan	907,203	53,719	56,394	-	61,894	
2	Perikanan	14,888	185	2,546	-	2,915	
3	Pertambangan dan penggalian	721	242	495	-	498	
4	Industri pengolahan	28,258	888	18,942	16,505	2,964	
5	Listrik,Gas dan Air	176,281	-	99	-	280	

Tabel 2.5.a : PENGUNGKAPAN TAGIHAN DAN PENCADANGAN BERDASARKAN SEKTOR EKONOMI - BANK SECARA INDIVIDUAL

dalam jutaan rupiah | in millions rupiah

No	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Individual	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Kolektif	Tagihan yang dihapus buku
			Belum jatuh Tempo	Telah jatuh Tempo			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	31 Desember 2014						
9	Transportasi,pergudangan dan komunikasi	16,120	581	932	-	740	
10	Perantara keuangan	4,615,203	651	1,251	-	244	
11	Real estate,usaha persewaan dan jasa perusahaan	44,768	314	785	-	1,010	
12	Administrasi Pemerintahan,pertahanan dan jaminan sosial wajib	-	-	-	-	-	
13	Jasa pendidikan	2,912	97	-	-	94	
14	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	11,315	402	87	-	405	
15	Jasa ke masyarakatan,sosial budaya,hiburan dan perorangan lainnya	69,913	4,770	5,644	-	7,749	
16	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	425	31	24	-	29	
17	Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	-	-	-	-	-	
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya	486,980	2,174	3,757	-	-	
19	Bukan Lapangan Usaha	9,109,329	143,411	128,820	-	155,679	
20	Lainnya	3,440,318	-	-	-	1,155	
	Total	20,172,976	295,241	337,993	26,375	388,383	-

Tabel 2.6.a : PENGUNGKAPAN RINCIAN MUTASI CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI - BANK SECARA INDIVIDUAL

dalam jutaan rupiah | in millions rupiah

No.	Keterangan	31 Desember 2014		31 Desember 2013	
		CKPN Individual	CKPN Kolektif	CKPN Individual	CKPN Kolektif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Saldo awal CKPN	26,375	388,383	29,662	331,990
2	Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode berjalan (Net)				
	2.a. Pembentukan CKPN pada periode berjalan	-		4	65,973
	2. b. Pemilihan CKPN pada periode pembentukan	(3,117)	(19,065)	(3,291)	(9,580)
3	CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan pada periode berjalan			-	-
4	Pembentukan (prmulihan) lainnya pada periode berjalan			-	-
Saldo akhir CKPN		**23,258**	**369,318**	**26,375**	**388,383**

Tabel 3.1.a : PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN KATEGORI PORTOFOLIO DAN SKALA PERINGKAT - BANK SECARA INDIVIDUAL

dalam jutaan rupiah | in millions rupiah

31 Desember 2014															
No.	Kategori Portofolio		Tagihan Bersih											Tanpa Peringkat	Total
		Lembaga Pemeringkat	Peringkat Jangka Panjang							Peringkat Jangka Pendek					
		Standard and Poor's	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	Kurang dari B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3		
		Fitch Rating	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	Kurang dari B-	F1+ s.d F1	F2	F3	Kurang dari F3		
		Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3	A1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3	Ba1 s.d Ba3	B1 s.d B3	Kurang dari B3	P-1	P-2	P-3	Kurang dari P-3		
		PT. Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn)	A+ (idn) s.d A- (idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn)	BB+(idn) s.d BB-(idn)	B+(idn) s.d B-(idn)	Kurang dari B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari F3(idn)		
		PT. ICRA Indonesia	[idr]AAA	[idr]AA+ s.d [idr]AA-	[idr] A+ s.d [idr] A-	[idr]BBB+ s.d [idr] BBB-	[idr]BB+ s.d [idr] BB-	[idr]B+ s.d [idr] B-	Kurang dari [idr] B-	[idr]A1+ s.d [idr] A1	[idr] A2+ s.d [idr]A2	[idr] A3+ s.d [idr]A3	Kurang dari [idr] A3		
		PT. Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-	idA+ s.d id A-	id BBB+ s.d id BBB-	id BB+ s.d id BB-	id B+ s.d id B-	Kurang dari idB-	idA1	idA2	idA3 s.d id A4	Kurang dari idA4		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Tagihan Kepada Pemerintah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,715,091	2,715,091
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik		8,896	20,000	10,090	-	-	-	-	-	-	-	-	109,084	148,070
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasinal		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank		2,934,891	638,751	930,678	25,000	-	-	-	-	-	-	-	1,165,261	5,694,580
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal													412,715	412,715

Tabel 3.1.a : PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN KATEGORI PORTOFOLIO DAN SKALA PERINGKAT - BANK SECARA INDIVIDUAL

dalam jutaan rupiah | in millions rupiah

6	Kredit Beragun Properti Komersial													8,639	8,639
7	Kredit Pegawai/Pensiunan													9,390,106	9,390,106
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro,Usaha Kecil dan Portofolio Ritel													2,140,632	2,140,632
9	Tagihan Kepada Korporasi		19,594	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	228,676	248,270
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo													25,093	25,093
11	Aset Lainnya													1,676,892	1,676,892
12	Eksposure di Unit Usaha Syariah (apabila ada)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,025,985	1,025,985
	Total		2,963,379.59	658,750.74	940,768.13	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	18,898,173.98	23,486,072

Tabel 3.1.a : PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN KATEGORI PORTOFOLIO DAN SKALA PERINGKAT - BANK SECARA INDIVIDUAL

dalam jutaan rupiah | in millions rupiah

31 Desember 2013														
			Tagihan Bersih											
	Kategori Portofolio	Lembaga Pemeringkat	Peringkat Jangka Panjang							Peringkat Jangka Pendek				Tanpa Peringkat	Total
		Standard and Poor's	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	Kurang dari B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3		
		Fitch Rating	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	Kurang dari B-	F1+ s.d F1	F2	F3	Kurang dari F3		
		Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3	A1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3	Ba1 s.d Ba3	B1 s.d B3	Kurang dari B3	P-1	P-2	P-3	Kurang dari P-3		
		PT. Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn)	A+ (idn) s.d A- (idn)	BBB+(idn) s.d BBB- (idn)	BB+(idn) s.d BB- (idn)	B+(idn) s.d B-(idn)	Kurang dari B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari F3(idn)		
		PT. ICRA Indonesia	[idr]AAA	[idr]AA+ s.d [idr]AA-	[idr] A+ s.d [idr] A-	[idr]BBB+ s.d [idr] BBB-	[idr]BB+ s.d [idr] BB-	[idr]B+ s.d [idr] B-	Kurang dari [idr] B-	[idr]A1+ s.d [idr] A1	[idr] A2+ s.d [idr]A2	[idr]A3+ s.d [idr] A3	Kurang dari [idr]A3		
		PT. Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-	idA+ s.d id A-	id BBB+ s.d id BBB-	id BB+ s.d id BB-	id B+ s.d id B-	Kurang dari idB-	idA1	idA2	idA3 s.d id A4	Kurang dari idA4		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Tagihan Kepada Pemerintah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,104,077	3,862,039
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik		29,141.94	58,081.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,089	179,492
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasinal		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank		2,610,723.91	313,792.73	1,043,254.11	-	-	-	-	-	-	-	-	613,745	5,045,390
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal													403,551	416,027

Tabel 3.1.a : PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN KATEGORI PORTOFOLIO DAN SKALA PERINGKAT - BANK SECARA INDIVIDUAL

dalam jutaan rupiah | in millions rupiah

6	Kredit Beragun Properti Komersial													44,175	34,061
7	Kredit Pegawai/Pensiunan													403,551	7,324,901
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro,Usaha Kecil dan Portofolio Ritel													1,863,754	1,672,172
9	Tagihan Kepada Korporasi		19,302.63	-	10,178.08	-	-	-	-	-	-	-	-	67,141	163,056
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo													17,997	21,806
11	Aset Lainnya														1,013,109
12	Eksposure di Unit Usaha Syariah (apabila ada)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	829,981	683,942
	Total	-	2,659,168	371,874	1,053,432	-	-	-	-	-	-	-	-	6,436,060	20,415,996

Tabel 3.2.a : PENGUNGKAPAN RISIKO KREDIT PIHAK LAWAN : TRANSAKSI DERIVATIF

dalam jutaan rupiah | in millions rupiah

No	Variabel yang Mendasari	31 Desember 2014								31 Desember 2013							
		Notional Amount			Tagihan Derivatif	Kewajiban Derivatif	Tagihan Bersih Sebelum MRK	MRK	Tagihan Bersih Setelah MRK	Notional Amount			Tagihan Derivatif	Kewajiban Derivatif	Tagihan Bersih Sebelum MRK	MRK	Tagihan Bersih Setelah MRK
		< 1 Tahun	> 1 Tahun < 5 Tahun	> 5 Tahun						< 1 Tahun	> 1 Tahun < 5 Tahun	> 5 Tahun					
BANK SECARA INDIVIDUAL																	
1	Suku Bunga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Nilai Tukar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANK SECARA KONSOLIDASI																	
1	Suku Bunga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Nilai Tukar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Satuan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Emas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Logam selain Emas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 3.2.b.1 : PENGUNGKAPAN RISIKO KREDIT PIHAK LAWAN : TRANSAKSI REPO - BANK SECARA INDIVIDUAL

dalam jutaan rupiah | in millions rupiah

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2014				31 Desember 2013			
		Nilai Wajar SSB Repo	Kewajiban Repo	Tagihan Bersih	ATMR	Nilai Wajar SSB Repo	Kewajiban Repo	Tagihan Bersih	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro,Usaha Kecil,dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Tabel 3.2.c.1 : PENGUNGKAPAN RISIKO KREDIT PIHAK LAWAN : TRANSAKSI REVERSE REPO - BANK SECARA INDIVIDUAL

dalam jutaan rupiah | in millions rupiah

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2014				31 Desember 2013			
		Tagihan Bersih	Nilai MRK	Tagihan Bersih Setelah MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	Nilai MRK	Tagihan Bersih Setelah MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro,Usaha Kecil,dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Tabel 4.1.a : PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN BOBOT RISIKO SETELAH MEMPERHITUNGKAN DAMPAK MITIGASI RISIKO KREDIT - BANK SECARA INDIVIDUAL

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2014										ATMR
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit										
		0%	20%	35%	40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
A	Eksposur Neraca											
1	Tagihan Kepada Pemerintah	2,715,091	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	93,902	28,896	-	-	-	10,090	-	-	-	-	10,824
3	Tagihan Kepada Bank Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	5,684,580	-	-	-	10,000	-	-	-	-	1,141,916
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	7,763	375,269	29,667	-	-	-	-	-	166,175
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-	-	7,750	-	-	7,750
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	9,390,106	-	-	-	-	4,695,053
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro,Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	2,070,155	-	-	-	1,552,616
9	Tagihan Kepada Korporasi	-	19,594	-	-	-	-	-	91,145	-	-	95,064
10	Tagihan yang Telah jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-	-	284	19,520	-	29,564
11	Aset lainnya	766,234	-	-	-	-	-	-	910,157	500	-	910,907
12	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,022,870	479,797
	Total Eksposur Neraca	3,575,227	5,733,070	7,763	375,269	29,667	9,410,196	2,070,155	1,009,336	20,020	1,022,870	9,089,666
B	Eksposur Kewajiban Komitmen /Kontijensi pd Transaksi Rekening Administratif											
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	15,182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	6
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-	-	889	-	-	889
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro,Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	70,476	-	-	-	52,857
9	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-	-	137,531	-	-	137,531

Tabel 4.1.a : PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN BOBOT RISIKO SETELAH MEMPERHITUNGKAN DAMPAK MITIGASI RISIKO KREDIT - BANK SECARA INDIVIDUAL

dalam jutaan rupiah | in millions rupiah

Beban Modal	31 Desember 2013										ATMR	Beban Modal
	Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit											
	0%	20%	35%	40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya		
(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
-	2,104,077	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
866	88,089	87,223	-	-	-	-	-	-	-	-	17,445	1,396
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91,353	-	4,581,515	-	-	-	-	-	-	-	-	916,303	73,304
13,294	-	-	28,233	365,068	10,250	-	-	-	-	-	160,521	12,842
620	-	-	-	-	-	-	-	44,175	-	-	44,175	3,534
375,604	-	-	-	-	-	8,591,247	-	-	-	-	4,295,624	343,650
124,209	-	-	-	-	-	-	1,863,754	-	-	-	1,397,815	111,825
7,605	-	19,303	-	-	-	10,178	-	67,141	-	-	76,091	6,087
2,365	-	-	-	-	-	-	-	3,821	14,176	-	25,085	2,007
72,873	562,570	-	-	-	-	-	-	571,269	500	-	572,020	45,762
38,384	-	-	-	-	-	-	-	-	-	810,950	373,884	29,911
727,173	2,754,736	4,688,041	28,233	365,068	10,250	8,601,425	1,863,754	686,406	14,676	810,950	7,878,962	630,317
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	30,955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	8	16	-	-	-	-	-	-	9	1
71	-	-	-	-	-	-	-	4,494	-	-	4,494	360
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4,229	-	-	-	-	-	-	79,733	-	-	-	59,800	4,784
11,002	-	-	-	-	-	-	-	120,805	-	-	120,805	9,664

Tabel 4.1.a : PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN BOBOT RISIKO SETELAH MEMPERHITUNGKAN DAMPAK MITIGASI RISIKO KREDIT - BANK SECARA INDIVIDUAL

10	Tagihan yang Telah jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-	-	-	5,289	-	7,933
11	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,115	1,580
	Total Eksposur TRA	15,182	-	-	16	-	-	70,476	138,420	5,289	3,115	200,797
C	Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)											
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro,Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Eksposur Counterparty Credit Risk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 4.1.a : PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN BOBOT RISIKO SETELAH MEMPERHITUNGKAN DAMPAK MITIGASI RISIKO KREDIT - BANK SECARA INDIVIDUAL

dalam jutaan rupiah | in millions rupiah

635	-	-	-	-	-	-	-	-	5,480	-	8,221	658
126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,031	9,700	776
16,064	30,955	-	8	16	-	-	79,733	125,299	5,480	19,031	203,028	16,242
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 4.2.a : PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH DAN TEKNIK MITIGASI RISIKO KREDIT - BANK SECARA INDIVIDUAL

dalam jutaan rupiah | in millions rupiah

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2014						31 Desember 2013					
		Tagihan Bersih	Bagian yang Dijamin Dengan				Bagian yang Tidak Dijamin	Tagihan Bersih	Bagian yang Dijamin Dengan				Bagian yang Tidak Dijamin
			Agunan	Garansi	Asuransi kredit	Lainnya			Agunan	Garansi	Asuransi kredit	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (3)-[(4)+(5)+(6)+(7)]	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) = (9)-[(10)+(11)+(12)+(13)]
A	Eksposur Neraca												
1	Tagihan Kepada Pemerintah	2,715,091	-	-	-	2,715,091	-	2,104,077	-	-	-	2,104,077	-
2	Tagihan Kepada Entitas Publik	132,888	-	-	-	91,064	41,824	175,313	-	-	-	88,089	87,223
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan dan lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	5,694,580	-	-	-	-	5,694,580	4,581,515	-	-	-	-	4,581,515
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	412,699					412,699	403,551					403,551
6	Kredi Beragun Properti Komersial	7,750					7,750	44,175					44,175
7	Kredit Pegawai/ Pensiunan	9,390,106					9,390,106	8,591,247					8,591,247
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro,Usaha Kecil,dan Portofolio Ritel	2,070,155					2,070,155	1,863,754					1,863,754
9	Tagihan Kepada Korporasi	110,738					110,738	96,622					96,622
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	19,804					19,804	17,997					17,997
11	Aset Lainnya	1,676,892					1,676,892	1,134,340					1,134,340
12	Ekposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	1,022,870					1,022,870	810,950					810,950

Tabel 4.2.a : PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH DAN TEKNIK MITIGASI RISIKO KREDIT - BANK SECARA INDIVIDUAL

dalam jutaan rupiah | in millions rupiah

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2014						31 Desember 2013					
		Tagihan Bersih	Bagian yang Dijamin Dengan				Bagian yang Tidak Dijamin	Tagihan Bersih	Bagian yang Dijamin Dengan				Bagian yang Tidak Dijamin
			Agunan	Garansi	Asuransi kredit	Lainnya			Agunan	Garansi	Asuransi kredit	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (3)-[(4)+(5)+(6)+(7)]	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) = (9)-[(10)+(11)+(12)+(13)]
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Publik	15,182				15,182	-	30,955				30,955	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan dan lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	16	-	-	-	-	16	23	-	-	-	-	23
6	Kredi Beragun Properti Komersial	889	-	-	-	-	889	4,494	-	-	-	-	4,494
7	Kredit Pegawai/ Pensiunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro,Usaha Kecil,dan Portofolio Ritel	70,476	-	-	-	-	70,476	79,733	-	-	-	-	79,733
9	Tagihan Kepada Korporasi	137,531	-	-	-	-	137,531	120,805	-	-	-	-	120,805
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	5,289	-	-	-	-	5,289	5,480	-	-	-	-	5,480
11	Ekposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	3,115	-	-	-	-	3,115	19,031	-	-	-	-	19,031

Tabel 4.2.a : PENGUNGKAPAN TAGIHAN BERSIH DAN TEKNIK MITIGASI RISIKO KREDIT - BANK SECARA INDIVIDUAL

dalam jutaan rupiah | in millions rupiah

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2014						31 Desember 2013					
		Tagihan Bersih	Bagian yang Dijamin Dengan				Bagian yang Tidak Dijamin	Tagihan Bersih	Bagian yang Dijamin Dengan				Bagian yang Tidak Dijamin
			Agunan	Garansi	Asuransi kredit	Lainnya			Agunan	Garansi	Asuransi kredit	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (3)-[(4)+(5)+(6)+(7)]	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) = (9)-[(10)+(11)+(12)+(13)]
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Publik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan dan lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro,Usaha Kecil,dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Ekposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Ekposur Counterparty Credit Risk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total (A)+(B)+(C)		23,486,072	-	-	-	2,821,337	20,664,735	20,084,062	-	-	-	2,223,121	17,860,940

Tabel 5.1.a : PENGUNGKAPAN TRANSAKSI SEKURITISASI - BANK SECARA INDIVIDUAL

dalam jutaan rupiah | in millions rupiah

No	Eksposur Sekuritisasi	31 Desember 2014						31 Desember 2013					
		Nilai Aset yang Disekuritisasi	Nilai Aset yang disekuritisasi yang mengalami penurunan nilai		Laba/Rugi dari aktivitas sekuritisasi	ATMR	Pengurang Modal	Nilai Aset yang Disekuritisasi	Nilai Aset yang disekuritisasi yang mengalami penurunan nilai		Laba/Rugi dari aktivitas sekuritisasi	ATMR	Pengurang Modal
			Telah Jatuh Tempo	Belum Jatuh tempo					Telah Jatuh Tempo	Belum Jatuh tempo			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Bank bertindak sebagai Kreditur asal												
	- Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)												
2	Bank bertindak sebagai Penyedia Kredit Pendukung												
	a. Fasilitas pemegang risiko pertama												
	- Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)												
	b. Fasilitas pemegang risiko kedua												
	- Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)												
3	Bank bertindak sebagai Penyedia Fasilitas Likuiditas												
	- Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)												

Tabel 5.1.a : PENGUNGKAPAN TRANSAKSI SEKURITISASI - BANK SECARA INDIVIDUAL

dalam jutaan rupiah | in millions rupiah

No	Eksposur Sekuritisasi	31 Desember 2014						31 Desember 2013					
		Nilai Aset yang Disekuritisasi	Nilai Aset yang disekuritisasi yang mengalami penurunan nilai		Laba/Rugi dari aktivitas sekuritisasi	ATMR	Pengurang Modal	Nilai Aset yang Disekuritisasi	Nilai Aset yang disekuritisasi yang mengalami penurunan nilai		Laba/Rugi dari aktivitas sekuritisasi	ATMR	Pengurang Modal
			Telah Jatuh Tempo	Belum Jatuh tempo					Telah Jatuh Tempo	Belum Jatuh tempo			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	- Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)												
6	Bank bertindak sebagai Pemodal												
	a. senior tranche												
	- Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)												
	b. junior tranche												
	- Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)												

Tabel 5.1.a : PENGUNGKAPAN RINGKASAN AKTIVITAS TRANSAKSI SEKURITISASI BANK BERTINDAK SEBAGAI KREDITUR - BANK SECARA INDIVIDUAL

dalam jutaan rupiah | in millions rupiah

No	Underlying Asset	31 Desember 2014		31 Desember 2013	
		Nilai Aset yang Disekuritisasi	Keuntungan (Kerugian) penjualan	Nilai Aset yang Disekuritisasi	Keuntungan (Kerugian) penjualan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
		-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-
5	Kredit beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro,Usaha Kecil,dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-
10	Aset Lainnya	-	-	-	-
11	Eksposur di Unit Usaha Syariah	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-

Tabel 6.1.1 : PENGUNGKAPAN EKSPOSURE ASET DI NERACA

dalam jutaan rupiah | in millions rupiah

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2014			31 Desember 2013		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)	(4)	(5)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	2,715,091	-	-	2,104,077	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	132,888	57,775	10,824	175,313	61,489	17,445
3	Tagihan Kepada Bank Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	5,694,580	1,141,916	1,141,916	4,581,515	916,303	916,303
5	Kredit beragun Rumah Tinggal	412,699	166,175	166,175	403,551	160,521	160,521
6	Kredit beragun Properti Komersial	7,750	7,750	7,750	44,175	44,175	44,175
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	9,390,106	4,695,053	4,695,053	8,591,247	4,295,624	4,295,624
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro,Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	2,070,155	1,552,616	1,552,616	1,863,754	1,397,815	1,397,815
9	Tagihan kepada Korporasi	110,738	95,064	95,064	96,622	76,091	76,091
10	Tagihan yang telah jatuh tempo	19,804	29,564	29,564	17,997	25,085	25,085
11	Aset lainnya	1,676,892		910,908	1,134,340		572,020
TOTAL		**22,230,704**	**7,745,913**	**8,609,871**	**19,012,590**	**6,977,102**	**7,505,078**

Tabel 6.1.2 : PENGUNGKAPAN EKSPOSUR KEWAJIBAN KOMITMEN/KONTINJENSI PADA TRANSAKSI REKENING ADMINISTRATIF

dalam jutaan rupiah | in millions rupiah

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2014			31 Desember 2013		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)	(4)	(5)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	15,182	7,591	-	30,955	15,478	-
3	Tagihan Kepada Bank Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	-
5	Kredit beragun Rumah Tinggal	16	6	6	23	9	9
6	Kredit beragun Properti Komersial	889	889	889	4,494	4,494	4,494
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro,Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	70,476	52,857	52,857	79,733	59,800	59,800
9	Tagihan kepada Korporasi	137,531	137,531	137,531	120,805	120,805	120,805
10	Tagihan yang telah jatuh tempo	5,289	7,933	7,933	5,480	8,221	8,221
	TOTAL	229,383	206,808	199,217	241,491	208,806	193,328

Tabel 6.1.3 : PENGUNGKAPAN EKSPOSUR YANG MENIMBULKAN RISIKO KREDIT AKIBAT KEGAGALAN PIHAK LAWAN (COUNTERPARTY CREDIT RISK)

dalam jutaan rupiah | in millions rupiah

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2014			31 Desember 2013		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro,Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-
TOTAL		-	-	-	-	-	-

Tabel 6.1.4 : PENGUNGKAPAN EKSPOSUR YANG MENIMBULKAN RISIKO KREDIT AKIBAT KEGAGALAN SETELMEN (SETTLEMENT RISK)

dalam jutaan rupiah | in millions rupiah

No	Jenis Transaksi	31 Desember 2014			31 Desember 2013		
		Nilai Eksposur	Faktor Pengurang Modal	ATMR Setelah MRK	Nilai Eksposur	Faktor Pengurang Modal	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Delivery versus payment	-	-	-	-	-	-
	a. Beban Modal 8% (5-15 hari)						
	b. Baban Modal 50% (16-30 hari)						
	c. Beban Modal 75% (31-45 hari)						
	d. Beban Modal 100% (lebih dari 45 hari)						
2	Non delivery versus payment	-	-	-	-	-	-
TOTAL		-	-	-	-	-	-

Tabel 6.1.5 : PENGUNGKAPAN EKSPOSUR SEKURITISASI

dalam jutaan rupiah | in millions rupiah

No	Jenis Transaksi	31 Desember 2014		31 Desember 2013	
		Faktor Pengurang Modal	ATMR	Faktor Pengurang Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Fasilitas Kredit Pendukung yang memenuhi persyaratan	-	-	-	-
2	Fasilitas Kredit Pendukung yang tidak memenuhi persyaratan	-	-	-	-
3	Fasilitas Likuiditas yang memenuhi persyaratan	-	-	-	-
4	Fasilitas Likuiditas yang tidak memenuhi persyaratan	-	-	-	-
5	Pembelian Efek Beragun Aset yang memenuhi persyaratan	-	-	-	-
6	Pembelian Efek Beragun Aset yang tidak memenuhi persyaratan	-	-	-	-
7	Eksposur Sekuritisasi yang tidak tercakup dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai prinsip-prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum	-	-	-	-
TOTAL		-	-	-	-

Tabel 6.1.6 : PENGUNGKAPAN EKSPOSUR DI UNIT USAHA SYARIAH

dalam jutaan rupiah | in millions rupiah

No	Jenis Transaksi	31 Desember 2014		31 Desember 2013	
		Faktor Pengurang Modal	ATMR	Faktor Pengurang Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)
1	Total Eksposur	-	481,377	-	383,584

Tabel 6.1.5 : PENGUNGKAPAN EKSPOSUR SEKURITISASI

dalam jutaan rupiah | in millions rupiah

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
TOTAL ATMR RISIKO KREDIT	9,290,464	8,081,990
TOTAL FAKTOR PENGURANG MODAL	-	-

Tabel 7.1 : PENGUNGKAPAN RISIKO PASAR DENGAN MENGGUNAKAN METODE STANDAR

dalam jutaan rupiah | in millions rupiah

No	Jenis Risiko	31 Desember 2014				31 Desember 2013			
		Bank		Konsolidasi		Bank		Konsolidasi	
		Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Risiko Suku Bunga			-	-			-	-
	a. Risiko Spesifik	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Risiko Umum	-	-	-	-	2,255	28,192	-	-
2	Risiko Nilai Tukar	7,135	89,186	-	-	3,160	39,502	-	-
3	Risiko Ekuitas *)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Risiko Komoditas *)	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Risiko Option	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	**7,135**	**89,186**	**-**	**-**	**5,415**	**67,694**	**-**	**-**

Tabel 7.2.a : PENGUNGKAPAN RISIKO PASAR DENGAN MENGGUNAKAN MODEL INTERNAL (VALUE AT RISK/ VaR) - BANK SECARA INDIVIDUAL

dalam jutaan rupiah | in millions rupiah

NO.	Jenis Risiko	31 Desember 2014				31 Desember 2013			
			VaR Maksimum	VaR Minimum	VaR Akhir Periode		VaR Maksimum	VaR Minimum	VaR Akhir Periode
(1)	(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Risiko Suku Bunga	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Risiko Nilai Tukar	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Risiko Option	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 8.1.a : PENGUNGKAPAN KUANTITATIF RISIKO OPERASIONAL - BANK SECARA INDIVIDUAL

dalam jutaan rupiah | in millions rupiah

No	Pendekatan Yang Digunakan	31 Desember 2014			31 Desember 2013		
		Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 tahun terakhir	Beban Modal	ATMR	Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 tahun terakhir	Beban Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)	(4)	(5)
1	Pendekatan Indikator Dasar	1,175,938	176,391	2,204,885	1,072,406	160,861	2,010,761
	Total	**1,175,938**	**176,391**	**2,204,885**	**1,072,406**	**160,861**	**2,010,761**

Tabel 9.1.a : PENGUNGKAPAN PROFIL MATURITAS RUPIAH - BANK SECARA INDIVIDUAL

dalam jutaan rupiah | in millions rupiah

No.	Pos-pos	31 Desember 2014						31 Desember 2013					
		Saldo	Jatuh Tempo					Saldo	Jatuh Tempo				
			≤ 1 bulan	> 1 bulan s.d 3 bulan	> 3 bulan s.d 6 bulan	> 6 bulan s.d 12 bulan	> 12 bulan		≤ 1 bulan	> 1 bulan s.d 3 bulan	> 3 bulan s.d 6 bulan	> 6 bulan s.d 12	> 12 bulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
I	**NERACA**												
	A. Aset												
	1. Kas	**752,709**	752,709	-	-	-	-	**553,443**	553,443	-	-	-	-
	2. Penempatan pada Bank Indonesia	**2,622,098**	1,397,329	344,678	880,091	-	-	**2,029,561**	1,775,836	-	-	253,725	-
	3. Penempatan pada Bank lain	**5,558,220**	5,357,620	200,600	-	-	-	**4,450,268**	4,450,268	-	-	-	-
	4. Surat Berharga	**195,130**	-	-	-	5,818	189,312	**180,206**	15,025	-	-	43,236	121,945
	5. Kredit yang Diberikan	**12,325,548**	67,009	116,459	138,077	193,098	11,810,905	**11,332,566**	65,139	145,611	140,227	198,540	10,783,049
	6. Tagihan lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7. Lain-lain	**507,538**	83,955	180,023	115,057	62,775	65,728	**375,088**	80,676	8,365	7,077	136,390	142,580
	Total Aset	**21,961,243**	**7,658,622**	**841,760**	**1,133,225**	**261,691**	**12,065,945**	**18,921,131**	**6,940,387**	**153,976**	**147,304**	**631,891**	**11,047,574**
	B. Kewajiban												
	1. Dana Pihak Ketiga	**16,240,364**	12,118,690	1,277,080	1,259,955	929,693	654,946	**12,980,317**	#########	706,210	518,536	359,018	421,623
	2. Kewajiban pada Bank Indonesia	**6**	-	-	-	-	6	**59**	-	-	-	-	59
	3. Kewajiban pada Bank Lain	**1,730,746**	1,725,246	3,000	2,500	-	-	**1,820,188**	1,820,188	-	-	-	-
	4. Surat Berharga yang Diterbitkan	**499,894**	-	-	-	-	499,894	**499,785**	-	-	-	-	499,785
	5. Pinjaman Yang Diterima	**309,714**	-	-	-	-	309,714	**4,238**	-	-	-	-	4,238
	6. Kewajiban Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7. Lain-lain	**1,074,937**	460,678	132,463	135,561	136,374	209,861	**1,458,614**	625,180	187,297	190,395	191,208	264,534
	Total Kewajiban	**19,855,661**	**14,304,614**	**1,412,543**	**1,398,016**	**1,066,067**	**1,674,421**	**16,763,201**	#########	**893,507**	**708,931**	**550,226**	**1,190,239**
	Selisih Aset dan Kewajiban dalam Neraca	**2,105,582**	**(6,645,992)**	**(570,783)**	**(264,791)**	**(804,376)**	**10,391,524**	**2,157,930**	**(6,479,911)**	**(739,531)**	**(561,627)**	**81,665**	**9,857,335**
II	**REKENING ADMINISTRATIF**												
	A. Tagihan Rekening Administrarif												
	1. Komitmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Kontijensi	**160,049**	160,049	-	-	-	-	**120,684**	120,684	-	-	-	-
	Total Tagihan Rekening Administratif	**160,049**	**160,049**	-	-	-	-	**120,684**	**120,684**	-	-	-	-
	B. Kewajiban Rekening Administratif												
	1. Komitmen	**154,533**	27,986	18,514	35,204	38,714	34,115	**177,826**	16,006	11,928	50,181	28,119	71,592
	2. Kontijensi	**152,117**	63,033	36,859	32,598	6,856	12,771	**152,577**	84,094	13,313	28,618	14,411	12,141
	Total Kewajiban Rekening Administratif	**306,650**	**91,019**	**55,373**	**67,802**	**45,570**	**46,886**	**330,403**	**100,100**	**25,241**	**78,799**	**42,530**	**83,733**
	Selisih Tagihan dan Kewajiban Dalam Rekening Administratif	**(146,601)**	**69,030**	**(55,373)**	**(67,802)**	**(45,570)**	**(46,886)**	**(209,719)**	**20,584**	**(25,241)**	**(78,799)**	**(42,530)**	**(83,733)**
	Selisih (IA-IB)+(IIA-IIB)	**1,958,981**	**(6,576,962)**	**(626,156)**	**(332,593)**	**(849,946)**	**10,344,638**	**1,948,211**	**(6,459,327)**	**(764,772)**	**(640,426)**	**39,135**	**9,773,602**
	Selisih Kumulatif		**(6,576,962)**	########	########	**(8,385,657)**	**1,958,981**		**(6,459,327)**	**(7,224,099)**	**(7,864,525)**	########	**1,948,211**

Tabel 9.2.b : PENGUNGKAPAN PROFIL MATURITAS VALAS - BANK SECARA INDIVIDUAL

dalam jutaan rupiah | in millions rupiah

No.	Pos-pos	31 Desember 2014						31 Desember 2013					
		Saldo	Jatuh Tempo					Saldo	Jatuh Tempo				
			≤ 1 bulan	> 1 bulan s.d 3	> 3 bulan s.d 6	> 6 bulan s.d 12	> 12 bulan		≤ 1 bulan	> 1 bulan s.d 3	> 3 bulan s.d 6	> 6 bulan s.d 12	> 12 bulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
I	NERACA												
	A. Aset												
	1. Kas	1,092	1,092	-	-	-	-	750	750	-	-	-	-
	2. Penempatan pada Bank Indonesia	2,005	2,005	-	-	-	-	905	905	-	-	-	-
	3. Penempatan pada Bank lain	5,488	5,488	-	-	-	-	10,785	10,785	-	-	-	-
	4. Surat Berharga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5. Kredit yang Diberikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6. Tagihan lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7. Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Aset	8,585	8,585	-	-	-	-	12,440	12,440	-	-	-	-
	B. Kewajiban												
	1. Dana Pihak Ketiga	1,396	1,363	23	8	2	-	6,204	6,103	91	8	2	-
	2. Kewajiban pada Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Kewajiban pada Bank Lain	-	-	-	-	-	-	3,000	3,000	-	-	-	-
	4. Surat Berharga yang Diterbitkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5. Pinjaman Yang Diterima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6. Kewajiban Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7. Lain-lain	7,190	7,190	-	-	-	-	3,234	3,234	-	-	-	-
	Total Kewajiban	8,586	8,553	23	8	2	-	12,438	12,337	91	8	2	-
	Selisih Aset dan Kewajiban dalam Neraca	(1)	32	(23)	(8)	(2)	-	2	103	(91)	(8)	(2)	-
II	REKENING ADMINISTRATIF												
	A. Tagihan Rekening Administrarif												
	1. Komitmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Kontijensi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Tagihan Rekening Administratif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B. Kewajiban Rekening Administratif												
	1. Komitmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Kontijensi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Kewajiban Rekening Administratif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 9.2.b : PENGUNGKAPAN PROFIL MATURITAS VALAS - BANK SECARA INDIVIDUAL

dalam jutaan rupiah | in millions rupiah

No.	Pos-pos	31 Desember 2014						31 Desember 2013					
		Saldo	Jatuh Tempo					Saldo	Jatuh Tempo				
			≤ 1 bulan	> 1 bulan s.d 3	> 3 bulan s.d 6	> 6 bulan s.d 12	> 12 bulan		≤ 1 bulan	> 1 bulan s.d 3	> 3 bulan s.d 6	> 6 bulan s.d 12	> 12 bulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Selisih Tagihan dan Kewajiban Dalam Rekening Administratif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Selisih (IA-IB)+(IIA-IIB)	(1)	32	(23)	(8)	(2)	-	2	103	(91)	(8)	(2)	-
	Selisih Kumulatif		32	9	1	(1)	(1)		103	12	4	2	2





LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Good Corporate Governance

"Secara konsisten Bank Riau Kepri berkomitmen untuk melaksanakan dan menerapkan prinsip tata kelola perusahan yang baik dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* yang berkesinambungan".

PENDAHULUAN

Bank Riau Kepri menyadari arti pentingnya implementasi GCG sebagai salah satu alat untuk meningkatkan nilai dan pertumbuhan bisnis jangka panjang secara berkesinambungan, tidak hanya bagi Pemegang Saham (Shareholders) namun juga segenap pemangku kepentingan (Stakeholders), dengan pengelolaan bisnis yang bukan hanya mengejar keuntungan semata namun juga pengelolaan yang penuh amanah, transparan dan akuntabel.

Kepercayaan Stakeholders sebagai pemangku kepentingan, merupakan faktor yang sangat menentukan bagi perkembangan dan kelangsungan usaha Bank. Kredibilitas Bank dan kepercayaan pemangku kepentingan sangat erat kaitannya dengan perilaku Bank dalam berinteraksi dengan para pemangku kepentingan. Pengelolaan Bank selain harus mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku juga harus menjunjung tinggi norma dan nilai etika. Kesadaran untuk menjalankan etika yang baik akan meningkatkan dan memperkuat reputasi Bank.

Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank senantiasa selalu berlandaskan pada lima prinsip dasar Good Corporate Governance. Pertama, transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Ketiga, pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Keempat, independensi (independency) yaitu pengelolan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Kelima, kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak–hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang–undangan yang berlaku.

Dalam rangka mewujudkan komitmen Bank dalam melaksanakan ketentuan Bank Indonesia khususnya Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006, yang di dalamnya ditegaskan bahwa "Bank wajib menyusun laporan pelaksanaan Good Corporate Governance pada setiap akhir tahun buku" serta guna memenuhi transparansi pelaksanaan GCG Bank sebagaimana dimaksud di dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, Bank menyusun laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance untuk tahun 2014 (periode Januari s/d Desember).

KEBIJAKAN, PROGRAM, MEKANISME GCG DAN UNIT KERJA PENGELOLA GCG

KEBIJAKAN GCG

Pelaksanaan dan penerapan GCG Bank pada awalnya dilakukan berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 70/KEPDIR/2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang Kebijakan Good Corporate Governance, berikut perubahannya Nomor 68.A/ KEPDIR/2011 tanggal 26 Juli 2011 tentang Perubahan Pertama SK Direksi Nomor 70/KEPDIR/2007 tentang Kebijakan Good Corporate Governance PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.

Sejalan dengan perubahan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum yang mencabut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, Bank telah melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap ketentuan Bank Indonesia tersebut khususnya yang menyangkut dengan kebijakan GCG Bank, hal ini ditandai dengan telah diterbitkannya Keputusan Direksi Nomor 138/KEPDIR/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Good Corporate Governance PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.

Keputusan Direksi Nomor 138/KEPDIR/2013 tanggal 31 Desember 2013 di atas merupakan perubahan dan penyempurnaan atas Keputusan Direksi Nomor 70/KEPDRI/2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang Kebijakan Good Corporate Governance dan Keputusan Direksi Nomor 68.A/KEPDRI/2011 tanggal 26 Juli 2011 tentang Perubahan Pertama SK Direksi Nomor 70/KEPDRI/2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang Kebijakan Good Corporate Governance.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan dan penerapan GCG, selain telah menerbitkan Kebijakan tentang Compliance Charter (Piagam Kepatuhan) sebagaimana termuat di dalam Keputusan Direksi Nomor 67/KEPDIR/2013 tanggal 31 Juli 2013, Bank sepanjang tahun 2014 telah menerbitkan ketentuan mengenai pedoman kerja Dewan Komisaris sebagai

"Secara konsisten **Bank Riau Kepri** berkomitmen untuk melaksanakan dan menerapkan prinsip tata kelola **perusahan yang baik** dengan prinsip-prinsip ***Good Corporate Governance (GCG)*** yang berkesinambungan".

mana yang termuat di dalam Keputusan Dewan Komisaris Nomor 001/KEPDKS/X/2014 tanggal 03 Oktober 2014 dan beberapa kebijakan kepatuhan lainnya yang sedang dalam proses penyusunan antara lain terkait penyempurnaan Buku Pedoman GCG khusus mengatur tentang Code of Conduct, melakukan kajian mengenai pedoman Gratifikasi, rencana penyusunan Pedoman Benturan Kepentingan, dan lain-lain.

Di dalam pedoman kerja Dewan Komisaris diatur secara tegas mengenai persyaratan, komposisi serta Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris, Etika Jabatan, waktu kerja Dewan Komisaris, pengaturan mengenai rapat Dewan Komisaris dan organ-organ yang berada di bawah Dewan Komisaris. Pedoman kerja Dewan Komisaris tersebut akan dievaluasi secara berkala untuk menjamin kesesuaian terhadap perubahan ketentuan perBankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PROGRAM PENGENALAN DAN PEMAHAMAN GCG

Dalam rangka pengenalan dan pemahaman GCG kepada pegawai dilingkungan Bank, unit kerja Kepatuhan telah memberikan sosialisasi/pelatihan terkait Kebijakan Good Corporate Governance dan kode etik Bankir yang disampaikan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Program pengenalan dan pemahaman GCG yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan tersebut diharapkan mampu membangun kesadaran tentang arti pentingnya Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) dalam setiap aktifitas operasional Bank, serta bersama-sama berkomitmen untuk melaksanakan penerapan Good Corporate Governance di Bank Riau Kepri.

UNIT KERJA PENGELOLA GCG

Saat ini Bank Riau Kepri telah menyempurnakan struktur dan tata kelola Bank sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas usaha, sebagaimana tertuang di dalam Keputusan Direksi Nomor 79/KEPDIR/2008 tanggal 25 Juni 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Riau, berikut perubahan-perubahannya dan terakhir diubah berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 69/KEPDIR/2013 tanggal 31 Juli 2013 tentang Perubahan Ketiga Keputusan Direksi Nomor 79/KEPDIR/2008 tanggal 25 Juni 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Riau.

Di dalam Keputusan Direksi tersebut ditetapkan bahwa Divisi Kepatuhan di bawah unit kerja bagian Kepatuhan sebagai pengelola GCG Bank. Salah satu bentuk pengelolaan GCG yang dilakukan adalah melaksanakan internalisasi pelaksanaan GCG, berupa pengenalan dan penerapan pelaksanaan GCG diseluruh pegawai Bank, dalam bentuk sosialisasi tentang GCG.

Unit kerja kepatuhan juga telah melakukan penyempurnaan kebijakan Buku Pedoman Perusahaan tentang GCG yang disesuaikan dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, sebagai mana yang termuat di dalam Keputusan Direksi Nomor 138/KEPDIR/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Buku Pedoman Perusahaan Good Corporate Governance PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.

PENGUNGKAPAN PELAKSANAAN GCG BANK RIAU KEPRI

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

RUPS sebagai organ perusahaan merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting berkenaan dengan bisnis dan operasional Perseroan termasuk jumlah remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, pembayaran dividen dan pembagian keuntungan, persetujuan tentang Laporan Tahunan, penunjukan auditor independen, perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan pendelegasian wewenang kepada Direksi untuk menindaklanjuti pokok-pokok permasalahan yang dibahas dan disetujui oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Keputusan yang diambil dalam RUPS didasari pada kepentingan usaha perusahaan. RUPS dan/atau Pemegang Saham tidak melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan hak sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. Pengambilan keputusan RUPS dilakukan secara wajar dan transparan. Hal-hal yang dibicarakan pada Rapat Umum Pemegang Saham dimuat di dalam Akta RUPS baik yang sifatnya Tahunan maupun Luar Biasa.

Guna memenuhi ketentuan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan sesuai dengan Anggaran Dasar Bank, Dewan Komisaris bersama Direksi telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). RUPS pada tahun 2014 terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.

RUPS Tahunan wajib diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Bank berakhir. Materi yang di sampaikan di dalam RUPS Tahunan, meliputi antara lain :

1. Penyampaian laporan tahunan Direksi yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS.
2. Penyampaian laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik untuk mendapatkan pengesahan RUPS.
3. Penyampaian laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris yang telah dilakukan.
4. Penetapan penggunaan laba, dalam hal Bank mempunyai saldo laba yang positif.
5. Hal-hal lain yang dianggap perlu.

Untuk RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan Bank guna membicarakan dan memutuskan mata acara rapat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar Bank.

Tata Cara Penyelenggaraan RUPS

Tata cara penyelenggaran RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa diatur di dalam Anggaran Dasar Bank Riau Kepri yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Di dalam anggaran dasar Bank diatur mengenai tata cara pemanggilan RUPS, antara lain sebagai berikut :

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama.
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.
3. Panggilan RUPS mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor perseroan.

Untuk penyelenggaraan RUPS tahun 2014 Bank telah menyampaikan pemberitahuan dan undangan kepada pemegang saham, dengan rincian sebagai berikut :

PEMBERITAHUAN JADWAL DAN AGENDA RUPS		
Tanggal Pelaksanaan RUPS	Tujuan Surat	Mata Acara RUPS
01 Juni 2014	• Gubernur Riau.	
	• Gubernur Kepulauan Riau.	
	• Seluruh Bupati dan Walikota Provinsi Riau dan Kepri.	• Laporan pengawasan Dewan Komisaris.
		• Laporan pertanggung jawaban Direksi.
		• Hasil Audit KAP atas laporan keuangan Bank yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.
		• Penyampaian Rencana Bisnis Bank tahun 2014.
		• Persetujuan Laporan Tahun Buku 2013.
		• Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2013.
		• Persetujuan Penyediaan Dana Pembinaan Kemitraan Tahun 2014.
		• Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Laporan Keuangan PT. Bank Riau Kepri Tahun Buku 2014.
		• Penetapan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank Riau Kepri Tahun 2014.
		• Lain-lain dianggap perlu.
08 November 2014	• Gubernur Riau.	
	• Gubernur Kepulauan Riau.	
	• Seluruh Bupati dan Walikota Provinsi Riau dan Kepri.	• Penetapan pengurus perseroan.
		• Lain-lain dianggap perlu.

PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Sepanjang Tahun 2014, Bank telah melaksanakan 1 (satu) kali Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan 2 (dua) kali Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB), dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN			
Jadwal	Tempat		Agenda Rapat
01 Juni 2014	Hotel Labersa Kabupaten Kampar - Provinsi Riau	a.	Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2013.
		b.	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2013.
		c.	Persetujuan Penyediaan Dana Pembinaan Kemitraan Tahun 2014.
		d.	Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Laporan Keuangan PT. Bank Riau Kepri Tahun Buku 2014.
		e.	Penetapan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank Riau Kepri Tahun 2014.
		f.	Lain-lain dianggap perlu.

RUPS Tahunan dipimpin oleh Komisaris Independen yaitu Bapak A. Rivaie Rachman. Penunjukan Komisaris Independen sebagai pemimpin rapat telah memperhatikan pasal 9 ayat (6) dan (7) anggaran dasar Bank.

RUPS Tahunan Bank dihadiri oleh pemegang saham/kuasanya, dan telah memenuhi syarat dan sah untuk mengambil keputusan.

Dari hasil pembahasan terhadap agenda RUPS tahunan menghasilkan berbagai keputusan-keputusan diantaranya, sebagai berikut :

1. Menyetujui Laporan Tahun Buku 2013 (dua ribu tiga belas) yaitu Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2013 (dua ribu tiga belas) yang telah

diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Abdi Ichjar, BAP dan Rekan dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.

2. Menyetujui alokasi penggunaan laba bersih dan pembagian dividen Perseroan tahun buku 2013 sesuai dengan yang diusulkan.
3. Menyetujui penggunaan cadangan jasa produksi dan tantiem tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas) yang telah menjadi biaya dan telah disetujui pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebelumnya.
4. Menyetujui penyediaan Dana Pembinaan Kemitraan Tahun 2014 (dua ribu empat belas) sebesar Rp21.000.000.000,- (dua puluh satu milyar rupiah) yang pelaksanaannya akan diatur oleh Direksi.
5. Menyetujui untuk penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) guna melakukan audit Laporan Keuangan PT. Bank Riau Kepri tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik sesuai dengan rekomendasi Komite Audit.
6. Menyetujui penetapan besarnya remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank Riau Kepri tahun 2014 sesuai usulan Dewan Komisaris yang direkomendasikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi diusulkan tidak mengalami kenaikan atau sama dengan tahun 2013 (dua ribu tiga belas) yaitu sebesar Rp32.090.000.000,- (tiga puluh dua milyar sembilan puluh juta rupiah). Pengaturan rincian penggunaannya diberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris dan Direksi, dengan catatan meningkatkan kinerja.
7. Seluruh agenda dan keputusan rapat RUPS Tahunan ini selanjutnya dituang di dalam Akta Notaris Fery Bakti, SH Nomor : 01 tanggal 01 Juni 2014 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bank Riau Kepri.

Selain menyelenggarakan RUPS Tahunan tahun 2014, Bank juga telah menyelenggarakan beberapa kali RUPS Luar Biasa (RUPS-LB), yaitu sebagai berikut :

PELAKSANAAN RUPS LUAR BIASA			
Jadwal	Tempat		Agenda Rapat
01 Juni 2014	Hotel Labersa Kabupaten Kampar - Provinsi Riau	•	Persetujuan Penambahan Modal Disetor yang telah disetor pada tahun 2013.
		•	Persetujuan Rencana Tambahan Modal Disetor tahun 2014.
		•	Menetapkan Pengangkatan Pengurus Bank.
		g.	Lain-lain dianggap perlu.
08 November 2014	Hotel Labersa Kabupaten Kampar - Provinsi Riau	•	Menetapkan Pengangkatan Pengurus Bank.
		•	Lain-lain dianggap perlu.

RUPS Luar Biasa dipimpin oleh Komisaris Independen yaitu Bapak A. Rivaie Rachman. Penunjukan Komisaris Independen sebagai pemimpin rapat telah memperhatikan pasal 9 ayat (6) dan (7) anggaran dasar Bank, bahwa apabila Komisaris Utama berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS Luar Biasa dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris.

RUPS Luar Biasa Bank dihadiri oleh pemegang saham/kuasanya, dan telah memenuhi syarat dan sah untuk mengambil keputusan.

Dari hasil pembahasan terhadap agenda RUPS Luar Biasa tanggal 01 Juni 2014 menghasilkan berbagai keputusan-keputusan diantaranya, sebagai berikut :

1. Menyetujui penambahan modal disetor yang telah disetorkan pada tahun 2013 sebesar Rp19.641.843.946,- (sembilan belas milyar enam ratus empat puluh satu juta delapan ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

NO	PEMEGANG SAHAM (PEMPROV/PEMKO/ PEMKAB)	TAMBAHAN MODAL DISETOR YANG TELAH DISETOR TAHUN 2013 (Rp)
1	2	3
1	Pemerintah Provinsi Riau	-
2	Pemerintah Kota Pekanbaru	-
3	Pemerintah Kabupaten Kampar	-
4	Pemerintah Kabupaten Bengkalis	-
5	Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu	-
6	Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir	4,641,843,946
7	Pemerintah Kabupaten Siak	-
8	Pemerintah Kota Dumai	-
9	Pemerintah Kabupaten Pelalawan	-
10	Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu	-
11	Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir	-
12	Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi	-
13	Pemerintah Kabupaten Bintan	4,000,000,000
14	Pemerintah Kota Batam	-
15	Pemerintah Kabupaten Karimun	-
16	Pemerintah Kabupaten Natuna	-
17	Pemerintah Kota Tanjung Pinang	-
18	Pemerintah Kabupaten Lingga	1,000,000,000
19	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti	10,000,000,000
20	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	-
21	Pemerintah Kabupaten Anambas	-
	TOTAL	19,641,843,946

2. Menetapkan pengembalian deviden tahun 2013 untuk modal disetor tahun 2014 diserahkan kepada para pemegang saham.
3. Menyetujui penambahan transaksi pada obligasi yang diterbitkan oleh Bank dengan Rating mimimal A yang jumlahnya akan ditetapkan oleh Rencana Bisnis Bank atau RKAT Tahunan.
4. Persetujuan Penetapan Calon Pengurus Bank.
   Mengingat bahwa untuk pembahasan penetapan calon pengurus, menyangkut diri pengurus Bank, maka Sdr. Abdul Rivaie Rachman selaku pemimpin rapat menyerahkan jalannya rapat penetapan calon pengurus Bank kepada wakil Gubernur Riau untuk memimpin rapat khusus ini.

Dari hasil pembahasan terkait calon-calon pengurus Bank, maka RUPS sepakat memutuskan, sebagai berikut :

a. Menyetujui untuk menetapkan pengakhiran masa jabatan saudara Rafjon Yahya sebagai Direktur Utama dan saudara Fizan Noor Djaelani sebagai Komisaris Utama Perseroan.
b. Menetapkan calon-calon pengurus Bank, sebagai berikut :

Calon Dewan Komisaris :

No	Nama Calon Komisaris	Jabatan Yang akan Diduduki
1.	Zaini Ismail	Komisaris Utama
2.	Mambang Mit	
3.	Wan Marwan	
1.	Prof. Yusmar Yusuf	Komisaris Independen
2.	Mambang Mit	
3.	RM Zubir Salehan	
1.	Wan Marwan	Komisaris Non Independen

Dengan ketentuan :

- *Seluruh calon Dewan Komisaris diserahkan kepada Gubernur Riau untuk memilih 2 (dua) nama dari calon tersebut untuk setiap jabatan yang lowong sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat (3) PBI tentang Fit and proper test Nomor 12/23/ PBI/2010.*
- *Untuk setiap calon agar terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.*

Calon Direksi Bank :

No	Nama Calon Direksi	Jabatan Yang akan Diduduki
1.	Nizam	Direktur Utama Utama
2.	Syamsul Bakri	
3.	Rafjon Yahya	
4.	Calon lainnya (diusulkan paling lambat 1 minggu sejak RUPS disampaikan kepada Gubernur Riau)	
1.	Denny Mulya Akbar	Direktur Operasional
2.	Calon lainnya (diusulkan paling lambat 1 minggu sejak RUPS disampaikan kepada Gubernur Riau)	

Dengan ketentuan :

- Penetapan calon Direktur Utama dan Direktur Operasional akan ditentukan dalam RUPSLB berikutnya.
- Untuk setiap calon agar terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.

Untuk hasil pembahasan terhadap agenda RUPS Luar Biasa tanggal 08 November 2014 menghasilkan berbagai keputusan-keputusan diantaranya, sebagai berikut :

1. Menyetujui penambahan modal disetor yang telah disetor oleh para pemegang saham sebagai berikut :

NO	PEMEGANG SAHAM (PEMPROV/PEMKO/PEMKAB)	TAMBAHAN MODAL DISETOR (Rp)
1	2	3
1	Pemerintah Kota Batam	42,940,400,000
2	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti	10,000,000,000
	TOTAL	52,940,400,000

2. Untuk penetapan pengangkatan pengurus Bank, diputuskan, hal-hal sebagai berikut :
   a. Menyetujui untuk menetapkan calon-calon Komisaris Bank untuk diajukan fit and proper test pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu :
      - Mambang Mit sebagai Komisaris Utama
      - Wan Marwan sebagai Komisaris Non Independen
      - RM Zubir Salehan sebagai Komisaris Independen

   b. Menyetujui perpanjangan sementara masa jabatan Abdul Rivaie Rachman sebagai Komisaris Independen dan menetapkan yang bersangkutan sebagai Komisaris Independen untuk periode berikutnya terhitung sejak tanggal diterimanya Perubahan Anggaran Dasar pada pasal 14 ayat 6 oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dan telah dicatat oleh Otoritas Jasa Keuangan

   c. Menyetujui untuk menetapkan calon-calon Direktur Utama Bank yaitu :
      - Irvandi Gustari
      - Sonni Triandalarso

   d. Untuk Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Direktur Dana dan Jasa, dan Direktur Kredit dan Syariah akan dilakukan evaluasi kembali dengan mengundang yamg bersangkutan untuk mempresentasikan kinerja masing-masing dalam rapat Evaluasi Pemegang Saham bertempat di Batam dan apabila dianggap perlu akan diadakan seleksi ulang terhadap jabatan tersebut.
   e. Untuk calon-calon Direktur Operasional agar diproses ulang seleksinya oleh Komite Remunerasi dan Nominasi.

3. Menyetujui perpanjangan sementara masa jabatan saudara Chairisman Rasahan sebagai Komisaris Independen sampai dengan terpilihnya dan diangkatnya Komisaris Independen yang baru.

4. Menyetujui perpanjangan sementara masa jabatan saudara Wan Marwan sebagai Direktur Operasional sampai dengan terpilihnya dan diangkatnya Direktur Operasional yang baru.

5. Menetapkan perubahan pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar Bank Riau Kepri tentang periodesasi masa jabatan Dewan Komisaris untuk mengakomodir terdapatnya usulan perpanjangan masa jabatan Dewan Komisaris yang telah 2 (dua) periode jabatan.

Pengesahan/Pemberitahuan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham

Untuk menindaklanjuti Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 01 Juni 2014 dan tanggal 08 November 2014 tersebut, Bank telah menuangkan hasil RUPS Luar Biasa tersebut ke dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) Nomor 21 tanggal 17 Juni 2014 dan Nomor 06 tanggal 02 Desember 2014 yang keduanya dibuat dihadapan Fery Bakti, SH, Notaris di Pekanbaru.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut telah disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh pengesahan/penegasan pemberitahuan perubahan data perseroan yang termuat di dalam akta tersebut.

Di dalam masing-masing akta Pernyataan keputusan Rapat tersebut, memuat hal-hal sebagai berikut :

PERNYATAAN KEPUTUSAN RUPSLB		
No	No dan Tanggal Akta	Keputusan RUPSLB
1	Akta Nomor 21 Tanggal 17 Juni 2014	• Menyetujui untuk menetapkan pengakhiran masa jabatan saudara Rafjon Yahya sebagai Direktur Utama dan saudara Fizan Noor Djaelani sebagai Komisaris Utama Perseroan. Sehingga dengan demikian susunan Direksi dan Dewan Komisaris perseroan menjadi sebagai berikut :
		Susunan Dewan Komisaris
		- Abdul Rivaie Rachman: Komisaris Independen
		- Chairisman Rasahan: Komisaris Independen
		- Sarjono Amnan: Komisaris Independen
		Susunan Direksi
		-Wan Marwan: Direktur Operasional
		- Nizam: Direktur Dana & Jasa
		- Afrial Abdullah: Direktur Kredit & Syariah
		- Eka Afriadi: Direktur Kepatuhan &
		Manajemen Risiko
		• Menyetujui penambahan modal disetor yang telah disetor-kan pada tahun 2013 sebesar Rp19.641.843.946,- (sembilan belas milyar enam ratus empat puluh satu juta delapan ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) sesuai dengan rincian yang disampaikan.
2	Akta Nomor 06 Tanggal 02 Desember 2014	• Menyetujui penambahan modal disetor yang telah disetor oleh para pemegang saham sebagai berikut :
		Penambahan modal disetor oleh Pemerintah Kota Batam sebesar Rp42.940.400.000,- (empat puluh dua milyar sembilan ratus empat puluh juta empat ratus ribu rupiah)
		- Penambahan modal disetor oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)

PERNYATAAN KEPUTUSAN RUPSLB	
	- Menetapkan perubahan pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar Bank Riau Kepri tentang periodesasi masa jabatan Dewan Komisaris untuk mengakomodir terdapatnya usulan perpanjangan masa jabatan Dewan Komisaris yang telah 2 (dua) periode jabatan, sehingga berbunyi menjadi sebagai berikut :
	• *"Masa jabatan anggota Dewan Komisaris selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatannya dan dapat diangkat kembali apabila mempunyai prestasi yang baik yang dibuktikan dengan kesehatan Bank dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Apabila seorang anggota Dewan Komisaris sebelum berakhir masa jabatannya digantikan oleh seorang anggota Komisaris baru, maka masa jabatan anggota Dewan Komisaris baru tersebut berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatannya".*

Akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut di atas telah di sampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah memperoleh penegasan pemberitahuan perubahan data perseroan, masing-masing sebagai berikut :

No	Nomor dan Tanggal Akta	Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan		
		Nomor Pemberitahuan	Tanggal Pemberitahuan	Perihal
1	Akta Nomor 21 Tanggal 17 Juni 2014	AHU-18833.40.22.2014	10 Juli 2014	Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data Perseroan PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri
2	Akta Nomor 06 Tanggal 02 Des 2014	AHU-10373.40.21.2014	29 Des 2014	Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data Perseroan PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri

DEWAN KOMISARIS

Komposisi Dewan Komisaris

Di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006, diatur bahwa untuk susunan keanggotaan Dewan Komisaris ditetapkan paling kurang terdiri 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.

Paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen dan berdomisili di Pekanbaru sebagai kota kedudukan kantor pusat Bank Riau Kepri.

Sesuai ketentuan Bank Indonesia tersebut di atas, sampai dengan 31 Desember 2014 anggota Dewan Komisaris Bank yang tercatat di dalam administrasi pengawasan Bank Indonesia berjumlah 3 (tiga) orang yang keseluruhannya berasal dari pihak Independen, yaitu sebagai berikut :

Nama	Jabatan
A. Rivaie Rachman	Komisaris (independen)
Chairisman Rasahan	Komisaris (independen)
Sarjono Amnan	Komisaris (independen)

Kriteria Dewan Komisaris

Seluruh pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris disetujui oleh RUPS sejalan dengan kriteria utama dengan mempertimbangkan integritas, kompetensi, profesionalisme dan reputasi keuangan yang memadai sesuai dengan persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Selain itu, seluruh anggota Dewan Komisaris Bank telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris sesuai dengan Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Umum, dan Peraturan Bank Indonesia tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and proper test).

Independensi Dewan Komisaris

Sebagaimana telah diatur dalam ketentuan GCG bahwa, untuk pelaksanaan GCG Bank perlu melakukan check and balance, menghindari benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas serta meningkatkan perlindungan bagi kepentingan pemangku kepentingan khususnya nasabah pemilik dana dan pemegang saham minoritas. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan keberadaan Komisaris Independen dan Pihak Independen yang membantu tugas Dewan Komisaris.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 berikut perubahannya Nomor 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum diatur mengenai kriteria Komisaris Independen yaitu anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Sehubungan hal tersebut di atas seluruh anggota Dewan Komisaris Bank telah memenuhi hal-hal yang dipersyaratkan di dalam ketentuan Bank Indonesia di atas. Selain hal tersebut untuk Komisaris Independen Bank telah membuat surat pernyataan bahwa tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Hubungan keluarga dan keuangan anggota Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Nama	Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Keuangan Dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
A. Rivaie Rachman	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√
Chairisman Rasahan	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√
Sarjono Amnan	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√

Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Di dalam ketentuan dan kebijakan GCG ditetapkan bahwa Komisaris Independen tidak merangkap jabatan kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia tentang pelaksanaan GCG bagi Bank Umum, yaitu anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai :

1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan; atau
2. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank.

Berdasarkan hal tersebut salah satu Komisaris Independen Bank Bapak A. Rivaie Rachman yang sebelumnya juga duduk sebagai Komisaris di beberapa perusahaan, saat ini yang bersangkutan telah mengundurkan diri pada perusahaan-perusahaan tersebut, perusahaan-perusahaan dimaksud, adalah sebagai berikut ini :

Nama Perusahaan	Jabatan	Tanggal Pengunduran Diri
PT. Mantera Medika Lestari	Komisaris	01 Agustus 2011
PT. Meridan Sejati Surya Platantion	Komisaris	01 Agustus 2011
PT. Ciliandra Perkasa*	Komisaris	-

** Bpk. A. Rivaie Rachman masih menjabat sebagai Komisaris, dan jabatan tersebut tidak melanggar ketentuan rangkap jabatan yang diatur di dalam PBI GCG.*

Sesuai hal tersebut di atas, maka untuk Jabatan rangkap Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

RANGKAP JABATAN PADA DEWAN KOMISARIS			
Nama	Jabatan di Bank Riau Kepri	Jabatan Pada Perusahaan/Instansi Lain	Nama Perusahaan/Instansi Lain
A. Rivaie Rachman	Komisaris Independen	Komisaris Utama	PT. Ciliandra Perkasa
Chairisman Rasahan	Komisaris Independen	Tidak Ada	Tidak Ada
Sarjono Amnan	Komisaris Independen	Tidak Ada	Tidak Ada

Kepemilikan Saham anggota Dewan Komisaris

Bank mewajibkan anggota Dewan Komisaris untuk mengungkapkan kepemilikan sahamnya, baik pada Bank Riau Kepri maupun pada Bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

Sepanjang tahun 2014, seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank maupun Perusahaan lain, rincian Kepemilikan Saham Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS					
Nama	**Kepemilikan Saham**				
	Bank Riau Kepri	**Bank Lain**	**Lembaga Keuangan Non Bank**	**Perusahaan Lain**	**Keterangan**
A. Rivaie Rachman	-	-	-	-	Nihil
Chairisman Rasahan	-	-	-	-	Nihil
Sarjono Amnan	-	-	-	-	Nihil

Pemenuhan Ketentuan Fit & Proper Tes.

Seluruh anggota Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and proper test).

Dalam melaksanakan tugasnya selaku Komisaris Bank, seluruh anggota Dewan Komisaris telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia, dengan rincian sebagai berikut :

Nama Anggota Dewan Komisaris	Persetujuan Bank Indonesia	Tanggal Persetujuan	Perihal
A. Rivaie Rachman	Surat BI No. 8/144/GBI/DPIP/Rahasia	04 Desember 2006	Keputusan atas Pencalonan Pengurus PT. Bank Pembangunan Daerah Riau
	Surat BI No. 13/18/DPB1/APBU/Pbr	14 Maret 2011	Perpanjangan Masa Jabatan Komisaris Bank Saudara
Chairisman Rasahan	Surat BI No. 8/144/GBI/DPIP/Rahasia	04 Desember 2006	Keputusan atas Pencalonan Pengurus PT. Bank Pembangunan Daerah Riau
	Surat BI No. 13/18/DPB1/APBU/Pbr	14 Maret 2011	Perpanjangan Masa Jabatan Komisaris Bank Saudara
Sarjono Amnan	Surat BI No. 14/44/DPB1/APBU/Pbr	25 September 2012	Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank Saudara

Tugas Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ perseroan yang secara kolektif bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris tidak turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen adalah setara.

Sesuai dengan anggaran dasar Bank, Dewan Komisaris wajib :

1. Melakukan pengawasan atas jalannya pengurusan perseroan oleh Direksi pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan dan memberikan nasehat kepada Direksi.
2. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut anggaran dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS.
3. Melakukan tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Bank dan keputusan RUPS.
4. Menerapkan dan memastikan pelaksanaan manajemen risiko dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
5. Menyusun pedoman kerja Dewan Komisaris.
6. Mengevaluasi dan menyetujui rencana bisnis Bank.
7. Mengusulkan penunjukan Kantor Akuntan Publik atas rekomendasi Komite Audit untuk melakukan audit atas laporan keuangan Bank guna mendapatkan persetujuan RUPS.
8. Membentuk Komite-komite sesuai dengan peraturan yang berlaku, paling kurang :
   a. Komite Audit;
   b. Komite Pemantau Risiko;
   c. Komite Remunerasi dan Nominasi
9. Memastikan bahwa komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif.

Wewenang Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris berwenang untuk melakukan hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka melaksanakan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris atau setiap anggota Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor berhak memasuki bangunan, halaman dan tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan, berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain, serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Dewan Komisaris diwajibkan mengurus perseroan untuk sementara, dalam hal seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
3. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk komite-komite sesuai peraturan yang berlaku.
4. Untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat membentuk Sekretaris Dewan Komisaris yang dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat Dewan Komisaris yang diangkat oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.
5. Dewan Komisaris atas biaya perseroan dapat meminta bantuan ahli-ahli untuk melakukan pemeriksaan sesuai tugas dan wewenangnya.

Selain juga diatur di dalam anggaran dasar Bank, tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris Bank juga termuat di beberapa ketentuan dan kebijakan internal Bank, seperti termuat di dalam Pedoman Good Corporate Governance Bank, Pedoman Dewan Komisaris dan lain-lain.

Kinerja Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dewan Komisaris selalu berpedoman pada Anggaran Dasar, Keputusan RUPS Tahunan, dan Program Kerja Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris menggunakan program kerja ini sebagai pedoman dalam menjalankan tugasnya untuk memastikan prinsip GCG diterapkan dengan baik. Dalam menjalankan program kerja dimaksud, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

Program Kerja Dewan Komisaris selama tahun 2014 menghasilkan beberapa persetujuan, pendapat, tanggapan, dan rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi antara lain sebagai berikut :

1. Persetujuan Calon Pemimpin SKAI Bank
2. Persetujuan Revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) Bank Riau Kepri tahun 2014.
3. Persetujuan penggantian anggota Komite Remunerasi dan

Nominasi Bank sesuai rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

4. Persetujuan penerbitan produk EDC Merchant Bank Riau Kepri.
5. Memberikan masukan kepada Direksi terkait keluarnya persetujuan OJK atas RBB Bank tahun 2014 - 2016.
6. Persetujuan atas rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi terkait :
   a. Besaran Remunerasi pengurus tahun 2014 tidak mengalami kenaikan atau sama dengan Remunerasi yang diterima pengurus tahun 2013.
   b. Meneruskan keputusan Komite Remunerasi dan Nominasi tersebut kepada RUPS tahun 2013 atau pada RUPS Luar Biasa tahun 2014.
7. Persetujuan tentang Pedoman Penanganan Kredit Bermasalah.
8. Persetujuan penghapusan dan pemusnahan asset/aktiva tetap/inventaris pada beberapa kantor Bank.
9. Persetujuan draft Kebijakan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko.
10. Persetujuan Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2015
11. Persetujuan rangkap tugas dan tanggung jawab Direktur Operasional oleh Direktur Kredit & Syariah dan Direktur Dana & Jasa sampai dengan dikeluarkannya surat atau penetapan OJK tentang status perpanjangan masa jabatan Direktur Operasional.

Rapat Dewan Komisaris

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum berikut perubahannya No. 8/14/PBI/2006 tanggal 05 Oktober 2006, pasal 15 ditegaskan bahwa rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun dan wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.

Di dalam Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Good Corporate Governance Bank berikut perubahannya, Rapat Internal Dewan Komisaris diselenggarakan secara berkala minimal 6 (enam) kali dalam setahun, dan wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun.

Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan, dan dipimpin oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir.

Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan dengan dihadiri oleh anggota Komisaris, atau dengan mengundang Direksi dan/atau pejabat Bank terkait.

Sepanjang tahun 2014 Dewan Komisaris Bank telah melaksanakan 25 (dua puluh lima) kali pertemuan/rapat, baik yang diselenggarakan oleh internal Komisaris maupun rapat dengan mengundang Direksi, atau pejabat/pegawai Bank lainnya, yang terlihat pada tabel berikut :

AKTIVITAS RAPAT DEWAN KOMISARIS				
No	Tanggal	Materi Rapat	Peserta	
1	20-01-14	Evaluasi Kinerja PT. Bank Riau Kepri Posisi Desember 2013	1.	Chairisman Rasahan
			2.	Sarjono Amnan
			3.	Direksi Bank
			4.	Sekretaris Dekom
2	12-03-14	Persetujuan atas Penunjukan Sdr. Khairul Anwar sebagai Pemimpin SKAI	1.	A. Rivaie Rachman
			2.	Chairisman Rasahan
			3.	Sarjono Amnan
			4.	Pindiv. Human Capital
			5.	Sekretaris Dekom
3	13-03-14	Usulan Calon Pemimpin SKAI PT. Bank Riau Kepri	1.	A. Rivaie Rachman
			2.	Chairisman Rasahan
			3.	Sarjono Amnan
			4.	Pindiv. Human Capital
			5.	Sekretaris Dekom
4	26-03-14	Usulan Revisi RBB Tahun 2014	1.	A. Rivaie Rachman
			2.	Chairisman Rasahan
			3.	Sarjono Amnan
			4.	Dir. Dana dan Jasa
			5.	Dir.Kepatuhan
			6.	Pindiv. Perencanaan Strategis
			7.	Pejabat Divisi Perencanaan Strategis
5	27-03-14	1. Persiapan RUPS Tahunan dan RUPSLB PT. Bank Riau Kepri 2. Gedung Kantor Bank Riau Kepri	1.	A. Rivaie Rachman
			2.	Chairisman Rasahan
			3.	Sarjono Amnan
			4.	Seluruh Direksi Bank
			5.	Sekretaris Dekom
6	10-04-14	Penunjukan Pemimpin Rapat RUPS dan RUPSLB	1.	A. Rivaie Rachman
			2.	Chairisman Rasahan
			3.	Sarjono Amnan
			4.	Sekretaris Dekom
7	11-04-14	Pembahasan : 1. Perkembangan RUPS Tahunan dan RUPSLB PT. Bank Riau Kepri 2. Penyelesaian Gedung Kantor Bank Riau Kepri	1.	Chairisman Rasahan
			2.	Sarjono Amnan
			3.	Seluruh Direksi Bank
			4.	Sekretaris Dekom
8	15-04-14	Pembahasan Rekomendasi Komite untuk Penggantian Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi	1.	A. Rivaie Rachman
			2.	Chairisman Rasahan
			3.	Sarjono Amnan
			4.	Sekretaris Dekom

9	28-04-14	Tindak Lanjut Putusan BANI dalam sengketa antara PT. Waskita Karya dengan PT. Bank Riau Kepri	1.	Chairisman Rasahan
			2.	Sarjono Amnan
			3.	Seluruh Direksi Bank
			4.	Unit Kerja Terkait
			5.	Konsultan Hukum PT. Waskita Karya
10	30-05-14	Penunjukan Pemimpin Rapat RUPS dan RUPSLB	1.	A. Rivaie Rachman
			2.	Chairisman Rasahan
			3.	Sarjono Amnan
			4.	Sekretaris Dekom
11	24-06-14	Pembahasan Usulan Revisi RBB Tahun 2014	1.	Chairisman Rasahan
			2.	Direksi Bank
			3.	Divisi Perencanaan Strategis
12	30-06-14	Tindak Lanjut Temuan BI and OJK	1.	Chairisman Rasahan
			2.	Sarjono Amnan
			3.	Dir.Kepatuhan dan Manajemen Risiko
			4.	Sekretaris Dekom
13	08-07-14	Tindak Lanjut Permasalahan Kasus yang terjadi di kantor Bank Riau Kepri.	1.	A. Rivaie Rachman
			2.	Chairisman Rasahan
			3.	Sarjono Amnan
			4.	Direksi Bank
			5.	Sekretaris Dekom
14	04-08-14	Evaluasi terhadap Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Riau Kepri	1.	Chairisman Rasahan
			2.	Sarjono Amnan
			3.	Pindiv. Manajemen Risiko
			4.	Sekretaris Dekom
15	04-08-14	Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan SKAI Bank Riau Kepri	1.	Chairisman Rasahan
			2.	Sarjono Amnan
			3.	Staf SKAI
			4.	Sekretaris Dekom
16	13-08-14	Perkembangan Masalah Gedung Bank Riau Kepri dan Rencana RUPSLB	1.	Chairisman Rasahan
			2.	Sarjono Amnan
			3.	Dir.Kepatuhan dan Manajemen Risiko
			4.	Sekretaris Dekom
17	20-08-14	Pembahasan Buku Pedoman Kerja Dewan Komisaris PT. Bank Riau Kepri	1.	Chairisman Rasahan
			2.	Sarjono Amnan
			3.	Dir.Kepatuhan dan Manajemen Risiko
			4.	Pindiv. Kepatuhan
			5.	Sekretaris Dekom

18	29-08-14	Tingkat Kesehatan Bank per Juni 2014	1.	A. Rivaie Rachman
			2.	Chairisman Rasahan
			3.	Sarjono Amnan
			4.	Dir.Kepatuhan dan Manajemen Risiko
			5.	Divisi Manajemen Risiko
			6.	Sekretaris Dekom
19	19-09-14	Pembahasan BPP Manajemen Risiko PT. Bank Riau Kepri	1.	A. Rivaie Rachman
			2.	Chairisman Rasahan
			3.	Sarjono Amnan
			4.	Dir.Kepatuhan dan Manajemen Risiko
			5.	Divisi Manajemen Risiko
			6.	Sekretaris Dekom
20	07-10-14	Perkembangan Permasalahan Gedung Kantor Bank Riau Kepri	1.	A. Rivaie Rachman
			2.	Chairisman Rasahan
			3.	Direksi Bank
			4.	Sekretaris Dekom
21	06-11-14	Penunjukan Pemimpin Rapat RUPS dan RUPSLB	1.	A. Rivaie Rachman
			2.	Chairisman Rasahan
			3.	Sarjono Amnan
			4.	Sekretaris Dekom
22	07-11-14	Persiapan dan Skenario Pra-RUPS LB	1.	A. Rivaie Rachman
			2.	Chairisman Rasahan
			3.	Sarjono Amnan
			4.	Seluruh Direksi Bank
			5.	Sekretaris Dekom
23	25-11-14	Pembahasan RBB Bank Riau Kepri Tahun 2015	1.	Chairisman Rasahan
			2.	Sarjono Amnan
			3.	Seluruh Direksi Bank
			4.	Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis
			5.	Pejabat Divisi Perencanaan Strategis
24	17-12-14	Pembahasan Hasil Pemeriksaan OJK terhadap PT. Bank Riau Kepri	1.	A. Rivaie Rachman
			2.	Chairisman Rasahan
			3.	Sarjono Amnan
			4.	Seluruh Direksi Bank
			5.	Sekretaris Dekom
25	29-12-14	Pembahasan Hasil Rapat Direksi tentang Tugas dan Wewenang Direksi PT. Bank Riau Kepri	1.	Chairisman Rasahan
			2.	Sarjono Amnan
			3.	Sekretaris Dekom

Rapat di atas merupakan rapat Dewan Komisaris yang berdasarkan anggaran dasar Bank telah memenuhi kuorum, sehingga keputusan yang dihasilkan tersebut merupakan keputusan yang mengikat.

Hasil rapat dituangkan di dalam risalah rapat dan di dokumentasikan dengan baik, termasuk jika terdapat adanya disenting opinion, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan para peserta rapat, selanjutnya hasil rapat merupakan rekomendasi dan/atau nasihat yang dapat diimplementasikan.

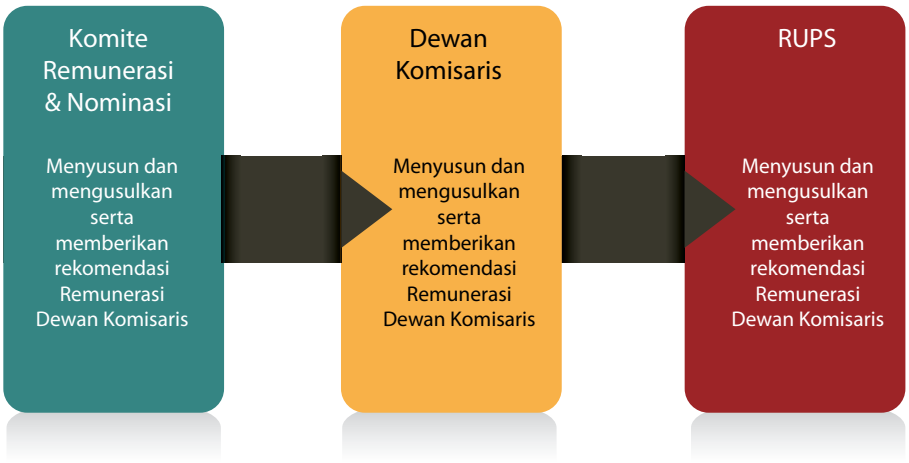
Tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris secara fisik dalam rapat rapat Dewan Komisaris baik yang diselenggarakan internal Dewan Komisaris maupun mengundang Direksi dan pejabat Bank Riau Kepri lainnya, dapat terlihat di dalam tabel berikut :

Nama	Jumlah Kehadiran Pada :			% Kehadiran
	Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi/Divisi	Rapat Internal Dewan Komisaris	Total Jumlah Kehadiran Rapat Dewan Komisaris	
A. Rivaie Rachman	10	4	14	56 %
Chairisman Rasahan	20	5	25	100 %
Sarjono Amnan	18	5	23	92 %

Kebijakan dan Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris

Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris Bank didasarkan pada Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007, Anggaran Dasar Bank, dan Keputusan Direksi Bank Nomor 64/KEPDIR/2013 tanggal 24 Juli 2013 tentang remunerasi Pengurus PT. Bank Riau Kepri dan Keputusan Direksi Nomor 14/KEPDIR/2013 tanggal 22 Februari 2012 tentang Penghasilan Pengurus PT. Bank Riau Kepri.

Keputusan penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris ditetapkan melalui RUPS, dengan mekanisme sebagai berikit :



Remunerasi dan Fasilitas lain Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2014 jumlah gaji dan tunjangan lainnya yang meliputi remunerasi dalam bentuk natura dan non natura yang diberikan kepada Dewan Komisaris adalah sebesar Rp. 11.832.996.127,-.

Remunerasi Dewan Komisaris selama tahun 2014 terlihat dalam tabel berikut :

Jenis Penerimaan	Jumlah Komisaris	Nominal (Rp)
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, penghasilan tetap lainnya dan fasilitas lain dalam bentuk non-natura)	3	11.788.037.487,-
2. Fasilitas lain dalam bentuk Natura (perumahan, transportasi, perawatan kesehatan, dsb)	3	44.958.640,-
Jumlah Penerimaan	11.832.996.127,-	

Jumlah anggota Dewan Komisaris yang menerima paket remunerasi selama tahun 2014 yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, terlihat dalam tabel di bawah.

Kelompok Nominal Remunerasi dalam 1 tahun	Jumlah Komisaris
Di atas Rp 2 miliar	3
Di atas Rp 1 miliar s.d 2 miliar	-
Di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	-
Rp 500 juta ke bawah	-
Total	3

Program Orientasi Dewan Komisaris

Dengan latar belakang Anggota Dewan Komisaris yang berasal dari berbagai pihak yang mewakili Pemegang Saham, maka keberadaan Program Orientasi sangat penting untuk dilaksanakan. Hal ini karena antar Anggota Dewan Komisaris tidak saling mengenal dan/atau belum pernah bekerja dalam satu tim sebelumnya. Program orientasi yang diberikan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke fasilitas Perseroan. Program orientasi dapat juga berupa program lain yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Prosedur Program Orientasi meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Program Orientasi mengenai Bank wajib diberikan kepada Anggota Dewan Komisaris yang baru pertama menjabat.
2. Tanggungjawab pelaksanaan Program Orientasi ada pada Komisaris Utama. Jika Komisaris Utama berhalangan maka tanggung jawab pelaksanaan program orientasi berada pada Anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk.
3. Materi yang diberikan pada Program Orientasi antara lain meliputi :
   a. Gambaran mengenai Bank yang berkaitan dengan tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan berbagai masalah strategis lainnya.
   b. Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance oleh Bank.
   c. Tanggungjawab hukum Anggota Dewan Komisaris.
   d. Penjelasan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal serta tugas dan peran Komite Audit dan Komite-komite lain yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.
   e. Penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.
   f. Sebagai Team building, yaitu bahwa seluruh Anggota Dewan Komisaris, baik yang baru menjabat maupun yang pernah menjabat sebelumnya dengan tujuan mewujudkan kekompakan dan kerjasama tim sebagai Dewan Komisaris.

Program Pelatihan dan Seminar Dewan Komisaris

Pada tahun 2014 Dewan Komisaris telah mengikuti beberapa pelatihan/seminar/workshop baik yang diselenggarakan oleh pihak internal, Bank Indonesia maupun dari lembaga pelatihan yang ada di Indonesia.

Nama	Jenis Pelatihan	Lembaga Penyelenggara	Tgl & Tahun Pelaksanaan
A. Rivaie Rachman			
(Komisaris Independen)	Program Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko	BSMR	16-08-14
Chairisman Rasahan			
(Komisaris Independen)	Program Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko	BSMR	16-08-14
Sarjono Amnan			
(Komisaris Independen)	Program Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko	BSMR	16-08-14
	Penerapan Peraturan OJK No.1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan	FKDKP	16-09-14
	Penyusunan Laporan Dewan Komisaris yang Komprehensif dan Efektif	ASBANDA	07-02-14
	Seminar BPD Syariah 2014	ASBANDA	23-06-14

Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris

Dalam rangka menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris selain berpedoman pada anggaran dasar Bank dan BPP GCG Bank, juga mengacu kepada Pedoman Kerja Dewan Komisaris. Pedoman Kerja Dewan Komisaris berisi tentang ketentuan-ketentuan yang mengatur tata kerja Dewan Komisaris dengan organ kelengkapannya, dan dapat menjadi acuan bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai Visi dan Misi Bank.

Pedoman kerja Dewan Komisaris diatur di dalam Keputusan Dewan Komisaris No. 001/KEPDKS/X/2014 tanggal 03 Oktober 2014, mengatur hal-hal sebagai berikut :

1. Pendahuluan, meliputi :
   a. Dasar Hukum
   b. Defenisi dan istilah yang digunakan

2. Komisaris, meliputi :
   a. Visi, Misi dan tujuan
   b. Fungsi
   c. Persyaratan dan Komposisi Dewan Komisaris
   d. Etika Jabatan
   e. Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris
   f. Waktu kerja
   g. Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris berkaitan dengan Anggaran Dasar
   h. Rapat Dewan Komisaris
   i. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris
   j. Hubungan Kerja Antara Dewan Komisaris dan Direksi

3. Organ-organ di bawah Dewan Komisaris
   a. Staf Ahli dan Komite-Komite
   b. Sekretariat Dewan Komisaris

DIREKSI

Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif dalam mengelola perusahaan. Direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan agar dapat menghasilkan nilai tambah dan memastikan kesinambungan usaha. Masing-masing anggota Direksi melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenang. Tugas, wewenang, tanggung jawab dan hal-hal lain yang terkait dengan Direksi dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kriteria Direksi

Kriteria atau persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi Bank pada prinsipnya diatur baik di dalam Undang-undang Perseroan Terbatas, anggaran dasar Bank dan Peraturan Bank Indonesia. Di dalam anggaran dasar Bank anggota Direksi harus memenuhi persyaratan umum, persyaratan khusus serta persyaratan lainnya dan beberapa syarat tambahan bagi Direktur Kepatuhan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia terkait Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Seluruh anggota Direksi Bank telah memenuhi kriteria atau persyaratan sebagai berikut :

KRITERIA/PERSYARATAN DIREKSI					
Kriteria/Persyaratan	Direktur Utama*	Direktur Dana & Jasa	Direktur Kredit & Syariah	Direktur Operasional	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko
Persyaratan Umum :					
Warga Negara Indonesia	-	√	√	√	√
Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa	-	√	√	√	√
Mempunyai Akhlak dan Moral yang Baik	-	√	√	√	√
Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah	-	√	√	√	√
Sehat jasmani dan rohani	-	√	√	√	√
Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan Negara	-	√	√	√	√
Tidak pernah melakukan kegiatan yang tercela dibi-dang perBankan	-	√	√	√	√
Mampu melaksanakan perbuatan hukum	-	√	√	√	√

Tidak termasuk dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan/atau pengurus Bank/BPR sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BI	-	√	√	√	√
Tidak pernah dinyatakan pailit	-	√	√	√	√
Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan	-	√	√	√	√
Persyaratan Khusus :					
Memiliki kompetensi dan integritas yang baik.	-	√	√	√	√
Persyaratan Lainnya :					
Memiliki pengalaman 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai pejabat eksekutif pada Bank.	-	√	√	√	√
Tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada Bank dan/atau pada suatu perusahaan lain.	-	√	√	√	√
Sesama anggota Direksi dan antara Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua.	-	√	√	√	√
Merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris, Direksi atau pejabat eksekutif pada Bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.	-	-	-	-	-
Merangkap jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam instansi/lembaga pemerintah pusat/daerah.	-	-	-	-	-
Merangkap jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan atau pertentangan kepentingan secara langsung/tidak langsung dengan perseroan yang dipimpinnya dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.	-	-	-	-	-
Persyaratan Tambahan Untuk Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko					
Tidak merangkap jabatan sebagai Direktur Utama Bank dan/atau Wakil Direktur Utama					√
Memiliki integritas dan pengetahuan yang memadai mengenai ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku					√
Memenuhi persyaratan independensi					√
Lulus Fit and proper test					√

* *Sampai dengan akhir periode laporan GCG (Desember 2014) Bank masih belum memiliki Direktur Utama. Proses penetapan calon Direktur Utama telah dilakukan pada RUPS bulan Juni 2014, namun untuk pelaksanaannya perlu dilakukan RUPS lanjutan.*
RUPS lanjutan pada tanggal 08 November 2014 telah menyetujui dan menetapkan calon Direktur Utama Bank, dan hasil keputusan penetapan calon pengurus Bank tersebut akan disampaikan ke BI/OJK untuk dilakukan fit and propertest.

Komposisi Direksi

Pengangkatan anggota Direksi Bank dilakukan di dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Sampai dengan akhir tahun 2014, susunan pengurus Bank (Direksi) adalah, sebagai berikut :

Nama Direksi	Jabatan	Periode Jabatan	
		Diangkat	Berakhir
Wan Marwan*	Direktur Operasional	2010	2014
Nizam	Direktur Dana dan Jasa	2012	2016
Afrial Abdullah	Direktur Kredit dan Syariah	2012	2016
Eka Afriadi	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko	2013	2017

* *Untuk jabatan Wan Marwan selaku Direktur Operasional berakhir per Desember 2014, pada RUPS tanggal 08 November 2014 telah ditetapkan bahwa masa jabatan yang bersangkutan diperpanjang untuk sementara sampai dengan terpilihnya pengurus Bank (Dekom dan Direksi) yang tetap dan telah disetujui BI/OJK. Perpanjangan sementara jabatan Wan Marwan sebagai Direktur Operasional telah disetujui OJK sesuai surat Nomor SR-50/KO.5411/2014 tanggal 31 Desember 2014 perihal Perpanjangan Sementara Masa Jabatan Komisaris Independen dan Direktur Operasional Bank Saudara.*

Uji Kelayakan Dan Kepatutan Direksi

Setiap anggota Direksi Bank memiliki pengalaman dibidang operasional sebagai pejabat eksekutif Bank, hal ini mengingat karena anggota Direksi Bank merupakan mantan dan pernah menjabat sebagai pejabat eksekutif Bank. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh para pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham dan memenuhi persyaratan Bank Indonesia melalui Uji Kelayakan dan Kepatutan Direksi.

Seluruh anggota Direksi Bank telah lulus uji kelayakan dan kepatutan dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia, sebagaimana terungkap pada tabel di bawah ini :

Nama Direksi	Jabatan	Persetujuan Bank Indonesia	
		Nomor Surat	Tanggal
Wan Marwan	Direktur Operasional	13/6/DPB1/APBU/Pbr	17 Januari 2011
Nizam	Direktur Dana dan Jasa	14/44/DPB1/APBU/Pbr	25 September 2012
Afrial Abdullah	Direktur Kredit dan Syariah	14/44/DPB1/APBU/Pbr	25 September 2012
Eka Afriadi	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko	15/2/DPKP/Pbr	12 Juli 2013

Tugas dan Tanggungjawab Direksi

Direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Di samping hal tersebut Direksi juga melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Untuk memaksimalkan kinerja Direksi dalam rangka pengurusan Bank, diaturlah pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab Direksi yang tertuang di dalam surat Keputusan Direksi Nomor 108-A/KEPDIR/2010 tanggal 30 November 2010 tentang pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab Direksi. Pembagian tugas Direksi ini dilandasi dengan asas keseimbangan dan keserasian.

Sebagai bagian implementasi pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, keputusan Direksi Nomor 108-A/KEPDIR/2010 tanggal 30 November 2010 yang mengatur tugas, wewenang dan tanggungjawab Direksi Bank tersebut telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.

Independensi Direksi

Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Hubungan keluarga dan keuangan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Nama	Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Keuangan Dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Wan Marwan	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√
Nizam	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√
Afrial Abdullah	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√
Eka Afriadi	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√

Rangkap Jabatan Direksi

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, lembaga keuangan non Bank atau perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

Jabatan rangkap Direksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini sebagai berikut :

RANGKAP JABATAN PADA DIREKSI			
Nama Direksi	**Jabatan di Bank**	**Pada Bank Lain**	**Perusahaan Lain**
Wan Marwan	Direktur Operasional	Tidak ada	Tidak ada
Nizam	Direktur Dana & Jasa	Tidak ada	Tidak ada
Afrial Abdullah	Direktur Kredit & Syariah	Tidak ada	Tidak ada
Eka Afriadi	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko	Tidak ada	Tidak ada

Kepemilikan Saham Direksi

Bank mewajibkan anggota Direksi untuk mengungkapkan kepemilikan sahamnya, baik pada Bank Riau Kepri maupun pada Bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

Untuk periode 31 Desember 2014, seluruh anggota Direksi tidak memiliki saham pada Bank Riau Kepri.

Menurut ketentuan Bank Indonesia, anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain. Per 31 Desember 2014, seluruh anggota Direksi tidak memiliki saham pada Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank maupun Perusahaan lain.

Rincian Kepemilikan Saham Direksi Bank adalah sebagai berikut :

KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI					
Nama	Kepemilikan Saham				
	Bank Riau Kepri	Bank Lain	Lembaga Keuangan Non Bank	Perusahaan Lain	Keterangan
Wan Marwan	-	-	-	-	Nihil
Nizam	-	-	-	-	Nihil
Afrial Abdullah	-	-	-	-	Nihil
Eka Afriadi	-	-	-	-	Nihil

Rapat Direksi

Di dalam Kebijakan Good Corporate Governance Bank Riau Kepri, Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu dan diselenggarakan secara rutin minimal satu kali dalam 1 (satu) bulan.

Direksi dapat mengadakan rapat di luar jadwal tersebut di atas berdasarkan permintaan tertulis :

1. Seorang atau lebih Direktur
2. Permintaan tertulis seorang atau lebih Anggota Dewan Komisaris.
3. Permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.

Sepanjang tahun 2014 Direksi Bank telah menyelenggarakan rapat sebanyak 17 (tujuh belas) kali, baik rapat internal Direksi, rapat Direksi dengan Komisaris maupun rapat Direksi dengan unit kerja terkait (rapat koordinasi). Rapat Direksi berfungsi untuk menetapkan kebijakan dalam pengambilan keputusan strategis.

AKTIVITAS RAPAT DIREKSI

No	Tanggal	Materi Rapat	Peserta		
1	20-01-2014	Evaluasi Kinerja Bank Riau Kepri Posisi Desember 2013		1.	Nizam
				2.	Wan Marwan
				3.	Afrial Abdullah
				4.	Eka Afriadi
				5.	Dewan Komisaris
2	05-02-2014	Pembahasan dan Keputusan Sanksi Terhadap kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai		1.	Nizam
				2.	Wan Marwan
				3.	Afrial Abdullah
				4.	Eka Afriadi
				5.	Tim Pertimbangan Hukuman Jabatan.
3	18-03-2014	1. Afrial Abdullah 2. Eka Afriadi 3. Unit Kerja Terkait		1.	Finalisasi Revisi RBB tahun 2014
				2.	Tindak Lanjut atas surat OJK terlait realisasi Triwulan IV – 2013
				3.	Review BPP Sistem Penilaian Unit dan Kinerja Pegawai
4	26-03-2014	Usulan Revisi RBB Tahun 2014		1.	Nizam
				2.	Eka Afriadi
				3.	Dewan Komisaris
				4.	Pejabat Divisi Perencanaan Strategis
5	27-03-2014	1. Pembahasan Persiapan RUPS Tahunan dan RUPSLB Bank Riau Kepri 2. Pembahasan Gedung Kantor Bank Riau Kepri		1.	Nizam
				2.	Wan Marwan
				3.	Afrial Abdullah
				4.	Eka Afriadi
				5.	Dewan Komisaris

6	11-04-2014	1. Pembahasan Perkembangan RUPS Tahunan dan RUPSLB PT. Bank Riau Kepri 2. Pembahasan Penyelesaian Gedung Kantor Bank Riau Kepri	1.	Nizam
			2.	Wan Marwan
			3.	Afrial Abdullah
			4.	Eka Afriadi
			5.	Dewan Komisaris
7	17-04-2014	1. Laporan PKLD s/d Maret 2014 2. Rencana Evaluasi TW I 2014 3. Tanggapan Surat OJK 4. Rencana Peresmian Kantor	1.	Nizam
			2.	Wan Marwan
			3.	Afrial Abdullah
			4.	Eka Afriadi
			5.	Staf Direksi
			6.	Unit Kerja Terkait
8	28-04-2014	Tindak Lanjut Putusan BANI dalam sengketa antara PT. Waskita Karya dengan Bank Riau Kepri	1.	Nizam
			2.	Wan Marwan
			3.	Afrial Abdullah
			4.	Eka Afriadi
			5.	Dewan Komisaris
			6.	Unit Kerja Terkait
			7.	Konsultan Hukum
9	24-06-2014	Pembahasan Usulan Revisi RBB Tahun 2014	1.	Nizam
			2.	Afrial Abdullah
			3.	Eka Afriadi
			4.	Dewan Komisaris
			5.	Pejabat Divisi Perencanaan Strategis
10	08-07-2014	Tindak Lanjut Permasalahan Pada Kedai Midai	1.	Nizam
			2.	Wan Marwan
			3.	Eka Afriadi
			4.	Dewan Komisaris
11	19-09-2014	1. Laporan PKLD s/d Agustus 2014 2. Mekanisme Rapat Evaluasi Cabang 3. Mekanisme Penyusunan RBB	1.	Wan Marwan
			2.	Eka Afriadi
			3.	Pejabat Seluruh Divisi
			4.	Staf Direksi
12	07-10-2014	Perkembangan Permasalahan Gedung Kantor Bank Riau Kepri	1.	Nizam
			2.	Eka Afriadi
			3.	Afrial Abdullah
			4.	Dewan Komisaris
13	07-11-2014	Persiapan dan Skenario Pra RUPSLB	1.	Nizam
			2.	Wan Marwan
			3.	Afrial Abdullah
			4.	Eka Afriadi
			5.	Dewan Komisaris

14	25-11-2014	Pembahasan RBB Bank Riau Kepri Tahun 2015	1.	Nizam
			2.	Wan Marwan
			3.	Afrial Abdullah
			4.	Eka Afriadi
			5.	Dewan Komisaris
			6.	Pejabat Divisi Perencanaan Strategis
15	08-12-2014	Pembahasan Risk Appetite Statement dan Reviwe Keanggotaan RMCO	1.	Nizam
			2.	Wan Marwan
			3.	Eka Afriadi
			4.	Pemimpin Seluruh Divisi
16	12-12-2014	Pembahasan dan Keputusan Sanksi Terhadap kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai	1.	Nizam
			2.	Wan Marwan
			3.	Afrial Abdullah
			4.	Eka Afriadi
			5.	Tim Pertimbangan Hukuman Jabatan.
17	17-12-2014	Pembahasan Hasil Pemeriksaan OJK	1.	Nizam
			2.	Wan Marwan
			3.	Afrial Abdullah
			4.	Eka Afriadi
			5.	Dewan Komisaris

Hasil rapat dituangkan di dalam risalah rapat dan di dokumentasikan dengan baik, termasuk disenting opinion, serta dibagikan kepada seluruh anggota Direksi dan pihak terkait, dan selanjutnya hasil rapat merupakan rekomendasi dan/atau nasihat yang dapat diimplementasikan.

Tingkat kehadiran anggota Direksi secara fisik dalam rapat rapat Direksi baik yang diselenggarakan internal Direksi maupun mengundang unit kerja terkait dan undangan Dewan Komisaris, dapat terlihat di dalam tabel berikut :

No	Direksi	Jabatan	Kehadiran		
			Total Rapat	Jumlah	Persentase
1	Nizam	Direktur Operasional	17	15	86%
2	Wan Marwan	Direktur Dana & Jasa	17	13	93%
3	Afrial Abdullah	Direktur Kredit & Syariah	17	13	93%
4	Eka Afriadi	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko	17	17	100%

Jumlah kehadiran rapat di atas, merupakan rapat yang dilaksanakan oleh Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris, dan Divisi terkait. Di samping Direksi menyelenggarakan rapat sebagaimana diatur di atas, masing-masing Direksi telah menyelenggarakan rapat dengan unit kerja di bawah supervisinya, sebagai berikut :

AKTIVITAS RAPAT DIREKTUR DANA DAN JASA		
No	**Tanggal**	**Materi Rapat**
1	27-01-2014	Pembahasan Finalisasi BPP PKB
2	05-02-2014	Persiapan Rapat kerja Bank Riau Kepri di Tanjung Pinang
3	14-03-2014	Pembahasan Mutasi yang Terjadi di Direktorat Dana dan Jasa

4	18-03-2014	1. Finalisasi Revisi RBB tahun 2014
		2. Tindak Lanjut atas surat OJK terlait realisasi Triwulan IV – 2013
		3. Review BPP Sistem Penilaian Unit dan Kinerja Pegawai
5	26-03-2014	Usulan Revisi RBB Tahun 2014
6	08-04-2014	Target Penyelesaian BPP PKB
7	17-04-2014	1. Laporan PKLD s/d Maret 2014
		2. Rencana Evaluasi TW I 2014 3. Tanggapan Surat OJK
		4. Rencana Peresmian Kantor
8	06-05-2014	Pembahasan Finalisasi BPP PKB
9	09-05-2014	Pembahasan Finalisasi BPP PKB
10	13-05-2014	Pelaksanaan Undian STM PT. Bank Riau Kepri
11	02-06-2014	Pelaksanaan Undian STM PT. Bank Riau Kepri
12	27-06-2014	Pembahasan Finalisasi BPP PKB
13	15-08-2014	Target NPL sesuai RKAT
14	29-08-2014	Laporan Realisasi RBB TW II tahun 2014
15	14-10-2014	Pra Evaluasi Kinerja TW III tahun 2014
16	19-11-2014	Koordinasi Pelaksanaan Undian STM Bank Riau Kepri
17	17-12-2014	Koordinasi Pelaksanaan Undian STM Bank Riau Kepri

AKTIVITAS RAPAT DIREKTUR OPERASIONAL		
No	**Tanggal**	**Materi Rapat**
1 2	15-01-2014 20-01-2014	Rapat Finalisasi KPI tahun 2014 Divisi/Desk/Staf Direksi bersama Direksi
		1. Evaluasi Kinerja Bank Riau Kepri posisi 31 Desember 2014
		2. Kondisi Keuangan Bank Riau Kepri saat ini
		3. Informasi lain yang perlu disampaikan kepada Dewan Komisaris
3	06-02-2014	Finalisasi KPI Direktorat Operasional Tahun 2014
4	27-02-2014	Rapat ALCO Bank Riau Kepri
5	07-04-2014	Rapat ALCO Bank Riau Kepri
6	19-05-2014	Rapat ALCO Bank Riau Kepri
7	08-07-2014	Tindak Lanjut Permasalahan Kasus Bank Riau Kepri Kedai Midai
8	24-07-2014	Rapat ALCO Bank Riau Kepri
9	19-09-2014	4. Laporan PKLD s/d Agustus 2014
		5. Mekanisme Rapat Evaluasi Cabang
		6. Mekanisme Penyusunan RBB
10	07-11-2014	Persiapan Pelaksanaan Tutup Buku Akhir Tahun 2014
11	08-12-2014	Pembahasan On Site Visit Bank Indonesia Jakarta dan Rencana Tutup Buku Akhir Tahun 2014
12	16-12-2014	Rapat ALCO Bank Riau Kepri
13	17-12-2014	Pembahasan Hasil Pemeriksaan OJK
14	24-12-2014	Pembahasan dalam Rangka Pembetulan PPh Badan tahun 2009
15	29-12-2014	Penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan PPh Badan tahun 2011

AKTIVITAS RAPAT DIREKTUR KREDIT DAN SYARIAH		
No	**Tanggal**	**Materi Rapat**
1	27-01-2014	Perubahan Tingkat Suku Bunga Kredit
2	06-02-2014	1. Penyampaian kondisi dan posisi keuangan Bank Riau Kepri tahun 2013 dan Rencana Penyaluran Kredit tahun 2014
		2. Penyampaian Program Kerja tahun 2014
3	28-04-2014	Rapat Monitoring Kredit
4	30-04-2014	Rapat Monitoring Kredit
5	18-06-2014	Pembahasan penyaluran kredit dan NPL sampai dengan akhir Mei 2014
6	26-08-2014	Rapat Pembahasan Kredit
7	29-08-2014	Pembahasan permasalahan perkredit Cabang Tembilahan.
8	25-09-2014	Pembahasan dan Tindak lanjut Rencana Penurunan NPL Kredit NPL di Capem Pakning
9	29-09-2014	Rapat Monitoring Kredit
10	23-10-2014	Target Penyaluran Kredit sampai dengan akhir tahun 2014
11	27-11-2014	Rapat Monitoring Kredit
12	04-12-2014	Pembahasan Target NPL Akhir Tahun 2014 Khusus Wilayah Cabang Pasar Pusat dan sekitarnya
13	08-12-2014	Evaluasi dan Monitoring NPL Jaringan Kantor Cabang Pangkalan Kerinci
14	09-12-2014	Evaluasi dan Monitoring NPL Jaringan Kantor Cabang Air Molek
15	10-12-2014	Evaluasi dan Monitoring NPL Jaringan Kantor Cabang Taluk Kuantan
16	11-12-2014	Evaluasi dan Monitoring NPL Jaringan Kantor Cabang Utama Pekanbaru
17	12-12-2014	Evaluasi dan Monitoring NPL Jaringan Kantor Cabang Syariah Pekanbaru dan Capem Syariah Duri
18	16-12-2014	Evaluasi dan Monitoring NPL Jaringan Kantor Cabang Tanjung Balai Karimun
19	16-12-2014	Evaluasi dan Monitoring NPL Jaringan Kantor Cabang Batam
20	22-12-2014	Evaluasi dan Monitoring NPL Jaringan Kantor Cabang Tembilahan

AKTIVITAS RAPAT DIREKTUR KEPATUHAN DAN MANAJEMEN RISIKO		
No	**Tanggal**	**Materi Rapat**
1	30-06-2014	Tindak Lanjut Temuan BI and OJK
2	13-08-2014	Perkembangan Masalah Gedung Bank Riau Kepri dan Rencana RUPSLB
3	20-08-2014	Pembahasan Buku Pedoman Kerja Dewan Komisaris PT. Bank Riau Kepri
4	29-08-2014	Tingkat Kesehatan Bank per Juni 2014
5	05-09-2014	Pembahasan Permasalahan Debitur Capem Panam
6	19-09-2014	Pembahasan BPP Manajemen Risiko
7	20-10-2014	Laporan Profil Risiko Konvensional dan UUS Posisi September 2014
8	08-12-2014	Pembahasan Risk Appetite Statement dan Reviwe Keanggotaan RMCO

Penilaian Kinerja Direksi

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi bertanggung jawab kepada RUPS. Pertanggungjawaban Direksi kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Kinerja Direksi dievaluasi oleh Dewan Komisaris baik secara individual maupun kolektif berdasarkan unsur-unsur penilaian kinerja yang disusun oleh Komite Remunerasi dan Nominasi. Pelaksanaan penilaian dilakukan pada tiap akhir periode tutup buku. Hasil penilaian kinerja Direksi oleh Dewan Komisaris disampaikan dalam RUPS Bank.

Paket Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain Direksi

Sepanjang tahun 2014 jumlah gaji dan tunjangan lainnya yang meliputi remunerasi dalam bentuk natura dan non natura yang diberikan kepada Direksi adalah sebesar Rp.

18.421.919.283,-

Jumlah di atas merupakan remunerasi yang diberikan kepada Direksi untuk periode Januari s/d Desember 2014.

Remunerasi dan fasilitas lain yang diterima dalam 1 tahun pada tahun 2014, sebagai berikut :

Jenis Penerimaan	Jumlah Direksi	Nominal (Rp)
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, penghasilan tetap lainnya dan fasilitas lain dalam bentuk non-natura)	4	18.245.144.843,-
2. Fasilitas lain dalam bentuk Natura (perumahan, transportasi, perawatan kesehatan, dsb)	4	176.774.440,-
Jumlah Penerimaan		18.421.919.283,-

Jumlah anggota Direksi yang menerima paket remunerasi selama tahun 2013 yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, terlihat dalam tabel di bawah.

Kelompok Nominal Remunerasi dalam 1 tahun	Jumlah Direksi
Di atas Rp 2 miliar	4
Di atas Rp 1 miliar s.d 2 miliar	-
Di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	-
Rp 500 juta ke bawah	-
Total	4

Program Pelatihan dan Seminar Direksi

Sepanjang tahun 2014 para anggota Direksi telah mengikuti beberapa pelatihan/seminar/workshop yang diselenggarakan oleh pihak internal dan eksternal yaitu BI dan dari lembaga pelatihan yang ada di Indonesia, antara lain :

Nama	Materi Pelatihan	Penyelenggara Pelatihan/ Seminar	Tempat & Waktu Pelaksanaan
Wan Marwan	Workshop Implementasi Kartu Debit Chip (NSICCS)	Multipolar	Jakarta, 03 April
	Seminar Pengelolaan Dana Pensiun Dalam Menyongsong Landscape Sistem Jaminan Sosial Nasional	ADPI	Yogyakarta, 25 Sept
	Seminar Hasil Survey MRI dan Undangan Penghargaan K3 Tahun 2013	ASBANDA	30 April
	Sosialisas MPN Bank Persepsi Bagi Pegawai PT Bank Riau Kepri	Div. Operasional	Pekanbaru, 08 Mei
	Pelatihan Persiapan Pensiun Dan Kewirausahaan	Bizcontact	Bandung, 06 Januari
Afrial Abdulah	Pelatihan Executive Overview of Islamic Banking	ICDIF	Jakarta, 03 April
	Lokakarya The Role and Function of Commissioners, Directors and Sharia Supervisory Board in Managing Islamic Banks	ICDIF	Jakarta, 09 Mei
	Sosialisasi Ketentuan TKS-RBBR Syariah	OJK	Jakarta, 19 Mei
	Seminar & Wisata Tomohon International Flower Festival	ADPI	Manado, 07 Agustus
	Workshop Internasional KUR Program	KEMENTRIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN RI	Bali, 13 Oktober
	Seminar Strategy Execution Leadership Mojo	Gml Performance Consulting	Jakarta, 17 November
	Workshop Spin Off Bagi Pejabat PT Bank Riau Kepri	PT Batasa Tazdkia	Pekanbaru, 05 Mei
	Workshop Implementasi PAPSI 2013 Bagi Pegawai PT Bank Riau Kepri	Divisi UUS	Pekanbaru, 05 Mei

Nizam	Sosialisasi Mini Master Repurchase Agreement (MRA) dan Workshop Surveillance Pelaksanaan Operasi Moneter	Bank Indonesia	Batam, 07 Maret
	Undangan Business Meeting 2014	ASBANDA	Jakarta, 19 Maret
	Seminar BPDSI dan Penarikan Undian Tabungan Simpeda	ASBANDA	Bengkulu, 13 April
	Seminar Nasional "Prospek dan Peluang Investasi 2014 serta Dana Pensiun Lembaga Lembaga Keuangan (DPLK) Pasca Terbitnya UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS"	PPSPJ	Jakarta, 29 April
	Sosialisasi Branchless Banking Telkomsel	Telkomsel	Jakarta, 29 April
Eka Afriadi	Workshop Annual Report Award (ARA)	IDX	Jakarta, 29 Januari
	Focus Group Discussion Kejahatan PerBankan Berbasis TI (Cyber Crime)	OJK	Jakarta, 13 Mei
	Workshop Teknik Pengendalian Kecurangan dan Membangun Whistleblower System (WBS) yang Efektif	LPFA	Jakarta, 26 Juni
	Seminar Dan Workshop Memahami Operasional Fraud Dan Top 10 Audit Test	AWESOME CONSULTING	Jakarta, 29 September
	Sosialisasi Penanganan Tindak Pidana PerBankan	OJK	Jakarta, 22 Oktober
	Undangan Seminar OJK	OJK	Jakarta, 18 November
	Seminar Nasional BPDSI	ASBANDA	Jakarta, 15 Desember

RASIO GAJI DAN KOMPOSISI PEGAWAI

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Untuk perbandingan/ratio gaji antara gaji Dewan Komisaris tertinggi dengan yang terendah, gaji Direksi tertinggi dengan yang terendah, gaji pegawai tertinggi dengan yang terendah, dan antara gaji Direksi tertinggi dengan gaji pegawai yang tertinggi sepanjang tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Jabatan	Gaji (Rp)		Rasio Perbandingan (%)
		Tertinggi	Terendah	
1	Gaji Dewan Komisaris	56.160.000,-	56.160.000,-	100
2	Gaji Direksi	70.200.200,-	70.200.200,-	100
3	Gaji Pegawai Tetap	22.997.000,-	4.703.000,-	20,45
4	Gaji Pegawai Tidak Tetap	4.735.000,-	1.760.000,-	37,17
5	Gaji Direksi Tertinggi & Pegawai Tetap Tertinggi	70.200.200,-	22.997.000,-	32,76

Komposisi Pegawai

Sampai dengan akhir tahun 2014 jumlah pegawai Bank Riau Kepri (pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap) berjumlah 2015 orang, terjadi peningkatan jumlah pegawai dari tahun sebelumnya.

Komposisi pegawai sebagaimana diuraikan di bawah ini merupakan uraian komposisi pegawai Bank Riau Kepri dengan status pegawai tetap dan pegawai tidak tetap.

1. Komposisi Pegawai Tetap (PT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) berdasarkan tingkat usia pada tahun 2014

No	Usia Pegawai	(PT)	(PTT)	Jumlah
1	**50 – 55**	**87**	**4**	**91**
2	40 – 49	138	29	167
3	30 – 39	602	216	818
4	23 – 29	184	593	777
5	≤ 23	0	162	162
Total		**1011**	**1004**	**2015**

2. Komposisi Pegawai Tetap berdasarkan jabatan pada tahun 2014

No	Jabatan	Jumlah
1	Pemimpin Divisi	15
2	Staf Ahli Direksi	6
3	Pemimpin Bagian Kantor Pusat	24
4	Pemimpin Cabang Konvensional	17
5	Pemimpin Cabang Syariah	2
6	Setingkat Pemimpin Cabang Utama	2
7	Pemimpin Cabang pembantu	38
8	Pemimpin Bagian Cabang Utama/Setingkat	2
9	Pemimpin Setingkat Pincapem	3
10	Pemimpin Seksi Setingkat	269
11	Pegawai MPP (Masa Persiapan Pensiun)	6
12	Pelaksana	573
13	Supir	19
14	Satpam	35
Total		**1011**

3. Komposisi Pegawai Tidak Tetap berdasarkan jabatan pada tahun 2014

No	Jabatan	Jumlah
1	Pegawai Administrasi	11
2	Teller/CS/Pemasar	464
3	Supir	85
4	Satpam	294
5	Operator Telepon	2
6	Operator Genset	10
7	Petugas Ekspedisi	5
8	Pembantu Rumah Tangga	7
9	Petugas Jaga Malam	10
10	Petugas Kebersihan	116
Total		**1004**

4. Komposisi Pegawai (tetap dan tidak tetap) berdasarkan pendidikan pada tahun 2013

No	Keterangan	Pegawai Tetap	Pegawai Tidak Tetap	Jumlah
1	Doktor	1	-	1
2	Pasca Sarjana	41	-	41
3	Sarjana	688	362	1050
4	Sarjana Muda	179	126	305
5	SLTA	93	490	583
6	SLTP	4	25	29
7	SD	5	1	6
Total		**1011**	**1004**	**2015**

KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dalam pelaksanaan tugasnya Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Struktur yang dibentuk sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum.

Struktur keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi Bank pada awalnya diatur berdasarkan Keputusan Direksi Bank Nomor 76/KEPDIR/2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang Susunan Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi berikut perubahannya SK Direksi Nomor 51/KEPDRI/2012 tanggal 15 Oktober 2012 tentang Perubahan Keputusan Direksi Nomor 76/KEPDIR/2011 tentang Susunan Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Pada tahun 2013 terjadi perubahan susunan keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi Bank sebagaimana tertuang di dalam Keputusan Direksi Nomor 09/KEPDIR/2013 tanggal 31 Januari 2013 tentang Susunan Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Riau Kepri.

Untuk tahun 2014 susunan keanggotaan Komite Dewan Komisaris mengalami perubahan, sebagaimana termuat di dalam tabel di bawah ini :

PERUBAHAN SUSUNAN KOMITE DEWAN KOMISARIS		
Nomor dan Tanggal SK Direksi	**Perihal**	**Isi Perubahan**
25/KEPDIR/2014 Tanggal 21 April 2014	Perubahan Keputusan Direksi Nomor 09/KEPDIR/2013 Tentang Susunan Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri	
		Merubah susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi menjadi :
		1. H. A. Rivaie Rachman
		2. H. Charisiman Rasahan
		3. Denny M Akbar
54/KEPDIR/2014 Tanggal 16 Juli 2014	Perubahan Keputusan Direksi Nomor 09/KEPDIR/2013 Tentang Susunan Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri	
		Merubah susunan keanggotaan Komite Audit menjadi :
		1. H. Charisiman Rasahan
		2. H. Sarjono Amnan
		3. Fahmi Oemar
		4. Indarti

		Merubah susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko menjadi :
		1. H. Sarjono Amnan
		2. H. Charisiman Rasahan
		3. Fahmi Oemar
		3. Indarti

KOMITE AUDIT

Susunan Anggota Komite Audit

Susunan anggota Komite Audit telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam Pasal 38 ayat (1) PBI Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum yang menegaskan bahwa anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi dan seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perBankan.

Pada tahun 2014, terdapat perubahan susunan keanggotaan Komite Audit, berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 54/ KEPDIR/2014 tanggal 16 Juli 2014 tentang perubahan Keputusan Direksi Nomor 09/KEPDIR/2013 Tentang Susunan Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri. Perubahan terjadi pada komposisi/jumlah Komite Audit, dimana salah seorang anggota komite yang tidak diperpanjang masa kerjanya yaitu Sdr. Kirmizi. Untuk perubahan Komposisi Komite Audit, terlihat dari tabel di bawah ini :

Komposisi Komite Audit berdasarkan SK Direksi No. 09/ KEPDIR/2013 tanggal 31 Januari 2013, adalah sebagai berikut :

Susunan Keanggotaan Komite Audit		
Nama	**Jabatan**	**Keterangan**
Chairisman Rasahan	Ketua (merangkap anggota)	Komisaris Independen
Sarjono Amnan	Anggota	Komisaris Independen
Kirmizi	Anggota	Pihak Independen
Fahmi Oemar	Anggota	Pihak Independen
Indarti	Anggota	Pihak Independen

Komposisi Komite Audit berdasarkan SK Direksi No. 54/ KEPDIR/2014 tanggal 16 Juli 2014.

Susunan Keanggotaan Komite Audit		
Nama	**Jabatan**	**Keterangan**
Chairisman Rasahan	Ketua (merangkap anggota)	Komisaris Independen
Sarjono Amnan	Anggota	Komisaris Independen
Fahmi Oemar	Anggota	Pihak Independen
Indarti	Anggota	Pihak Independen

Keahlian dan Independensi Komite Audit

Anggota Komite Audit Bank terdiri dari Komisaris independen dan pihak independen. Anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Independen memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi dan memiliki keahlian di bidang hukum atau perBankan.

Anggota Komite Audit Bank telah memenuhi kriteria independensi, keahlian, integritas dan moral yang baik yang dipersyaratkan dalam Buku Pedoman Perusahaan Good Corporate Governance Bank Riau Kepri dan peraturan/ ketentuan terkait lainnya.

Seluruh anggota Komite Audit tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank,

yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Tugas dan Tanggung jawab Komite Audit

Komite Audit bertugas mengevaluasi, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian khusus serta memberikan pendapat secara profesional yang independen kepada Dewan Komisaris di bidang laporan keuangan dari Direksi, auditor internal, auditor eksternal, serta mereview laporan ketaatan pada peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan manajemen risiko.

Diantara tugas dan tanggungjawab Komite Audit yang diatur di dalam Buku Kebijakan Perusahaan (BPP) Good Corporate Governance Bank Riau Kepri antara lain adalah :

1. Menindaklanjuti hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) sesuai dengan kebijakan atau pengarahan yang diberikan oleh Komisaris.
2. Mengevaluasi hasil temuan pemeriksaan oleh SKAI.
3. Meminta Direksi untuk menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan SKAI.
4. Memberikan persetujuan tentang pengangkatan dan pemberhentian Pemimpin SKAI oleh Direksi dan dilaporan kepada Bank Indonesia.
5. Menyetujui Internal Audit Charter, menanggapi rencana Audit Intern dan masalah-masalah yang ditemukan oleh Auditor Intern serta menentukan pemeriksaan khusus oleh SKAI, apabila terdapat dugaan terjadinya kecurangan, penyimpangan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
6. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam hal auditee tidak menindaklanjuti laporan SKAI.
7. Memastikan bahwa laporan-laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia serta instansi lain yang berkepentingan dilakukan dengan benar dan tepat waktu dan memastikan bahwa Bank mematuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
8. Memastikan bahwa manajemen menjamin baik Auditor Ekstern maupun Intern dapat bekerja sesuai dengan Standar Audit yang berlaku.
9. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukkan akuntan publik, serta melakukan evaluasi terhadap kandidat minimal 3 (tiga) tahun sekali untuk menjaga kemandirian dari akuntan publik yang ditunjuk.
10. Memastikan kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan.
11. Mengevaluasi masalah-masalah pajak dan hukum yang membutuhkan penanganan khusus.

Rencana dan Realisasi Kegiatan Komite Audit

1. Rencana Kegiatan/Program Kerja Komite Audit
   Untuk tahun 2014 Komite Audit telah menyusun program kerja sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya, antara lain sebagai berikut :
   a. Melakukan rapat rutin Komite Audit
   b. Melakukan review rencana kerja Audit Tahunan SKAI
   c. Melakukan pembahasan hasil tindak lanjut audit intern dan ekstern
   d. Melakukan rapat Komite Audit dengan Kantor Akuntan Publik
   e. Melakukan kunjungan kerja ke kantor Cabang
   f. Melaksanakan rapat dengan Divisi dan unit kerja lainnya
   g. Melakukan pembahasan laporan keuangan dan laporan realisasi Rencana Bisnis serta laporan kinerja Bank

2. Realisasi Kegiatan Komite Audit
   Sepanjang tahun 2014 Komite Audit telah melaksanakan program kerja sesuai dengan rencana kerja dan tugas serta tanggungjawabnya, meliputi sebagai berikut :
   a. Menyelenggarakan rapat rutin Komite Audit
   b. Melakukan kunjungan kerja ke beberapa kantor Bank
   c. Menyelenggarakan rapat dengan Kantor Akuntan Publik
   d. Melakukan rapat dengan Direksi/Komisaris dan/atau unit kerja terkait

Aktivitas Rapat Komite Audit

Rapat Komite Audit selama ini dilaksanakan sesuai kebutuhan Bank dan hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen.

Berdasarkan tugas dan fokus kegiatan tersebut di atas, sepanjang tahun 2014 Komite Audit telah melakukan pembahasan dan menyampaikan saran–saran yang meliputi berbagai aktifitas penting yang dilakukan oleh Bank sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) kali rapat/pertemuan.

Rapat yang diselenggarakan oleh Komite Audit secara internal sebanyak 28 (dua puluh delapan) kali rapat/pembahasan, sebagai berikut :

AKTIVITAS RAPAT KOMITE AUDIT				
No	**Tanggal**	**Materi Rapat**	**Peserta**	
1	15-01-14	Membahas :	1.	Chairisman Rasahan
		- Kinerja Bank Riau Kepri Bulan November 2013	2.	Sarjono Amnan
		- Laporan Monitoring Tindak Lanjut SKAI Posisi November 2013	3.	Kirmizi
			4.	Fahmi Oemar
			5.	Indarti
2	29-01-14	Membahas :	1.	Chairisman Rasahan
		- Kinerja Bank Riau Kepri Bulan Desember 2013.	2.	Sarjono Amnan
		- Membahas Laporan Monitoring Tindak Lanjut SKAI Posisi Desember 2013	3.	Kirmizi
			4.	Fahmi Oemar
			5.	Indarti
3	03-02-2014	Membahas Laporan SKAI mengenai Audit Umum Kantor Cabang Tanjung Balai Karimun Periode Audit 01 Januari 2007 s/d 31 Oktober 2013	1.	Chairisman Rasahan
			2.	Sarjono Amnan
			3.	Kirmizi
			4.	Fahmi Oemar
			5.	Indarti
4	04-02-14.	Membahas Laporan Hasil Audit Umum Kantor Cabang Selat Panjang Periode 01 September 2009 s/d 31 Oktober 2013	1.	Chairisman Rasahan
			2.	Sarjono Amnan
			3.	Kirmizi
			4.	Fahmi Oemar
			5.	Indarti
5	14-03-14	Membahas :	1.	Chairisman Rasahan
		- Membahas langkah-langkah untuk meningkatkan DPK (Dana Pihak Ketiga).	2.	Sarjono Amnan
		- Membahas Laporan SKAI mengenai tindak lanjut Audit Umum Perkreditan , Audit Umum operasional dan IT, Umum posisi Februari 2014	3.	Kirmizi
			4.	Fahmi Oemar
			5.	Indarti
6	26-03-14	Membahas Laporan Tahunan Evaluasi Kinerja SKAI Bank Riau Kepri Tahun 2013 dan Rencana Kerja SKAI Tahun 2014	1.	Chairisman Rasahan
			2.	Sarjono Amnan
			3.	Kirmizi
			4.	Fahmi Oemar
			5.	Indarti
7	22-05-14	Membahas Laporan Kinerja Bank Riau Kepri April 2014	1.	Chairisman Rasahan
			2.	Sarjono Amnan
			3.	Kirmizi
			4.	Fahmi Oemar

			5.	Indarti
8	02-06-14	Membahas Realisasi Rencana Bisnis PT Bank Riau Kepri Triwulan I – 2014	1.	Chairisman Rasahan
			2.	Sarjono Amnan
			3.	Kirmizi
			4.	Fahmi Oemar
			5.	Indarti
9	10-06-14	Membahas Laporan SKAI mengenai Audit Umum Kantor Cabang Dumai Periode Audit 1 Maret 2012 s/d 28 Maret 2014	1.	Chairisman Rasahan
			2.	Sarjono Amnan
			3.	Kirmizi
			4.	Fahmi Oemar
			5.	Indarti
10	01-07-14.	Membahas :	1.	Chairisman Rasahan
		- Laporan Kinerja Bank Riau Kepri Bulan Mei 2014	2.	Sarjono Amnan
		- Membahas Laporan SKAI mengenai tindak lanjut Audit UmumPerkreditan, Umum, Operasional, dan IT	3.	Fahmi Oemar
			4.	Indarti
11	02-07-14	Membahas Laporan Divisi SKAI tentang Hasil Audit Umum Kantor Cabang Pasar Pusat Periode Audit 1 Oktober 2014 s/d April 2014	1.	Chairisman Rasahan
			2.	Sarjono Amnan
			3.	Fahmi Oemar
			4.	Indarti
12	03-07-14	Membahas Laporan Divisi SKAI tentang Hasil Audit Umum Kantor Cabang Tanjung Pinang Periode Audit 31 Juli 2008 s/d 31 Maret 2014	1.	Chairisman Rasahan
			2.	Sarjono Amnan
			3.	Fahmi Oemar
			4.	Indarti
13	04-07-14	Membahas Laporan Divisi SKAI tentang Hasil Audit Umum Kantor Cabang Air Molek Periode 1 November 2008 s/d 30 April 2014	1.	Chairisman Rasahan
			2.	Sarjono Amnan
			3.	Fahmi Oemar
			4.	Indarti
14	15-07-14	Membahas Laporan Divisi SKAI tentang Hasil Audit Umum Kantor Cabang Siak Sri Indrapura Periode 1 Agustus 2013 s/d 30 April 2014	1.	Chairisman Rasahan
			2.	Sarjono Amnan
			3.	Fahmi Oemar
			4.	Indarti
15	17-07-14	Membahas Laporan Divisi SKAI tentang Hasil Audit Umum Kantor Cabang Bangkinang Periode 1 Mei 2010 s/d 30 April 2014	1.	Chairisman Rasahan
			2.	Sarjono Amnan
			3.	Fahmi Oemar
			4.	Indarti
16	21-07-14	Membahas :	1.	Chairisman Rasahan
		- Laporan Kinerja Bank Riau Kepri Bulan Juni 2014.	2.	Sarjono Amnan
		- Laporan SKAI mengenai tindak lanjut Audit Umum Perkreditan, Umum, Operasional, dan IT	3.	Fahmi Oemar
			4.	Indarti

17	18-08-14	Membahas Laporan Divisi SKAI tentang Hasil Audit Umum Kantor Cabang Ranai Periode 1 Agustus 2013 s/d 31 Mei 2014	1.	Chairisman Rasahan
			2.	Sarjono Amnan
			3.	Fahmi Oemar
			4.	Indarti
18	26-08-14	Membahas Laporan Divisi SKAI tentang Hasil Audit Umum Kantor Cabang Bagan Siapi-api Periode 1 Mei 2010 s/d 31 Mei 2014	1.	Chairisman Rasahan
			2.	Sarjono Amnan
			3.	Fahmi Oemar
			4.	Indarti
19	28-08-14	- Membahas KAP untuk melakukan Audit Laporan Keuangan, Audit Kepatuhan & Teknologi Informasi Bank Riau Kepri Tahun 2014	1.	Chairisman Rasahan
		- Memberikan Rekomendasi Penetapan KAP untuk Bank Riau Kepri Tahun Buku 2014	2.	Sarjono Amnan
			3.	Fahmi Oemar
			4.	Indarti
20	04-09-14	Membahas Laporan Kinerja Bank Riau Kepri Bulan Juli 2014	1.	Chairisman Rasahan
			2.	Sarjono Amnan
			3.	Fahmi Oemar
			4.	Indarti
21	29-09-14	Membahas Laporan Divisi SKAI tentang Hasil Audit Umum Kantor Cabang Syariah Tanjung Pinang Periode 1 Januari 2009 s/d 30Juli 2014	1.	Chairisman Rasahan
			2.	Sarjono Amnan
			3.	Fahmi Oemar
			4.	Indarti
22	03-10-14	Membahas Laporan Kinerja PT Bank Riau Kepri Bulan Agustus 2014	1.	Chairisman Rasahan
			2.	Sarjono Amnan
			3.	Fahmi Oemar
			4.	Indarti
23	15-10-14	Membahas Laporan Divisi SKAI tentang Hasil Audit Umum Kantor Cabang Taluk Kuantan Periode 1 Maret 2013 s/d 30 Juni 2014	1.	Chairisman Rasahan
			2.	Sarjono Amnan
			3.	Fahmi Oemar
			4.	Indarti
24	17-10-14	Membahas Laporan Divisi SKAI tentang Hasil Audit Umum Kantor Cabang Utama Periode 1 Desember 2008 s/d 31 Juli 2014	1.	Chairisman Rasahan
			2.	Sarjono Amnan
			3.	Fahmi Oemar
			4.	Indarti
25	21-10-14	Membahas Laporan Divisi SKAI tentang Hasil Audit Umum Kantor Cabang Bengkalis Periode 1 Juli 2010 s/d 31 Juli 2014	1.	Chairisman Rasahan
			2.	Sarjono Amnan
			3.	Fahmi Oemar
			4.	Indarti

26	29-10-14	Membahas Laporan SKAI mengenai Laporan Hasil Audit Umum Divisi Teknologi Sistem Informasi PT Bank Riau Kepri periode 1 Agustus 2011 s/d 31 Agustus 2014	1.	Chairisman Rasahan
			2.	Fahmi Oemar
			3.	Indarti
27	20-11-14	Membahas Laporan Divisi SKAI tentang Laporan Tindak Lanjut Audit Umum, Perkreditan, Operasional dan IT Periode Oktober 2014.	1.	Chairisman Rasahan
			2.	Sarjono Amnan
			3.	Fahmi Oemar
			4.	Indarti
28	12-12-14	Laporan Kinerja Bank Riau Kepri bulan November 2014.	1.	Chairisman Rasahan
			2.	Sarjono Amnan
			3.	Fahmi Oemar
			4.	Indarti

Untuk rapat koordinasi Komite Audit dengan unit kerja Bank lainnya telah dilakukan sebanyak 11 (sebelas) kali rapat/ pembahasan, yaitu sebagai berikut :

AKTIVITAS RAPAT KOMITE AUDIT				
No	**Tanggal**	**Materi Rapat**	**Peserta**	
1	05-02-14	Membahas Mengenai Hasil Kunjungan Kerja Ke Cabang Pembantu Rumbai. :	1.	Chairisman Rasahan
		- Tentang kondisi NPL Capem Rumbai yang cukup tinggi.	2.	Sarjono Amnan
		- Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi tingginya NPL	3.	Kirmizi
			4.	Fahmi Oemar
			5.	Indarti
			6.	Pemimpin dan Staf Capem Rumbai
2	05 -02-14	Membahas mengenai Hasil Kunjungan Kerja Ke Cabang Syariah Pekanbaru:	1.	Chairisman Rasahan
		- Tentang kondisi NPF yang cukup tinggi pada Cabang Syariah Pekanbaru.	2.	Sarjono Amnan
		- Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi tingginya NPF tersebut.	3.	Kirmizi
			4.	Fahmi Oemar
			5.	Indarti
			6.	Pemimpin dan Staf Cabang Syariah Pekanbaru
3	04-03-14	Membahas mengenai Hasil Kunjungan Kerja Ke Capem Sei Pakning dan Cabang Bengkalis :	1.	Chairisman Rasahan
		- Tentang kondisi NPL Capem Sei Pakning yang cukup tinggi.	2.	Kirmizi
		- Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi tingginya NPL tersebut.	3.	Fahmi Oemar
			4.	Indarti
			5.	Pemimpin dan Staf Cabang Bengkalis
			6.	Pemimpin dan Staf Capem Sei Pakning

4	10-03-14	Membahas Hasil Pemeriksaan (General Audit) PT Bank Riau Kepri oleh KAP AbdiIchjar, BAP & Rekan tahun Buku 2013.	1.	Chairisman Rasahan
			2.	Sarjono Amnan
			3.	Kirmizi
			4.	Fahmi Oemar
			5.	Indarti
			6.	Direksi
			7.	Pemimpin Divisi
			8.	KAP
5	18-03-14	Membahas tentang Hasil Kunjungan Kerja Kedai Kabun Cabang Pasir Pengaraian :	1.	Chairisman Rasahan
		- Tentang Kondisi NPL yang cukup tinggi.	2.	Kirmizi
		- Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasinya tingginya NPL tersebut.	3.	Fahmi Oemar
			4.	Indarti
			5.	Pemimpin Cabang Pasir Pangaraian
			6.	Pinkedai dan Staf Kedai Kabun
6	03-04-14	Membahas tentang Hasil Kunjungan Kerja ke Capem Lubuk Baja :	1.	Chairisman Rasahan
		- Tentang Kondisi NPL yang cukup tinggi.	2.	Sarjono Amnan
		- Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi tingginya NPL tersebut.	3.	Kirmizi
			4.	Fahmi Oemar
			5.	Indarti
			6.	Pemimpin dan Staf Capem Lubuk Baja
7	21-03-14	Membahas :	1.	Chairisman Rasahan
		- Laporan SKAI mengenai tindak lanjut Audit Umum Perkreditan, Operasional, IT, Umum Posisi Maret 2014 Kinerja Bank Riau Kepri bulan Sept 2013.	2.	Sarjono Amnan
		- Rapat Internal dengan SKAI	3.	Kirmizi
			4.	Fahmi Oemar
			5.	Indarti
			6.	SKAI
8	09-10-14	Membahas tentang Hasil Kunjungan Kerja ke Cabang Tembilahan, Capem Sei Guntung dan Capem Kota Baru :	1.	Chairisman Rasahan
		- Tentang Kondisi NPL yang cukup tinggi.	2.	Fahmi Oemar
		- Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi tingginya NPL tersebut.	3.	Indarti
			4.	Pemimpin Cabang Tembilahan dan Staf
9	10-11-14	Membahas Hasil Kunjungan Pengawasan ke Cabang Siak Sri Indrapura & Capem Sungai Apit, NPL yang cukup tinggi.	1.	Chairisman Rasahan
			2.	Sarjono Amnan
			3.	Fahmi Oemar
			4.	Indarti

			5.	Pemimpin Cabang Siak Sri Indrapura
			6.	Pemimpin Capem Sungai Apit
10	12-11-14	Membahas tentang Hasil Kunjungan Kerja ke Cabang Bagan Siapi-api, Capem Bagan Batu dan Capem Ujung Tanjung :	1.	Chairisman Rasahan
		- Tentang Kondisi NPL yang cukup tinggi.	2.	Sarjono Amnan
		- Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi tingginya NPL tersebut.	3.	Fahmi Oemar
			4.	Indarti
			5.	Pemimpin Cabang Bagan Siapi-api dan Staf
			6.	Pemimpin Capem Bagan Batu dan Staf
			7.	Pemimpin Capem Ujung Tanjung dan Staf
11	16-12-14	Membahas hal-hal yang harus diperhatikan oleh KAP untuk diupdate dalam Audit Plan dan Audit Report Tahun Buku 2014.	1.	Chairisman Rasahan
			2.	Sarjono Amnan
			3.	Fahmi Oemar
			4.	Indarti
			5.	KAP

Keputusan rapat komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

Hasil keputusan rapat Komite dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi dalam rapat komite beserta alasan perbedaan pendapat tersebut. Hasil rapat komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.

Tingkat kehadiran masing-masing anggota dalam rapat Komite Audit baik secara internal maupun rapat koordinasi, adalah sebagai berikut :

Nama	Jumlah Kehadiran Pada :			(%) Kehadiran
	Rapat Internal Komite	Rapat Koordinasi	Total Jumlah Kehadiran	
Chairisman Rasahan	28	11	39	100 %
Sarjono Amnan	27	8	35	90 %
Kirmizi*	9	7	16	100 %
Fahmi Oemar	28	11	39	100 %
Indarti	28	11	39	100 %

* *Bapak Kirmizi tidak lagi diperpanjang masa kerjanya sebagai anggota Komite Audit per tanggal 25 Juni 2014*

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komposisi Komite Pemantau Risiko

Sesuai ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, Komite Pemantau Risiko dibentuk untuk memastikan bahwa kerangka kerja yang telah disusun pada unit kerja Manajemen Risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap eksposure risiko Bank, baik operasional maupun non operasional.

Komite Pemantau Risiko dibentuk bertujuan melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, serta memberikan rekomendasi dan saran atas berbagai kegiatan perusahaan sehingga perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan terhadap Direksi.

Pada tahun 2014, terdapat perubahan susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko, berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 54/KEPDIR/2014 tanggal 16 Juli 2014 tentang perubahan Keputusan Direksi Nomor 09/KEPDIR/2013 Tentang Susunan Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri. Perubahan terjadi pada komposisi/jumlah Komite Pemantau Risiko, karena salah seorang anggota komite yaitu Sdr. Kirmizi tidak diperpanjang masa kerjanya. Untuk perubahan Komposisi Komite Pemantau Risiko, terlihat dari tabel di bawah ini :

Komposisi Komite Pemantau Risiko berdasarkan SK Direksi No. 09/KEPDIR/2013 tanggal 31 Januari 2013.

Susunan Keanggotaan Komite Komite Pemantau Risiko		
Nama	**Jabatan**	**Keterangan**
Sarjono Amnan	Ketua (merangkap anggota)	Komisaris Independen
Chairisman Rasahan	Anggota	Komisaris Independen
Kirmizi	Anggota	Pihak Independen
Fahmi Oemar	Anggota	Pihak Independen
Indarti	Anggota	Pihak Independen

Komposisi Komite Pemantau Risiko berdasarkan SK Direksi No. 54/KEPDIR/2014 tanggal 16 Juli 2014.

Susunan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko		
Nama	**Jabatan**	**Keterangan**
Sarjono Amnan	Ketua (merangkap anggota)	Komisaris Independen
Chairisman Rasahan	Anggota	Komisaris Independen
Fahmi Oemar	Anggota	Pihak Independen
Indarti	Anggota	Pihak Independen

Keahlian dan Independensi Komite Pemantau Risiko

Anggota Komite Pemantau Risiko Bank terdiri dari Komisaris Independen dan pihak Independen. Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak Independen memiliki keahlian dibidang keuangan dan memiliki keahlian dibidang manajemen risiko Bank.

Seluruh keanggotaan Komite Pemantau Risiko telah memenuhi kriteria independensi, keahlian, integritas dan moral yang baik yang dipersyaratkan dalam PBI Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, Buku Pedoman Perusahaan Good Corporate Governance Bank Riau Kepri dan peraturan/ketentuan terkait lainnya.

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara independen.

Tugas dan Tanggung jawab Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko bertugas membantu pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan oleh Dewan Komisaris terhadap Direksi beserta jajarannya dalam area penerapan manajemen risiko agar dapat terlaksana secara efektif, baik mengenai isu–isu manajemen risiko dan sistem pengawasan

internal serta langkah–langkah antisipasi yang diambil Direksi dalam pengelolaan risiko dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam mengkaji sistem manajemen risiko dan perbaikan kebijakan manajemen risiko.

Diantara tugas dan tanggungjawab Komite Pemantau Risiko Bank Riau Kepri adalah :

1. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
3. Melakukan evaluasi atas kebijakan dan strategi manajemen risiko yang di susun Manajemen secara tahunan.
4. Melakukan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan Kepatuhan.
5. Mengevaluasi langkah-langkah yang diambil oleh Direksi dalam rangka memenuhi Peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian, khususnya yang berkaitan dengan manajemen risiko dan kepatuhan.
6. Mengevaluasi hasil pemantauan Direksi terhadap kegiatan usaha Perseroan, agar tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
7. Mengevaluasi hasil pemantauan atas kepatuhan Perseroan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Direksi kepada Bank Indonesia.
8. Melakukan evaluasi terhadap permohonan atas usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi untuk dapat digunakan oleh Komisaris sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.
9. Mengevaluasi kepatuhan terhadap ketentuan internal perseroan tidak terbatas pada laporan pemeriksaan SKAI dan Direktur Kepatuhan.

Rencana dan Realisasi Program Kerja Komite Pemantau Risiko

1. Rencana Kegiatan Komite Pemantau Risiko
   Untuk tahun 2014 Komite Pemantau Risiko telah menyusun program kerja sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya, antara lain sebagai berikut :
   a. Menyelenggarakan rapat Komite Pemantau Risiko untuk membahas mengenai informasi-informasi yang terkait dengan profil risiko diluar dari laporan regular dari Divisi Manajemen Risiko.
   b. Menyelenggarakan rapat Komite Pemantau Risiko dengan Divisi Manajemen Risiko untuk membahas laporan profil risiko Bank dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan profil risiko memiliki angka yang tinggi.
   c. Melaksanakan rapat lainnya yang dipandang perlu dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris.

2. Realisasi Kegiatan Komite Pemantau Risiko
   Sepanjang tahun 2014 kegiatan yang telah direalisasikan oleh Komite Pemantau Risiko, adalah sebagai berikut :
   a. Melaksanakan rapat rutin Komite Pemantau Risiko.
   b. Melaksanakan rapat koordinasi dengan Divisi Manajemen Risiko terkait Tingkat Kesehatan Bank.
   c. Melakukan kunjungan kerja ke beberapa Kantor Bank.

Aktivitas Rapat Komite Pemantau Risiko

Rapat Komite Pemantau Risiko selama ini dilaksanakan sesuai kebutuhan Bank dan hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen.

Berdasarkan tugas dan fokus kegiatan tersebut di atas, sepanjang tahun 2014 Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan rapat internal sebanyak 16 (enam belas) kali rapat/pertemuan, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

AKTIVITAS RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO				
No	**Tanggal**	**Materi Rapat**	**Peserta**	
1	30-01-14	Menelaah Laporan Hasil Audit Umum Cabang Tanjung Balai Karimun Periode Audit 01 Januari 2007 s/d 31 Oktober 2013	1.	Sarjono Amnan
			2.	Chairisman Rasahan
			3.	Kirmizi
			4.	Fahmi Oemar
			5.	Indarti
2	03-02-14	Menelaah Hasil Audit Umum Cabang Tanjung Balai Karimun Periode Audit 01 Januari 2007 s/d 31 Oktober 2013	1.	Sarjono Amnan
			2.	Chairisman Rasahan
			3.	Kirmizi
			4.	Fahmi Oemar
			5.	Indarti
3	11-03-14	Membahas Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Desember 2013	1.	Sarjono Amnan
			2.	Chairisman Rasahan
			3.	Kirmizi
			4.	Fahmi Oemar
			5.	Indarti
4	01-04-14	- Menelaah Laporan Tahunan Evaluasi Kinerja SKAI Bank Riau Kepri Tahun 2013	1.	Sarjono Amnan
-		- Rencana Kerja SKAI Tahun 2014	2.	Chairisman Rasahan
			3.	Kirmizi
			4.	Fahmi Oemar
			5.	Indarti
5	21-05-14	Menelaah Laporan Kinerja Bank Riau Kepri Bulan April 2014	1.	Sarjono Amnan
			2.	Chairisman Rasahan
			3.	Kirmizi
			4.	Fahmi Oemar
			5.	Indarti
6	02-06-14	Menelaah Laporan Rencana Realisasi Bank Triwulan I – 2014	1.	Sarjono Amnan
			2.	Chairisman Rasahan
			3.	Kirmizi
			4.	Fahmi Oemar
			5.	Indarti
7	14-07-14	Menelaah Laporan Hasil AUDIT Umum Cabang Siak Sri Indrapura Periode Audit 01 Agustus 2013 s.d 30 April 2014	1.	Sarjono Amnan
			2.	Chairisman Rasahan
			3.	Fahmi Oemar
			4.	Indarti
8	18-07-14	Menelaah Laporan Hasil Audit Umum Cabang Bangkinang Periode Audit 01 Mei 2010-30 April 2014	1.	Sarjono Amnan
			2.	Chairisman Rasahan
			3.	Fahmi Oemar

			4.	Indarti
9	24-07-14	Menelaah Laporan Kinerja Bank Riau Kepri Bulan Juni 2014	1.	Sarjono Amnan
			2.	Chairisman Rasahan
			3.	Fahmi Oemar
			4.	Indarti
10	14-08-14	Menelaah Laporan Hasil Audit Umum Cabang Ranai Periode Audit 01 Agustus 2009-31 Mei 2014	1.	Sarjono Amnan
			2.	Chairisman Rasahan
			3.	Fahmi Oemar
			4.	Indarti
11	12-09-14	Menelaah Laporan Kinerja Bank Riau Kepri Bulan Juli 2014	1.	Sarjono Amnan
			2.	Chairisman Rasahan
			3.	Fahmi Oemar
			4.	Indarti
12	30-09-14	Menelaah Laporan Hasil Audit Umum Cabang Syariah Tanjung Pinang Periode Audit 01 Januari 2009 s/d 30 Juli 2014	1.	Sarjono Amnan
			2.	Chairisman Rasahan
			3.	Fahmi Oemar
			4.	Indarti
13	22-10-14	Menelaah Laporan Hasil Audit Umum Cabang Utama Pekanbaru Periode Audit 01 Desember 2008 s/d 31 Juli 2014	1.	Sarjono Amnan
			2.	Chairisman Rasahan
			3.	Fahmi Oemar
			4.	Indarti
14	31-10-14	Menelaah Laporan Hasil Audit Umum Divisi Teknologi Sistem Informasi PT. Bank Riau Kepri, Periode Audit 01 Agustus 2011 s/d 31 Agustus 2014	1.	Sarjono Amnan
			2.	Chairisman Rasahan
			3.	Fahmi Oemar
			4.	Indarti
15	19-11-14	Membahas Laporan Divisi SKAI tertanggal 11 November 2014 tentang Laporan Tindak Lanjut Audit Umum Perkreditan, Operasional, dan IT Periode Oktober 2014	1.	Sarjono Amnan
			2.	Chairisman Rasahan
			3.	Fahmi Oemar
			4.	Indarti
16	30-12-14	Menelaah Laporan Kinerja Bank Riau Kepri sampai dengan Bulan November 2014	1.	Sarjono Amnan
			2.	Chairisman Rasahan
			3.	Fahmi Oemar
			4.	Indarti

Untuk rapat koordinasi Komite Pemantau Risiko dengan unit kerja Bank lainnya telah dilakukan sebanyak 5 (lima) kali rapat/ pembahasan, sebagai berikut :

AKTIVITAS RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO				
No	**Tanggal**	**Materi Rapat**	**Peserta**	
1	05-02-14	Membahas tentang NPF yang cukup tinggi pada Cabang Syariah Pekanbaru	1.	Sarjono Amnan
			2.	Chairisman Rasahan
			3.	Kirmizi
			4.	Fahmi Oemar
			5.	Indarti
			6.	Pemimpin Cabang Syariah Pekan-baru dan Staf
2	03-04-14	Membahas tentang NPL yang cukup tinggi pada Capem Lubuk Baja	1.	Sarjono Amnan
			2.	Chairisman Rasahan
			3.	Kirmizi
			4.	Fahmi Oemar
			5.	Indarti
			6.	Pemimpin Capem Lubuk Baja dan Staf
3	19-08-14	Membahas terkait :	1.	Sarjono Amnan
-		- Laporan Divisi Manajemen Risiko mengenai Tingkat Kesehatan Bank (TKB) per 30 Juni 2014	2.	Chairisman Rasahan
-		- Meminta kepada Divisi Manajemen Risiko untuk menjelaskan lebih lanjut dan secara detail mengenai poin-poin yang disampai-kan pada analisis laporan hasil PenilaianTingkat Kesehatan Bank Riau Kepri	3.	Fahmi Oemar
-		- Penjelasan lebih lanjut mengenai apakah akar permasalahan nya sehingga Div Manajemen Risiko memberikan komposit TKB secara Umum 2	4.	Indarti
			5.	Pemimpin Divisi Manajemen Risiko
4	10-11-14	Membahas Kondisi Laporan Keuangan dan Posisi NPL yang cukup tinggi di Cab Siak dan Capem Sei Apit	1.	Sarjono Amnan
			2.	Chairisman Rasahan
			3.	Fahmi Oemar
			4.	Indarti
			5.	Pemimpin Cabang Siak Sri In-drapura dan Staf
			6.	Pemimpin Capem Sei Apit dan Staf
5	12-11-14	Membahas Kondisi Laporan Keuangan dan Posisi NPL yang cukup tinggi di Cabang Bagan Siapi-api, Capem Bagan Batu dan Capem Ujung Tanjung	1.	Sarjono Amnan
			2.	Chairisman Rasahan
			3.	Fahmi Oemar
			4.	Indarti
			5.	Pemimpin Cabang Bagan Siapi-api dan Staf

			6.	Pemimpin Capem Bagan Batu dan Staf
			7.	Pemimpin Capem Ujung Tanjung dan Staf

Keputusan rapat komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

Hasil keputusan rapat komite dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota komite yang hadir dan di dokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi dalam rapat komite beserta alasan perbedaan pendapat tersebut. Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.

Tingkat kehadiran masing-masing anggota dalam rapat Komite Pemantau Risiko baik secara internal maupun rapat koordinasi, adalah sebagai berikut :

Nama	**Jumlah Kehadiran Pada :**			**%**
	Kehadiran			
	Rapat Internal Komite	Rapat Koordinasi	Total Jumlah Kehadiran	
Sarjono Amnan	16	5	21	100 %
Chairisman Rasahan	16	5	21	100 %
Kirmizi*	6	2	8	100 %
Fahmi Oemar	16	5	21	100 %
Indarti	16	5	21	100 %

* *Bapak Kirmizi tidak lagi diperpanjang masa kerjanya sebagai anggota Komite Pemantau Risiko per tanggal 25 Juni 2014*

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Komposisi Komite Remunerasi dan Nominasi.

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank terdiri dari Komisaris independen dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan sumber daya manusia (Pemimpin Divisi Human Capital). Untuk anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang berasal dari Pejabat Eksekutif yang membawahkan sumber daya manusia (Divisi HC) memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi dan/atau nominasi serta succession plan Bank, dari Pihak Independen memiliki keahlian di bidang keuangan dan memiliki keahlian di bidang manajemen risiko Bank.

Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi dilakukan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum dan mengembangkan kualitas manajemen puncak melalui kebijakan remunerasi dan nominasi.

Pada tahun 2014, terdapat perubahan susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi, berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 25/KEPDIR/2014 tanggal 21 April 2014 tentang perubahan Keputusan Direksi Nomor 09/KEPDIR/2013 Tentang Susunan Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri. Perubahan terjadi karena adanya penggantian pejabat Pemimpin Divisi Human Capital. Untuk perubahan sebagaimana dimaksud di atas, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Komposisi Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan SK Direksi No. 09/KEPDIR/2013 tanggal 31 Januari 2013.

Susunan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi		
Nama	Jabatan	Keterangan
A. Rivaie Rachman	Ketua (merangkap anggota)	Komisaris Independen
Chairisman Rasahan	Anggota	Komisaris Independen
Hendra Buana	Anggota	Pjs. Pemimpin Divisi Human Capital

Sedangkan untuk komposisi Komite Pemantau Risiko berdasarkan SK Direksi No. 25/KEPDIR/2014 tanggal 21 April 2014, adalah sebagai berikut :

Susunan Keanggotaan Komite Audit		
Nama	Jabatan	Keterangan
A. Rivaie Rachman	Ketua (merangkap anggota)	Komisaris Independen
Chairisman Rasahan	Anggota	Komisaris Independen
Denny M Akbar	Anggota	Pihak Independen

Keahlian dan Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Seluruh keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi telah memenuhi kriteria independensi, keahlian, integritas dan moral yang baik yang dipersyaratkan di dalam Buku Pedoman Perusahaan Good Corporate Governance Bank Riau Kepri dan peraturan/ketentuan terkait lainnya.

Seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Tugas dan Tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi.

1. Terkait dengan bidang remunerasi :
   a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi
   b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
      - Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk di sampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham
      - Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi
   c. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai dengan :
      - Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
      - Prestasi kerja individual
      - Kewajaran dengan peer group
      - Perimbangan dan strategi jangka panjang Bank
2. Terkait dengan bidang nominasi :
   a. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham
   b. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham
   c. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris

Rencana dan Realisasi Kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi

1. Rencana Kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi
   Untuk tahun 2014 Komite Remunerasi dan Nominasi telah menyusun rencana kegiatan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya, yaitu sebagai berikut :
   a. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan/penggantian dan calon, Direksi atau Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS
   b. Memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang kebijakan remunerasi Dewan Komisaris/Direksi untuk disampaikan kepada RUPS
   c. Memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang kebijakan remunerasi bagi pejabat Eksekutif
   d. Merekomendasikan pihak independen yang akan menjadi anggota komite
   e. Mengadakan rapat tentang perpanjangan anggota komite
   f. Merekomendasikan calon Direksi dan Dewan Komisaris

kepada OJK

g. Mengadakan rapat dengan Dewan Komisaris
h. Mengadakan rapat dengan Direksi dan satuan Kerja (Divisi Human Capital)
i. Membalas surat masuk dan surat keluar
j. Melaksanakan tugas lain dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris

2. Realisasi Kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi

Sepanjang tahun 2014 program kerja yang telah dilaksanakan/direalisasikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi, antara lain sebagai berikut :

a. Menyampaikan informasi kepada Dewan Komisaris Bank mengenai calon pengurus Bank khususnya terkait dengan track record dari para calon pengurus intern Bank
b. Memberikan rekomedasi kepada Dewan Komisaris terkait dengan calon Direktur Utama dan Komisaris Utama Bank dan calon Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko
c. Menetapkan honorarium Dewan Pengawas Syariah, dan meninjau kembali besaran hak dan fasilitas Dewan Komisaris dengan memperhatikan antara lain tanggungjawab yang diemban dan kemampuan Bank
d. Usulan penambahan fasilitas kesehatan bagi Dewan Komisaris Bank dan usulan kenaikan gaji Direktur Utama
e. Menyetujui perpanjangan masa kerja anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko Bank dan menyetujui besaran honorarium bagi masing-masing anggota komite
f. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait permohonan pengunduran diri Pemiminpin SKAI
g. Melaksanakan rapat untuk membahas calon pengurus Bank dan jadwal RUPS Bank

Aktivitas Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi selama ini dilaksanakan sesuai kebutuhan Bank dan hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif.

Sesuai ketentuan bahwa rapat Komite Remunerasi dan Nominasi wajib dilaksanakan sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Sepanjang tahun 2014 Komite Remunerasi dan Nominasi Bank telah melakukan pembahasan dalam bentuk pertemuan/rapat sebanyak 10 (sepuluh) kali rapat/pertemuan, dengan rincian sebagai berikut :

AKTIVITAS RAPAT KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI				
No	**Tanggal**	**Materi Rapat**	**Peserta**	
1	06-01-14	Membahas masa kerja anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko yaitu Sdr. Fahmi Oemar dan Sdr. Indarti yang berakhir pada tanggal 01 Februari 2014	1.	A. Rivaie Rachman
			2.	Chairisman Rasahan
			3.	Hendra Buana
			4.	Sekretaris Dekom
2	12-03-14	Persetujuan atas penunjukan Sdr. Khairul Anwar sebagai Pemimpin SKAI	1.	A. Rivaie Rachman
			2.	Chairisman Rasahan
			3.	Dewan Komisaris
			4.	Hendra Buana
			5.	Sekretaris Dekom
3	13-03-14	Usulan Calon Pemimpin SKAI Bank Riau Kepri	1.	A. Rivaie Rachman
			2.	Chairisman Rasahan
			3.	Dewan Komisaris
			4.	Hendra Buana
			5.	Sekretaris Dekom
4	15-04-14	Membahas Penggantian Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Riau Kepri	1.	A. Rivaie Rachman

			2.	Chairisman Rasahan
			3.	Hendra Buana
			4.	Denny M. Akbar
			5.	Sekretaris Dekom
5	20-05-14	Usulan Remunerasi Pengurus Bank Riau Kepri	1.	A. Rivaie Rachman
			2.	Chairisman Rasahan
			3.	Denny M. Akbar
			4.	Sekretaris Dekom
6	30-05-14	Membahas Calon Pengurus Bank Riau Kepri	1.	A. Rivaie Rachman
			2.	Chairisman Rasahan
			3.	Denny M. Akbar
			4.	Sekretaris Dekom
7	11-11-14	Membahas masa kerja anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko yaitu Sdr. Kirmizi yang berakhir pada tanggal 25 Juni 2014	1.	A. Rivaie Rachman
			2.	Chairisman Rasahan
			3.	Denny M. Akbar
			4.	Sekretaris Dekom
8	16-10-14	Membahas Calon Pengurus Bank Riau Kepri	1.	A. Rivaie Rachman
			2.	Chairisman Rasahan
			3.	Denny M. Akbar
9	16-10-14	Membahas Calon Pengurus Bank Riau Kepri	1.	Chairisman Rasahan
			2.	Denny M. Akbar
10	16-10-14	Membahas Calon Pengurus Bank Riau Kepri	1.	A. Rivaie Rachman
			2.	Chairisman Rasahan

Keputusan rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, apabila tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak, dan segala keputusan rapat komite bersifat mengikat bagi seluruh anggota komite.

Hasil keputusan rapat komite dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota komite yang hadir dan di dokumentasikan.

Tingkat kehadiran masing-masing anggota dalam rapat Komite Remunerasi dan Nominasi baik secara internal maupun rapat koordinasi, adalah sebagai berikut :

Nama	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
A. Rivaie Rachman	9	90 %
Chairisman Rasahan	10	100 %
Hendra Buana*	4	100 %
Denny M. Akbar**	6	100 %

* *Merupakan kegiatan rapat yang diikuti oleh Sdr. Hendra Buana sampai dengan bulan April 2014.*

* *Merupakan kegiatan rapat yang diikuti oleh Sdr. Denny M. Akbar sejak pengangkatan yang bersangkutan menjadi Pemimpin Divisi HC sampai dengan Desember 2014*

KOMITE-KOMITE EKSEKUTIF YANG DIMILIKI OLEH BANK

Untuk dapat melaksanakan tugasnya secara efektif, Direksi telah membentuk komite eksekutif yang berfungsi membantu Direksi dalam melaksanakan tugasnya, yang terdiri dari : Komite Teknologi Informasi, Komite Manajemen Risiko, Komite Pembiayan, Komite ALCO, Komite Kredit, Komite Anti Fraud dan Komite Sumber Daya Manusia.

1. Komite Teknologi Informasi

   Komite Teknologi Informasi dibentuk berdasarkan Keputusan Direksi No. 06/KEPDIR/2013 tanggal 09 Januari 2013 tentang Komite Pengarah Teknologi dan Sistem Informasi PT. Bank Riau Kepri. Keputusan Direksi tersebut diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Direksi No. 117/KEPDIR/2014 tanggal 05 Desember 2004 tentang Komite Teknologi Sistem Informasi PT. Bank Riau Kepri.

Susunan Keanggotaan

Susunan Keanggotaan Komite Teknologi Informasi	
Direktur Utama	Ketua
Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko	Anggota
Direktur Operasional	Anggota
Direktur Kredit & Syariah	Anggota
Direktur Dana & Jasa	Anggota
Pemimpin Divisi Teknologi dan Sistem Informasi	Anggota
Pemimpin Divisi Manajemen Risiko	Anggota
Pemimpin Divisi Operasional dan Keuangan	Anggota
Pemimpin Divisi Produk, Dana dan Jasa	Anggota
Pemimpin Divisi Umum	Anggota
Pemimpin Divisi Human Capital	Anggota

Tugas dan Tanggung Jawab

Memberikan rekomendasi kepada Direksi, antara lain mencakup :

a. Rencana Strategis Teknologi Informasi yang sesuai dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank.
b. Perumusana kebijakan dan prosedur Teknologi Informasi yang utama seperti kebijakan pengamanan Teknologi Informasi dan manajemen risiko terkait penggunaan Teknologi Informasi.
c. Kesesuaian proyek-proyek Teknologi Informasi yang disetujui dengan rencana strategis Teknologi Informasi.
d. Menetapkan status prioritas Teknologi Informasi yang bersifat kritikal (berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional Bank).
e. Kesesuaian pelaksanaan proyek-proyek Teknologi Informasi dengan rencana proyek yang disepakati di dalam Service Level Agreement, melengkapi rekomendasi dengan hasil analisis dari proyek-proyek Teknologi Informasi yang utama sehingga memungkinkan Direksi mengambil keputusan secara efesien.
f. Kesesuaian Teknologi Informasi dengan kebutuhan sistem informasi manajemen yang mendukung pengelolaan kegiatan usaha Bank.
g. Efektifitas langkah-langkah minimalisasi risiko atas investasi Bank pada sector Teknologi Informasi dan investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Bank.
h. Pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi dan uapaya peningkatannya.
i. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan satuan kerja penyelenggara.

Rapat Komite Teknologi Informasi

Sepanjang tahun 2014 Komite Teknologi Informasi, telah menyelenggarakan rapat dengan pembahasan, sebagaimana termuat di dalam tabel di bawah ini :

AGENDA RAPAT KOMITE TEKNOLOGI INFORMASI TAHUN 2014	
Tanggal	Agenda
Rabu, 17 Maret 2014	Pembahasan :
	• Pengadaan lisensi Microsoft windows
	• Pengadaan Treasury System
	• Pengalihan Operasional Bank Vision dari Production ke DRC
	• Implementasi Infrastruktur ATM CHIP NSICCS
	• Pengembangan HRIS
	• Implementasi e-los Konsumer + Mikro
	• Aplikasi Monitoring ATM
	• Contact Center / Call Center + Aplikasi Pelayanan Pengaduan Pelanggan.
	• Relokasi koordinator SKN-BI, BI RTGS, DHN dari Cabang Utama ke Divisi Operasional
	• Upgrade system mesin ATM Diebold
	• Upgrade M-Banking (Non Blackberry)
	• Implementasi CMS
	• Implementasi Virtual Account
	• Swift MT 700 Trade Finance
	• Implementasi Otomasi Distribusi bagi hasil antar kantor BRK Syariah
	• Warnasari

2. Komite Manajemen Risiko

   Komite Manajemen Risiko (RMCO) dibentuk bertujuan untuk melakukan fungsi evaluasi pengelolaan risiko secara independen. Pembentukan Komite Manajemen Risiko ditetapkan di dalam Keputusan Direksi Nomor 17/ KEPDIR/2011 tanggal 15 Maret 2011 tentang Komite Manajemen Risiko. Keputusan Direksi di atas selanjutnya diubah dengan Keputusan Direksi Nomor 093A/ KEPDIR/2014 tanggal 17 Desember 2014 tentang Komite Manajemen Risiko.

Susunan Keanggotaan

Sampai dengan 31 Desember 2014, susunan keanggotaan Komite Manajemen Risiko di Bank Riau Kepri, adalah sebagai berikut :

SUSUNAN KEANGGOTAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO	
Ketua I	Direktur Utama
Ketua II	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko
Sekretaris	Pemimpin Divisi Manajemen Risiko
Anggota	Direktur Operasional
	Direktur Dana dan Jasa
	Direktur Kredit dan Syariah
	Pemimpin Divisi Komersial
	Pemimpin Divisi Konsumer Mikro
	Pemimpin Divisi Treasury & Internasional
	Pemimpin Divisi Produk & Jasa
	Pemimpin Divisi Syariah
	Pemimpin Divisi Kepatuhan
	Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Manajemen Risiko memiliki Misi, Tugas dan Tanggung jawab sebagai berikut :

a. Misi

Mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya aktivitas/kegiatan usaha Bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan. Sehingga Komite Manajemen Risiko berfungsi sebagai filter atau pemberi peringatan dini (early warning system) terhadap kegiatan usaha Bank yang senantiasa tidak lepas dari risiko.

b. Tugas dan Tanggungjawab

- Bertanggungjawab atas penerapan manajemen risiko yang efektif di Bank Riau Kepri.
- Menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko.
- Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposure risiko.
- Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penerapan manajemen risiko.
- Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku mengenai penerapan manajemen risiko.
- Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia yang menyangkut penerapan manajemen risiko.
- Mengembangkan budaya risiko pada seluruh jenjang organisasi.
- Menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal.
- Berwenang dan bertanggungjawab terhadap perbaikan atau penyempurnaan penerapan manajemen risiko yang dilakukan secara berkala, sebagaimana diatur/ dipersyaratkan di dalam Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
- Menjalankan dan memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank dalam setiap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

Rapat Komite Manajemen Risiko

Sepanjang tahun 2014 Komite Manajemen Risiko, telah menyelenggarakan rapat dengan pembahasan, sebagaimana termuat di dalam tabel di bawah ini :

AGENDA RAPAT KOMITE MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2014	
Tanggal	**Agenda**
Senin, 08 Desember 2014	Pembahasan :
	• Risk Appetite Statement
	• Review Keanggotaan dan Mekanisme Rapat RMCO

3. Komite Pembiayaan

Bank telah membentuk Komite Pembiayaan yang bertujuan memberikan masukan dan rekomendasi berupa persetujuan atau penolakan pembiayaan sebagai bahan pertimbangan Direktur Utama dalam mengambil keputusan.

Pembentukan Komite Pembiayaan ditetapkan di dalam Keputusan Direksi Nomor 03/KEPDIR/2011 tanggal 17 Januari 2011 tentang Susunan dan Tata tertib Komite Kredit/ Pembiayaan PT. Bank Riau Kepri. Keputusan Direksi di atas selanjutnya diubah dengan Keputusan Direksi Nomor 90/ KEPDIR/2013 tanggal 30 September 2013 tentang Susunan dan Tata tertib Komite Pembiayaan PT. Bank Riau Kepri.

Susunan Keanggotaan

Sampai dengan 31 Desember 2014, susunan keanggotaan Komite Pembiayaan di Bank Riau Kepri, adalah sebagai berikut :

SUSUNAN KEANGGOTAN KOMITE PEMBIAYAAN	
Ketua (merangkap anggota)	**Direktur Kredit dan Syariah**
Sekretaris (merangkap anggota)	Pemimpin Divisi Syariah
Anggota	Direktur Dana dan Jasa
	Pemimpin Divisi Komersial
	Pinbag. Pemasaran dan Pengembangan Bisnis – Divisi Syariah

Tugas dan Tanggung Jawab

Untuk tugas dan tanggung jawab Komite Pembiayaan, antara lain sebagai berikut :

a. Membahas permohonan pembiayaan nasabah di atas plafon tertentu yang diusulkan oleh kantor Cabang dan permohonan pembiayaan sindikasi, dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian.
b. Memberikan rekomendasi persetujuan atau rekomendasi penolakan pembiayaan sebagai bahan pertimbangan Keputusan Direktur Utama.
c. Rekomendasi persetujuan atau rekomendasi penolakan pembiayaan dilaksanakan secara profesional berdasarkan kompetensi yang dimiliki, obyektif dan megedepankan integritas.
d. Jika diperlukan komite pembiayaan dapat melakukan koordinasi dengan ALCO dalam aspek pendanaan pembiayaan.

4. Komite ALCO

Pengelolaan seluruh risiko bisnis Bank harus dilakukan secara sistematis, terintegrasi dan berkesinambungan. Untuk itu, dalam proses pelaksanaan asset dan liability, Bank Riau Kepri telah memiliki Komite ALCO yang tertuang di dalam Keputusan Direksi tentang Asset Liability Management PT. Bank Riau Kepri.

Saat ini ketentuan mengenai Komite ALCO diatur di dalam Keputusan Direksi No. 64/KEPDIR/2014 tanggal 19 September 2014 tentang Asset Liability Management. Keputusan Direksi tersebut merupakan perubahan atas keputusan-keputusan Direksi sebelumnya yang mengatur tentang Asset Liability Management PT. Bank Riau Kepri.

Susunan Keanggotaan

Komposisi keanggotaan Komite ALCO sampai dengan 31 Desember 2014, adalah sebagai berikut :

SUSUNAN KEANGGOTAN KOMITE ALCO	
Ketua	**Direktur Utama**
Wakil Ketua merangkap Ketua Pengganti	Direktur Dana dan Jasa
Wakil Ketua	Direktur Kredit dan Syariah
	Direktur Operasional
Sekretaris	Pemimpin Divisi Treasury & Internasional
Anggota	Pemimpin Divisi Komersial
	Pemimpin Divisi Konsumer & Mikro
	Pemimpin Divisi Produk & Jasa
	Pemimpin Divisi Syariah
	Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis
	Pemimpin Divisi Operasional
	Pemimpin Divisi Kepatuhan
	Pemimpin Divisi Manajemen Risiko

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Komite ALCO adalah melakukan pengelolaan Asset dan Liabilities Management (ALMA) yang dapat meliputi liquidity management, gap management, forex management, earning and investment management, dengan mengevaluasi perkembangan dan prospek indikator-indikator ekonomi serta dampaknya kepada posisi Bank Riau Kepri dengan menghitung cost of funds, menetapkan base lending rate/prime landing rate dan menetapkan internal fund transfer price.

Rapat Komite ALCO

Sepanjang tahun 2014, Komite ALCO telah menyelenggarakan 8 kali rapat/pembahasan, dengan rincian sebagai berikut :

AGENDA RAPAT KOMITE ALCO TAHUN 2014		
Tanggal		**Agenda**
15 Januari 2014	1.	Menetapkan Base Lending Rate (BLR) Januari 2014
	2.	Menetapkan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) Januari 2014
	3.	Evaluasi suku bunga simpanan dan suku bunga kredit
	4.	Perkembangan likuiditas
	5.	Hal lainnya yang disuslkan oleh anggota ALCO
27 Februari 2014	1.	Menetapkan Base Lending Rate (BLR) Februari 2014
	2.	Menetapkan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) Februari 2014
	3.	Evaluasi suku bunga DOC dan bunga antar kantor
	4.	Hal lainnya yang diusulkan oleh anggota ALCO
27 Maret 2014	1.	Menetapkan Base Lending Rate (BLR) Maret 2014
	2.	Menetapkan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) Maret 2014
	3.	Hal lainnya yang diusulkan oleh anggota ALCO
28 Maret 2014	1.	Menetapkan Base Lending Rate (BLR) Maret 2014
	2.	Menetapkan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) Maret 2014
	3.	Hal lainnya yang diusulkan oleh anggota ALCO
07 April 2014	1.	Menetapkan Base Lending Rate (BLR) April 2014
	2.	Menetapkan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) April 2014
	3.	Hal lainnya yang diusulkan oleh anggota ALCO
19 Mei 2014	1.	Menetapkan Base Lending Rate (BLR) Mei 2014
	2.	Menetapkan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) Mei 2014
	3.	Mengusulkan perubahan suku bunga DOC
	4.	Membahas rasio LDR yang berada di atas 100%
	5.	Hal lainnya yang diusulkan oleh anggota ALCO
24 Juli 2014	1.	Menetapkan Base Lending Rate (BLR) Juli 2014
	2.	Menetapkan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) Juli 2014
	3.	Hal lainnya yang diusulkan oleh anggota ALCO
16 Desember 2014	1.	Menetapkan Base Lending Rate (BLR) Desember 2014. Menetapkan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) Desember 2014
	2.	Menetapkan metode perhitungan SBDK yang terbaru
	3.	Penempatan Reksadana Terproteksi sebagai mitigasi risiko dalam menghadapai fluktuasi harga obligasi surat berharga pemerintah (SUN)
	4.	Hal lainnya yang diusulkan oleh anggota ALCO

5. Komite Kebijakan Perkreditan

   Komite Kebijakan Perkreditan merupakan sektor yang sangat strategis di setiap usaha keuangan dan perBankan. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan yang menyangkut sektor tersebut membutuhkan perencanaan, riset dan evaluasi mendalam. Setelah itu, harus diimplementasikan secara tepat dan dalam pengawasan yang cukup ketat.

   Komite Kebijakan Perkreditan Bank Riau Kepri dibentuk berdasarkan Keputusan Direksi No. 82/KEPDIR/2011 tanggal 27 September 2011 tentang Komite Kebijakan Perkreditan PT. Bank Riau Kepri.

Susunan Keanggotaan

Komposisi keanggotaan Komite Kebijakan Perkreditan sampai dengan 31 Desember 2014, adalah sebagai berikut :

SUSUNAN KEANGGOTAN KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN	
Ketua I	Direktur Utama
Ketua II	Direktur Kredit dan Syariah
Ketua III	Direktur Dana dan Jasa
Sekretaris I	Pemimpin Divisi Komersial
Sekretaris II	Pemimpin Divisi Konsumer & Mikro
Sekretaris III	Pemimpin Divisi Syariah
Anggota	Pemimpin Divisi Treasury & Internasional
	Pemimpin Divisi Penanganan Kredit Bermasalah
	Pemimpin Satuan Kerja Audit Intern
	Pemimpin Divisi Manajemen Risiko

Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab

Fungsi Komite Kebijakan Perkreditan, meliputi sebagai berikut :

a. Merumuskan Kebijaksanaan Perkreditan Bank (KPB).
b. Mengawasi pelaksanaan kebijakasanaan perkreditan .
c. Memantau perkembangan kondisi portfolio perkreditan.
d. Memberikan saran-saran langkah perbaikan dibidang perkreditan.
e. Menetapkan dan/atau merubah tingkat suku bunga dan/atau jasa untuk tiap-tiap produk kredit.
f. Melakukan kajian berkala terhadap KPB.

Tugas dan tanggung jawab Komite Kebijakan Perkreditan, adalah sebagai berikut :

a. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai hasil pengawasan atau penerapan dan pelaksanaan KPB.
b. Memberikan saran langkah-langkah perbaikan kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai hasil pengawasan dan evaluasi penerapan KPB.

6. Komite Kredit

Bank memiliki Komite Kredit yang bertugas memberikan rekomendasi persetujuan atau penolakan terhadap pengajuan kredit sebagai bahan pertimbangan bagi Direktur Utama dalam mengambil keputusan.

Komite Kredit Bank Riau Kepri dibentuk berdasarkan Keputusan Direksi No. 40/KEPDIR/2013 tanggal 20 Mei 2013 tentang Susunan dan Tata Tertib Komite Kredit PT. Bank Riau Kepri. Keputusan Direksi ini merupakan perubahan terhadap keputusan Direksi sebelumnya yang mengatur tentang hal tersebut di atas.

Susunan Keanggotaan

Komposisi keanggotaan Komite Kredit sampai dengan 31 Desember 2014, adalah sebagai berikut :

SUSUNAN KEANGGOTAN KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN	
Ketua merangkap Anggota	Direktur Kredit dan Syariah
Anggota merangkap Sekretaris	Pemimpin Divisi Komersial
Anggota	Direktur Dana & Jasa
	Pemimpin Divisi Konsumer & Mikro
	Pemimpin Bagian Komersial
Supporting	Staf Divisi Komersial

Tugas Komite Kredit

Secara umum Komite Kredit bertugas :

a. Membahas permohonan kredit nasabah di atas plafond tertentu yang diusulkan kantor Cabang dan permohonan kredit sindikasi, dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian.
b. Memberikan rekomendasi persetujuan atau rekomendasi penolakan kredit sebagai bahan pertimbangan keputusan Direktur Utama.
c. Rekomendasi persetujuan ata rekomendasi penolakan kredit dilaksanakan secara profesional berdasarkan kompetensi yang dimiliki, obyektif dan mengedepankan integritas.
d. Jika diperlukan Komite Kredit dapat melakukan koordinasi dengan ALCO dalam aspek pendanaan perkreditan.
e. Untuk supporting, secara umum bertugas :
   - Membuat undangan dan mendistribusikannya kepada masing-masing anggota Komite Kredit.
   - Mendistribusikan copy analisis kredit yang telah di disposisi pejabat yang berwenang.
   - Menyiapkan notulen rapat dan berita acara rapat komite kredit serta meminta kepada seluruh peserta rapat yang hadir untuk menandatangani hasil rapat tersebut dan selanjutnya meneruskan berita acara rapat kepada Direktur Utama untuk diputuskan.

Rapat Komite Kredit

Sepanjang tahun 2014, Komite Kredit telah menyelenggarakan 4 kali rapat/pembahasan, dengan rincian sebagai berikut :

AGENDA RAPAT KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN TAHUN 2014	
Tanggal	Agenda
16 April 2014	Rapat Pembahasan Permohonan Kredit Karya Prima Standby Plafond an. PT. Nata Indonesia.
02 September 2014	Rapat Pembahasan Kredit Sindikasi an. PT. PLN.
17 September 2014	Rapat Pembahasan Bank Garansi an. PT. Nata Indonesia.
22 Desember 2014	Rapat Pembahasan Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Niaga Prima Revolving PT. Subur Baru Madani.

7. Komite Anti Fraud

Susunan Keanggotaan

Komite Anti Fraud dibentuk berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 85/KEPDIR/2014 tanggal 02 Desember 2014, dengan komposisi keanggotaannya, adalah sebagai berikut :

SUSUNAN KEANGGOTAN KOMITE ANTI FRAUD	
Ketua	Pemimpin Divisi Manajemen Risiko
Sekretaris	Pemimpin Bagian Pengembangan dan Penerapan Kebijakan Divisi Manajemen Risiko
Anggota	Pemimpin SKAI
	Pemimpin Divisi Hukum & Corporate Secretary
	Pemimpin Divisi Kepatuhan
	Pemimpin Divisi Human Capital

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Anti Fraud memiliki kewenangan dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Melakukan sosialisasi dan pembelajaran secara periodik terhadap seluruh pegawai terkait kebijakan, prosedur dan penerapan strategi anti fraud yang ditetapkan Bank.
b. Mengkoordinasikan peningkatan pemahaman pegawai mengenai fraud seperti bentuk-bentuk fraud, transparansi hasil investigasi dan tindak lanjut terhadap fraud yang dilakukan secara berkesinambungan.
c. Mengkoordinasikan peningkatan kepedulian dan kewaspadaan nasabah terhadap kemungkinan terjadinya fraud.
d. Menetapkan metode penilaian dan pengukuran terhadap kejadian fraud termasuk proses monitoring dan control serta pengelolaan database untuk setiap kejadian fraud, baik yang sudah terjadi maupun dalam

usaha percobaan namun tidak terealisasi.

e. Mengkoordinir pelaksanaan identifikasi kerawanan dengan melakukan identifikasi, analisis dan menilai potensi terjadinya fraud yang melekat pada setiap aktifitas Bank.
f. Mendokumentasikan dan menginformasikan hasil identifikasi kerawanan kepada pihak berkepentingan dan selalu dikinikan terutama terhadap aktifitas yang dinilai berisiko tinggi untuk terjadinya fraud.
g. Mengkoordinasikan penerapan Wistleblowing System.
h. Mengkoordinasikan pelaksanaan Surprise Audit dan Surveillance System.
i. Mengkoordinasikan evaluasi data kejadian.
j. Mengkoordinasikan pemantauan terhadap tindak lanjut yang dilakukan atas kejadian-kejadian fraud.

TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Kebijakan, sistem dan prosedur mengenai benturan kepentingan Bank, saat ini melekat pada masing-masing bidang kegiatan operasional Bank. Seperti di dalam Kebijakan Perkreditan Bank, Kebijakan Audit SKAI, maupun kebijakan pengadaan barang dan jasa. Untuk tahun 2015 Bank telah menyusun rancangan kebijakan mengenai Pedoman Benturan Kepentingan. Di dalam rancangan kebijakan pedoman benturan kepentingan diatur mengenai bentuk-bentuk benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, sanksi dan pencegahan jika terjadi benturan kepentingan.
Tidak terdapat laporan mengenai adanya transaksi yang mengandung benturan kepentingan sepanjang tahun 2014.

PENERAPAN FUNGSI DAN BUDAYA KEPATUHAN

Kepatuhan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi bagian terpenting dalam mewujudkan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik dan dapat menjadi tolok ukur atas penilaian nasabah dan pemegang saham terhadap kinerja Bank.

Fungsi Kepatuhan merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat exante (preventif) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia, dan atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Sedangkan Budaya Kepatuhan adalah nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia/OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Saat ini Bank Indonesia telah melakukan perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang kebijakan terkait dengan penugasan Direktur Kepatuhan (Compliance Director) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum dengan peraturan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

Seiring dengan perubahan ketentuan Bank Indonesia tersebut, Bank Riau Kepri telah menyusun dan memberlakukan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Riau Kepri, sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Direksi No. 67/KEPDIR/2012 tanggal 31 Desember 2012. BPP Kepatuhan tersebut mengatur lebih spesifik mengenai Peran dan Fungsi Kepatuhan serta Satuan Kerja Kepatuhan, yang nantinya diharapkan akan menjadi lebih forward looking dan lebih sensitif terhadap dinamika perubahan pada kegiatan usaha Bank.

Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan

Di dalam Pedoman Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Riau Kepri, fungsi, tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan, diatur sebagai berikut :

1. Direktur Kepatuhan berfungsi untuk melakukan serangkaian tindakan atau langkah-langkah untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
2. Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan, meliputi antara lain :
   a. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank
   b. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi

c. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank
d. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Unit Usaha Syariah
e. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank
f. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
g. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia maupun otoritas pengawas lainnya yang berwenang
h. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan
i. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (selanjutnya disingkat APU dan PPT) seluruh operasional Bank, dengan berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan

Tugas dan tanggung jawab tersebut di atas tidak menghilangkan hak dan kewajiban Direktur Kepatuhan sebagai anggota Direksi Bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, apabila untuk perbuatan-perbuatan tertentu tersebut diperlukan keputusan dari seluruh anggota Direksi Bank.

3. Direktur Kepatuhan dilarang membawahkan fungsi-fungsi:
   a. bisnis dan operasional;
   b. manajemen risiko yang melakukan pengambilan keputusan pada kegiatan usaha Bank;
   c. treasury;
   d. keuangan dan akuntansi;
   e. logistik dan pengadaan barang/jasa;
   f. teknologi informasi; dan
   g. audit intern/SKAI.
4. Direktur Kepatuhan wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia tentang pelaksanaan tugasnya, meliputi :
   a. Rencana kerja kepatuhan yang dimuat dalam rencana bisnis Bank;
   b. Laporan kepatuhan; dan
   c. Laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menurutnya telah menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bagian dari tugas Direktur Kepatuhan.

Laporan sebagaimana dimaksud di atas wajib ditandatangani oleh Direktur Kepatuhan, dan disampaikan kepada Bank Indonesia secara semesteran dan diterima Bank Indonesia paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode pelaporan berakhir dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan Direktur Utama.

Sehubungan dengan fungsi kepatuhan yang diatur di atas, Direktur Kepatuhan Bank Riau Kepri telah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas dan fungsinya, antara lain :

1. Menetapkan strategi Budaya Kepatuhan, antara lain :
   a. Menyusun Compliance charter (piagam kepatuhan)
   b. Menyusun Compliance code of conduct (kode etik kepatuhan)
   c. Menyusun Compliance policy (kebijakan kepatuhan).
2. Melakukan sosialisasi Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Riau Kepri.
3. Melakukan sosialisasi dan pelatihan terkait pedoman APU & PPT serta pedoman GCG.
4. Melakukan review terhadap kebijakan dan prosedur internal Bank sesuai dengan perubahan peraturan eksternal.
5. Memantau tindaklanjut pemenuhan komitmen Bank terhadap Bank Indonesia/OJK.
6. Menyusun dan melaporkan hasil penilaian dan pelaksanaan penerapan Good Corporate Governance.
7. Melakukan pengujian terhadap kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank agar tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Menyampaikan laporan rencana kerja Kepatuhan yang dimuat di dalam laporan Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2015.
9. Menyampaikan laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Terkait dengan pelaksanaan ketentuan kehati-hatian, Bank telah melaporkan kepada OJK, antara lain sebagai berikut :

LAPORAN PELAKSANAAN KETENTUAN KEHATI-HATIAN BANK		
Jenis Laporan	**Penilaian Pada Periode Laporan**	
	Juni 2014	**Desember 2014**
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	17.13 %	18.27 %
Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)	0,11 %	0,09 %
Kredit Kualitas Rendah	6,31 %	5.65 %
Non Performing Loan (NPL)	2,92 %	2.79%
Tingkat Kesehatan Bank	2 (Sehat)	2 (Sehat)

Langkah-langkah yang telah ditempuh dan dilakukan oleh Direktur Kepatuhan di atas masih perlu ditingkatkan, khususnya terkait menyangkut pemahaman dan disiplin karyawan terhadap ketentuan yang berlaku baik internal maupun eksternal dan sistem kontrol atas implementasi terhadap peraturan yang berlaku, dengan demikian perbaikan yang berkesinambungan tetap terus dilakukan agar penerapan praktik-praktik prinsip Good Corporate Governance dan praktik kepatuhan benar-benar melekat dalam kegiatan kerja sehari-hari.

Unit Kerja Di bawah Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko

Untuk melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya, Direktur Kepatuhan memiliki 3 (tiga) unit kerja yang membantu pelaksanaan tugas-tugas Direktur Kepatuhan Bank. Unit kerja yang berada di bawah Direktorat Kepatuhan dan Manajemen Risiko adalah Divisi Kepatuhan, Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Hukum dan Corporate Secretary. Pembentukan unit kerja tersebut sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Bank Riau Kepri.

Tugas dan Tanggungjawab Divisi Kepatuhan, Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Hukum dan Corporate Secretary antara lain adalah sebagai berikut :

1. Divisi Kepatuhan
   a. Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi.
   b. Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Bank Indonesia mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
   c. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   d. Melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Unit Usaha Syariah.
   e. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   f. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

2. Divisi Manajemen Risiko
   a. Mengelola kebijakan risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional dan risiko lainnya.
   b. Mengelola strategi manajemen risiko yang direkomendasikan oleh RMCO dan telah disetujui oleh Direksi serta memantau pelaksanaannya.
   c. Mengembangkan metode dan modul pengukuran risiko.
   d. Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMR).
   e. Mengembangkan perangkat aplikasi pengukuran dan pengendalian risiko.
   f. Melakukan kajian risiko atas usulan produk atau aktivitas baru serta mendukung/memberikan solusi untuk percepatan target kinerja unit bisnis dan unit kerja terkait lainnya.
   g. Melakukan pengukuran, analisa risiko kredit, pemantauan dan pengendalian, risiko pasar, risiko operasional dan risiko lainnya pada setiap aktivitas fungsional Bank.
   h. Merekomendasikan langkah-langkah taktis dan strategis untuk mitigasi risiko kepada satuan kerja operasional dan atau kepada Komite Manajemen Risiko (RMCO).
   i. Meningkatkan kompetensi pengurus dan pejabat Bank dalam rangka Sertifikasi Manajemen Risiko.

3. Divisi Hukum dan Corporate Secretary
   a. Bertanggung jawab terhadap tuntutan hukum yang dihadapi oleh Bank, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
   b. Bertanggung jawab dalam hal membuat perjanjian/ perikatan antara Bank dengan pihak ketiga dan kegiatan dibidang hukum lainnya.
   c. Memberikan bantuan advis/saran hukum menyangkut permasalahan hukum yang terjadi di Bank.
   d. Melaksanakan fungsi Corporate Secretary dan Humas sebagai single contact point hubungan antara Bank dengan berbagai stakeholder, termasuk media.
   e. Memberikan pelayanan kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi dan Stakeholder lainnya atas informasi yang berkaitan dengan kondisi perusahaan.
   f. Memberikan informasi secara aktual terhadap isu-isu yang berkembang baik yang bersifat positif maupun negatif kepada stakeholders.

Sistem Kepatuhan

Sistem Kepatuhan Bank dilaksanakan melalui serangkaian proses dan tahapan untuk menjamin kepatuhan Bank terhadap regulasi yang berlaku, meliputi :

1. Prosedur Kepatuhan (Compliance Procedure)
   Dimaksudkan untuk membangun awareness segenap jajaran Bank terhadap prosedur kerja dan prosedur kepatuhan (compliance procedure) di Kantor Pusat maupun di Kantor Cabang.

2. Pengujian Kepatuhan (Compliance Review), meliputi :
   a. Pengujian Kebijakan
      Adalah memastikan setiap ketentuan, kebijakan dan standar operasional prosedur Bank sesuai dengan regulasi yang berlaku baik Undang-Undang, Peraturan Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia, dan ketentuan eksternal lainnya.
   b. Pengujian Rencana Pemberian Kredit/Pembiayaan
      Adalah memastikan bahwa setiap rencana pemberian kredit/pembiayaan yang menjadi wewenang Direksi telah sesuai dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku baik Undang-Undang, Peraturan Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia, dan ketentuan eksternal lainnya.
   c. Pengujian Permasalahan Operasional Bank
      Adalah pengujian terhadap permasalahan-permasalahan operasional Bank pada setiap satuan kerja, meliputi permasalahan sebagai berikut :
      - Belum ada peraturan internal yang mengatur, sehinga satuan kerja perlu memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan BI dan ketentuan yang berlaku.
      - Kebijakan yang akan diambil telah diatur di dalam ketentuan internal, namun perlu penafsiran/ penjelasan lebih lanjut.

Kegiatan Unit Kerja Kepatuhan

Sesuai dengan SOT Bank Riau Kepri, bahwa struktur Satuan Kerja Kepatuhan (Divisi Kepatuhan) memiliki 2 (dua) bagian, Bagian Kepatuhan, Kebijakan & GCG dan Bagian Unit Kerja Pengenalan Nasabah (UKPN). Sepanjang tahun 2014 Divisi kepatuhan telah melakukan kegiatan-kegiatan, diantaranya namun tidak terbatas pada :

1. Melakukan pengkajian Rencana Keputusan dan Rancangan Kebijakan Bank.
2. Melakukan pengkajian dan pengujian kepatuhan terhadap produk dan jasa Bank.
3. Menyampaikan laporan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri (LTKL) kepada PPATK secara online melalui Aplikasi GRIPS sesuai jangka waktu yang ditetapkan.
3. Menyusun dan menerbitkan Surat Keputusan Direksi Nomor 36/KEPDIR/2014 tanggal 30 Mei 2014 tentang Penetapan Kantor Cabang Dengan Kompleksitas Usaha Yang Tinggi.
4. Memberikan pelatihan APU & PPT termasuk penerapan GCG Bank secara berkala kepada petugas frontliner (customer service dan teller) baru dan refresh serta kepada Pemimpin Seksi Pelayanan Cabang, Pemimpin Seksi Operasional Capem dan Pemimpin Kedai (baru & refresh).
5. Melakukan Pemantauan terhadap Kegiatan Pengkinian Data Nasabah.
6. Memastikan bahwa tidak terjadi denda akibat keterlambatan Laporan pada Bank Indonesia.
7. Melakukan monitoring terhadap temuan Bank Indonesia/ OJK.
8. Menyampaikan laporan pelaksanaan GCG tahun 2013 kepada pihak-pihak terkait.
9. Menyusun dan menerbitkan Surat Keputusan Direksi Nomor 84/KEPDIR/2014 tanggal 03 Desember 2014 tentang Aplikasi Pelaporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari Dan Ke Luar Negeri.
10. Mempersiapkan tools normalisasi CIF untuk meng-cleansing seluruh CIF sesuai dengan parameter ganda yang ditetapkan (baru sebatas nasabah invidual saja)
11. Memberlakukan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Single CIF dalam suatu Keputusan Direksi Nomor 30/KEPDIR/2014 tanggal 20 Mei 2014, sebagai

pedoman prosedur tentang tata cara pembukaan, perubahan dan penghapusan CIF termasuk dokumentasi dari setiap kegiatan yang dilakukan.

12. Melakukan sosialisasi pelaksanaan single CIF dan teknis penggabungan CIF di seluruh kantor Bank pada tanggal 8 & 9 Agustus 2014 untuk pegawai Bank Riau Kepri wilayah kepulauan dan pada tanggal 15 & 16 Agustus 2014 untuk pegawai Bank Riau Kepri wilayah daratan.
13. Melakukan penyempurnaan aplikasi pengkinian data nasabah yang telah ada dilakukan dengan menambahkan field tingkat risiko (Low, Medium ,High) dari masing-masing nasabah yang akan dikinikan datanya.
14. Melakukan pengkinian data nasabah.

PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN BANK

Di dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 1/6/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (Compliance Director) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum (SPFAIB), ditetapkan bahwa Bank wajib menerapkan fungsi audit intern bank, untuk membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan menjabarkan secara operasional perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan atas hasil audit. Dalam melaksanakan hal ini Auditor Intern mewakili pandangan dan kepentingan profesinya dengan membuat analisis dan penelitian dibidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan secara on-site dan pemantauan secara off-site, serta memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang direview kepada semua tingkatan manajemen. Di samping itu, SKAI harus mampu mengidentifikasikan segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana yang ada.

Dalam melaksanakan kegiatan bisnis dan operasional bank, sejak awal Bank Riau Kepri telah membentuk unit kerja yang menjalankan fungsi audit intern untuk memastikan bahwa struktur pengendalian intern yang ada pada bank telah berjalan sebagaimana mestinya.

Saat ini, unit yang melaksanakan fungsi audit intern pada Bank Riau Kepri adalah Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). Pada awalnya, unit kerja ini bernama Satuan Pengawasan Intern(SPI). Namun, guna mengikuti perkembangan bisnis perbankan yang ada dan seiring dengan adanya beberapa perubahan ketentuan yang berlaku, berikut dengan metode pengawasan yang digunakan serta untuk menyesuaikan dengan istilah yang ada pada PBI, maka nama Satuan Pengawasan Intern mengalami beberapa kali perubahan nama, dari Biro Pengawasan kemudian diubah namanya menjadi Divisi Pengawasan pada tahun 2004 dan sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang namanya diubah menjadi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).

SKAI berikut Auditor-nya harus memiliki independensi dalam melakukan audit dan mengungkapkan pandangan serta pemikiran sesuai dengan profesinya dan standar audit yang berlaku umum. Independensi tersebut sangat penting agar produk yang dihasilkan memiliki manfaat yang optimal bagi terselenggara dan terjaminnya kepentingan bank dan masyarakat. Dalam hal ini, Auditor harus independen dari kegiatan dan objek yang diperiksa. Auditor dianggap independen apabila dapat bekerja dengan bebas dan obyektif. Untuk memperoleh independensi tersebut, maka kedudukan Pemimpin SKAI dalam organisasi harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari manajemen ataupun pihak lain yang terkait dengan bank.

Pada tahun 2012, SKAI telah melakukan penyempurnaan terhadap beberapa bagian dari Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Pengawasan Berbasis Risiko, antara lain :

1. Visi SKAI adalah menjadi "VIP Auditor" (Value added, Independen dan Profesional) untuk mendukung pencapaian visi dan tujuan Bank Riau Kepri.

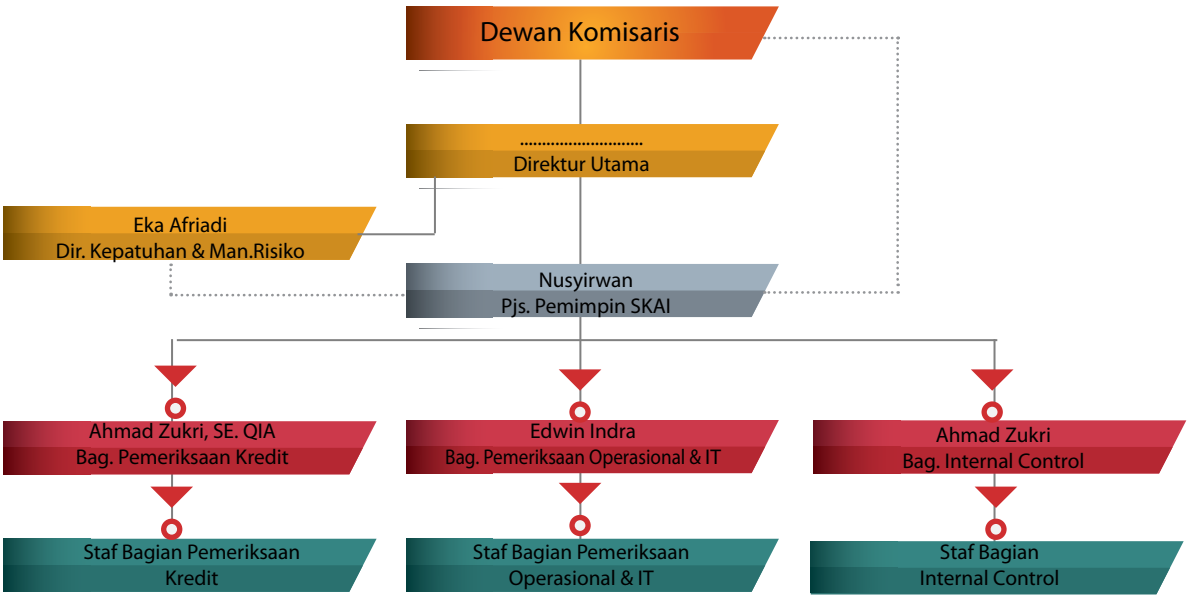
2. Misi SKAI adalah :
   - Melaksanakan fungsi audit intern untuk memastikan terselenggaranya fungsi pengendalian intern bank dan senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip manajemen risiko, kepatuhan terhadap pelaksanaan ketentuan, baik intern maupun ekstern serta keterlaksanaan fungsi GCG.
   - Berperan sebagai partner dan konsultan bagi manajemen dan unit kerja yang memerlukan.

3. Ruang lingkup kegiatan Satuan Kerja Audit Intern mencakup evaluasi atas kecukupan dan efektivitas pengendalian intern, pengelolaan risiko dan proses governance dalam rangka melindungi kepentingan stake holders pada seluruh aspek/kegiatan Bank Riau Kepri dan semua tingkatan manajemen yang berada dibawah Direksi Bank Riau Kepri.

4. Beberapa perubahan terkait dengan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dalam mendukung efektivitas Internal Audit, meliputi :
   - Melaksanakan pemantauan dan penelaahan terhadap pengelolaan dan pengendalian Bank, serta memberikan pendapat professional dan mengidentifikasi hal-hal yang memberikan pendapat professional dan mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.
   - Menelaah hasil pemeriksaan terhadap kecukupan dan efektivitas pengendalian intern Bank.
   - Menelaah tingkat kecukupan upaya manajemen dalam menindaklanjuti rekomendasi auditor intern dan ekstern yang berkaitan dengan pengendalian intern.

Susunan Organisasi dan Panduan Kerja Audit Intern

Berdasarkan SK Direksi No. 99/ KEPDIR/2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri, ditegaskan bahwa Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dipimpin oleh seorang Pemimpin SKAI setingkat Pemimpin Divisi (diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Bank Indonesia) yang memiliki 3 (tiga) bagian dibawahnya, yaitu Bagian Pemeriksaan Kredit, Bagian Pemeriksaan Operasional dan IT dan Bagian Internal Kontrol.



Dalam melakukan tugasnya, SKAI Bank Riau Kepri berpedoman pada Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter) dan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Pengawasan Berbasis Risiko yang tertuang di dalam SK Direksi Bank Nomor 63/KEPDIR/2006 tanggal 29 Agustus 2006 berikut perubahannya SK Direksi Nomor 96/KEPDIR/2011 tanggal 28 November 2011, yang dalam penyusunannya tetap mengacu pada Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) sebagai standar yang memuat ukuran minimal tentang Fungsi Audit Intern yang perlu diselenggarakan oleh bank umum serta aspek-aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan Audit Intern tersebut.

Tugas dan Tanggung jawab Audit Internal

Sejalan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum, SK Direksi Bank Riau Kepri No. 99/KEPDIR/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang perubahan atas Keputusan Direksi No. 79/KEPDIR/2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Riau, Internal Audit Charter dan BPP Pengawasan Berbasis Risiko, maka Tugas Pokok Satuan Kerja Audit Intern meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja/strategi bisnis Satuan Kerja Audit Intern dan unit kerja dibawah supervisi dalam bentuk KPI(Key Performance Indicator)
2. Menyusun anggaran(budget) tahunan dan melakukan monitoring/penegndalian atas pelaksanaannya.
3. Menjabarkan secara operasional perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan secara aktif (on-site) dan pemantauan secara pasif (off-site) serta memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang direview kepada semua tingkatan manajemen.
4. Memberikan penilaian terhadap system pengendalian intern dan prosedur yang ada pada seluruh aspek kegiatan Bank untuk memperoleh keyakinan tercapainya tujuan dan sasaran Bank secara optimal.
5. Melaksanakan proses kegiatan audit secara professional dan independen dan proaktif serta kontinyu sesuai dengan internal audit charter dan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Risk Based Audit dan ketentuan yang berlaku.
6. Melakukan audit terhadap hal-hal diluar rencana kerja, baik itu atas permintaan internal maupun eksternal yang berwenang sesuai persetujuan Direksi.
7. Melakukan koordinasi tugas dan mendampingi pemeriksaan eksternal dalam rangka kelancaran pemeriksaan.
8. Menyampaikan usulan/saran kepada Direksi mengenai tindakan/sanksi yang akan diberikan terhadap pelanggaran/penyimpangan yang mengakibatkan kerugian bagi Bank atau pihak luar Bank.
9. Me-review semua kebijakan dan prosedur yang tertulis sebagai pedoman bagi audit intern dalam melakukan tugasnya.
10. Memberikan jasa konsultasi kepada pihak intern Bank Riau Kepri untuk memberikan nilai tambah (value added) sepanjang sumber daya yang kompeten dan memadai telah tersedia serta tidak mempengaruhi independensi dan objektivitas Divisi SKAI

Laporan Kegiatan Audit Internal

Sesuai dengan Rencana Kerja Audit Tahunan Satuan Kerja Audit Intern tahun 2014 yang telah disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris, SKAI telah melakukan hal-hal terkait dengan rencana kerja tahun 2014 sebagai berikut :

1. Mengimplementasikan BPP Risk Based Audit dalam melakukan pemeriksaan Divisi dan Kantor Cabang serta unit kerja dibawahnya dengan memperhitungkan tingkat risiko sesuai dengan hasil risk assesment yang dilakukan oleh bagian Internal Control dengan risk level prioritas utama dan risiko tinggi.
2. Melakukan penyempurnakan beberapa bagian dari BPP Pengawasan Berbasis Risiko, buku 2 D tentang Audit Khusus, dan penambahan Audit Program Manajemen Likuiditas.
3. Melakukan penyempurnaan Audit Rating dan Tool Risk Assesment.
4. Melakukan Audit pada Divisi dan Kantor Cabang sesuai dengan hasil Risk Assessment dengan risk level prioritas utama dan risiko tinggi lebih didahulukan untuk dilakukan pemeriksaan, yaitu:

Audit Umum Perkreditan dan Operasional/IT

No.	Auditee	Tanggal Pelaksanaan
1	Audit Umum Cabang Pkl. Kerinci	20 Mei 2014
2	Audit Umum Cabang Batam	21 Mei 2014
3	Audit Umum Cabang Dumai	21 Mei 2014

No.	Auditee	Tanggal Pelaksanaan
4	Audit Umum Cabang Bangkinang	22 Mei 2014
5	Audit Umum Cabang Siak Sri Indrapura	18 Juni 2014
6	Audit Umum Cabang Air Molek	18 Juni 2014
7	Audit Umum Cabang Pasar Pusat	20 Juni 2014
8	Audit Umum Cabang Tanjung Pinang	23 Juni 2014
9	Audit Umum Cabang Tembilahan	23 Juni 2014
10	Audit Umum Cabang Syariah Pekanbaru	4 Juli 2014
11	Audit Umum Cabang Bagan Siapiapi	7 Juli 2014
12	Audit Umum Cabang Ranai	22 Juli 2014
13	Audit Umum Cabang Pasir Pengarayan	23 Juli 2014
14	Audit Umum Cabang Tanjung Balai Karimun	25 Agustus 2014
15	Audit Umum Cabang Teluk Kuantan	8 September 2014
16	Audit Umum Cabang Utama	10 September 2014
17	Audit Umum Cabang Syariah Tanjung Pinang	16 September 2014
18	Audit IT	30 September 2014
19	Audit Umum Cabang Bengkalis	6 Oktober 2014
20	Audit Umum Cabang Selat Panjang	6 Oktober 2014
21	Pemeriksaan Internal dan Security audit Sistem BI-RTGS dan Security audit SKN-BI	10 Oktober 2014

5. Melakukan edukasi ke Kantor Cabang dalam rangka mempercepat penyelesaian tindaklanjut hasil audit intern dan ekstern.
6. Melakukan Edukasi terhadap 8 (delapan) Kantor Cabang, terkait dengan penerapan Strategi Anti Fraud dan Whistle Blowing System.
7. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan personil SKAI, maka kepada beberapa orang pegawai SKAI setiap tahunnya diikutsertakan dalam pendidikan, pelatihan, maupun seminar yang berkaitan dengan Audit dan perkembangannya. Pada tahun 2013 ini pegawai SKAI telah mengikuti beberapa pelatihan dan seminar yang diadakan oleh Lembaga-lembaga pendidikan audit atau organisasi yang bergerak di bidang Audit dengan pemberi materi yang telah berpengalaman. Materi pelatihan yang didapat dari kegiatan tersebut, nantinya akan disampaikan kepada Auditor lainnya melalui mekanisme "Sharing Moment" sebagai bahan masukan dan pembelajaran untuk dapat memberikan nilai tambah kepada seluruh auditor SKAI.
8. Dalam meningkatkan kemampuan dan kopetensi seluruh auditor, telah dilaksanakan Pelatihan Sertifikasi Qualified Internal Auditor (QIA).

Program Pengendalian Mutu.

SKAI memiliki program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit yang dilakukannya. Evaluasi tersebut terdiri dari :

1. Supervisi, dilakukan terhadap pekerjaan Auditor secara berkesinambungan untuk memastikan adanya kepatuhan terhadap standar audit, kebijakan, prosedur dan program audit yang telah disusun.
2. Review Intern, dilakukan terhadap Auditor SKAI secara berkesinambungan atas kualitas pekerjaan audit yang mereka hasilkan. Untuk tahun 2014, dalam menjaga mutu kegiatan audit dan mempertahankan independensi serta obyektifitas atas pelaksanaan audit, Divisi SKAI melalui Pemimpin SKAI dan atau Pemimpin Bagian Internal Control telah melakukan tugas Quality Assurance (QA), namun hanya terbatas pada hasil audit yang dilakukan oleh Internal Control Cabang dan Kantor Pusat dan belum melakukan fungsi QA tersebut terhadap Hasil Audit yang dilakukan oleh Bagian Pemeriksaan Perkreditan dan Bagian Pemeriksaan Operasional dan IT. Selain melaksanakan QA untuk menjaga mutu Audit, SKAI juga melakukan Edukasi dalam rangka mempercepat penyelesaian tindak lanjut hasil audit intern.

- *Quality Assurance*

No	Keterangan	Pelaksanaan Quality Assurance
1	IC Cabang Selat Panjang	22 Mei 2014
2	IC Cabang Pasar Pusat	28 Mei 2014
3	IC Cabang Batam	19 Mei 2014
4	IC Cabang Dumai	19 Mei 2014
5	IC Cabang Pangkalan Kerinci	21 Mei 2014
6	IC Cabang Siak Sri Indrapura	12 Juni 2014
7	IC Cabang Tj. Balai Karimun	25 Agustus 2014
8	IC Cabang Cab. Utama	26 Agustus 2014
9	IC Cabang Syariah TPI	8 September 2014
10	IC Cabang Syariah Pekanbaru	10 Desember 2014
11	IC Cabang Pasir Pangaraian	29 Desember 2014

- *Edukasi*

No	Kantor Cabang	Tanggal Pelaksanaan
1	Cabang Selat Panjang	27 Maret 2014
2	Cabang Pangkalan Kerinci	7 Mei 2014
3	Cabang Batam	9 Mei 2014
4	Cabang Bangkinang	12 Mei 2014
5	Cabang Dumai	13 Mei 2014
6	Cabang Pasar Pusat	2 Juni 2014
7	Cabang Siak Sri Indrapura	4 Juni 2014
8	Cabang Air Molek	5 Juni 2014
9	Cabang Tanjung Balai Karimun	14 Agustus 2014
10	Cabang Cab. Utama	29 Agustus 2014
11	Cabang Syariah TPI	5 September 2014
12	Cabang Syariah Pekanbaru	27 November 2014
13	Cabang Pasir Pangaraian	23 Desember 2014

3. Review Ekstern, dilakukan terhadap Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) untuk menilai mutu kegiatan SKAI Bank Riau Kepri atas pelaksaan audit yang telah dilakukan. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999, maka fungsi SKAI harus di-review oleh pihak ekstern minimal sekali dalam 3(tiga) tahun yang memuat pendapat tentang hasil kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank serta perbaikan yang mungkin dilakukan. Sampai saat ini, SKAI telah 4 (empat) kali di-review oleh pihak ekstern dengan urutan sebagai berikut :

Nama Akuntan Publik	Tahun	Untuk Periode
KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan	2013	2011 - 2013
KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan	2010	2007 – 2010
KAP Drs. J. Tanzil & Rekan	2007	2004 – 2007
BPKP Riau	2004	2001 – 2004

Sistem Pelaporan Pelanggaran *(Whistleblowing System)*

Landasan Pembentukan

Sebagai tindaklanjut nyata dari implementasi GCG guna menciptakan lingkungan perusahaan yang bersih dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), Bank Riau Kepri berusaha menerapkan strategi mitigasi terhadap potensi praktik-praktik KKN melalui penerapan sistem pelaporan pelanggaran.

Sistem Pelaporan pelanggaran (Whistleblowing System) adalah pola yang mengatur pelaporan suatu penyimpangan yang terjadi di dalam perusahaan. Hal ini diterapkan karena biasanya pelapor tidak berani menyampaikan hal-hal yang ia ketahui, karena takut dianggap melawan atasan, dipecat, dan tidak dipromosikan. Untukmenghindari hal ini, maka dilakukan upaya-upaya sosialisasi tentang pemahaman mekanisme sistem ini dan komitmen perusahaan untuk memberikan jaminan sesuai Undang Undang Nomor: 13 tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan, khususnya pasal 153 ayat (1) huruf h, Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja/buruh yang mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan,sehingga meningkatkan awareness seluruh karyawan/ti Bank Riau Kepri terhadap budaya ini.

Setiap pegawai Bank Riau Kepri tidak diperbolehkan melakukan perbuatan yang melanggar terhadap ketentuan yang berlaku atau melakukan perbuatan yang mendorong terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Bank juga mendorong agar setiap pegawai menyampaikan laporan jika terjadi kasus (setiap permasalahan yang terjadi di Bank Riau Kepri yang kemungkinan dapat menimbulkan tuntutan dari pihak ketiga dan/atau menimbulkan kerugian bagi Bank namun tidak terbatas pada permasalahan yang berhubungan dengan system transaksi perbankan).

Dengan adanya Sistem Pelaporan Pelanggaran ini, efektifitas yang dirasakan adalah terdeteksinya kecurangan-kecurangan dalam waktu yang relatif singkat dan lebih rinci, sehingga sangat mempermudah proses pengawasan dilakukan di internal, karena cakupan aktivitas dan jumlah karyawan yang sangat banyak. Ruang lingkup dari Sistem Pelaporan Pelanggaran meliputi perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian financial atau non financial terhadap perusahaan (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

Penanganan Kasus Yang Berpotensi Merugikan Bank

Setiap pegawai Bank Riau Kepri tidak diperbolehkan melakukan perbuatan yang melanggar terhadap ketentuan yang berlaku atau melakukan perbuatan yang mendorong terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Bank juga mendorong agar setiap pegawai menyampaikan laporan jika terjadi kasus (setiap permasalahan yang terjadi di Bank Riau Kepri yang kemungkinan dapat menimbulkan tuntutan dari pihak ketiga dan/atau menimbulkan kerugian bagi Bank namun tidak terbatas pada permasalahan yang berhubungan dengan sistem transaksi perbankan).

Setiap pegawai Bank Riau Kepri wajib menginformasikan secara lisan kepada atasannya / Pemimpin Unit Kerja dan pegawai juga dapat langsung menyampaikan informasi tersebut secara tertulis langsung kepada Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Cq. Pemimpin Divisi Kepatuhan/Divisi Hukum dan Corporate Secretary dengan tembusan kepada SKAI (ringkasakan laporan peristiwa tersebut disampaikan selambat-lambatnya dalam waktu 1 x 24 jam). Temuan dan pelaporan kasus, Tindak Lanjut Laporan Final, Penghapusan dan Pembukuan Kerugian, Monitoring Perkembangan Proses Hukum serta Monitoring dan Data Base Kasus diatur dalam Surat Edaran No. 10/SE/2008 tanggal 28 April 2008 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Yang Berpotensi Merugikan Bank. SE sudah dicabut dan telah dituangkan dalam ***BPP Strategi Anti Fraud, SK No. 36A/ KEPDIR/2012.***

Bank akan melindungi identitas pegawai yang telah melaporkan adanya tindakan atau potensi terjadinya kasus. Bank memberikan sanksi terhadap pegawai apabila terdapat pelanggaran/kesalahan dan/atau keterlibatan pegawai unit kerja dan memberikan penghargaan terhadap pegawai unit kerja yang berhasil mencegah terjadinya kasus.

Struktur Pengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran

Bank Riau Kepri mempunyai 2 (dua) Unsur sebagai Unit yang melaksanakan Sistem Pelaporan pelanggaran, yang terdiri atas :

1. Bagian Internal Control SKAI
   Tugas Pokok :
   Tugas pokok Bagian Internal Control SKAI, khususnya dalam menangani laporan pelanggaran adalah membantu

Direksi untuk menerima pelaporan tertulis maupun lisan yang ditindaklanjuti dengan melaksanakan investigasi awal terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan/ti Bank Riau Kepri, antara lain:

a. Menerima laporan pelanggaran.
b. Mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan dan melakukan investigasi awal terhadap substansi pelanggaran yang dilaporkan.
c. Membuat Laporan Awal Kasus kepada Pemimpin SKAI atas hasil investigasi awal dan rekomendasi atas pelanggaran yang dilaporkan, yang kemudian akan diteruskan oleh Pemimpin SKAI kepada Direksi Bank Riau Kepri guna menentukan pelaksanaan Audit Khusus atas Laporan tersebut.

2. Komite Audit.
Dalam mekanisme Sistem Pelaporan pelanggaran, khususnya dalam menangani laporan pelanggaran, tugas komite Audit adalah membantu Komisaris untuk menerima pelaporan tertulis maupun lisan yang ditindaklanjuti dengan melaksanakan investigasi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi Bank Riau Kepri.

Media Saluran Laporan Pelanggaran
Guna efektifitas penerapan Sistem Pelaporan pelanggaran Bank Riau Kepri menyediakan saluran penyampaian laporan melalui:

1) Alamat Surat : Jl. Sumatra No.30 Pekanbaru-riau
2) Telpon : 0761-25378
4) Facsimile : (0761) 36768
5) E-mail : indra.bayu@bankriau.co.id,
wbs@bankriau.co.id,
audit@bankriau.co.id,
divisiskai@bankriau.co.id

PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

Salah satu keputusan RUPS tahun 2013, antara lain memberikan persetujuan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk KAP sebagai auditor ekstern yang independen untuk memeriksa laporan keuangan Bank Riau Kepri tahun 2013. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Bank Indonesia dilakukan berdasarkan hasil rekomendasi dari Komite Audit.

Berdasarkan persetujuan tersebut, Dewan Komisaris sesuai dengan rekomendasi Komite Audit menunjuk KAP Tjahjo, Machdjud Modopuro & Rekan untuk melakukan audit laporan keuangan Bank Riau untuk tahun buku 31 Desember 2014.

Penunjukan KAP Tjahjo, Machdjud Modopuro & Rekan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, antara lain bahwa KAP tersebut merupakan entitas yang terdaftar di Bank Indonesia dan BAPEPAM-LK, tidak memberikan jasa lain kepada Bank Riau Kepri pada tahun tersebut sehingga terhindar dari kemungkinan benturan kepentingan, dan tidak melakukan pekerjaan audit atas Laporan Keuangan Bank Riau Kepri lebih dari 5 (lima) tahun berturut-turut.

Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk telah menyampaikan hasil audit dan management letter kepada Bank tepat waktu, mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.
Hasil audit laporan keuangan Bank Riau tahun 2014 yang telah disampaikan Kantor Akuntan Publik Tjahjo, Machdjud Modopuro & Rekan tanggal 14 Februari 2014 mendapat opini "Wajar Tanpa Syarat".

Berikut disampaikan nama Akutan Publik yang ditunjuk sebagai auditor ekstern yang independen untuk memeriksa laporan keuangan Bank Riau Kepri 5 tahun kebelakang, sebagai berikut :

Nama Akuntan Publik	Tahun Buku	Penilaian
Tjahjo, Machdjud Modopuro & Rekan	2014	xxxxxxx
Abdi Icjhar, BAP & Rekan	2013	Wajar Tanpa Syarat
Eka Masni, Bustamam & rekan	2012	Wajar Tanpa Syarat
Eka Masni, Bustamam & rekan	2011	Wajar Tanpa Syarat
Eka Masni, Bustamam & rekan	2010	Wajar Tanpa Syarat
Eka Masni, Bustamam & rekan	2009	Wajar Tanpa Syarat

PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

Sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun buku 2013, Dewan Komisaris diberikan kewenangan oleh RUPS untuk menunjuk Auditor laporan keuangan Bank tahun buku 2014.

Berdasarkan kewenangan tersebut, Dewan Komisaris sesuai dengan rekomendasi Komite Audit per tanggal 28 Agustus 2014, menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Thahjo, Machdjud Modopuro & Rekan untuk melaksanakan audit atas laporan keuangan Bank Riau Kepri tahun buku 2014 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Selain penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) di atas, Dewan Komisaris berdasarkan hasil rekomendasi Komite Audit juga telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Ekamasni, Bustaman & Rekan untuk melaksanakan Audit Kepatuhan & Teknologi System Informasi Bank Riau Kepri tahun 2014.

Kantor Akuntan Publik (KAP) Thahjo, Machdjud Modopuro & Rekan dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Ekamasni, Bustaman & Rekan merupakan akuntan publik yang terdaftar, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :

TAHUN BUKU 2014			
NAMA KAP	PIMPINAN REKAN	IZIN USAHA	ALAMAT
Thahjo, Machdjud Modopuro & Rekan	Drs. Thahjo Nurwantoro, CPA.,CA	Menteri Keuangan KEP. 1021/KMK.17/1998	Jl. Cempaka Putih Barat 13 No. G-10 Jakara 10520
Ekamasni, Bustaman & Rekan	Hermen Bustaman, CPA	Menteri Keuangan KEP. 408/ KM.6/2004	Gedung Sentra Kramat Blok-18 Jl. Kramat Raya No. 7-9 Jakarta

Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, antara lain bahwa KAP merupakan entitas yang terdaftar di Bank Indonesia dan BAPEPAM-LK, tidak memiliki hubungan kuangan dengan Bank Riau Kepri, tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Bank, tidak memberikan jasa lain kepada Bank Riau Kepri pada tahun tersebut sehingga terhindar dari kemungkinan benturan kepentingan, dan tidak melakukan pekerjaan audit atas Laporan Keuangan Bank Riau Kepri lebih dari 5 (lima) tahun berturut-turut, serta mampu melaksanakan audit sesuai Standar Profesional Akuntan Publik, Kode Etik Profesi dan SPKN (Sistem Pemeriksaan Keuangan Negara).
Hasil audit laporan keuangan Bank Riau Kepri tahun 2014 yang telah disampaikan Kantor Akuntan Publik KAP Abdi Ichjar, BAP & Rekan tanggal 02 Maret 2015 mendapat opini "Wajar Tanpa Pengecualian".

Berikut disampaikan beberapa Kantor Akuntan Publik yang telah memeriksa laporan keuangan Bank Riau Kepri 5 (lima) tahun kebelakang, sebagai berikut :

Nama Akuntan Publik	Tahun Buku	Penilaian
Thahjo, Machdjud Modopuro & rekan	2014	Wajar Tanpa Pengecualian
Abdi Ichjar, BAP & rekan	2013	Wajar Tanpa Pengecualian
Eka Masni, Bustaman & rekan	2012	Wajar Tanpa Syarat
Eka Masni, Bustaman & rekan	2011	Wajar Tanpa Syarat
Eka Masni, Bustaman & rekan	2010	Wajar Tanpa Syarat

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN PENYEDIAAN DANA BESAR.

Bank sangat berhati-hati dalam melakukan penyediaan dana kepada pihak terkait, sehingga porsi kredit kepada pihak terkait dalam total kredit yang diberikan Bank relatif sedikit.

Prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar yang dilakukan Bank sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum (BMPK) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006.

Secara umum Bank telah memiliki kebijakan mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait yang disesuaikan dengan ketentuan dan perudang-undangan yang berlaku.

Dalam rentang waktu selama tahun 2014, Bank tidak pernah melanggar atau melampaui BMPK. Untuk pelaksanaan kewajiban laporan, Bank telah menyampaikan laporan secara berkala kepada Bank Indonesia perihal BMPK dimaksud di atas secara konsekwen dan tepat waktu.

Tabel di bawah ini menjelaskan penyediaan dana kepada pihak terkait maupun debitur individu dan grup, di Bank Riau Kepri periode Desember 2014 :

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (jutaan rupiah)
1	Kepada Pihak Terkait	7	Rp 1.897,-
2	Kepada debitur inti :	25	Rp 182.854,-
	a. individu	2	Rp 4.710
	b. group	23	Rp 178.854,-

RENCANA STRATEGIS BANK

Langkah-langkah Strategis yang Akan Ditempuh Bank

Untuk mencapai visi dan misi Bank dan sesuai arah kebijakan Bank tahun 2014, maka perlu ada langkah-langkah strategis yang harus dilakukan antara lain :

1. Optimalisasi peran dan fungsi unit kerja kantor pusat serta seluruh jaringan distribusi Bank (Cabang, Capem, Kedai, Butik dan ATM).
2. Melakukan review, pengembangan serta optimalisasi fitur produk dan jasa Bank.
3. Melakukan review dan pengembangan berbagai skim kredit/pembiayaan untuk percepatan intermediasi.
4. Percepatan peningkatan recovery kredit bermasalah.
5. Penyempurnaan dan pengembangan teknologi Informasi yang tepat guna.
6. Penyempurnaan sistem pengembangan karir berbasis talent management, kompetensi dan performance management yang terintegrasi.
7. Optimalisasi peran dan fungsi treasury dan transaksi devisa.
8. Optimalisasi peran dan fungsi syariah dalam rangka persiapan spin off.
9. Peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, kemampuan pengelolaan risiko (risk management) serta Good Corporate Governance (GCG).
10. Pengembangan budaya perusahaan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
11. Menerapkan fungsi Quality Assurance guna memastikan kualitas pekerjaan audit yang dihasilkan auditor dan/ atau branch auditor sesuai dengan ketentuan dan tetap menerapkan sistem audit berbasis risiko (risk-based audit).
12. Optimalisasi fungsi Hukum, Corporate Secretary dan Corporate Social Responsibility (CSR).

Rencana Jangka Pendek

Beberapa faktor penting yang menjadi perhatian dalam pengembangan bisnis di tahun 2014 adalah :

1. Menurunkan tingkat NPL atau kredit bermasalah (recovery kredit bermasalah).
   Kondisi NPL PT. Bank Riau Kepri secara keseluruhan masih berada di bawah angka normatif ketentuan BI yaitu 2,90% per 31 Maret 2014. Namun apabila dilihat perkembangannya dari tahun-tahun sebelumnya menunjukkan peningkatan secara netto maupun bruto. Strategi yang dilakukan dalam rangka memperbaiki kinerja NPL ini antara lain :
   a. Penagihan oleh kantor cabang kepada debitur NPL. Jika diperlukan, kantor cabang dapat meminta Divisi PKB untuk mendampingi penagihan kepada debitur NPL.
   b. Restrukturisasi kredit terhadap rekening yang masih mempunyai prospek bisnis yang baik dan cashflow yang relatif terjaga.
   c. Penjualan agunan kredit dilakukan terhadap kredit yang sudah tidak produktif untuk ditagih dan masih memiliki agunun yang marketable, akan dilakukan penjualan agunan baik secara sukarela maupun melalui lelang eksekusi.
   d. Penghapusbukuan debitur yang telah jatuh tempo, dengan tetap melakukan penagihan dan penjualan agunan kredit.

Dengan upaya-upaya yang dilakukan di atas, maka Bank Riau Kepri akan melakukan perbaikan NPL dengan menargetkan pada tahun 2014 NPL bruto sebesar 2,75% dengan asumsi :

   a. Penyaluran kredit sebesar Rp13,60 triliun.
   b. Kualitas penyaluran terjaga dengan baik dan terus ditingkatkan.
   c. Debitur yang mempunyai fasilitas kredit bermasalah dapat diselesaikan sehingga kualitas kredit semakin baik.

2. Meningkatkan fungsi intermediasi.
   Diperkiraan pertumbuhan kredit Bank Riau Kepri pada tahun 2014 sebesar 14% dan pertumbuhan dana pihak ketiga sebesar 16%. Dengan adanya dana yang berasal dari dana pihak ketiga yang bersumber dari masyarakat, diharapkan

nantinya fungsi intermediasi Bank dapat berjalan dengan baik. Selain itu juga dilakukan penambahan jaringan kantor baru di berbagai daerah di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau sebagai upaya meningkatkan hubungan Bank dengan masyarakat.

3. Peningkatan Efisiensi.
   Dengan semakin besarnya usaha Bank maka akan berdampak pada semakin besarnya biaya operasional yang dikeluarkan. Untuk itu perlu dilakukan pengendalian yang ketat agar pencapaian efisiensi masih berada pada kondisi normatif. Pada tahun 2014 Bank Riau Kepri telah memproyeksikan rasio efisiensi (BOPO) sebesar 69,90% dan terus dipertahankan di bawah angka normatif hingga tiga tahun ke depan.

Rencana Jangka Menengah

1. Pengembangan Usaha Syariah
   Upaya yang dilakukan dalam rangka pengembangan Unit Usaha Syariah dalam jangka menengah adalah :
   a. Meningkatkan jumlah asset menjadi Rp1,51 triliun.
   b. Melakukan penambahan jaringan kantor cabang dan cabang pembantu serta office chanelling syariah di berbagai daerah Provinsi Riau dan Provinsi Kepri.
   c. Peningkatan pengembangan bisnis syariah, pengembangan produk dan pelayanan syariah berdasarkan segmentasi nasabah.
   d. Melakukan kajian persiapan spin-off Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah (BUS).

2. Peningkatan Kemampuan Menghimpun DPK.
   Untuk meningkatkan kemampuan DPK, Bank akan melakukan pengembangan berbagai produk dana dan jasa antara lain mencakup Phone Banking, Corporate Internet Banking, EDC merchant, Priority Banking.
3. Optimalisasi Fungsi SBU
   Optimalisasi Fungsi SBU antara lain dilakukan melalui pengembangan produk/fitur layanan masing-masing SBU serta melakukan perbaikan/penyempurnaan SOP dan SOT.
4. Optimalisasi Sarana Pendukung
   Optimalisasi sarana pendukung antara lain dilakukan pembangunan gedung kantor yang representatif, melakukan standarisasi facade gedung jaringan kantor dan pembaharuan sarana kerja.
5. Perluasan Jaringan Distribusi
   Perluasan Jaringan Distribusi antara lain dilakukan penambahan jaringan kantor, ATM, CDM, EDC, serta perluasan jaringan kantor ke luar wilayah Provinsi Riau dan Kepri.
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan
   Peningkatan Kualitas Pelayanan antara lain dilakukan pembenahan CIF (Customer Information File), pengembangan CRM (Customer Relationship Management) serta peningkatan fungsi Service Quality di masing-masing kantor.
7. Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance)
   a. Melakukan pengelolaan GCG meliputi verifikasi dan evaluasi peraturan/kebijakan internal, koordinasi dengan unit-unit terkait untuk keperluan pelaksanaan GCG.
   b. Membudayakan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yaitu: Transparency, Accountable, Responsible, Independence dan Fairness serta menjadikan Pegawai Bank bekerja berdasarkan Kode Etik GCG.

8. Penguatan Internal Kontrol
   Penguatan Internal Kontrol antara lain dilakukan melalui penyempurnaan sistem Risk Based Audit serta penerapan Audit Rating System, penguatan fungsi IT Auditor dan penguatan fungsi Internal Control Cabang dengan menerapkan fungsi Quality Assurance guna memastikan kualitas pekerjaan audit yang dihasilkan auditor dan/atau branch auditor.
9. Penguatan Manajemen Risiko
   Penguatan Manajemen Risiko antara lain dilakukan penerapan risk appetite dan risk tolerance, penyempurnaan strategi anti fraud, pengembangan dan implementasi aplikasi perhitungan modal minimum sesuai profil risiko, serta kajian metode dan model pengukuran risiko.
10. Menurunkan NPL
    Untuk menurunkan NPL antara lain dilakukan melalui perbaikan proses kerja dan peningkatan kehati-hatian dalam penyaluran kredit, perbaikan mekanisme penagihan kredit, kerja sama dengan Balai Lelang dan KPKNL untuk penyelesaian/pelelangan agunan.
11. Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi
    Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi antara lain dilakukan melalui pembuatan Data Centre di gedung kantor pusat yang baru, pembenahan/standarisasi jaringan komunikasi data, upgrade infrastruktur ATM Chip, penambahan security (BSAVE) untuk keamanan dan monitoring akses ke C/B, pengembangan aplikasi CRC (Contact Respond Centre) untuk pendataan seluruh komplain dan tracking komplain, standarisasi sistem PABX untuk peningkatan efisiensi komunikasi antar kantor, pengembangan MIS dan Corporate University (e-learning).

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK

Bank Riau Kepri telah mentransparansikan informasi produk dan layanan Bank sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 tentang transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

Penerapan mengenai transparansi informasi produk Bank saat ini telah dapat diketahui nasabah melalui berbagai media komunikasi antara lain seperti :

1. Website Bank Riau Kepri (www.Bankriau.co.id)
2. Brosur/leaflet dan iklan
3. Pengumuman yang dipasang/ disebarkan di kantor-kantor Cabang Bank
4. Penjelasan lisan dari petugas frontliner Bank
   Secara khusus Bank masih belum memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan. Namun terkait mengenai kebijakan transparansi, Bank saat ini telah memiliki Ketentuan Direksi tentang Tranparansi produk Bank, sebagaimana tertuang di dalam SK Direksi No. 13/KEPDIR/2006 tanggal 01 Februari 2006 tentang Kebijakan Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah Bank Riau.

Untuk kebijakan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan melekat di masing-masing kewajiban pelaporan Bank, seperti laporan LBU, LHBU, Laporan tahunan dll.

Bank telah melakukan transparansi terhadap kondisi keuangan dan non keuangan kepada para Stakeholders termasuk laporan keuangan publikasi dan telah menyampaikan laporan tersebut kepada pihak-pihak terkait seperti Bank Indonesia/OJK dan para Stakeholders sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan dan non keuangan disesuaikan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank. Hal tersebut dilakukan dengan tepat waktu, dan lengkap sesuai yang dipersyaratkan di dalam ketentuan Bank Indonesia dan OJK.

Salah satu bentuk pengungkapan transaparansi kondisi keuangan Bank antara lain sebagai berikut :

1. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih, baik pada Bank maupun pada lembaga keuangan bukan Bank, Bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.
2. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali Bank.
3. Bank telah menyampaikan Laporan GCG tahun 2013 kepada Bank Indonesia, pihak independen sesuai ketentuan Bank Indonesia dan disajikan pada Home Page Bank Riau Kepri.

KEPEMILIKAN SAHAM DAN SHARES OPTION

Bank Riau Kepri merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang perBankan dengan kepemilikan saham dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Riau, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, pemerintah kota dan kabupaten yang berada di wilayah Riau dan Kepri.

Untuk periode sampai dengan 31 Desember 2014, anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank tidak memiliki saham pada Bank Riau Kepri, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan perusahaan lainnya yang berkedudukan baik di dalam maupun di luar daerah Propinsi Riau dan Kepulauan Riau.

Selama dan dalam periode tahun pelaporan 2014 Bank Riau Kepri tidak terdapat opsi untuk membeli saham oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank.

PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, bahwa yang di maksud dengan internal fraud adalah penyimpangan/ kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (honorer dan outsourcing) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan yaitu apabila dampak penyimpangannya lebih dari Rp 100.000.000 (Seratus juta rupiah).

Sepanjang tahun 2014 permasalahan penyimpangan internal yang indikasi kerugiannya lebih dari Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan telah dilaporkan ke Bank Indonesia terdapat 4 (empat) penyimpangan internal (internal fraud) yang terjadi di Bank Riau Kepri.

Jumlah penyimpangan internal dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah Kasus Yang Dilakukan :					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2013	Tahun 2014
Total Fraud	-	-	3	-	-	2
Telah diselesaikan	-	-	3	-	-	2
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-

PERMASALAHAN HUKUM

Jumlah permasalahan hukum yang dihadapi Bank dan telah diajukan melalui proses hukum, selama periode tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Permasalahan Hukum	Jumlah		
	PHI	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/Upaya Perdamaian)	-	-	1
Dalam proses penyelesaian	-	1	4
Total	-	1	5

Perkara Perdata

Sepanjang tahun 2014, terdapat 1 (satu) kasus perdata yang masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Dalam kasus tersebut Bank Riau Kepri sebagai Turut Tergugat dalam perkara gugatan antara Jondra Effendi sebagai Penggugat melawan Suwarno dkk sebagai Tergugat, dengan permasalahan terkait jual beli rumah antara penggugat dengan tergugat, dimana Penggugat sebagai konsumen yang membeli bangunan rumah tempat tinggal dari Tergugat seharga Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah). Penggugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Akta Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan. Terhitung sampai dengan batas waktu penyerahan sertifikat tanggal 08 Juli 2009 sampai dengan saat ini sertifikat tersebut belum diserahkan kepada Penggugat. Dari hasil pemeriksaan di Badan Pertanahan Nasional Pekanbaru diketahui bahwa sertifikat atas nama Tergugat (Suwarno) telah dipasangkan Hak Tanggungan pada Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pusat berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). Saat ini permasalahan tersebut masih dalam proses persidangan dan tinggal menunggu putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Perkara Pidana

Sepanjang tahun 2014 kasus perkara pidana yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/upaya perdamaian) adalah 1 (satu) kasus yaitu terkait laporan ahli waris alm. Katimin (dahulunya adalah debitur Bank) kepada pihak kepolisian mengenai tidak dibayarkannya klaim asuransi AJB. Bumiputera an. alm. Katimin sebesar Rp. 400.000.000,- . Saat ini ini perkara tersebut telah dihentikan oleh pihak kepolisian dengan telah diterbitkannya Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3).

Sedangkan untuk perkara pidana yang masih dalam proses adalah sebanyak 4 (empat) perkara, sebagai berikut :

1. Adanya dugaan tindak pidana korupsi pada pemberian kredit ke PT. Bukit Bais Faindo sebesar Rp.5 milyar. Saat ini perkara tersebut telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tipikor Pekanbaru dan telah diputuskan oleh Majelis Hakim. Terhadap putusan tersebut telah dilakukan upaya Banding di Pengadilan Tinggi Pekanbaru, dan hingga saat ini proses banding masih berjalan.
2. Adanya tindak pidana korupsi pada proses pemberian kredit kepada nasabah tanpa melalui prosedur semestinya

yang terjadi di Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan. Saat ini proses penyelidikan telah ditingkatkan ke tahap penyidikan melalui Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tembilahan No. Print-04/N.4.15/Fd.1/01/2014 tanggal 30 Januari 2014.

3. Adanya dugaan tindak pidana perbankan dalam pemberian kredit kepada PT. Lautan Mas Sejahtera sebesar Rp. 400.000.000,- pada tahun 2003. Atas dugaan tindak pidana perbankan tersebut pihak Kepolisian telah melakukan pemanggilan kepada beberapa pegawai Bank Riau Kepri untuk dilakukan pemeriksaan pada bulan Desember 2014.
4. Adanya dugaan tindak pidana perbankan atas penarikan uang nasabah Bank Riau Kepri Cabang Utama yang dilakukan oleh pegawai Kantor Cabang Utama. Saat ini kasus tersebut telah dilimpahkan berkas perkaranya kepada Kejaksaan Negeri Pekanbaru pada tanggal 8 April 2014.

BUY BACK SHARES DAN BUY BACK OBLIGASI BANK

Pada tanggal 8 Juli 2011, Bank menerbitkan Obligasi I Bank Riau Kepri tahun 2011 dengan nilai sebesar Rp. 500.000.000.000,- . Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal emisi sampai dengan tanggal jatuh tempo pada tanggal 8 Juli 2016. Tingkat bunga obligasi bunga tetap sebesar 10,4% pertahun dan ditawarkan sebesar 100% dari nilai nominal.

Wali amanat untuk penerbitan obligasi tersebut adalah PT Bank Mega, Tbk. Obligasi tersebut dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 11 Juli 2011 dan dinyatakan efektif berdasarkan surat Keputusan Bapepam-LK No. S-7298/BL/2011 pada tanggal 30 Juni 2011.

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Bank baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang Obligasi.

Sampai saat ini Bank belum pernah melakukan buy back shares dan buy back obligasi yang diterbitkan oleh Bank.

UNIT USAHA SYARIAH (UUS)

Dengan berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Riau Kepri berkomitmen dalam melaksanan GCG di seluruh aspek yang dimiliki dengan berlandaskan pada 5 prinsip dasar Good Corporate Governance. Dalam pelaksanaan GCG, perlu melakukan check and balance, menghindari benturan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas serta meningkatkan perlindungan bagi kepentingan stakeholders khususnya nasabah pemilik dana dan pemegang saham minoritas.

Penyusunan Laporan Pelaksanaan GCG ini disusun berdasarkan ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Sesuai ketentuan PBI No. 11/10/PBI/2009 tanggal 19 Maret 2009 perihal Unit Usaha Syariah, bahwasanya Jumlah anggota DPS sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang, dan DPS dipimpin oleh 1 (satu) orang yang ditunjuk dari anggota DPS. DPS PT. Bank Riau Kepri terdiri dari 2 (dua) orang yaitu Dr. H. Suryan Al Jamrah,MA (ketua) dan Drs. KH. Tengku Zulkarnain, MA (anggota). Kedua DPS tersebut diangkat pada tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia No.15/5/DPbS/PAdBS/Pbr dan Surat Rekomendasi DSN-MUI No.U-400/DSN-MUI/XI/2011. Berikut susunan DPS Bank Riau Kepri :

No	Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Surat Rekomendasi DSN-MUI	Surat Keputusan Bank Indonesia	Masa Jabatan
1.	Dr. H. Suryan Al Jamrah,MA	Ketua	SK Direksi PT. Bank Riau Kepri No.23/KEPDIR/2013	Surat No. U-400/DSN-MUI/XI/2011	Surat No. 15/5/DPbS/PAd BS/Pbr	sampai dengan 4 (empat) tahun terhitung tanggal 13 februari 2013
2.	Drs. KH. Tengku Zulkarnain, MA	Anggota	SK Direksi PT. Bank Riau Kepri No.23/KEPDIR/2013	Surat No. U-400/DSN-MUI/XI/2011	Surat No. 15/5/DPbS/PAd BS/Pbr	

Adapun masa Jabatan DPS selama 4 (empat) tahun terhitung tanggal 13 Februari 2013 sebagaimana tertuang dalam akta RUPSLB Nomor 19 yang dibuat dihadapan notaris REFIZAL,SH.,MHum dan Surat Keputusan Direksi Bank Riau Kepri No. 23/KEPDIR/2013 tanggal 26 Februari 2013.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Sesuai dengan PBI No. 11/10/PBI/2009 tanggal 19 Maret 2009 perihal Unit Usaha Syariah, tugas dan tanggung jawab DPS adalah sebagai berikut :

1. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh UUS;
2. Mengawasi proses pengembangan produk baru UUS sejak awal sampai dengan dikeluarkannya produk tersebut;
3. Memberikan opini syariah terhadap produk baru dan/atau pembiayaan yang direstrukturisasi;
4. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk UUS yang belum ada fatwanya;
5. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank; dan
6. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja UUS dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Pedoman Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Direksi Bank Riau Kepri telah menerbitkan SK Direksi Nomor 09/KEPDIR/2014 tanggal 11 Maret 2014 Tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Dewan Pengawas Syariah Bank Riau Kepri yang terdiri dari 5 (Lima) Bab dengan rincian sebagai berikut :

Bab I : Berisi mengenai pendahuluan dan latar belakang penyusunan, dasar hukum, serta pengertian-pengertian

Bab II : Berisi uraian mengenai DPS secara kelembagaan, menyangkut ketentuan mengenai kedudukan DPS, Persyaratan anggota DPS, tugas dan tanggung jawab DPS, mekanisme penetapan anggota DPS, jumlah dan perangkapan keanggotaan DPS, Rapat DPS, masa jabatan DPS, serta hak dan fasilitas anggota DPS dan ketentuan lainnya.

Bab III : Pedoman pengawasan dan tata cara pelaporan DPS, berisi tentang mekanisme pelaksanaan pengawasan DPS terhadap proses pengembangan produk baru dan terhadap kegiatan Unit Usaha Syariah serta tata cara pelaporan DPS.

Bab IV : Objek material pengawasan DPS, Berisi materi-materi bermuatan syariah dalam seluruh kegiatan operasional termasuk produk dan jasa

Unit Usaha Syariah dengan berpedoman kepada fatwa DSN-MUI dan sesuai prinsip-prinsip umum syaria.

Bab V : Lampiran-lampiran.

Selama tahun 2014 DPS Bank Riau Kepri telah melakukan aktifitas dan rapat yang merupakan realisasi dari tugas dan tanggung jawab DPS.

Opini dan Aktifitas Dewan Pengawas Syariah

Realisasi tugas dan tanggung jawab dalam hal menilai dan memastikan pemenuhan prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh UUS, DPS telah mengeluarkan pernyataan atas ketaatan UUS Bank Riau Kepri terhadap pelaksanaan prinsip syariah untuk laporan keuangan tahun buku 2013, pernyataan ini dilampirkan di Laporan Aktifitas DPS yang dilaporkan per semester pada tahun 2014. DPS juga menjawab Surat dari Akuntan Publik terkait kesesuaian UUS Bank Riau Kepri terhadap prinsip syariah.

Realisasi tugas dan tanggung jawab DPS dalam hal mengawasi proses pengembangan produk baru UUS sejak awal sampai dengan dikeluarkannya produk dan memberikan opini syariah dari pengeluaran produk tersebut adalah DPS telah ikut mengawasi selama proses pembuatan produk baru UUS dengan mengadakan rapat koordinasi antara Divisi Syariah dan Kantor Cabang Syariah.

Realisasi tugas dan tanggung jawab DPS dalam hal meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja UUS dalam rangka pelaksanaan tugasnya, UUS Bank Riau Kepri telah memenuhi semua permintaan data yang diminta oleh DPS, baik pada saat proses audit yang rutin ataupun permintaan yang bersifat insidentil.

Sesuai dengan PBI No. 11/10/PBI/2009 tanggal 19 Maret 2009 perihal Unit Usaha Syariah, tugas dan tanggung jawab DPS, Dimana DPS melakukan pengawasan terhadap Bank baik dalam hal dikeluarkannya produk baru maupun aktivitas baru, maka DPS dalam hal ini memberikan opini/pendapat terkait produk dan aktivitas tersebut, apakah telah sesuai dengan Prinsip Syariah. Adapun pendapat tersebut disampaikan dalam bentuk opini dan surat keterangan Dewan Pengawas Syariah sebagai berikut :

1. Opini Nomor 01/DPS-BRKS/I/2014 Tentang Kesesuaian Pelaksanaan Prinsip Syariah oleh Cabang dan Cabang Pembantu Syariah terutama tentang pembiayaan dan murabahah.
2. Opini Nomor 02/DPS-BRKS/VI/2014 Syariah Tentang Review biaya administrasi tabungan Sinar iB.
3. Opini Nomor 03/DPS-BRKS/VII/2014 Syariah Tentang Produk Deposit On Call (DOC)
4. Opini Nomor 04/DPS-BRKS/VII/2014 Syariah Tentang Imbalan Antar Kantor Syariah.

Dapat disampaikan juga DPS Bank Riau Kepri telah melaporkan laporan Semester hasil pengawasan DPS selama tahun 2014 secara tepat waktu ke Bank Indonesia yang juga diteruskan ke Direksi, Dewan Komisaris Bank Riau Kepri dan Dewan Syariah Nasional – MUI, hal ini sejalan dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Realisasi kegiatan yang telah disebutkan di atas, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel kegiatan DPS selama tahun 2014, berikut tabelnya :

NO	TANGGAL	AKTIVITAS DPS	TEMPAT	KETERANGAN
1	7-Jan-2014	DPS melakukan pemeriksaan terhadap KCPS Tembilahan.	KCPS Tembilahan	Anggota DPS dan Pinbag Pemasaran & Peng Bisnis (UUS)
2	16-Jan-2014	DPS melakukan pemeriksaan terhadap KCS Tg. Pinang.	KCS Tg.Pinang	Ketua DPS dan Pinbag Pemasaran & Peng Bisnis (UUS)
3	17 Jan 2014	DPS melakukan pemeriksaan terhadap KCPS Batam	KCPS Batam	Ketua DPS dan Pinbag Pemasaran & Peng Bisnis (UUS)
4	28 Jan 2014	DPS melakukan pemeriksaan terhadap KCPS Teluk Kuantan,	KCPS Teluk Kuantan	Anggota DPS dan Staf Operasional (UUS)
5	4 Feb 2014	DPS melakukan pemeriksaan terhadap KCPS Duri	KCPS Duri	Ketua DPS dan Pinbag Pemasaran & Peng Bisnis (UUS)
6	11 Feb 2014	DPS melakukan pemeriksaan terhadap KCS Pekanbaru	KCS Pekanbaru	Anggota DPS dan Pinbag Pemasaran & Peng Bisnis (UUS)
7	17 Feb 2014	DPS melakukan pemeriksaan terhadap KCPS Panam	KCPS Panam	Ketua DPS dan Pinbag Pemasaran & Peng Bisnis (UUS)
8	3 Maret 2014	DPS menghadiri Presentasi Rencana Bisnis Bank Riau Kepri Tahun 2014-2016 kepada OJK	Ruang Rapat Besar Lt.2 Kantor Perwakilan BI Prov. Riau	DPS
9	8 April 2014	DPS menghadiri Acara Silaturahmi dan Syukuran di PT. Bank Riau Kepri Cab. Syariah Pekanbaru	Kantor Cab. Syariah Pekanbaru	Ketua DPS
10	5-6 Mei 2014	Menghadiri Acara Workshop Spin Off PT. Bank Riau Kepri UUS	Hotel Grand Central Pekanbaru	Ketua DPS
11	7 Mei 2014	Kunjungan Ke Pondok Pesantren Gontor Putri Tujuh	Ponpes Gontor Putri Tujuh Pekanbaru	Ketua DPS, Pemimpin Divisi Syariah
12	9-10 Mei 2014	Menghadiri acara Lokakarya Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Pejabat Bank Syariah	Kampus LPPI Bumi Kemang Jakarta	Direktur Kredit dan Syariah, Ketua DPS dan Pimpinan Divisi Syariah
13	23 Mei 2014	Rapat Pembahasan Review Kebijakan Tabungan iB Sinar	Ruang DPS	Pemimpin Divisi Syariah, Pimpinan Bagian Divisi Syariah, Ketua DPS
14	22-24 Juni 2014	Mengikuti Seminar BPD Syariah 2014 yang diselenggarakan oleh Asbanda	Ruang Simpeda Kantor ASBANDA, Menara MTH Lt.8, Jakarta	Pemimpin Divisi Syariah dan Ketua DPS
15	21 Juni 2014	Menghadiri Acara MILAD ke- 10 beroperasinya Divisi Syariah PT. Bank Riau Kepri	Kantor Cabang Syariah Pekanbaru	Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Syariah
16	7 Juli 2014	DPS melakukan pemeriksaan terhadap KCPS Panam	KCPS Panam	Ketua DPS dan Pinbag Peng. Bisnis & Pemasaran Divisi Syariah
17	10 Juli 2014	DPS melakukan pemeriksaan terhadap KCS Pekanbaru	KCS Pekanbaru	Ketua DPS dan Pinbag. Operasional Divisi Syariah
18	14-16 Juli 2014	DPS melakukan pemeriksaan terhadap KCPS Tembilahan	KCPS Tembilahan	Ketua DPS dan Pinbag. Operasional Divisi Syariah
19	16-18 Juli 2014	DPS melakukan pemeriksaan terhadap KCPS Duri,	KCPS Duri	Ketua DPS dan Pinbag Peng. Bisnis dan Pemasaran
20	23 Juli 2014	DPS melakukan pertemuan dengan Divisi Syariah membahas Deposit on Call dan Imbalan Antar Kantor Syariah	Ruang DPS	DPS & Divisi Syariah
20	23-25 Juli 2014	DPS melakukan pemeriksaan terhadap KCPS Teluk Kuantan	KCPS Teluk Kuantan	Ketua DPS dan Pinbag. Operasional Divisi Syariah
21	4-8 Agst 2014	DPS melakukan pemeriksaan terhadap KCS Tg. Pinang dan KCPS Batam	KCS Tg. Pinang dan KCPS Batam	Ketua DPS dan Pinbag Peng. Bisnis dan Pemasaran

22	9 Okt 2014	DPS menghadiri dan menjadi narasumber di acara talkshow perbankan syariah di Gedung Engku Kelana yang dihadiri oleh Bupati Inhil	Tembilahan	Anggota DPS Pindiv UUS serta Staff UUS
23	13 Nov 2014	Ketua DPS membahas rencana pengawasan dan pemeriksaan untuk periode Juli-Desember ke Cabang&Capem Syariah	Ruang DPS	Ketua DPS dan Pinbag. Operasional
24	16 – 18 Des 2014	Menghadiri undangan Ijtima' Sanawi DPS & DSN-MUI	Jakarta	T. Zulkarnain (Anggota DPS)

Frekuensi Rapat

Dewan Pengawas Syariah PT. Bank Riau Kepri telah mengadakan dan mengikuti beberapa rapat terkait dengan pembahasan pengembangan produk, pengeluaran opini syariah, jasa Bank, Operasional Bank dan lain-lainnya yang berhubungan dengan aspek syariah. Di dalam ketentuan Bank Indonesia, rapat dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan.

Terhitung selama tahun 2014 DPS PT. Bank Riau Kepri telah mengikuti rapat intern dengan Manajamen UUS PT. Bank Riau Kepri dan Rapat ekstern dengan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) sebanyak 5 (lima) kali dan telah mengeluarkan opini syariah sebanyak 4 (empat) opini terkait Produk baru dan pengembangan produk yang telah ada di UUS PT. Bank Riau Kepri di Tahun 2014.

Berikut tabel frekuensi Rapat DPS selama tahun 2014 :

Nama	Tingkat Kehadiran		Total Kehadiran
	Rapat Intern dengan PT. Bank Riau Kepri (4 Rapat)	Rapat Ekstern dengan DSN-MUI (1 Rapat)	
Dr.H.Suryan Al Jamrah	3	0	3
Drs.KH.Tengku Zulkarnain,MA	1	1	2

Berikut rincian rapat yang diikuti oleh DPS selama tahun 2014 :

NO	TANGGAL	AKTIVITAS DPS	TEMPAT	KETERANGAN
1	3 Maret 2014	DPS menghadiri Presentasi Rencana Bisnis Bank Riau Kepri Tahun 2014-2016 kepada OJK	Ruang Rapat Besar Lt.2 Kantor Perwakilan BI Prov. Riau	DPS
2	23 Mei 2014	Rapat Pembahasan *Review* Kebijakan Tabungan iB Sinar	Ruang DPS	Ketua DPS, Pemimpin Divisi Syariah, Pimpinan Bagian Divisi Syariah, Staff
3	23 Juli 2014	Rapat Pembahasan Opini Deposit On Call iB	Ruang DPS	Ketua DPS, Pemimpin Divisi Syariah, Pimpinan Bagian Divisi Syariah, Staff
4	13 November 2014	Ketua DPS rapat membahas rencana pengawasan dan pemeriksaan untuk periode Juli-Desember ke Cabang&Capem Syariah	Ruang DPS	Ketua DPS dan Pinbag. Operasional
5	16 – 18 Desember 2014	Menghadiri undangan Ijtima' Sanawi DPS & DSN-MUI	Jakarta	T. Zulkarnain (Anggota DPS)

Remunerasi dan Fasilitas Lainnya DPS

Remunerasi yang dimaksud adalah penghasilan dalam bentuk keuangan (non natura) antara lain gaji, tunjangan (benefit), kompensasi dalam bentuk saham, bonus dan bentuk remunerasi lainnya.

Fasilitas lain yang dimaksud adalah fasilitas yang diterima tidak dalam bentuk keuangan (natura), antara lain fasilitas perumahan, fasilitas transportasi, fasilitas asuransi kesehatan, fasilitas telekomunikasi, dan fasilitas lainnya, yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki.

Berikut tabel Remunerasi dan Fasilitas Lainnya DPS Bank Riau Kepri :

No	Jenis Remunerasi dan Fasilitas lainnya	Jumlah diterima dalam 1 (satu) tahun	
		Orang	Jutaan Rupiah
1.	Remunerasi	2	Rp. 477,428,781,-
2.	Fasilitas lainnya :	-	-
	a. Yang dapat dimiliki	-	-
	b. Yang tidak dapat dimiliki	-	-
		TOTAL	Rp. 477,428,781,-

Jumlah anggota DPS Bank Riau Kepri yang menerima remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, sebagaimana tabel di bawah ini :

Jumlah Remunerasi *) per orang dalam 1 tahun	Jumlah Dewan Pengawas Syariah
di atas Rp. 2 miliar	-
di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2 miliar	-
di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	-
Rp. 500 juta ke bawah	2

*) yang diterima dalam bentuk keuangan (non natura)

Jumlah Penyimpangan (Internal Fraud) dan Permasalahan Hukum Yang Terjadi

Tidak terdapat penyimpangan (internal fraud) yang terjadi pada UUS Bank Riau Kepri selama tahun 2014.

Yang dimaksud dengan "permasalahan hukum" adalah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi UUS selama periode tahun 2014 dan telah diajukan melalui proses hukum. Untuk pengertian permasalahan hukum sebagaimana yang disebut diatas tidak ada / tidak terjadi pada UUS Bank Riau Kepri selama tahun 2014.

Pendapatan Non Halal Dan Penggunaannya

Pendapatan non halal yang dimaksud adalah pendapatan yang didapatkan dari usaha berbasis bunga (ribawi) atau bertentangan dengan prinsip syariah. Contoh dari pendapatan ini adalah pendapatan bunga dari penempatan dana antar Bank pada Bank Konvensional.

Unit Usaha Syariah Bank Riau Kepri selama tahun 2014 tidak ada memiliki pendapatan dari pendapatan non halal sebagaimana dimaksud di atas.

Penggunaan Konsultan atau Penasehat

Pada tahun 2014 UUS Bank Riau Kepri tidak menggunakan jasa Konsultan, Penasihat ataupun yang dipersamakan dengan itu untuk program atau operasional apapun yang ada di UUS PT. Bank Riau Kepri.

CORPORATE SECRETARY

Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. 63 tahun 1996 Peraturan Nomor IX.I.4, maka keberadaan Corporate Secretary merupakan perpanjangan fungsi Direksi dalam menjalankan fungsi komunikasi, yaitu untuk memastikan kelancaran komunikasi antara perusahaan dengan pemangku kepentingan, serta menjamin tersedianya informasi yang boleh

diakses oleh stakeholders sesuai dengan kebutuhan yang wajar dari stakeholders. Disamping itu, Corporate Secretary Bank Riau Kepri mengemban misi menciptakan citra baik perusahaan secara konsisten dan berkesinambungan melalui pengelolaan strategi dan program komunikasi yang efektif kepada segenap pemangku kepentingan.

Atas dasar tersebut, melalui Surat Keputusan Direksi No.99/KEPDIR/2010 tanggal 29 Oktober 2010, maka telah dilakukan perubahan struktur organisasi dan tata kerja perusahaan dengan membentuk Divisi Hukum dan Corporate Secretary, dibawah Direktur Supervisi, Direktur Kepatuhan dan Managemen Risiko. Sebagaimana fungsinya, Divisi Hukum dan Corporate Secretary membidangi kegiatan Public Relation, Investor Relations, dan hukum/legal dengan fungsi dan tugas yang saling membantu.

Tugas dan tanggungjawab

Tugas dan tanggungjawab Corporate Secretary Bank Riau Kepri serta seluruh unit pendukung telah diatur dalam Surat Keputusan Direksi No.99/KEPDIR/2010 tanggal 29 Oktober 2010 dengan tugas pokok yakni:

1. Bertanggung jawab terselenggaranya hubungan dengan berbagai media secara sinergis, efektif dan efisien.
2. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan media komunikasi perusahaan.
3. Penyelesaian Annual Report sesuai ketentuan, peraturan, dan batas waktu yang ditetapkan.
4. Sebagai pelaksana tugas sekretaris perusahaan secara efektif dan efisien.
5. Menjalankan fungsi Compliance Officerdenganmengikuti perkembangan pasar dan kondisi eksternal Bank Riau Kepri, khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang PerBankan.
6. Sebagai mediator antara manajemen kepada pegawai, dan direksi kepada komisaris.
7. Sebagai mediator atau perwakilan antara Bank Riau Kepri dengan lembaga atau institusi eksternal.
8. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham .

Fungsi Public Relation

Corporate Secretary berfungsi sebagai salah elemen perusahaan dalam memenuhi tanggung jawab menjebatani komunikasi antara perusahaan dan masyarakat, serta stakeholders. Dengan strategi komunikasi perusahaan yang baik, maka interaksi antara perusahaan dengan stakeholders akan berjalan baik, sehingga memberi dampak postif bagi pengembangan perusahaan.

Dalam pelaksanaannya, Corporate Secretary Bank Riau Kepri menerapkan strategi komunikasi yang dibagi menjadi dua bagian, yakni: komunikasi Eksternal dan Internal.

1. Komunikasi Eksternal

   Komunikasi Eksternal adalah jaringan komunikasi antara Bank denga publik luar, dengan memastikan terjalin kesepahaman bersama guna mendukung kebijakan perusahaan.

   Untuk tahun 2014, Corporate Secretary Bank Riau Kepri menerapkan strategi ini dengan melakukan beberapa program, diantaranya :

   a. Komunikasi Tatap Muka:
      - Media Gathering yang melibatkan rekan-rekan Pers;
      - Cafe morning dengan rekan-rekan Pers dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
      - Seminar bersama praktisi dan akademisi bidang pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan, dan lingkungan.

   a. Komunikasi via Media :
      - Update berita dan informasi Bank Riau Kepri di halaman website www.bankriaukepri.co.id;
      - Merilis setiap kegiatan yang disebarkan ke media-media di Koran;
      - Membuka komunikasi di facebook;
      - Membuka komunikasi di twitter;
      - Membuka komunikasi e-mail.

2. Kumunikasi Internal

   Komunikasi Internal adalah jaringan komunikasi antara Bank denga publik internal, seperti: karyawan, keluarga karyawan, rekanan, anggota koperasi, dan dana pensiun. Mengingat publik internal merupakan salah satu elemen penting dalam penciptaan citra perusahaan, Corporate Secretary memiliki tugas menyebarluaskan informasi mengenai Bank Riau Kepri kepada publik internal, termasuk menyampaikan program dan kebijakan manajemen. Informasi tersebut disampaikan melalui media internal antara lain penerbitan majalah internal "Xcellence", forum intranet, portal intranet "Corporate University (e-learning)", temu pegawai, serta sosialisasi ke kantor wilayah dan cabang guna memberikan informasi kepada seluruh pegawai Bank tentang berbagai kegiatan perusahaan serta informasi penting lainnya seperti SK Direksi, PBI, SOP dan lain-lain yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari.

Fungsi Investor Relations

Fungsi Investor Relation adalah pemenuhan informasi, data, kondisi, dan perkembangan perusahaan kepada stakeholders, yakni pemegang saham dan pemilik rekening obligasi. Dengan fungsi ini, para investor dapat dengan mudah mengambil keputusannya, karena setiap keputusan sangat dipengaruhi oleh kualitas dan ketepatan waktu (timeliness) dari informasi yang diterimanya. Corporate Secretary Bank Riau Kepri dapat membantu memastikan informasi material tersampaikan kepada investor pada waktu yang tepat.

Salah satu bentuk praktik investor relations adalah penyiapan Laporan Tahunan (Annual Report), neraca publiksi, penyelenggaraan RUPS dan RUPS Luar Biasa. Hubungan dengan stakeholders, khususnya para investor, dilakukan melalui kegiatan temu analis, paparan publik, penerbitan buletin kinerja keuangan triwulanan, penerbitan laporan keuangan triwulanan, tengah-tahunan dan tahunan. Pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya juga dapat mengakses informasi mengenai Bank Riau Kepri dan kegiatannya di situs web, www.bankriaukepri.co.id.

Fungsi Corporate Legal

Fungsi Corporate Legal adalah kepastian hukum atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepastian hukum merupakan prasyarat mutlak bagi kelangsungan hidup perusahaan. Kepercayaan investor sangat ditentukan dari hal ini. Disinilah peranan penting bagian hukum (Corporate Legal) Divisi Hukum dan Corporate Secretary. Selain menjalankan tugasnya seperti biasanya yakni memberikan bantuan hukum, hal terpenting lainnya adalah memastikan segala pelaksanaan program kebijakan perusahaan khususnya yang berhubungan stakeholders tidak terkendala dengan masalah hukum yang dapat mengganggu citra dan kepercayaan mereka.

Struktur Organisasi Divisi Hukum dan Corporate Secretary

Untuk struktur organisasi Divisi Hukum dan Corporate Secretary, tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, dimana sesuai dengan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Nomor 79/KEPDIR/2008 tanggal 25 Juni 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Riau, berikut perubahan-perubahannya dan terakhir diubah berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 69/KEPDIR/2013 tanggal 31 Juli 2013 tentang Perubahan Ketiga Keputusan Direksi Nomor 79/KEPDIR/2008 tanggal 25 Juni 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Riau, ditetapkan bahwa Divisi Hukum dan Corporate Secretary berada di bawah Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

Kegiatan di tahun 2014

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Corporate Secretary selama tahun 2013, dalam fungsinya terhadap stakeholders antara lain:

1) Kegiatan rutin media gathering yang melibatkan rekan-rekan Pers;
2) Melaksanakan berbagai event dalam rangka membangun citra positif Bank Riau Kepri, antara lain:
   a. Acara UMKM Award 2014;
   b. Mengikuti pameran property;
   c. Mengikut Pameran Riau Expo 2014,
3) Mengadakan berbagai acara terkait dengan program Corporate Social Responsibility (CSR) antara lain:
   a. Kegiatan keagamaan;
   b. Kegiatan pendidikan;
   c. Kegiatan sosial;
   d. Kegiatan kesehatan masyarakat;
   e. Kegiatan kepemudaan dan olah raga;
   f. Kegiatan lingkungan;
   g. Kegiatan seni dan budaya;

CODE OF CONDUCT BANK RIAU KEPRI

Pengaturan Code of Conduct Bank Riau Kepri telah diatur di dalam Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Good Corporate Governance, Buku IV (Code of Conduct).

Di dalam Buku IV (Code of Conduct) Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Good Corporate Governance Code of conduct Bank Riau Kepri yang terdiri dari:

1. PILAR BISNIS BANK RIAU KEPRI
2. STANDAR ETIKA KERJA

Penjabaran Code of conduct tersebut adalah sebagai berikut :

a. PILAR BISNIS BANK RIAU KEPRI:

1. Kami Sajikan Mutu

   Kegiatan Operasional Bank dituntut untuk melakukan aktivitas kegiatan sehari-hari yang harus senantiasa berfokus pada mutu dengan kata lain adalah, setiap insan Bank Riau Kepri senantiasa memenuhi kebutuhan dan harapan customer, baik internal customer maupun eksternal customer.

2. Kami Bekerja Profesional

Dalam setiap aktifitas operasional bank, setiap insan Bank Riau Kepri dituntut untuk mengerti hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawabnya. Hal tersebut penting sehingga masing-masing pegawai mampu melaksanakan tugas secara professional. Untuk itu itu seorang pegawai harus memiliki KAS (Knowledge, Attitude, dan Skill).

3. Kami Bertekad Mewujudkan Good Corporate Governance

Good Corporate Governance merupakan tata kelola perusahaan yang baik dalam rangka memberikan nilai yang terbaik bagi para stakeholder. Di dalamnya terkandung 5 prinsip yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, Fairness (T-A-R-I-F). Setiap Pegawai dalam melakukan aktivitas sehari-hari senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip dasar good corporate governance sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Dengan melaksanakan prinsip-prinsip tersebut diharapkan akan terjadi proses check and balance.

4. Kami Menjaga Semangat Kebersamaan

Setiap insan Bank Riau Kepri harus menjaga rasa kebersamaan, meliputi kebersamaan dalam tempat berkarya, kesamaan pandang mengenai visi dan misi, dan kebersamaan dalam jiwa sebagai insan Bank.

5. Kami Menghargai Peranan Dan Prestasi Pegawai

Keberhasilan pencapaian kinerja Bank Riau Kepri harus dipandang sebagai hasil kerja kolektif seluruh pegawai dan unit kerja. Penghargaan harus diberikan kepada pegawai yang berprestasi sesuai dengan kontribusinya kepada perusahaan.

b. STANDAR ETIKA KERJA :

1. Menjaga nama baik perusahaan

Bisnis perbankan adalah bisnis kepercayaan. Oleh karena itu setiap pegawai harus bersikap jujur, bersikap terbuka, dan taat pada sistem dan prosedur yang berlaku. Pegawai dalam tugasnya harus menjaga nama baik dan reputasi Bank, dengan tidak melakukan hal-hal yang dapat merusak citra Bank baik yang dilakukan di dalam maupun diluar Bank.

2. Menjaga hubungan baik antar pegawai

Pegawai dalam pekerjaannya harus saling berkomunikasi dan saling berinteraksi serta saling memberikan masukan yang bersifat positif, guna terciptanya hubungan yang harmonis dalam setiap tugas dan pekerjaannya.

Agar suasana kerja menjadi positif dan kondusif maka setiap pegawai harus menjauhkan diri dari :

- Penekanan
- Penghinaan
- Pelecehan
- Provokasi
- Persaingan tidak sehat

3. Menjaga kerahasiaan Bank

Setiap pegawai tidak melakukan :

- Tidak memberikan data nasabah
- Tidak membocorkan rahasia perusahaan
- Menyalahgunakan rahasia perusahaan untuk kepentingan pribadi/politik.

4. Menjaga Dan Menggunakan Harta Benda Perusahaan Dengan Benar

Setiap pegawai baik di dalam maupun diluar Bank tidak melakukan hal-hal sbb :

- Tidak menggunakan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi.
- Tidak menggunakan aset perusahaan untuk kepentingan politik dan pihak ketiga lainnya
- Menjaga dan mengamankan aset perusahaan

5. Menjaga Keamanan Kerja Dan Kebersihan Lingkungan Kerja

Setiap pegawai dalam bekerja harus :

- Mengamankan lingkungan kerja termasuk harta, data, dan transaksi perusahaan.
- Tidak melakukan pelanggaran hukum.
- Tidak membocorkan rahasia perusahaan
- Tidak melakukan kegiatan yang melanggar norma agama, etika, dan kesusilaan

6. Melakukan Pencatatan Data Perusahaan Dan Penyusunan Laporan Dengan Baik Dan Benar

Pegawai dalam setiap pekerjaannya harus melakukan :

- Kebenaran data keuangan, transaksi, akuntansi, kepegawaian, kekayaan.
- Penggantian/pembebanan biaya dengan back up dokumen.
- Menyusun laporan dan bertanggung jawab atas kebenaran isi laporan

7. Menghindari Terjadinya Konflik Kepentingan Pribadi

Pegawai tidak melakukan investasi dan penanaman modal di perusahaan yang memiliki transaksi bisnis dengan Bank Riau Kepri. Guna menghindari konflik kepentingan pribadi, setiap rangkap jabatan yang dilakukan oleh pegawai

terlebih dahulu disetujui oleh Bank Riau Kepri

8. Menghindarkan Diri Dari Penyuapan
   Setiap pegawai dilarang memberikan maupun menerima suap dalam cara dan bentuk apapun.
9. Tidak Memanfaatkan Posisi Untuk Kepentingan Pribadi (Insider Trading)
   Setiap pegawai dilarang memanfaatkan jabatan dan posisi serta wewenang yang telah diberikan kepadanya untuk mengambil keuntungan dalam rangka memperkaya diri sendiri, atau dengan jabatan dan posisi serta wewenang yang telah diberikan kepadanya tersebut dipergunaka untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
10. Tidak Menerima Imbalan Dan Cindera Mata
    Setiap pegawai Bank Riau Kepri dilarang untuk menerima imbalan dalam bentuk apapun untuk memperkaya diri dan keluarganya.

c. Keberadaan, Tujuan dan Penerapan Code of Conduct
   Tujuan utama Code of Conduct Bank Riau Kepri ini adalah sebagai acuan bagi seluruh pegawai dalam menjalankan operasional Bank dan dalam menjalin hubungan dengan seluruh pihak-pihak luar yang terkait. Di samping sebagai acuan bagi seluruh pegawai, Code of Conduct Bank Riau Kepri membantu menunjukkan komitmen perusahaan untuk mengimplementasikan GCG, juga membantu percepatan implementasi internal karena memberikan kontrol yang semakin ketat dari pihak eksternal terhadap Bank.

   Dengan adanya Code of Conduct Bank Riau Kepri ini diharapkan seluruh pegawai dan manajemen Bank senantiasa berlaku jujur dan sadar akan tanggung jawabnya dalam mengemban tugasnya masing-masing, sehingga perusahaan dapat terhindar dari praktek-praktek yang dapat diartikan sebagai pelanggaran hukum dan penyimpangan dari norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dengan berperilaku yang bertanggung-jawab yang diperlihatkan dan dibuktikan oleh para pegawai, maka akan menghasilkan citra baik perusahaan. Hal ini akan menjadi faktor penting agar tetap eksis dan dihargai oleh masyarakat.

   Guna menginplemenatsikannya, maka Code of Conduct Bank Riau Kepri ini setiap bulannya dipublikasikan kepada seluruh karyawan melalui email di milist karyawan@bankriau.co.id dengan tambahan pembahasan yang lebih praktis oleh Divisi Kepatuhan, agar selalu dipatuhi dan diamalkan oleh seluruh pegawai Bank Riau Kepri. Namun, jika hal ini dilanggar, maka pelanggaran tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank Riau Kepri.

d. CODE OF CONDUCT DALAM IMPLEMENTASI GCG BANK RIAU KEPRI

   Good Corporate Governance (GCG) diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan. Dalam pelaksanaan GCG di Bank Riau Kepri, penting bagi bank untuk melakukan pentahapan yang cermat berdasarkan analisis atas situasi dan kondisi bank, dan tingkat kesiapannya, sehingga penerapan GCG dapat berjalan lancar dan mendapatkan dukungan dari seluruh unsur di dalam bank.

   Pengaturan dan implementasi GCG di Bank Riau Kepri harus memerlukan komitmen dari top management dan seluruh jajaran organisasi. Pelaksanaannya dimulai dari penetapan kebijakan dasar (strategic policy) dan kode etik yang harus dipatuhi oleh semua pihak dalam perusahaan, kepatuhan terhadap kode etik diwujudkan dalam satunya kata dan perbuatan, merupakan faktor penting sebagai landasan penerapan GCG.

   Dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan berkesinambungan serta terintegrasi dalam penerapan Code of Conduct yang konsisten, diharapkan mampu :
   - Meningkatkan kinerja Bank dengan menerapkan GCG dalam segala kegiatan Bank sejalan dengan visi, misi, dan rencana strategi usaha yang telah ditetapkan Bank.
   - Menjaga agar kegiatan operasional dan non operasional Bank mematuhi peraturan internal dan eksternal Bank, serta perundangan yang berlaku.
   - Meningkatkan pertanggungjawaban dan memberikan nilai tambah Bank kepada Stakeholders.
   - Memperbaiki budaya kerja Bank.
   - Mengelola sumber daya Bank secara lebih amanah.
   - Mendorong dan mendukung pengembangan Bank serta mengubah budaya kerja dan budaya perusahaan yang lebih baik.

MEDIA PENYEBARAN DAN AKSES INFORMASI

Dalam era serba teknologi yang berkembang sangat cepat sekarang ini, akses informasi dan data perusahaan sangatlah

dibutuhkan. Oleh karena itu, bank membutuhkan media yang tepat untuk dapat melaporkan dan menginformasikan data, kegiatan, dan aktifitas perusahaan kepada publik secara cepat dan mudah. Tidak hanya itu, Bank Riau Kepri selalu memegang teguh prinsip transparansi dalam menyampaikan informasi kepada stakeholder. Untuk itu, Bank RiauKepri menyediakan saluran akses informasi dan data perusahaan kepada publik, melalui:

1. Media Komunikasi Eksternal
   Untuk menyampaikan dan menyebarkan informasi serta akses informasi kepada publik eksternal, maka Bank Riau Kepri menyediakan beberapa media yang dapat diakses langsung diantaranya:
   - Website: www.bankriaukepri.co.id
   - Brosur
   - Halaman Media Massa
   - Facebook: bankriaukepri1
   - twitter: @bankriaukepri1
   - Majalah Excellence
   - Call Center: (071) 37050 ext:0 (Via Operator)

2. Media Kominukasi Internal
   Untuk menyampaikan dan menyebarkan informasi serta akses informasi kepada publik internal, maka Bank Riau Kepri menyediakan beberapa media yang dapat diakses langsung diantaranya:
   - Intranet/ Corporate University
   - Forum Chating
   - Milis
   - Black Berry Messages Group



KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GCG.

Dengan diterbitkannya Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) sebagai bentuk perubahan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Bank diwajibkan melaksanakan Self Assessment terhadap penerapan GCG. Pelaporan penilaian sendiri (self assessment) pelaksanaan GCG dilakukan secara berkala sesuai dengan periode penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum (TKB) yaitu periode Juni dan Desember setiap tahunnya.

Untuk laporan penilaian sendiri (Self Assessment) Bank dalam rangka laporan pelaksanaan GCG tahun 2014 di susun sesuai dengan format sebagaimana lampiran IV Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bagi Bank Umum, sebagai berikut :

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG		
Peringkat		Definisi Peringkat
Individual	3	Pelaksanaan dan penerapan Good Corporate Governance di Bank secara umum cukup baik, hal ini tercermin dari telah dipenuhinya beberapa prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam kegiatan operasional Bank. Namun secara keseluruhan penerapan GCG di Bank Riau Kepri perlu mendapat perhatian yang serius dari manajemen Bank, mengingat masih terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan baik di dalam Governance Structure, Governance Proses maupun pada Governance Outcome. Kelemahan dan kekurangan tersebut tergambar di dalam beberapa aspek sebagaimana diuraikan pada analisis di bawah ini.
Analisis		
Untuk periode laporan GCG tahun 2014, Bank telah melakukan self assessment (penilaian sendiri) terhadap penerapan Good Corporate Governance yang secara umum cukup baik, hal ini tercermin dari pemenuhan atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang termuat di dalam Governance Structure, Governance Proses maupun pada Governance Outcome. Namun dari proses pelaksanaan penerapan GCG di Bank tersebut masih terdapat kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi pelaksanaan penerapan Good Corporate Governance sepanjang periode laporan di atas yang dinilai cukup signifikan, antara lain :		
	1.	Bank masih belum memiliki Direktur Utama dan Komisaris Utama yang defenitif sebagaimana yang telah diatur di dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOT).
	2.	Kekosongan Direktur Utama dan Komisaris Utama tersebut mengakibatkan kurang efektifnya proses pengambilan keputusan oleh manajemen, hal ini dibuktikan dengan adanya hambatan dalam pengambilan keputusan yang menjadi kewenangan Direktur Utama.
	3.	Tidak berjalannya fungsi dan kewenangan Direktur Utama Bank mengakibatkan pelaksanaan tugas Direktur Utama dilaksanakan secara bersama-sama oleh seluruh Direksi Bank yang ada.
	4.	Mengingat Direksi secara bersama-sama menjalankan fungsi dan kewenangan Direktur Utama Bank, maka pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing Direktur Bank menjadi bertambah.
	5.	Masih terdapat pelanggaran yang dilakukan pegawai terhadap ketentuan internal Bank di sepanjang periode laporan, meskipun pegawai yang bersangkutan telah mengetahui ketentuan dan kebijakan tersebut dan mendapatkan pelatihan yang memadai.
Terhadap kelemahan-kelemahan yang terjadi di dalam pelaksanaan penerapan Good Corporate Governance Bank, manajemen saat ini telah memberikan perhatian yang cukup untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan tersebut, dengan melakukan :		
	1.	Bank beberapa kali telah melakukan RUPS untuk menetapkan Direktur Utama dan Komisaris Utama Bank sebagaimana tertuang di dalam akta RUPS Nomor 02 tanggal 01 Juni 2014 dan terakhir pada RUPS lanjutan yang diadakan pada tanggal 08 Nopember 2014, RUPS menyetujui dan menetapkan calon :

		a.	Direktur Utama Bank yaitu sdr. Irvandi Gustari dan Sonni Triandalarso. Hasil keputusan tersebut akan di sampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk dilakukan fit and proper test.
		b.	Untuk calon Komisaris Utama RUPS tanggal 08 Nopember 2014 telah menetapkan HR Mambang Mit merupakan calon Komisaris Utama untuk diajukan ke OJK dalam rangka pelaksanaan fit and proper test.
	2.		Terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai, manajemen telah melakukan pemeriksaan terhadap pegawai yang bersangkutan dan selanjutnya akan diproses dan diberi sanksi sesuai ketentuan Bank yang berlaku. Selain itu untuk meminimalisir munculnya pelanggaran-pelanggaran yang serupa, Bank secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada pegawai mengenai ketentuan dan kebijakan Bank yang berlaku.
Penetapan peringkat hasil penilaian sendiri (self assessment) pelaksanaan penerapan GCG di atas, dihasilkan dengan pertimbangan meliputi governance structure, governance process dan governance outcome.			
Untuk governance structure, secara umum kelengkapan struktur Direksi Bank telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya UU Perseroan Terbatas, namun sesuai ketentuan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Bank, terdapat organ Direksi Bank yang belum terpenuhi (diisi) yaitu Direktur Utama.			
Untuk struktur dan pelaksanaan tugas serta wewenang Dewan Komisaris dan beberapa Komite yang mendukung tugas dan fungsi Dewan Komisaris dinilai telah terpenuhi secara memadai meskipun Komisaris Utama belum ada.			
Bank telah memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang jelas untuk masing-masing struktur organisasi, yang termuat di dalam Kebijakan Direksi tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Bank.			
Untuk Governance Process, secara umum struktur dan infrastruktur tata kelola Bank yang ada mampu melaksanakan penerapan fungsi kepatuhan Bank meskipun hasilnya belum maksimal.			
Selama proses pemenuhan kelengkapan struktur Direksi (Direktur Utama), Bank telah menetapkan bahwa tugas dan fungsi Direktur Utama dilaksanakan oleh Direksi yang ada. Akibat belum dipenuhinya kelengkapan struktur Direksi tersebut, mengakibatkan kurang efektifnya proses pengambilan keputusan oleh manajemen yang terhambat karena belum lengkapnya Direksi Bank, hal ini dibuktikan dengan adanya hambatan dalam pengambilan keputusan yang menjadi kewenangan Direktur Utama.			
Dengan dilengkapinya struktur organisasi Bank yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik untuk struktur Direksi maupun Dewan Komisaris dan beberapa Komite yang mendukung tugas dan fungsi Dewan Komisaris, diharapkan kedepan pelaksanaan penerapan Good Corporate Governance Bank dapat dipenuhi dengan baik.			
Untuk Governance Outcome struktur dan infrastruktur tata kelola Bank yang ada mampu memberikan outcome yang cukup baik bagi Bank terlihat dari adanya peningkatan laba perusahaan, efisiensi dan permodalan Bank.			





TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PROGRAM (CSR)

PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

"Keberhasilan mencatat kinerja cemerlang, tidak menutup kewajiban perusahaan terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan sekitar. Dengan Program CSR Bank Riau Kepri menjadi bentuknya kepedulian seluruh insan di Bank Riau Kepri".

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Tanggung jawab perusahaan tersebut dituangkan dalam bentuk kepedulian Bank Riau Kepri dengan menyediakan dana bagi kepentingan pembangunan manusia (people) dan lingkungan (environment) secara berkelanjutan berdasarkan prosedur (procedure) yang tepat dan profesional.

Program Bantuan Kemasyarakatan (Corporate Social Responsibility/CSR) bertujuan untuk mendorong budaya kerja perusahaan yang lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan aktivitas bisnis, sehingga pada akhirnya dunia usaha akan dapat bertahan secara berkelanjutan untuk mencapai tujuan perusahaan. Secara eksternal, program CSR diharapkan dapat membentuk dan menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan, dengan menciptakan dan melibatkan semangat sinergi dari semua pihak secara terus menerus dalam bidang sosial, ekonomi dan lingkungan yang lebih sejahtera dan mandiri. Dimana pelaksanaannya tetap fokus pada ke-4 pilar Bank Riau Kepri.

Di tahun 2014, Bank Riau Kepri telah menyalurkan dana bantuan sebesar Rp2.617juta untuk program Corporate Social Responsibility(CSR)nya, yang rinciannya dapat dilihat didalam laporan ini. Program CSR Bank Riau Kepri dilaksanakan dalam dua bentuk program, yakni: Program Bantuan Kemitraan dan Program Bantuan Kemasyarakatan. Kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) yang dijalankan Bank Riau Kepri di tahun 2013 tetap fokus pada 4 pilar utama yakni: 1.Sosial Kemasyarakatan, yang terdiri dari: Bantuan Pendidikan, Bantuan Keagamaan, Bantuan Kesehatan, Bantuan Kepemudaan dan Olahraga, Bantuan Seni dan Budaya, Bantuan Kegiatan Sosial, 2. Lingkungan Hidup, 3. Ketenaga Kerjaan/Keselamatan Kerja, 4. Perlindungan Nasabah.

Melalui Program CSR Bank Riau Kepri yang difokuskan pada 4 pilar utama tersebut, tentunya dapat mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Riau dan Kepri. Bank Riau Kepri percaya bahwa dengan melakukan hal yang baik, bagi masyarakat sekitar adalah bagian dari investasi untuk mendukung perusahaan tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

A. LANDASAN HUKUM PROGRAM CSR BANK RIAU KEPRI

Landasakan hukum sebagai dasar pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility/CSR Bank Riau Kepri adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas Pasal 74 ayat (1) yang berbunyi: "…Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan…"

B. VISI MISI

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility/CSR Bank Riau Kepri, maka hal tersebut termaktub dalam visi dan misi sebagai berikut:





C. PRINSIP PENGELOLAAN

1) Accountability yaitu pencapaian sasaran baik kejelasan fungsi, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban di dalam pengelolaan dana maupun manfaat dari program Corporate Social Responsibility agar dapat terlaksana secara efektif.
2) Transparancy yaitu segala proses pengambilan keputusan dalam mengemukakan ketentuan dan informasi baik tata cara, evaluasi, dan penetapan sasaran terbuka bagi pemegang saham dan seluruh stakeholder.
3) Responsibility yaitu kesesuaian dalam tanggung jawab pengelolaan program Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap peraturan yang berlaku.

REALISASI PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) BANK RIAU KEPRI TAHUN 2014

Pelaksanaaan Program Corporate Social Responcibility (CSR) di Bank Riau Kepri dilaksanakan dalam dua bentuk program, yakni: Program Bantuan Kemasyarakatan dan Program Bantuan Kemitraan.

A. REALISASI KEGIATAN & ANGGARAN PROGRAM KEMITRAAN

Program Kemitraan adalah program tanggung-jawab moral Bank Riau Kepri terhadap masyarakat yang bersinergi dengan program pemerintah daerah dalam memperhatikan perkembangan atau pembangunan di daerah yang sejalan dengan 4 pilar Bank Riau Kepri.

Realisasi Kegiatan Program Kemitraan Per 31 Desember 2014, PT. Bank Riau Kepri menyalurkan dana dalam bentuk Program Kemitraanyang bekerjasama dan sejalan dengan kebutuhan pemerintah daerah yakni dalam bentuk pengadaan fasilitas umum seperti mobil ambulance, mobil operasional, dan lainnya.

Realisasi Anggaran Program Kemitraan pada tahun 2014 tergambar pada tabel dibawah ini.

PROGRAM KEMITRAAN/CSR YANG TELAH DILAKSANAKAN PADA TAHUN 2014

NO	PEMERINTAH	DAFTAR BANTUAN YANG DIBERIKAN	QUANTITAS (UNIT)	ANGGARAN	Tanggal Realisasi	KETERANGAN
1	Kabupaten Bengkalis	MOBIL AMBULANCE	4	872,516,000	10/16/2014	Sdh di serahkan ke pemda
2	Kabupaten Indragiri Hilir	TONG SAMPAH	100	363,000,000	7/16/2014	Sdh di serahkan ke pemda
		TENDA DAN GEROBAK	10	86,900,000	12/12/2014	Sdh di serahkan ke pemda
3	Kabupaten Indragiri Hulu	MOBIL BUS	1	328,500,000	12/23/2014	Sdh di serahkan ke pemda
4	Kabupaten Kuantan Singingi	MOBIL AMBULANCE	1	218,129,000	10/21/2014	Sdh di serahkan ke pemda
5	Kabupaten Pelalawan	DUMP TRUCK SAMPAH	1	318,000,000	12/31/2014	Sdh di serahkan ke pemda
6	Kabupaten Kepulauan Meranti	DUMP TRUCK SAMPAH	1	318,000,000	12/31/2014	Proses pengiriman
		MOBIL PICK UP	1	157,000,000	12/31/2014	Proses pengiriman
7	Kabupaten Bintan	MOBIL AMBULANCE	1	295,000,000	5/28/2014	Sdh di serahkan ke pemda
8	Kabupaten Karimun	DUMP TRUCK SAMPAH	1	318,000,000	12/31/2014	Sdh di serahkan ke pemda
9	Kabupaten Kepulauan Anambas	KENDARAAN RODA 3	7	259,100,000	10/23/2014	Sdh di serahkan ke pemda
10	Kota Batam	DUMP TRUCK SAMPAH	1	318,000,000	12/31/2014	Sdh diserahkan ke Cab Batam
11	Kota Tanjung Pinang	KENDARAAN RODA 3	10	259,085,000	10/23/2014	Sdh di serahkan ke pemda
	TOTAL			**4,111,230,000**		

B. PROGRAM BANTUAN KEMASYARAKATAN

Program Bantuan Kemasyarakatan adalah program tanggung-jawab moral Bank Riau Kepri terhadap para stakeholdernya, terutama komunitas atau masyarakat disekitar wilayah kerja dan operasinya melalui program-program pengembangan masyarakat dengan mengacu pada konsep pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup. Program ini merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh perusahaan untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerja beserta keluarganya, seraya menyeimbangkan beragam kepentingan para stakeholders, serta pelestarian lingkungan hidup.

Realisasi Kegiatan Program Bantuan Kemasyarakatan hingga per 31 Desember 2014, Bank Riau Kepri menyalurkan dana dalam bentuk Program Bantuan Kemasyarakatan yang dapat dikelompokkan menjadi beberapa bidang kegiatan yang disalurkan baik melalui Kantor Pusat maupun jaringan Kantor Cabang (Branch).

Adapun bantuan tersebut dapat terbagi pada beberapa bidang kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Keagamaan

Bank Riau Kepri percaya, bahwa dengan agama, maka kita mampu menata kehidupan sosial dan kemasyarakatan agamis yang madani. Rusaknya tatanan dan nilai-nilai moral dikarenakan ketidak pedulian masyarakat kepada nilai-nilai luhur dalam agama. Untuk itu, ditahun 2014 fokus Program Bantuan Kemasyarakatan tetap pada Kegiatan Keagamaan. Bank Riau Kepri telah melaksanakan serangkaian kegiatan di antaranya: membantu lembaga dan organisasi keagamaan, membantu kegiatan dakwah organisasi keagamaan, pembangunan fasilitas rumah ibadah dan tempat belajar keagamaan. Dana Program Bantuan Kemasyarakatan yang disalurkan pada kegiatan ini sebesar Rp326,855 juta, turun sedikit dibandingkan pada tahun 2013, yakni sebesar Rp430,629 juta.

b. Kegiatan Pendidikan

Ditahun 2014, berbagai kegiatan dilaksanakan Bank Riau Kepri dalam upaya untuk meningkatkan dunia pendidikan di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau. Bank telah melaksanakan beberapa kegiatan khususnya dibidang Pendidikan diantaranya: kegiatan bantuan biaya pendidikan, biaya penelitian, dan biaya kegiatan pendidikan (seminar, ekstrakulikuler, studi banding, dan try out) bagi siswa dan mahasiswa, serta bantuan kepada tenaga pengajar maupun penyediaan fasilitas belajar mengajar. Kami di Bank Riau Kepri percaya, bahwa pendidikan mampu mambantu meningkatkan taraf hidup dan kualitas hidup masyarakat secara nyata. Dana Program Bantuan Kemasyarakatan yang disalurkan pada kegiatan ini sebesar Rp209,540 juta, naik dibandingkan pada tahun 2013, yakni sebesar Rp148,250 juta.

c. Kegiatan Sosial

Ditahun 2014, berbagai kegiatan dilaksanakan Bank Riau Kepri dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui beberapa kegiatan sebagai salah satu sarana terbaik untuk membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara nyata. Program yang telah dilaksanakan dalam bentuk kontribusi berupa pemberdayaan wanita, kepemudaan, bantuan organisasi sosial, bantuan kepada anak yatim, masyarakat miskin, pemberdayaan tuna netra, dan lain-lain. Dana Program Bantuan Kemasyarakatan yang disalurkan pada kegiatan ini sebesar Rp 357,340 juta, turun sedikit dibandingkan pada tahun 2013, yakni sebesar Rp393,326juta.

d. Kegiatan Kesehatan

Ditahun 2014, Bank Riau Kepri tetap berkomitmen untuk turut mendukung peningkatan kesehatan masyarakat yang diwujudkan melalui kerja sama dengan beberapa institusi dan Lembaga di Bidang Kesehatan yang menjadi mitra Bank. Serangkaian program telah dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sosialisasi bahaya narkoba, bakti sosial pengobatan gratis, pengobatan massal, sunatan massal, seminar dan workshop kesehatan dan lain-lain. Dana Program Bantuan Kemasyarakatan yang disalurkan pada kegiatan ini sebesar Rp22,000 juta, turun dibandingkan pada tahun 2013, yakni sebesar Rp26,800 juta.

e. Kegiatan Kepemudaan dan Pembinaan Olahraga

Ditahun 2014, berbagai kegiatan dan program dilaksanakan Bank Riau Kepri dalam upaya membangun semangat kepemudaan yang terarah dan posisif, serta pembinaan keolah-ragaan agar jiwa-jiwa muda terpancing untuk aktif berprestasi. Sepanjang tahun 2014, Bank telah memberikan kontribusi berupa bantuan kegiatan kejurnas, pramuka, lokakarya, seminar, turnamen tenis meja, kejuaraan pencak silat, futsal, dan lain-lain. Dana Program

Bantuan Kemasyarakatan yang disalurkan pada kegiatan ini sebesar Rp165,715 juta, turun dari tanun 2013 yakni sebesar Rp114,700juta.

f. Kegiatan Seni dan Budaya

Ditahun 2014, berbagai kegiatan dan program dilaksanakan Bank Riau Kepri dalam upaya untuk menjaga kelesatarian adat, seni, dan budaya yang ada Riau dan Kepulauan Riau. Sepanjang tahun 2014 Bank telah melaksanakan beberapa kegiatan yang diantaranya: partisipasi terlaksananya pagelaran seni melayu, parade seni rakyat, senin pangguna, dan pemberdayaan lembaga-lembaga kebudayaan. Dana Program Bantuan Kemasyarakatan yang disalurkan pada kegiatan ini sebesar Rp 32,200 juta, naik sedikit dibandingkan pada tahun 2013, yakni sebesar Rp32,000 juta.

G. Pengaduan Nasabah

Bank Riau Kepri menyediakan ketentuan internal dan sarana pengaduan nasabah dengan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah berpedoman kepada ketentuan Bank Indonesia tentang pengaduan nasabah dan mediasi perbankan. unit Pengelola pengaduan nasabah ini adalah Unit kerja Desk Service Quality Bank Riau Kepri, yang merupakan unit kerja yang memiliki aktivitas menerima pengaduan dan keluhan pelanggan, yang kemudian ditindak lanjuti sampai tahap penyelesaiannya.

Untuk pengaduan nasabah ini bisa disampaiakan melalui:

Email	:	corsec@bankriau.co.id, service.excellence@bankriau.co.id
Surat	:	Bank Riau Kepri Cq : Corporate Secretary atau Desk Service Quality d/a Jl. Jendral sudirman No.377 Pekanbaru- Riau
Facebook	:	bankriaukepri1
Twitter	:	@bankriaukepri1
Telepon	:	0761) 37050, 37060
Fax	:	(0761) 28322

DAMPAK KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BAGI PERUSAHAAN DARI PROGRAM CSR

Bank Riau Kepri menyakini bahwa keberadaan perusahaan yang dapat memberikan nilai-nilai tambah kepada stakeholdernya akan memperkuat kepercayaan dan menjaga keberlangsungan bisnis perusahaan. Besarnya anggaran dana yang digunakan untuk program CSR di tahun 2014 berdampak pada semakin meningkatnya kepercayaan publik dan loyalitas nasabah kepada bank. Dengan meningkatnya loyalitas nasabah, berdampak pada peningkatan intensitas nasabah bertransaksi di Bank Riau Kepri, yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi finansial kepada kinerja Bank. Disamping itu, meningkatnya kepercayaan publik adalah hal penting yang tidak dapat terukur dengan besaran finansial. Di sisi lain, rasa aman dan nyamannya para pegawai dalam menjalankan aktifitasnya, tentunya berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan.



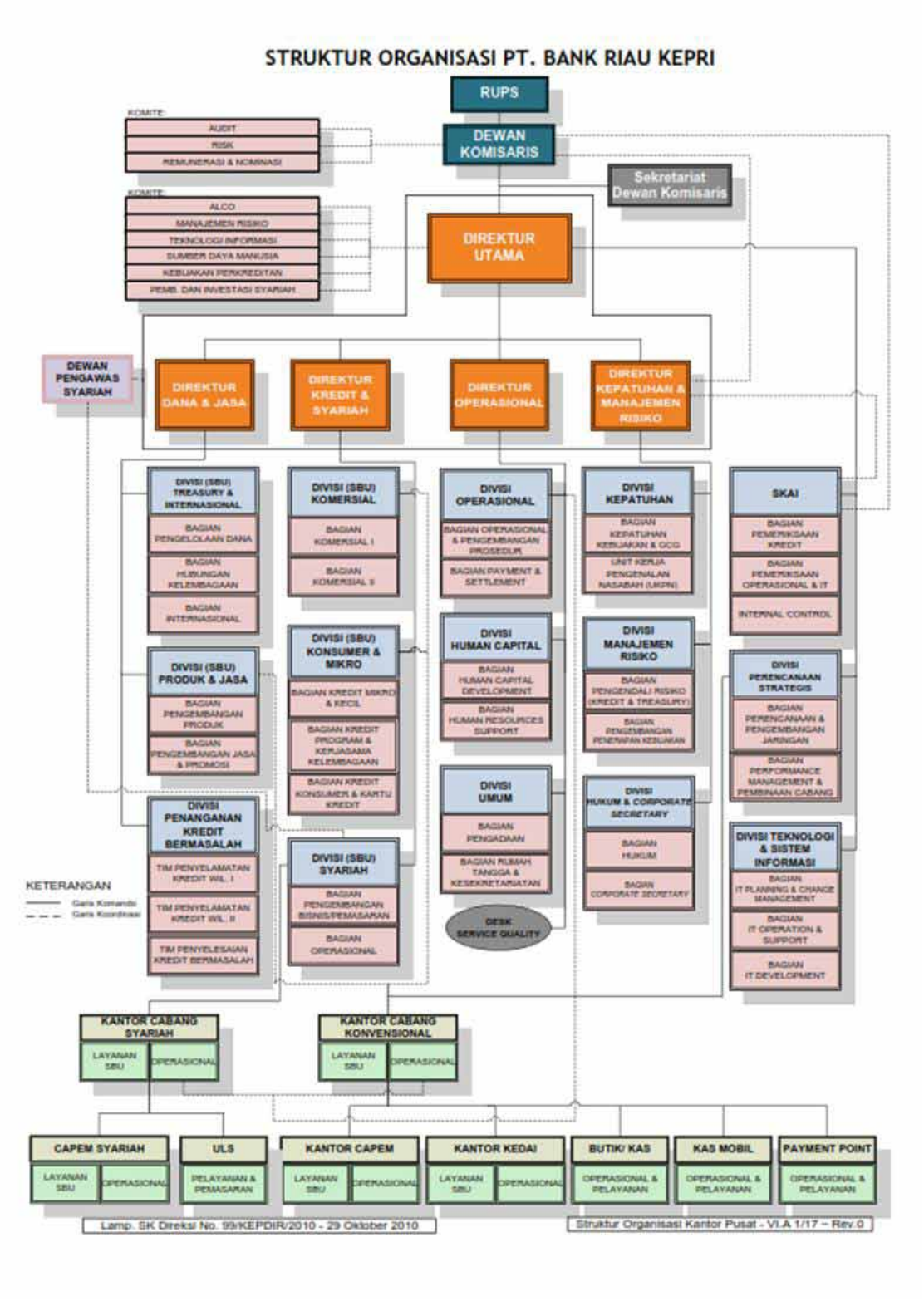


DATA PERUSAHAAN
COMPANY DATA

"Kami berkomitmen untuk mendedikasikan diri sepenuhnya dan lebih professional agar membawa Bank Riau Kepri menjadi lebih baik"

STRUKTUR ORGANISASI

Sampai dengan Desember 2014 bagan struktur organisasi PT. Bank Riau Kepri tidak dilakukan perubahan dan tetap mengacu pada Review/penyempurnaan SOT atas SOT Nomor 69/KEPDIR/2013 tanggal 31 Juli 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Direksi Nomor 79/KEPDIR/2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Riau sebagai berikut:



"Kami berkomitmen untuk **mendedikasikan diri sepenuhnya** dan lebih **professional** agar membawa **Bank Riau Kepri** menjadi lebih baik"



DEWAN KOMISARIS



Abdul Rivaie Rachman

Komisaris Independen

Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, pada saat ini berusia 79 tahun. Dilahirkan di Indragiri Hulu, Riau pada tanggal 15 Mei 1934. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi dari Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 1963 dan mengikuti beberapa pelatihan dan seminar antara lain Regional and Local Development di University of Pittsburg, Amerika Serikat, Orientasi Perluasan Daerah di Jakarta, Survey Agro Ekonomi di Pekanbaru, serta Seminar Otoritas Jasa Keuangan: Suatu Harapan Dan tantangan pengawasan lembaga Keuangan Ke Depan.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Bank Riau Kepri sejak tahun 2007. Jabatan lain yang pernah dipegang antara lain Wakil Gubernur Propinsi Riau (1994 - 1999), Sekretaris Wilayah Daerah Propinsi Riau (1991–1994), Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Riau (1982-1991) dan Direktur Bank Pembangunan Daerah Riau (1966-1973).



Chairisman Rasahan
Komisaris Independen
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 64 tahun. Dilahirkan di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau pada tanggal 25 Desember 1949. Menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Ekonomi Atas pada tahun 1972 di Tanjung Pinang. Selama tahun 2013 mengikuti beberapa pelatihan dan seminar antara lain: Pelatihan Program Sertifikasi Manajemen Resiko.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Bank Riau Kepri sejak tahun 2006. Mengawali karir di Bank Riau Kepri pada tahun 1980, dan jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain Pemimpin Divisi Sumber Daya Manusia Bank Riau Kepri (2002-2005), Pemimpin Biro Kepegawaian (1994-1999) dan Pemimpin Cabang Pasar Pusat (1992-1994).



Sarjono Amnan
Komisaris Independen
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 54 tahun. Dilahirkan di Bengkalis, Riau pada tanggal 29 Desember 1959. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi dari Universitas Riau Fakultas Ekonomi Studi Pembangunan pada tahun 1985 dan Magister Management pada tahun 2009 dari Universitas Riau serta mengikuti beberapa seminar dan pelatihan yang pernah di ikuti di tahun 2013 antara lain: Pelatihan Program Sertifikasi Manajemen Resiko, Seminar FKDKP Untuk Level Pengurus Bank Dengan Tema Harapan dan Tantangan Perbankan nasional 2013 – 2015, Seminar Peranan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Dalam Mendukung Pengawasan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menjabat sebagai Komisaris Indepenpen pada akhir tahun 2012. Mengawali karir di Bank Riau Kepri pada tahun 1986. Jabatan lain yang pernah dipegang antara Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Bank Riau Kepri sejak tahun 2007 sampai dengan pertangahan tahun 2012, Direktur Umum dan Kepatuhan (2003-2007), Direktur Umum (2000-2003), Pjs. Direktur Umum (1999-2000).

DEWAN DIREKSI



Wan Marwan
Direktur Operasional
Direktur Operasional

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 53 tahun. Dilahirkan di Pekanbaru, Riau pada tanggal 29 April 1960. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi di Universitas Riau Fakultas Ekonomi pada tahun 2003.

Menjabat sebagai Direktur Operasional Bank Riau Kepri sejak tahun 2007. Jabatan lain yang pernah dipegang antara lain Pemimpin Cabang Utama Pekanbaru Bank Riau Kepri Riau (2005-2006), Pemimpin Cabang Siak (2004-2005), Pemimpin Cabang Tembilahan (2001-2004) dan Pemimpin Cabang Pangkalan Kerinci BPD Riau (2000-2001).



Nizam Putih
Direktur Dana Dan Jasa
Direktur Dana Dan Jasa

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 45 tahun. Dilahirkan di Pekanbaru pada tanggal 22 Agustus 1968. Menyelesaikan studi di bidang Ekonomi Jurusan Akuntansi dan meraih gelar Sarjana dari Universitas Riau pada tahun 1994. Meraih gelar Pasca Sarjana di bidang MSDM dari Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 2002.

Menjabat sebagai Direktur Dana dan Jasa Bank Riau Kepri pada pertengahan tahun 2012. Memulai karir di Bank Riau Kepri sejak tahun 1994. Beberapa posisi penting yang pernah dijabat diantaranya sebagai Pemimpin Bagian Operasional Cabang Utama, Pemimpin Bagian Perencanaan Divisi Perencanaan, Pinbag Pemasaran Divisi Pemasaran, Pemimpin Divisi Umum, dan menjabat Pemimpin Divisi Operasional & Keuangan.



Afrial Abdullah
Direktur Kredit dan Syariah
Direktur Kredit dan Syariah

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 45 tahun. Dilahirkan di Tambusai pada tanggal 17 April 1968. Meraih Gelar Sarjana pada Studi Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Riau pada tahun 1990 dan meraih Gelar Pasca Sarjana pada Magister Manajemen UNRI di Jurusan Manajemen Pemasaran pada tahun 2005.

Menjabat sebagai Direktur Kredit dan Syariah Bank Riau Kepri pada akhir tahun 2012. Memulai karir di Bank Riau Kepri sejak tahun 1994, beberapa posisi jabatan yang pernah diduduki diantaranya adalah sebagai Pemimpin Seksi Pemasaran Cabang Batam, Pemimpin Bagian Perencanaan Divisi Perencanaan, Pemimpin Cabang Teluk Kuantan, Pemimpin Cabang Bengkalis, dan menjabat sebagai Pemimpin Divisi Human Capital & Service.



Eka Afriadi

Direktur Kepatuhan dan Manajemen Resiko

Direktur Kepatuhan dan Manajemen Resiko

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 46 tahun. Lahir di Pekanbaru, pada tanggal 1 April 1967. Menyelesaikan Studi di bidang Ekonomi Jurusan Akuntansi dan meraih gelar Sarjana dari Universitas Andalas Padang pada tahun 1993. Bergabung di Bank Riau Kepri sejak tahun 1994.

Menjabat sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Resiko Bank Riau Kepri pada akhir tanggal 29 Juli 2013. Beberapa posisi penting yang pernah dijabat diantaranya sebagai Staff Direktur Kepatuhan, Pemimpin Bagian Kepatuhan pada Divisi Kepatuhan & Manajemen Resiko, dan Pemimpin Divisi Kepatuhan.

DEWAN PENGAWAS SYARIAH



Suryan Al Jamrah
Ketua Dewan Pengawas Syariah
Ketua Dewan Pengawas Syariah

Lahir di Indragiri Hilir pada 9 Oktober 1959. Menyelesaikan pendidikan Sarjana PERBAGA di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1985, Megister Studi Islam di IAIN Syahid Jakarta tahun 1991, dan meraih gelar Doktor Studi Islam di IAIN Syahid Jakarta tahun 1997. Menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank Riau Kepri sejak tahun 2013. Pernah menjabat sebagai Dosen, Asisten Direktur I Program Pasca Sarjana, dan Direktur Program Pasca Sarjana di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Pekanbaru.



Tengku Zulkarnain
Anggota
Anggota

Lahir di Medan 14 Agustus 1963. Menyelesaikan studi Sarjana Sastra Inggris di Universitas Sumatera Utara pada tahun 1987. Menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Riau Kepri sejak tahun 2013.

ANGGOTA KOMITE



Fahmi Oemar

Anggota Komite Audit & Pemantau Risiko

Anggota Komite Audit & Pemantau Risiko

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia usia 51 tahun dan dilahirkan di Bengkalis pada tanggal 16 Februari 1962. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Akutansi di Universitas Riau pada tahun 1988, dan menyelesaikan studi Pasca Sarjana dengan jurusan Manajemen Keuangan di UPI-YPTK,Padang pada tahun 2008, serta menyelesaikan studi Program Doktor dengan jurusan Manajemen Keuangan di Universitas Persada Indonesia (UPI-YAI) Jakarta. Beberapa seminar dan pelatihan yang pernah diikuti antara lain: Review Mutu, RUU AP & Current Issues, Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Melalui Pemenuhan Hak-Hak Konstitusionalnya, Pelaporan Dan Audit Dana Kampanye Pemilu

Menjabat sebagai Anggota Komite Audit dan Anggota Komite Pemantau Risiko pada pertengahan tahun 2012.



Indarti

Anggota Komite Audit & Pemantau Risiko

Anggota Komite Audit & Pemantau Risiko

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia usia 38 tahun dan dilahirkan di Pekanbaru pada tanggal 19 November 1975. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Akutansi di Universitas Riau pada tahun 1999, dan Magister Management, Management Keuangan di Universitas Riau pada tahun 2011 dan beberapa seminar dan pelatihan yang pernah diikuti antara lain: Interviewing & Interrogation Skills for Anti Fraud - (Audit & Physiological Approach), Audit Core Skill, Company Orientation Training, Internal Audit Training, Seminar dan pendidikan profesi with Topic : Wajib Daftar Perusahaan, Wajib penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Perusahan dan Profesionalisme Akuntan Publik.

Menjabat sebagai Anggota Komite Audit dan Anggota Komite Pemantau Risiko pada pertengahan tahun 2012.

PEJABAT EXECUTIVE



Syamsul Bakri

Pemimpin Divisi Produk dan Jasa

Pemimpin Divisi Produk dan Jasa

Lahir di Bangkinang tanggal 7 Juni 1960. Menyelesaikan studi di bidang Ekonomi Jurusan Manajemen Perusahaan dan meraih gelar Sarjana dari Universitas Islam Riau pada tahun 1989. Memulai karir di Bank Riau Kepri sejak tahun 1985. Beberapa posisi penting yang pernah dijabat diantaranya sebagai Pemimpin Cab. Tanjung Balai Karimun, Pimbag Operasional UUS, Pemimpin Bagian Pemasaran unit Usaha Syariah, Pemimpin Cabang Syariah Tanjung Pinang, Wakil Pemimpin Cabang Utama, Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis, hingga akhirnya menjabat sebagai Pemimpin Divisi Produk dan Jasa.



Andi Mulya

Pemimpin Divisi Treasury & Internasional / Pgs. Pemimpin Divisi Operasional

Pemimpin Divisi Treasury & Internasional / Pgs. Pemimpin Divisi Operasional

Lahir Pekanbaru, 16 September 1966. Menyelesaikan Studi di Bidang Akuntasi dan meraih gelar Sarjana dari STIE-Yayasan Pendidikan Keuangan dan Perbankan Bandung pada tahun Tahun 1993. Berkarir di Bank Riau Kepri sejak tahun 1994. Beberapa posisi penting yang pernah dijabat diantaranya Staf Biro Dana, Pemimpin Bagian Pengelolaan Dana Divisi Treasury & Internasional. Pada pertengahan tahun 2013, merangkap sebagai Pgs. Pemimpin Divisi Opeasional.



Rizali Effendi
Pimpinan Divisi Komersial
Pimpinan Divisi Komersial

Lahir di Tanjungbatu, 18 September 1964. Menyelesaikan Studi Ekonomi Study Pembangunan di Universitas Lancang Kuning Pekanbaru pada tahun 1990. Memulai karir di Bank Riau Kepri pada tahun 1994 dengan jabatan sebagai pelaksana operasional. Beberapa posisi penting yang pernah dijabat diantaranya, Pinbag Administrasi dan Pengendalian, Pimpinan Cabang Dumai, Pimpinan Cabang Tanjung Balai Karimun, dan Pimpinan Cabang air Molek. Pada tahun 2013, merangkap sebagai Pgs. Pemimpin Divisi Konsumer dan Mikro.



Edy Muhardy
Pemimpin Divisi Umum
Pemimpin Divisi Umum

Lahir di Pekanbaru, 25 Mei 1964. Menyelesaikan Studi di Bidang Akuntansi dan meraih gelar Sarjana Muda dari Akademi Akuntansi Riau pada tahun 1997. Berkarir di Bank Riau Kepri mulai tahun 1985 dan telah menduduki beberapa jabatan penting diantaranya: Auditor Biro Pengawasan, Kontrol Intern Cabang Bangkinang, Pimpinan cabang Pembantu Tangkerang, Pimpinan cabang Pembantu Rumbai, Pimpinanan Bagian Pengadaan Divisi Umum, hingga akhirnya menjadi Pimpinan Divisi Umum pada pertengahan tahun 2012.



Hendra Buana

Pemimpin Divisi Manajemen Risiko

Pemimpin Divisi Manajemen Risiko

Lahir di Pekanbaru 11 Juli 1970. Meraih Gelar Sarjana pada Studi Manajemen di STIE Purna Graha pada tahun 1993 dan meraih Gelar Pasca Sarjana pada Magister Manajemen UNRI pada tahun 2009. Memulai karir di Bank Riau Kepri sejak tahun 1994, beberapa posisi jabatan yang pernah diduduki diantaranya adalah sebagai Staf Biro Perencanaan, Pemimpin Bagian Perencanaan Divisi Perencanaan dan Strategis, Pemimpin Bagian Pengendali Risiko Divisi Manajemen Risiko, Pemimpin Bagian Divisi Human Capital, hingga akhirnya menjabat sebagai Pemimpin Divisi Human Capital & Service.



Nusyirwan

Pemimpin Divisi SKAI

Pemimpin Divisi SKAI

Lahir pada tanggal 30 November 1964. Menyelesaikan Studi S1 MANAJEMEN STIE PURNA GRAHA. Berkarir di Bank Riau Kepri mulai 1 Juli 1985. Pernah menjabat beberapa posisi penting diantaranya Pemimpin Bagian SKAI, Pemimpin Bagian Divisi Umum, Pemimpin Cabang Syariah Tanjung Pinang, hingga akhirnya menjabat sebagai Pemimpin Divisi SKAI.



Denny M. Akbar
Pemimpin Divisi Human Capital
Pemimpin Divisi Human Capital

Lahir pada tanggal 26 April 1971. Meraih Gelar Sarjana pada Studi Manajemen di Universitas Padjadjaran Bandung. Memulai karir di Bank Riau Kepri sejak 1 November 2000, beberapa posisi jabatan yang pernah diduduki diantaranya adalah sebagai Staf Biro Perencanaan, Pemimpin Bagian Sekretariat dan Humas, Pemimpin Cabang Tanjung Balai Karimun, Pemimpin Cabang Tanjung Pinang, hingga akhirnya menjabat sebagai Pemimpin Divisi Human Capital & Service.



Ikhwan
Pemimpin Divisi Kepatuhan
Pemimpin Divisi Kepatuhan

Lahir pada tanggal 14 November 1967. Menyelesaikan Studi sarjana (S1) MANAJEMEN UNRI. Bergabung di Bank Riau Kepri sejak tanggal 10 Januari 1994. Beberapa posisi penting yang pernah dijabat diantaranya sebagai Pemimpin Cabang Kerinci, Pemimpin Cabang Bengkalis, hingga akhirnya menjabat sebagai Pemimpin Divisi Kepatuhan.



Heppy Wardono

Pemimpin Divisi Operasional

Pemimpin Divisi Operasional

Lahir di Pekanbaru, 27 Desember 1962, Menyelesaikan Studi Ilmu Administrasi di Universitas Islam Riau dan meraih gelar Sarjana pada tahun 1998. Bergabung di Bank Riau Kepri mulai tahun 1985. Beberapa posisi penting di Bank Riau Kepri yang telah dijabat diantaranya sebagai Seksi Giro Kantor Pusat, Staff Biro Administrasi Keuangan, Pemimpin Bagian Divisi Teknologi dan Sistem Informasi, Pemimpin Bagian Divisi Treasury, Pemimpin Bagian Operasional dan Keuangan, dan Pemimpin Bagian Divisi Perencanaan Strategis.



Tengku Irawan

Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis

Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis

Lahir pada tanggal 9 Oktober 1976. Menyelesaikan Studi S2 MANAJEMEN di Universitas Riau (UNRI). Berkarir di Bank Riau Kepri sejak 1 November 2000. Beberapa posisi penting yang pernah dijabat diantaranya Pemimpin Bagian Kredit Komersil, Pemimpin Cabang Bagan Siapi-api, Pemimpin Divisi Kepatuhan, hingga Pemimpin Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis.



Khairul Anwar

Pemimpin Divisi Unit Usaha Syariah

Pemimpin Divisi Unit Usaha Syariah

Lahir pada tanggal 17 May 1969. Menyelesaikan Studi Sarjana Ekonomi di Universitas Riau. Memulai karir di Bank Riau Kepri sejak 1 Agustus 1974. Sebelum menjabat sebagai Pemimpin Divisi Unit Usaha Syariah, berbagai posisi jabatan pernah diduduki diantaranya sebagai Pemimpin Cabang Siak Sriindapura, Pemimpin Cabang Bagan Siapi-api.



Wan Mukhlis

Pemimpin Divisi Teknologi Informasi

Pemimpin Divisi Teknologi Informasi

Lahir pada tanggal 13 May 1972. Menyelesaikan studi S1 TEKNIK INFORMATIKA STMIK. Memulai karir di Bank Riau Kepri sejak 1 januri 1998. Sebelum menjabat sebagai Pemimpin Divisi Teknologi Informasi, berbagai posisi jabatan pernah diduduki diantaranya sebagai Pemimpin Bagian Operasional dan Pengembangan Prosedur Divisi Operasional, dan terakhir Pemimpin Divisi Operasional.



M. Azwizar Hendry

Pemimpin Divisi Konsumer dan Mikro

Pemimpin Divisi Konsumer dan Mikro

Lahir pada tanggal 7 Januria 1969. Menyelesaikan Studi di Bidang Akuntasi dan meraih gelar Sarjana dari Universitas Riau (UNRI). Berkarir di Bank Riau Kepri sejak 1 Agustus 1994. Beberapa posisi penting yang pernah dijabat diantaranya Pemimpin Bagian Pengelolaan Dana Divisi Treasury & Internasional, Pemimpin Cabang Siak Sriindrapura, Pemimpin Cabang Pasir Pangarayan, hingga akhirnya menjadi Pemimpin Divisi Konsumer Dan Mikro.



Amir Husin

Pemimpin Divisi Penyelesaian Kredit Bermasalah

Pemimpin Divisi Penyelesaian Kredit Bermasalah

Lahir pada tanggal 7 November 1959. Menyelesaikan Studi di SMEA NEGERI PEKANBARU. Berkarir di Bank Riau Kepri sejak 1 Maret 1983. Beberapa posisi penting yang pernah dijabat diantaranya Staf Biro IT, Pemimpin Bagian Penanganan Kredit Divisi Penyelesaian Kredit Bermasalah, hingga akhirnya dipromosikan sebagai Pemimpin Divisi Penyelesaian Kredit Bermasalah

STAFF DIREKSI



Syahrul Ilyas

Lahir di Bengkalis 22 Juni 1964, Menyelesaikan Studi Ekonomi di Uniersitas Riau Jurusan Manajemen dan meraih gelar Sarjana pada tahun 1990, meraih gelar Pasca Sarjana dari Universitas Riau dibidang Manajemen Keuangan pada tahun 2005. Bergabung di Bank Riau Kepri mulai tahun 1994. Beberapa posisi penting di Bank Riau Kepri yang telah dijabat diantaranya sebagai Pemimpin Seksi Kredit/Pemasaran, Pemimpin Bagian Kredit Komersil, Pemimpin Cabang Bengkalis, Pemimpin Cabang Tanjung Pinang, dan Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis.



Said Syamsuri

Lahir di Rengat 7 Desember 1965. Menyelesaikan Studi di bidang Ekonomi Akuntansi dan meraih gelar Sarjana pada tahun 1993. Bergabung di Bank Riau Kepri mulai tahun 1994. Beberapa posisi yang pernah dijabat antara lain sebagai Pemimpin Seksi Pemasaran, Pemimpin Bagian Kredit Kerakyatan, Pemimpin Bagian Kredit UKM, Pemimpin Bagian Retail, Pemimpin Divisi Mikro dan Kecil, hingga akhirnya menjabat sebagai Pemimpin Divisi Konsumer & Mikro.



Zammeibar Kahar

Lahir di Pekanbaru, 12 Februari 1962. Menyelesaikan Studi Magister Manajemen di Universitas Riau di tahun 2006. Memulai karir di Bank Riau Kepri pada tahun 1984 dengan jabatan sebagai pelaksana akutansi. Beberapa posisi penting yang pernah dijabat diantaranya Pinbag Kompeda, Pinbag Pengembangan&aplikasi program IT, Pinbag Pengawasan, Pinbag Treasury dan Akutansi Divis Unit Usaha Syariah, Pincab syariah Pekanbaru, Pinbag Operasional Divisi Unit Usaha Syariah, hingga akhirnya menjabat sebagai Pemimpin Divisi Penyelesaian Kredit Bermasalah.

DESK



Ernawati Gani

Pemimpin Desk Services Quality

Lahir pada tanggal 15 May 1961. Menyelesaikan Studi S1 PERTANIAN Universitas Andalas (UNAND). Memulai karir di Bank Riau Kepri pada 1 Januri 1986. Beberapa posisi penting yang pernah dijabat diantaranya Pemimpin Bagian Kredit Komersil, Pemimpin Bagian Divisi Sumber Daya Manusia, hingga menjadi Pemimpin Desk Services Quality.

PRODUK DAN LAYANAN PERBANKAN

Konvensional

Produk Dana/ ***products Fund***

a. Tabungan
Tabungan Simpanan Pembangunan Daerah (Simpeda)
Tabungan Simpanan Amanah Riau (Sinar),
Tabungan Sinar Belia,
Tabungan Sinar Pendidikan,
Tabungan Sinar Delima,
Tabungan Tabunganku,
Tabungan Sinar KPE,
Tabungan Sinar Dana BOS,
Tabungan Sinar Community.
Tabungan Dhuha

b. Giro
Giro Rupiah
Giro Valas

c. Deposito
Deposito Berjangka Rupiah
Deposito Berjangka Valas

Produk Kredit

a. Komersil
Kredit Karya Prima,
Kredit Niaga Prima,
Kredit Bina Prima,
Kredit Pinjaman Daerah,
Kredit Sindikasi,
Co-Financing,

b. Mikro dan Kecil
Kredit Pengusaha Kecil (Plafond Rp 50-500juta)
Kredit Pengusaha Mikro (Plafond s/d Rp 50juta)
Kredit Ketahanan Pangan & Energi (KKPE)
Kredit BPD Peduli (Plafond s/d Rp 5 Juta)
Kredit KUMK SUP 005
Kredit Kepada BPR
Kredit Agribisnis
Kredit Kedai Bank Riau Kepri
Kredit Koperasi/LKM
Kredit Usaha Rakyat

c. Konsumer
KAG (Kredit Aneka Guna),
KPR (Kredit Kepemilikan Rumah),
KKB (Kredit Kendaraan Bermotor),
Kredit Karyawan Bank Riau Kepri
Kartu Kredit Bank Riau Kepri Visa
Pelayanan Jasa-jasa
Kiriman Uang dalam bentuk Rupiah dan Valuta Asing
Western Union
Money Changer
Inkaso
Jaminan Bank
Referensi Bank
Kliring dan Kliring Antar Wilayah
RTGS
Pembayaran rekening telpon
Pembelian Pulsa
Pembayaran Pensiun
Pembayaran PBB
Fasilitas ATM
Fasilitas CDM (Cash Deposit Manchine)
Fasilitas EDC Merchant
Fasilitas EDC Mini ATM
SMS Banking
M-Banking

Produk Syariah

Produk Dana :

1. Tabungan iB Sinar.
2. Tabungan iB Dhuha.
3. Tabungan iB Sinar Belia.
4. Tabungan iB Sinar Delima.
5. Tabungan iB Sinar Pendidikan.
7. Giro iB Wadiah.
8. Giro iB Mudharabah.
9. Deposito iB Syariah

Pembiayaan :

1. Pembiayaan Rekening Koran Syariah.
2. Pembiayaan Musyarakah.
3. Pembiayaan iB Mitra Swadaya (Diferensiasi pembiayaan mikro iB Pengusaha Kecil).
4. Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR).
5. Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PKB).
6. Pembiayaan Aneka Guna (PAG).
7. Ijarah.
8. Itishna'.
9. Pembiayaan Aneka Guna Syariah.
10. Pembiayaan Pemilikan Rumah Syariah.
11. Pembiayaan Kendaraan Bermotor Syariah.
12. Pembiayaan Tanpa Agunan.
13. Qardh.
14. Rahn Emas.

JARINGAN KANTOR

Untuk tahun 2014, pengembangan jaringan kantor dan ATM yaitu:

a. Pendirian Kantor Cabang Pembantu (setingkat) sebanyak 10 (sepuluh) kantor, yaitu:
   1. KCP. Botania Batam.
   2. KCPS. Tanjung Balai Karimun.
   3. Kedai Meral.
   4. Kedai Batu Panjang Rupat (Operasional tanggal 24 Maret 2014).
   5. Kedai Midai.
   6. Kedai Serasan.
   7. Kedai Teluk Belitung Merbau.
   8. Kedai Bandar Sei Kijang.
   9. Kedai Pujud.
   10. Kedai Sabak Auh.

b. Rencana Pendirian Kantor Kas sebanyak 3 (tiga) kantor, yaitu:
   1. Kantor Gubernur Kepulauan Riau.
   2. Kantor Dinas Pendidikan Kota Batam.
   3. Kantor DPPKAD Kab. Kepulauan Meranti.

c. Office Channeling / Unit Layanan Syariah untuk Kantor Cabang Pembantu dan Kedai sebanyak 1 (satu), yaitu :
   1. KCP. Botania Batam

d. Kegiatan Pelayanan Kas
   - Payment Point sebanyak 3 (tiga) kantor, yaitu :
     1. Kantor Dispenda Kab. Siak (Operasional tanggal 2 Januari 2014)
     2. Kantor Dispenda Kab. Kepulauan Meranti
     3. Kantor Dispenda Kab. Bengkalis
   - Kas Keliling Mini Oto Banking sebanyak 9 unit mobil, yang berinduk di KC Teluk Kuantan (Operasional 28 Maret 2014), KC Bagan Siapi-Api, KC Dumai (Operasional 28 MAret 2014), KC Batam, KC Tanjung Pinang, KC Syariah Pekanbaru, KC Bangkinang, KC Pasir Pangaraiyan, dan KC Tembilahan.
   - ATM sebanyak 62 mesin ATM yaitu :
     1. Kantor Cabang Tembilahan
     2. Kantor Cabang Tembilahan
     3. Kantor Cabang Bangkinang
     4. Kab. Kampar
     5. Cabang Teluk Kuantan
     6. Kota Teluk Kuantan
     7. Kota Teluk Kuantan
     8. Cabang Bagan Siapiapi
     9. Capem Bagan Batu
     10. Kedai Pujud
     11. Kota Bagan Siapiapi
     12. Capem Botania Batam
     13. Capem Lubuk Baja
     14. Kota Batam
     15. Kota Batam
     16. Kota Batam
     17. Kota Batam
     18. Cabang Batam
     19. CDM Kota Batam
     20. Kota Tanjung Balai Karimun
     21. Kota Tanjung Balai Karimun
     22. Kota Ranai
     23. Capem Syariah Panam
     24. Cabang Syariah Pekanbaru
     25. Kota Tanjung Pinang
     26. Capem Syariah Tanjung Balai Karimun
     27. Capem Belilas
     28. Kantor Bupati Indragiri Hulu
     29. Kedai Pasar Peranap
     30. Kedai Teluk Belitung Merbau
     31. Kota Pekanbaru
     32. Kota Pekanbaru
     33. Kota Pekanbaru
     34. Cabang Tanjung Pinang
     35. CDM Cabang Tanjung Pinang
     36. Kota Tanjung Pinang
     37. Kota Tanjung Pinang
     38. Kota Tanjung Uban
     39. Capem Bintan Center
     40. Capem Perawang
     41. Cabang Siak
     42. Kota Pangkalan Kerinci
     43. Kedai Pasar Pangkalan Kerinci
     44. Kedai Batupanjang Rupat
     45. Capem Tangkerang
     46. Capem Tuanku Tambusai
     47. Cabang Pasar Pusat
     48. Kota Pekanbaru
     49. Kota Pekanbaru
     50. Kota Pekanbaru
     51. Kota Pekanbaru
     52. Drive Thrue Kota pekanbaru
     53. Kios ATM Non Tunai Kota pekanbaru
     54. Kios ATM Non Tunai Kota pekanbaru
     55. CDM Cabang Pasar Pusat
     56. Kota Pekanbaru
     57. Kantor Dinas PU Riau

58. Cabang Pasir Pengasinaran
59. Kedai Kabun
60. Capem Ujung Batu
61. Cabang Dumai
62. Kota Duri

- EDC (Electronic Data Capture)
  1. EDC Mobile (On Bank) sebanyak 110 unit
  2. EDC Merchant (Off Bank) sebanyak 200 unit

e. Rencana perubahan status jaringan kantor sebanyak 1 (satu) kantor yaitu:
   1. Peningkatan Status Kantor Payment Point Dispenda Rokan Hilir menjadi Kantor Kas Dispenda Rokan Hilir.

f. Rencana relokasi/pemindahan alamat kantor sebanyak 6 (enam) kantor yaitu:
   1. Kantor Pusat, direlokasi dari Jl. Jend. Sudirman No. 377 ke Jl. Jend. Sudirman No. 462 Pekanbaru
   2. Kantor Cabang Utama Pekanbaru, direlokasi dari Jl. Jend. Sudirman No. 377 ke Jl. Jend. Sudirman No. 462 Pekanbaru
   3. Kantor Cabang Pasir Pengasinaran, direlokasi dari Jl. Pasar Senen ke Jl. Tuanku Tambusai Pasir Pengasinaran
   4. Kantor Cabang Siak, direlokasi dari Jl. Sultan Ismail No 72 ke Jl.Dr Sutomo Siak
   5. Kantor Cabang Pembantu Bagan Batu, direlokasi dari Jl. Jend Sudirman Bagan Sinembah ke Jl. Jend Sudirman Bagan Sinembah.
   6. Kantor Cabang Pembantu Tangkerang direlokasi dari Jl. Imam Munandar No. 162A ke Jl. Imam Munandar Pekanbaru

g. Rencana relokasi/pemindahan alamat ATM sebanyak 8 (delapan) unit ATM yaitu:
   1. 2 (dua) unit ATM di Kantor Cabang Pasir Pengasinaran direlokasi dari Jl. Pasar Senen ke Jl. Tuaku Tambusai Pasir Pengasinaran
   2. 2 (dua) unit ATM di Kantor Cabang Siak direlokasi dari Jl. Sultan Ismail No.72 ke Jl. Dr. Sutomo Siak
   3. 1 (satu) unit ATM di Kantor Cabang Pembantu Bagan Batu direlokasi dari Jl. Jend Sudirman Bagan Sinembah ke Jl. Jend Sudirman Bagan Sinembah
   4. 1 (satu) unit ATM di Kantor Cabang Pembantu Tangkerang direlokasi dari Jl. Imam Munandar No. 162A ke Jl. Imam Munandar Pekanbaru
   5. 1 (satu) unit ATM di RSUD Indragiri Hilir, direlokasi dari RSUD Indragiri Hilir ke Hotel TOP 5 Jl. Baharuddin Yusuf Tembilahan.
   6. 1 (satu) unit ATM di SPBU Harapan Sinara, direlokasi dari SPBU Harapan Sinara ke Jl. Imam Munandar Pekanbaru.

2. Rencana Penerbitan Produk dan/atau Pelaksanaan Aktivitas Baru

   Pada tahun 2013, masih terdapat rencana penerbitan produk dan/atau aktivitas yang belum direalisasikan dan rencana ini kembali dicantumkan sebagai rencana di tahun 2014. Evaluasi terhadap rencana penerbitan produk dan/atau aktivitas dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut.

SURAT PERNYATAAN TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS ISI LAPORAN TAHUNAN

Surat Pernyataan Dewan Komisaris Dan Direksi Tentang Tanggung Jawab Laporan Tahunan 2014 PT. Bank Riau Kepri

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam laporan tahunan PT. Bank Riau Kepri, tahun 2014 telah dibuat secara lengkap dan benar, serta bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... 2015
Dewan Komisaris
Board of Commissioners

H. A. Rivaie Rachman	H. Chairisman Rasahan	H. Sarjono Amnan
Komisaris Independen	Komisaris Independen	Komisaris Independen
Independent Commissioner	*Independent Commissioner*	*Independent Commissioner*

Direksi
Board of Director

H. Wan Marwan	Nizam	H. Afrial Abdullah	Eka Afriadi
Direktur Operasional	Direktur Dana dan Jasa	Direktur Kredit dan Syariah	Direktur Kepatuhan& Mgt Risiko

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI

LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
DAN
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31,2014 AND 2013
AND
INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI
(PT BANK RIAU KEPRI)

LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014 DAN 2013

FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED ON DECEMBER 31, 2014 AND 2013

DAFTAR ISI / *TABLE OF CONTENTS*

Halaman / *Pages*

SURAT PENYATAAN DIREKSI / *BOARDS OF DIRECTOR'S STATEMENT*	……...	i
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN / INDEPENDEN AUDITOR'S REPORT	……..……	ii
LAPORAN POSISI KEUANGAN / STATEMENT OF FINANCIAL POSITION	……..……	1 - 2
LAPORAN LABA-RUGI KOMPREHENSIF/ *COMPREHENSIVE STATEMENT OF INCOME*		3
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS / *STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY*	…..……..	4
LAPORAN ARUS KAS / *STATEMENT OF CASH FLOWS*	……..……..	5
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN / *NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS*	...	6 - 173

=== oOo ===

bankriaukepri
tumbuh kembangkan usaha

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL
31 DESEMBER 2014 DAN 2013
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Wan Marwan
   Alamat Kantor : Jl. Jend. Sudirman No. 377 Pekanbaru 28116
   Alamat Rumah Sesuai KTP : Jl. Purwodadi No. 179 Kec. Tampan, Pekanbaru
   Nomor Telp : 0761-37050
   Jabatan : Direktur Operasional

2. Nama : Afrial Abdullah
   Alamat Kantor : Jl. Jend. Sudirman No. 377 Pekanbaru 28116
   Alamat Rumah Sesuai KTP : Jl. Rawa Mulia No. 9 Kec. Marpoyan Damai, Pekanbaru
   Nomor Telp : 0761-37050
   Jabatan : Direktur Kredit dan Syariah

menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan perusahaan.
2. Laporan keuangan perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar.
   b. Laporan keuangan perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT
REGARDING
THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENT'S
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2014 AND 2013
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI

We, the undersigned :

1. *Name : Wan Marwan*
   Office Address : Jl. Jend. Sudirman No. 377 Pekanbaru 28116
   Domicile Address as State in ID : Jl. Purwodadi No. 179 Kec. Tampan, Pekanbaru
   Phone Number : 0761-37050
   Function : Operational Director

2. *Name : Afrial Abdullah*
   Office Address : Jl. Jend. Sudirman No. 377 Pekanbaru 28116
   Domicile Address as State in ID : Jl.Rawa Mulia No. 9 Kec. Marpoyan Damai, Pekanbaru
   Phone Number : 0761-37050
   Function : Credir and Sharia Director

declare that :

1. *We are responsible for the preparation and representation of the company's financial statements.*
2. *The company's financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesia Financial Accounting Standards.*
3. a. *All information in the company's financial statement has been disclosed in a complete and truthful manner.*
   b. *The company's financial statement do not contain any incorrect information or material fact, nor do they omit information or material fact.*
4. *We are responsible for the company's internal control system.*

We certify the accuracy of this statement.

Atas nama dan mewakili Direksi / *For and on behalf of the Board of Directors*

METERAI TEMPEL
BAC95ADF125884289
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Wan Marwan
Direktur Operasional / *Operational Director*

Afrial Abdullah
Direktur Kredit dan Syariah / *Credit and Sharia Director*

Pekanbaru, 02 Maret 2015 / *March 02, 2015*

Kantor Pusat :
Jl. Jend. Sudirman No. 377 Pekanbaru 28116
Telp. (0761) 37050, 37060 (Hunting 5 Lines)
Fax. : 21195, 28322, 33397, 40134, 40135
Website : www.bankriaukepri.co.id

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
TJAHJO, MACHDJUD MODOPURO & REKAN
Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : KEP-1021/KMK.17/1998

Jl. Cempaka Putih Barat 13, No G-10, Jakarta 10520; Telp.: 42882576; Facs.: 42882577; E-mail : kaptim@rad.net.id

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

No. : 16/LK/3/15

Kepada Yth. / *To*
Direksi dan Pemegang Saham / *The Shareholders and Board of Directors*
PT Bank Riau Kepri
Pekanbaru – Riau

Laporan atas Laporan Keuangan

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri terlampir yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2014, serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Laporan keuangan PT Bank Riau Pembangunan Daerah Riau Kepri tanggal 31 Desember 2013, telah diaudit oleh Auditor Independen lain yang laporannya tertanggal 21 Februari 2014 dengan memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan tersebut.

Report on the financial statements

We have audited the accompanying financial statements of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri as of which comprise the statement of financial position as of December 31, 2014, and the statement of comprehensive income, changes in equity and cash flow for the years ended, and summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audits. Financial statement of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri for the ended year December 31, 2013, were audited by other auditor independent whose reports, dated February 21, 2014, expressed an unqualified opinion after the restatement.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether do to fraud or error.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Auditor's responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audits in accordance with standards on auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

Kantor Akuntan Publik
TJAHJO, MACHDJUD MODOPURO & REKAN

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risk of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statement.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri tanggal 31 Desember 2014, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri as of December 31, 2014 and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

TJAHJO MACHDJUD MODOPURO & REKAN
KANTOR AKUNTAN PUBLIK
JAKARTA

Drs. Tjahjo Nurwantoro, CPA., CA
NRAP / *License Acc.* : AP.0710

2 Maret 2015 / *March 2, 2015*

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2014 dan 2013
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
December 31, 2014 and 2013
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / *Notes*	31 Desember 2014/ *December 31, 2014*	31 Desember 2013/ *December 31, 2013*	
Aset				***Assets***
Kas	2e, 3	775,964,466,541	573,069,943,336	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	2f, 4	1,289,270,431,156	1,214,020,913,656	*Current Account with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar nihil pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013.	2f, 5	69,642,528,594	98,471,093,030	*Current account with other Bank net of allowance for impairment losses each of them amount to Rp.0 as of December 31, 2014 and 2013.*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp1.269.391.389 dan Rp1.546.243.045 pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013.	2g, 6	5,872,156,716,327	4,636,122,228,951	*Placement with Bank Indonesia and other bank net of allowance for impairment losses each of them amount to Rp1.269.391.389 and Rp1.546.243.045 as of December 31, 2014 and 2013.*
Surat berharga setelah dikurangi premi dan bunga yang belum diamortisasi sebesar Rp21.868.997.522 dan Rp10.315.548.619 pada tanggal 31	2h, 2i, 7	1,419,899,202,009	1,033,223,476,123	*Marketable securities allowance for impairment losses each of them amount to Rp21.868.997.522 and Rp10.315.548.619 as of December 31, 2014 and 2013.*
Kredit yang diberikan setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp391.421.743.064 dan Rp413.603.569.890 pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013.				*Loans net of allowance for impairment losses each of them amount to Rp391.421.743.064 and Rp413.603.569.890 as of December 31, 2014 and 2013.*
Pihak berelasi	2d, 2j, 2k, 2l, 2u, 8	9,151,644,748	7,773,718,883	*Related parties*
Pihak ketiga		12,755,599,683,019	11,530,214,651,466	*Third parties*
Jumlah		12,764,751,327,767	11,537,988,370,349	*Total*
Penyertaan setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai masing-masing sebesar Rp1.155.450.000 pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013.	2d, 2m, 9	500,333,335	500,333,335	*Investment net of allowance for impairment losses each of them amount to Rp1.155.450.000 as of December 31, 2014 and 2013.*
Aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp111.212.237.722 dan Rp98.669.102.976 tanggal 31 Desember 2014 dan 2013.	2o, 2q, 10	416,123,256,336	177,641,952,876	*Fixed assets net of accumulated depreciation respectively amount to Rp111.212.237.722 and Rp98.669.102.976 as of December 31, 2014 and 2013.*
Aset pajak tangguhan	2ad, 11	17,100,724,094	23,367,206,668	*Deferred tax assets*
Aset lain-lain	2n,p,r,s,12	228,659,148,848	165,512,590,159	*Other assets*
Jumlah aset		**22,854,068,135,006**	**19,459,918,108,482**	*Total assets*

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to financial statements an integral part of this financial statements

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2014 dan 2013
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
December 31, 2014 and 2013
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / *Notes*	31 Desember 2014/ *December 31, 2014*	31 Desember 2013/ *December 31, 2013*	
Liabilitas dan ekuitas				***Liabilities and equity***
Liabilitas segera	2v, 2ab, 13	840,737,125,435	1,258,386,729,165	*Current liabilities*
Simpanan dari nasabah				*Deposits from costumers*
Giro				*Current acoount*
Pihak berelasi	2d, 2w, 14	5,345,520,593,869	4,708,273,247,390	*Related parties*
Pihak ketiga		1,754,413,523,539	2,440,583,446,726	*Third parties*
Jumlah		7,099,934,117,409	7,148,856,694,116	*Total*
Tabungan				*Savings*
Pihak berelasi	2d, 2w, 14	9,920,404,007	5,130,156,988	*Related parties*
Pihak ketiga		4,306,507,855,228	4,574,105,150,238	*Third parties*
Jumlah		4,316,428,259,235	4,579,235,307,226	*Total*
Deposito berjangka				*Time deposits*
Pihak berelasi	2d, 2w, 14	3,235,688,468,175	938,736,662,270	*Related parties*
Pihak ketiga		2,275,240,071,052	975,879,188,709	*Third parties*
Jumlah		5,510,928,539,227	1,914,615,850,979	*Total*
Jumlah simpanan dari nasabah		**16,927,290,915,871**	**13,642,707,852,322**	*Total deposits from costumers*
Simpanan dari bank lain				*Deposits from other banks*
Pihak berelasi	2d, 2x, 15	8,768,476,216	5,815,836,584	*Related parties*
Pihak ketiga		1,801,978,020,275	1,850,882,070,049	*Third parties*
Jumlah		1,810,746,496,492	1,856,697,906,633	*Total*
Obligasi yang diterbitkan	1b, 2y, 16	499,893,929,908	499,785,215,979	*Bond issued*
Pinjaman yang diterima	2d, 17	311,373,187,002	4,296,233,979	*Borrowings*
Hutang Pajak	2ad, 19	9,139,254,836	67,537,660,092	*Tax liabilities*
Liabilitas lain-lain	20	67,749,386,041	53,633,711,550	*Other liabilities*
Jumlah Liabilitas		**20,466,930,295,585**	**17,383,045,309,720**	*Total liabilities*
Ekuitas				***Equity***
Modal saham				*Share capital*
Modal dasar perseroan berjumlah Rp2.000.000.000.000 terbagi atas 20.000.000 lembar saham yang terdiri dari 17.000.000 saham seri A dengan nilai nominal per lembar saham Rp100.000 dan 3.000.000 saham seri B dengan nilai nominal per lembar saham Rp100.000				*Authorized capital company as of Association are Rp2.000.000.000.000 for 20.000.000 per share are consist of 17.000.000 per Share of A Series with par Value amount to Rp 100.000 and 3.000.000 per Share of B Series with par value amount to Rp 100.000 per share*
Modal ditempatkan dan disetor penuh oleh para pemegang saham masing-masing sebanyak 9.767.879 dan 9.571.461 lembar saham seri A dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp100.000 atau masing-masing seluruhnya sebesar Rp976.787.900.000 dan Rp957.146.100.000 pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013.	1a, 21	976,787,900,000	957,146,100,000	*Capital placement and fully paid by stockholders each are 9.767.879 and 9.571.461 per share of A Series with par value amount to Rp100.000 per share or each equivalent to Rp976.787.900.000 and Rp957.146.100.000 and as of December 31, 2014 and 2013.*
Tambahan modal disetor	22	64,500,700,524	21,727,100,524	*Additional paid-up capital*
Kerugian bersih yang belum direalisasi dari penurunan nilai wajar efek-efek dan obligasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual	7	(3,828,701,024)	(4,980,057,996)	*Unrealized losses on availabel for impairment losses sale marketable securities and Governmment Bonds*
Saldo laba	23			*Retained earnings*
Cadangan umum dan tujuan	2ab, 2ac	774,861,564,706	605,613,454,198	*General reverses and purpose*
Belum ditentukan penggunaannya		574,816,375,214	497,366,202,036	*Unappropriated*
Jumlah saldo laba		**1,349,677,939,920**	**1,102,979,656,234**	*Total retained earnings*
Jumlah ekuitas		**2,387,137,839,421**	**2,076,872,798,762**	*Total equity*
Jumlah liabilitas dan ekuitas		**22,854,068,135,006**	**19,459,918,108,482**	*Total liabilities and equity*

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to financial statements an integral part of this financial statements

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2014 dan 2013
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI
STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME
Years ended
December 31, 2014 and 2013
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / *Notes*	31 Desember 2014/ *December 31, 2014*	31 Desember 2013/ *December 31, 2013*	
Pendapatan dan beban operasional				***Operating income and expense***
Pendapatan bunga dan syariah				*Interest income and sharia income*
Pendapatan bunga	2z, 2aa, 24	2,089,368,476,935	1,892,297,763,754	*Interest income*
Pendapatan syariah	2z, 2aa, 24	85,630,391,990	67,293,446,834	*Sharia Income*
Jumlah pendapatan bunga dan syariah		**2,174,998,868,925**	**1,959,591,210,588**	*Total interest and sharia income*
Beban bunga dan syariah				*Interests and sharia expenses*
Beban bunga	2z, 25	796,374,583,316	634,841,303,282	*Interests expenses*
Beban syariah	2z, 2aa, 25	20,672,349,693	16,688,943,634	*Sharia expense*
Provisi dan komisi	2z, 2aa, 24	808,873,653	723,727,055	*Fees and commission*
Jumlah beban bunga dan syariah		**817,855,806,662**	**652,253,973,971**	*Total interests and sharia expenses*
Pendapatan bunga dan syariah - bersih		**1,357,143,062,263**	**1,307,337,236,617**	*Net interest and sharia income*
Pendapatan operasional lainnya	26	163,553,670,457	120,945,939,294	*Other operating income*
Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif	2k, 2l, 2u, 27	27,368,816,219	53,105,953,991	*Allowance for impairment losses on expenses of velue productive assets*
Beban operasional lainnya				*Other operating expenses*
Umum dan administrasi	28	176,753,513,652	155,986,658,951	*General and administrative*
Tenaga kerja	2ab, 28	485,134,320,808	424,520,677,570	*Personnel and labourer*
Lain-lain	28	143,557,732,447	152,207,942,168	*Others*
Jumlah beban operasional lainnya		**805,445,566,907**	**732,715,278,689**	*Total other operating expenses*
Laba operasional		**687,882,349,594**	**642,461,943,230**	*Operating income*
Pendapatan dan (beban) non operasional				***Non operating income and (expenses)***
Pendapatan non operasional	29	31,103,579,057	9,764,470,904	*Non operating income*
Beban non operasional	29	(28,844,723,286)	(48,351,851,788)	*Non operating expense*
Jumlah		2,258,855,770	(38,587,380,884)	Total
Laba sebelum pajak		**690,141,205,364**	**603,874,562,346**	*Income before tax*
Manfaat (beban) pajak penghasilan	2ad			***Income (expenses) tax***
Pajak kini	19	(183,688,059,000)	(182,026,061,250)	*Current tax expenses*
Pajak tangguhan	11	(5,882,696,916)	1,271,775,174	*Deferred tax*
Jumlah		**(189,570,755,916)**	**(180,754,286,076)**	*Total*
Laba bersih tahun berjalan		**500,570,449,448**	**423,120,276,270**	*Net profit*
Pendapatan komprehensif lain :				***Others comprehensive income :***
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek dan obligasi pemerintah yang tersedia untuk dijual - neto dengan jumlah yang ditranfer ke laba rugi sehubungan dengan perubahan nilai wajar efek-efek dan obligasi yang tersedia untuk dijual	7	(5,104,934,698)	(6,640,077,328)	*Unrealised profit (losses) on available for sale marketable securities and Government Bonds - with ammounts transferred to profit or loss in respect of fair value of available for sale marketable securities and Government bonds*
Pajak penghasilan terkait dengan komponen pendapatan komprehensif lainnya	7	1,276,233,675	1,660,019,332	*Income tax relating to components of other comprehensive income*
Pendapatan komprehensif lain setelah pajak		(3,828,701,024)	(4,980,057,996)	*Other comprehensive income, net of tax*
Jumlah laba (rugi) komprehensif		496,741,748,424	418,140,218,274	*Total comprehensive Income*
Laba bersih per saham	2ae, 32	51,855	45,960	*Net profit as authorized share capital*

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to financial statements an integral part of this financial statements

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2014 dan 2013
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI
STATEMENTS OF CHANGE IN EQUITY
Years ended
December 31, 2014 and 2013
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	Modal ditempatkan dan disetor penuh / *Issued and Paid-up capital*	Tambahan Modal disetor / *Additionalpaid-up capital*	Kerugian yang belum direalisasi atas efek-efek dan obligasi pemerintah dalam kelompok tersedia untuk dijual / Unrealised losses on available for sale marketable securities and Government Bonds,	Saldo Laba / *Retained Earnings*		Jumlah Ekuitas / Total Equity	
					Cadangan umum dan tujuan / *General reverses and purpose*	Yang belum ditentukan penggunaannya / *Unappropriated*		
Saldo 31 Desember 2012		**894,874,800,000**	**64,356,556,579**	**-**	**478,382,990,191**	**375,161,990,397**	**1,812,776,337,167**	***Balance as of December 31, 2012***
Tambahan Modal disetor	22	-	19,641,843,946	-	-	-	19,641,843,946	*Additional paid - up capital*
Reklasifikasi dari Tambahan Modal disetor	22	62,271,300,000	(62,271,300,000)	-	-	-	-	*Reclasification from Additional paid - up capital*
Pembagian saldo laba								*Prior retained earnings*
Dividen	23	-	-	-	-	(190,845,696,011)	(190,845,696,011)	*Dividend*
Cadangan umum dari pembagian laba	23	-	-	-	69,976,755,204	(69,976,755,204)	-	*General reserve from prior retained earnings*
Cadangan tujuan dari pembagian laba	23	-	-	-	57,253,708,803	(57,253,708,803)	-	*Purpose reserve from prior retained earnings*
Dana CSR - dikembalikan ke laba ditahan	23					17,160,095,387	17,160,095,387	*Purpose reserve from prior retained earnings*
Kerugian bersih yang belum direalisasi dari Penurunan nilai wajar efek-efek dan obligasi pemerintah yang tersedia untuk dijual.	7	-	-	(4,980,057,996)	-	-	(4,980,057,996)	*Unrealised losses on available for sale marketable securities and Government Bonds*
Laba bersih tahun berjalan	23	-	-	-	-	423,120,276,270	423,120,276,270	*Net profit*
Jumlah mutasi		**62,271,300,000**	**(42,629,456,054)**	**(4,980,057,996)**	**127,230,464,007**	**122,204,211,639**	**264,096,461,596**	***Amount***
Saldo 31 Desember 2013		**957,146,100,000**	**21,727,100,525**	**(4,980,057,996)**	**605,613,454,198**	**497,366,202,036**	**2,076,872,798,763**	***Balance as of June 30, 2013***
Tambahan Modal disetor	22	-	62,415,400,000	-	-	-	62,415,400,000	*Additional paid - up capital*
Reklasifikasi dari Tambahan Modal disetor	22	19,641,800,000	(19,641,800,000)	-	-	-	-	*Reclasification from Additional paid - up capital*
Pembagian saldo laba								*Prior retained earnings*
Dividen	23	-	-	-	-	(253,872,165,762)	(253,872,165,762)	*Dividend*
Cadangan umum dari pembagian laba	23	-	-	-	93,086,460,779	(93,086,460,779)	-	*General reserve from prior retained earnings*
Cadangan tujuan dari pembagian laba	23	-	-	-	76,161,649,729	(76,161,649,729)	-	*Purpose reserve from prior retained earnings*
Kerugian yang belum direalisasi atas efek-efek dan obligasi pemerintah dalam kelompok tersedia untuk dijual	7	-	-	1,151,356,973	-	-	1,151,356,973	*Unrealised losses on available for sale marketable securities and Government Bonds*
Laba bersih tahun berjalan	23	-	-	-	-	500,570,449,448	500,570,449,448	*Net profit*
Jumlah mutasi		**19,641,800,000**	**42,773,600,000**	**1,151,356,973**	**169,248,110,508**	**77,450,173,178**	**310,265,040,659**	***Amount***
Saldo per 31 Desember 2014		**976,787,900,000**	**64,500,700,524**	**(3,828,701,024)**	**774,861,564,706**	**574,816,375,214**	**2,387,137,839,421**	***Balance as of June 30, 2014***

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to financial statements an integral part of this financial statements

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI
LAPORAN ARUS KAS
Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI
STATEMENTS OF CASH FLOWS
Years ended December 31, 2014 and 2013
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / *Notes*	31 Desember 2014/ *December 31, 2014*	31 Desember 2013/ *December 31, 2013*	
Arus kas dari aktivitas operasi				***Cash flows by operating activities***
Penerimaan bunga dan syariah		2,155,492,127,445	1,912,619,110,786	*Receipts of interest and sharia*
Pembayaran bunga, bagi hasil syariah		(804,293,203,090)	(653,840,717,133)	*Payments of Interest and sharia*
Penerimaan operasional lainnya		20,767,788,010	93,278,885,076	*Receipts of others operating*
Pembayaran beban umum dan administrasi		(143,332,220,479)	(113,116,233,781)	*Payments of general and administration*
Pembayaran beban tenaga kerja		(440,397,804,015)	(398,562,525,261)	*Payments of employee expenses*
Penerimaan (pembayaran) pendapatan (beban) non operasional bersih		990,825,651	(42,937,129,473)	*Receipts and payments of non operating income (expenses) net*
Pembayaran pajak penghasilan		(180,023,214,000)	(151,928,109,600)	*Payments of income taxes*
Arus kas sebelum perubahan aset operasi dan liabilitas operasi		**609,204,299,521**	**505,367,838,448**	*Cash flow before changes inoperating assets and liabilities*
Penurunan (kenaikan) aset operasi				***Decrease (increase) in operating assets***
Surat berharga		(364,724,218,914)	(184,268,377,679)	*Marketable securities*
Kredit yang diberikan		(1,253,140,595,173)	(1,733,128,929,288)	*Loans*
Aset lain-lain		134,707,920,931	105,500,900,080	*Others Asset*
(Penurunan) kenaikan liabilitas operasi				***(Decrease) increase in operating liabilities***
Simpanan Nasabah		3,284,583,063,549	(1,710,170,300,416)	*Costumers deposit*
Simpanan dari bank lain		(45,951,410,141)	555,277,620,123	*Others bank deposit*
Liabilitas segera		(464,729,570,882)	468,314,985,799	*Current liabilities*
Hutang pajak		(242,086,464,256)	(120,418,279,351)	*Tax payable*
Liabilitas lain-lain		(9,825,451,163)	(32,662,262,636)	*Others liabilities*
Jumlah		**1,038,833,273,950**	**(2,651,554,643,368)**	*Total*
Arus kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi		**1,648,037,573,471**	**(2,146,186,804,920)**	*Net cash flow provided by (used in) operating activities*
Arus kas dari aktivitas investasi				***Cash flows from investing***
Pembelian aset tetap	2o, 10	(257,035,240,992)	(32,650,992,680)	*Fixed asset buying*
Penjualan aset tetap	2o, 10	22,592,249	303,268,900	*Fixed asset selling*
Arus kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi		**(257,012,648,743)**	**(32,347,723,780)**	*Net cash flow provided by (used in) invesment activities*
Arus kas dari aktivitas pendanaan				***Cash flows provided financing***
Pinjaman yang diterima		307,076,953,023	1,130,937,712	*Borrowings*
Pembayaran dividen		(253,872,165,762)	(190,845,696,011)	*Dividend payment*
Program kemitraan dan bina lingkungan		(21,572,000,000)	(12,062,500,000)	*Partnership and environment program*
Tambahan modal disetor		62,415,400,000	19,641,843,946	*Additional paid-up capital*
Arus kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) pendanaan		**94,048,187,261**	**(182,135,414,353)**	*Net cash flow provided by (used in) financing activities*
Kenaikan bersih kas		1,485,073,111,989	(2,360,669,943,053)	*Net increase in cash*
Kas dan setara kas awal		6,523,230,422,016	8,883,900,365,069	*Cash, cash equivalents at the beginning*
Kas dan setara kas akhir		**8,008,303,534,006**	**6,523,230,422,016**	*Cash and cash equivalents at the end*
Kas dan setara kas pada akhir tahun				***Cash and cash equivalent at end of year***
Kas	2e, 3	775,964,466,541	573,069,943,336	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	2f, 4	1,289,270,431,156	1,214,020,913,656	*Current account with Bank Indonesia*
Giro pada Bank lain	2f, 5	69,642,528,594	98,471,093,030	*Current account with others bank*
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain	2g, 6	5,873,426,107,715	4,637,668,471,995	*Placement with bank Indonesia and other bank*
Jumlah kas dan setara kas		**8,008,303,534,006**	**6,523,230,422,016**	*Total cash and cash equivalents*

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan/ *The accompanying notes to financial statements an integral part of this financial statements*

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2014 dan 2013
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years ended
December 31, 2014 and 2013
(Expressed in fully Rupiah, unless otherwise stated)

1. Umum

a. Pendirian Bank dan Informasi Umum

Bank kebanggaan milik masyarakat Riau dan Kepri ini didirikan sesuai dengan Undang-Undang No. 13 tahun 1962 tentang Bank Pembangunan Daerah. Terhitung tanggal 01 April 1966 secara resmi kegiatan Bank Pembangunan Daerah Riau dimulai dengan status sebagai Bank Milik Pemerintah Daerah Riau.

Dengan berbagai perubahan dan perkembangan kegiatan bank,sejak tahun 1975 status pendirian Bank Pembangunan Daerah Riau disesuaikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor 10 Tahun 1975,yang kemudian diatur kembali dengan Peraturan Daerah Tingkat I Riau Nomor 18 tahun 1986 berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962. Status pendirian Bank Pembangunan Daerah Riau diatur dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah No. 14 tahun 1992 tentang Bank Pembangunan Daerah Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Bank Pembangunan Daerah Riau.

Selanjutnya Bank Pembangunan Daerah Riau disetujui berubah status dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) sesuai hasil Keputusan RUPS tanggal 26 Juni 2002 yang dibuat oleh notaris Ferry Bakti,SH dengan Akta Nomor 33,yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2002 tanggal 26 Agustus 2002 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2002 Nomor 50. Perubahan Bentuk Hukum tersebut telah dibuat dengan Akta Notaris Muhammad Dahad Umar,SH Notaris di Pekanbaru nomor 36 tanggal 18 Januari 2003 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM dengan Surat Keputusan Nomor:C-09851.HT.01.01.TH.2003 tanggal 5 Mei 2003. Perubahan badan hukum tersebut telah disahkan dalam RUPS tanggal 13 Juni 2003 yang dituangkan di dalam Akta Notaris No. 209 tanggal 13 Juni 2003 Notaris Yondri Darto,SH,Notaris di Batam,dan telah pula mendapat persetujuan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia nomor 5/30/KEP.DGS/2003 tanggal 22 Juli 2003.

Sesuai keputusan RUPSLB tanggal 26 April 2010,telah dilakukan perubahan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Riau menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri yang disingkat PT. Bank Riau Kepri setelah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI melalui keputusan No.AHU-36484.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 22 Juli 2010 dan Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Direktur Perdata No.AHU.2-AH.01.01-6849 tanggal 25 Agustus 2010,serta persetujuan dari Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/59/KEP.GBI/2010 tanggal 23 September 2010.

1. General

a. Establishment of the Bank and general information

Bank owned community pride Riau and Riau Islands is established in accordance with Act No. 13 of 1962 on Regional Development Banks. Commencing on April 1, 1966 officially Riau Regional Development Bank activities began with its status as a government-owned Bank of Riau.

With various changes and development activities of the bank, since 1975 the status of the establishment of the Regional Development Bank Riau adjusted with Provincial Regulation Level Region Riau No. 10 of 1975, which is then set back to the level I Riau Regional Regulation No. 18 of 1986 by Law No. 13 Year 1962. Status of establishment of the Regional Development Bank Riau arranged and adapted to the Regional Regulation No. 14 of 1992 on the Riau Regional Development Bank pursuant to Act No. 7 of 1992 on Banking. Finally the Provincial Regulation Level Region Riau No. 5 of 1998 on First Amendment Regulations Provincial Level Region Riau No. 14 of 1992 on Regional Development Bank Riau.

Furthermore Riau Regional Development Bank approved changing the status of the Regional Company (PD) into a Limited Liability Company (PT) according to the results Decisions Annual General Meeting on June 26, 2002 made by notary Ferry Bakti, SH by Deed No. 33, which is then determined by the Regional Regulation No. 10 of 2002 dated August 26, 2002 and has been enacted in the Riau Provincial Gazette 2002 No. 50. Conversion of the law has been made by Deed Dahad Muhammad Umar, SH, Notary in Pekanbaru number 36 dated January 18, 2003 which was approved by the Minister of Justice and Human Rights with Decree Number: C-09851.HT.01.01.TH.2003 May 5, 2003. Changes in the legal entity has been approved in the Annual General Meeting on June 13, 2003 are set forth in the Deed No. 209 dated June 13, 2003 Notary Yondri Darto, SH, Notary in Batam, and has also received the approval of the Senior Deputy Governor of Bank Indonesia Number 5/30 / KEP.DGS / 2003 dated July 22, 2003.

At the discretion of the EGM dated April 26, 2010, has made changes to the name of PT. Riau Regional Development Bank to PT. Regional Development Bank Riau Riau Islands abbreviated PT. Bank Riau Riau Islands after the approval of the Minister of Justice and Human Rights through No.AHU decision-36484.AH.01.02 Year 2010 dated July 22, 2010 and the letter of the Director General of the General Director of Civil Law Administration No.AHU.2-AH.01.01-6849 date August 25, 2010, as well as the approval of Bank Indonesia Bank Indonesia Governor Decree No.12 / 59 / KEP.GBI / 2010 dated 23 September 2010.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2014 dan 2013
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years ended
December 31, 2014 and 2013
(Expressed in fully Rupiah, unless otherwise stated)

1. Umum (lanjutan)

a. Pendirian Bank dan Informasi Umum (Lanjutan)

Melalui Surat dari Bank Indonesia No. 6/7/DPbs/Pbr tanggal 27 Februari 2004 dinyatakan bahwa Bank Indonesia Menyetujui Prinsip Pembukaan Kantor Cabang Syariah Bank Riau dengan memperhatikan ketentuan PBI No.4/1/PBI/2002.

Berdasarkan Surat Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor : 9/5/KEP.DpG/2007 tanggal 15 Maret 2007 tentang penunjukan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Riau sebagai Bank Umum Devisa ditetapkan bahwa Bank harus melaksanakan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing dengan nasabahnya dan atau melakukan transaksi perbankan dengan pihak-pihak di luar negeri. Bank juga wajib menyampaikan laporan tertulis yang berkaitan dengan pelaksanaan transaksi devisa dan kegiatan valuta asing yang telah dan sedang dilakukan kepada Bank Indonesia setempat.

Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Bank telah dilakukan penyesuaian. Penyesuaian tersebut dinyatakan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Riau, Akta No.33 tanggal 23 Mei 2008, yang dibuat oleh Notaris Refizal,SH.MHum. Dalam akta tersebut juga ditetapkan modal dasar perseroan berjumlah Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun rupiah) terbagi atas 20.000.000 (dua puluh juta) saham yang terdiri dari 17.000.000 (tujuh belas juta) saham seri A dengan nilai nominal saham sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 3.000.000 (tiga juta) saham seri B dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah). Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh oleh para pemegang saham yaitu sebanyak 5.160.400 (lima juta seratus enam puluh ribu empat ratus) lembar saham seri A dengan jumlah nominal seluruhnya sebesar Rp516.040.000.000,- (lima ratus enam belas milyar empat puluh juta rupiah).

Selanjutnya berdasarkan Akta Risalah Rapat "Bank" Akta No. 277, tanggal 26 Desember 2008, yang dibuat Notaris Yondri Darto, SH Notaris di Batam, menyetujui tambahan modal disetor perseroan sebesar Rp63.157.194.230,- (enam puluh tiga milyar seratus lima puluh tujuh juta seratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tiga puluh rupiah) sehingga dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh oleh para pemegang saham yaitu sebanyak 5.791.968 (lima juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh delapan) lembar saham seri A dengan jumlah nominal seluruhnya sebesar Rp579.196.800.000.- (lima ratus tujuh puluh sembilan milyar seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).

Pada tahun 2009 terdapat penambahan modal disetor sebesar Rp89.106.300.000, sehingga jumlah modal disetor "Bank" per 31 Desember 2009 menjadi Rp668.303.100.000,- (enam ratus enam puluh delapan milyar tiga ratus tiga juta seratus ribu rupiah) sebagaimana surat Direksi "Bank" kepada Bank Indonesia, No. 13/DIR/2010, tanggal 05 Januari 2010, tentang Laporan Perubahan Modal Disetor.

1. General (continued)

a. Establishment of The Bank and General Information (Continued)

According to the Letter from Bank Indonesia No. 6/7/DPbs/Pbr dated on 27th of February 2004 stated that Bank Indonesia Approves the Principal of Opening the Branch Office of Syariah Bank Riau by considering the provisions of PBI No.4/1/PBI/2002.

Based on the Decree Letter by the Deputy Governor of Bank Indonesia Number: 9/5/KEP.DpG/2007 dated 15th of March 2007 on the appointment of Limited Liability Company Bank Pembangunan Daerah Riau as Foreign Exchange Public Bank resolving that the Bank must perform its banking business activities in foreign exchange with its customers and or performing banking transactions with parties overseas. The bank also is obligated to deliver written reports related to the performance of foreign exchange transaction and foreign exchange activities already and being performed to the local Bank Indonesia.

For fulfill regulation of Amandement Number 40 year 2007 dated on August 16, 2007 about Limited Company, the Bank was do did Adjusment. That adjusment was in Notarial deed at General Meeting Stockholder PT Bank Riau with Noatrial number 33 dated on May 23, 2008 by Noatries Refizal, SH, M.Hum. In that notarial deed will be decided authorized capital of Rp2.000.000.000.000,- (two thousand billion rupiah) consist of 20.000.000 (twenty millions) shares which Consists of 17.000.000 (seventeen milions) Seri A shares with Share Nominal Value Rp100.000 (one hundred thousand rupiah) and 3.000.000 (three million) Seri B shares with Share Nominal Value Rp100.000 (one hundred thousand rupiah). That authorized capital has been placed and fully paid by share holders that is 5.160.400 (five million one hundred sixty thousand and four hundred) Seri A shares with total Nominal Rp516.040.000.000 (five hundred sixteen billion and forty million rupiah).

Then based on the Minutes of Meeting Deed of PT Bank Riau, Deed Number 277, dated December 26, 2008, Drawn up by Notary Yondri Darto, SH. Notary in Batam, have approved the fully paid additional of Rp63.157.194.230,- (sixty three billion one hundredt million fivety seven million one hundred ninety four thousand two hundred and threety) so that from the authorized capital has been placed and fully paid by shareholders as much as 5.791.968 (five million seven hundred ninety one thousand and nine hundred sixty eight) Seri A shares with total nominal value of Rp579.196.800.000 (five hundred seventynine billion one hundred ninety six million and eight hundred thousand rupiah).

In the year 2009 there are addition paid up capital amount Rp89.106.300.000,- so that total paid capital "Bank" 31 December 2009 to become amount Rp668.303.100.000,- (Six hundred sixtyeight billion three hundred three million and one hundred thousand rupiah). Based on latter Director "Bank" to Bank of Indonesia, No.13/DIR/2010, date on January 5, 2010, about change of paid in capital Statements.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2014 dan 2013
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years ended
December 31, 2014 and 2013
(Expressed in fully Rupiah, unless otherwise stated)

1. Umum (lanjutan)

a. Pendirian Bank dan Informasi Umum (Lanjutan)

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 41 pada tanggal 26 April 2010 Notaris Fery Bakti, SH yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Nomor AHU-36484.AH.01.02.Tahun 2010 pada tanggal 22 Juli 2010 bahwa Bank mengganti nama Perseroan dari semula "PT Bank Pembangunan Daerah Riau" atau disingkat "PT Bank Riau" berubah menjadi "PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri" atau disingkat "PT Bank Riau Kepri".

Selanjutnya berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diaktakan oleh Notaris Yondri Darto, SH dengan nomor Akta 125 pada tanggal 19 Agustus 2010 dijelaskan bahwa tujuan dari dirubahnya nama Perseroan menjadi PT Bank Riau Kepri adalah guna meningkatkan kemampuan Perseroan dalam menghimpun dana masyarakat yang berada di provinsi Riau dan provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan perubahan Anggaran Dasar Bank sesuai akta nomor 53 tanggal 31 Desember 2010 oleh Notaris Fery Bakti, SH, menyatakan persetujuan penambahan modal disetor Bank sebesar Rp78.929.800.000. Jumlah modal saham yang ditempatkan dan disetor penuh oleh para pemegang saham per 31 Desember 2010 dan 2009 sesuai dengan perubahan anggaran dasar yang diaktakan dengan akta nomor 06 tanggal 8 Januari 2010 oleh Notaris Fery Bakti, SH masing-masing sebesar 7.479.441 dan 6.683.031 lembar saham seri A dengan nilai nominal saham sebesar Rp100.000 per lembar saham atau masing-masing sebesar Rp747.944.100.000 dan Rp668.303.100.000. Penambahan modal ditempatkan dan modal disetor sebesar Rp78.929.800.000 telah dicatat sesuai dengan administrasi Bank Indonesia berdasarkan surat No. 13/25/DPIP/Prz/Pbr tanggal 25 April 2011 perihal perubahan modal disetor penuh oleh masing-masing pemegang saham.

Perubahan modal disetor selanjutnya, sebagaimana diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, yang tercantum dalam Berita Acara Rapat dengan akta no.45 tanggal 30 Mei 2011 yang diaktakan oleh Notaris Fery Bakti, SH menyetujui besar modal disetor Bank per 31 Desember 2011 menjadi Rp826.873.900.000 atau 8.268.739 lembar saham.

Pada RUPSLB tanggal 31 Mei 2011 diputuskan perubahan anggaran dasar sebagaimana akta nomor 47 tanggal 31 Mei 2011 oleh Notaris Fery Bakti, SH mengenai persetujuan dan pengesahan perubahan modal disetor Bank dari Rp826.873.900.000 meningkat menjadi Rp840.073.900.000. Kenaikan modal sebesar Rp13.200.000.000 berasal dari setoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp12.000.000.000 dan setoran Pemerintah Kabupaten Siak Sri Indrapura berupa tanah dengan nilai Rp1.200.000.000.

1. General (continued)

a. Establishment of The Bank and General Information (Continued)

Based on Decision meeting was notarial deed number 41 dated April 26, 2010 by Notaries Fery Bakti, SH was have been aproval by Human Rights and Law Minister number AHU-36484.AH.01.02. year 2010 dated on July 22, 2010 is Bank was replacement the company name which before are "PT Bank Pembangunan Daerah Riau" or "PT Bank Riau" was changed with name "PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri" or "PT Bank Riau Kepri".

Then based on General Meeting Of Shareholders was notarial deed by Noatries Yondri Darto, SH with number 125 dated August 19, 2010 representitive are purposed from changed the name of company to become PT Bank Riau Kepri is use to provide company ability in finding people fund is in Riau Province and Riau Island Province.

Based on changed of amandement of the Bank with notarial deed number 53 dated December 31, 2010 by notaries Fery Bakti, SH about approval for replacement of paid up capital in the Bank in the amount of Rp78.929.800.000.he total capital placed and deposited fully paid by the shareholders per the 31st of December 2010 and 2009 in accordance with the amendment of articles of association deeded by deed number 06 dated the 8th of January 2010 by Notary Fery Bakti, SH respectively in the amount of 7.479.441 and 6.683.031 share certificates series A with share nominal value in the amount of Rp100.000 per share certificate or each in the amount of Rp747.944.100.000 and Rp668.303.100.000. Additional placed of capital and paid up capital amounted of Rp78.929.800.000 has been recorded in the administration of Bank Indonesia based on the letter No. 13/25/DPIP/Prz/Pbr dated April 25, 2011 on the subject of changes in deposited capital dan fully paid by the shareholders, respectively.

Changes in deposited capital based on General Meeting Of Shareholders, notarial deed number 45 dated on May 30, 2011 by notaries Fery Bakti, SH accepted its authorized fully paid up capital of Bank as of December 31, 2011 was changed to become Rp826.873.900.000 or 8.268.739 share .

On General Meeting Of Shareholders (GMOS), Based on amandment of the Bank of notarial deed number 47 dated on May 31, 2011 by Fery Bakti, SH about approvement and legalization changing of authorized Bank capital from Rp826.873.900.000 to become Rp840.073.900.000. That capital raise amounting to Rp13.200.000.000 which are from the goverment of Riau Island Province paid up amount Rp12.000.000.000 and land from the regional goverment of Siak Sri Indrapura was appraisal value are amounting to Rp1.200.000.000.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2014 dan 2013
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years ended
December 31, 2014 and 2013
(Expressed in fully Rupiah, unless otherwise stated)

1. Umum (lanjutan)

a. Pendirian Bank dan Informasi Umum (Lanjutan)

Penambahan modal ditempatkan dan modal disetor sebesar Rp13.200.000.000 telah dicatat dan ditatausahakan sesuai dengan administrasi Bank Indonesia berdasarkan surat No.14/12/DPB1/APBU/Pbr tanggal 7 Pebruari 2012 perihal Tambahan setoran modal dan Perubahan Komposisi Kepemilikan Saham.

Modal disetor kembali ditingkatkan sebagaimana Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dengan akta no.45 tanggal 15 Juni 2012 yang diaktakan oleh Notaris Refizal, SH, M.Hum. Berdasarkan akta tersebut posisi modal disetor Bank berubah dari Rp826.873.900.000 menjadi Rp840.073.900.000. Perubahan tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Bank Indonesia. Dengan demikian jumlah modal saham yang ditempatkan dan disetor penuh oleh para pemegang saham sebesar 8.400.739 lembar saham seri A dengan nilai nominal saham sebesar Rp100.000 per lembar saham atau sebesar Rp840.073.900.000.

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat dengan akta no.60 tanggal 26 Juni 2012 yang diaktakan oleh Notaris Refizal, SH, M.Hum dijelaskan bahwa para pemegang saham menyetujui penambahan modal disetor sebesar Rp54.801.000.000 sehingga posisi modal disetor Bank telah berubah dari Rp840.073.900.000 menjadi Rp894.874.900.000. Berdasarkan surat dari Bank Indonesia mengenai Laporan Perubahan Modal Disetor Bank dengan Nomor 14/52/DPB1/APBU/Pbr tanggal 28 Desember 2012, Bank telah mendapatkan penegasan dari Bank Indonesia atas tambahan modal sebesar Rp54.801.000.000 yang telah ditatausahakan sesuai dengan administrasi Bank Indonesia.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Riau Kepri nomor 60 tanggal 26 Juni 2012 yang diaktakan oleh Notaris Refizal, SH, M.Hum menerangkan bahwa telah disetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor oleh para pemegang saham sebesar Rp7.500.000.000 dari Kabupaten Anambas, perubahan tersebut merubah susunan modal ditempatkan yang semula sebesar Rp894.874.800.000 berubah menjadi Rp902.374.800.000.

Berdasarkan surat dari Bank Indonesia nomor 15/5/DPB1/APBU/Pbr tanggal 14 Januari 2013 mengenai Laporan Perubahan Modal Bank Riau Kepri, dijelaskan bahwa Bank telah mendapatkan pengesahan dari Bank Indonesia atas perubahan modal tersebut.

Rencana tambahan modal disetor tahun 2013 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Riau Kepri nomor 43 tanggal 15 Juni 2013 yang diaktakan oleh Notaris Refizal, SH, M.Hum menerangkan bahwa telah disetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor oleh para pemegang saham sebesar Rp.54.771.345.829 dari Pemerintah Daerah dan pengembalian 70% dividen masing-masing pemegang saham yaitu sebesar Rp.133.591.100.000. Sehingga proyeksi modal disetor tahun 2013 dari Rp902.374.800.000 menjadi Rp1.090.737.245.829.

1. General (continued)

a. Establishment of The Bank and General Information (Continued)

Additional placed of capital and paid up capital amounted of Rp13.200.000.000 has been recorded in the administration of Bank Indonesia based on the letter No.14/12/DPB1/APBU/Pbr dated February 7, 2012 on the subject of Additional paid up capital and changing of shareholders composition.

Change Deposited Capital Based on General Meeting Of Shareholders (GMOS) were notarial deed number 45 dated on June 15, 2012 by notaries Refizal, SH, M.Hum mentioned its authorized fully paid up capital of Bank was changed from Rp826.873.900.000 to become Rp840.073.900.000. That changed has been approved and recorded in the administration of Bank Indonesia. Therefore, total capital of share which placement and fully paid up by the shareholders are respectively in the amount of 8.400.739 share certificates series A with share nominal value in the amount of Rp100.000 per share certificate or each in the amount of Rp840.073.900.000.

Based on Meeting declare decision were notarial deed number 60 dated on June 26, 2012 by notaries Refizal, SH, M.Hum that the Shareholders was approved to paid up capital amount to Rp54.801.000.000 mentioned its authorized fully paid up capital of Bank as of December 31, 2012 was changed from Rp840.073.900.000 to become Rp894.874.900.000. Based on Letter of Bank Indonesia on the subject of Additional paid up capital and changing of shareholders composition with number 14/52/DPB1/APBU/Pbr dated December 28, 2012, Bank has confirmed from Bank Indonesia about additional paid up capital amount to Rp54.801.000.000 was has been recorded in the administration of Bank Indonesia.

Based on the minutes of meeting PT Bank Riau Kepri deed number 60 dated on June 26, 2012 by notarial Refizal, SH, M.Hum disclouse about additional paid up and fully paid capital by shareholders amounted to Rp7.500.000.000 from Anambas regional goverment, that changed was changing that additional fully paid with beginning are amounting to Rp894.874.800.000 to become Rp902.374.800.000.

Based on letter from Bank of Indonesia number 15/5/DPB1/APBU/Pbr dated on Januari 14, 2013 about changing report of Bank Riau Kepri capital placement and fully paid up, explained that Bank has obtain confirmation from Bank of Indonesia as that changing.

Addition plan of the working capital 2013 based on the minutes of meeting PT Bank Riau Kepri deed number 43 dated on June 15, 2013 by notarial Refizal, SH, M.Hum disclouse about additional paid up and fully paid capital by shareholders amounted to Rp54.771.345.829 from regional goverment and from 70% devidend amounted to Rp133.591.100.000. That changed was changing projection of the working capital 2013 with beginning are amounting to Rp902.374.800.000 to become Rp1.090.737.245.829.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2014 dan 2013
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years ended
December 31, 2014 and 2013
(Expressed in fully Rupiah, unless otherwise stated)

1. Umum (lanjutan)

a. Pendirian Bank dan Informasi Umum (Lanjutan)

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Riau Kepri nomor 68 tanggal 26 Juni 2013 yang diaktakan oleh Notaris Refizal, SH, M.Hum menerangkan bahwa telah menyetujui penambahan modal disetor sebesar Rp54.771.345.829 sehingga posisi modal disetor Bank telah berubah dari Rp902.374.800.000 menjadi Rp957.146.100.000. Laporan perubahan modal disetor tersebut telah disetujui oleh Bank Indonesia berdasarkan surat No.15/9/DPKP/Pbr tanggal 17 September 2013.

Berdasarkan berita acara rapat umum pemegang saham tahunan PT Bank Riau Kepri nomor 01 tanggal 1 Juni 2014 yang diaktakan oleh Notaris Fery Bakti, SH menerangkan keputusan RUPS sebagai berikut :

1. Menyetujui laporan tahunan tahun buku 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Abdi Ichjar, BAP dan Rekan.
2. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih perseroan tahun buku 2013 sebesar Rp423.120.276.270 dengan komposisi dividen sebesar 60% atau sebesar Rp253.872.165.762, cadangan umum/ wajib 22% atau sebesar Rp93.086.460.779 dan cadangan tujuan/ lainnya 18% atau sebesar Rp76.161.649.729.

   Menyetujui penggunaan cadangan jasa produksi dan tantiem tahun buku 2013 yang telah menjadi biaya dan telah disetujui pada RUPS sebelumnya. Untuk penetapan cadangan jasa produksi dan tantiem tahun buku 2014 akan dievaluasi dan di putuskan pada RUPS berikutnya.
3. Menyetujui penyediaan dana pembinaan kemitraan tahun 2014 sebesar Rp21.000.000.000 yang pelaksanaannya akan diatur oleh Direksi.
4. Menyetujui penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) guna melakukan audit Laporan Keuangan PT Bank Riau Kepri tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2014, RUPS memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik sesuai dengan rekomendasi Komite Audit.
5. Menyetujui besarnya remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Riau Kepri tahun 2014 sebesar Rp32.090.000.000.

Berdasarkan berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) PT Bank Riau Kepri nomor 02 tanggal 1 Juni 2014 yang diaktakan oleh Notaris Fery Bakti, SH menerangkan bahwa telah disetujui penambahan modal disetor tahun 2013 sebesar Rp19.641.800.000 dan telah disetujui rencana tambahan modal disetor tahun 2014 sebesar Rp177.709.600.000 sehingga posisi modal disetor Bank akan berubah dari Rp957.146.100.000 menjadi Rp1.154.497.500.000. Namun hingga saat ini belum ada surat keputusan dari Bank Indonesia

1. General (continued)

a. Establishment of The Bank and General Information (Continued)

Based on the minutes of meeting PT Bank Riau Kepri deed number 68 dated on June 26, 2013 by notarial Refizal, SH, M.Hum disclouse about additional paid up and fully paid capital by shareholders amounted to Rp54.771.345.829 mentioned its authorized fully paid up capital of Bank as of December 31, 2013 was changed from Rp902.374.800.000 to become Rp957.146.100.000. However that changed has approved and recorded in the administration of Bank Indonesia letter No.15/9/DPKP/Pbr on September 17, 2013.

Based on the minute of shareholders' general meeting of PT Bank Riau Kepri number 01 dated June 1, 2014, by the deed of Public Notary Fery Bakti, SH explained the minute of as follows:

1 Approved the 2013 annual report which audited by the Public Accountant Abdi Ichjar, BAP and Partner.

2 Approved the decision in using of the 2013 company's net profit amounted to Rp423.120.276.270 with the composition of, devidend amounted to Rp253.872.165.762, general fund/ necessary 22% or amounted to Rp93.086.460.779 and purpose fund/ others 18% or amounted to Rp76.161.649.729.

Approved in using of production service fund and tantiem of the year 2013 which have become expense and have agreed in the shareholders' general meeting before. The decision of production service fund and tantiem for the year 2014 will be evaluate and decide at the following RUPS.

3 Approved to prepare the construction of join operation fund for the year 2014 amounted to Rp21.000.000.000 that the implementation will be regulate by Board of Directors.

4 Approved the Statement of Public Accountant for audit the Financial Report of PT Bank Riau Kepri tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2014, the Shareholders' General Meeting give the mandate to the Board of Commissionaires to state which Public Accountant in accordance with the recomendation of Audit Commitee.

5 Approved the amount of remuneration for the Board of Commissioner and Board of Directors of PT Bank Riau Kepri for the year 20014 amounted to Rp32.090.000.000.

Based on the the minute of the Shareholders Extraordinary Meeting of PT Bank Riau Kepri number 02 dated June 1, 2014 by the deed of the Public Notary Fery Bakti, SH explained, that have been approved the increasing of paid in capital in the year 2013 amounted to Rp19.641.800.000 and have been agreed the planning of additional of paid in capital for the year 2014 amounted to Rp177.709.600.000 so the position of paid in capital of the bank will be increase from Rp957.146.100.000 to Rp1.154.497.500.000. Inspite of until now there is no decision letter from Bank of Indonesia.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2014 dan 2013
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years ended
December 31, 2014 and 2013
(Expressed in fully Rupiah, unless otherwise stated)

1. Umum (lanjutan)

a. Pendirian Bank dan Informasi Umum (Lanjutan)

Realisasi modal disetor pada tahun 2014 sebesar Rp19.641.800.000 sehingga total modal disetor bank per 31 Desember 2014 menjadi sebesar Rp976.787.900.000. Perubahan modal disetor bank telah disetujui Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau berdasarkan surat OJK No. S-139/KO.5411/2014 tanggal 9 September 2014.

Berdasarkan berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Bank Riau Kepri No.7 tanggal 8 November 2014 yang dibuat oleh notaris Fery Bakti, SH disetujui penambahan modal disetor pemerintah kota Batam sebesar Rp42.940.400.000 dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar Rp10.000.000.000. Sebagaimana juga dinyatakan pada akta pernyataan keputusan rapat PT. Bank Riau Kepri No.06 tanggal 2 Desember 2014 yang dibuat oleh notaris Fery Bakti, SH menyetujui penambahan modal disetor tersebut diatas sehingga total modal disetor menjadi Rp1.029.728.300.000 rincian modal disetor sebesar Rp976.787.900.000 adalah sebagai berikut :

Berdasarkan berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Bank Riau Kepri No.7 tanggal 8 November 2014 yang dibuat oleh notaris Fery Bakti, SH disetujui penambahan modal disetor sebagaimana akta diatas dan menyetujui untuk menetapkan pengangkatan pengurus bank sebagai berikut :

- Menyetujui untuk menetapkan calon-calon komisaris bank untuk diajukan fit and profer test pada Otoritas jasa keuangan (OJK) yaitu calon Komisaris Utama HR. Mambang Mit, Calon Komisaris Non Independen Wan Marwan, Calon Komisaris Independen RM Zubir Salehan.
- Menyetujui perpanjangan sementara masa jabatan Abdul Rivai Rachman sebagai komisaris independen.
- Menyetujui untuk menetapkan calon direktur utama bank yaitu sodara Irvandi Gustari dan Sonni Triandalarso.
- Untuk Direktur Kepatuhan dan Manajemen Resiko, Direktur Dana dan Jasa serta Direktur Kredit dan Syariah akan dilakukan evaluasi kembali.
- Untuk calon Direktur Operasional agar diproses ulang seleksinya oleh Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Menyetujui perpanjangan sementara masa jabatan saudara Chairisman Rasahan sebagai Komisaris independen.
- Menyetujui perpanjangan sementara masa jabatan saudara Wan Marwan sebagai Direktur Operasional.
- Menetapkan perubahan pasal 14 ayat 6 anggaran dasar PT. Bank Riau Kepri tentang periodesasi masa jabatan Dewan Komisaris.

1. General (continued)

a. Establishment of The Bank and General Information (Continued)

Realization of paid-in capital in 2014 amounted to Rp19.641.800.000 bringing the total paid up capital of the bank at December 31, 2014 amounted to Rp976.787.900.000. Changes in capital the bank has approved the Office of the Financial Services Authority FSA Riau Province by letter No. S-139 / KO.5411 / 2014 dated September 9, 2014.

Based on the minutes of the general meeting of shareholders extraordinary PT. Bank Riau Riau 7 November 8, 2014 made by notary Fery Bakti, SH approved additional paid-in capital amounted Rp42.940.400.000 Batam city government and the Government of the District of Rp10,000,000,000 Meranti Islands. As also stated in the Deed of PT. Bank Riau Riau Islands No.06 dated December 2, 2014 made by notary Fery Bakti, SH agreed to increase the paid up capital of the above so that the total paid up capital be paid up capital of Rp1.029.728.300.000 Rp976.787.900.000 details are as follows:

Based on the minutes of the general meeting of shareholders extraordinary PT. Bank Riau Riau 7 November 8, 2014 made by notary Fery Bakti, SH approved additional paid-in capital amounted And agreed to establish the appointment of bank management as follows:

Agreed to establish a bank commissioner candidates to put forward fit and profer test on financial services Authority (FSA) is a candidate for Commissioner of HR. Mambang Mit, Non Independent Candidate Commissioner Wan Marwan, Candidate Independent Commissioner RM Zubir Salehan.

Approve the extension of temporary tenure as commissioner Abdul Rachman Rival independent.

Agreed to establish a bank managing director candidates are Sodara Irvandi Gustari and Sonni Triandalarso.

To the Director of Compliance and Risk Management, Director of the Fund and Services and Director of Credit and Sharia will be re-evaluated.

Director of Operations for the candidate in order to reprocess the selection by the Remuneration and Nomination Committee.

Approve the extension of the term of office while you Chairisman Rasahan as an independent commissioner.

Approve the extension of the term of office while Wan brother Marwan as Director of Operations.

Establish a change to Article 14 paragraph 6 of the articles of association of PT. Bank Riau Riau Islands of periodization of the term of office of the Board of Commissioners.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2014 dan 2013
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years ended
December 31, 2014 and 2013
(Expressed in fully Rupiah, unless otherwise stated)

1. Umum (lanjutan)

a. Pendirian Bank dan Informasi Umum (Lanjutan)

Tujuan pendirian PT Bank Pembangunan Daerah Riau yang disebut dengan "Bank Riau" adalah untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah disegala bidang, serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat dengan menyediakan pembiayaan pembangunan, penghimpunan dana dan melaksanakan pekerjaan penyimpanan uang daerah serta kegiatan perbankan pada umumnya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Bank" mempunyai Visi "Sebagai perbankan yang mampu berkembang dan terkemuka di daerah, memiliki manajemen yang profesional dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah sehingga dapat memberdayakan perekonomian rakyat".

b. Penawaran umum obligasi

Obligasi I Bank Riau Kepri Tahun 2011

Pada tanggal 8 Juli 2011, Bank menerbitkan Obligasi I Bank Riau Kepri Tahun 2011 dengan nilai nominal sebesar Rp500.000.000.000. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal emisi sampai tanggal jatuh tempo pada tanggal 8 Juli 2016. Bunga obligasi tetap sebesar 10,4% per tahun dan ditawarkan sebesar 100% dari nilai nominal. Wali amanat penerbitan obligasi tersebut adalah PT Bank Mega, Tbk. Obligasi tersebut tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 11 Juli 2011 dan dinyatakan efektif berdasarkan keputusan Bapepam-LK No.S-7298/BL/2011 pada 30 Juni 2011.

Obligasi I Bank Riau Kepri Tahun 2011

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Bank baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Bank lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Bank yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Bank baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 bulan sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing bunga dimana pembayaran bunga ke-1 dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2011, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi adalah pada tanggal 8 Juli 2016.

1. General (continued)

a. Establishment of The Bank and General Information (Continued)

The purpose of the Regional Development Bank of Riau called as "Bank Riau" are to help and push the economical growth and regional development in every aspects, also as one of regional income source in the frame of increasing quality of life by preparing thedevelopment fund, collecting fund and carry out regional money saving works, and generally bank activity, as long as in the contrary with the regulation of law implemented.

Bank has a vision "As a Banking Incorporation which is capable to grow and become prominent in the region, has a professional management and push the regional economic growth so that it can empowering people's economy".

b. General offering Bonds

Bank Riau Kepri Bond I Years 2011

On July 8, 2011, the Bank issued Bank Riau Kepri years 2011 Bonds I with bond nominal value amounting to Rp500.000.000.000. This bond was issued without letter and this time period are 5 (five) since emition dated till dated of time period on July 8, 2016. The rate of bond interest are 10,4% per annum and offered to public 100% from nominal value. The trustee for that bond issued are PT Bank Mega, Tbk. That bond listed in the Indonesia Stock Exchange dated on July 11, 2011 and became effective based on Bapepam-LK Decision Letter number S-7298/BL/2011 dated on June 30, 2011.

Bank Riau Kepri Bond I Years 2011

This Bonds are not secured by specific guarantee, but secured by all of the Bank's assets, moveable and non-moveable assets, including assets that already owned and will be owned in the future in accordance with Article 1131 and 1132 of Indonesia's Civil Code.

The right of bond holder is side by side equally without any preference right towards other Bank creditors both existing now as well as in the days to come, except for the rights of Bank creditors guaranteed specially by the wealth of the Bank both the one already existing as well as those existing in days.

The interest of the bonds shall be paid every 3 month in accordance with the date of payment for each interest whereas the payment for the first interest shall be performed on October 8, 2011, as for the last payment of the interest, which is also the due date of the bonds shall be on July 8, 2016.

1. Umum (lanjutan)

c. Manajemen Eksekutif

Per 31 Desember 2014

Adapun susunan Komisaris dan Direksi Bank per 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut :

a. Dewan Komisaris
- Komisaris Independen — Drs. H. Abdul Rivaie Rachman
- Komisaris Independen — H. Chairisman Rasahan
- Komisaris Independen — H. Sarjono Amnan, SE, MM

b. Direksi
- Direktur Dana dan Jasa — Nizam Putih, SE. Ak, MM
- Direktur Kredit dan Syariah — H. Afrial Abdullah, SE.Ak, MM
- Direktur Operasional — H. Wan Marwan, SE
- Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko — Eka Afriadi, SE. Ak

c. Komite Audit Bank
- Ketua — H. Chairisman Rasahan
- Anggota — H. Sarjono Amnan, SE, MM
- Anggota — Prof. DR. Kirmizi, MBA, Ak
- Anggota — Drs. Fahmi Oemar, MM.Ak
- Anggota — Indarti, SE.,Ak.MM

d. Komite Pemantau Risiko
- Ketua — H. Sarjono Amnan, SE, MM
- Anggota — H. Chairisman Rasahan
- Anggota — Prof. DR. Kirmizi, MBA, Ak
- Anggota — Drs. Fahmi Oemar, MM.Ak
- Anggota — Indarti, SE.,Ak.MM

e. Komite Remunerasi dan Nominasi
- Ketua — Drs. H. Abdul Rivaie Rachman
- Anggota — H. Chairisman Rasahan
- Anggota — Denny M. Akbar

f. Dewan Pengawas Syariah
- Ketua — Dr. H. Suryan Al Jamrah, MA
- Anggota — Drs. KH. Tengku Zulkarnain, MA

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi tersebut diatas telah disetujui oleh Bank Indonesia melalui surat No.14/44/DPB1/APBU/Pbr tanggal 25 September 2012.

Pengangkatan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan surat keputusan direksi PT Bank Riau Kepri No.09/KEPDIR/2013 tanggal 31 Januari 2013.

Pengangkatan dewan pengawas syariah berdasarkan berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa PT Bank Riau Kepri yang telah diaktakan oleh Notaris Refizal, SH, M.Hum dengan akta Nomor 19 tanggal 13 Februari 2013.

Pengangkatan direktur kepatuhan dan manajemen risiko berdasarkan berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa PT Bank Riau Kepri yang telah diaktakan oleh Notaris Fery Bakti, SH dengan akta Nomor 46 tanggal 29 Juli 2013.

1. General (continued)

c. Executive boards

As of December 31, 2014

The Structure of Board of Commissioners and Directors of the Bank as of December 31, 2014 are as follows:

a. Commissioner
- *Independent Commissioner*
- *Independent Commissioner*
- *Independent Commissioner*

b. Director
- *Funding and Services Director*
- *Credits and Shariah Director*
- *Operational Director*
- *Director of Performance and Risk Management*

c. Bank Auditor Committee
- *Chairman*
- *Member*
- *Member*
- *Member*
- *Member*

d. Risk Monitoring Committee
- *Chairman*
- *Member*
- *Member*
- *Member*
- *Member*

e. Remuneration and Nomination Committee
- *Chairman*
- *Member*
- *Member*

f. Board of Shari'ah Supervisors
- *Chairman*
- *Member*

The appointment of Board of Commissioner and Board of Directors above had been approved by Bank of Indonesia through the letter number 14/144/DPB1/APBU/ Pbr dated September 25, 2012.

The appointment of Audit Committee, Risk Monitoring Committee, and Remuneration Committee, Nominated by board of directors decision of Riau Kepri Bank,Inc. Ltd., number 09/KEPDIR/2013 dated January 31, 2013.

The appointment of board of monitoring of syariah based on the minute of the extraordinary shareholders general meeting of Riau Kepri Bank,Inc. Ltd., in the deed of Notarial Refizal, SH M.Hum Number 19, dated Februari 13, 2013.

The appointment of Director of Performance and Risk Management based on the minute of the extraordinary shareholders general meeting of Riau Kepri Bank,Inc. Ltd., in the deed of Fery Bakti, SH Number 46, dated July 29, 2013.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2014 dan 2013
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years ended
December 31, 2014 and 2013
(Expressed in fully Rupiah, unless otherwise stated)

1. Umum (lanjutan)

c. Manajemen Eksekutif (lanjutan)

Perpanjangan sementara masa jabatan Komisaris Independen dan Direktur Operasional berdasarkan surat OJK No. SR-50/KO.5411/2014 tgl 31 Desember 2014, bahwa perpanjangan sementara masa tugas Sdr. Rivaie Rachman dan Sdr. Chairisman Rasahan sebagai Komisaris dan Sdr. Wan Marwan sebagai Direktur Operasional telah dicatat dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan berlaku sejak berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan pada tanggal 28 Desember 2014 hingga ditetapkannya Direksi dan Komisaris secara definitif oleh RUPS atau selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 2015.

Berdasarkan berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa PT Bank Riau Kepri yang telah diaktakan oleh Notaris Fery Bakti, SH dengan akta Nomor 02 tanggal 1 Juni 2014 , sesuai surat Gubernur Riau No; 500/ADM-EK/45.07 dan surat No; 500/ADM-EK/46.07 tanggal 23 Mei 2014 telah ditetapkan Zaini Ismail sebagai calon Komisaris Utama PT Bank Riau Kepri dan ditetapkannya Yusmar Yusuf sebagai calon Komisaris Independen PT Bank Riau Kepri.

Adapun susunan Komisaris dan Direksi Bank per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut :

a. Dewan Komisaris
- Komisaris Independen — Drs. H. Abdul Rivaie Rachman
- Komisaris Independen — H. Chairisman Rasahan
- Komisaris Independen — H. Sarjono Amnan, SE, MM

b. Direksi
- Direktur Dana dan Jasa — Nizam Putih, SE. Ak, MM
- Direktur Kredit dan Syariah — H. Afrial Abdullah, SE.Ak, MM
- Direktur Operasional — H. Wan Marwan, SE
- Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko — Eka Afriadi, SE. Ak

c. Komite Audit Bank
- Ketua — H. Chairisman Rasahan
- Anggota — H. Sarjono Amnan, SE, MM
- Anggota — Prof. DR. Kirmizi, MBA, Ak
- Anggota — Drs. Fahmi Oemar, MM.Ak
- Anggota — Indarti, SE.,Ak.MM

d. Komite Pemantau Risiko
- Ketua — H. Sarjono Amnan, SE, MM
- Anggota — H. Chairisman Rasahan
- Anggota — Prof. DR. Kirmizi, MBA, Ak
- Anggota — Drs. Fahmi Oemar, MM.Ak
- Anggota — Indarti, SE.,Ak.MM

e. Komite Remunerasi dan Nominasi
- Ketua — Drs. H. Abdul Rivaie Rachman
- Anggota — H. Chairisman Rasahan
- Anggota — H. Hendra Buana

f. Dewan Pengawas Syariah
- Ketua — Dr. H. Suryan Al Jamrah, MA
- Anggota — Drs. KH. Tengku Zulkarnain, MA

Jumlah Karyawan "Bank" pada akhir 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebanyak 2.006 orang dan 1.906 orang.

1. General (continued)

c. Executive boards (Continued)

Temporary extension of the term of office Independent Commissioner and Director of Operations pursuant to the FSA No. SR-50 / KO.5411 / 2014 Date December 31, 2014, that the temporary extension of duty Br. Rivaie Rachman and Br. Chairisman Rasahan as Commissioner and Br. Wan Marwan as Director of Operations has been noted in the administrative supervision of the Financial Services Authority in effect since the end of the term of office concerned on the date of December 28, 2014 until the enactment of the Board of Directors and Commissioners definitively by the AGM or at the latest on June 30, 2015.

Based onthe minute of the Shareholders Extraordinary Meeting of PT Bank Riau Kepri number 02 dated June 1, 2014 by the deed of the Public Notary Fery Bakti, SH in accordance with the letter of Riau Governor Number 500/ADM-EK/45.07 and Number 500/ADM-EK/46.07 dated May 23, 2014 have decided Mr. Zaini Ismail as the candidate of President of Commissioner of PT Bank Riau Kepri and stated Mr. Yusmar Yusuf the candidate of Independent of Commissioner of PT Bank Riau Kepri.

The Structure of Board of Commissioners and Directors of the Bank as of December 31, 2013 are as follows:

a. Commissioner
- *Independent Commissioner*
- *Independent Commissioner*
- *Independent Commissioner*

b. Director
- *Funding and Services Director*
- *Credits and Shariah Director*
- *Operational Director*
- *Director of Performance and Risk Management*

c. Bank Auditor Committee
- *Chairman*
- *Member*
- *Member*
- *Member*
- *Member*

d. Risk Monitoring Committee
- *Chairman*
- *Member*
- *Member*
- *Member*
- *Member*

e. Remuneration and Nomination Committee
- *Chairman*
- *Member*
- *Member*

f. Board of Shari'ah Supervisors
- *Chairman*
- *Member*

Total personil of The Bank as of December 31, 2014 and December 31, 2013 respectively are 2.006 person and 1.906 person.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2014 dan 2013
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years ended
December 31, 2014 and 2013
(Expressed in fully Rupiah, unless otherwise stated)

1. Umum (lanjutan)

d. Jaringan kantor

PT Bank Riau Kepri untuk pelayanan konvensional dan syariah kantor pusat berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman No 377 Pekanbaru - Riau.

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diaktakan oleh Notaris Refizal, SH, M.Hum dengan nomor 45 tanggal 15 Juni 2012, bahwa dilaporkan hingga akhir tahun 2011 jaringan distribusi Bank telah memiliki jaringan yang luas.

Posisi jaringan distribusi Bank yang tersebar di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2014	31 Desember 2013	
Kantor cabang utama	1 unit / office	1 unit / office	*Branch of main office*
Kantor cabang	17 unit / office	16 unit / office	*Branch office*
Kantor cabang pembantu	38 unit / office	33 unit / office	*Branch of sub office*
Kantor kedai	32 unit / office	27 unit / office	*first class office*
Kantor kas	30 unit / office	28 unit / office	*Cash office*
Kantor payment point	6 unit / office	5 unit / office	*Payment point office*
Kantor butik	4 unit / office	4 unit / office	*Boutique office*
Kantor cabang syariah	2 unit / office	2 unit / office	*Branch Sharia office*
Kantor cabang pembantu syariah	5 unit / office	5 unit / office	*Branch of sub sharia office*
Jumlah kantor	**135 unit / office**	**122 unit / office**	***Total office***
Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	149 Atm	140 Atm	*Automatic Teller Machine (ATM)*
Unit kas mobil	6 unit / cars	2 unit / cars	*Oto Banking Mobile*
CDM	2 unit / CDM	1 unit / CDM	*CDM*
EDC	40 unit / EDC	40 unit / EDC	*EDC*
Unit Layanan Syariah	51 unit / office	51 unit / office	*Sharia services units*

Kesemua kantor tersebut tersebar di berbagai daerah Provinsi Riau dan Kepulauan Riau.

1. General (continued)

d. Office Network

Head Office of PT Bank Riau Kepri for conventional and sharia services is located at Jenderal Sudirman Street Number 377 Pekanbaru - Riau.

Based on the minute of Shareholders Annually General Meeting by Notary Refizal, SH, M.Hum under number 45 dated June 15, 2012, reported that untill the end of 2011 Bank has had wide distribution network.

Net working position of the Bank office at Riau province and Riau Island Province as of December 31, 2014 and December 31, 2013 is are follows :

All of offices are location in Riau province and Riau Islands province.

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan keuangan disajikan dengan menggunakan praktek yang lazim berlaku dalam industri perbankan dan standar akuntansi keuangan lainnya yang terkait dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan peraturan Bapepam dan LK No. VIII.G.7 lampiran keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

Laporan keuangan Unit Usaha Syariah yang beroperasi dalam bidang perbankan dengan prinsip syariah menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang menggunakan prinsip akuntansi syariah.

2. Summary of accounting policy

a. Based on Prepared Financial Statement

Statement of Compliance

The Financial statement for the year ended December 31, 2014 and 2013 were prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

The consolidated financial statements have also been prepared using the prevailing banking industry practices and accounting and reporting guidelines prescribed by the Indonesian Banking Regulatory Authority and the Indonesian Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (BAPEPAM) and LK No. VIII.G.7, included in the Appendix ofthe Decision of the Chairman of BAPEPAM -LK No. KEP-347/BL/2012 dated June 25, 2012, about "Financial Statements Presentation and Disclosure for Issuers or Public Companies".

The financial statement of the sharia branches which operating in banking with sharia principal have been prepared that financial statement in conformity with Statement of Financial Accounting Standard with used sharia accounting principal.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2014 dan 2013
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years ended
December 31, 2014 and 2013
(Expressed in fully Rupiah, unless otherwise stated)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi (lanjutan)

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan (lanjutan)

Pernyataan Kepatuhan (lanjutan)

Bank menggunakan pedoman akuntansi syariah sesuai dengan PSAK 101, "Penyajian Laporan Keuangan Syariah", PSAK 102, "Akuntansi Murabahah", PSAK 105 "Akuntansi Mudharabah", PSAK 106, "Akuntansi Musyarakah", dan PSAK 107 "Akuntansi Ijarah" yang menggantikan PSAK No. 59 tentang "Akuntansi Perbankan Syariah" yang berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan terhadap topik-topik tersebut dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan Ikatan Akuntan Indonesia.

Laporan keuangan "Bank" disajikan berdasarkan nilai historis, kecuali disebutkan lain dan disusun dengan basis akrual tagihan bunga atas aset produktif yang digolongkan sebagai non-performing dicatat berdasarkan basis kas.

Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung yang di modifikasi dengan mengelompokkan arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, kecuali untuk beberapa arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan yang disusun dengan menggunakan metode tidak langsung. Sejak 1 Januari 2010, untuk keperluan laporan arus kas yang termasuk kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada Bank lain, penempatan pada bank lain dan Sertifikat Bank Indonesia yang jatuh tempo dalam waktu 3 bulan sejak tanggal perolehan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima serta tidak dibatasi penggunaanya.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp). Angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan, kecuali dinyatakan lain, disajikan dalam Rupiah penuh.

b. Penjabaran transaksi dalam mata uang asing

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal neraca, aset dan Liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal neraca.

Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan Liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui pada laporan laba rugi periode tahun berjalan.

Bank tidak mempunyai kantor cabang yang berada di luar negeri, sehingga Bank tidak mempunyai laporan keuangan kantor cabang yang akan dikonsolidasi dengan laporan keuangan Bank. Sebagaimana dinyatakan dalam PSAK No.1 (revisi 2009) tentang Penyajian Laporan Keuangan diungkap bahwa laporan keuangan kantor cabang luar negeri dijabarkan ke Rupiah. Laporan posisi keuangan, kecuali untuk akun rekening kantor pusat serta rekening administratif-menggunakan kurs pada tanggal pelaporan. Akun rekening kantor pusat dijabarkan dengan kurs historis. Laporan laba rugi dan laporan laba rugi komprehensif- menggunakan kurs rata-rata dalam periode yang bersangkutan, yang mendekati kurs tanggal transaksi.

2. Summary of accounting policy (continued)

a. Based on Prepared Financial Statement (continued)

Statement of Compliance (continued)

Bank was implementation of accounting sharia principal with SFAS No. 101 "Sharia financial statement presentation", SFAS No.102 "Accounting for Murabahah", SFAS No.105 "Accounting for Mudharabah", SFAF No.106 "Accounting for Musyarakah", and SFAS No.107 "Accounting for ijarah" which superseed SFAS No.59 about "Accounting for Syariah Banking," in relation to the recognition, measurement, presentation and disclosure for the above mention topics and the Accounting guidelines for Indonesian Syariah Bankings (PAPSI) issued by Bank Indonesia in cooperation with Indonesian of Institute of Accountant.

The financial statements of "Bank" have been prepared on a historical cost basis, unless otherwise stated,and under the accrual basis of accounting interest receivable of productive assets are as non performing measured at cash basis.

Statement of cash flows was prepared based on the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities, except for several cash flow statement in operating and financing activities was prepared based on indirect method. Since January 1, 2010, for the purpose prepared of the cash flow report, cash and cash equivalent include cash, current account with Bank Indonesia, current account with others banks and other short-term highly liquid invesment with original maturities of three months or less.

The presentation currency used in the financial statement is the Indonesian Rupiah (Rp), presented in the financial statement. Unless otherwise stated, presented in Rupiah full amount.

b. Translation of foreign currency transaction

Transactions denominated in foreign currencies are converted into rupiah at the exchange rates prevailing at the dates of the transactions. At the balance sheet date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated at the exchange rates prevailing at such date.

Gains and losses exchange rate arising from transactions denominated in foreign currencies and on the translation of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognized in the statement of income at year end period.

Bank doesn't have any branches at overseas, so that the bank doesn't have branches financial statement will be consolidated with Bank financial reports. Based on SFAS No.1 (revision 2009) about Financial Report Disclousures mention that branches financial statement at overseas will express in Rupiah. The financial statements of the overseas branch are translated into Rupiah using the following exchange rates: Statements of financial position, with the exception of the head office accounts and off balance sheet accounts - at the exchange rates prevailing at the reporting date. Head office accounts are translated at historical rates.Statements of income and statements of comprehensive income - at the average exchange rates during the related period, which approximate the transaction date rates.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2014 dan 2013
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years ended
December 31, 2014 and 2013
(Expressed in fully Rupiah, unless otherwise stated)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi (lanjutan)

b. Penjabaran transaksi dalam mata uang asing (lanjutan)

Selisih yang timbul dari proses penjabaran laporan keuangan tersebut diakui secara langsung pada pendapatan komprehensif lain.

Kurs mata uang asing utama yang digunakan untuk penjabaran dalam rupiah pada tanggal 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2014	31 Desember 2013	
Dolar Amerika Serikat	12,385	12,170	*United States Dollar*
Euro	15,053	16,759	*Euro*
Dolar Singapura	9,376	9,622	*Singapore Dollar*

c. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan Bank terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, surat-surat berharga, efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali, penyertaan saham, kredit yang diberikan, tagihan akseptasi, tagihan derivatif dan aset lain-lain.

Liabilitas keuangan Bank terdiri dari liabilitas segera, simpanan nasabah, simpanan dari bank lain, liabilitas akseptasi, liabilitas derivatif, obligasi yang diterbitkan, pinjaman yang diterima, dan liabilitas lain-lain.

Efektif 1 Januari 2012, Bank menerapkan PSAK No. 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan", PSAK No. 55 (Revisi 2011), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" yang menggantikan PSAK No. 55 (Revisi 2006) "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", dan PSAK No. 50 (Revisi 2010), "Instrumen Keuangan: Penyajian" efektif sejak tanggal 1 Januari 2010, yang menggantikan PSAK No. 50 (Revisi 2006) "Instrumen Keuangan: Penyajian".

1. Aset keuangan

Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Bank mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori sebagai berikut:

a. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Kategori ini terdiri dari dua sub-kategori: aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan dan aset keuangan yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh Bank untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat atau jika merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek (short term profit taking) yang terkini.

2. Summary of accounting policy (continued)

b. Translation of foreign currency transaction (continued)

The difference arising from the translation of such financial statements is recognized directly in other comprehensive income.

The primary forex exchanged rates was in used for translation into Rupiah as of December 31, 2014 and December 31, 2013 by using the middle rates on Indonesian Banking, are as follows :

c. Financial Assets and Financial Liabilities

The Bank"s financial assets consist of cash, current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks, marketable securities, marketable securities purchased under agreements to resell, investments in shares, loans, acceptances receivable, derivative receivable and other assets.

The Bank"s financial liabilities consist of obligations due immediately, deposits from customers, deposits from other banks, acceptances payable, derivative payable, bond issued, borrowings and other liabilities.

Effective January 1, 2012 Bank adopted SFAS No. 60, "Financial Instruments: Disclosure", SFAS No. 55 (Revised 2011), "Financial Instruments:Recognition and Measurement" which replaced SFAS No. 55 (Revised 2006),"Financial Instruments: Recognition and Measurement", and SFAS No. 50 (Revised 2010), "Financial Instruments: Presentation" which became effected starting January 1, 2010, which replaced SFAS No. 50 (Revised 2006), "Financial Instruments: Presentation".

1. Financial assets

Management determines the classification of its financial assets at initial recognition. The classification depends on the purpose for which the financials assets were acquired. The Bank classifies its financial assets in the following categories:.

a. Financial assets at fair value through profit or loss

This category comprises two sub-categories; financial assets classified as held for treading, and financial assets designated by the Bank as at fair value through profit or loss upon initial recognition.

A financial asset is classified as held for trading if it is acquired or incurred principally for the purpose of selling or repurchasing it in the near term or if it is part of a portfolio of identified financial instruments that are managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of short-term-profit-taking.

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi (lanjutan)

c. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

1. Aset keuangan (lanjutan)

Derivatif juga dikategorikan dalam kelompok diperdagangkan, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai. Aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan terdiri dari efek-efek. Obligasi pemerintah dan tagihan derivatif, termasuk aset keuangan derivatif melekat.

a. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (lanjutan)

Intrumen keuangan yang dikelompokan ke dalam kategori ini diakui pada nilai wajarnya pada saat pengakuan awal; biaya transaksi diakui secara langsung kedalam laporan laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dan penjualan instrumen keuangan diakui di dalam laporan laba rugi.

Keuntungan dan kerugian tersebut dicatat sebagai "keuntungan/(kerugian) dari perubahan nilai wajar instrumen keuangan" dan "keuntungan/ (kerugian) dari penjualan instrumen keuangan". Pendapatan bunga dari instrumen keuangan dalam kelompok diperdagangkan dicatat sebagai "pendapatan bunga".

Bank pada pengakuan awal dapat menetapkan aset keuangan tertentu sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi (opsi nilai wajar). Selanjutnya, penetapan ini tidak dapat diubah. Berdasarkan PSAK 55, opsi nilai wajar dapat digunakan hanya bila memenuhi ketetapan sebagai berikut:

- *penetapan sebagai opsi nilai wajar mengurangi atau mengeliminasi ketidak-konsistenan pengukuran dan pengakuan (accounting mismatch) yang dapat timbul.*
- *aset keuangan merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan yang risikonya dikelola dan dilaporkan kepada manajemen kunci berdasarkan nilai wajar.*
- *aset keuangan terdiri dari kontrak utama dan derivatif melekat yang harus dipisahkan.*

Untuk mengurangi ketidak-konsistenan pengukuran dan pengakuan, nilai wajar digunakan untuk pinjaman yang diberikan dan piutang tertentu yang dilindungi nilai menggunakan *swap* suku bunga, namun tidak memenuhi kriteria untuk akuntansi lindung nilai. Jika tidak, pinjaman yang diberikan akan dicatat menggunakan biaya diamortisasi dan derivatif akan diukur menggunakan nilai wajar melalui laba rugi.

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau Liabilitas keuangan adalah jumlah aset atau Liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif dengan menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

2. Summary of accounting policy (continued)

c. Financial Assets and Financial Liabilities (continued)

1. Financial assets (continued)

Derivatives are also categorised as held for trading unless they are designated and effective as hedging instruments. Financial assets held for trading consist of marketable securities, Goverment Bonds and derivative receivables, as well as financial assets with embedded derivatives.

a. Financial assets at fair value through profit or loss (continued)

Financial instruments included in this category are recognised initialy at fair value; transaction costs are taken directly to the income statement. Gains and losses arising from changes in fair value and sales of these financial instruments are included directly in the income statements.

That gain and losses are reported respectively as "Gains/(losses) from changes in fair value of financial instruments" "Gains/(losses) from sale of financial instruments". Interest income on financial instruments held for trading are included in "interest income".

The Bank designates certain financial assets upon initial recognition as at fair value through profit or loss (fair value option). This designation cannot subsequently be changed. According to SFAS 55, the fair value option is only applied when the following conditions are met:

- *the application of the fair value option reduces or eliminates an accounting mismatch that would otherwise arise.*
- *the financial assets are part of a portofolio of financial instruments which is risk managed and reported to senior management on a fair value basis.*
- *the financial assets consists of debt host and an embedded derivatives that must be separated.*

The reduce accounting mismatch, the fair value option is applied to certain loans and receivables that are hedged with credit derivatives or interest rate swaps but for which the hedge accounting conditions are not fulfilled. The loans would have been otherwise accounted for at amortised cost, whereas the derivatives are measured at fair value through profit or loss.

The cost of amortized revenues of the financial assets or financial liabilities is the total assets or financial liabilities counted at the initial acknowledgement subtracted with the principal payment, added or subtracted with cumulated amortization using effective interest rate method counted from the difference between the initial value and its maturity value, and subtracted with the reserve for decreased value loss.

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi (lanjutan)

c. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

1. Aset keuangan (lanjutan)

b. Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:

- yang dimaksud oleh Bank untuk dijual dalam waktu, yang diklasifikasi dalam kelompok diperdagangkan, serta yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;
- yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk dijual; atau
- dalam hal pemilik mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial selain yang disebabkan oleh penurunan kualitas aset keuangan dan diklasifikasikan dalam kategori Tersedia untuk Dijual.

Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Pendapatan dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang dicatat didalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai Pendapatan bunga. Dalam hal terjadi penurunan nilai, kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang, dan diakui di dalam laporan laba rugi sebagai "Cadangan Kerugian Penurunan Nilai".

c. Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo

Investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta Menajemen mepunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, kecuali:

- investasi yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi
- investasi yang ditetapkan oleh entitas dalam kelompok tersedia untuk dijual; dan
- investasi yang memiliki definisi pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pada saat pengakuan awal, aset dimiliki hingga jatuh tempo diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada perolehan diamortisasi dengan suku bunga efektif.

2. Summary of accounting policy (continued)

c. Financial Assets and Financial Liabilities (continued)

1. Financial assets (continued)

b. Loans and receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payment that are not quoted in an active market, other than:

- *those that the Bank intends to sell immediately or in the short term, which are classified as held for trading, and those that the entity upon initioal recognition designates as at fair value through profit or loss;*
- *those that the Bank upon initial recognition designates as available for sale; or*
- *those for which the holder may not recover substantially all of its initial investment, other than because of quality assets financial allowance and classification in available for sales category.*

Loans and receivables are initially recognised at fair value plus transaction costs and subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate method. Interest income on financial assets classified as loans and receivables is included in the consolidated income statement and is reported as 'Interest income'. In the case of impairment, the impairment loss is reported as a deduction from the carrying value of the financial assets classified as loan and receivables recognised in the consolidated income statement as 'Allowance for impairment losses".

c. Held-to-maturity financial assets

Held-to-maturity investments are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturities that the Management has the positive intention and ability to hold to maturity, other than:

- *those that the Bank upon initial recognition designates as at fair value through profit or loss;*
- *those that the Company designates as available for sale; and*
- *those that meet the definition of loans and receivables.*

These are initially recognised at fair value including transaction costs and subsequently measured at amortised cost, using the effective interest method.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2014 dan 2013
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years ended
December 31, 2014 and 2013
(Expressed in fully Rupiah, unless otherwise stated)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi (lanjutan)

c. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

1. Aset keuangan (lanjutan)

c. Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo (lanjutan)

Pendapatan bunga dari investasi dimiliki hingga jatuh tempo dicatat dalam laporan laba rugi dan diakui sebagai 'Pendapatan bunga'. Ketika penurunan nilai terjadi, kerugian penurunan nilai diakui sebagai pengurang dari nilai tercatat investasi dan diakui didalam laporan keuangan sebagai 'Cadangan Kerugian Penurunan Nilai;

d. Aset keuangan tersedia untuk dijual

Pada saat pengakuan awalnya, aset keuangan tersedia untuk dijual diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi.

Untuk pengakuan selanjutnya diukur pada nilai wajarnya dimana keuntungan atau kerugian diakui pada laporan perubahan ekuitas kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan laba rugi selisih kurs, hingga aset keuangan dihentikan pengakuannya.

Jika aset keuangan tersedia untuk dijual mengalami penurunan nilai, akumulasi laba rugi yang sebelumnya diakui di laporan perubahan ekuitas, diakui pada laporan laba rugi. Pendapatan bunga dihitung menggunakan metode suku bunga efektif dan keuntungan atau kerugian yang timbul akibat perubahan nilai tukar dari aset moneter yang diklasifikasikan sebagai kelompok tersedia untuk dijual diakui pada laba rugi.

2. Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan dikeluarkan ketika Liabilitas telah dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa. Bank mengklasifikasikan Liabilitas keuangan sebagai berikut:

a. Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Kategori ini terdiri dari dua sub-kategori: Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan dan Liabilitas keuangan yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh Bank untuk diukur pada nilai wajar.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat atau jika merupakan bagian dari portfolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini. Derivatif diklasifikasikan sebagai Liabilitas diperdagangkan kecuali ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

b. Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dikategorikan dan diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

2. Summary of accounting policy (continued)

c. Financial Assets and Financial Liabilities (continued)

1. Financial assets (continued)

c. Held-to-maturity financial assets (continued)

Interest income on held-to-maturity investments is included in income statement and reported as 'Interest income'. In the case of an impairment, the impairment loss is been reported as a deduction from the carrying value of the investment and recognised in the consolidated income statement as 'Allowance for impairment losses".

d. Available-for-sale financial assets

Available-for-sale financial assets are initial recognised at fair value, plus transaction costs.

For the next recognized measured subsequently at fair value with gains and losses being recognised in the statement of changes in equity, except for impairment losses and foreign exchange gains and losses, until the financial assets is derecognised.

If an available-for-sale financial asset is determined to be impaired, the cummulative gain or loss previously recognised in the statement of changes in equity is recognised in income statement. Interest income is calculated using the effective interest method, and foreign currency gains or losses on monetary assets classified as available for-sale are recognised in income statement.

2. Financial liabilities

Financial liabilities are derecognised when extinguished. The Bank classified its financial liabilities in the categories of:

a Financial liabilities at fair value through profit or loss

This category comprises two sub-categories: financial liabilities classified as held for trading, and financial liabilities disignated by the Bank as at fair value through profit or loss upon initial recognition.

A financial liability is classified as held for trading if it is acquired or incurred principally for the purpose of selling or repurchasing it in the near term or if it is part of a portfolio of identified financial instruments that are managed together and for which there is evidence of a recent actual pettern of short-term profit-taking. Derivatives are also categorised as held for trading unless they are designated and effective as hedging instruments.

b Financial liabilities at amortised cost

Financial liabilities that are not classified as at fair value through profit and loss fall into this category and are measured as amortised cost.

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi (lanjutan)

c. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

2. Liabilitas keuangan (lanjutan)

Setelah pengakuan awal, Bank mengukur seluruh Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

3. Penentuan nilai wajar

Nilai wajar adalah nilai dimana suatu aset dapat dipertukarkan, atau suatu Liabilitas diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar (arm's length transaction) pada tanggal pengukuran.

Jika tersedia, bank mengukur nilai wajar instrumen keuangan dengan menggunakan harga kuotasi dipasar aktif untuk instrumen tersebut. Suatu pasar dianggap aktif jika harga kuotasi sewaktu-waktu dan secara berkala tersedia dan mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan teratur dalam suatu transaksi yang wajar.

Jika pasar suatu instrumen keuangan tidak aktif, bank menentukan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian mencakup penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak yang memahami, berkeinginan, dan jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, penggunaan analisis arus kas yang didiskontokan dan penggunaan model penetapan harga opsi (option pricing model). Teknik penilaian yang dipilih memaksimalkan penggunaan input pasar, dan meminimalkan penggunaan taksiran yang bersifat spesifik dari Bank, memasukkan semua faktor yang akan dipertimbangkan oleh para pelaku pasar dalam menetapkan suatu harga dan konsisten dengan metodologi ekonomi yang dapat diterima dalam penetapan harga instrumen keuangan. Input yang digunakan dalam teknik penilaian secara memadai mencerminkan ekspektasi pasar dan ukuran atas faktor risiko dan pengembalian (risk retur) yang melekat pada instrumen keuangan.

Bukti terbaik atas nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal adalah harga transaksi, yaitu nilai wajar dari pembayaran yang diberikan atau diterima, kecuali jika nilai wajar dari instrumen keuangan tersebut ditentukan dengan perbandingan terhadap transaksi pasar terkini yang dapat diobservasi dari suatu instrumen yang sama (yaitu tanpa modifikasi atau pengawasan ulang) atau berdasarkan suatu teknik penilaian yang variabelnya hanya menggunakan data dari pasar yang dapat diobservasi. JIka harga transaksi memberikan bukti terbaik atas nilai wajar pada saat pengakuan awal, maka instrumen keuangan pada awalnya diukur pada harga transaksi dan selisih antara harga transaksi dan nilai yang sebelumnya diperoleh dari model penilaian diakui dalam laporan laba rugi.

2. Summary of accounting policy (continued)

c. Financial Assets and Financial Liabilities (continued)

2. Financial liabilities (continued)

After initial recognition, Group measures all financial liabilities at amortised cost using effective interest rates method.

3. Determination of fair value

The reasonable value is the value where an asset can be exchanged, or a liability completed between the party understanding and desiring to perform reasonable transaction (arm's length transaction) at the measuring date.

If available, the bank measures the reasonable value of financial instrument using the quotation price in active market for that instrument. A market is considered active if the quotation price at anytime and periodically is available and reflecting the market transaction actual and regular in a reasonable transaction.

When a financial instrument is not active, the bank decides the reasonable value by using the appreciation technique. The appreciation technique includes the use of the latest market transaction performed reasonably by the parties understanding, desiring, and if available, the reference on the latest reasonable value of other instrument substantially the same, the use of discounted cash flow analysis and the use of option pricing model. The selected appreciation technique maximizes the use of market input, and minimizes the use of estimation specifically from the Bank, inputting all the factors to be considered by the market actors in deciding a price and consistent with the acceptable economic method in pricing decision of financial instrument. The input used in the appreciation technique sufficiently reflects the market expectation and the measure on risk return factor attached to the financial instrument.

The best proof for the financial instrument reasonable value at the initial acknowledgement is the transaction price that is the reasonable value of the payment given or received, unless the reasonable value of the financial instrument is determined by comparison to the latest market transaction that can be observed from a similar instrument (that is without modification or recheck) or based on an appreciation technique its variable only using the data from the market that can be observed. If the transaction price gives the best proof of the reasonable value at the initial acknowledgement, then the financial instrument initially is measured on transaction price and the difference between the transaction price and the price previously obtained from the appreciation model acknowledged in the profit loss report.

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi (lanjutan)

c. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

3. Penentuan nilai wajar (lanjutan)

setelah pengakuan awal tergantung pada masing-masing fakta dan keadaan dari transaksi tersebut namun tidak lebih lambat dari saat penilaian tersebut didukung sepenuhnya oleh data pasar yang dapat diobservasi atau saat transaksi ditutup.

Nilai wajar mencerminkan risiko kredit atas instrumen keuangan dan termasuk penyesuaian yang dilakukan untuk memasukkan risiko kredit dan pihak lawan, mana yang lebih sesuai. Taksiran nilai wajar yang diperoleh dari model penilaian akan disesuaikan untuk mempertimbangkan faktor-faktor lainnya, seperti risiko likuiditas atau ketidakpastian model penilaian, sepanjang bank yakin bahwa keterlibatan suatu pasar Pihak ketiga akan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dalam penetapan harga suatu transaksi.

Sejak tanggal 1 Januari 2010, aset keuangan dan long position diukur dengan menggunakan harga penawaran, Liabilitas keuangan dan short position diukur menggunakan harga permintaan. Jika bank memiliki posisi aset dan Liabilitas dimana risiko pasarnya saling hapus, maka bank dapat menggunakan nilai tengah dari harga pasar sebagai dasar menghapus untuk menentukan nilai wajar posisi risiko yang saling hapus tersebut dan menerapkan penyesuaian terhadap harga penawaran atau harga permintaan terhadap posisi terbuka neto (net open position), mana yang lebih sesuai.

Sebelum tanggal 1 Januari 2010, aset dan kewajban keuangan maupun long dan short position diukur pada nilai tengah dari harga pasar (mid price).

4. Penghentian pengakuan

Penghentian pengakuan aset keuangan dilakukan ketika hak kontraktual untuk atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau ketika aset keuangan tersebut telah ditransfer dan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset telah ditransfer (jika, secara substansial seluruh risiko dan manfaat tidak ditransfer, maka Bank melakukan evaluasi untuk memastikan keterlibatan berkelanjutan atas kontrol yang masih dimiliki tidak mncegah penghentian pengakuan). Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika Liabilitas telah dilepaskan atau dibatalkan.

Agunan (saham dan obligasi) yang diserahkan oleh Bank di dalam perjanjian dijual dengan janji untuk dibeli kembali dan transaksi securities lending and borrowing tidak dihentikan pengakuannya karena Bank secara substansial masih memiliki seluruh risiko dan manfaat agunan tersebut, berdasarkan ketentuan bahwa harga pembelian telah ditentukan di awal, sehingga kriteria penghentian pengakuan tidak terpenuhi. Hal ini juga berlaku untuk transaksi securitisation tertentu dimana Bank masih memiliki sebagian dari risiko.

2. Summary of accounting policy (continued)

c. Financial Assets and Financial Liabilities (continued)

3. Determination of fair value (continued)

after the initial acknowledgement depending on each fact and condition of the transaction but not later than the time of the appreciation supported fully by market data that can be observed or when the transaction is closed.

The reasonable value reflects the credit risk on the financial instrument and including the adjustment performed to input the credit risk and the contradicting party, whichever is more appropriate. The estimated reasonable value obtained from the appreciation model shall be adjusted to consider other factors, such as liquidity risk or the uncertainty of appreciation model, as long as the bank is convinced that the involvement of third party market shall consider those factors in deciding the price of a transaction.

As of the 1st of January 2010, the financial assets and long position shall be measure using the price offer, financial liabilities and the short position shall be measured using the demand price. If the bank has asset and liability position whereas its market risks are mutually erasing, then the bank may use the mid value of the market price as the basis for erasing to decide the reasonable price for the mutually erasing risk position and applying adjustment to the price offer or demand price against the net open position, whichever is more appropriate.

Before the 1st of January 2010, the financial assets and liabilities as well as long and short position, they shall be measured on the mid value of the market price (mid price).

4. Derecognition

Financial assets are derecognized when the contractual rights to receive the cash flows from these assets have ceased to exist or the assets assets have been transferred and substantially all the risks and rewards of ownership of the assets are also transferred (that is, if substantially all the risks and rewards have not been transferred, the Bank tests control to ensure that continuing involvement on the basis of any retained powers of control does not prevent derecognition). Financial liabilities are derecognised when they have been redeemed o otherwisw extinguished.

Collateral (shares and bonds) furnished by the Bank under standard repuchase agreements and securities lending and borrowing transactios not derecognised because the Bank retains substantially all the risks and rewards on the basis of the predetermined repuchase price, and the criteria for derecognition are therefore not met. This also applies to certain securitisation transaction in wich the Bank retains a portion of the risks.

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi (lanjutan)

c. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

4. Penghentian pengakuan (lanjutan)

Bank menghapusbukukan saldo kredit dan efek hutang untuk tujuan investasi, dan cadangan kerugian penurunan nilai terkait, pada saat Bank menentukan bahwa kredit atau efek-efek tersebut tidak dapat ditagih. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan informasi seperti telah terjadinya perubahan signifikan pada posisi debitur sehingga tidak lagi dapat melunasi Liabilitasnya atau hasil penjualan agunan tidak akan cukup untuk melunasi seluruh ekposur kredit.

5. Reklasifikasi aset keuangan

Bank tidak diperkenankan untuk mereklasifikasi instrumen keuangan dari atau ke kategori instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi selama instrumen keuangan tersebut dimiliki atau diterbitkan.

Bank tidak boleh mengklasifikasikan aset keuangan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, jika dalam tahun berjalan atau dalam kurun waktu dua tahun sebelumnya, telah menjual atau mereklasifikasi investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan sebelum jatuh tempo (lebih dari jumlah yang tidak signifikan dibandingkan dengan total nilai investasi dimiliki hingga jatuh tempo), kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut:

a. dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali dimana perubahan suku bunga tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai wajar aset keuangan tersebut;

b. terjadi setelah Bank telah memperoleh secara substansial seluruh jumlah pokok aset keuangan tersebut sesuai jadwal pembayaran atau telah memperoleh pelunasan dipercepat; atau

c. terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali Bank, tidak terulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar oleh Bank.

Reklasifikasi aset keuangan dari kelompok dimiliki hingga jatuh tempo ke kelompok tersedia untuk dijual dicatat sebesar nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi tetap dilaporkan dalam komponen ekuitas sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya, dan pada keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi.

2. Summary of accounting policy (continued)

c. Financial Assets and Financial Liabilities (continued)

4. Derecognition (continued)

Bank erase from booking the credit balance and debt stock for investment purpose, and reserve for related value decreased loss, when the Bank resolves that those credits or stocks are not chargeable. This decision is taken after considering the information such as the already occurring significant changes in debtor position resulting in it no longer capable to pay up its obligations or the results of collateral sales will not be sufficient to pay up all those credit exposures.

5. Reclassification of financial assets

Bank shall not reclassify any financial instrument out of or into the fair value through profit or loss category while it is held or issued.

An entity shall not classify any financial assets as held-to-maturity if the entity has, during the current financial year or during the two preceding financial years, sold or reclassified more than an insignificant amount of held-to-maturity investment before maturity (more than insignificant in relation to the total amount of held-to maturity investment) other than sales or reclassification that:

a. are so close to maturity or the financial asset`s calf date that changers in the market rate of interest would not have a significant effect on the financial asset`s fair value;

b. occur after the entity has collected substantially all of the financial asset`s original principal through scheduled payments or prepayments; or

c. are attributeable to an isolated event that is beyond the entity`s control, is non-recurring and coud not have been reasonably anticipated by the entity.

Reclassification of financial assets from held to maturity classification to available for sale are recorded at fair value. Unrealised gains or losses are recorded in the equity section and shall be recognised directly in equity section until the financial assets is derecognised, at which time the cummulative gain or loss previously recognised in equity shall be recognised in profit or loss.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2014 dan 2013
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years ended
December 31, 2014 and 2013
(Expressed in fully Rupiah, unless otherwise stated)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi (lanjutan)

c. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

6. Klasifikasi atas instrumen keuangan

Bank mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Keterangan	Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan
Aset keuangan:	
- Kas	- Pinjaman yang diberikan dan piutang
- Giro pada Bank Indonesia	- Pinjaman yang diberikan dan piutang
- Giro pada bank lain	- Pinjaman yang diberikan dan piutang
- Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain	- Pinjaman yang diberikan dan piutang
- Surat berharga	- Dimiliki hingga jatuh tempo
- Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	- Investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo
- Tagihan derivatif	- Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi
- Kredit yang diberikan	- Pinjaman yang diberikan dan piutang
- Tagihan akseptasi	- Pinjaman yang diberikan dan piutang
- Penyertaan	- Pinjaman yang diberikan dan piutang
Liabilitas keuangan:	
- Liabilitas segera	- Liabilitas lainnya (biaya perolehan diamortisasi)
- Simpanan nasabah	- Liabilitas lainnya (biaya perolehan diamortisasi)
- Simpanan dari bank lain	- Liabilitas lainnya (biaya perolehan diamortisasi)
- Liabilitas derivatif	- Liabilitas lainnya (nilai wajar melalui laporan laba rugi)
- Liabilitas akseptasi	- Liabilitas lainnya (biaya perolehan diamortisasi)
- Pinjaman yang diterima	- Liabilitas lainnya (biaya perolehan diamortisasi)
- Beban yang masih harus dibayar	- Liabilitas lainnya (biaya perolehan diamortisasi)

Sebelum tanggal 1 Januari 2010, efek-efek diklasifikasikan kedalam salah satu dari kategori dimiliki hingga jatuh tempo, diperdagangkan, dan tersedia untuk dijual, sesuai dengan PSAK No.50 (Revisi 1999): "Akuntansi Investasi Efek Tertentu" .

7. Saling hapus instrumen keuangan

Aset keuangan dan Liabilitas saling hapus buku dan nilai bersihnya disajikan dalam neraca jika memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus buku atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan liabilitasnya secara simultan.

2. Summary of accounting policy (continued)

c. Financial Assets and Financial Liabilities (continued)

6. Classes of financial instrument

The Bank classifies the financial instruments into classes that reflects the nature of information and take into account the characteristic of those financial instruments. The classification can be seen in the table below:

Description	*Financial Asset and Liabilities classification*
Financial assets:	
- *Cash*	- *Loans and receivables*
- *Current accounts with Bank Indonesia*	- *Loans and receivables*
- *Current accounts with other banks*	- *Loans and receivables*
- *Placements with Banks Indonesia & other banks*	- *Loans and receivables*
- *Marketable securities*	- *Held-to-maturity*
- *Derivatives receivable*	- *Held-to-maturity invesment*
- *Derivatives receivable*	- *Financial assets designated at fair value through profit or loss.*
- *Loans*	- *Loans and receivables*
- *Acceptances receivables*	- *Loans and receivables*
- *Investement*	- *Loans and receivables*
Financial liabilities:	
- *Liabilities immediately payables*	- *Other liabilities (amortized cost)*
- *Deposits from customers*	- *Other liabilities (amortized cost)*
- *Deposits from other bank*	- *Other liabilities (amortized cost)*
- *Derivatives payables*	- *Other liabilities (designated at fair value through profit or loss)*
- *Acceptances payables*	- *Other liabilities (amortized cost)*
- *Borrowings*	- *Other liabilities (amortized cost)*
- *Accured expenses*	- *Other liabilities (amortized cost)*

Before January, 1, 2010, the marketable securities have classified in category as held to maturity, trading and available for sale, as mentioned in SFAS No.50 (Revised 1999): "Accounting for specific investment".

7. Classes of financial instrument

Financial assets and liabilities are offset and the net amount reported in balance sheet when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis or realise the assets and settle the liability simultaneously.

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi (lanjutan)

c. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

8. Pengukuran Biaya Diamortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok pinjaman, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai pengakuan awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan nilai.

9. Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar adalah nilai dimana suatu aset dapat dipertukarkan, atau suatu liabilitas dapat diselesaikan, diantara para pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi yang wajar pada tanggal pengukuran, termasuk didalamnya adalah nilai pasar dari Interdealer Market Association (IDMA) atau harga yang diberikan oleh broker (quoted price) dari Bloomberg dan Reuters pada tanggal pengukuran.

Jika tersedia, Bank mengukur nilai wajar dari suatu instrumen dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen terkait. Suatu pasar dianggap aktif bila harga yang dikuotasikan tersedia sewaktu-waktu dari bursa, pedagang efek (dealer), perantara efek (broker), kelompok industri, badan pengawas (pricing service or regulating agency) dan merupakan transaksi pasar aktual dan teratur terjadi yang dilakukan secara wajar.

Jika pasar untuk instrumen keuangan tidak aktif, Bank menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan (jika tersedia), referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial serupa dan analisis arus kas yang didiskonto.

Aset keuangan yang dimiliki atau liabilitas yang akan diterbitkan diukur menggunakan harga penawaran; aset keuangan yang akan diperoleh atau liabilitas keuangan yang dimiliki diukur menggunakan harga permintaan. Jika Bank memiliki posisi aset dan liabilitas dimana risiko pasarnya saling hapus, maka Bank dapat menggunakan nilai tengah dari pasar sebagai dasar untuk menentukan nilai wajar posisi risiko yang saling hapus tersebut dan menerapkan penyesuaian terhadap harga penawaran atau harga permintaan terhadap posisi terbuka atau neto (net open position), mana yang lebih sesuai.

10. Perbedaan 1 (satu) hari

Pada saat transaksi berbeda dengan nilai wajar dari transaksi pasar lainnya yang dapat diobservasi saat ini atas instrumen yang sama atau berdasarkan teknik penilaian yang hanya menggunakan variabel data dari pasar yang dapat diobservasi, Bank secara langsung mengakui perbedaan antara nilai transaksi dan nilai wajar ("1 hari"

Jika nilai wajar ditentukan berdasarkan data yang tidak dapat diobservasi, maka perbedaan antara nilai transaksi dan nilai model hanya dapat diakui pada laporan laba rugi pada saat data menjadi dapat diobservasi atau pada saat instrumen tersebut tidak diakui lagi.

2. Summary of accounting policy (continued)

c. Financial Assets and Financial Liabilities (continued)

8. Amortized cost measurement

The amortized cost of a financial asset or liability is the amount at which the financial asset or liability is measured at initial recognition, minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest rate method of any difference between the initial amount recognised and the maturity amount, minus any reduction for impairment.

9. Fair value measurement

Fair value is the amount for which an asset could be exchanged, or a liability settled, between knowledgeable, willing parties in an arm"s length transaction on the measurement date, including the market value from the Interdealer Market Association (IDMA) or the given price by brokers (quoted price) from Bloomberg and Reuters on the measurement date.

When available, the Bank measures the fair value of an instrument using quoted prices in an active market for that instrument. A market is regarded as active if quoted prices are readily available from the stock exchange, dealer, broker, industry group, pricing service or regulating agency and represent actual and regularly occurring market transactions on an arm"s length basis.

If a market for a financial instrument is not active, the Bank determines the fair value using a valuation technique. Valuation techniques include using the recent arm"s length transactions between knowledgeable, willing parties (if available), reference to the current fair value of other instruments that are substantially the same and discounted cash flow analysis.

Financial assets held or liabilities to be issued are measured at bid price; financial assets to be acquired or financial liabilities held are measured at asking price. Where the Bank has asset and liability positions with off-setting market risk, the Bank can use middle-market prices to measure the fair value off-setting risk positions and apply bid or asking price adjustments only to the net open positions, as appropriate.

10 Day 1 (one) Difference

When the transaction price differs from the fair value of other observable current market transactions in the same instrument or based on a valuation technique whose variable include only data from observable markets, the Bank immediately recognises the difference between the transaction price and fair value (a "Day 1" profit or loss) in the

In cases where fair value is determined using data which is not observable, the difference between the transaction price and model value is only recognised in the statements of income when the inputs become observable or when the instrument is derecognised.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2014 dan 2013
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years ended
December 31, 2014 and 2013
(Expressed in fully Rupiah, unless otherwise stated)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi (lanjutan)

c. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

10. Perbedaan 1 (satu) hari (lanjutan)

Instrumen Keuangan : Pengungkapan

Efektif 1 Januari 2012, Bank menerapkan PSAK No. 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan", PSAK No. 55 (Revisi 2011), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" yang menggantikan PSAK No.55 (Revisi 2006) "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", dan PSAK No.50 (Revisi 2010), "Instrumen Keuangan: Penyajian" efektif sejak tanggal 1 Januari 2010, yang menggantikan PSAK No. 50 (Revisi 2006) "Instrumen Keuangan: Penyajian".

Signifikansi Instrumen Keuangan Terhadap Posisi dan Kinerja Keuangan

1. Kategori Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Bank mengklasifikasi aset keuangannya berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

a. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu aset keuangan yang ditetapkan demikian saat pengakuan awal dan aset keuangan yang diklasifikasi dalam kelompok yang diperdagangkan

b. Kredit yang diberikan dan piutang

c. Investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo; dan

d. Aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan ke dalam kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

a. Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang memiliki 2 sub-klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan liabilitas keuangan yang telah diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan

b. Liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi.

2. Aset Keuangan atau Liabilitas Keuangan diukur pada nilai wajar melalui Laba Rugi

Bank telah menetapkan pinjaman yang diberikan untuk diukur pada nilai wajar melalui Laba rugi, Bank telah mengungkapkan :

a. Eksposur maksimum terhadap risiko kredit dari pinjaman atau kredit yang diberikan pada akhir periode laporan.

b. Jumlah derivatif kredit atau instrumen serupa terkait yang memitigasi eksposur maksimum terhadap risiko kredit.

2. Summary of accounting policy (continued)

c. Financial Assets and Financial Liabilities (continued)

10. *Day 1 (one) Difference (continued)*

Financial instrument : Disclosure

The Bank adopted SFAS No. 60, "Financial Instruments: Disclosure", SFAS No. 55 (Revised 2011), "Financial Instruments: Recognition and Measurement" whichreplaced SFAS No. 55 (Revised 2006),"Financial Instruments: Recognition and Measurement", and SFAS No. 50 (Revised 2010), "Financial Instruments: Presentation" which became effected starting January 1,2010, which replaced SFAS No. 50 (Revised 2006), "Financial Instruments: Presentation" effective January 1, 2012.

Financial Instrument significant to position and financial performance

1. Financial assets and liabilities category

The Bank classified its financial assets in the following categories on initial recognition:

a. Financial assets held at fair value through profit or loss, which have 2 (two) sub-classifications, i.e. financial assets designated as such upon initial recognition and financial assetsclassified as held-for-trading

b. Loans and receivables

c. Held-to-maturity investments; and

d. Available-for-sales financial assets

Financial liabilities are classified into the following categories on initial recognition:

a. Financial liabilities at fair value through profit or loss, which has 2 sub-classifications, i.e. thosedesignated as such upon initial recognition and those classified asheld-for-trading

b. Financial liabilities measured at amortized cost.

2. Financial assets or liabilities was determined of fair value from income statement

The bank has stated the given loan to measure at fair value through profit and loss, the Bank has discloused:

a. The maximum exposure of credit risk of the loan or credit given at the end of financial report period.

b. Derivative credit amount or other similar related which mitigated the maximum exposure of to credit risks.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2014 dan 2013
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years ended
December 31, 2014 and 2013
(Expressed in fully Rupiah, unless otherwise stated)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi (lanjutan)

c. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Signifikansi Instrumen Keuangan Terhadap Posisi dan Kinerja Keuangan (lanjutan)

2. Aset Keuangan atau Liabilitas Keuangan diukur pada nilai wajar melalui Laba Rugi (lanjutan)

c. Jumlah perubahan, selama periode dan secara kumulatif, nilai wajar kredit yang diberikan yang dapat diatribusikan pada perubahan risiko kredit atas aset keuangan. Perubahan kondisi pasar yang menimbulkan risiko pasar termasuk perubahan suku bunga terobsesi (acuan), harga komoditas, kurs valuta asing, indeks harga dan tarif.

d. Jumlah perubahan nilai wajar dari derivatif kredit atau instrumen serupa terkait yang terjadi selama periode dan secara komulatif sejak pinjaman yang diberikan ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Bank telah menetapkan suatu liabilitas keuangan untuk diukur pada nilai wajar melalui Laba rugi dan Bank telah mengungkapkan beberapa hal mengenai :

a. Jumlah perubahan, selama periode dan secara komulatif, nilai wajar liabilitas keuangan yang dapat diatribusikan pada perubahan risiko kredit atas liabilitas keuangan. Perubahan kondisi pasar yang menimbulkan risiko pasar termasuk perubahan suku bunga terobsesi (acuan), harga instrumen keuangan Bank lain, harga komoditas, kurs valuta asing, indeks harga dan tarif. Untuk kontrak yang memiliki fitur unit-link, perubahan kondisi pasar termasuk kinerja yang terkait dengan dana investasi internal atau eksternal.

b. Perbedaan antara jumlah tercatat liabilitas keuangan dan jumlah yang disyaratkan secara kontraktual bagi entitas untuk membayar pada saat jatuh tempo kepada pemegang kewajiban tersebut.

c. Reklasifikasi aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, bukan nilai wajar atau pada nilai wajar, bukan perolehan yang diamortisasi. Jumlah yang direklasifikasi dari dan ke setiap kategori dan alasan direklasifikasi.

Untuk periode pelaporan ketika aset keuangan direklasifikasi, keuntungan atau kerugian nilai atas aset keuangan yang diakui dalam laba rugi atau pendapatan lain pada periode pelaporan tersebut dan periode pelaporan sebelumnya.

Untuk periode pelaporan setelah reklasifikasi (termasuk periode pelaporan dimana aset keuangan direklasifikasi) hingga penghentian pengakuan aset keuangan, keuntungan atau kerugian nilai wajar yang seharusnya diakui dalam laba rugi atau pendapatan lain, jika aset keuangan tersebut tidak direklasifikasi.

Keuntungan, kerugian, pendapatan dan beban yang diakui dalam laba rugi serta suku bunga efektif dan estimasi jumlah arus kas yang Bank perkirakan untuk pulih pada tanggal reklasifikasi aset keuangan.

2. Summary of accounting policy (continued)

c. Financial Assets and Financial Liabilities (continued)

Financial Instrument significant to position and financial performance (continued)

2. Financial assets or liabilities was determined of fair value from income statement (continued)

c. The sum of changes, during the period accumulatively, the fair value of credit that could atributed in the moving of credit risks on the financial assets. The changes of market condition afection market risks within the changes of obsesed the interest rate , commodities price, exchange rates, price indexes and tarifs.

d. The sum of derivative credit fair value or the related similar instruments happened during the period accuumulatively since the loan given is stated to measure in fair value through profit and loss.

The bank has stated a financial liabilities to measure in fair value through profit and loss and the bank had stated several things about :

a. The sum of changes, during the period accumulatively, the fair value of financial liabilities that could atributed in the the moving of credit risks on the financial liabilities. The changes of market condition afection market risks including the interest rate obsesed, other bank instruments price, commodities price, exchange rates, price indexes and tarifs. For the contracts used unit links fixture, the changes of market condition include in relative works with internal or external investment fund.

b. The differences of the liability financial amount recorded and the contractual amount for the entities to pay at the value date to that liability holder.

c. The Reclasification of financial assets measured on gained value amortised expense, not at fair value or on fair value, not on gained amortised. The sum reclasified from and to every category and reason of reclasification.

For the reporting period when financial assets reclasified, gain and loss value of the financial assets approved in profit and loss or other income in that reporting period and last period report.

For the reporting period after reclasification (include reporting the period where the financial assets report) due to the approvement of financial assets stopped, gain or loss of fair value which have been approved as profit and loss or other income, if that financial assets not reclasified.

Gain, loss, income and expenses which approved in the profit and loss statement and effective interest rate and estimation of cash flow amount estimated by the bank in recovery on the date of reclasification of financial assets.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2014 dan 2013
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years ended
December 31, 2014 and 2013
(Expressed in fully Rupiah, unless otherwise stated)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi (lanjutan)

c. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

2. Aset Keuangan atau Liabilitas Keuangan diukur pada nilai wajar melalui Laba Rugi (lanjutan)

d. Jenis aset keuangan, jenis risiko dan manfaat atas kepemilikan di Bank, melanjutkan pengakuan atas seluruh aset (jumlah tercatat dan liabilitas terkait), melanjutkan pengakuan atas aset sejauh keterlibatan - berkelanjutannya.

e. Jumlah tercatat aset keuangan yang dijaminkan sebagai agunan termasuk jumlah yang telah direklasifikasi dengan berpedoman pada syarat dan ketentuan yang terkait dengan penjaminan tersebut. Bank tidak memiliki agunan yang dijual dan atau dijaminkan kembali.

f. Rekonsiliasi atas aset keuangan yang mengalami penurunan nilai karena kerugian kredit dan penurunan nilai dalam akun terpisah dan bukan langsung mengurangi jumlah tercatat aset keuangan.

3. Nilai Wajar

Bank telah menguraikan nilai wajar untuk setiap kelompok aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

a. Nilai wajar dari kelompok aset dan liabilitas keuangan tersebut dilakukan dengan cara yang memungkinkan untuk membandingkan dengan jumlah tercatatnya.

b. Saling hapus di antara kelompok aset keuangan dan liabilitas keuangan hanya dilakukan sepanjang jumlah tercatatnya juga saling hapus di laporan posisi keuangan.

c. Metode dan asumsi yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar dengan cara menginformasikan perubahan dalam tehnik penilaian dengan menyebutkan alasan yang digunakan dalam perubahan tersebut.

d. Klasifikasi pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hirarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi input yang digunakan dalam melakukan pengukuran harga kuotasian (tingkat 1), input observasi langsung dan tidak langsung (harga dan derivasi dari harga) (tingkat 2) dan data pasar yang diobservasi (tingkat 3).

e. Tingkat pada hirarki nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan dengan memisahkan nilai wajar sesuai tingkat yang telah ditentukan.

4. Sifat dan luas risiko yang timbul dari instrumen keuangan

Pengungkapan ini memfokuskan pada risiko yang timbul dari instrumen keuangan dan bagaimana risiko tersebut dikelola. Risiko ini umumnya meliputi, tetapi tidak berbatas pada, risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko pasar.

a. Pengungkapan kualitatif yaitu Bank mengungkap eksposur risiko dan bagaimana risiko tersebut timbul. Tujuan, kebijakan dan proses pengelolaan risiko serta metode yang digunakan untuk mengukur risiko tersebut.

2. Summary of accounting policy (continued)

c. Financial Assets and Financial Liabilities (continued)

2. Financial assets or liabilities was determined of fair value from income statement (continued)

d. The variation of financial assets, risk and usefulness of the ownership in the bank, to continue the approvement on all assets (the amount recorded and the liabilities related), as far as concern continously.

e. The recorded amount of financial assets guaranted include the amount reclassified based on the related clausule and decree with that guarantee. The bank did not own the sold guaranty the reguanty assets.

f. The reconciliation of the decreasing financial assets value causing by credit loss and decreasing value in seperating account or indirectly decrease the financial assets recorded.

1. Fair Value

Bank has classified the fair value for every groups of financial assets and financial liabilities by declare the following:

a. The fair value for every groups of financial assets and financial liabilities only done as far as possible way to compare with the amount recoreded.

b. Depreciating of each other in between the groups of assets only done as long as the amount recorded depreciated each other too.

c. The method and assumption applied in stating the fair value by changing information in value technique and give the reason used in that changes.

d. The clasification of the measuring of fair value by using grade of fair value which shows the significant input used in merasuring quotation price (grade 1), direct and indirect input observation (cost and derivation from cost) (grade 2) and market data observated (grade 3).

e. Level on grade of fair value categorated as a whole by seperating the fair value in accordance with the grade stated.

4. Nature and risk of extensive from the financial instrumen

This enclosure focused in risks which arise from financial instruments and how that risks worked. This risks generally include, but not limited on, credit risks, liquidity risks, and market risks.

a. The qualitative enclosure means the bank enclose the exposure of risks and how the risks arise. The aim of this rule and the process of work on risks and the method used to measure that risks.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2014 dan 2013
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years ended
December 31, 2014 and 2013
(Expressed in fully Rupiah, unless otherwise stated)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi (lanjutan)

c. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

4. Sifat dan luas risiko yang timbul dari instrumen keuangan (lanjutan)

b. Pengungkapan kuantitatif yaitu ikhtisar mengenai eksposur Bank terhadap risiko pada akhir periode pelaporan. Pelaporan tersebut didasarkan pada informasi yang disajikan secara internal kepada personel manajemen kunci. Jika data kuantitatif pada akhir periode tidak mewakili eksposur atas risiko, maka Bank menyediakan informasi lebih lanjut yang mewakili.

c. Risiko kredit yaitu nilai maksimal eksposur pada akhir periode tanpa memperhitungkan agunan yang dimiliki, informasi dari aset keuangan yang belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan dan aset keuangan yang belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai yang telah di negosiasi ulang.

d. Risiko likuiditas yaitu risiko analisa jatuh tempo untuk liabilitas keuangan non derivatif yang menunjukkan sisa jatuh tempo kontraktual dimana jatuh tempo kontraktual sangat penting untuk memahami waktu arus kas.

e. Risiko pasar yaitu analisis sensitivitas dimana Bank terekspos pada akhir periode pelaporan, yang menunjukkan bagaimana laba rugi dan ekuitas mungkin terpengaruh oleh perubahan pada variabel risiko yang relevan pada tanggal tersebut.

d. Transaksi dengan Pihak berelasi

1. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

Sesuai dengan PSAK No. 7 (Revisi 2010) tentang " Pengungkapan pihak-Pihak berelasi", yang dimaksud dengan Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang berelasi dengan entitas pelapor sebagai berikut :

a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut :

(i) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama terhadap entitas pelapor.

(ii) Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau

(iii) Personal manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal sebagai berikut :

(i) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).

(ii) Suatu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).

(iii) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.

(iv) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.

2. Summary of accounting policy (continued)

c. Financial Assets and Financial Liabilities (continued)

4. Nature and risk of extensive from the financial instrumen (continued)

b. The qualitative enclosure are the summary about bank exposure of the risks at the end of the year end report. That reporting based on the information stated internally to the key personal management. If qualitative data at the end of the period is unbehalf of the exposure on risks. though the bank prepare more information in accordance with the subject.

c. The Credit risk is the maximum exposure at the end of the period without calculating the own guaranty, the information of financial assets which un in value date or undecreased and financial assets which un in value date which value renegociated.

d. The liquidity risks is the analitical of the value date for financial liabilities non derivative that shows the balance of how contractual value date is so important to fulfil timing of cash flows.

e. Market risk is the analitical of sensitivity where the bank exposed at the end of the reporting period, which shows how the profit, loss and equity possibly concluded by the relevan risk variable at that date.

d. Transaction with related parties disclouser

1. Based on Statement of Financial Accounting Standards

In accordance with PSAK No. 7 (Revision 2010) regarding "related party Disclosure", the meaning of a related party is a person or entity that is related to a reporting entity as follow :

a. *A person or a close member of that person"s family is related to a reporting entity if that person :*

(i) *Has control or joint control over the reporting entity.*

(ii) *Has significant influence over the reporting entity; or*

(iii) *Is a member of the key management personel of the reporting entity of a parent of the reporting entity.*

b. *An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies:*

(i) The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).

(ii) One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of member of a group of which the other entity is a member).

(iii) Both entities are joint ventures of the same third party.

(iv) One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi (lanjutan)

d. Transaksi dengan Pihak berelasi (lanjutan)

1. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (lanjutan)

b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal sebagai berikut (lanjutan):

(v) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.

(vi) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam butir (a).

(vii) Orang yang diidentifikasi huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas personil manajemen kunci entitas (entitas induk dari entitas).

Semua transaksi yang jumlahnya signifikan dengan pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan syarat normal, sebagaimana dilakukan dengan Pihak berelasi, maupun tidak, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

Berdasarkan PSAK No. 7 (Revisi 2010), transaksi antara bank dengan pemerintah, BUMN lainnya dan perusahaan-perusahaan yang dimiliki, atau dikendalikan negara, termasuk Lembaga Penjamin Simpanan tidak dikategorikan sebagai transaksi dengan pihak berelasi.

2. Berdasarkan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam- LK No.Kep-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012

Entitas yang berelasi dengan pemerintah merupakan entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan oleh pemerintah.

Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Keuangan atau Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham dari entitas.

Pihak yang bukan merupakan pihak berelasi adalah sebagai berikut :

a. dua entitas hanya karena memiliki direktur atau personil manajemen kunci yang sama atau karena personil manajemen kunci dari satu entitas mempunyai pengaruh sifnifikan atas entitas lain.

b. dua venturer hanya karena mereka mengendalikan bersama atas ventura bersama.

c. penyandang dana, serikat dagang, entitas pelayanan publik, serta kementerian dan instansi pemerintah yang tidak mengendalikan, mengendalikan bersama atau memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor, hanya karena ada keharusan (simply by virtue) dalam pelaksanaan urusan normal dengan entitas (meskipun pihak-pihak tersebut dapat membatasi kebebasan entitas atau ikut serta dalam proses pengambilan keputusan).

2. Summary of accounting policy (continued)

d. Transaction with related parties disclouser (continued)

1. Based on Statement of Financial Accounting Standards (continued)

b. An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies (continued):

(v) The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity.If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.

(vi) The entity controlled or jointly controlled by a person identified in (a).

(vii) A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personel of the entity (a parent oh the entity).

All significant transaction with related parties whether conducted under normal requirement, which is conducted with related parties, or not, is disclosed in the financial statements.

Based on PSAK No. 7 (Revision 2010), transaction between the Bank and the government, other state owned entities and companies which are owned or controlled by the government, including the deposit insurance corporation is not categorized as transaction with related parties.

2. Based on Attached of Chairman decision of Bapepam-LK No.Kep-347/BL/2012 on June 25, 2012

The Entity related with the government is the entity controled as awhole or significantly influenced by the government.

The government in this case si the Minister of Finance or The Province Government as the shareholders to the entity.

The unrelated parties is as follow :

a. Two entities only because they have the same director or key management or because the personal of key management of one entity have a significant influence to another entity.

b. Two venturer only for they control the venture together.

c. The investor, trade unity, public service entity, and the non controlling ministry and government institution, controlling together or have the significant influence on the report entity, only for the simply by virtue in implemented normal case with the entity (inspite of each parts could limiting the entity or take part in decision making process.

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi (lanjutan)

d. Transaksi dengan Pihak berelasi (lanjutan)

2. Berdasarkan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam- LK No.Kep-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 (lanjutan)

d. Pelanggan, pemasok, pemegang hak waralaba, distributor, atau agen umum yang mengadakan transaksi usaha dengan volume signifikan yang hanya disebabkan ketergantungan ekonomis yang diakibatkan oleh keadaan.

e. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas dalam laporan arus kas terdiri dari Kas, Giro pada Bank Indonesia dan Giro pada Bank lain, Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain serta fasilitas pinjaman dari Bank Indonesia yang jatuh tempo dalam 3 bulan sejak tanggal perolehan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima serta tidak dibatasi penggunaannya.

f. Giro pada Bank Indonesia dan Bank Lain

Giro pada Bank Indonesia dan giro pada bank lain pada awalnya diukur pada nilai wajar dan ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut, dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Sebelumnya giro pada Bank Indonesia dinyatakan sebesar saldo giro, sedangkan giro pada bank lain dinyatakan sebesar saldo giro dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Perubahan kedua berdasarkan PBI No. 15/7/PBI/2013 tanggal 26 September 2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada BI (GWM) dalam mata uang rupiah dan valuta asing. Perubahan pertama tanggal 9 Pebruari 2011, Bank Indonesia mengeluarkan peraturan No.13/10/PBI/2011 tentang perubahan atas PBI No.12/19/PBI/2010, No.10/25/PBI/2008 dan 10/19/PBI/2008 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam rupiah dan valuta asing. Berdasarkan peraturan tersebut, GWM ditetapkan sebesar 12,5% dari dana Pihak ketiga dalam rupiah yang terdiri dari GWM utama dan GWM sekunder, GWM dalam valuta asing ditetapkan sebesar 8% dari DPK dalam valuta asing. GWM utama dalam rupiah ditetapkan sebesar 10% dari Dana Pihak ketiga (DPK) dalam rupiah dan GWM Sekunder dalam rupiah ditetapkan sebesar 2,5% dari DPK yang berlaku tanggal 9 Pebruari 2011.

g. Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain

Penempatan pada bank Indonesia dan Bank lain dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain dikalsifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

2. Summary of accounting policy (continued)

d. Transaction with related parties disclouser (continued)

2. Based on Attached of Chairman decision of Bapepam-LK No.Kep-347/BL/2012 on June 25, 2012 (continued)

d. Customers, suppliers, trading,s right, distributors, or general agent make trading transaction, in significant volume which only affected by the economical dependency affected by the condition.

e. Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents presented in the statements of cash flows consist of cash, current accounts with Bank Indonesia and other banks, placements with Bank Indonesia abd other banks and Bank Indonesia Deposits Facility maturing within 3 (three) months from the acquisition date, and not used as collateral for borrowing and not restricted in use.

f. Current accounts with Bank Indonesia and other Banks

The clearing of Bank Indonesia and clearing at other banks initially shall be measured at reasonable value and added with transaction cost that can be attributed directly and is the additional cost to obtain financial asset, and after the initial acknowledgement it shall be measured on the revenue costs amortized using the effective interest rate method.

Before, current accounts with Bank Indonesia is stated as outstanding balance on the other hand current accoun in other banks is stated as the outstanding balance less allowance for impairment losses.

The second change is based on PBI 15/7 / PBI / 2013 dated 26 September 2013 on Statutory Reserves of Commercial Banks with BI (GWM) in rupiah currency and foreign exchange. The first change on February 9, 2011, Bank Indonesia issued regulation No.13/10/PBI/2011 concerning amendment of Regulation of Indonesian Bank (PBI) No.12/19/PBI/2010, No.10/25/PBI/2008 and No.10/19/PBI/2008 regarding statutory reserves at Bank Indonesia for commercial banks in rupiah and foreign currencies. In accordance with the regulation, the minimum ratio of statutory reserves which the banks shall maintain is 12,5% of Third Party Funds in rupiah which consist of Primary Statutory Reserves and secondary Statutory Reserves and 8% of TPF in foreign currency. Primary Statutory Reserves are 10% of TPF in rupiah and Secondary Statutory Reserves are 2,5% of TPF in rupiah since February 9, 2011.

g. Placement with Bank Indonesia and other banks

Placement in Bank of Indonesia and other banks is stated as at cost and amortized used effective interest methode subtracted with Allowance for impairment losses. Placement in Bank of Indonesia and other banks is classiffied to loans and receivable.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2014 dan 2013
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years ended
December 31, 2014 and 2013
(Expressed in fully Rupiah, unless otherwise stated)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi (lanjutan)

h. Surat berharga

Surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersil, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas surat berharga, dan setiap derivatif dari surat berharga.

Surat-surat berharga diklasifikasikan ke dalam kelompok untuk diperdagangkan, tersedia untuk dijual, atau dimiliki hingga jatuh tempo.

Surat-surat berharga yang diklasifikasikan kedalam kelompok untuk diperdagangkan ("*trading*") disajikan sebesar nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya diakui dalam laporan laba rugi periode berjalan.

Surat-surat berharga yang diklasifikasikan ke dalam kelompok tersedia untuk dijual (*"available-for-sale"*) disajikan sebesar nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dari surat-surat berharga tersedia untuk dijual tersebut setelah dikurangi pajak yang tercacat dalam ekuitas diakui sebagai penghasilan atau beban pada periode dimana surat berharga tersebut dijual. Penurunan permanen atas nilai surat berharga yang tersedia untuk dijual diakui dalam laporan laba rugi periode berjalan.

Surat-surat berharga yang diklasifikasikan ke dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo (*"held-to-maturity"*) disajikan sebesar biaya perolehan yang disesuaikan dengan premi dan/atau diskonto yang belum diamortisasi.

Bila terjadi penurunan nilai wajar dibawah biaya perolehan (termasuk amortisasi premi dan/atau diskonto) yang bersifat permanen, maka biaya perolehan surat berharga yang bersangkutan diturunkan sebesar nilai wajarnya dan jumlah penurunan nilai tersebut dibebankan pada laporan laba rugi periode berjalan.

Sebelum 1 Januari 2010, pemindahan surat berharga antar kelompok diakui sebesar nilai wajar pada tanggal pemindahan. Untuk surat berharga yang dipindahkan dari kelompok diperdagangkan, laba atau rugi yang belum direalisasi pada tanggal pemindahan telah tercatat sebagai penghasilan dan oleh karena itu tidak boleh dihapus.

Untuk surat berharga yang dipindahkan dari kelompok dimiliki hingga jatuh tempo ke tersedia untuk dijual dicatat sebesar nilai wajarnya. Laba atau rugi yang belum direalisasi pada tanggal pemindahan diakui dalam komponen equitas secara terpisah.

Sejak 1 Januari 2010, premi atau diskonto diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Sebelum 1 Januari 2010, premi atau diskonto diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus.

Penyisihan kerugian penurunan nilai dan perubahan nilai wajar disajikan sebagai penambah/pengurang terhadap surat-surat berharga.

Sejak 1 Januari 2010, penyisihan kerugian penurunan nilai dibentuk jika terdapat bukti objektif penurunan nilai. Sebelum 1 Januari 2010, penyisihan kerugian dibentuk berdasarkan penelaahan terhadap kolektibilitas dari masing-masing surat berharga.

2. Summary of accounting policy (continued)

h. Marketable securities

Marketable securities is Letter of debt, commercial marketable securities, Share, obligation, list of payable, Unit contract investment of collective investment,contract to expect for effect, and derivatif from effect.

Marketable securities are classified aseither trading, available-for-sale, or held-to-maturity.

Marketable securities classified as trading are stated at fair value. The unrealized gains or losses resulting from the increase or decrease in fair value are recognized in the current period's statement of income.

Marketable securities classified as available-for-sale are stated at fair value. The unrealized gains or losses, net of tax, on the available-for-sale marketbale securities recorded in equity are recognized as income or expense of the period when realized. Any permanent decline in the value of available-for-sale marketable securities is recognized in the current period's statement of income.

Marketable securities classified as held-to-maturity are satetd at cost adjusted for unamortized premium or discount.

If it is probable that the cost (including amortization of premium and/or discount) of such marketable securities will not be fully recovered, a permanent diminution in value is considered to have occurred and the individual security is written down to its fair value. Any such write-down is recognized as loss in the current period's statement of income.

Prior to January 1, 2010, the transfer of a marketable security between categories of investment shall be accounted for at fair value at the date of the transfer. For a marketable security transferred from the trading category, the unrealized holding gain or loss at the date of the transfer would have been recognized in earnings and shall not be recoveryd.

Marketable security transferred from held-to-maturity category to available-for-sale category is recorded at fair value. Unrealized gain or losses at the date of the transfer shall be recognized in equity separately.

Starting January 1, 2010, premium or discount is amortized using effective interest rate method. Prior to January 1, 2010, premium or discount is amortized using the straight-line method.

The allowance for impairment losses and changes in fair value are presented as additions to/deductions from the outstanding balance of marketable securities.

Starting January 1, 2010, the allowance for impairment losses is provided if there is an objective evidence of impairment. Prior to January 1, 2010, allowance for losses is determined based on evaluation of collectibility of each marketable security.

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi (lanjutan)

i. Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali

Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali disajikan sebesar harga jual kembali surat berharga yang bersangkutan dikurangi pendapatan bunga yang belum diamortisasi. Pendapatan bunga yang belum diamortisasi merupakan selisih antara harga beli dan harga jual kembali surat berharga yang diakui sebagai pendapatan bunga dan diamortisasi selama jangka waktu sejak surat berharga dibeli hingga dijual kembali.

Sejak 1 Januari 2010, pendapatan bunga diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Sebelum 1 Januari 2010, pendapatan bunga diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus.

Sejak 1 Januari 2010, surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung, jika ada, dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Penyisihan kerugian penurunan nilai dibentuk jika terdapat bukti objektif penurunan nilai.

Sebelum 1 Januari 2010, surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali dinyatakan sebesar harga jual dikurangi dengan penyisihan kerugian yang dibentuk berdasarkan penelaahan kolektibilitas dari saldo surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali.

j. Kredit yang diberikan

Kredit yang diberikan dinyatakan sebesar saldo kredit dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Bank membentuk penyisihan cadangan kerugian penurunan nilai berdasarkan penelaahan terhadap saldo masing-masing kredit pada akhir tahun. cadangan kerugian penurunan nilai ditetapkan berdasarkan penelaahan terhadap kolektibilitas yang besarnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI).

Sejak 1 Januari 2010, kredit yang diberikan diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi dengan penyisihan kerugian penurunan nilai.

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan diskonto atau premi pada saat akuisisi dan biaya transaksi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suku bunga efektif. Penyisihan kerugian penurunan nilai dibentuk jika terdapat bukti objektif penurunan nilai.

Sebelum 1 Januari 2010, kredit yang diberikan dinyatakan sebesar saldo kredit bruto dikurangi dengan penyisihan kerugian yang dibentuk berdasarkan penelaahan terhadap kolektibilitas dari kredit yang diberikan.

Kredit sindikasi, kredit dalam rangka pembiayaan bersama dan kredit penerusan dinyatakan sebesar pokok kredit sesuai dengan porsi risiko yang ditanggung oleh Bank.

Kredit yang direstrukturisasi dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat kredit yang diberikan pada tanggal restrukturisasi atau nilai tunai penerimaan kas masa depan setelah restrukturisasi.

2. Summary of accounting policy (continued)

i. Marketable securities purchased with agreement to resell

Marketable secutities purchased with agreements to resell are presented at their resale price less unamortized interest income. Unamortized interest income is the defference between the purchase price and the selling price which is recognized as interest income and amortized during the period from the purchase of marketable securities.

Starting January 1, 2010, the interest income is amortized using effective interest rate method. Prior to January 1, 2010, the interest income is amortized using straight-line method.

Starting January 1, 2010, marketable securities purchased with agreements to resell are initially measured at fair value plus directly attributable transaction costs, if any, and subsequently measured at their amortized cost using the effective interest rate method. The allowance for impairment losses is provided if there is an objective evidence of impairment.

Prior to January 1, 2010, marketable securities purchased with agreements to resell are stated at the resale price, net of allowance for losses, which is determined based on evaluation of the collectibility of each marketable security purchased with agreements to resell.

j. Loans

Credit given is certified as in the amount of credit balance minus the allowance for impairment losses. Bank establishes the setting aside of allowance for impairment losses based on the balance of each credit at year end. the reserve for value decreased loss is decided to be based on the evaluation to the collectability with the amount as arranged in the Regulation of Bank Indonesia (PBI).

Starting January 1, 2010, loans are measured at amortized cost using the effective interest rate method, less allowance for impairment losses.

Amortized cost calculated by taking into account any discount or premium onacquisition and transaction that are an integral part of effective interest rate. Allowance for impairment losses is provided if there is an objective evidance of impairment.

prior to January 1, 2010, loans are stated at the gross amount of their outstanding balances, less allowance for impairment losses which is determined based on evaluation of the collectibility of each loan.

Syndicated, joint financing and channeling loans are stated at the loan principal amount based on the risk participation by the Bank.

Restructured loans are presented at the lower of the carrying value of the loan at the time of restructuring or the net present value of the total future cash receipts after restructuring.

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi (lanjutan)

j. Kredit yang diberikan (lanjutan)

Kerugian akibat selisih antara nilai tercatat kredit pada tanggal restrukturisasi dengan nilai tunai penerimaan kas masa depan setelah restrukturisasi diakui dalam laporan laba rugi. Setelah restrukturisasi, semua penerimaan kas masa depan yang ditetapkan dalam persyaratan baru dicatat sebagai pengembalian pokok kredit yang diberikan dan penghasilan bunga secara proporsional.

Sejak tanggal 1 Januari 2010, saat persyaratan kredit telah dinegosiasi ulang atau dimodifikasi (kredit restrukturisasi), penurunan nilai yang ada diukur dengan menggunakan suku bunga efektif awal yang digunakan sebelum persyaratan diubah dan kredit tidak lagi diperhitungkan sebagai menunggak.

Manajemen secara berkelanjutan mereview kredit yang direkstrukturisasi untuk menyakinkan terpenuhinya seluruh kriteria dan pembayaran di masa depan. Kredit akan terus menjadi subjek penilaian penurunan nilai individual atau kolektif dengan menggunakan suku bunga efektif awal.

Sebelum 1 Januari 2010, kredit yang direstrukturisasi disajikan sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat kredit pada tanggal restrukturisasi atau nilai tunai penerimaan kas masa depan setelah restrukturisasi.

Kerugian akibat selisih antara nilai tercatat kredit pada tanggal restrukturisasi dengan nilai tunai penerimaan kas masa depan setelah restrukturisasi diakui dala laporan laba rugi. Setelah restrukturisasi semua penerimaan kas masa depan yang ditetapkan dalam persyaratan baru dicatat sebagai pengembalian pokok kredit yang diberikan dan penghasilan bunga secara proporsional.

Jumlah bruto kredit yang direstrukturisasi mencakup pokok kredit, bunga dan beban lainnya yang dikapitalisasi ke pokok kredit. Bunga yang dikapitalisasi ke pokok kredit tersebut diakui sebagai pendapatan bunga ditangguhkan.

Kredit diklasifikasikan sebagai “non-performing” pada saat pokok kredit telah lewat jatuh tempo dan/atau pada saat manajemen berpendapat bahwa penerimaan atas pokok atau bunga kredit tersebut diragukan. Pendapatan bunga atas kredit yang telah diklasifikasikan sebagai “non-performing” diakui sebagai pendapatan pada saat diterima.

Kredit yang diberikan dihapusbuku dari penyisihan penghapusan kredit pada saat manajemen berpendapat bahwa kredit tersebut harus dihapus bukukan karena sudah tidak akan tertagih lagi. Sebelum tanggal 1 Januari 2010, penerimaan kembali kredit yang telah dihapus bukukan dikreditkan ke akun penyisihan penghapusan kredit. Kemudian setelah tanggal 1 Januari 2010 penerimaan kembali kredit yang telah dihapus bukukan dibukukan sebagai pendapatan operasional selain bunga.

Penyaluran kredit pola channeling terdapat kredit yang disalurkan ke nasabah dengan penerusan pinjaman (Channeling), Bank hanya mengakui kredit sebesar porsi kredit yang risikonya ditanggung Bank. Jika Bank tidak mempunyai risiko atas penerusan kredit, maka Bank tidak mengakui kredit tersebut. Untuk kredit yang diberikan dengan perjanjian penerusan kredit antara lain kemitraan, pengentasan kemiskinan, pengembangan usaha kecil, pinjaman kredit yang berasal dari luar negeri, dan dana investasi pemerintah.

2. Summary of accounting policy (continued)

j. Loans (continued)

Losses arising from any excess of the carrying value of the loan at the time of restructuring over the net present value of the total future cash receipts after restructuring are recognized in the statement of income. Thereafter, all cash receipts under the new terms shall be accounted for as the recovery of principal and interest revenue, on a proportionate basis.

Starting January 1, 2010, when the credit requirements have been renegotiated or modified (restructuring credit), the existing decreased value shall be measured using the initial effective interest rate used before the requirements are amended and the credit is no longer counted as outstanding.

The management continuously reviews the restructured to assure the completion of all criteria and payment in the future. The credit shall be continuously become the subject individual or collective decreased value appreciation using the initial effective interest rate.

Prior to January 1, 2010 restructured loans are stated at the lower of carrying value of the loans at the time of restructuring or net present value of the total future cash receipt after restructuring.

Losses arising from any excess of the carrying value of the loans at the time of restructuring over the net present value of the total future cash receipts after restructuring are recognized in the statement of income. Thereafter, all cash receipts under the new terms shall be accounted for as the recovery of principal and interest revenue, proportionately.

The total restructured credit gross includes the principal credit, interests and other liabilities capitalized to the principal credit. The interest capitalized to the principal credit shall be acknowledged as postponed interest income.

Loans are classified as non-performing at the time the basic is already over due and/or when the management assumes that the collection of the basic and/or its interest is questioned. Incomes from loan interest is classified as non-performing, acknowledged as income at the time of collection.

The given loans will be write-off from an allocation for possible losses when the management assumes that those loans should be written-off since they will not be collectibleanymore. Prior to January 1, 2010, the recollection of the written-off loan is recorded as credit on the account for allocation for possible losses. After that, Starting on January 1, 2010 the recollection of the written-off loan is recorded as operating income beside interest.

In the channelling pattern of loans to costumers, (Channelling), the Bank only acknowledges the loan equal to its portion of the risk guaranteed (borne)by the Bank. If the Bank has no risk of channeling the loans, hence Bank does not approve that loan. Examples of loans given with the agreement of Channeling loans are partnership loan, poor endeavoring credit, small-scale development loan, loan derived from abroad, and government investment fund.

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi (lanjutan)

k. Pembiayaan Syariah

Pembiayaan syariah terdiri dari piutang murabahah, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, ijarah, istishna dan qardh.

Pembiayaan mudharabah dan musyarakah disajikan dalam laporan posisi keuangan sebesar nilai wajar dan jika nilai wajar lebih besar daripada nilai buku, maka selisih tersebut diakui sebagai keuntungan yang ditangguhkan dan diamortisasi selama masa akad atau diakui sebagai kerugian pada saat terjadinya apabila nilai wajar lebih kecil daripada nilai tercatat.

Piutang murabahah disajikan dalam laporan posisi keuangan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi pendapatan murabahah ditangguhkan dan penyisihan kerugian penurunan nilai piutang.

Pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya.

Piutang istishna disajikan dalam laporan posisi keuangan sebesar tagihan termin kepada pembeli dikurangi penyisihan kerugian.

Piutang qardh diakui sebesar jumlah dana dipinjamkan pada saat terjadinya. Kelebihan penerimaan dari pinjaman qardh diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya.

Murabahah adalah akad jual beli barang tertentu dengan harga ditentukan sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan Bank sebagai penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli (debitur). Piutang murabahah dinyatakan sebesar jumlah piutang setelah dikurangi dengan ”marjin yang ditangguhkan” yang belum direalisasikan dan penyisihan kerugian.

Mudharabah adalah kerjasama usaha antara pemilik dana (shahibul maal) dan manajer pendanaan (mudharib) berdasarkan rasio pendapatan dan pendanaan (mudharib) seta ratio kerugian yang ditentukan sebelumnya.

Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik modal (mitra musyarakah) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil atau kerugian sesuai kesepakatan atau secara proporsional sesuai kontribusi modal.

Qardh adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan yang diperjanjikan dengan liabilitas pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

l. Aset Produktif dan Penilaian Kualitas Aset

Untuk 1 Januari 2012, bank mengaplikasikan perhitungan CKPN kolektif menggunakan data historikal dengan perhitungan probability default (PD) dan Lost Given Default (LGD) dengan metode perhitungan Role rate.

Untuk tahun yang berakhir 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013, bank telah mengaplikasikan pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai yang harus dibentuk untuk kredit yang diberikan secara kolektif adalah sebagai berikut:

2. Summary of accounting policy (continued)

k. Sharia Financing

Sharia financing consists of murabahah receivables, mudharabah financing, musyarakah financing, ijarah, istishna and qardh.

Mudharabah and musyarakah financing are stated in the statement of financial position at fair value and if the fair value is higher than the book value, the margin is recorded as deferred income and amortized over the period of financing or recorded as a loss and charged to the current period if the fair value is less than the book value.

Murabahah receivables are stated in the statement of financial position at net realizable value, which is the receivable balance less deferred murabahah income and allowance for impairment losses.

Ijarah income is presented net of related expenses such as depreciation, maintenance and repairs, and so forth.

Istishna receivables are presented in the statements of financial position at the istishna billing to the buyer less an allowance for losses.

A qardh receivable is recognized in the amount of financing granted at the transaction date. Any excess amount paid by the borrower in repaying a qardh receivable is recognized as revenue upon receipt.

Murabahah is an agreement to buy and sell certain products at acquisition cost plus a certain margin to be agreed by both the buyer and seller and the Bank as the seller is required to disclose the acquisition cost to the buyer. Murabahah receivables are stated at the amount of receivables less unrealized deferred margin and allowance for losses.

Mudharabah is a commercial cooperation contract between the owner of funds (shahibul maal) and a funds manager (mudharib) based on a predetermined ratio of revenue or profit and loss sharing.

Musyarakah is an agreement between the investors (mitra musyarakah) to enter into a joint-venture in the form of a partnership with revenue or profit and loss sharing based on an agreement or capital contribution proportion.

Qardh is a loan/borrowing funds without any agreed consideration wherein the borrower has the obligation to return the principal of the loan at lump sum or on installment over a certain period.

l. Assets productif and value of quality assets

For the January 1, 2012, the banks applies the allowance for impairment losses are collectively used historical data with evaluated probability default and Lost Given Default with Role rate calculated method.

For the year ended Juni 30, 2014 and December 31, 2013, the banks applies the allowance for impairment losses to be established for loans that are colletively evaluated are as follows:

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi (lanjutan)

I. Aset Produktif dan Penilaian Kualitas Aset (lanjutan)

Klasifikasi	Persentase cadangan kerugian penurunan nilai *Percentage of impairment losses*	*Classification*
• Lancar (tidak ada jatuh tempo)	1 %	*Current (no overdue)* •
• Dalam perhatian khusus (jatuh tempo 1 - 90 hari)	5 %	*Special mention (overdue 1 - 90 days)* •
• Kurang lancar (jatuh tempo 90 - 120 hari)	15 %	*Substandard (overdue 90 - 120 days)* •
• Diragukan (jatuh tempo 120 - 180 hari)	50 %	*Doubtful (overdue 120 - 180 days)* •
• Macet (jatuh tempo > 180 hari)	100 %	*Non performing (overdue > 180 days)* •

Sejak 1 Januari 2010, Bank mengaplikasikan No.11/33.DPNP dalam penyisihan penghapusan aset produktif.

Starting January 1, 2010 the bank applies circular letter No. 11/33.DPNP in determining the collectibility productive assets.

Pada tanggal 8 Desember 2009, Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran No. 11/33/DPNP yang mengatur mengenai estimasi penurunan nilai kolektif kredit yang diberikan dengan keterbatasan pengalaman kerugian spesifik. Bagi bank yang belum dapat melakukan estimasi yang memadai dan belum memiliki data kerugian historis yang memadai untuk menentukan besarnya penurunan nilai atas kredit yang diberikan secara kolektif sesuai dengan persyaratan dalam PSAK 55 (Revisi 2006) dan PAPI, maka pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai dapat menggunakan estimasi yang didasarkan pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai " Penilaian Kualitas aset Bank Umum ".

On 8 December, bank Indonesia issued circular letter No.11/33/DPNP which regulates the estimation collective allowance for imparment losses of loans with limited experience of specific losses. For Banks that have not been able to make reasonable estimates and do not have sufficient historical loss data to determine the amount of impairment losses for loans that are collectively evaluated in accordance with the requirments of SFAS 55 (Revised 2006) and PAPI, the allowance for impairment losses is calculated using the estimates based on the applicable Bank Indonesia regulation regarding " Assets Quality Ratings for Commercial Banks ".

Sesuai dengan Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/33/DPNP (SE-BI) tanggal 8 Desember 2009, Bank menentukan penyisihan kerugian penurunan nilai kredit secara kolektif dengan mengacu pada pembentukan penyisihan umum dan penyisihan khusus sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Sesuai dengan SE-BI tersebut ketentuan transisi penurunan nilai atas kredit secara kolektif dapat diterapkan paling lambat sampai dengan 31 Desember 2011.

In accordance with the Attachment of Bank Indonesia's Circulatory Note No. 11/33/DPNP (SE-BI) on the 8th of December 2009, the Bank decides on the setting aside of loss by decreased credit value collectively taking as reference the formation of common setting aside and special setting aside in accordance with the provision of Bank Indonesia concerning the Public Bank Asset Quality Appreciation. According to SE-BI the provision on decreased value on credit collectively may be applied at the latest up to the 31st of December 2011.

Aset Produktif Bank Umum, adalah penyediaan dana Bank untuk memperoleh penghasilan.

The productive asset of General Bank, is the appropriation of bank fund of to get income.

Penilaian kualitas Aset bank berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/PBI/2005, tanggal 20 Januari 2005, Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/3/DPNP, tanggal 31 Januari 2005, Perihal Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Kemudian perubahan I Peraturan Bank Indonesia No. 8/2/PBI/2006, tanggal 30 Januari 2006, Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, perubahan ke II PBI No. 9/6/PBI/2007 tanggal 30 Maret 2007 serta perubahan ke III PBI No.11/2/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Penilai kualitas aset "Bank" juga berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Nomor 68/KEPDIR/2006 tanggal 27 September 2006.

The assesment of bank productive assets was based on the regulation of Bank of Indonesia Number 7/2/PBI/2005, dated January 20, 2005, about Assesment of assets quality of general bank and Bank of Indonesia Decree Number 7/3/DPNP, dated January 31, 2005, on assessment of assets quality with General Bank. and then First Change Bank of Indonesia Regulation Number 8/2/PBI/2006, dated January 30, 2006, about modification of Central Bank of Indonesia's Regulation No. 7/2/PBI/2005 about assesment of assets quality of general bank, the second modification PBI Number 9/6/PBI/2007 dated March 30, 2007 and the third modification PBI Number 11/2/PBI/2009 dated January 29, 2009 about assesment of assets quality of general bank. The assessment of assets quality 'Bank" based on the Letter Board of Directors Number 68/KEPDIR/2006 dated September 27, 2006.

Dalam peraturan tersebut, klasifikasi agunan yang diambil alih dan properti terbengkalai ditetapkan sebagai berikut:

This regulation classifies feroclosed assets and abandoned proporties into the following classification:

Klasifikasi	**Batas waktu/*Period***	***Classification***
Lancar	Sampai dengan 1 tahun/ *Up to 1 year*	*Current*
Kuranng lancar	Lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun/ *More than 1 year up to 3 years*	*Sub-standard*
Diragukan	Lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun/ *More than 3 year up to 5 years*	*Doubtful*
Macet	Lebih dari 5 tahun/*More than 5 years*	*Loss*

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2014 dan 2013
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years ended
December 31, 2014 and 2013
(Expressed in fully Rupiah, unless otherwise stated)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi (lanjutan)

l. Aset Produktif dan Penilaian Kualitas Aset (lanjutan)

Klasifikasi untuk rekening antar kantor dan *suspense account* ditetapkan sebagai berikut:

Klasifikasi	**Batas waktu/*Period***	***Classification***
Lancar	Sampai dengan 180 hari/*Up to 180 days*	*Current*
Macet	Lebih dari 180 hari/*More than 180 days*	*Loss*

Penilaian kualitas Aset bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 yang diubah dengan PBI No. 8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006, serta diubah kembali dengan PBI Nomor 9/9/PBI/2007 pada tanggal 18 Juni 2007 yang kemudian diubah dengan PBI Nomor 10/24/PBI/2008, tanggal 16 Oktober 2008, serta terakhir diubah dengan PBI Nomor 13/13/PBI/2011 pada tanggal 24 Maret 2011 tentang Penilaian Kualitas aset Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Penilaian kualitas Aset bank umum yang terakhir ditetapkan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum tanggal 24 Oktober 2012.

Klasifikasi aset produktif bank adalah sebagai berikut:

- Giro pada Bank lain
- Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain
- Surat-surat berharga;
- Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali
- Tagihan derivatif;
- Kredit yang diberikan;
- Tagihan akseptasi;
- Penyertaan
- Komitmen dan kontinjensi yang berisiko kredit
- Transaksi rekening administratif;
- Serta bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

m. Penyertaan

Penyertaan saham merupakan penanaman dana dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak dibidang keuangan yang tidak melalui pasar modal untuk tujuan investasi jangka panjang, serta penyertaan sementara dalam rangka restrukturisasi kredit.

Perusahaan asosiasi adalah seluruh entitas di mana Bank mempunyai pengaruh signifikan, namun tidak sampai mengendalikan entitas-entitas tersebut. Dalam hal ini, Bank umumnya mempunyai persentase kepemilikan 20% sampai dengan 50% hak suara. Penyertaan saham pada perusahaan asosiasi dicatat dengan metode ekuitas dan pada awalnya dicatat sebesar harga perolehan dan disesuaikan dengan bagian Bank atas laba atau rugi bersih perusahaan asosiasi sesuai dengan jumlah persentase kepemilikan dan dikurangi dengan penerimaan dividen sejak tanggal akuisisi.

Penyisihan kerugian penurunan nilai atas penyertaan dibentuk apabila berdasarkan pendapat manajemen terdapat penurunan nilai secara permanen atas nilai penyertaan.

2. Summary of accounting policy (continued)

l. Assets productif and value of quality assets (continued)

The classifications for inter-branch accounts and suspense accounts are as follows:

The assessment of bank productive assetts of general bank which carries out its business based on syariah principles, is regulated based on Central Bank of Indonesia regulation Number 7/2/PBI/2005 dated in January 20, 2005 which addendum PBI Number 8/21/PBI/2006 dated in October 2006 and addendum with number 9/9/PBI/2007 dated in June 18, 2007 which addendum with number 10/24/PBI/2008 dated in October 16, 2008 and last are addendum with number 13/13/PBI/2011 dated in March 24, 2011 about assets quality assessment of General Sharia Bank and Sharia Unit.

The latest valuation of general bank Assets quality stated based on the Bank of ndonesia Regulation Number 14/15/PB/2012 about the valuation of Public Bank Assets Quality dated October 24, 2012.

Classification of productive of bank assets are as follows:

- *Current account with other banks*
- *Placement with Bank Indonesia and other banks*
- *Marketable securities*
- *Marketable securities purchase with agreement to sell*
- *Derivatives receivable*
- *Loans*
- *Acceptances receivable*
- *Invesment*
- *Commitment and contigencies which carry credit risk*
- *Transaction recening administration*
- *With bend prepare other fund to be able in resemble*

m. Investment

An investment is an investment of capital in stock at the companies engaged in financial services industry that are not listed in the stock market for a long-term investment purpose,as well as temporary investments, in order for loan restructuring purpose.

Associates are all entities over which the Bank has significant influence, but does not have control. Generally, the Bank's shareholding is between 20% and 50% of the voting rights. Investments in shares in associates are accounted for under the equity method and are initially recognized at cost and adjusted for the Bank's share of net profit or loss of the associated companies less dividends received after the acquisition date.

Setting aside the loss of decreased value for participation shall be established when based on the opinion of the management there is permanent decreased value on the participation value.

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi (lanjutan)

m. Penyertaan (lanjutan)

Untuk penyertaan saham dengan persentase kepemilikan di bawah 20% dicatat dengan metode biaya. Dengan metode ini, penyertaan saham dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Pendapatan dividen diakui pada saat keputusan pembagian dividen diumumkan.

n. Beban dibayar dimuka

Beban dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing beban dengan menggunakan metode garis lurus.

o. Aset tetap dan penyusutan

Aset tetap dicatat berdasarkan harga perolehan. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (Straight Line Method) dari harga perolehan, yang didasarkan atas masa manfaat dari Aset tetap yang bersangkutan. Persentase tarif penyusutan Aset tetap dan inventaris ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau No. 51/KEPDIR/2007 tanggal 1 Mei 2007, yang mengacu pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2000, Tentang perubahan ketiga atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, dan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 138/KMK.03/2002 tanggal 8 April 2002, Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan RI No. 520/KMK.04/2000, tanggal 14 Desember 2000.

Efektif tanggal 1 Januari 2008, Bank menerapkan PSAK No.16 (Revisi 2007) "Aset Tetap", yang menggantikan PSAK No.16 (1994), "Aset Tetap dan Aset Lain-lain" dan PSAK No.17 (1994), "Akuntansi penyusutan". Standar ini mengatur antara lain mengenai pengakuan aset tetap, penentuan jumlah tercatat, penyusutan dan penurunan nilai. Selain itu, standar ini mewajibkan untuk menghitung dan memasukkan biaya pembongkaran dan pemindahan atau restorasi lokasi aset sebagai bagian dari biaya perolehan.

Mewajibkan bank untuk memilih di antara model biaya atau model revaluasi sebagai kebijakan akuntansi atas aset tetapnya. Dalam hal ini, Bank memilih menggunakan model biaya.

Awalnya suatu aset tetap diukur sebesar biaya perolehan, yang terdiri dari harga perolehannya dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen, serta estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset.

Biaya-biaya setelah perolehan awal seperti penggantian komponen dan inspeksi yang signifikan, diakui dalam jumlah tercatat aset tetap jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan akan mengalir ke Bank dan biaya tersebut dapat diukur secara handal. Sisa jumlah tercatat biaya komponen yang diganti atau biaya inspeksi terdahulu dihentikan pengakuannya. Biaya perawatan sehari-hari aset tetap diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

2. Summary of accounting policy (continued)

m. Investment (continued)

Investments in shares with an ownership interest below 20% are recorded based on the cost method. Under this method, investments in shares are carried at cost less Allowance for impairment losses. Dividend income is recognized when the decision to distribute the dividend is declared.

n. Beban dibayar dimuka

Prepaid expenses are amortized over the beneficial periods using the straight-line method.

o. Fixed assets and depreciation

Fixed assets is written based on gain price. Depreciation is calculated by using Straight Line Method of gain price which is based on the above inward period of the fixed asset. The percentage of Fixed assets depreciation or inventory is defined based on the Decree of Riau Regional Development Bank's Board of Directors No.51/KEPDIR/2007 dated May 1, 2007, referring to constitution No. 17, 2000, on the third addendum of Constituent No 7 year 1983 about Income Tax, and Indonesia's Finance Minister No. 138/KMK.03/2002 dated April 8, 2002 in the front addendum of the Decree ot the Republic Indonesia's of Finance Minister No. 520/KMK.04/200, dated December 14, 2000.

Effective January 1, 2008, the Bank applied SFAS No. 16 (Revised 2007), "Fixed Assets", with supersedes SFAS No.16 (1994), "Fixed Assets and Other Assets" and SFAS No.17 (1994), "Accounting for Depreciation", prescribes the accounting treatment for property and equipment and provides, among others, for the recognition of the assets, determination of their carrying amounts, depreciation and impairment losses. In addition, the standard requires the inclusion of the cost of dismantling, removal or restoration of an asset as part of the cost of an item property and equipment.

Requires the bank to choose between the cost model and the revaluation model as the accounting policy for its property and equipment. The Bank choose for use cost model.

From the onset, an asset is still measured in the amount of revenue costs, consisting of the revenue price and costs that can be attributed directly to carry asset to the location and the desired condition in order the asset ready to be used in accordance with the desire and objective of the management, as well as the initial estimated fixed asset unloading and transfer costs and restoration of local assets.

The costs after the initial revenue such as component replacement and significant inspection, are acknowledged in in the amount recorded as fixed assets when it is very likely the economic benefits in the future shall flow to the Bank and those costs can be measured reliably. The remaining of recorded amount of reimbursed component costs or the previous inspection costs its acknowledgement is stopped. The daily maintenance cost of fixed assets shall be acknowledged as liability at the occurrence.

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi (lanjutan)

o. Aset tetap dan penyusutan (lanjutan)

Tanah diakui sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan. Beban-beban tertentu sehubungan dengan perolehan atau perpanjangan hak atas tanah ditangguhkan dan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus sepanjang tahun yang lebih pendek antara hak atas tanah atau umur ekonomis tanah. Beban ditangguhkan ini disajikan dalam akun "Aset Lain-lain" pada neraca.

Estimasi masa manfaat aset tetap adalah sebagai berikut :

Penggolongan harta berwujud	Masa manfaat/ *Useful life*	Tarif penyusutan/ *Depreciation tarif*	*Group assets*
Perabot / perlengkapan kantor	4 tahun/ *years*	25%	*Group I*
Perabot / perlengkapan rumah dinas	4 tahun/ *years*	25%	*Group I*
Perabot / perlengkapan mess	4 tahun/ *years*	25%	*Group I*
Mesin kantor	4 tahun/ *years*	25%	*Group I*
Komputer	4 tahun/ *years*	25%	*Group I*
Kendaraan	4 tahun/ *years*	25%	*Group I*
Perabot / perlengkapan kantor	8 tahun/ *years*	12,5%	*Group II*
Perabot / perlengkapan rumah dinas	8 tahun/ *years*	12,5%	*Group II*
Kendaraan	8 tahun/ *years*	12,5%	*Group II*
Bangunan Kantor	20 tahun/ *years*	5%	*Fixed*
Bangunan Rumah dinas	20 tahun/ *years*	5%	*Fixed*
Bangunan mess	20 tahun/ *years*	5%	*Fixed*

Hak atas tanah tidak disusutkan. Aset yang sudah tidak digunakan lagi dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan, laba atau rugi yang diperoleh/ diderita dilaporkan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan.

Sesuai dengan PSAK No.47 "Akuntansi Tanah" semua biaya dan beban yang terjadi sehubungan dengan perolehan hak atas tanah antara lain biaya perijinan, biaya survey dan pengukuran lokasi, biaya Notaris dan pajak-pajak yang berhubungan dengan hal tersebut, ditangguhkan dan disajikan secara terpisah dari biaya perolehan hak atas tanah. Biaya perolehan hak atas tanah yang ditangguhkan tersebut disajikan sebagai bagian dari akun Aset lain-lain dalam neraca bank dan diamortisasi selama manfaat hak atas tanah yang bersangkutan dengan menggunakan metode garis lurus.

Selain itu, PSAK No.47 menyatakan bahwa hak tanah tidak diamortisasi kecuali memenuhi kondisi tertentu yang telah ditentukan.

PSAK No.48 tentang "Penurunan Nilai Aset" mensyaratkan bahwa nilai tercatat aset tetap dikaji ulang setiap tanggal neraca untuk menilai apakah aset tetap tersebut nilai tercatatnya lebih tinggi dari jumlah yang dapat diperoleh kembali *(recoverable amount)* dari aset tetap tersebut. Jika nilai tercatat dari aset tetap melebihi taksiran jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset tetap tersebut, nilai tercatat aset tetap harus diturunkan menjadi nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset tetap tersebut.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan dalam laporan laba rugi pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

2. Summary of accounting policy (continued)

o. Fixed assets and depreciation (continued)

Land shall be acknowledged in the amount of revenue cost and shall not be decreased. Certain liabilities related to revenues or extended land title right shall be postponed and amortized using shorter linear method throughout the year between land title right or land economic age. This deferred liability shall be presented in the account of "Other Assets" in balance sheet.

Estimated useful lives of the assets as follows :

Rights on lands is not depreciated. Assets, which no longer been used were set out from the group of fixed assets, and profit/ losss gained/suffered is reported in the respective profit/ loss annual report.

According to SFAS No.47 "Land Accountancy" of all costs and liabilities occurring related to land title right revenues among them permit cost, survey and location measurement cost, notary cost and taxes related to that matter, shall be postponed and presented separately from the land title right revenue cost. The postponed land title right revenue cost shall be presented as part of Other Asset account in the balance of bank and amortized during the benefits of the concerned land title right using straight line method.

Besides that, SFAS No.47 also certifies that the land title right shall not be amortized unless it meets certain conditions already decided.

SFAS No.48 on "Asset Decreased Value " requires that the the recorded value of fixed assets still to be reviewed on each balance sheet date to appreciate whether the said fixed assets the recorded value is higher than the recoverable amount value from the said fixed assets. If the recorded value of fixed assets exceeds the estimated recoverable amount value of the fixed asset, the recorded fixed asset value must be lowered to become the recoverable amount value of the said fixed assets.

An item of property, plant and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in profit or loss in the year the asset is derecognized.

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi (lanjutan)

p. Aset tidak berwujud

Aset tidak berwujud terdiri dari perangkat lunak yang diperoleh Bank dan dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai aset.

Pengeluaran selanjutnya yang jumlahnya signifikan akan dikapitalisasi hanya jika pengeluaran tersebut menambah manfaat ekonomis aset yang bersangkutan dimasa mendatang. Pengeluaran lainnya dibebankan pada saat terjadinya.

Amortisasi diakui pada laporan laba rugi berdasarkan masa manfaat ekonomis yang berkisar antara 4 sampai dengan 8 tahun dengan menggunakan metode garis lurus sejak tanggal dimana aset siap untuk digunakan. Aset tidak berwujud disajikan dalam akun "Aset lain-lain".

q. Aset dalam penyelesaian

Aset tetap dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Ketika aset dalam penyelesaian telah selesai dan siap digunakan, akumulasi biaya perolehan direklasifikasi ke akun aset tetap yang sebenarnya.

Akumulasi biaya konstruksi aset tetap dikapitalisasi sebagai aset dalam penyelesaian. Biaya tersebut direklasifikasi ke akun aset tetap pada saat proses konstruksi selesai dan aset tetap siap untuk digunakan. Penyusutan mulai dibebankan pada tanggal yang sama.

r. Beban tangguhan

Beban tangguhan merupakan nilai tercatat atas pengadaan IT yang proses pengerjaannya melalui tender. Bank akan melakukan pembayaran pada saat penyerahan Berita Acara Pekerjaan telah selesai dilakukan.

s. Pajak di bayar dimuka

Uang muka pajak merupakan jumlah uang muka pajak badan dibayar sendiri dan pajak penghasilan yang telah dibayarkan yang dapat diperhitungkan pada tahun berjalan maupun tahun berikutnya.

t. Agunan yang diambil alih

Agunan yang diambil alih atas penyelesaian kredit yang diberikan dinyatakan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai penurunan nilai. Nilai bersih yang dapat direalisasi adalah nilai wajar agunan yang diambil alih setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan. Selisih lebih antara saldo kredit yang tidak dapat ditagih dengan nilai agunan yang diambil alih tersebut dibebankan pada cadangan kerugian penurunan nilai. Biaya sehubungan dengan pemeliharaan dan perolehan Aset tersebut dibebankan pada operasi pada saat terjadinya. Laba atau rugi yang terjadi akibat realisasi penjualan agunan diambil alih dilaporkan sebagai pendapatan atau beban periode berjalan.

2. Summary of accounting policy (continued)

p. Formless assets

Formless assets consist of software obtained by Bank and recorded in the amount of revenue costs minus accumulated amortization and accumulated loss of the asset decreased value.

Further expenses with significant amount shall be capitalized only when those expenses increasing the related asset economic benefits in the future. Other expenses shall be imputed at the occurrence.

Amortization shall be acknowledged on profit loss report based on the economic benefits ranging from 4 to 8 years using linear method as of the date when the assets are ready to be used. Formless assets shall be presented in "Other Assets" account.

q. Construction in progress

Fixed assets in settlement shall be stated in the amount of revenues and presented as part of fixed assets. When assets in settlement have been settled and ready to be used, the accumulated revenue costs shall be reclassified to real fixed asset account.

The accumulated costs of the construction of fixed assets are capitalized as assets under construction. These costs are reclassified to the appropriate fixed asset account when the construction is completed and the asset is ready to use. Depreciation is charged from this date.

r. Deferred expenses

Deferred costs are the recorded values on IT procurement with its working process through tender. Bank shall perform payment at the time the submission of Work Minutes has been completely performed.

s. Prepaid tax

Prepaid tax payment are income taxes that have been paid but not been charged yet in the respective accounting period.

t. Foreclosed collateral

Foreclosed collateral related to the settlement of loans shall bestated based on net realisable value. The net realisable value is the fair value of foreclosed collateral after being deducted with the estimated release expense. The surplus balances between the loans balance that cannot be collected with the foreclosed collaterals shall be charged to Allowance for impairment losses. Expenses in relation to acquisition and maintenance of the foreclosed collaterals shall be charged to the on going operation. Gains or losses which arised from the realization of foreclosed collateral selling shall be reported as income or expense in such periode.

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi (lanjutan)

t. Agunan yang diambil alih (lanjutan)

Penagihan atas kredit macet diserahkan ke Lembaga pelelangan Negara. Pengambilalihan agunan kredit nasabah dilakukan melalui Kantor Lelang untuk nasabah yang jaminannya diserahkan ke Lembaga pelelangan Negara dan dicatat sebesar nilai terendah antara nilai taksiran aset menurut Lembaga pelelangan dan saldo pinjaman yang belum dilunasi. Dalam hal nilai taksiran aset lebih rendah dari saldo pinjaman, maka selisih dari saldo pinjaman yang tidak dapat ditagih lagi, dikurangkan dari cadangan kerugian penurunan nilai kredit.

Agunan yang diambil alih tidak disusutkan dan beban-beban sehubungan dengan perolehan & pemeliharaan aset tersebut dibebankan pada saat terjadinya.

Selisih antara nilai tercatat dan hasil penjualan dari agunan yang diambil alih diakui sebagai laba atau rugi pada saat penjualan agunan yang diambilalih dan diakui sebagai pendapatan atau beban non operasional dalam laporan laba rugi.

Agunan yang diambil alih disajikan dalam akun "Aset lain-lain" pada neraca.

u. Identifikasi dan Pengukuran Penurunan Nilai

Pada setiap tanggal neraca, Bank mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Estimasi periode antara terjadinya peristiwa dan teridentifikasinya kerugian ditentukan oleh manajemen untuk setiap portofolio yang diidentifikasi. Pada umumnya, periode tersebut bervariasi antara 3 dan 12 bulan, untuk kasus tertentu diperlukan periode yang lebih lama.

Bank pertama kali menentukan apakah terdapat bukti obyektif penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, dan secara individual atau kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual.

Jika Bank menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Bank memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

2. Summary of accounting policy (continued)

t. Foreclosed collateral (continued)

The claim over stuck credit shall be submitted to Lembaga pelelangan Negara (the State auction Institution). Taking over the customer's credit collateral shall be performed through the Auction Office on customer whose collateral submitted to the State auction Institution and shall be recorded at the lowest value between the estimated asset value according to the auction Institution and outstanding loan balance. In the case the estimated asset value is lower than the loan balance, then the difference of the loan balance no longer able to be claimed, shall be deducted from the reserve of decreased credit value loss.

The collateral taken over shall not be able to be decreased and the liabilities related to the revenues & maintenances of the assets shall be borne at the time of the occurrence.

The difference between the written value and the proceeds from the sale of taken over collateral shall be acknowledged as profit or loss at the time of taken over collateral sale and shall be acknowledge as income or nonoperational liability in profit loss report.

The collateral taken over shall be presented in the account of "Other assets" in the balance sheet.

u. Identification and Impairment of Assets

The Group assesses at each reporting date whether there is objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired. A financial asset or a group of financial assets is impaired and impairment losses are incurred only if there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the asset (a "loss event") and that loss event (or events) has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or group of financial assets that can be reliably estimated.

The estimated period between a loss occurring and its identification is determined by management for each identified portfolio. In general, the periods used vary between 3 months and 12 months; in exceptional cases, longer periods are warranted.

The Bank first assesses whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, and individually or collectively for financial assets that are not individually significant.

If the Bank determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, whether significant or not, it includes the asset in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment. Assets that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is or continues to be recognised are not included in a collective assessment of impairment.

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi (lanjutan)

u. Identifikasi dan Pengukuran Penurunan Nilai (lanjutan)

Jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Nilai tercatat aset tersebut dikurangi melalui akun cadangan kerugian penurunan nilai dan beban kerugian diakui pada laporan laba rugi konsolidasian. Jika pinjaman yang diberikan atau investasi dimiliki hingga jatuh tempo memiliki suku bunga variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif yang berlaku yang ditetapkan dalam kontrak.

Sebagai panduan praktis, dapat mengukur penurunan nilai berdasarkan nilai wajar instrumen dengan menggunakan harga pasar yang dapat diobservasi. Perhitungan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan dengan agunan (colateralised financial asset) mencerminkan arus kas yang dapat dihasilkan dari pengambilalihan agunan dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh dan menjual agunan, terlepas apakah pengambilalihan tersebut berperluang terjadi atau tidak.

Untuk tujuan evaluasi penurunan nilai secara kolektif, aset keuangan dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakteristik risiko kredit (yaitu berdasarkan proses pemeringkatan yang mempertimbangkan jenis aset, industri, lokasi geografis, jenis agunan, status tunggakan, dan faktor-faktor relevan lainnya). Karakteristik yang dipilih adalah relevan dengan estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset tersebut yang mengindikasikan kemampuan debitur untuk membayar seluruh utang yang jatuh tempo sesuai persyaratan kontrak dari aset yang dievaluasi.

Arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan yang penurunan nilainya dievaluasi secara kolektif, diestimasi berdasarkan kontraktual atas aset didalam kelompok tersebut dan kerugian historis yang pernah dialami atas aset yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dengan karakteristik risiko kredit kelompok tersebut. Kerugian historis yang pernah dialami disesuaikan berdasarkan data terkini dapat diobservasi untuk mencerminkan kondisi saat ini yang tidak berpengaruh pada periode terjadinya dan menghilangkan pengaruh yang ada pada historis namun sudah tidak ada lagi saat ini.

Estimasi terhadap perubahan arus kas masa datang dari kelompok aset harus mencerminkan dan memiliki arah yang konsisten dengan perubahan data terkait yang dapat diobservasi dari satu periode ke periode berikutnya (seperti perubahan tingkat pengangguran, harga properti, harga komoditas, status pembayaran, atau faktor-faktor lainnya yang merupakan indikasi timbulnya kerugian dalam kelompok aset keuangan tersebut serta besarannya). Metodologi dan asumsi yang digunakan dalam mengestimasi arus kas masa datang dikaji ulang secara berkala untuk mengurangi perbedaan antara taksiran kerugian dengan jumlah kerugian aktualnya.

2. Summary of accounting policy (continued)

u. Identification and Impairment of Assets (continued)

The amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future credit losses that have not been incurred) discounted at the financial asset's original effective interest rate. The carrying amount of the asset is reduced through the use of an allowance account and the amount of the loss is recognised in the consolidated income statement. If a \loan or held-to-maturity investment has a variable interest rate, the discount rate for measuring any impairment loss is the current effective interest rate determined under the contract.

As a practical expedient, the Bank may measure impairment on the basis of an instrument's fair value using an observable market price.The calculation of the present value of the estimated future cash flows of a collateralised financial asset reflects the cash flows that may result from foreclosure less costs for obtaining and selling the collateral, whether or not foreclosure is probable.

For the purposes of a collective evaluation of impairment, financial assets are grouped on the basis of similar credit risk characteristics (that is, on the basis of the Banks grading process that considers asset type, industry, geographical location, collateral type, past-due status and other relevant factors). Those characteristics are relevant to the estimation of future cash flows for groups of such assets by being indicative of the debtors' ability to pay all amounts due according to the contractual terms of the assets being evaluated.

Future cash flows in a group of financial assets that are collectively evaluated for impairment are estimated on the basis of the contractual cash flows of the assets in the group and historical loss experience for assets with credit risk characteristics similar to those in the group. Historical loss experience is adjusted on the basis of current observable data to reflect the effects of current conditions that did not affect the period on which the historical loss experience is based and to remove the effects of conditions in the historical period that do not currently exist.

Estimates of changes in future cash flows for groups of assets should reflect and be directionally consistent with changes in related observable data from period to period (for example, changes in unemployment rates, property prices, payment status, or other factors indicative of changes in the probability of losses in the Group and their magnitude). The methodology and assumptions used for estimating future cash flows are reviewed regularly by the Banks to reduce any differences between loss estimates and actual loss experience.

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi (lanjutan)

u. Identifikasi dan Pengukuran Penurunan Nilai (lanjutan)

Dalam mengevaluasi penurunan nilai secara kolektif, Bank menggunakan model statistik dari tren probability of default di masa lalu, waktu pemulihan dan jumlah kerugian yang terjadi, yang disesuaikan dengan pertimbangan manajemen mengenai apakah kondisi ekonomi dan kondisi kredit saat ini mungkin menyebabkan kerugian aktual lebih besar atau lebih kecil dari pada yang dihasilkan oleh model statistik. Tingkat wanprestasi, tingkat kerugian dan waktu pemulihan yang diharapkan di masa datang secara berkala dibandingkan dengan hasil aktual yang diperoleh untuk memastikan bahwa model statistik yang digunakan masih memadai.

Penyisihan kolektif untuk kredit yang dikelompokan sebagai dalam perhatian khusus, kurang lancar diragukan dan macet dihitung setelah dikurangi dengan nilai agunan yang diperkenankan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Perhitungan penyisihan kerugian penurunan nilai berdasarkan nilai tercatat (biaya perolehan amortisasi).

Kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi diukur sebesar selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Perhitungan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan dengan agunan (collateralised finansial asset) mencerminkan arus kas yang dapat dihasilkan dari pengambilalihan agunan dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh dan menjual agunan, terlepas apakah pengambilalihan tersebut berpeluang terjadi atau tidak. Kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba rugi dan dicatat pada akun kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi. Pendapatan bunga atas aset keuangan yang mengalami penurunan nilai tetap diakui atas dasar suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam pengukuran kerugian penurunan nilai. Ketika peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai menyebabkan jumlah kerugian penurunan nilai berkurang, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan dan pemulihan tersebut diakui pada laporan laba rugi.

Jika persyaratan kredit, piutang atau investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo dinegosiasi ulang atau dimodifikasi karena debitur atau penerbit mengalami kesulitan keuangan, maka penurunan nilai ukur dengan suku bunga efektif awal yang digunakan sebelum persyaratan diubah.

Bank mencatat taksiran kerugian atas transaksi rekening administratif sesuai dengan peraturan Bank Indonesia.

Sebelum tanggal 1 Januari 2010, Bank membentuk cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif serta taksiran kerugian atas transaksi rekening administrasi.

Aset produktif Bank meliputi giro pada bank lain, penempatan pada lain, efek-efek, kredit, penyertaan, yang mempunyai risiko kredit (bank garansi), serta aset produktif yang berasal dari kegiatan perbankan syariah.

2. Summary of accounting policy (continued)

u. Identification and Impairment of Assets (continued)

In evaluating the collective decreased value, the Bank uses statistic model of the probability of default trend in the past, restoration time, and the total loss occurring, adjusted with the management consideration on whether the current economic condition and credit condition may cause larger or smaller actual loss than that produced by statistic model. Default level, loss level, and restoration time to be expected in the future are periodically compared to the actual result obtained in order to assure that the statistic model being used is still sufficient.

Colleting setting aside for credit categorized in special attention, not smooth in doubt and stuck shall be counted after deducted by the allowed collateral value according to the provision of Bank Indonesia. The calculation of setting aside the decreased value loss is based on the recorded value (amortization revenue cost).

The loss by decreased value on financial assets recorded in the amortized revenue cost shall be measured in the amount of difference between the value recorded as financial asset and the current estimated cash flow value in the future discounted using the initial effective rate of the financial asset. The calculation of the current value of the future estimated cash flow on the collateralized financial assets reflects the cash flow that can be produced from the collateral takeover deducted by costs to obtain and sell the collateral, regardless whether the takeover has the possibility to occur or not. The occurring loss shall be acknowledged in the profit loss report and recorded in the decreased value loss account on the financial assets recorded in the amortized revenue cost. The interest income on financial assets experiencing decreased value is still acknowledged on the basis of the interest rate used to discount the future cash flow in the measurement of decreased value loss. When the occurrence happening after decreased value causes the total decreased value loss to decrease, the decreased value loss previously acknowledged must be restored and the restoration shall be acknowledged in the profit loss report.

If the credit requirements, receivables, or investments owned up to its due time is renegotiated or modified because the debtor or publisher experiencing financial difficulty, then the measuring decreased value and the initial effective interest rate used before the requirements shall be amended.

The bank records the estimated loss on the administrative account in accordance with the regulation of Bank Indonesia.

Before the 1st of January 2010, the Bank shall form reserve for the decreased value loss of productive assets as well as estimated loss on the administrative account transaction.

The Bank productive assets includes the clearing in other banks, stocks, credits, participations as well as productive assets coming from syariah banking activities.

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi (lanjutan)

u. Identifikasi dan Pengukuran Penurunan Nilai (lanjutan)

Komitmen dan kontinjensi yang mempunyai risiko kredit terdiri atas fasilitas kartu kredit kepada nasabah yang belum digunakan, garansi yang diterbitkan.

Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan taksiran atas transaksi rekening administratif dibentuk berdasarkan hail evaluasi terhadap kolektibilitas dari masing-masing aset produktif dan transaksi rekening administratif yang mempunyai risiko kredit sesuai dengan PBI tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Evaluasi manajemen atas kolektibilitas masing-masing aset produktif dan transasksi rekening administratif dilakukan berdasarkan sejumlah faktor, termasuk keadaan ekonomi/prospek usaha saat ini maupun yang diantisipasi untuk masa yang akan datang, kondisi keuangan, kemampuan membayar serta faktor-faktor lain yang relevan.

Sesuai dengan ketentuan BI, cadangan kerugian penurunan aset produktif dan transaksi rekening administratif adalah sebagai berikut :

1. Cadangan umum sekurang-kurangnya 1% dari aset produktif transaksi rekening administratif yang digolongkan lancar.
2. Cadangan Khusus untuk aset produktif dan transaksi rekening administratif.

v. Liabilitas segera

Liabilitas segera merupakan Liabilitas Bank yang harus segera dibayarkan kepada pihak lain berdasarkan kontrak atau perintah dari pihak yang mempunyai kewenangan untuk itu. Liabilitas segera dinyatakan sebesar nilai Liabilitas Bank.

w. Simpanan nasabah

Sejak 1 Januari 2010, giro, tabungan dan deposito berjangka diklasifikasikan sebagai Liabilitas lain, yang diakui pada nilai wajar pada pengakuan awal dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal simpanan nasabah dan biaya transasksi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

Sebelum 1 Januari 2010, giro dan tabungan dinyatakan sebesar nilai Liabilitas pemegang giro dan tabungan dan deposito berjangka dinyatakan sebesar nilai nominal sesuai dengan perjanjian pemegang deposito berjangka dengan Bank.

Giro merupakan dana nasabah yang bisa digunakan sebagai alat pembayaran dan dapat ditarik setiap saat melalui bilyet giro dan cek.

Giro dinyatakan sebesar nilai terhutang kepada pemegang giro. Tabungan merupakan dana nasabah yang dapat ditarik sesuai dengan persyaratan tertentu. Tabungan dinyatakan sebesar nilai terhutang kepada pemegang tabungan.

Deposito berjangka dan deposito on call merupakan dana deposan dinyatakan sebesar nilai nominal. Pencairan Deposito sebelum tanggal jatuh tempo dikenakan kepada deposan biaya administrasi, bunga dihitung sampai dengan saat pencairan.

2. Summary of accounting policy (continued)

u. Identification and Impairment of Assets (continued)

Commitment and contingency having credit risk consist of credit card facility to customer not yet used and the published guarantee.

Reserve for the loss of decrease value of productive assets and estimation on administrative account transaction shall be established based on the evaluation results to the collectability of each productive asset and administrative account transaction having credit risk according to the PBI on Public Bank Asset Quality Appreciation.

Management evaluation on the collectability of each productive asset and administrative account transaction shall be performed based on a number of factors, including the current economic condition/business prospect as well as those anticipated in the time to come, financial condition, capability to pay and other relevant factors.

In accordance with the provisions of BI, the reserve for the loss of decreased productive assets and administrative account transaction is as follows:

1. *Common reserve is at least 1% of the productive assets of administrative account transaction categorized as smooth.*
2. *Special Reserve for productive assets and administrative account transaction.*

v. Liabilities Immediately payable

Liabilities immediately payable represent obligations to Third parties based on contract or order by those having authority that have to be settled immediately. These are stated at the amounts payable by the Bank.

w. Deposit from costumers

Starting January 1, 2010, demand deposits, saving deposit and time deposits are classified as other liabilities, which are initially recognized at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium related to the initial recognition of deposits from costumers and transaction cost that are an integral part of the effective interest rate.

Prior to January 1, 2010, demand deposits and savings deposits are stated at the amounts due to the account holders and time deposits are stated at the nominal amounts set forth in the agreement between the Bnak and time deposits holders.

Current accounts are costumers' fund that can be used as a payment tools and can be withdrawn at anytime by bilyet giro and cheque.

Current account is stated on the debted value of the current account holder. Savings is costumers' fund, wich can be withdrawn referring to selected clauses. Savings accounts is stated on the debted value of the saving holder.

Time deposits and on call deposits are depositor funds that are stated on nominal value. Deposits witdrawn before the due date are charged to Depositor. Interest deposit was calculated until the withdrawal date.

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi (lanjutan)

w. Simpanan nasabah lanjutan)

Sertifikat deposito dinyatakan sebesar nilai nominal dikurangi bunga yang belum diamortisasi.

Simpanan termasuk simpanan Syariah dan investasi tidak terikat yang terdiri dari:

1. Giro wadiah merupakan giro wadiah yadadhamanah yakni titipan dana dalam bentuk giro dan tabungan pihak lain dimana pemilik dana mendapatkan pendapatan bonus.
2. Dana Syirkah Temporer dalam bentuk tabungan mudharabah yang merupakan simpanan dana pihak lain yang memberikan pemilik dana imbalan bagi hasil dari pendapatan unit Syariah atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya.
3. Dana Syirkah Temporer dalam bentuk deposito berjangka mudharabah merupakan simpanan dana pihak lain yang memberikan pemilik dana imbalan bagi hasil dari pendapatan unit Syariah atas penggunaan dana tersebut sesuai dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

x. Simpanan dari bank Lain

Simpanan dari bank lain terdiri dari Liabilitas terhadap bank lain dalam bentuk giro, tabungan, interbank call money dan deposito berjangka. Semuanya dinyatakan sesuai jumlah Liabilitas terhadap bank lain.

Sejak 1 Januari 2010, simpanan dari bank lain diklasifikasikan sebagai Liabilitas lain, yang diakui pada nilai wajar pada pengakuan awal dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal simpanan nasabah dan biaya transaksi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

Sebelum 1 Januari 2010, simpanan dari bank lain dinyatakan sesuai jumlah Liabilitas terhadap bank lain.

y. Obligasi yang diterbitkan

Obligasi yang diterbitkan merupakan obligasi yang diterbitkan oleh Bank yang diklasifikasikan sebagai kewajiban keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan penerbitan obligasi dikurang dari jumlah obligasi.

Penerbitan obligasi yang diterbitkan oleh Bank, telah mendapat izin produk dari Bank Indonesia melalui surat Bank Indonesia Nomor 12/43/DPB1/APBU/Pbr tanggal 2 September 2010 perihal rencana penerbitan produk baru.

Obligasi yang diterbitkan dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal dan biaya-biaya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif.

2. Summary of accounting policy (continued)

w. Deposit from costumers (continued)

Certificates of deposit are stated at their nominal value less unamortized interest.

Deposits include Sharia deposits and unrestricted investments consist of the following:

1. *Wadiah which is a wadiah yadadhamanah savings and demand deposits on which the customer may receive bonus income.*
2. *Temporary Syirkah Fund in the form of mudharabah savings which entitle the customer to receive a share of the Sharia unit's income in return for the usage of the funds in accordance with the defined terms (nisbah).*
3. *Temporary Syirkah Fund in the form of mudharabah time deposits which entitle the customer to receive a share of the Sharia unit's income for the usage of the funds in accordance with the pre-defined terms (nisbah).*

x. Deposit from other banks

Deposits from other banks represent liabilities to other banks, in the form of demand deposits, savings, interbank call money and time deposits. These are stated at the amount due to the other banks.

Starting January 1, 2010, deposits from other banks are classified as other liabilities, which are initially recognized at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium related to the initial recognition of deposits from costumers and transaction cost that are an integral part of the effective interest rate.

Prior to January 1, 2010, deposits from other banks are stated at the amounts due to the other banks.

y. Bond Issued

Bond issued are bonds issued by the Bank which are classified as financial liabilities and measured at amortized cost. Incremental costs that can be attributed directly to the bonds issuance are deducted from the total amount of bonds issued.

Bond of issuer by Bank has ben permits from Bank of Indonesia by letter of Bank Indonesia number 12/43/DPB1/APBU/Pbr dated on September 2, 2010 about planning of issued brand new product from Bank.

Bond issued are measured at amortised cost using the effective interest rate method. Amortised cost is calculated by taking into account any discount or premium on initial recognition and costs that are an integral part of the effective interest rate.

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi (lanjutan)

z. Pendapatan dan beban bunga

Sejak 1 Januari 2010, secara prospektif, untuk seluruh instrumen keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan dengan pendapatan bunga yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual, pendapatan maupun beban bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, yaitu suku bunga yang akan mendiskonto secara tepat estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang sepanjang perkiraan umur instrumen keuangan tersebut atau, jika lebih tepat untuk masa yang lebih singkat untuk nilai tercatat bersih dari aset keuangan atau Liabilitas keuangan. Perhitungan dilakukan dengan memperhitungkan syarat dan ketentuan dari kontraktual instrumen keuangan dan biaya tambahan yang timbul untuk instrumen tersebut dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari suku bunga efektif.

Sebelum 1 Januari 2010, pendapatan dan beban bunga diakui secara akrual, kecuali pendapatan bunga atas kredit yang diberikan dan aset produktif lainnya yang diklasifikasi sebagai *non-performing.* Pendapatan bunga tersebut diakui pada saat pendapatan tersebut diterima. Pendapatan bunga yang diakui tetapi belum tertagih harus dibatalkan pada saat kredit diklasifikasikan *non-performing.* Pendapatan bunga atas aset non-performing yang belum diterima dilaporkan sebagai tagihan kontijensi dalam rekening administratif dan diakui sebagai pendapatan pada saat diterima tunai.

Konvensional

Pendapatan dan beban bunga diakui dengan metode akrual. Pendapatan bunga atas aset produktif yang digolongkan sebagai bermasalah (kurang lancar, diragukan, dan macet) dicatat sebagai tagihan kontinjensi dan diakui sebagai pendapatan pada saat diterima secara tunai (cash basis).

Pendapatan bunga yang ditangguhkan dari kredit yang direstrukturisasi diakui sebagai pendapatan secara proporsional pada saat diterima pembayaran angsuran pokok.

Pada saat kredit diklasifikasikan sebagai bermasalah, bunga yang telah diakui tetapi belum tertagih akan dibatalkan pengakuannya. Selanjutnya bunga yang dibatalkan tersebut diakui sebagai tagihan kontinjensi.

Penerimaan tunai atas kredit yang diklasifikasikan sebagai diragukan atau macet dipergunakan terlebih dahulu untuk mengurangi pokok kredit. Kelebihan penerimaan dari pokok kredit diakui sebagai pendapatan bunga dalam laba rugi.

Syariah

Pendapatan operasi utama terdiri dari pendapatan dari murabahah dan istishna pendapatan bagi hasil dari pembiayaan mudharabah dan musyarakah, pendapatan dari transaksi ijarah muntahiyah bittamlik dan pendapatan lainnya.

Pendapatan dari transaksi istishna diakui apabila telah terjadi penyerahan barang. Bagi hasil dari pembiayaan mudharabah dan musyarakah diakui pada saat angsuran diterima secara tunai (cash basis). Pendapatan operasi utama lainnya terdiri dari pendapatan dari Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, pendapatan dari penempatan pada bank Syariah lain dan pendapatan bagi hasil surat berharga Syariah. Pendapatan operasi utama lainnya diakui pada saat diterima.

2. Summary of accounting policy (continued)

z. Income and interest expenses

Starting January 1, 2010, prospectively, for all financial instruments measured at amortised cost, interest bearing financial assets classified as available-for-sale, interest income or expense is recorded using the effective interest rate method, which is the rate that exactly discounts estimated future cash payment or receipts through the expected life of the financial statement or a shorter period, where appropriate, to the net carrying amount of the financial asset or financial liability. The calculation takes into account all contractual term of the financial instrument and include any fees or incremental cost that are directly attributable to the instrument and are an integral part of the effective interest rate.

Prior to January 1, 2010, interest income and expenses are recognized on an accrual basis, except for interest income from loans and other earning assets classified as non-performing. These interest income are recognized only when such interests are actually received. Interest incomes recognized or recorded but not yet received are cancelled when the loans are classified as non-performing. Such interest income from non-performing assets are recorded as contingent receivables in the administrative account and are recognized as income when collection of the cash is received.

Conventional

Income and interest expenses are acknowledged based on an accrual method. Interest income on earning assets which is clasified as non performing loan (substandard, questioned, and stagnant) are recorded as contingency collection and recognized as income when it is received in cash (cash basis).

The deffered interest income of restructured loan is recognized as interest income proportionnally at the time of the payment of basic installment is accepted.

When a loan is classified as non-performing, any interest income previously recognized and accrued but not yet collected is recoveryd against interest income. The recoveryd interest income is recognized as a contingent receivable.

Cash receipts from loans classified as doubtful or loss are applied to reduce the loan principal first. The excess of cash receipts over the loan principal on these loans is recognized as interest income in the statement of income.

Sharia

Main operating income consists of income from murabahah and istishna transactions, income from profit sharing of mudharabah and musyarakah financing, income from ijarah muntahiyah bittamlik and others.

Income from istishna is recognized upon delivery of goods. Profit sharing from mudharabah and musyarakah financing is recognized upon collection (cash basis). Other main operating income consists of income derived from Bank Indonesia Wadiah Certificates, placements with other Sharia banks, and revenue sharing from Sharia securities. Other main operating income is recognized upon collection.

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi (lanjutan)

aa. Pendapatan provisi dan komisi

Sejak tanggal 1 Januari 2010, pendapatan provisi dan komisi yang signifikan yang berkaitan langsung dengan kegiatan pemberian kredit dan merupakan bagian integral dari suku bunga efektif atas aset keuangan atau Liabilitas keuangan diakui sebagai bagian atau pengurang dari biaya perolehan kredit dan akan diakui sebagai pendapatan bunga dengan cara diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Pendapatan provisi dan komisi lainnya yang tidak berkaitan dengan pemberian kredit, termasuk provisi yang terkait kegiatan ekspor, impor, provisi atas manajemen kas dan provisi atas jasa diakui pada saat jasa diberikan. Atas komitmen kredit yang tidak diharapkan adanya penarikan kredit, provisi dari komitmen kredit tersebut diakui berdasarkan metode garis lurus selama jangka waktu komitmen.

Sebelum tanggal 1 Januari 2010, provisi dan komisi yang jumlahnya signifikan yang berkaitan langsung dengan kegiatan perkreditan dan mempunyai jangka waktu tertentu ditangguhkan dan diamortisasi berdasarkan metode garis lurus sesuai jangka waktunya. Untuk kredit yang dilunasi sebelum jatuh temponya, saldo provisi dan komisi ditangguhkan, diakui pada saat kredit dilunasi. Provisi dan komisi lainnya yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan perkreditan atau jangka waktu tertentu diakui pada saat terjadinya transaksi.

ab. Program imbalan kerja

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek seperti upah, iuran jaminan sosial, cuti jangka pendek, bonus dan imbalan non-moneter lainnya diakui selama periode jasa diberikan. Imbalan kerja jangka pendek diukur sebesar jumlah yang tidak didiskontokan.

Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terhutang kepada karyawan berdasarkan metode akrual.

Program pensiun manfaat pasti

Sesuai dengan keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri selaku pendiri Dana Pensiun Pegawai Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri No.64/KEPDIR/2012 tanggal 12 Desember 2012. Bank menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti untuk seluruh karyawan tetapnya dengan jumlah kontribusi sebesar 5% dari penghasilan dasar pensiun pekerja dan atas sisa jumlah yang perlu didanakan kepada Dana Pensiun merupakan kontribusi Bank.

Dana Pensiun Pegawai Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri ini mendapat pengesahan dari Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-527/NB.1/2013 tanggal 27 September 2013.

Program pensiun iuran pasti

Sesuai dengan dokumen perjanjian kerjasama No. 022/DLK/1/2013 tanggal 24 Juni 2013, Bank mengadakan perjanjian kerjasama dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Bank Negara Indonesia 46 (BNI 46) pada tanggal 24 Juni 2013 tentang pengelolaan program pensiun iuran pasti bagi pegawai bank.

2. Summary of accounting policy (continued)

aa. Fee and commission income

As of the 1st of January 2010, the income of commission and significant commission related directly with credit giving activity and as integral part of effective interest rate on financial assets or financial liabilities shall be acknowledged as part or reduction of the credit obtaining cost and shall be acknowledged as interest income by means of amortization using effective interest rate method.

Commission and other commissions not related to credit giving, including commissions related to the activities of export, import, commissions on cash management and commission on services shall be acknowledged when the services are given. On the credit commitment not expecting the existence of withdrawal, the commission shall be acknowledged based on straight line method as long as the period.

Before dated on January 1, 2010, provision that come from significant sum of fees and commission which directly related to loan activities and/or have a certain period is deferred and amortized based on a straight line method in accordance with its period. For the loans paid up before the due date, the deferred balance of income and commission is recognized at the time of loan settlement. The income of other fees and commissions whicht are not related directly with loan activities or certain period is admitted at the time of transaction.

ab. Employee benefit plan

Short-term employee benefits

Short-term employee benefits such as wages, social security contributions, short-term compensated leaves, bonuses and other non-monetary benefits are recognized during the period when services have been rendered. Short-term employee benefits are measured using undiscounted amounts.

Short-term employee benefits are recognized when payable to the employees based on accrual basis.

Defined benefit pension plan

In accordance with the decision of the Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri as the founder of Dana Pensiun Pegawai Bank Pembangunan Daerah Riau No.64/KEPDIR/2012 dated December 12, 2012 .The Bank established a defined benefit pension plan for all of its permanent employees with contributions of 5% of employees' basic pension salaries being paid by the employees and the remaining required contributions being paid by the Bank.

"Dana Pensiun Pegawai Bank Pembangunan Daerah Riau" was approved by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia in decree No. KEP-527/NB.1/2013 dated September 27, 2013.

Defined contribution pension plan

In accordance cooperation agreement document No. 022/DLK/1/2013 dated June 24, 2013 the Bank entered into a cooperation agreement with "Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Negara Indonesia 46 (BNI 46)" dated June 24, 2013 regarding defined contribution pension plan for the Bank's employees.

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi (lanjutan)

ab. Program imbalan kerja (lanjutan)

Program pensiun iuran pasti (lanjutan)

Iuran kepada dana pensiun sebesar persentase tertentu gaji pegawai yang menjadi peserta program pensiun iuran pasti Bank, dicadangkan dan diakui sebagai biaya ketika jasa telah diberikan oleh pegawai-pegawai tersebut.

Beban imbalan kerja yang harus disediakan berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003, dihitung dengan menggunakan metode penilaian aktuaria berdasarkan metode projected unit credit. Keuntungan dan kerugian aktuarial diakui sebagai pendapatan atau beban ketika akumulasi keuntungan atau kerugian aktuarial yang belum diakui untuk masing-masing karyawan pada akhir periode sebelumnya melebihi jumlah yang lebih besar antara 10% dari nilai kini liabilitas manfaat pasti (defined benefit obligation) atau 10% dari nilai wajar aset program (fair value of plan assets).

Program imbalan pasti merupakan program pensiun yang menetapkan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima oleh karyawan pada saat pensiun yang biasanya tergantung pada umur, masa kerja dan kompensasi.

Jumlah kontribusi karyawan dalam program pensiun ini ditetapkan sebesar 5% dari gaji dasar karyawan yang bersangkutan dan sisanya ditanggung oleh Bank.

Beban Liabilitas masa lampau diakui secara langsung di laporan laba rugi, kecuali pembayaran imbalan tersebut tergantung pada apakah karyawan tetap bekerja selama periode waktu tertentu (periode vesting). Dalam hal ini, biaya jasa lalu diamortisasi secara metode garis lurus sepanjang periode vesting.

Nilai kini Liabilitas imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas keluar masa depan dengan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah (dengan pertimbangan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi korporat berkualitas tinggi) dalam mata uang yang sama dengan mata uang imbalan yang akan dibayarkan dan waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo imbalan yang bersangkutan.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian pengalaman dan perubahan asumsi-asumsi aktuarial untuk setiap program pada setiap akhir periode pelaporan sebelumnya yang jumlah keuntungan atau kerugian aktuarial melebihi 10% dari imbalan pasti atau 10% dari nilai wajar aset program pada tanggal tersebut maka kelebihannya dibebankan atau dikreditkan pada pendapatan atau beban selama sisa masa kerja rata-rata para karyawan yang bersangkutan.

Pemupukan dana pensiun berasal dari Iuran Normal Pemberi Kerja/ bank dan Iuran Normal Peserta/ pegawai aktif masing-masing sebesar 12% dan 5% dari Penghasilan Dasar Pensiun, (total 17%), yang disajikan berdasarkan hasil perhitungan laporan internal Dana Pensiun PT Bank Riau Kepri per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012.

2. Summary of accounting policy (continued)

ab. Short term employee benefits (continued)

Defined contribution pension plan (continued)

Contribution payable to a pension fund equivalent to a certain percentage of salaries for qualified employees under the Bank's defined contribution plan is accrued and recognized as expense when services have been rendered by qualified employees.

The cost of providing employee benefits under Law No. 13/2003 ("the Law") dated March 25, 2003 is determined using the projected unit credit method. Actuarial gains and losses are recognized as income or expense when the net cumulative unrecognized actuarial gains and losses for each individual plan at the end of the previous reporting year exceeded 10% of the defined benefit obligation or 10% of fair value of plan assets at that date.

A defined benefit plan is a pension plan that defines an amount of pension benefit that an employee will receive on retirement which usually depends on one or more factors, such as age, years of service and total compensation.

The total employee contribution in this pension program is 5% of the basic salary of the corresponding employee and the remaining required to fund the plan is borne by the Bank.

Past service costs are recognized immediately in the statement of income, unless the payments of the benefits are conditional on whether the employees remain working for a specified period of time (vesting period). In this case, the past service costs are amortized on a straight-line method over the vesting period.

The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of government bonds (considering currently there is no deep market for highquality corporate bonds) that are denominated in the currency in which the benefit will be paid, and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension liability.

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions for each plan at the end of the previous reporting period that exceed whichever is higher of 10% of the present value of defined benefit obligation or 10% of the fair value of plan assets at that date are charged or credited to the statement of income over the average remaining service life of the covered employees.

Increasing pension fund comes from company contribution and employee's contribution of 12% and 5% respectively from the employee's monthly salary (total 17%), in coured based yield calculate internal report from Pension fund of PT Bank Riau Kepri as of December 31, 2013 and December 31, 2012.

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi (lanjutan)

ab. Program imbalan kerja (lanjutan)

Tantiem

Bank membuat penyisihan atas tantiem berdasarkan estimasi manajemen dan dibebankan pada laba rugi tahun berjalan. Tantiem akan dibayarkan kepada Direksi dan Komisaris setelah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Selisih antara jumlah yang diestimasi oleh manajemen dengan jumlah yang disyahkan oleh pemegang saham dibebankan atau dikreditkan pada periode dimana tantiem tersebut disahkan oleh RUPS.

Bonus/ Jasa produksi

Bank membuat penyisihan atas jasa produksi berdasarkan estimasi manajemen dan dibebankan pada laba rugi tahun berjalan. Jasa produksi akan dibayarkan kepada pegawai setelah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Selisih antara jumlah yang diestimasi oleh manajemen dengan jumlah yang disyahkan oleh pemegang saham dibebankan atau dikreditkan pada periode dimana jasa produksi tersebut disahkan oleh RUPS.

ac. Dividen

Pembagian dividen kepada para pemegang saham diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan pada tanggal dividen tersebut disetujui oleh para pemegang saham.

ad. Pajak Penghasilan

Beban pajak kini ditetapkan berdasarkan taksiran laba kena pajak tahun berjalan dan disajikan sebesar nilai bersihnya setelah dikompensasikan dengan kewajiban pajak kini. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara aset dan liabilitas untuk tujuan komersial dan untuk tujuan perpajakan setiap tanggal pelaporan. Manfaat pajak di masa mendatang, seperti saldo rugi fiskal yang belum digunakan, diakui sejauh besar kemungkinan manfaat pajak tersebut dapat direalisasi.

Pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Semua perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas untuk pelaporan keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya diakui sebagai pendapatan pajak tangguhan dengan metode liabilitas (*liability method*). Tarif pajak yang berlaku saat ini dipakai untuk menentukan pajak tangguhan.

Aset pajak tangguhan diakui apabila besar kemungkinan bahwa jumlah laba fiskal pada masa mendatang akan memadai untuk dapat dikompensasi dengan aset pajak tangguhan yang diakui tersebut.

Perubahan terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat Surat Ketetapan Pajak ("SKP") diterima atau, jika Bank mengajukan

2. Summary of accounting policy (continued)

ab. Short term employee benefits (continued)

Management Tantiem

The Bank sets aside for dividends based on the estimation of management and to be put into account of profits losses of the current year. The dividends shall be paid to the Board of Directors and Commissioners after obtaining the approval in the General Meeting of Shareholders (GMOS). The difference between the amount estimated by the management and the amount legalized by shareholders shall be borne or credited in the period wherein the dividends legalized by GMOS.

Bonus/ Production service

The Bank sets aside for production service based on the estimation of management and to be put into account of profits losses of the current year. The production service shall be paid to the Board of Directors and Commissioners after obtaining the approval in the General Meeting of Shareholders (GMOS). The difference between the amount estimated by the management and the amount legalized by shareholders shall be borne or credited in the period wherein the production service legalized by GMOS.

ac. Dividends

Dividend distribution to the shareholders is recognized as a liability in the financial statements at the date when the dividend is approved by the shareholders.

ad. Income Tax

Current tax expense is provided based on the estimated taxable income for the year and are presented at net value after offset against current tax liabilities. Deferred tax assets and liabilities are recognized for temporary differences between the financial and the tax bases of assets and liabilities at each reporting date. Future tax benefits, such as the carry-forward of unused tax losses, are also recognized to the extent that realization of such benefits is probable.

Deferred tax is calculated at the tax rates that have been enacted or substantively enacted at the statements of financial position date. Changes in the carrying amounts of deferred tax assets and liabilities due to a change in tax rates are recognized in the current year's statement of comprehensive income, except to the extent that it relates to items previously charged or credited to equity.

Deferred income tax is provided, using the balance liability method, for temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying values for financial reporting purposes. The effective tax rate is used to determine deferred tax.

A deferred tax asset is recognized to the extent that it is probable that future taxable profits will be available against which the deferred tax asset can be utilized.

Amendments to tax obligations are recorded when an Tax Assessment Letter ("SKP") is received or, for amounts appealed

keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut

against by the Bank, when the result of the appeal is

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi (lanjutan)

ad. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Efektif tanggal 1 Januari 2012, Bank menerapkan PSAK No. 46 (Revisi 2010), yang mengharuskan Bank untuk memperhitungkan konsekuensi pajak kini dan pajak masa depan atas pemulihan di masa depan (penyelesaian) dari jumlah tercatat aset (kewajiban) yang diakui dalam laporan posisi keuangan, dan transaksi- transaksi serta peristiwa lain yang terjadi dalam periode berjalan yang diakui dalam laporan keuangan. PSAK ini juga mensyaratkan entitas untuk mencatat kekurangan/kelebihan pembayaran pajak penghasilan beserta bunga/denda, jika ada, sebagai bagian dari "Beban Pajak Kini" dalam laporan laba rugi komprehensif.

ae. Laba bersih per saham

Berdasarkan PSAK No. 56 tentang "Laba Per Saham" (LPS), adalah data yang banyak digunakan sebagai alat analisis keuangan. Laba bersih per lembar saham seri A dan Seri B dihitung dengan membagi laba bersih dengan jumlah rata-rata tertimbang saham seri A dan B yang beredar pada periode bersangkutan.

af. Pembagian laba bersih

Pembagian laba bersih untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 berdasarkan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Riau Kepri Nomor 01 tanggal 01 Juni 2014 oleh Fery Bakti, SH laba bersih setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh RUPS pembagiannya ditetapkan untuk dividen pemegang saham sebesar 60%, Cadangan Umum 22% dan Cadangan Tujuan 18%.

Pembagian laba bersih untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012 berdasarkan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Riau Kepri Nomor 42 tanggal 15 Juni 2013 oleh Notaris Refizal, SH, M.Hum laba bersih setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh RUPS pembagiannya ditetapkan untuk dividen pemegang saham sebesar 60%, Cadangan Umum 22% dan Cadangan Tujuan 18%.

ag. Informasi Segmen

Bank menentukan dan menyajikan segmen operasi berdasarkan informasi yang secara internal diberikan oleh bagian akuntansi kepada pengambil keputusan operasional.

Bank mengidentifikasikan segmen operasi sebagai suatu komponen dari entitas:

a. Yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);

b. Hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan

2. Summary of accounting policy (continued)

ad. Income Tax (Continued)

Effective on January 1, 2012, the Bank applied SFAS No. 46 (Revised 2010), which requires the Bank to account for the current and future tax consequences of the future recovery (settlement) of the carrying amount of assets (liabilities) that are recognized in the statements of financial position; and transactions and other events of the current period that are recognized in the financial statements. The revised PSAK also prescribes an entity to present the underpayment/overpayment of income tax, including its interest/penalty, if any, as part of "Tax Expense Current" in the statement of comprehensive income.

ae. Earning per share

According to SFAS No. 56 concerning "Earning per Share" nett operational income and nett income per piece of A series and B series of shares was calculated by deviding nett income with average amount of A series and B series of shares which is outstanding at the related period.

af. Earning of prior year income

The distribution of net profit for the year ended on the 31st of December 20112based on the deed of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Bank Riau Kepri Number 42 dated June 15, 2013 by Notary Refizal, SH, M.Hum the net profit after it has been deducted by taxes already validated by the GMOS, the distribution for stoke holders deviden paid 60%, general reserve 22% and purpose reserve 18%.

The distribution of net profit for the year ended on the 31st of December 20112based on the deed of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Bank Riau Kepri Number 42 dated June 15, 2013 by Notary Refizal, SH, M.Hum the net profit after it has been deducted by taxes already validated by the GMOS, the distribution ifor stoke holders deviden paid 60%, general reserve 22% and purpose reserve 18%.

ag. Business Segmen Information

The Bank determines and presents operating segments based on the information that is internally provided by accounting department to the chief operating decision maker.

The Bank defines an operating segment as acomponent of an entity:

a. *That engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses (including revenues and expenses relating to transactions with other components of the same entity);*

b. *Whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and assess its performance; and*

c. Tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

c. *For which discrete financial information is available.*

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi (lanjutan)

ag. Informasi Segmen (lanjutan)

Bank mengungkapkan segmen operasionalnya berdasarkan segmen usaha yang meliputi perbankan konvensional dan syariah.

Segmen geografis meliputi penyediaan jasa di dalam lingkungan ekonomi tertentu yang memiliki risiko serta tingkat pengembalian yang berbeda dengan segmen operasi lainnya yang berada dalam lingkungan ekonomi lain. Segmen geografis Bank adalah Riau dan selain Riau.

ah. Biaya Emisi Obligasi

Sesuai dengan Peraturan No. VIII.G.7 lampiran Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 mengenai "Penyajian Dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten Atau Perusahaan Publik", Biaya emisi obligasi, kecuali obligasi konversi, merupakan biaya transaksi yang dapat diatribusikan langsung dengan penerbitan dan wajib dikurangkan dari hasil emisi dalam rangka menentukan hasil emisi neto obligasi tersebut.

ai. Penggunaan Estimasi dan Pertimbangan Akuntansi yang Penting

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas serta pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Hasil yang sebenarnya mungkin berbeda dari estimasi tersebut.

Pertimbangan profesional dan estimasi yang signifikan adalah sebagai berikut:

Usaha yang berkelanjutan

Manajemen Bank telah melakukan penilaian atas kemampuan Bank untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Bank memiliki sumber daya untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. Selain itu, manajemen Bank tidak mengetahui adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap kemampuan Bank untuk melanjutkan usahanya. Oleh karena itu, laporan keuangan telah disusun atas dasar usaha yang berkelanjutan.

Nilai wajar atas instrumen keuangan

Bila nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan tidak tersedia di pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian termasuk penggunaan model matematika. Masukan (input) untuk model ini berasal dari data pasar yang bisa diamati sepanjang data tersebut tersedia. Bila data pasar yang bisa diamati tersebut tidak tersedia, pertimbangan manajemen diperlukan untuk menentukan nilai wajar. Pertimbangan manajemen tersebut mencakup pertimbangan likuiditas dan masukan model seperti volatilitas dan tingkat diskonto, tingkat pelunasan dipercepat dan asumsi tingkat gagal

2. *Summary of accounting policy (continued)*

ag. Business Segmen Information (continued)

Bank discloses its operating segments based on business segments that consist of banking conventional and sharia.

A geographical segment is engaged in providing services within a particular economic environment that is subject to risks and returns that are different from those of segments operating in other economic environments. The Bank's geographical segments are Riau and other than Riau.

ah. Premium on Bond expenses

In accordance with the Regulation No. VIII.G.7 attached to the Decision Letter of the Chairman of BAPEPAM No. KEP-347/BL/2012 dated June 25, 2012 regarding "The Presentation and Disclosure of Financial Statement for Emitten or Public Company", the premium on Bond expenses, unleast conversation bond, are transaction cost which can direct attributed with issuance and must less from issuance premium bond to dicide value from that issuance premium nett.

ai. Use of Significant Accounting Estimates and Judgesment

The preparation of financial statements in conformity with Financial Accounting Standards in Indonesia requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements and the reported amount of revenues and expenses during the reporting period. Actual results could differ from those estimates.

The most significant uses of judgment and estimates are as follows:

Going concern

The Bank"s management has made an assessment of the Bank"s ability to continue as a going concern and is satisfied that the Bank has the resources to continue its business for the foreseeable future. Furthermore, the management is not aware of any material uncertainties that may cast significant doubt to the Bank"s ability to contibue as a going concern. Therefore, the financial statements continues to be prepared on the going concern basis.

Fair value of financial instruments

Where the fair values of financial assets and financial liabilities recorded on the statement of financial position cannot be derived from active markets, they are determined using a variety of valuation techniques that include the use of mathematical models. The inputs to these models are derived from observable market data where possible, but where observable market data are not available, judgment is required to establish fair values. The judgment include considerations of liquidity and model inputs such as volatility and discount rates, prepayment rates and default rate assumptions.

diskonto, tingkat pelunasan dipercepat dan asumsi tingkat gagal bayar.

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi (lanjutan)

ai. Penggunaan Estimasi dan Pertimbangan Akuntansi yang Penting (lanjutan)

Penurunan Nilai Kredit Yang Diberikan dan Piutang

Bank mereview kredit yang diberikan dan piutang secara individu pada setiap tanggal laporan posisi keuangan untuk menilai apakah penurunan nilai harus dicatat dalam laporan laba rugi komprehensif. Secara khusus, justifikasi oleh manajemen diperlukan dalam estimasi jumlah dan waktu arus kas di masa mendatang ketika menentukan penurunan nilai. Dalam estimasi arus kas ini, Bank membuat justifikasi tentang situasi keuangan peminjam dan nilai realisasi bersih agunan.

Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas jumlah pajak penghasilan terpulihkan (recoverable) pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan. Justifikasi manajemen diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, sesuai dengan waktu yang tepat dan tingkat laba fiskal di masa mendatang sejalan dengan strategi rencana perpajakan ke depan.

Pensiun

Program-program pensiun ditentukan berdasarkan perhitungan dari aktuaria. Perhitungan aktuaria menggunakan asumsi-asumsi seperti tingkat diskonto, tingkat pengembalian investasi, tingkat kenaikan gaji, tingkat kematian, tingkat pengunduran diri dan lain-lain.

Klasifikasi Pada Investasi Yang Dimiliki Hingga Jatuh Tempo

Bank mengklasifikasikan aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo. Klasifikasi memerlukan pertimbangan signifikan untuk memiliki investasi tersebut sampai dengan jatuh tempo. Dalam membuat pertimbangan ini, Bank mengevaluasi intense dan kemampuan untuk memiliki investasi tersebut hingga jatuh tempo.

Estimasi-estimasi ini didasarkan pada asumsi-asumsi tentang sejumlah faktor dan hasil aktual mungkin berbeda, yang tercermin dalam perubahan penyisihan penurunan nilai tersebut di masa mendatang.

Penurunan nilai efek dimiliki hingga jatuh tempo

Bank mereviu efek yang diklasifikasikan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo pada setiap tanggal posisi keuangan untuk menilai apakah telah terjadi penurunan nilai.

Dalam menentukan pertimbangan, Bank mengevaluasi diantaranya faktor, pergerakan harga pasar historis dan jangka waktu serta lama perpanjangan di mana nilai wajar dari investasi kurang dari biayanya.

2. Summary of accounting policy (continued)

ai. Use of Significant Accounting Estimates and Judgesment (continued)

Impairment losses on loans and receivables

The Bank reviews its loans and receivables individually at each statement of financial position date to assess whether an impairment loss should be recorded in the statement of comprehensive income. In particular, judgment by management is required in the estimation of the amount and timing of future cash flows when determining the impairment loss. In estimating these cash flows, the Bank makes judgments about the borrower"s financial situation and the net realizable value of collateral.

Deffered Taxes Assets

Deferred tax assets are recognized for the future recoverable taxable income arising from temporary difference. Management's judgement is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing on level of future taxable profits together with future tax planning strategics.

Pension

Pension programs are determined based on actuarial valuation. The actuarial valuation involves assumptions such as discount rate, expected rate of returns on investments, future salary increase, mortality rate, resignation rates and others.

Classification to held-to-maturity Invesment

The Bank classifies non derivative financial assets with fixed and determinable payments and fixed maturity as held-to-maturity investments. This classification requires significant judgement to hold such investments to maturity. In making this judgement, the Bank evaluates its intention and ability to hold such investments to maturity.

These estimates are based on assumptions about a number of factors and actual results may differ, as reflected in changes in the provision for impairment in the future.

Impairment of held-to-maturity securities

Bank reviews securities classified held to maturity at each financial position date to assess whether there is an impairment in value.

In making this judgment, the Bank evaluates, among others factors, historical market price movements and duration and the extent to which the fair value of the investment is less than the cost.

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi (lanjutan)

ai. Penggunaan Estimasi dan Pertimbangan Akuntansi yang Penting (lanjutan)

Penurunan nilai atas aset tidak produktif

Bank melakukan penilaian atas penurunan nilai pada aset non-finansial kapan saja terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat pada suatu aset mungkin tidak dapat diperoleh kembali. Faktor-faktor yang dianggap penting oleh Bank yang dapat memicu adanya ulasan atas penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

a Kinerja dibawah rata-rata yang signifikan yang relatif terhadap hasil historis atau proyeksi hasil operasi yang diharapkan; di masa yang akan datang;

b Perubahan yang signifikan dari cara penggunaan aset yang diperoleh atau strategi untuk bisnis secara keseluruhan; dan

c Tren negatif industri dan ekonomi yang signifikan.

Penyusutan dan estimasi masa manfaat dari aset tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus untuk bangunan dan untuk selain bangunan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen Bank mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 4 sampai dengan 20 tahun.

Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

2. Summary of accounting policy (continued)

ai. Use of Significant Accounting Estimates and Judgesment (continued)

Impairment of non-productive assets

Bank assesses impairment on non productive assets whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount of an asset may not be recoverable. The factors that the Bank considers important which could trigger an impairment review include the followings:

a. *Significant underperfomance relative to expected historical or projected future operating results;*

b. *Significant changes in the manner of use of the acquired assets or the strategy for overall business; and*

c. *Significant negative industry or economic trends.*

Depreciation and estimated useful life of fixed assets

The costs of fixed asset are depreciated on a straight-line basis for buildings and for other than buildings over their estimated useful lives. The Bank's management estimates the useful lives of these fixed assets to be within 4 to 20 years.

Changes in the expected level of the usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of the assets, and thefore future depreciation changes could be revised.

3. Kas

Akun ini terdiri dari :	31 Desember 2014	31 Desember 2013	*This account consist of :*
Rupiah			*Rupiah*
Kas	728,177,222,008	534,228,038,350	*Cash*
Kas Anjungan Tunai Mandiri	34,262,350,000	29,714,450,000	*Automatic Teller Machine Cash*
Mata uang asing			*Foreign currencies*
Euro	87,083,630	78,517,367	*Euro*
Dolar Amerika Serikat	9,700,486,229	6,103,108,960	*United Stated Dollar*
Dolar Singapura	3,737,324,675	2,945,828,658	*Singapore Dollar*
Jumlah	**775,964,466,541**	**573,069,943,336**	Total

3. Cash

4. Giro pada Bank Indonesia

Akun ini terdiri dari :	31 Desember 2014	31 Desember 2013	*This account consist of :*
Giro pada Bank Indonesia			*Current account with Bank Indonesia*
Rupiah	1,264,438,506,156	1,203,007,063,656	*Rupiah*
Mata uang asing			*Foreign currencies*
Dolar Amerika Serikat	24,831,925,000	11,013,850,000	*United Stated Dollar*
Jumlah	1,289,270,431,156	1,214,020,913,656	*Total*

4. Current accounts with Bank Indonesia

Giro Wajib Minimim (GWM) Bank pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut :

The minimum statutory reserves requirement (GWM) of the Bank as of December 31, 2014 and 2013 wa s as follows :

	31 Desember 2014	31 Desember 2013	
GWM Rupiah			*Staturory reserves in Rupiah*
Utama	8.00%	8.00%	*Primary*

Sekunder	4.00%	2.50%	*Secondary*
GWM mata uang asing			*Staturory reserves in foreign exchange*
Utama	8.00%	8.00%	*Primary*

4. Giro pada Bank Indonesia (lanjutan)

Giro Wajib Minimum Bank telah sesuai dengan PBI No.7/29/PBI/2005 Tanggal 6 September 2005 yang telah beberapa kali dirubah dengan PBI No.10/19/PBI/2008 Tanggal 14 Oktober 2008, PBI No.10/25/PBI/2008 tanggal 23 Oktober 2008 PBI Nomor 12/19/PBI/2010 tanggal 4 Oktober 2010 perubahan pertama dengan PBI No.13/10/PBI/2011 dan perubahan kedua berdasarkan PBI No. 15/7/PBI/2013 tanggal 26 September 2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada BI (GWM) dalam mata uang rupiah dan valuta asing yang terdiri dari GWM utama, GWM sekunder dan GWM untuk Valuta Asing. Realisasi GWM utama dan Valuta asing per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing adalah 8,171% dan 8,35% untuk Rupiah serta 19,30% dan 14,95% untuk valuta asing. Sedangkan untuk GWM Sekunder per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar 8,75% dan 6,57%.

4. Current accounts with Bank Indonesia (continued)

The Banks statutory reserves complied with PBI No.7/29/PBI/2005 dated September 6, 2005 wich has been amended by PBI No. 10/19/PBI/2008 dated October 14,2008, PBI No.10/25/PBI/2008 tanggal 23 Oktober 2008, PBI 12/19/PBI/2010 tanggal 4 Oktober 2010 and the first amendment by PBI No.13/10/PBI/2011 and The second change is based on PBI 15/7 / PBI / 2013 dated 26 September 2013 concerning the Statutory Reserves of Commercial Banks with BI which consist pf primary statutory reserves, secondary statutory reserves and statutory of foreign currencies. In fact,The percentage of Primary statutory reserves and foreign currencies as of December 31, 2014 and December 31, 2013 respectively are 8.171% and 8.35% for Rupiah and then 19.30% and 14.95% for foreign currency statutory reserves. Meanwhile for secondary statutory reserves respectively are 8.75% and 6.57%.

5. Giro Pada Bank Lain

Tidak terdapat giro pada bank lain kepada Pihak berelasi.

5. Current accounts with Other Bank

There are no related party in current accounts with other banks.

a. Berdasarkan mata uang

a. By currency

Akun ini terdiri dari :	31 Desember 2014	31 Desember 2013	*This account consist of :*
Rupiah	51,211,922,355	64,583,618,958	*Rupiah*
Mata uang asing			*Foreign currencies*
Dolar Amerika Serikat	11,091,952,992	27,107,873,119	*United Stated Dollar*
Euro	427,742,446	895,300,775	*Euro*
Dolar Singapura	6,910,910,801	5,884,300,178	*Singapore Dollar*
Jumlah	69,642,528,594	98,471,093,030	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	*Allowance for impairment losses*
Bersih	**69,642,528,594**	**98,471,093,030**	*Net*

b. Berdasarkan mata uang dan nama bank

b. By currency and counterparty bank

Rupiah	31 Desember 2014	31 Desember 2013	***Rupiah***
Bank Pembangunan Daerah			***Government Development Bank***
BPD DKI	6,400,898	6,400,898	*BPD DKI*
	6,400,898	6,400,898	
Bank Umum			***Commercial Banks***
Bank Central Asia Tbk	26,871,970,996	26,897,827,161	*Bank Central Asia Tbk*
Bank Rakyat Indonesia Tbk	477,526,733	980,848,422	*Bank Rakyat Indonesia Tbk*
Bank Mandiri (Persero) Tbk	5,286,948,900	8,112,501,116	*Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Bank Mega Tbk	671,348,102	886,705,229	*Bank Mega Tbk*
Bank Negara Indonesia Tbk	3,699,257,906	13,786,416,101	*Bank Negara Indonesia Tbk*
Bank CIMB Niaga Tbk	570,627,067	562,584,207	*Bank CIMB Niaga Tbk*
Bank Muamalat	13,627,841,751	13,350,335,824	*Bank Muamalat*
	51,205,521,455	64,577,218,060	
Jumlah rupiah	**51,211,922,355**	**64,583,618,958**	*Total rupiah*
Mata uang asing			***Foreign currencies***
UOB Singapura	6,910,910,801	5,884,300,178	*UOB Singapura*
Bank Mandiri (Persero) Tbk	4,155,099,630	22,430,168,228	*Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Standard Chartered Jerman	427,742,446	895,300,775	*Standard Chartered Jerman*
Standard Chartered	2,287,318,895	2,931,408,224	*Standard Chartered*
Bank Central Asia Tbk cab Jakarta	4,649,534,467	1,746,296,666	*Bank Central Asia Tbk Jakarta bch*
Jumlah mata uang asing	18,430,606,239	33,887,474,071	*Total foreign currencies*
Total	69,642,528,594	98,471,093,029	*Grand total*

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	-	-	*Allowance for impairment losses*
Bersih	**69,642,528,594**	**98,471,093,030**	*Net*

5. Giro Pada Bank Lain (lanjutan) / ***5. Current accounts with Other Bank (continued)***

c. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun / ***c. Average interest rate per annum***

	31 Desember 2014	31 Desember 2013	
Rupiah	0,00% - 4,32%	0,5% - 5,00%	*Rupiah*
Mata uang asing	0% - 0,1%	0% - 0,1%	*Foreign currencies*

Tidak terdapat saldo giro pada bank lain yang di blokir atau yang digunakan sebagai agunan.

There is no balance of clearing in other bank blocked or used as collateral.

d. Kolektibilitas / ***d. Collectibility***

Berdasarkan hasil penelaahan dan evaluasi manajemen bank, kolektibilitas atas giro pada bank lain seluruhnya lancar. Manajemen Bank berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya giro pada bank lain serta telah dihitung berdasarkan ketentuan Bank Indonesia.

Based on bank management review result and evaluation, the collectibility of current accounts with other banks classified as pass enturely. Management beliaves that the allowances for possible losses are adequated to cover possible losses arising from uncollectibility of current accounts with other banks and also have been calculated based on the regulation of Central Bank of Indonesia.

6. Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain / ***6. Placement with Bank Indonesia and other bank***

Akun ini terdiri dari :	31 Desember 2014	31 Desember 2013	*This account consist of :*
Penempatan pada Bank Indonesia	-	-	*Placement with Bank Indonesia*
Penempatan pada Bank lain	5,873,426,107,715	4,637,668,471,995	*Placement with others bank*
PPA -Umum Syariah Pada Bank Lain	(1,269,391,389)	(1,546,243,045)	*General Allow. sharia to other Bank*
Jumlah	**5,872,156,716,327**	**4,636,122,228,951**	*Total*

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dapat dibedakan berdasarkan jenis dan nama bank, mata uang dan jatuh tempo yang dapat dirinci sebagai berikut :

Placement with Bank Indonesia and other bank can difference based on by type an counterparty bank, currency and maturity is as follow :

a. Berdasarkan jenis dan nama bank / ***a. By type an counterparty bank***

♦ **Per 31 Desember 2014** / ***As of December 31, 2014***

Akun ini terdiri dari :	Jangka Waktu	Tingkat Bunga	Jumlah	*This account consist of :*
Pihak ketiga				***Third parties***
Call Money				*Call Money*
Bank Mega Jakarta	3-14 Hari	6.20%-6.25%	300,000,000,000	*Bank Mega Jakarta*
Bank Victoria Internasional	14 Hari	6.25%	25,000,000,000	*Bank Victoria International*
BPD DKI Jakarta	2-7 Hari	6.20%-6.80%	150,000,000,000	*BPD DKI Jakarta*
BPD Aceh	11 Hari	6.25%	40,000,000,000	*BPD Aceh*
BPD Bengkulu	4 Hari	5.99%	40,000,000,000	*BPD Bengkulu*
BPD Jabar Banten	7-21 Hari	6.25%-7.00%	345,000,000,000	*BPD Jabar Banten*
BPD Yogyakarta	9 Hari	6.20%	50,000,000,000	*BPD Yogyakarta*
BPD Jawa Tengah	3 Hari	6.17%	50,000,000,000	*BPD Jawa Tengah*
BPD Jambi	21 Hari	7.00%	50,000,000,000	*BPD Jambi*
BPD Lampung	10-11 Hari	6.20%	65,000,000,000	*BPD Lampung*
BPD Maluku	14 Hari	6.50%	25,000,000,000	*BPD Maluku*
BPD Sulawesi Utara	14 Hari	6.30%	25,000,000,000	*BPD Sulawesi Utara*
BPD Sulawesi Tengah	14 Hari	6.25%	30,000,000,000	*BPD Sulawesi Tengah*
BPD Sulawesi Selatan	11 Hari	6.35%	70,000,000,000	*BPD Sulawesi Selatan*
BPD Sumatera Utara	11 Hari	6.20%	100,000,000,000	*BPD Sumatera Utara*
BPD Sumatera Barat	2 Hari	5.95%	50,000,000,000	*BPD Sumatera Barat*
BPD Sumatera Selatan	14 Hari	6.50%	50,000,000,000	*BPD Sumatera Selatan*
BPD Kalimantan Selatan	14 Hari	6.25%	100,000,000,000	*BPD Kalimantan Selatan*
BPD Kalimantan Timur	11 Hari	6.20%	75,000,000,000	*BPD Kalimantan Timur*
BPD Nusa Tenggara Barat	10 Hari	6.25%	100,000,000,000	*BPD Nusa Tenggara Barat*
BPD Bali	8-9 Hari	6.15%-6.20%	200,000,000,000	*BPD Bali*
			1,940,000,000,000	

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2014 dan 2013
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years ended
December 31, 2014 and 2013
(Expressed in fully Rupiah, unless otherwise stated)

Deposito Berjangka (Valas)				*Time Deposit (Valas)*
Bank Rakyat Indonesia	8-9 Hari	6.15%-6.20%	49,540,000,000	*Bank Rakyat Indonesia*
(USD 4,000,000.00 rate Rp12.385,00)				*(USD 4,000,000.00 rate Rp12.385,00)*

6. Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain (lanjutan)

6. Placement with Bank Indonesia and other bank (continued)

a. Berdasarkan jenis dan nama bank (lanjutan)

a. By type an counterparty bank (continued)

♦ **Per 31 Desember 2014** / ***As of December 31, 2014***

Akun ini terdiri dari : / *This account consist of :*	Jangka Waktu	Tingkat Bunga	Jumlah	
Pihak ketiga / ***Third parties***				
Deposito Mudharabah (Rupiah)				*Mudharabah Time Deposit (Rupiah)*
Bank Sinarmas UUS Cikditiro	30 Hari	8.50%	27,000,000,000	Bank Sinarmas UUS Cikditiro
Bank BRI Syariah				Bank BRI Syariah
Bank Jabar Bandung Syariah	30 Hari	7.50%	20,000,000,000	Bank Jabar Bandung Syariah
BPD Aceh Unit Syariah	30 Hari	7,25%- 7,75%	65,000,000,000	BPD Aceh Unit Syariah
			112,000,000,000	
Deposito On Call				*Deposit on Call*
Bank Rakyat Indonesia	14 Hari	8.00%	500,000,000,000	*Bank mandiri Cabang Sudirman Atas*
Bank Mandiri	11-15 Hari	7.00%-7.50%	1,300,000,000,000	*Bank mandiri Cabang Nangka*
Bank Muamalat	15 Hari	7.00%	200,000,000,000	*Bank mandiri Cabang Ahmad Yani*
			2,000,000,000,000	
Deposito Berjangka (Rupiah)				*Time Deposit (Rupiah)*
Bank Rakyat Indonesia	30-31 Hari	1.00%-8.50%	500,000,000,000	Bank Rakyat Indonesia
Bank Mandiri	31-33 Hari	7.50%-8.00%	500,000,000,000	Bank Mandiri
BPD Jawa Barat dan Banten	31 Hari	7.00%	25,000,000,000	BPD Jawa Barat dan Banten
BPD Aceh	31-33 Hari	7.00%	125,000,000,000	BPD Aceh
BPD Sumatera Selatan	33 Hari	6.75%	50,000,000,000	BPD Sumatera Selatan
BPD Kalimantan Timur	90 Hari	7.15%	100,000,000,000	BPD Kalimantan Timur
BPD Sulawesi Tenggara	31 Hari	7.00%	30,000,000,000	BPD Sulawesi Tenggara
Bank Tabungan Negara	31-123 Hari	7.75%-8.00%	250,000,000,000	Bank Tabungan Negara
BPR Payung Negeri	90 Hari	9.25%	300,000,000	BPR Payung Negeri
BPR Universal Karya Mandiri Riau	90 Hari	9.25%	300,000,000	BPR Universal Karya Mandiri Riau
			1,580,600,000,000	
Fasilitas Bank Indonesia (Fasbi)				*Indonesian Banking Facilities (Fasbi)*
DF ON 1 hari	2 Hari	5.75%	189,939,324,938	*DF ON 1 hari*
Tabungan Konvensional dan Syariah				*Conventional and Sharia Savings*
BPR Karimun		3.00%	35,510,669	*BPR Karimun*
Bank Muamalat Indonesia				*Bank Muamalat Indonesia*
Bank Syariah Mandiri		3.05%	1,311,272,108	*Bank Syariah Mandiri*
Jumlah Tabungan			1,346,782,777	*Total savings*
Jumlah penempatan			**5,873,426,107,715**	*Amount to*
PPA -Umum Syariah Pada Bank Lain			(1,269,391,389)	*allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih			**5,872,156,716,327**	*Amount to - net*

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2014 dan 2013
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years ended
December 31, 2014 and 2013
(Expressed in fully Rupiah, unless otherwise stated)

6. Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain (lanjutan)

a. Berdasarkan jenis dan nama bank (lanjutan)

6. Placement with Bank Indonesia and other bank (continued)

a. By type an counterparty bank (continued)

♦ **Per 31 Desember 2013** / ***As of December 31, 2013***

Akun ini terdiri dari : / *This account consist of :*	Jangka Waktu	Tingkat Bunga	Jumlah	
Pihak ketiga / ***Third parties***				
Call Money / *Call Money*				
Bank Mega Jakarta / *Bank Mega Jakarta*	4-7 Hari	7,5%-7,55%	350,000,000,000	
Bank Bukopin Jakarta / *Bank Bukopin Jakarta*	6 Hari	7.00%	90,000,000,000	
BPD Aceh / *BPD Aceh*	2 Hari	6.10%	50,000,000,000	
BPD Bengkulu / *BPD Bengkulu*	3 Hari	7.00%	30,000,000,000	
BPD Jabar Banten / *BPD Jabar Banten*	7 Hari	7.60%	150,000,000,000	
BPD Jabar banten Syariah / *BPD Jabar banten Syariah*	13 Hari	7.85%	20,000,000,000	
BPD Jawa Tengah / *BPD Jawa Tengah*	7 Hari	7.50%	100,000,000,000	
BPD Jambi / *BPD Jambi*	4 Hari	7.50%	50,000,000,000	
BPD Lampung / *BPD Lampung*	4 Hari	7.30%	80,000,000,000	
BPD Maluku / *BPD Maluku*	7 Hari	7.50%	50,000,000,000	
BPD Sulawesi Utara / *BPD Sulawesi Utara*	7 Hari	8.00%	75,000,000,000	
BPD Sulawesi Tenggara / *BPD Sulawesi Tenggara*	7 Hari	7.40%	50,000,000,000	
BPD Sulawesi Tengah / *BPD Sulawesi Tengah*	10 Hari	7.30%	40,000,000,000	
BPD Sulawesi Selatan / *BPD Sulawesi Selatan*	4 Hari	7.50%	75,000,000,000	
BPD Kalimantan Selatan / *BPD Kalimantan Selatan*	7 Hari	7.50%	50,000,000,000	
BPD Kalimantan Timur / *BPD Kalimantan Timur*	15 Hari	6.75%	100,000,000,000	
			1,360,000,000,000	
Deposito Berjangka (Valas) / *Time Deposit (Valas)*				
Bank Muamalat Pekanbaru / *Pekanbaru Muamalat Bank*	31-33 hari	1,85%-2%	97,360,000,000	
(8,000,000.00 rate Rp12.170,00) / *(8,000,000.00 rate Rp12.170,00)*				
Deposito Mudharabah (Rupiah) / *Mudharabah Time Deposit (Rupiah)*				
BPD Sumatera Utara Unit Syariah	30 hari	7,9%-8,0%	80,000,000,000	BPD Sumatera Utara Unit Syariah
Bank BRI Syariah	30 hari	8,5%-9,0%	30,000,000,000	Bank BRI Syariah
Bank Jabar Banten Syariah	30 hari	7,8%-7,9%	20,000,000,000	Bank Jabar Banten Syariah
BPD Aceh Unit Syariah	30 hari	9.00%	10,000,000,000	BPD Aceh Unit Syariah
			140,000,000,000	
Deposito On Call / *Deposit on Call*				
Bank Mandiri	7 Hari	7.75%	2,450,000,000,000	Bank Mandiri cab Nangka Pekanbaru
			2,450,000,000,000	
Deposito Berjangka (Rupiah) / *Time Deposit (Rupiah)*				
Bank Mandiri Pekanbaru / *Bank Mandiri Pekanbaru*	31Hari	7.60%	100,000,000,000	
Bank BJB / *Bank BJB*	31-32 hari	7.50%	150,000,000,000	
BPD Aceh Syariah / *BPD Aceh Syariah*	30 hari	7.75%	100,000,000,000	
Bank Mega Syariah Jakarta / *Bank Mega Syariah Jakarta*	32 hari	8.00%	14,000,000,000	
Bank Muamalat Pekanbaru / *Bank Muamalat Pekanbaru*	30-31 hari	7,75%-9%	225,000,000,000	
			589,000,000,000	
Tabungan Konvensional dan Syariah / *Conventional and Sharia Savings*				
BPR Karimun / *BPR Karimun*		3.00%	34,503,350	
Bank Muamalat Indonesia / *Bank Muamalat Indonesia*		3.40%	-	
Bank Syariah Mandiri / *Bank Syariah Mandiri*		3%-3,26%	1,273,968,645	
Jumlah / *Total*			1,273,968,645	
Jumlah Tabungan / *Total savings*			1,308,471,995	
Jumlah penempatan / *Amount to*			**4,637,668,471,995**	
PPA -Umum Syariah Pada Bank Lain / *allowance for impairment losses*			(1,546,243,045)	
Jumlah - bersih / *Amount to - net*			**4,636,122,228,950**	

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2014 dan 2013
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years ended
December 31, 2014 and 2013
(Expressed in fully Rupiah, unless otherwise stated)

6. Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain (lanjutan)

b. Berdasarkan mata uang

	31 Desember 2014	31 Desember 2013	
Mata uang Rupiah			*Rupiah currency*
Interbank call money	1,940,000,000,000	1,360,000,000,000	*Interbank call money*
Tabungan	1,346,782,777	1,308,471,995	*saving*
Deposito on call	2,000,000,000,000	2,450,000,000,000	*Deposit on call*
Deposito berjangka	1,692,600,000,000	729,000,000,000	*Timed deposits*
Fasilitas Bank Indonesia	189,939,324,938	-	*Indonesian Banking Facilities*
Jumlah	5,823,886,107,715	4,540,308,471,995	*Total*
Mata uang US Dollar			*US Dollar currency*
Deposito berjangka	49,540,000,000	97,360,000,000	*Timed deposits*
Jumlah	**49,540,000,000**	**97,360,000,000**	*Total*
Jumlah	**5,873,426,107,715**	**4,637,668,471,995**	*Total*
PPA -Umum Syariah Pada Bank Lain	(1,269,391,389)	(1,546,243,045)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah	**5,872,156,716,327**	**4,636,122,228,950**	*Total*

c. Berdasarkan jatuh tempo

	31 Desember 2014	31 Desember 2013	
< 1 bulan	4,179,479,324,938	3,810,000,000,000	*1 month <*
1 bulan - 3 bulan	1,692,600,000,000	826,360,000,000	*1 month - 3 month*
9 bulan - 12 bulan	1,346,782,777	1,308,471,995	*9 month - 12 month*
Jumlah penempatan	**5,873,426,107,715**	**4,637,668,471,995**	*Total placement*
PPA -Umum Syariah Pada Bank Lain	(1,269,391,389)	(1,546,243,045)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah	**5,872,156,716,327**	**4,636,122,228,951**	*Total*

d. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai

	31 Desember 2014	31 Desember 2013	
Saldo awal periode	(1,546,243,044)	(2,239,569,816)	*Beginning balance of allowance*
(Pembentukan) pemulihan CKPN	276,851,656	693,326,772	*(Reserve) recovery allowance for impairment losses*
Saldo akhir tahun	**(1,269,391,388)**	**(1,546,243,044)**	*Ending Balance*

Bank tidak memiliki transaksi dengan Pihak berelasi semua transaksi hanya dengan Pihak ketiga.

Berdasarkan hasil penelaahan dan evaluasi manajemen bank, kolektibilitas atas penempatan pada bank lain seluruhnya lancar. Manajemen "Bank" berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya penempatan pada bank lain.

6. Placement with Bank Indonesia and other bank (continued)

b. By currency

c. By maturity

d. Movements in the allowance for impairment losses

Bank has no transaction with privileged relation party for all transactions are only with third party.

Based on bank management review result and evaluation, the collectibility of placements with other bank is classified as pass enturely. The Management assumes that the allocations for possible losses are adequate to cover possible losses arising from uncollectibility of current accounts with other banks.

7. Surat berharga

- Klasifikasi surat berharga berdasarkan jenis dan tujuan investasi adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2014	31 Desember 2013	
SBPM Obligasi-tersedia untuk dijual	22,023,558,940	20,542,375,150	Bonds available for sale
SBPM Obligasi diukur pada nilai wajar	46,136,900,000	42,959,500,000	Bonds at fair value
SBPM Obligasi dimiliki hingga jatuh tempo	126,969,740,591	116,704,149,592	SBPM Obligation Held-to-maturity
SBPU dimiliki hingga jatuh tempo	1,246,638,000,000	863,333,000,000	*Marketable Held-to-maturity*
-/-Bunga SBPU yang belum di amortisasi-dimiliki hingga jatuh tempo	(21,868,997,522)	(10,315,548,619)	*-/- Unamortized discount of Marketable Held-To-Maturity*
Jumlah	1,419,899,202,009	1,033,223,476,123	*Total*

7. Marketable securities

Marketable securities classification based on type and invesment purpose are as follows:

Jumlah surat berharga	1,419,899,202,009	1,033,223,476,123	*Total Marketable Securities*
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	*Allowance for impairment losses*
Jumlah	**1,419,899,202,009**	**1,033,223,476,123**	*Grand Total*

7. Surat berharga (lanjutan)

- Klasifikasi surat berharga berdasarkan jatuh tempo

7. *Marketable securities (continued)*

- *Marketable securities classification to maturity*

	31 Desember 2014	31 Desember 2013	
Dimiliki hingga Jatuh Tempo			***Held-to-maturity***
Biaya perolehan			*At cost after amortized*
Sampai dengan 1 bulan	-	-	*Less than 1 month*
Lebih dari 1 s/d 12 bulan	1,419,899,202,009	1,033,223,476,123	*More than 1 s/d 12 month*
Jumlah	**1,419,899,202,009**	**1,033,223,476,123**	*Amount to*

Bunga Surat Berharga belum diamortisasi 31-12-2014: ***Unamortized marketable discount December 31, 2014***

Surat-Surat Berharga / *Marketable Security*	Penempatan / *Placement*	Jatuh Tempo / *Due date*	Bunga/ *Interest*	Nominal/ *At par*	Selisih Penilaian/ *difference value*
• Obligasi tersedia untuk dijual / *Obligation available for sale*					
Obligasi FR0065	15 Nopember 2012	15 Mei 2033	6.625%	20,000,000,000	(3,147,600,000)
Obligasi FR0065	15 Nopember 2012	15 Mei 2033	6.625%	6,137,000,000	(965,841,060)
Jumlah/ *Total*				26,137,000,000	(4,113,441,060)

Surat-Surat Berharga / *Marketable Security*	Penempatan / *Placement*	Jatuh Tempo / *Due date*	Bunga/ *Interest*	Nominal/ *At par*	Selisih Penilaian/ *difference value*
• SBPM Obligasi diukur pada nilai wajar / *SBPM Obligation measured at fair value*					
Obligasi FR0064	15 Nopember 2012	15 Mei 2028	6.125%	20,000,000,000	(3,266,000,000)
Obligasi FR0064	15 Nopember 2012	15 Mei 2028	6.125%	10,000,000,000	(1,633,000,000)
Obligasi FR0065	15 Nopember 2012	15 Mei 2033	6.625%	10,000,000,000	(1,573,800,000)
Obligasi FR0065	15 Nopember 2012	15 Mei 2033	6.625%	10,000,000,000	(1,573,800,000)
Obligasi FR0064	15 Nopember 2012	15 Mei 2028	6.125%	5,000,000,000	(816,500,000)
Jumlah/ *Total*				55,000,000,000	(8,863,100,000)

Bunga Surat Berharga belum diamortisasi 31-12-2014: ***Unamortized marketable discount December 31, 2014***

Surat-Surat Berharga / *Marketable Security*	Penempatan / *Placement*	Jatuh Tempo / *Due date*	Bunga/ *Interest*	Nominal/ *At par*	Selisih Penilaian/ *difference value*
• SBPM Obligasi dimiliki hingga jatuh tempo / *SBPM Obligation Held-to-maturity*					
Berklnjtn Ind. Eximbank I Tahap III Th. 20	23-May-13	23-May-16	8.03%	10,000,000,000	(203,232,323)
Berklnjtn Ind. Eximbank I Tahap III Th. 20	23-May-13	23-May-16	8.03%	10,000,000,000	(203,232,323)
Berklnjtn I Jasa Marga Thp. I Th. 2013 Se	27-Sep-13	27-Sep-16	8.70%	20,000,000,000	-
Danareksa V Th. 2010 Seri B	11-Jan-10	11-Jan-16	9.21%	10,000,000,000	90,377,588
PLN IX Tahun 2007 Seri A	10-Jul-07	10-Jul-17	9.20%	3,000,000,000	76,755,319
PT. TELKOM II Tahun 2010 Seri A	06-Jul-10	06-Jul-15	9.01%	5,800,000,000	18,794,425
Subordinasi Bank Mandiri I Tahun 2009	11-Dec-09	11-Dec-16	9.73%	7,000,000,000	233,150,276
Subordinasi Bank Mandiri I Tahun 2009	11-Dec-09	11-Dec-16	9.73%	5,000,000,000	172,627,805
Subordinasi Bank Mandiri I Tahun 2009	11-Dec-09	11-Dec-16	9.73%	10,000,000,000	321,887,755
Subordinasi Bank Mandiri I Tahun 2009	11-Dec-09	11-Dec-16	9.73%	20,000,000,000	611,128,197
Obligasi III Bank SUMUT Tahun 2011	05-Jul-11	05-Jul-16	9.73%	10,000,000,000	-
Obligasi Bank Jabar Banten Tahun 2011	09-Feb-11	09-Feb-16	9.73%	15,000,000,000	51,483,871
Jumlah/ *Total*				125,800,000,000	1,169,740,591

Surat-Surat Berharga / *Marketable Security*	Penempatan / *Placement*	Jatuh Tempo / *Due date*	Bunga/ *Interest*	Nominal/ *At par*	Bunga / *Interest*
• SBPU dimiliki hingga jatuh tempo / *Marketable held-to-maturity*					
• Sertifikat Bank Indonesia OutRight / *Indonesian Bank Certificated OutRight*					
SBI Outright Seri IDBI 100415 273S I	11 September 2014	10 April 2015	6.60%	100,000,000,000	(1,765,055,118)
SBI Outright Seri IDBI 100415 273S I	11 September 2014	10 April 2015	6.60%	100,000,000,000	(1,765,055,118)
SBI Outright Seri IDBI 100415 273S I	11 September 2014	10 April 2015	6.60%	50,000,000,000	(882,527,559)
Jumlah/ *Total*				250,000,000,000	(4,412,637,795)

7. Surat berharga (lanjutan) / ***7. Marketable securities (continued)***

Surat-Surat Berharga / *Marketable Security*	Penempatan / *Placement*	Jatuh Tempo / *Due date*	Bunga/ *Interest*	Nominal/ *At par*	Bunga / *Interest*
• SBPU dimiliki hingga jatuh tempo (lanjutan) / *Marketable held-to-maturity (continued)*					
• Sertifikat Bank Indonesia Perdana / *First Indonesian Bangking Certificated*					
Bank Bca Jakarta Seri IDSD 260314	01 Oktober 2014	26 Maret 2015	6.65%	50,000,000,000	(760,349,633)
Bank Bca Jakarta Seri IDSD 260314	01 Oktober 2014	26 Maret 2015	6.65%	100,000,000,000	(1,520,699,266)
Bank Bca Jakarta Seri IDSD 260314	01 Oktober 2014	26 Maret 2015	6.65%	100,000,000,000	(1,520,699,266)
Bank Bca Jakarta Seri IDSD 260314	01 Oktober 2014	26 Maret 2015	6.65%	100,000,000,000	(1,520,699,266)
Jumlah/ *Total*				350,000,000,000	(5,322,447,431)
• Sertifikat Bank Indonesia Perdana / *First Indonesian Bangking Certificated*					
SBI Perdana Seri IDBI 100415 273S	11 Juli 2014	10 April 2015	7.12%	646,638,000,000	(12,133,912,295)
				1,246,638,000,000	(21,868,997,521)
Jumlah surat berharga / *Total marketable securities*				1,441,768,199,531	
-/- Bunga SBPU yang belum diamotisasi / *-/- Unamortized interest of and SBPU*				(21,868,997,521)	
Jumlah surat berharga-bersih / *Total marketable securities-net*				**1,419,899,202,009**	

Bunga Surat Berharga belum diamortisasi 31-12-2013: / ***Unamortized marketable discount December 31, 2013***

Surat-Surat Berharga / *Marketable Security*	Penempatan / *Placement*	Jatuh Tempo / *Due date*	Bunga/ *Interest*	Nominal/ *At par*	Selisih Penilaian/ *difference value*
• Obligasi tersedia untuk dijual / *Obligation available for sale*					
Obligasi FR0065	15 Nopember 2012	15 Mei 2033	6.63%	20,000,000,000	(4,281,000,000)
Obligasi FR0065	15 Nopember 2012	15 Mei 2033	6.63%	6,137,000,000	(1,313,624,850)
Jumlah/ *Total*				26,137,000,000	(5,594,624,850)

Surat-Surat Berharga / *Marketable Security*	Penempatan / *Placement*	Jatuh Tempo / *Due date*	Bunga/ *Interest*	Nominal/ *At par*	Selisih Penilaian/ *difference value*
• SBPM Obligasi diukur pada nilai wajar / *SBPM Obligation measured at fair value*					
Obligasi FR0064	15 Nopember 2012	15 Mei 2028	6.125%	20,000,000,000	(4,434,000,000)
Obligasi FR0064	15 Nopember 2012	15 Mei 2028	6.125%	10,000,000,000	(2,217,000,000)
Obligasi FR0065	15 Nopember 2012	15 Mei 2033	6.625%	10,000,000,000	(2,140,500,000)
Obligasi FR0065	15 Nopember 2012	15 Mei 2033	6.625%	10,000,000,000	(2,140,500,000)
Obligasi FR0064	15 Nopember 2012	15 Mei 2028	6.125%	5,000,000,000	(1,108,500,000)
Jumlah/ *Total*				55,000,000,000	(12,040,500,000)

Surat-Surat Berharga / *Marketable Security*	Penempatan / *Placement*	Jatuh Tempo / *Due date*	Bunga/ *Interest*	Nominal/ *At par*	Selisih Penilaian/ *difference value*
• SBPM Obligasi dimiliki hingga jatuh tempo / *SBPM Obligation Held-to-maturity*					
BerkInjtn Ind. Eximbank I Tahap III Th. 20	23-May-13	23-May-16	6.40%	10,000,000,000	(348,686,869)
BerkInjtn Ind. Eximbank I Tahap III Th. 20	23-May-13	23-May-16	6.40%	10,000,000,000	(348,686,869)
BerkInjtn I Jasa Marga Thp. I Th. 2013 Se	27-Sep-13	02-Oct-14	8.40%	16,000,000,000	-
BerkInjtn I Jasa Marga Thp. I Th. 2013 Se	27-Sep-13	02-Oct-14	8.40%	16,000,000,000	-
BerkInjtn I Jasa Marga Thp. I Th. 2013 Se	27-Sep-13	27-Sep-16	8.70%	20,000,000,000	-
Danareksa V Th. 2010 Seri B	11-Jan-10	11-Jan-16	10.20%	10,000,000,000	178,075,518
PLN X Tahun 2009 Seri A	09-Jan-09	09-Jan-14	14.75%	15,000,000,000	25,028,090
PLN IX Tahun 2007 Seri A	10-Jul-07	10-Jul-17	10.40%	3,000,000,000	107,120,061
PLN VII Tahun 2004	11-Nov-04	11-Nov-14	12.25%	5,000,000,000	154,616,477
PT. TELKOM II Tahun 2010 Seri A	06-Jul-10	06-Jul-15	9.60%	5,800,000,000	55,170,732
PT. Pupuk Kaltim II Tahun 2009	04-Dec-09	04-Dec-14	10.75%	5,000,000,000	76,125,356
PT. Pupuk Kaltim II Tahun 2009	04-Dec-09	04-Dec-14	10.75%	1,000,000,000	5,387,096

Jumlah/ *Total*				116,800,000,000	(95,850,408)

7. Surat berharga (lanjutan) / ***7. Marketable securities (continued)***

Surat-Surat Berharga / *Marketable Security*	Penempatan / *Placement*	Jatuh Tempo / *Due date*	Bunga/ *Interest*	Nominal/ *At par*	Bunga / *Interest*
• SBPU dimiliki hingga jatuh tempo / *Marketable held-to-maturity*					
• Sertifikat Bank Indonesia OutRight / *Indonesian Bank Certificated OutRight*					
SBI Outright Bank Permata Seri IDB	05 Desember 2013	03 Juli 2014	7.00%	100,000,000,000	(3,437,416,600)
SBI Outright Bank Permata Seri IDB	05 Desember 2013	03 Juli 2014	7.00%	50,000,000,000	(1,718,708,300)
SBI Outright Bank Permata Seri IDB	05 Desember 2013	03 Juli 2014	7.00%	50,000,000,000	(1,719,029,442)
Jumlah/ *Total*				200,000,000,000	(6,875,154,342)

Surat-Surat Berharga / *Marketable Security*	Penempatan / *Placement*	Jatuh Tempo / *Due date*	Bunga/ *Interest*	Nominal/ *At par*	Bunga / *Interest*
• SBPU dimiliki hingga jatuh tempo (lanjutan) / *Marketable held-to-maturity (continued)*					
• Sertifikat Bank Indonesia Perdana / *First Indonesian Bangking Certificated*					
SBI Perdana IDBI 090114 273S	11 April 2013	09 Januari 2014	4.85%	250,000,000,000	(292,371,809)
SBI Perdana IDBI 090114 273S	11 April 2013	09 Januari 2014	4.90%	250,000,000,000	(295,277,963)
SBI Perdana IDBI 090114 273S	11 April 2013	09 Januari 2014	5.00%	100,000,000,000	(120,433,561)
SBI Perdana IDBI 140814 273S	14 Nopember 2013	14 Agustus 2014	7.25%	63,333,000,000	(2,732,310,946)
Jumlah/ *Total*				663,333,000,000	(3,440,394,279)
Jumlah surat berharga / *Total marketable securities*				1,043,539,024,742	(10,315,548,621)
-/- Bunga SBPU yang belum diamotisasi / *-/- Unamortized interest of and SBPU*				(10,315,548,621)	
Jumlah surat berharga-bersih / *Total marketable securities-net*				**1,033,223,476,123**	

Kolektibilitas surat berharga dapat dirinci sebagai berikut : / *Collectibility of marketable securities is as follow :*

	31 Desember 2014	31 Desember 2013	
Lancar	1,419,899,202,009	1,033,223,476,123	*Current*
Macet	-	-	*Loss*
Jumlah	1,419,899,202,009	1,033,223,476,123	*Amount to*
Dikurangi CKPN Surat berharga	-	-	*Less allowance for impairment losses*
Jumlah-bersih	**1,419,899,202,009**	**1,033,223,476,123**	*Amount to-Nett*

Kerugian yang belum direalisasi atas efek-efek dan Obligasi Pemerintah dalam kelompok tersedia untuk dijual setelah pajak tangguhan dirinci sebagai berikut : / *Unrealized losses on availabel for sale marketable securities and Governmment Bonds net of deferred tax detail is as follows :*

	31 Desember 2014	31 Desember 2013	
• Selisih penilaian nilai wajar efek yang tersedia untuk dijual	(5,104,934,698)	(6,640,077,328)	• *Differences of fair value available for sales*
• Pajak penghasilan komprehensif	1,276,233,675	1,660,019,332	• *Tax comprehensif income*
Jumlah	(3,828,701,024)	(4,980,057,996)	*Total*

Per 31 Desember 2014 / ***As of December 31, 2014***

Surat-Surat Berharga / *Marketable Security*	Penempatan / *Placement*	Jatuh Tempo / *Due date*	Keuntungan/ Kerugian yang belum direalisasi pada ekuitas
• Selisih penilaian nilai wajar efek yang tersedia untuk dijual/ Differences of fair value available for sales			
Obligasi FR0065	15 Nopember 2012	15 Mei 2033	(3,921,905,069)
Obligasi FR0065	15 Nopember 2012	15 Mei 2033	(1,183,029,629)
Jumlah/ *Total*			(5,104,934,698)

Per 31 Desember 2013 / ***As of December 31, 2013***

Surat-Surat Berharga / *Marketable Security*	Penempatan / *Placement*	Jatuh Tempo / *Due date*	Keuntungan/ Kerugian yang belum direalisasi pada ekuitas
• Selisih penilaian nilai wajar efek yang tersedia untuk dijual/ Differences of fair value available for sales			

Obligasi FR0065	15 Nopember 2012	15 Mei 2033	(5,097,444,121)
Obligasi FR0065	15 Nopember 2012	15 Mei 2033	(1,542,633,207)
Jumlah/ *Total*			(6,640,077,328)

8. Kredit yang diberikan

Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah seluruhnya diberikan dalam mata uang Rupiah serta dapat dirinci sebagai berikut :

8. *Loans*

All loans and sharia financing were granted in Rupiah Currency and detail from that detail is as follows :

	31 Desember 2014	31 Desember 2013	
Kredit Modal kerja	1,233,994,172,528	1,145,772,134,347	*Working capital loans*
Kredit Investasi	1,335,359,515,816	1,215,649,723,933	*Invesment loans*
Kredit Konsumtif	10,586,819,382,486	9,590,170,081,960	*Consumer loans*
Jumlah	13,156,173,070,831	11,951,591,940,239	*Amount to*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(391,421,743,064)	(413,603,569,889)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah-bersih	**12,764,751,327,767**	**11,537,988,370,349**	*Amount to-Nett*

a. Berdasarkan jenis dan kolektibilitas

a. *By type and collectibility*

Konvensional dan syariah / *Conventional and Sharia*

Per 31 Desember 2014 / *As of December 31, 2014*

Jenis/Type	Lancar / Current	DPK/ Special Mention	KL/ Substandart	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Total/ Amount to
• Modal kerja/ Working capital						
Pihak berelasi/ *Related parties*	330,681,112	-	-	-	-	330,681,112
Pihak ketiga/ *Third parties*	999,614,745,974	109,906,191,334	4,707,366,068	3,490,008,517	115,945,179,523	1,233,663,491,416
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai / *Allowance for impairment losses*	(11,650,487,612)	(8,790,769,594)	(2,124,804,117)	(2,882,593,363)	(108,388,085,192)	(133,836,739,878)
Jumlah/ *Total*	988,294,939,474	101,115,421,740	2,582,561,951	607,415,154	7,557,094,331	1,100,157,432,650
• Investasi/ Invesment						
Pihak berelasi/ *Related parties*						-
Pihak ketiga/ *Third parties*	1,105,771,716,405	122,747,232,252	11,907,141,655	6,496,931,323	88,436,494,181	1,335,359,515,816
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai / *Allowance for impairment losses*	(7,031,906,451)	(6,661,628,900)	(1,519,695,264)	(3,157,211,869)	(81,303,803,346)	(99,674,245,830)
Jumlah/ *Total*	1,098,739,809,954	116,085,603,352	10,387,446,391	3,339,719,454	7,132,690,835	1,235,685,269,986
• Konsumtif/ Consumer						
Pihak berelasi/ *Related parties*	8,824,757,423	-	-	-	-	8,824,757,423
Pihak ketiga/ *Third parties*	10,298,645,857,135	143,202,251,077	2,767,897,661	4,953,422,749	128,425,196,441	10,577,994,625,063
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai / *Allowance for impairment losses*	(17,864,352,011)	(9,184,448,377)	(1,805,929,490)	(4,737,413,336)	(124,318,614,141)	(157,910,757,355)
Jumlah/ Total	10,289,606,262,547	134,017,802,700	961,968,171	216,009,413	4,106,582,300	10,428,908,625,131
Jumlah						
• Jumlah Pihak berelasi/ *Related parties total*	9,155,438,535	-	-	-	-	9,155,438,535
Jumlah Pihak ketiga/ *Third parties total*	12,404,032,319,514	375,855,674,663	19,382,405,384	14,940,362,589	332,806,870,145	13,147,017,632,295
Jumlah/ Total	**12,413,187,758,049**	**375,855,674,663**	**19,382,405,384**	**14,940,362,589**	**332,806,870,145**	**13,156,173,070,831**
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai / *Allowance for impairment losses*	(36,546,746,074)	(24,636,846,871)	(5,450,428,871)	(10,777,218,568)	(314,010,502,679)	(391,421,743,064)
Jumlah bersih/ Total net	**12,376,641,011,975**	**351,218,827,792**	**13,931,976,513**	**4,163,144,021**	**18,796,367,466**	**12,764,751,327,767**

8. Kredit yang diberikan (lanjutan) / 8. *Loans (continued)*

a. Berdasarkan jenis dan kolektibilitas (lanjutan) / a. *By type and collectibility (continued)*

Konvensional dan syariah / *Conventional and Sharia*

Per 31 Desember 2013 / *As of December 31, 2013*

Jenis/Type	Lancar / Current	DPK/ Special Mention	KL/ Substandart	Diragukan/ Doubfful	Macet/ Loss	Total/ Amount to
• Modal kerja/ Working capital						
Pihak berelasi/ Related parties	-	-	-	-	-	-
Pihak ketiga/ Third parties	947,568,318,825	76,669,713,600	5,804,850,500	4,570,612,469	111,158,638,953	1,145,772,134,347
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai / *Allowance for impairment losses*	(43,470,063,046)	(17,059,648,185)	(3,238,662,452)	(3,823,024,047)	(105,374,659,500)	(172,966,057,231)
Jumlah/ *Total*	904,098,255,779	59,610,065,415	2,566,188,048	747,588,422	5,783,979,453	972,806,077,116
• Investasi/ Invesment						
Pihak berelasi/ Related parties	481,285,319	-	-	-	-	481,285,319
Pihak ketiga/ Third parties	1,054,023,226,312	77,075,811,717	2,969,286,610	4,009,764,392	77,090,349,584	1,215,168,438,614
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai / *Allowance for impairment losses*	(7,941,502,392)	(6,984,422,725)	(1,444,540,744)	(3,828,122,534)	(72,257,237,287)	(92,455,825,682)
Jumlah/ *Total*	1,046,563,009,239	70,091,388,991	1,524,745,865	181,641,858	4,833,112,297	1,123,193,898,250
• Konsumtif/ Consumer						
Pihak berelasi/ Related parties	7,370,955,977	-	-	-	-	7,370,955,977
Pihak ketiga/ Third parties	9,308,178,305,945	144,087,003,234	5,465,933,376	4,035,513,995	121,032,369,434	9,582,799,125,983
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai / *Allowance for impairment losses*	(13,587,617,595)	(10,901,699,538)	(4,278,417,087)	(3,805,272,169)	(115,608,680,587)	(148,181,686,976)
Jumlah/ Total	9,301,961,644,327	133,185,303,696	1,187,516,289	230,241,825	5,423,688,847	9,441,988,394,984
• Jumlah Pihak berelasi/ Related parties total	7,852,241,296	-	-	-	-	7,852,241,296
Jumlah Pihak ketiga/Third parties tota	11,309,769,851,081	297,832,528,551	14,240,070,486	12,615,890,855	309,281,357,971	11,943,739,698,943
Jumlah/ Total	**11,317,622,092,377**	**297,832,528,551**	**14,240,070,486**	**12,615,890,855**	**309,281,357,971**	**11,951,591,940,239**
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai / *Allowance for impairment losses*	(64,999,183,033)	(34,945,770,449)	(8,961,620,284)	(11,456,418,750)	(293,240,577,374)	(413,603,569,889)
Jumlah bersih/ Total net	**11,252,622,909,345**	**262,886,758,102**	**5,278,450,202**	**1,159,472,105**	**16,040,780,597**	**11,537,988,370,349**

b. Berdasarkan sektor ekonomi / b. *Based on Economic sector*

Konvensional / *Conventional*

Per 31 Desember 2014 / *As of December 31, 2014*

Jenis/ *Type*	Lancar/ *Current*	DPK/ *Special Mention*	KL/ *Substandart*	Diragukan/ *Doubfful*	Macet/ *Non performing*	Total/ *Amount to*
• Pertanian, perburuhan dan sarana pertanian/ *Agriculture, labor and agriculture medium*	990,307,326,772	62,076,788,250	1,779,627,934	1,275,832,673	55,621,201,343	1,111,060,776,972
• Pertambangan/ *Mining*	359,767,989	160,749,114	-	-	482,718,090	1,003,235,193
• Industri pengolahan/ *Manufacturing*	21,362,690,062	1,867,349,003	103,937,285	32,372,097	18,459,955,893	41,826,304,340
• Listrik, gas dan air/ *Electricity, gas and water*	92,642,627,328	438,542,131	-	-	-	93,081,169,459
• Konstruksi/ *Construction*	128,640,147,224	8,687,729,890	194,750,000	-	36,180,952,245	173,703,579,359
• Perdagangan, restoran dan hotel/ *Trading, restaurants and hotels*	705,601,204,809	123,733,271,422	3,382,624,074	4,516,861,537	74,176,260,631	911,410,222,473
• Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi/ *Transportation, warehousing and communication*	5,841,028,490	2,476,810,892	-	61,869,917	840,331,491	9,220,040,790
• Jasa dunia usaha/ *Bussiness service*	8,179,106,074	978,415,749	-	-	1,442,976,887	10,600,498,710
• Jasa sosial dan masyarkat/ *Social service and public*	69,094,939,126	6,008,723,697	1,658,879,001	326,211,786	3,853,860,332	80,942,613,942
• Lain-lain/ Other	9,620,159,606,988	140,157,099,069	2,690,068,155	4,876,389,812	124,816,416,471	9,892,699,580,495
Jumlah/ Total	**11,642,188,444,862**	**346,585,479,217**	**9,809,886,449**	**11,089,537,822**	**315,874,673,383**	**12,325,548,021,733**
• Cadangan Kerugian Penurunan Nilai / *Allowance for impairment losses*	(28,908,611,786)	(24,104,830,121)	(4,721,367,737)	(9,895,422,330)	(302,353,445,756)	(369,983,677,730)
Jumlah / *Total*	**11,613,279,833,076**	**322,480,649,096**	**5,088,518,712**	**1,194,115,492**	**13,521,227,627**	**11,955,564,344,003**

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2014 dan 2013
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years ended
December 31, 2014 and 2013
(Expressed in fully Rupiah, unless otherwise stated)

8. Kredit yang diberikan (lanjutan)

b. Berdasarkan sektor ekonomi (lanjutan)

8. *Loans (continued)*

b. *Based on Economic sector (continued)*

Syariah / *Sharia*

Per 31 Desember 2014 / *As of December 31, 2014*

Jenis/ *Type*	Lancar/ *Current*	DPK/ *Special Mention*	KL/ *Substandart*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Non performing*	Total/ *Amount to*
• Pertanian, perburuhan dan sarana pertanian/ *Agriculture, labor and agriculture medium*	44,533,253,572	19,657,597,109	7,204,895,836	1,614,615,249	5,104,185,071	78,114,546,837
• Pertambangan/ *Mining*	108,750,000	-	-	-	440,253,388	549,003,388
• Industri pengolahan/ *Manufacturing*	1,079,055,551	147,770,993	-	-	40,760,833	1,267,587,377
• Listrik, gas dan air/ *Electricity, gas and water*	90,277,788	-	-	-	-	90,277,788
• Konstruksi/ *Construction*	5,690,895,710	307,329,494	-	368,694,665	3,645,006,182	10,011,926,051
• Perdagangan, restoran dan hotel/ *Trading, restaurants and hotels*	24,490,586,372	4,633,791,984	1,543,618,920	1,346,217,622	2,582,481,787	34,596,696,685
• Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi/ *Transportation, warehousing and communication*	793,152,783	579,519,579	-	-	-	1,372,672,362
• Jasa dunia usaha/ *Bussiness service*	3,604,035,242	792,196,589	381,607,335	403,587,007	1,510,729,532	6,692,155,705
• Jasa sosial dan masyarkat/ *Social service and public*	3,298,298,599	106,837,689	364,567,338	40,677,287	-	3,810,380,913
• Lain-lain/ Other	687,311,007,570	3,045,152,008	77,829,506	77,032,937	3,608,779,970	694,119,801,991
Jumlah/ Total	**770,999,313,187**	**29,270,195,445**	**9,572,518,935**	**3,850,824,767**	**16,932,196,763**	**830,625,049,097**
• Cadangan Kerugian Penurunan Nilai / *Allowance for impairment losses*	(7,638,134,288)	(532,016,749)	(729,061,135)	(881,796,239)	(11,657,056,922)	(21,438,065,333)
Jumlah / *Total*	**763,361,178,899**	**28,738,178,696**	**8,843,457,800**	**2,969,028,528**	**5,275,139,841**	**809,186,983,764**

Konvensional dan Syariah / Conventional and Sharia

Per 31 Desember 2014 / *As of December 31, 2014*

Jenis/ *Type*	Lancar/ *Current*	DPK/ *Special Mention*	KL/ *Substandart*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Total/ *Amount to*
• Pertanian, perburuhan dan sarana pertanian/ *Agriculture, labor and agriculture medium*	1,034,840,580,344	81,734,385,359	8,984,523,770	2,890,447,922	60,725,386,414	1,189,175,323,809
• Pertambangan/ *Mining*	468,517,989	160,749,114	-	-	922,971,478	1,552,238,581
• Industri pengolahan/ *Manufacturing*	22,441,745,613	2,015,119,996	103,937,285	32,372,097	18,500,716,726	43,093,891,717
• Listrik, gas dan air/ *Electricity, gas and water*	92,732,905,116	438,542,131	-	-	-	93,171,447,247
• Konstruksi/ *Construction*	134,331,042,934	8,995,059,384	194,750,000	368,694,665	39,825,958,427	183,715,505,410
• Perdagangan, restoran dan hotel/ *Trading, restaurants and hotels*	730,091,791,181	128,367,063,406	4,926,242,994	5,863,079,159	76,758,742,418	946,006,919,158
• Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi/ *Transportation, warehousing and communication*	6,634,181,273	3,056,330,471	-	61,869,917	840,331,491	10,592,713,152
• Jasa dunia usaha/ *Bussiness service*	11,783,141,316	1,770,612,338	381,607,335	403,587,007	2,953,706,419	17,292,654,415
• Jasa sosial dan masyarkat/ *Social service and public*	72,393,237,725	6,115,561,386	2,023,446,339	366,889,073	3,853,860,332	84,752,994,855
• Lain-lain/ Other	10,307,470,614,558	143,202,251,077	2,767,897,661	4,953,422,749	128,425,196,441	10,586,819,382,486
Jumlah/ Total	**12,413,187,758,049**	**375,855,674,662**	**19,382,405,384**	**14,940,362,589**	**332,806,870,146**	**13,156,173,070,831**
• Cadangan Kerugian Penurunan Nilai / *Allowance for impairment losses*	(36,546,746,074)	(24,636,846,870)	(5,450,428,872)	(10,777,218,569)	(314,010,502,678)	(391,421,743,064)
Total / *Grand Total*	**12,376,641,011,975**	**351,218,827,792**	**13,931,976,512**	**4,163,144,020**	**18,796,367,468**	**12,764,751,327,767**

8. Kredit yang diberikan (lanjutan) / 8. *Loans (continued)*

a. Berdasarkan jenis dan kolektibilitas (lanjutan) / a. *By type and collectibility (continued)*

Konvensional dan syariah / *Conventional and Sharia*

Per 31 Desember 2013 / *As of December 31, 2013*

Jenis/Type	Lancar / Current	DPK/ Special Mention	KL/ Substandart	Diragukan/ Doubfful	Macet/ Loss	Total/ Amount to
• Modal kerja/ Working capital						
Pihak berelasi/ Related parties	-	-	-	-	-	-
Pihak ketiga/ Third parties	947,568,318,825	76,669,713,600	5,804,850,500	4,570,612,469	111,158,638,953	1,145,772,134,347
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai / *Allowance for impairment losses*	(43,470,063,046)	(17,059,648,185)	(3,238,662,452)	(3,823,024,047)	(105,374,659,500)	(172,966,057,231)
Jumlah/ *Total*	904,098,255,779	59,610,065,415	2,566,188,048	747,588,422	5,783,979,453	972,806,077,116
• Investasi/ Invesment						
Pihak berelasi/ Related parties	481,285,319	-	-	-	-	481,285,319
Pihak ketiga/ Third parties	1,054,023,226,312	77,075,811,717	2,969,286,610	4,009,764,392	77,090,349,584	1,215,168,438,614
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai / *Allowance for impairment losses*	(7,941,502,392)	(6,984,422,725)	(1,444,540,744)	(3,828,122,534)	(72,257,237,287)	(92,455,825,682)
Jumlah/ *Total*	1,046,563,009,239	70,091,388,991	1,524,745,865	181,641,858	4,833,112,297	1,123,193,898,250
• Konsumtif/ Consumer						
Pihak berelasi/ Related parties	7,370,955,977	-	-	-	-	7,370,955,977
Pihak ketiga/ Third parties	9,308,178,305,945	144,087,003,234	5,465,933,376	4,035,513,995	121,032,369,434	9,582,799,125,983
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai / *Allowance for impairment losses*	(13,587,617,595)	(10,901,699,538)	(4,278,417,087)	(3,805,272,169)	(115,608,680,587)	(148,181,686,976)
Jumlah/ Total	9,301,961,644,327	133,185,303,696	1,187,516,289	230,241,825	5,423,688,847	9,441,988,394,984
• Jumlah Pihak berelasi/ Related parties total	7,852,241,296	-	-	-	-	7,852,241,296
Jumlah Pihak ketiga/Third parties tota	11,309,769,851,081	297,832,528,551	14,240,070,486	12,615,890,855	309,281,357,971	11,943,739,698,943
Jumlah/ Total	**11,317,622,092,377**	**297,832,528,551**	**14,240,070,486**	**12,615,890,855**	**309,281,357,971**	**11,951,591,940,239**
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai / *Allowance for impairment losses*	(64,999,183,033)	(34,945,770,449)	(8,961,620,284)	(11,456,418,750)	(293,240,577,374)	(413,603,569,889)
Jumlah bersih/ Total net	**11,252,622,909,345**	**262,886,758,102**	**5,278,450,202**	**1,159,472,105**	**16,040,780,597**	**11,537,988,370,349**

b. Berdasarkan sektor ekonomi / b. *Based on Economic sector*

Konvensional / *Conventional*

Per 31 Desember 2014 / *As of December 31, 2014*

Jenis/ *Type*	Lancar/ *Current*	DPK/ *Special Mention*	KL/ *Substandart*	Diragukan/ *Doubfful*	Macet/ *Non performing*	Total/ *Amount to*
• Pertanian, perburuhan dan sarana pertanian/ *Agriculture, labor and agriculture medium*	990,307,326,772	62,076,788,250	1,779,627,934	1,275,832,673	55,621,201,343	1,111,060,776,972
• Pertambangan/ *Mining*	359,767,989	160,749,114	-	-	482,718,090	1,003,235,193
• Industri pengolahan/ *Manufacturing*	21,362,690,062	1,867,349,003	103,937,285	32,372,097	18,459,955,893	41,826,304,340
• Listrik, gas dan air/ *Electricity, gas and water*	92,642,627,328	438,542,131	-	-	-	93,081,169,459
• Konstruksi/ *Construction*	128,640,147,224	8,687,729,890	194,750,000	-	36,180,952,245	173,703,579,359
• Perdagangan, restoran dan hotel/ *Trading, restaurants and hotels*	705,601,204,809	123,733,271,422	3,382,624,074	4,516,861,537	74,176,260,631	911,410,222,473
• Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi/ *Transportation, warehousing and communication*	5,841,028,490	2,476,810,892	-	61,869,917	840,331,491	9,220,040,790
• Jasa dunia usaha/ *Bussiness service*	8,179,106,074	978,415,749	-	-	1,442,976,887	10,600,498,710
• Jasa sosial dan masyarkat/ *Social service and public*	69,094,939,126	6,008,723,697	1,658,879,001	326,211,786	3,853,860,332	80,942,613,942
• Lain-lain/ Other	9,620,159,606,988	140,157,099,069	2,690,068,155	4,876,389,812	124,816,416,471	9,892,699,580,495
Jumlah/ Total	**11,642,188,444,862**	**346,585,479,217**	**9,809,886,449**	**11,089,537,822**	**315,874,673,383**	**12,325,548,021,733**
• Cadangan Kerugian Penurunan Nilai / *Allowance for impairment losses*	(28,908,611,786)	(24,104,830,121)	(4,721,367,737)	(9,895,422,330)	(302,353,445,756)	(369,983,677,730)
Jumlah / *Total*	**11,613,279,833,076**	**322,480,649,096**	**5,088,518,712**	**1,194,115,492**	**13,521,227,627**	**11,955,564,344,003**

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2014 dan 2013
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years ended
December 31, 2014 and 2013
(Expressed in fully Rupiah, unless otherwise stated)

8. Kredit yang diberikan (lanjutan)

b. Berdasarkan sektor ekonomi (lanjutan)

Konvensional dan Syariah / Conventional and Sharia

8. *Loans (continued)*

b. *Based on Economic sector (continued)*

Per 31 Desember 2013 / *As of December 31, 2013*

Jenis/ *Type*	Lancar/ *Current*	DPK/ *Special Mention*	KL/ *Substandart*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Total/ *Amount to*
• Pertanian, perburuhan dan sarana pertanian/ *Agriculture, labor and agriculture medium*	854,189,051,043	55,443,846,144	1,372,892,156	3,528,416,087	52,575,466,142	967,109,671,571
• Pertambangan/ *Mining*	453,427,848	241,889,656	-	-	494,618,090	1,189,935,594
• Industri pengolahan/ *Manufacturing*	17,350,569,581	887,772,223	-	15,762,997	18,925,753,822	37,179,858,623
• Listrik, gas dan air/ *Electricity, gas and water*	90,787,514,819	-	-	-	98,736,247	90,886,251,066
• Konstruksi/ *Construction*	178,986,257,027	7,559,178,111	410,000,000	658,108,506	37,954,192,556	225,567,736,200
• Perdagangan, restoran dan hotel/ *Trading, restaurants and hotels*	757,613,470,507	81,991,907,234	5,595,203,979	3,992,218,735	70,320,860,556	919,513,661,011
• Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi/ *Transportation, warehousing and communication*	8,244,040,537	581,153,278	399,604,124	-	531,568,905	9,756,366,844
• Jasa dunia usaha/ *Bussiness service*	25,274,191,901	1,734,919,652	989,613,543	25,895,996	1,959,862,162	29,984,483,254
• Jasa sosial dan masyarkat/ *Social service and public*	69,415,557,194	5,313,836,978	6,823,308	359,974,540	5,387,930,057	80,484,122,077
• Lain-lain/ Other	9,315,308,011,921	144,078,025,274	5,465,933,376	4,035,513,995	121,032,369,434	9,589,919,854,000
Jumlah/ Total	**11,317,622,092,377**	**297,832,528,551**	**14,240,070,487**	**12,615,890,856**	**309,281,357,972**	**11,951,591,940,239**
• Cadangan Kerugian Penurunan Nilai / *Allowance for impairment losses*	(64,999,183,033)	(34,945,770,449)	(8,961,620,284)	(11,456,418,750)	(293,240,577,374)	(413,603,569,889)
Total / *Grand Total*	**11,252,622,909,345**	**262,886,758,102**	**5,278,450,203**	**1,159,472,106**	**16,040,780,598**	**11,537,988,370,349**

c. Berdasarkan jatuh tempo

c. *Based on Maturity*

	31 Desember 2014	31 Desember 2013	
Kurang s/d 1 tahun	640,416,258,249	669,012,814,757	*Less than 1 year*
1 tahun s.d 2 tahun	536,791,703,587	447,806,641,697	*1-2 years*
2 tahun s.d 5 tahun	3,234,136,547,024	2,674,841,461,565	*2-5 years*
Lebih dari 5 tahun	8,744,828,561,970	8,159,931,022,221	*More than 5 years*
Jumlah	**13,156,173,070,831**	**11,951,591,940,239**	*Total*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(391,421,743,064)	(413,603,569,890)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah	**12,764,751,327,767**	**11,537,988,370,349**	*Grand Total*

d. Berdasarkan jangka waktu perjanjian kredit

Klasifikasi kredit dilakukan berdasarkan perjanjian kredit dan sisa umur sampai dengan saat jatuh temponya adalah sebagai berikut :

d. *Based on term of credit agreements*

The loan classification is based on agreement and life residu up to due date as follows:

Berdasarkan perjanjian kredit

Based on loan agreement

Jangka waktu	31 Desember 2014	31 Desember 2013	*Term*
Kurang s/d 1 tahun	370,604,335,292	405,639,481,717	*Less than 1 year*
1 tahun s.d 2 tahun	95,501,620,128	164,341,556,138	*1-2 years*
2 tahun s.d 5 tahun	1,803,867,507,073	1,422,547,646,381	*2-5 years*
Lebih dari 5 tahun	10,886,199,608,337	9,959,063,256,003	*More than 5 years*
	13,156,173,070,831	**11,951,591,940,239**	
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(391,421,743,064)	(413,603,569,890)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah	**12,764,751,327,767**	**11,537,988,370,349**	*Grand Total*

e. Berdasarkan Pihak berelasi

e. *Based on related parties*

	31 Desember 2014	31 Desember 2013	
Pihak berelasi	9,155,438,535	7,852,241,296	*Related parties*
Pihak ketiga	13,147,017,632,295	11,943,739,698,943	*Third parties*

Jumlah	**13,156,173,070,831**	**11,951,591,940,239**	*Amount to*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(391,421,743,064)	(413,603,569,890)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah	**12,764,751,327,767**	**11,537,988,370,349**	*Amount to*

8. Kredit yang diberikan (lanjutan)

f. Berdasarkan Kolektibilitas

Klasifikasi risiko berdasarkan kolektibilitas kredit per 31 Desember 2014 dan 2013 telah mengacu kepada kriteria Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum tanggal 24 Oktober 2012, sebelumnya berdasarkan PBI Nomor 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005, sebagaimana yang telah dirubah dengan PBI No. 8/21/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006, PBI No. 9/6/PBI/2007 tanggal 30 Maret 2007 dan No. 11/2/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009.

Penilaian kualitas Aset bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 yang diubah dengan PBI No. 8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006, serta diubah kembali dengan PBI Nomor 9/9/PBI/2007 pada tanggal 18 Juni 2007 yang kemudian diubah dengan PBI Nomor 10/24/PBI/2008, tanggal 16 Oktober 2008, serta terakhir diubah dengan PBI Nomor 13/13/PBI/2011 pada tanggal 24 Maret 2011 tentang Penilaian Kualitas aset Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Penilaian kualitas Aset bank umum yang terakhir ditetapkan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum tanggal 24 Oktober 2012.

Klasifikasi risiko dapat dirinci sebagai berikut :

8. *Loans (continued)*

f. Based on Colectibility

Risks Clasification based on credit colletibilitis as at December 31, 2014 and 2013, had been in accordance with the Regulation of Bank of Indonesia (PBI) Number 14/15/PBI/2012 about the Valuation of General Bank Assets Qualitiy dated October 24, 2012, which before based PBI Number 7/2/PBI/2005 dated January 20, 2005, as had been changed with PBI Number 8/218PBI/2006 dated January 30, 2006, PBI Number 9/6/2007 dated March 30, 2007 and Number 11/2/PBI//2009 dated January 29, 2009.

The assessment of bank productive assetts of general bank which carries out its business based on syariah principles, is regulated based on Central Bank of Indonesia regulation Number 7/2/PBI/2005 dated in January 20, 2005 which addendum PBI Number 8/21/PBI/2006 dated in October 2006 and addendum with number 9/9/PBI/2007 dated in June 18, 2007 which addendum with number 10/24/PBI/2008 dated in October 16, 2008 and last are addendum with number 13/13/PBI/2011 dated in March 24, 2011 on assets quality assessment of General Sharia Bank and Sharia Unit.

The latest valuation of general bank Assets quality stated based on the Bank of ndonesia Regulation Number 14/15/PB/2012 about the valuation of Public Bank Assets Quality dated October 24, 2012.

Risks clasification detailed as follows:

Per 31 Desember 2014 / ***As of December 31, 2014***

Klasifikasi risiko / *Risk Clasification*	Persentase / *Percentage*	Baki Debet	CKPN / *Allowance for Impairment losses*	Jumlah bersih
• Lancar / Current	94.35%	12,413,187,758,049	(36,546,746,074)	12,376,641,011,975
• Dalam Perhatian Khusus / *Special Mention*	2.86%	375,855,674,663	(24,636,846,871)	351,218,827,792
• Kurang Lancar / *Substandart*	0.15%	19,382,405,384	(5,450,428,871)	13,931,976,513
• Diragukan / Doubfful	0.11%	14,940,362,589	(10,777,218,568)	4,163,144,021
• Macet / *Non performing*	2.53%	332,806,870,145	(314,010,502,679)	18,796,367,466
Total / *Amount to*	**100.00%**	**13,156,173,070,831**	**(391,421,743,064)**	**12,764,751,327,767**

Per 31 Desember 2013 / ***As of December 31, 2013***

Klasifikasi risiko / *Risk Clasification*	Persentase / *Percentage*	Baki Debet	CKPN / *Allowance for Impairment losses*	Jumlah bersih
• Lancar / Current	94.70%	11,317,622,092,377	(64,999,183,033)	11,252,622,909,345
• Dalam Perhatian Khusus / *Special Mention*	2.49%	297,832,528,551	(34,945,770,449)	262,886,758,102
• Kurang Lancar / *Substandart*	0.12%	14,240,070,486	(8,961,620,284)	5,278,450,202
• Diragukan / Doubfful	0.11%	12,615,890,855	(11,456,418,750)	1,159,472,105
• Macet / *Non performing*	2.59%	309,281,357,971	(293,240,577,374)	16,040,780,597
Total / *Amount to*	**100.00%**	**11,951,591,940,239**	**(413,603,569,889)**	**11,537,988,370,349**

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2014 dan 2013
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years ended
December 31, 2014 and 2013
(Expressed in fully Rupiah, unless otherwise stated)

8. Kredit yang diberikan (lanjutan)

g. Kisaran suku bunga

- Tingkat suku bunga kredit yang diberikan

Tingkat suku bunga Kredit Konsumer ditetapkan dengan Surat Edaran Direksi, No. 28/SE/2013, tanggal 30 Oktober 2013 untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Surat Edaran Direksi No. 29/SE/2013, tanggal 30 Oktober 2013 Tentang Kredit Aneka Guna (KAG), dan Surat Edaran No. 29/SE/2013, tanggal 30 Oktober 2013 tentang Kredit Kendaraan Bermotor (KKB). Tingkat suku bunga Kredit Komersial ditetapkan berdasarkan Surat Edaran Direksi No. 19/SE/2013, tanggal 11 September 2013 tentang "suku bunga kredit komersial, biaya provisi dan biaya administrasi kredit komersial, bank garansi dan dukungan keuangan". Dan tingkat suku bunga Kredit Mikro & Kecil ditetapkan dengan Surat Edaran Direksi No. 32/SE/2013, tanggal 04 November 2013 tentang "Perubahan Penetapan Tingkat Suku Bunga Kredit Mikro & Kecil PT Bank Riau Kepri".

8. *Loans (continued)*

g. Range of loan interest rates

- *Annual Interest rate given*

The interest rate of consumer stated by circulation letter of the Board of Directors, Number 28/SE/2013, dated October 30, 2013 for the credit housing ownership (KPR), circulation letter of the Board of Directors, Number 29/SE/2013, dated October 30, 2013 about various using (KAG) and aboout Vehiles credit (KKB). The interest rate of commercial credit stated based on circulation letter of the Board of Directors, Number 19/SE/2013, dated September 11, 2013, about "interest rate of credit commercial, bank guarantee and financial supporting". Interst rate of micro and small credit stated by circulation letter of the Board of Directors, Number 32SE/2013, dated November 04 ,2013, about " the changes of statement of interest rate of Micro and small credit of PT Bank Riau Kepri.

	Wednesday, December 31, 2014		Tuesday, December 31, 2013		
	Suku bunga	Suku bunga efektif	Suku bunga	Suku bunga efektif	
Kredit komersil	11,5% - 15%	11,5% - 15%	11% - 15%	11,5% - 15%	*comersil credits*
Kredit mikro	11% - 13%	12% - 22%	12% - 22%	12% - 22%	*micro credits*
Kredit konsumer	7,5% - 9,50%	s/d 5th : 9,5% > 5th : 9%	7,5% - 16,43%	s/d 5th : 9,5% > 5th : 9%	*consumer credits*

h. Ikhtisar kredit bermasalah berdasarkan sektor ekonomi

h. Non- performing loans by economic sector

	31 Desember 2014		31 Desember 2013		
	Kredit bermasalah / *Non performing loans*	CKPN / *Allowance for impairment losses*	Kredit bermasalah / *Non performing loans*	CKPN / *Allowance for impairment losses*	
• Pertanian, perburuhan dan sarana pertanian.	72,600,358,106	58,542,364,760	57,476,774,384	(53,030,229,904)	*Agriculture, labour and agriculture means* •
• Pertambangan	922,971,478	868,986,533	494,618,090	(460,568,120)	*Mining* •
• Industri pengolahan	18,637,026,108	18,387,998,248	18,941,516,819	(18,849,888,320)	*Manufacturing* •
• Listrik, gas dan air	-	-	98,736,247	(93,424,237)	*Electricity, gas and water* •
• Konstruksi	40,389,403,092	36,417,694,793	39,022,301,062	(36,503,004,504)	*Construction* •
• Perdagangan, restoran dan hotel	87,548,064,571	78,372,019,649	79,908,283,270	(73,777,355,357)	*Trading, restoran and hotel* •
• Pengangkutan, gudang dan komunikasi	902,201,408	879,440,270	931,173,029	(499,933,556)	*Transport, warehouse and comunication* •
• Jasa dunia usaha /	3,738,900,761	1,757,750,564	2,975,371,701	(1,413,459,644)	*Bussiness service* •
• Jasa sosial dan masyarkat	6,244,195,744	4,149,938,336	5,754,727,905	(5,338,382,923)	*Social and public service* •
• Lain-lain	136,146,516,851	130,861,956,967	130,533,816,805	(123,692,369,843)	*Others* •
Jumlah	**367,129,638,118**	**330,238,150,120**	**336,137,319,312**	**(313,658,616,408)**	*Total*

Rasio kredit konvensional bermasalah-kotor terhadap jumlah kredit konvensional per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing adalah 2,73% dan 2,84%.

Non-performing conventional loan ratio-gross to conventional loan as of December 31, 2014 and December 31, 2013, respectively was 2,73% and 2,84%.

Rasio kredit konvensional bermasalah-bersih terhadap jumlah kredit konvensional-bersih per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing adalah 0,17% dan 0,16%.

Non-performing conventional loan ratio-netto to conventional loans-netto as of December 31, 2014 and December 31, 2013 respectively was 0,17% and 0,16%.

Rasio kredit bermasalah-kotor (konvensional dan syariah)

Non-performing loan ratio-gross (conventional and sharia) to

terhadap jumlah kredit dan pembiayaan syariah untuk tahun 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing adalah 2,79% dan 2,81%.

conventional loan and sharia financing as of December 31, 2014 and December 31, 2013, respectively was 2,79% and 2,81%.

8. Kredit yang diberikan (lanjutan)

h. Ikhtisar kredit bermasalah berdasarkan sektor ekonomi (lanjutan)

Rasio kredit bermasalah-bersih (konvensional dan syariah) terhadap jumlah kredit dan pembiayaan syariah untuk 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing adalah 0,29% dan 0,19%.

Bank melakukan langkah-langkah untuk menekan jumlah kredit bermasalah dengan cara melakukan monitoring terhadap penyelesaian kredit bermasalah, melakukan pendekatan secara persuasif terhadap debitur yang bermasalah dan mempertahankan kualitas kredit yang tidak bermasalah agar tidak menjadi bermasalah dengan melakukan selektif dengan tingkat kehati-hatian dalam pemberian kredit baru.

i. Kredit yang direstrukturisasi

Restrukturisasi kredit merupakan upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam rangka penyelamatan kredit bermasalah, terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, dalam bentuk perpanjangan jangka waktu kredit, kapitalisasi tunggakan kedalam pokok, penurunan suku bunga dan kapitalisasi bunga.

Saldo kredit yang diretrukturisasi sebelum CKPN pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar Rp.15.816.800.837 dan Rp19.308.260.804 dengan rincian sebagai berikut :

Berdasarkan jenis

8. Loans (continued)

h. Non- performing loans by economic sector (continued)

Non-performing loan ratio-nett (conventional and sharia) to conventional loan and sharia financing as of December 31, 2014 and December 31, 2013, respectively was 0,29% and 0,19%.

Bank carries out steps to repress the amount of credits with problems by means of monitoring the settlement for credits with problems, performing persuasive approarches to debtors with problems and maintaining quality credit with no problems in order not to become a problem by performing selection with high level of prudency in providing new credits.

i. Restructured loans

Restructured loans is attempt repairs to Bank in the process save problem credits, to the debtors has difficulties for fully their liabilities, with schemes as extension loan period, capitalization of default, interest rate reduction, capitalization of interest.

Restructured loans before allowance for impairment losses as of December 31, 2014 and December 31, 2013 amounted Rp.15.816.800.837 and Rp19.308.260.804, are as follows :

By type and collectibility

Jenis/Type	Per 31 Desember 2014/ As of December 31, 2014					
	Lancar / Current	DPK/ Special Mention	KL/ Substandart	Diragukan/ Doubfful	Macet/ Loss	Total/ Amount to
• Modal kerja / *Workinf capital*						
Pihak berelasi /Related parties	-	-	-	-	-	-
Pihak ketiga / third parties	4,516,953,947	1,100,497,058	32,263,635	41,131,688	1,998,525,109	7,689,371,437
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ */ Allowance for impairment losses*	(46,735,488)	(90,001,312)	(21,790,859)	(31,123,488)	(1,479,696,630)	(1,669,347,777)
Jumlah/ *Total*	4,470,218,459	1,010,495,746	10,472,776	10,008,200	518,828,479	6,020,023,660
• Investasi/ Invesment						
Pihak berelasi /Related parties	-	-	-	-	-	-
Pihak ketiga / third parties	978,354,447	166,126,708		326,488,674	3,668,126,172	5,139,096,001
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ */ Allowance for impairment losses*	(9,087,061)	(12,473,573)		(305,136,315)	(2,566,645,877)	(2,893,342,826)
Jumlah/ *Total*	969,267,386	153,653,135	-	21,352,359	1,101,480,295	2,245,753,175
• Konsumtif/ Consumer						
Pihak berelasi /Related parties	-	-	-	-	-	-
Pihak ketiga / third parties	2,649,613,478	173,233,295	-	-	165,486,626	2,988,333,399
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ */ Allowance for impairment losses*	(10,094,141)	(16,976,863)	-	-	(151,153,214)	(178,224,218)
Jumlah/ Total	2,639,519,337	156,256,432	-	-	14,333,412	2,810,109,181
• Pihak berelasi /Related parties	-	-	-	-	-	-
Pihak ketiga / third parties	8,144,921,872	1,439,857,061	32,263,635	367,620,362	5,832,137,907	15,816,800,837
Jumlah/ Total	**8,144,921,872**	**1,439,857,061**	**32,263,635**	**367,620,362**	**5,832,137,907**	**15,816,800,837**
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai */ Allowance for impairment losses*	(65,916,690)	(119,451,748)	(21,790,859)	(336,259,803)	(4,197,495,721)	(4,740,914,821)

Jumlah bersih/ Total net	**8,079,005,182**	**1,320,405,313**	**10,472,776**	**31,360,559**	**1,634,642,186**	**11,075,886,016**

8. Kredit yang diberikan (lanjutan) / ***8. Loans (continued)***

i. Kredit yang direstrukturisasi (lanjutan) / ***i. Restructured loans (continued)***

Jenis/Type	Per 31 Desember 2013/ As of December 31, 2013					
	Lancar / Current	DPK/ Special Mention	KL/ Substandart	Diragukan/ Doubfful	Macet/ Loss	Total/ Amount to
• Modal kerja / *Workinf capital*						
Pihak berelasi /Related parties	-	-	-	-	-	-
Pihak ketiga / *Third parties*	3,140,849,339	717,302,494	35,857,451	24,504,824	3,015,478,343	6,933,992,450
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ */ Allowance for impairment losses*	(109,769,813)	(80,457,278)	(29,144,936)	(24,335,741)	(2,489,002,680)	(2,732,710,448)
Jumlah/ *Total*	3,031,079,526	636,845,216	6,712,515	169,083	526,475,663	4,201,282,003
• Investasi/ Invesment						
Pihak berelasi /Related parties	-	-	-	-	-	-
Pihak ketiga / *Third parties*	3,958,200,631	582,557,074	373,566,335	44,695,934	3,211,126,636	8,170,146,609
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ */ Allowance for impairment losses*	(240,928,947)	(59,776,908)	(296,051,320)	(41,755,618)	(2,156,816,638)	(2,795,329,431)
Jumlah/ *Total*	3,717,271,683	522,780,166	77,515,015	2,940,316	1,054,309,998	5,374,817,178
• Konsumtif/ Consumer						
Pihak berelasi /Related parties	-	-	-	-	-	-
Pihak ketiga / *Third parties*	3,023,022,074	1,036,447,948	-	-	144,651,722	4,204,121,744
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ */ Allowance for impairment losses*	(21,926,624)	(108,619,503)	-	-	(138,641,141)	(269,187,268)
Jumlah/ Total	3,001,095,450	927,828,445	-	-	6,010,581	3,934,934,476
• Pihak berelasi /Related parties	-	-	-	-	-	-
Pihak ketiga / *Third parties*	10,122,072,044	2,336,307,516	409,423,786	69,200,758	6,371,256,701	19,308,260,804
Jumlah/ Total	**10,122,072,044**	**2,336,307,516**	**409,423,786**	**69,200,758**	**6,371,256,701**	**19,308,260,804**
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai */ Allowance for impairment losses*	(372,625,384)	(248,853,688)	(325,196,256)	(66,091,359)	(4,784,460,459)	(5,797,227,147)
Jumlah bersih/ Total net	**9,749,446,659**	**2,087,453,827**	**84,227,530**	**3,109,399**	**1,586,796,242**	**13,511,033,657**

j. Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) / ***j. Allowance for Impairment Losses Mutation***

	31 Desember 2014	31 Desember 2013	
Saldo awal	413,603,569,890	360,497,615,898	*Balance at beginning*
Penyisihan kerugian penurunan nilai (pemulihan)	(22,181,826,826)	53,105,953,991	*(Reserve) recovery allowance for impairment losses*
Penghapus bukuan kredit	-	-	*Loans writen-off*
Saldo akhir	**391,421,743,064**	**413,603,569,890**	*Ending Balance*
Minimum penyisihan PPA	454,603,644,148	414,100,568,845	Minimum allowance PPA
Kekurangan CKPN atas PPA	63,181,901,084	496,998,955	Disadvantages CKPN on PPA
Rasio CKPN terhadap PPA	86.10%	99.88%	*CKPN to PPA Ratio*

Manajemen Bank berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya kredit yang diberikan serta telah dihitung berdasarkan ketentuan Bank Indonesia.

Management assumes that the allocations for possible losses is adequate to cover possible losses arising from uncollectible of loans and which also have been calculated based on the regulation of Central Bank of Indonesia.

Kredit yang diberikan posisi 31 Desember 2014 meningkat sebesar 10,08% dibanding tahun 2013 yaitu meningkat sebesar Rp1.204.250.449.479 dari baki debet Rp11.951.922.621.351 menjadi Rp13.156.173.070.831 namun CKPN kredit yang diberikan menurun sebesar Rp22.181.826.826 dari Rp413.603.569.890 menjadi Rp391.421.743.064. Penurunan CKPN tersebut karena selama tahun 2014 bank melakukan penagihan secara intensif untuk menekan NPL sehingga kualitas kredit pada akhir tahun membaik ditandai dengan penurunan NPL tahun 2013 sebesar 2,81% menjadi

Loans receivable position December 31, 2014 increased by 10.08% compared to the year 2013 in the amount of the debit balance Rp11.951.922.621.351 Rp1.204.250.449.479 be Rp13.156.173.070.831 but CKPN loans decreased by 5.36% or Rp22.181.826.826 of Rp413.603.569.890 be Rp391.421.743.064. The CKPN decline since 2014 because the banks do intensive billing to suppress the NPL that credit quality improved at the end of the year was marked by a decrease in NPLs in 2013 amounted to 2,81% to 2,70% by the end of 2014

ditandai dengan penurunan NPL tahun 2013 sebesar 2,81% menjadi 2,79% pada akhir tahun 2014.

to 2.81% to 2.79% by the end of 2014.

8. Kredit yang diberikan (lanjutan)

Penyisihan kerugian penurunan nilai pada 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp23.258.106.228. (individual) dan Rp368.163.636.836 (kolektif) dan Rp26.375.004.247 (individual) dan Rp387.228.565.643 (kolektif).

k. Kredit hapus buku

Posisi saldo kredit hapus buku per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp86.645.473.301 dan Rp88.177.018.552. Kredit hapus buku dikelola oleh divisi "Penanganan Kredit Bermasalah" (PKB) dan disajikan dalam laporan rekening administratif.

	31 Desember 2014	31 Desember 2013	
Saldo awal	88,177,018,552	90,296,488,612	*Beginning balance*
Penghapus bukuan kredit	-	-	*Loans extracomtable*
Koreksi	12,500,008	-	*Corection*
Penerimaan kembali *(pokok)*	(1,544,045,258)	(2,119,470,060)	*Receivable collect*
Saldo akhir	**86,645,473,301**	**88,177,018,552**	*Ending balance*

Sehubungan dengan penerapan PSAK No.50 (Revisi 2006) dan No. 55 (Revisi 2006) tentang instrumen Keuangan serta Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI 2008) penerimaan kembali kredit yang telah dihapusbukukan diakui sebagai pendapatan operasional lainnya.

l. Informasi pokok lainnya sehubungan dengan kredit yang diberikan

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan kredit yang diberikan :

- Agunan kredit

  Kredit yang diberikan dijamin dengan deposito, agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual dan jaminan lain yang umumnya dapat diterima oleh perbankan.

- Kredit modal kerja dan investasi

  Kredit modal kerja dan investasi diberikan kepada debitur untuk kepentingan modal kerja dan barang-barang modalnya.

- Kredit kepada "Karyawan Bank Riau Kepri"

  Kredit yang diberikan kepada karyawan "Bank" merupakan kredit untuk membeli kendaraan, rumah dan keperluan lainnya yang dibebani bunga, jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 15 (lima belas) tahun dengan mempertimbangkan sisa masa kerja dan dibayar kembali melalui pemotongan gaji setiap bulan dengan tingkat bunga kredit kepada karyawan berkisar sebesar 8% berdasarkan SK Direksi Nomor : 108/KEPDIR/2011 tanggal 30 Desember 2011.

- Kredit konsumsi

  Kredit konsumsi terdiri atas kredit kepemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor dan kredit perorangan lainnya.

- Kredit program pemerintah dan kredit chanelling

  Kredit program pemerintah yang disalurkan dengan sistem chanelling.

8. *Loans (continued)*

Allowance for impairment losses as of December 31, 2014 and December 31, 2013 respectively amount to Rp23.258.106.228. (individual) and Rp368.163.636.836 (collective) and Rp26.375.004.247 (individual) and Rp387.228.565.643 (collective).

k. Write off loans

The Position of balanced of Write Off Loans as of December 31, 2014 and December 31, 2013 respectively are Rp86.645.473.301 and Rp88.177.018.552 Write Off Loans is manage by Handling of Loan Problem Division (PKB) and to be presentid in Administration account Statement.

Related to the implementation of SFAS No. 50 (Revision 2006) and No. 55 (Revision 2006) on Financial instrument as well as Indonesian Banking Accountancy Manual (PAPI 2008) receiving back the credit already erased from the book shall be acknowledged as other operational income.

l. Other significant information relating to loans

The followings are main information related to the credit given:

- *Loan collateral*

  Loan using time deposit as collateral, bound collateral by registered mortgages or by powers of attorney to mortgage or sell and by other guarantees generally acceptable to the bank.

- *Working capital and investment loans*

  Working capital and investment loans given to costumers for working capital and capital assets required.

- *Employee Bank Riau Kepri loans*

  Loans given to employees of the bank are loans which are intended for acquisition of vehicles, houses and other needs which interest is charged of 1 (one) up to 15 (fifteen) years by considering the balance of working period and repaid through salary deduction monthly with credit interest rate to the employees up to 8% based SK Direksi Nomor : 108/KEPDIR/2011 December 31, 2011.

- *Consumer loans*

  Consumer loans consists of house property loans, motor vehicles loans and other individual loans.

- *Government program loans and channelling loans*

  Government program loans has been channelled using chanelling system

8. Kredit yang diberikan (lanjutan)

I. Informasi pokok lainnya sehubungan dengan kredit yang diberikan (lanjutan)

- Kredit Sindikasi

Kredit sindikasi merupakan kredit yang diberikan oleh beberapa Bank kepada Debitur. Terdapat dua debitur yang menggunakan fasilitas kredit tersebut, yaitu PT PLN (Persero) dengan plafond Rp200.000.000.000 dan baki debet per 31 Desember 2014 dan 2013 sebesar Rp91.063.831.439,97 dan Rp89.512.939.159,97 dengan jumlah peserta sindikasi sebanyak 23 Bank.

Kredit sindikasi tersebut penyalurannya digunakan untuk pembiayaan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) PLN Merah Putih dan pembangunan hotel oleh PT Wenang Permai Sentosa di Sulawesi. Kredit tersebut merupakan sindikasi dari beberapa anggota BPD yang tergabung dalam Asosiasi Bank Pembangunan daerah (ASBANDA).

- Batas maksimum pemberian kredit (BMPK) untuk Bank

Menurut laporan BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit) pada tangal 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 kepada Bank Indonesia tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan, baik Pihak berelasi maupun Pihak ketiga.

Sesuai dengan Peraturan BI No. 8/13/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang perubahan atas Peraturan BI No. 7/3/PBI/2005 tentang batas maksimum pemberian kredit bank umum, BMPK kepada pihak tidak terkait yaitu penyediaan dana kepada satu peminjam yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 20% dari Modal Bank, penyediaan dana kepada satu kelompok peminjam yang bukan merupakan pihak terkait ditettapkan paling tinggi 25% dari Modal Bank. BMPK kepada pihak terkait seluruh portofolio penyediaan dana kepada pihak terkait dengan Bank ditetapkan paling tinggi 10% dari Modal Bank.

Saldo deposito nasabah Bank (DPK) yang diblokir yang digunakan sebagai jaminan pinjaman sebesar Rp10.465.000.000 pada 31 Desember 2014 dan Rp18.357.516.600 pada 31 Desember 2013.

8. Loans (continued)

I. Other significant information relating to loans (continued)

- *Syndication loans*

Syndication credit is credit given by several Banks to Debtors. There are two debtors using that credit facility, they are PT PLN (Persero) with plafond Rp200.000.000.000 and debt tray as of December 31, 2014 are Rp89.512.939.159,97 with the number of syndication participants 23 Banks.

The loans of syndication as used for development of Steam Eletricity Power Generator (PLTU) by PT Indonesia Power and development of hotel property by PT Wenang Permai Sentosa at Sulawesi. That loans are syndicated from several BPD member its companing in Regional Development Bank Assosiation (ASBANDA).

- *Legal Linding Limit (BMPK) for Bank*

In Maximum Lending Limit Report (BMPK) on December 31, 2014 and December 31, 2013 to Bank Indonesia there is no violation or collision of the allowed maximum lending limit, both to related party nor third party.

In accordace with the Regulation of BI Number 8/13/PBI/2006 dated October 5, 2006 about the changes or BI Regulation Number 7/3/PBI/2005 about the maximum limit of credit given by general bank, BMPK to the related parties that fund prepared to one debtor as non related parties state maximumly 20% o Bank Capital, preparind fun to one group debtors stated maximumly 25% of Bank Capital. BMPK ti related parties a whole portfolio preparing fund stated not more than 10% of Bank Capital.

The balance of bank customers deposit (DPK) which blocked as the guarantee of lowance amounted to Rp10.465.000.000 as at December 31, 2014 and Rp18.357.516.600 as at December 31, 2013

9. Penyertaan

Akun ini merupakan penyertaan saham yang ditempatkan pada 3 (tiga) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan perusahaan daerah (Ventura). Penyertaan pada BPR dalam kondisi lancar, sedangkan pada Perusahaan Ventura dalam kondisi macet. Prosentase kepemilikan dan jumlah nominal penyertaan sebagai berikut :

9. Investment

This account represents the share of invesment which are placed at 3 (three) Loans Banks (BPR) and Region Companies (Ventura). Those invesments in BPR in current condition, Meanwhile for the Ventura Company are Non Performing condition. The ownership percentage and the share of invesment amount are:

Keterangan	Bagian penyertaan / *Share of*	Tanggal Penyertaan / *Date of invesment*	Kualitas / *Quality*	31 Desember 2014	31 Desember 2013
BPR Kubu	2.03%	21 Nopember 2007	Lancar	200,000,000	200,000,000
BPR Kateman	4.50%	02 Oktober 2007	Lancar	200,333,335	200,333,335
BPR Karimun	4.00%	18 Juni 2003	Lancar	100,000,000	100,000,000
PT Sarana Ventura	7.81%	30 Mei 2007	Macet	1,155,450,000	1,155,450,000
Penyertaan / *Invesment*				1,655,783,335	1,655,783,335
Cad. kerugian penurunan nilai /					

Allow. for impairment losses	(1,155,450,000)	(1,155,450,000)
Jumlah / *Total*	**500,333,335**	**500,333,335**

9. Penyertaan (lanjutan)

Manajemen bank berpendapat bahwa posisi per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 penyertaan saham yang ditempatkan pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tidak mengalami penurunan nilai sedangkan untuk ventura mengalami penurunan nilai.

9. *Investment (continued)*

Management assumes that as of December 31, 2014 and December 31, 2013 the share of invesment which are placed at Loans Banks (BPR) are not impaired meanwhile Region Companies (Ventura) are impaired.

10. Aset tetap

Berikut ini adalah aset tetap kepemilikan langsung yang dimiliki oleh Bank :

10. *Fixed assets*

Following is the direct ownership of fixed assets by the bank:

Akun ini terdiri dari/ *The account consist of :* **Per 31 Desember 2014 / As of December 31, 2014**

Perkiraan/ *Description*	Saldo Awal / *Beginning balance*	Penambahan / *Additional*	Pengurangan / Dispossall	Reklasifikasi / Reclasification	Saldo Akhir / Ending balance
Harga perolehan/ *Cost*					
Tanah/ *Land*	81,953,509,350	835,000,000	-	-	82,788,509,350
Bangunan/ *Buildings*	55,161,679,644	6,685,836,855	98,421,217	-	61,749,095,282
Mesin & peralatan kantor/ *Equipment*	124,315,202,767	15,341,521,721	5,832,653,569	-	133,824,070,919
Kendaraan/ *Vehicles*	5,426,314,508	6,120,558,985	79,728,000	-	11,467,145,493
Jumlah/ *Total*	**266,856,706,269**	**28,982,917,561**	**6,010,802,786**	**-**	**289,828,821,044**
Aset dalam penyelesaian/ *Asset in progres*					
Tanah dan bangunan/ land and b*uildings*	9,454,349,583	228,052,323,431	-	-	237,506,673,014
Mesin & peralatan kantor/ *Equipment*	-	-	-	-	-
Jumlah/ *Total*	**9,454,349,583**	**228,052,323,431**	**-**	-	**237,506,673,014**
Jumlah/ *Total*	**276,311,055,852**	**257,035,240,992**	**6,010,802,786**	**-**	**527,335,494,058**
Akumulasi penyusutan/ *Accumulated depreciation*					
Bangunan/ *Buildings*	11,423,972,534	2,694,887,299	98,421,217	-	14,020,438,616
Mesin & peralatan kantor/ *Equipment*	83,661,142,623	14,983,949,710	5,829,311,327	-	92,815,781,006
Kendaraan/ *Vehicles*	3,583,987,819	871,758,274	79,727,993	-	4,376,018,100
Jumlah/ *Total*	**98,669,102,976**	**18,550,595,283**	**6,007,460,537**	-	**111,212,237,722**
Nilai Buku/ *Book value*	**177,641,952,876**				**416,123,256,336**

Akun ini terdiri dari/ *The account consist of :* **Per 31 Desember 2013 / *As of December 31, 2013***

Perkiraan/ *Description*	Saldo Awal / *Beginning balance*	Penambahan / *Additional*	Pengurangan / Dispossall	Reklasifikasi / Reclasification	Saldo Akhir / Ending balance
Harga perolehan/ *Cost*					
Tanah/ *Land*	79,487,269,137	2,153,034,213	-	313,206,000	81,953,509,350
Bangunan/ *Buildings*	39,726,340,965	6,373,852,575	-	9,061,486,104	55,161,679,644
Mesin & peralatan kantor/ *Equipment*	116,634,827,742	17,715,548,347	10,035,173,322	-	124,315,202,767
Kendaraan/ *Vehicles*	6,281,766,508	443,882,000	1,299,334,000	-	5,426,314,508
Jumlah/ *Total*	**242,130,204,352**	**26,686,317,135**	**11,334,507,322**	**9,374,692,104**	**266,856,706,269**
Aset dalam penyelesaian/ *Asset in progres*					
Tanah dan bangunan/ land and b*uildings*	12,864,366,142	5,964,675,545	-	(9,374,692,104)	9,454,349,583
Mesin & peralatan kantor/ *Equipment*	-	-	-	-	-
Jumlah/ *Total*	**12,864,366,142**	**5,964,675,545**	**-**	(9,374,692,104)	**9,454,349,583**
Jumlah/ *Total*	**254,994,570,494**	**32,650,992,680**	**11,334,507,322**	**-**	**276,311,055,852**
Akumulasi penyusutan/ *Accumulated depreciation*					
Bangunan/ *Buildings*	9,397,212,123	2,026,760,411	-	-	11,423,972,534
Mesin & peralatan kantor/ *Equipment*	77,451,790,820	16,226,817,728	10,017,465,925	-	83,661,142,623
Kendaraan/ *Vehicles*	4,246,216,221	635,003,580	1,297,231,982	-	3,583,987,819
Jumlah/ *Total*	**91,095,219,164**	**18,888,581,719**	**11,314,697,907**	-	**98,669,102,976**
Nilai Buku/ *Book value*	**163,899,351,330**				**177,641,952,876**

10. Aset tetap (lanjutan) / **10. *Fixed assets (continued)***

	31 Desember 2014	31 Desember 2013	
Rekonsiliasi Aset tetap :			*Fixed Assets reconciale :*
Penambahan aset tetap			*Increase of fixed assets*
Aset tetap	28,982,917,561	26,686,317,135	*Fixed assets*
Aset dalam proses	228,052,323,431	5,964,675,545	*Assets in progress*
Jumlah	**257,035,240,992**	**32,650,992,680**	*Total*
Penjualan Aset Tetap:			*Sales of Fixed Assets:*
Harga jual	22,592,249	323,078,315	*At Cost*
Nilai Buku	3,342,249	19,809,415	*Book value*
Keuntungan (kerugian)	**19,250,000**	**303,268,900**	***Gain (losses)***

Perincian pos tanah dan bangunan dalam penyelesaian / *The details of Land and buildings in progress*

Perkiraan	Persentase penyelesaian / Percentage of completion	Akumulasi Biaya/ Accumulated cost	Estimasi Penyelesaian/ Estimated completion	*Description*
31 Desember 2014				***December 31, 2014***
Tanah dalam penyelesaian :				*Land under construction :*
- Capem Bagan Batu	100.00%	2,804,350,000	31-May-15	*Capem Bagan Batu* -
Bangunan dalam penyelesaian :				*Buildings under construction :*
- Gedung Dang Merdu Kantor Pusat	95.00%	225,912,078,496	31-Jul-15	*Dang Merdu Buildings* -
- Syariah Capem Duri	0.00%	3,030,000,000	31-Jul-15	*Syariah Capem Duri* -
- Capem Cikitsu Botania	95.00%	1,570,954,268	28-Feb-15	Capem Cikitsu Botania -
- Capem Tangkerang	95.00%	4,189,290,250	28-Feb-15	Capem Tangkerang -
Jumlah		**237,506,673,014**		*Total*
31 Desember 2013				***December 31, 2013***
Tanah dalam penyelesaian :				*Land under construction :*
- Capem Bagan Batu	100.00%	2,804,350,000	31-Dec-14	*Capem Bagan Batu* -
Bangunan dalam penyelesaian :				*Buildings under construction :*
- Dang Merdu	62.65%	6,340,044,442	31-Dec-14	*Dang Merdu* -
- Cabang Pasir Pangaraian	2.60%	308,663,641	31-Dec-14	*Cabang Pasir Pangaraian* -
- Cabang Siak Sri Indrapura	0.00%	1,291,500	31-Dec-14	*Cabang Siak Sri Indrapura* -
Jumlah		**9,454,349,583**		*Total*

Bank memiliki aset berupa bangunan Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri yang diperuntukkan sebagai kantor pusat Bank. Sampai dengan posisi 31 Desember 2014, Menara tersebut telah selesai dibangun namun belum dilakukan Berita Acara Serah Terima Bangunan sehingga belum dilakukan pembayaran atas Bangunan tersebut (turn key system) seperti yang disyaratkan dalam Perjanjian Pemborongan. Kemajuan prestasi pekerjaan sampai dengan posisi 31 Desember 2014 telah mencapai 100%.

Bank has assets in the form of Dang Merdu Bank Riau KepriTower it shall be appropriated as the Bank central office. As of December 31, 2014, that construction of the tower was finished to build, but not yet to provided in the Minutes of Work Transfer and the Bank has not to paid for that tower (turn key system) was like term in the Agreement Letter of work contract of that tower. The progress of the work achievement position as December 31, 2014 has reached 100%.

Berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Gedung Menara Dang Merdu Nomor 65/PKS/2010 dan 418/WK/KONT/WB/2010 tanggal 26 Juli 2010 antara Bank dengan PT Waskita Karya (Persero) dijelaskan bahwa PT Waskita Karya (Persero) telah menerima pekerjaan dari Bank untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Gedung Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri.

Based on the Agreement Letter of Work Contract for the Building Construction of Tower Dang Merdu Number 65/PKS/2010 and 418/WK/KONT/WB/2010 dated the 26th of July 2010 between Bank and PT Waskita Karya (Persero), it is explained that PT Waskita Karya (Persero) has received the work from the Bank to perform the construction work of Building Tower Dang Merdu of Bank Riau Kepri.

Pembangunan dilakukan dengan sistem Rancang Bangun sesuai dengan spesifikasi teknis, gambar dan ketentuan lainnya termasuk interior, landscape dan bangunan penunjang sesuai dengan dokumen penawaran. Metode pembiayaan yang digunakan dengan cara membiayai proyek terlebih dahulu sampai dengan selesainya proyek (100%) dan dananya ditanggung dulu oleh pelaksana

The construction was build with Building Design system in accordance with the specification of techniques, drawing and other provisions, including the interior, landscape supportive buildings pursuant to the offering documents. The financing method used is by means of funding the project first until the completion of the project (100%) and the funds shall be first

konstruksi yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan untuk ditagihkan sekaligus kepada Bank.

borne by the construction performer, which then to be provided in the Minutes of Work Transfer to be charged to the Bank.

10. Aset tetap (lanjutan)

10. *Fixed assets (continued)*

Bank berkewajiban untuk membayar sekaligus seluruh tagihan berdasarkan BASTP dari Kontraktor (Turn key system). Jangka waktu pelaksanaan adalah 540 hari kalender dari tanggal perjanjian atau 17 Januari 2012. Jumlah harga borongan untuk pekerjaan tersebut sebesar Rp214.969.000.000 termasuk PPN 10%. Untuk menjamin pembayaran tersebut, Bank mengeluarkan surat sanggup (Promissory Note) sebesar 100% dari harga borongan dengan jatuh tempo tanggal 12 Februari 2012.

The Bank is obliged to pay as a whole all the charges based on BASTP from the Contractor (Turn-key system). The length of time for the implementation is 540 calendar days from the date of agreement or on the 17th of January 2012. The amount of contract price for the work thereof is Rp214.969.000.000, including VAT 10%. In order to guarantee the payment thereof, the Bank sdhall issue Promissory Note 100% of the contract price with mature date on the 12th of February 2012.

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima I Menara Dang Merdu tanggal 23 Mei 2014 pihak PT Waskita Karya (Persero) Tbk. tetap bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan yang harus dipenuhi sesuai keputusan BANI Nomor: 525/V/ARB-BANI/2013 tanggal 5 Maret 2014 dan Kesepakatan Pelaksanaan Putusan BANI Nomor 82/PKS/2014 tanggal 23 Mei 2014. Bank telah membayar kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk. sebesar 95% dari harga pekerjaan sebesar Rp.214.969.000.000 yaitu Rp204.220.550.000; dan sisa 5% merupakan jaminan pemeliharaan dan dibayarkan pada saat serah terima pekerjaan. Berdasarkan surat Direksi bank kepada Dewan Komisaris No. 109A/DIR/2015 tanggal 10 Maret 2015 perihal Laporan perkembangan terakhir penyelesaian gedung Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri bahwa sampai saat ini pelaksanaan pekerjaan masih terus berlanjut dalam rangka penyelesaian seluruh pekerjaan sesuai putusan BANI.

Based Handover I Dang Merdu Tower dated May 23, 2014 the Waskita Karya (Persero) Tbk. remains responsible for completing the work that must be met in accordance BANI decision No. 525 / V / ARB-BANI / 2013 dated March 5, 2014 and the Implementation Agreement BANI Decision No. 82 / MCC / 2014 dated May 23, 2014. The Bank has paid to PT Waskita (Persero) Tbk. amounting to 95% of the price of the work of Rp.214.969.000.000 ie Rp204.220.550.000; and the remaining 5% is a guarantee of maintenance and paid upon handover. Based on the bank's letter to the Board of Directors No. 109A / DIR / 2015 dated March 10, 2015, concerning the last progress report Menara Dang Merdu Building completion Bank Riau Riau that until today the implementation of the work has been continued in order to completion of the entire work in accordance BANI decision.

Aset tetap berupa gedung, kendaraan dan inventaris tertentu lainnya diasuransikan atas kemungkinan risiko kebakaran, kecelakaan dan risiko lain. Besarnya nilai pertanggungan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp.92.807.512.100 dan Rp82.368.341.299 diasuransikan kepada PT Askrida, Bumiputera, Bumida, Tripakarta, Bumiputramuda, Jasindo, Parolamas dan Takaful. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut telah memadai untuk menutup kemungkinan terjadinya kerugian dari kebakaran dan gempa bumi.

Fixed asset in the from of buildings, vehicles and other certain inventories are insured for the risks of fire, accident, and other risks. The amount of security as December 31, 2014 and December 31, 2013 respectively amounting to Rp.92.807.512.100 and Rp82.368.341.299 insured to PT Askrida, Bumiputera, Jasindo, Bumida, Tripakarta, Bumiputramuda, Parolamas and Takaful. Management believes that security insurance adeguated to cover possible losses arising from fired and earthquake.

Beban penyusutan aset tetap dan inventaris per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp18.386.810.246 dan Rp18.888.581.719,-

Depreciation as December 31, 2014 and December 31, 2013 respectively amounting to Rp18.386.810.246 and Rp18.888.581.719,-

11. Aset pajak tangguhan

11. *Deferred tax assets*

Pajak tangguhan terjadi disebabkan adanya perbedaan waktu (temporary difference) dan metode pengakuan penghasilan dan beban tertentu menurut akuntansi dengan ketentuan perpajakan.

The Deffered tax created incause of temporary differences and Income recognition method and certain expensess to follow accounting by tax determination.

Aset pajak tangguhan (deferred tax assets) adalah jumlah pajak penghasilan terpulihkan (recoverable) pada periode mendatang sebagai akibat adanya "perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian". Jika beban yang diakui secara fiskal lebih kecil dari beban yang diakui secara komersil (koreksi beda waktu positif) maka selisih tersebut akan mengakibatkan adanya pengakuan beban pajak yang lebih kecil secara komersil pada masa yang akan datang, sehingga selisih tersebut akan menghasilkan "Aset pajak tangguhan".

The deferred tax assets is total income taxs recoverable in the future period such result of "temporary difference that can be reduce from the balance of loss Conpensation" If expense recognized by fiscal way less than the sum charge in comercial way (correction of positif difference time) then difference mentioned will effect tax expense recognition more less in commercial way in the future period, so that difference mentioned will produce "Deferred tax assets".

Liabilitas pajak tangguhan (deferred tax liabilities) adalah jumlah pajak penghasilan terutang (payable) untuk periode mendatang sebagai akibat adanya "perbedaan temporer" kena pajak. Jika beban yang diakui secara fiskal lebih besar dari beban yang diakui secara komersil (koreksi beda waktu negatif) maka selisih tersebut akan mengakibatkan adanya pengakuan beban pajak yang lebih besar

The deferred tax liabilities is the amount of income tax payable for the future periode as the effect of "temporary difference" of taxable income. If expense acknowledge in fiscal way fiscal higher than the sum charge in commercial way (correction of negative difference time negatif) so the difference mentioned will result tax expense recognition higherin the future period, so that

secara komersil pada masa yang akan datang, sehingga selisih tersebut akan menghasilkan "Liabilitas pajak tangguhan".

difference mentioned will produce" deffered tax liabilities".

11. Aset pajak tangguhan (lanjutan)

Saldo aset pajak tangguhan per 31 Desember 2014 dan 2013 sebesar Rp.17.100.724.094 dan Rp23.367.206.668. Perhitungan pajak tangguhan dilakukan pada akhir tahun periode.

11. *Deferred tax assets (continued)*

Deffered tax s December 31, 2014 and 2013 amounting to Rp.17.100.724.094 and Rp23.367.206.668.The deffered tax shall be calculated on end of the year.

Perhitungan pajak tangguhan sebagai berikut :

Calculated deferred tax assets is follow :

Per 31 Desember 2014 / ***As of December 30. 2014***

Keterangan/ *Dercription*	Beda Temporer/ *Temporery difference*	Prosentase/ *Prosentation*	Pajak Tangguhan/ *Deferred Tax*
• Cadangan kerugian penurunan nilai/ Allowance for impairment losses			
Penempatan pada bank lain/ *Placement with Other Bank*	1,269,391,389	25%	317,347,847
Kredit yang diberikan / *Loans*	(63,181,901,085)	25%	(15,795,475,271)
Penyertaan/ *Invesment*	1,155,450,000	25%	288,862,500
• Cadangan jasa produksi/ *Provision for employee bonuses*	100,114,089,890	25%	25,028,522,472
• Beban imbalan pasca kerja/ *Employe benefits Expenses*	23,940,931,485	25%	5,985,232,871
• Perubahan nilai wajar efek-efek dan obligasi pemerintah tersedia untuk dijual/ *Net changes in fair value of available-for-sale Marketable securities and Government Bonds*	5,104,934,698	25%	1,276,233,675
Jumlah/ *Total*	**68,402,896,377**		**17,100,724,094**

Per 31 Desember 2013 / ***As of December 30. 2013***

Keterangan/ *Description*	Beda Temporer/ *Temporery difference*	Prosentase/ *Prosentation*	Pajak Tangguhan/ *Deferred Tax*
• Cadangan kerugian penurunan nilai/ Allowance for impairment losses			
Penempatan pada bank lain/ *Placement with Other Bank*	1,546,243,045	25%	386,560,761
Kredit yang diberikan / *Loans*	(496,998,956)	25%	(124,249,739)
Penyertaan/ *Invesment*	1,155,450,000	25%	288,862,500
• Cadangan jasa produksi/ *Provision for employee bonuses*	84,624,055,254	25%	21,156,013,814
• Perubahan nilai wajar efek-efek dan obligasi pemerintah tersedia untuk dijual/ *Net changes in fair value of available-for-sale Marketable securities and Government Bonds*	6,640,077,328	25%	1,660,019,332
Jumlah/ *Total*	**93,468,826,671**		**23,367,206,668**

12. Aset lain-lain / ***12. Other assets***

Akun ini terdiri dari : / *This account consist of :*	31 Desember 2014	31 Desember 2013	
Pendapatan yang akan diterima : / *Revenue accrual :*			
- Penempatan pada bank lain / *Bank of placement interest*	9,703,002,827	5,663,614,687	
- Bunga kredit yang diberikan / *Loans interest*	101,182,309,194	85,082,836,445	
- Pendapatan provisi dan fee / *Privision / fee*	396,641,649	1,030,852,288	
- Piutang pendapatan bagi hasil / *Income receivable for results*	8,035,399	5,750,000	
Pajak lebih bayar tahun pajak 2011 / Overpayment tax 2011 tax year	12,313,280,291	-	
Uang jaminan yang dibayar / Paid guarantee	2,000,000,000	2,000,000,000	
Premi asuransi dibayar dimuka / *Prepaid Insurance*	3,609,797,508	3,321,903,962	
Sewa dibayar dimuka / *Prepaid rent*	13,920,473,694	12,075,438,575	
Persekot pembelian / *Prepaid purchasing*	-	12,065,000	
Pajak kendaraan bermotor / *Vehicle taxes*	47,482,872	52,140,969	

Pajak Bumi dan Bangunan	-	3,203,955	*PBB*
Iuran pensiun dibayar dimuka	-	969,593,983	*Prepaid contribution pension*

12. Aset lain-lain (lanjutan) / ***12. Other assets (continued)***

Rehabilitasi	1,858,211,817	780,499,078	*Rehabilitation*
Administrasi dibayar dimuka	571,592,410	35,469,042	*Prepaid administration*
Pemeliharaan dibayar dimuka	51,280,849	129,529,799	*Prepaid Maintenance*
Biaya restribusi dibayar dimuka	1,564,889,917	24,645,481	*Prepaid restribution*
Beban yang ditangguhkan	2,888,321,232	4,089,376,387	*Deferred expenses*
Persekot biaya	1,544,376,555	1,517,099,708	*Prepaid to calcul. with expenses*
Persediaan alat tulis dan lainnya	6,366,430,063	5,616,063,493	*Inventory of stationery and others*
Selisih kas ATM dalam penyelesaian	362,060,000	242,200,000	*ATM in progress*
Nota-nota debet dalam penyelesaian	320,487,929	408,728,492	*Debet note in progress*
Pembayaran lainnya dalam penyelesaian y	55,666,350	54,406,350	*Others payment in progress*
Pembayaran bunga berjalan obligasi yadip	118,500,000	154,948,055	*Paid of obligation current interest*
Tagihan kepada Pemerintah Provinsi Riau	1,658,756,088	-	*Claims to provincial government*
Tagihan principle acqurie	57,516,760,670	28,238,629,526	*Billing of principle acquire in progress*
Tagihan pembayaran affinity kartu kredit dalam penyelesaian	367,234,054	277,129,534	Billing of credit card affinity payment in progress
Rekening perantara valuta / devisa	-	-	Forex trading account
Pos-pos debet dalam penyelesaian lainnya	10,233,557,481	13,726,465,350	*Others debet account in progress*
Jumlah	**228,659,148,848**	**165,512,590,159**	*Total*

Pos debet dalam penyelesaian merupakan pengeluaran untuk pengadaan dan pembelian peralatan dan perabot kantor, komputer, perencanaan dan rehabilitasi gedung kantor dan bea balik nama, pemasangan, perangkat jaringan dan instalasi, mesin atm, alat tulis kantor, yang masih dalam proses penyelesaian.

Heading debit in progress represents expenditure for procurement and purchase of equipment and office furniture, computers, planning and rehabilitation of office buildings and transfer tax, installation, network devices and installation, atm machine, stationery, which is still in the process of completion.

13. Liabilitas segera / ***13. Liabilities payable on demand***

Akun ini terdiri dari :	31 Desember 2014	31 Desember 2013	*This account consist of :*
Bunga deposito	18,785,659,509	5,331,769,866	*Deposit interest*
Kewajiban perpajakan	16,075,340,154	43,206,952,621	*Taxes liability*
Kiriman uang dan inkaso	192,449,906,174	778,682,034,355	*Clearing and RTGS*
Setoran-setoran lain	92,373,049,716	78,209,279,094	*Others prepaid deposits*
Beban masih harus dibayar	59,734,449,988	45,282,092,307	*Accrued expenses*
Tantiem pengurus	25,028,522,473	21,156,013,813	*Management Tantiem*
Jasa produksi karyawan	100,114,089,889	84,624,055,254	*Bonuses for employee*
Bunga obligasi	11,844,444,444	11,844,444,444	*Bond interest*
Bagi hasil masih harus dibagikan	-	2,156,114	*Nisbah of shared income*
Iuran pensiun masih harus dibayar (iuran pasti)	-	969,593,983	*prepaid contribution pension (contribution plan)*
Liabilitas segera lainnya	324,331,663,088	189,078,337,313	*Others current liabilities*
Jumlah	**840,737,125,435**	**1,258,386,729,165**	*Total*

Pada laporan keuangan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 pembebanan Tantiem Pengurus dan Jasa Produksi Karyawan, dibukukan sebagai beban pada laporan laba rugi, hal tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 24 (Revisi) yang mengatur tentang "Imbalan Kerja" bahwa bagian atau hak karyawan atau pengurus harus dibebankan pada tahun berjalan.

In the financial report as of December 31, 2014 and December 31, 2013 the Tantiem of Management's and Employees bonus expense was recorded as expense of work compensation at the income statement, that was done based on the regulation in the Statement of Financial Accounting Standard No 24 (Revised) which regulate about "Work Compensation" that employee's share sand rights have to be charged to the current year.

Liabilitas kepada pemerintah merupakan Liabilitas bank sebagai bank persepsi dalam rangka penerimaan pajak dan bukan pajak dari wajib pajak / wajib setor, yang secara periodik dilimpahkan ke rekening kas negara di Bank Indonesia, serta penampungan dana-dana lain yang segera disetorkan.

Liability to the government is the liability of the bank as the perception bank in the framework of tax and nontax revenues by the taxpayer/deposit obligation periodically shall be transferred to the state cash account in Bank Indonesia, as well as the accommodation of other funds immediately to be deposited.

Liabilitas lainnya merupakan titipan kiriman uang yang akan

Other liability is deposited money delivery to be forwarded from

diteruskan dari bank lain, titipan nasabah, titipan gaji dan pensiun yang akan dibayar.

other banks, customer deposits, and salary and pension deposits to be paid.

13. Liabilitas segera (lanjutan)

13. *Liabilities payable on demand (continued)*

Nilai Liabilitas segera lainnya pada tanggal 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp.324.331.663.088 dan Rp.189.078.337.313 yang dapat dirinci sebagai berikut:

Other immediate obligations as of December 31, 2014 and December 31, 2013 respectively are Rp.324.331.663.088 and Rp.189.078.337.313 as follows :

	31 Desember 2014	31 Desember 2013	
Rekening giro yang ditutup	109,001,471	103,101,955	*Current account has been closed*
Rekening tabungan yang ditutup	117,960,313	435,324,967	*Saving account has been closed*
Setoran jaminan tunai jatuh tempo	22,347,276,085	20,595,532,480	*Cash collateral in due dated*
Penampung SPMU	158,706,557,666	89,216,379,042	*Receving SPMU*
Setoran kredit kelolaan	16,550,000	16,550,000	*Payment credit process*
Warkat kredit kliring	14,172,293,794	7,784,361,863	*Lofty Credit clearing*
Kiriman uang dengan RTGS	31,243,768,699	6,469,557,439	*Clearing with RTGS*
Liabilitas principle aqcuirer	74,569,992,365	40,158,276,063	*Liability of priciple aqcurier*
Setoran tagihan affinity kartu kredit	810,720,747	1,042,994,903	*Deposit from credit card Affinity*
Liabilitas transaksi telkomsel	125,742,904	59,136,558	*Payable transaction telkomsel*
Liabilitas segera lainnya	22,111,799,044	23,197,122,045	*Others current liabilities*
Jumlah	**324,331,663,088**	**189,078,337,313**	*Total*

14. Simpanan Nasabah

14. *Deposit from costumers*

Akun ini terdiri dari :	31 Desember 2014	31 Desember 2013	*This account consist of :*
Pihak berelasi	8,588,629,466,051	5,651,640,066,647	*Related parties*
Pihak ketiga	8,338,661,449,819	7,991,067,785,674	*Unrelated parties*
Jumlah	**16,927,290,915,870**	**13,642,707,852,322**	*Total*
Simpanan terdiri dari :			*This savings consist of :*
Giro	7,099,934,117,408	7,148,856,694,115	*Current account*
Tabungan	4,316,428,259,235	4,579,235,307,226	*Savings*
Deposito berjangka	5,510,928,539,227	1,914,615,850,979	*Time deposit*
Jumlah	**16,927,290,915,870**	**13,642,707,852,322**	*Total*

Berdasarkan Undang-undang No.24 tanggal 22 September 2004, efektif sejak tanggal 22 September 2005, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dibentuk untuk menjamin Liabilitas tertentu bank-bank umum berdasarkan program penjaminan yang berlaku. Ketentuan program penjaminan yang terakhir adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008. Pembayaran premi LPS oleh bank tahun berjalan lihat catatan No. 39.

Based on the Laws No. 24 dated 22nd of September 2004 effective as of the 22nd of September 2005, Deposit Guarantor Institution (LPS/Lembaga Penjamin Simpanan) shall be established to guarantee certain liabilities of public banks based on the prevailing guaranteeing program. The latest provision of the guaranteeing program is based on the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 66 year 2008 dated the 13th of October 2008.

Saldo deposito nasabah Bank (DPK) yang diblokir yang digunakan sebagai jaminan pinjaman sebesar Rp10.465.000.000 pada 31 Desember 2014 dan Rp18.357.516.600 pada 31 Desember 2013.

The balance of placement deposits at other bank blocked for the guarantee of loan amounted to Rp10.465.000.000 at December 31, 2014 and Rp18.357.516.600 at December 31, 2013.

A. Giro (simpanan)

A. *Demand deposits*

Akun ini terdiri dari :	31 Desember 2014	31 Desember 2013	*This account consist of :*
Konvensional			***Conventional***
Pihak berelasi			*Related parties*
Giro non bank - sektor pemerintahan	5,340,611,243,897	4,699,628,550,152	*Current account with non bank-government sector*
Giro non bank- sektor bukan pemerintah	4,909,349,972	8,644,697,238	*Current account with non bank- non government sector*
Jumlah	**5,345,520,593,869**	**4,708,273,247,390**	*Total*
Pihak ketiga			*Unrelated parties*
Giro non bank-sektor perorangan dan lembaga pemerintah	1,713,902,706,578	2,381,500,179,412	*Current account with non bank-personal and government sector*
Giro dari kredit yang diberikan	113,301,553	1,065,492,697	*Current account from loans*

Jumlah	**1,714,016,008,131**	**2,382,565,672,109**	*Total*
Total	**7,059,536,602,000**	**7,090,838,919,499**	*Total*

14. Simpanan Nasabah (lanjutan)

A. Giro (simpanan) (lanjutan)

14. *Deposit from costumers (continued)*

A. Demand deposits (continued)

Syariah			**Sharia**
Pihak ketiga			*Unrelated parties*
Giro wadiah non bank-sektor swasta/ perorangan dan pemerintah	40,397,515,408	58,017,774,617	*Current account with Wadiah non bank-private/personal, government.*
Jumlah	**40,397,515,408**	**58,017,774,617**	***Total***
Jumlah	**7,099,934,117,408**	**7,148,856,694,116**	***Total***

- Giro sektor pemerintah Pemda Tingkat I dan II

Deposits of government sector of Government level I and II •

Konvesional	31 Desember 2014	31 Desember 2013	***Conventional***
Provinsi Riau	803,709,674,617	202,525,684,080	*Riau province*
Provinsi Kepulauan Riau	57,214,676,122	-	*Riau Island province*
Kota Pekanbaru	16,853,099,599	217,933,990,300	*City of Pekanbaru*
Kabupaten Kampar	280,043,286,171	271,198,992,261	*Kampar regional government*
Kabupaten Bengkalis	1,373,364,051,797	1,377,246,213,640	*Bengkalis regional government*
Kabupaten Indragiri Hulu	153,233,608,933	214,277,030,872	*Indragiri Hulu regional government*
Kabupaten Indragiri Hilir	445,188,308,770	358,945,207,944	*Indragiri Hilir regional government*
Kabupaten Siak Sri Indrapura	554,954,464,200	681,360,476,043	*Siak Sri Indrapura government*
Kota Dumai	98,032,793,898	101,979,995,429	*City of Dumai*
Kabupaten Pelalawan	394,835,043,049	429,695,460,479	*Pelalawan regional government*
Kabupaten Rokan Hulu	28,591,287,043	22,946,220,776	*Rokan Hulu regional government*
Kabupaten Rokan Hilir	673,653,556,575	80,727,200,731	*Rokan Hilir regional government*
Kabupaten Kuantan Singingi	148,253,528,512	172,279,805,462	*Kuantan Singingi government*
Kabupaten Bintan	1,805,510,700	191,083,148	*Bintan regional government*
Kota Batam	61,382,889,798	16,679,898,568	*City of Batam*
Kabupaten Karimun	25,830,936,211	67,824,693,046	*Karimun regional government*
Kabupaten Natuna	13,418,744,783	9,782,159,032	*Natuna regional government*
Kota Tanjung Pinang	71,410,180,660	220,493,979,416	*City of Tanjung Pinang*
Kabupaten Kep. Meranti	133,589,991,768	200,423,525,857	*Meranti Island regional government*
Kabupaten Lingga	3,043,183,571	50,910,326,797	*Lingga regional government*
Kabupaten Anambas	2,202,427,120	2,206,606,271	*Anambas regional government*
Sub jumlah	5,340,611,243,897	4,699,628,550,152	*Sub total*
Sektor non Bank, swasta/perorangan	1,718,925,358,103	2,391,210,369,347	*Sector non Bank, private/ personal*
Sub jumlah	**7,059,536,602,000**	**7,090,838,919,499**	*Sub total*
Syariah			***Sharia***
Lembaga Pemerintah	11,073,315,215	25,391,017,899	*Government institution*
Perusahaan	13,764,958,266	20,137,462,969	*The company*
Yayasan, Badan sosial dan Ormas	15,338,160,079	9,258,125,320	*Foundation, Social Institution and Ormas*
Koperasi	78,330,081	53,696,083	*Cooperation*
Perorangan	139,243,419	323,003,920	*Individual*
Sektor swasta lainnya	3,508,348	2,854,468,426	*Other private sector*
Sub jumlah	**40,397,515,408**	**58,017,774,617**	*Sub total*
Jumlah	**7,099,934,117,408**	**7,148,856,694,116**	*Total*

Tingkat suku bunga giro (dana Pihak ketiga) per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar 0,50% s/d 3,65% dan 0,00% s/d 3,65% untuk konvensional. Sedangkan untuk syariah masing-masing sebesar 0,75% s/d 3% dan 0,75% s/d 3% per tahun.

Current account interest rate per annum in Rupiah at as of December 31, 2014 and December 31, 2013 respectively are 0,50% s/d 3,65% and 0,00% up to 3,65% for conventional. Meanwhile for sharia respectively rate are 3,65% s/d 4,32% and 0,75% up to 3% per annum.

Rincian giro berdasarkan mata uang

Current account based on foreign currency

Mata uang	31 Desember 2014	31 Desember 2013	*Mata uang asing*
USD	11,314,964,609	69,410,384,450	*USD*
SGD	1,995,117,089	1,677,675,559	*SGD*
IDR	7,086,624,035,710	7,077,768,634,106	*IDR*

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2014 dan 2013
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years ended
December 31, 2014 and 2013
(Expressed in fully Rupiah, unless otherwise stated)

Jumlah	**7,099,934,117,408**	**7,148,856,694,116**	*Total*

14. Simpanan Nasabah (lanjutan) / **14. *Deposit from costumers (continued)***

B. Tabungan (simpanan) / **B. *Savings***

Akun ini terdiri dari :	31 Desember 2014	31 Desember 2012	*This account consist of :*
Konvensional:			***Conventional***
Pihak berelasi			*Related parties*
Tabungan Simpeda	5,239,915,235	950,787,473	*Simpeda*
Tabungan Sinar	4,017,675,735	3,689,666,834	*Sinar*
Jumlah	9,257,590,970	4,640,454,307	*Total*
Pihak ketiga			*Unrelated parties*
Tabungan Simpeda	794,655,040,466	915,873,526,960	*Simpeda*
Tabungan Sinar	3,085,793,023,706	3,261,515,018,148	*Sinar*
Tabungan Haji Dhuha	8,539,920,030	10,204,660,647	*Dhuha Hajj Saving*
Tabunganku	9,455,312,060	7,778,968,472	*Mysaving*
Jumlah	3,898,443,296,262	4,195,372,174,227	*Total*
Jumlah tabungan konvensional	**3,907,700,887,232**	**4,200,012,628,533**	*Total conventional savings*
Syariah :			***Sharia***
Pihak berelasi			*Related parties*
Tabungan Sinar Syariah	652,613,037	479,502,681	*Sinar Sharia Saving*
Tabungan Ib Dhuha	10,200,000	10,200,000	*Ib Dhuha Saving*
Jumlah	662,813,037	489,702,681	*Total*
Pihak ketiga			*Unrelated parties*
Tabungan Sinar Syariah	352,507,704,663	325,696,339,609	*Sinar Sharia Savings*
Tabungan Ib Dhuha	55,556,854,303	53,036,636,402	*Ib Dhuha Saving*
Jumlah	408,064,558,966	378,732,976,012	*Total*
Jumlah tabungan syariah	**408,727,372,003**	**379,222,678,693**	*Total sharia savings*
Jumlah tabungan	**4,316,428,259,235**	**4,579,235,307,226**	*Total*

Tingkat suku bunga tabungan (dana Pihak ketiga) pada 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar 0,25% s/d 5% dan 0,05% s/d 5% untuk konvensional. Sedangkan untuk syariah ratenya masing-masing sebesar 2,07% s/d 3,37% dan 3,16% s/d 3,59%.

Savings interest rate per annum in December 31, 2014 and December 31, 2013 respectively rate are 0,25% to 5% and 0,05% to 5% for conventional. Meanwhile for sharia respectively rate are 2,07% to 3,37% and 3,16% to 3,59%.

C. Deposito berjangka (simpanan) / **C. *Time deposits***

Akun ini terdiri dari :	31 Desember 2014	31 Desember 2013	*This account consist of :*
Konvensional			***Conventional***
a. Berdasarkan mata uang			*a. Based on currency*
Rupiah			***Rupiah***
Pihak berelasi	3,233,176,083,175	938,224,492,270	*Related parties*
Pihak ketiga	2,053,247,181,922	822,340,617,032	*Unrelated Party*
Jumlah	5,286,423,265,097	1,760,565,109,302	*Total*
Mata uang asing			***Foreign Currency***
Pihak berelasi	12,385,000	12,170,000	*Related parties*
Pihak ketiga	3,972,893,658	4,404,105,977	*Unrelated Party*
Jumlah	3,985,278,658	4,416,275,977	*Total*
Jumlah	5,290,408,543,755	1,764,981,385,279	*Total*
Syariah			***Sharia***
Pihak berelasi :			*: Related parties*
Deposito Mudharabah sektor swasta/perorangan	2,500,000,000	500,000,000	*Time deposits Mudarabah for non private / personal sector*
Pihak ketiga :			*: Unrelated parties*
Deposito Mudharabah sektor swasta/perorangan	91,719,995,472	79,634,465,700	*Time deposits Mudarabah for non private / personal sector*
Deposito Mudharabah sektor	126,300,000,000	69,500,000,000	*Time deposits Mudharabah for*

lembaga pemerintah			*goverment institution sector*
Jumlah	220,519,995,472	149,634,465,700	*Total*
Jumlah	**5,510,928,539,227**	**1,914,615,850,979**	*Total*

14. Simpanan Nasabah (lanjutan) / **14. *Deposit from costumers (continued)***

C. Deposito berjangka (simpanan) (lanjutan) / ***C. Time deposits (continued)***

Konvensional			***Conventional***
1 bulan	3,620,264,042,711	1,300,613,484,014	*1 month*
3 bulan	325,802,152,047	224,497,079,150	*3 months*
6 bulan	242,912,629,896	197,057,895,223	*6 months*
12 bulan	1,096,244,349,535	41,211,836,292	*12 months*
12 bulan lebih	5,185,369,566	1,601,090,600	*more than 12 months*
Jumlah	5,290,408,543,755	1,764,981,385,279	*Total*
Syariah			***Sharia***
Berdasarkan jangka waktu			*Based on time period*
1 bulan	160,901,188,472	97,933,558,700	*1 month*
3 bulan	22,466,440,000	25,176,640,000	*3 months*
6 bulan	20,873,567,000	14,458,567,000	*6 months*
12 bulan	16,278,800,000	12,065,700,000	*12 months*
Jumlah	220,519,995,472	149,634,465,700	*Total*
Jumlah deposito berjangka	**5,510,928,539,227**	**1,914,615,850,979**	*Total time deposit*
Total simpanan	**16,927,290,915,870**	**13,642,707,852,322**	*Grand total deposit*

- Deposito sektor pemerintah Pemda Tingkat I dan II / *Government sector Time Deposits level I and II* -

	31 Desember 2014	31 Desember 2013	
Provinsi Riau	2,500,000,000,000	500,000,000,000	*Provinsi Riau*
Provinsi Kepulauan Riau	5,664,315,000	-	*Provinsi Kepulauan Riau*
Kota Pekanbaru	75,000,000,000	25,000,000,000	*Kota Pekanbaru*
Kabupaten Pelalawan	50,000,000,000	-	*Kabupaten Pelalawan*
Kabupaten Indragiri Hilir	2,304,684,856	582,992,270	*Kabupaten Indragiri Hilir*
Kabupaten Indragiri Hulu	25,502,083,320	-	*Kabupaten Indragiri Hilir*
Kabupaten Siak Sri Indrapura	300,000,000,000	150,000,000,000	*Kabupaten Siak Sri Indrapura*
Kota Dumai	45,000,000,000	45,000,000,000	*Kota Dumai*
Kabupaten Rokan Hilir	100,000,000,000	100,000,000,000	*Kabupaten Rokan Hilir*
Kabupaten Rokan Hulu	50,000,000,000	30,000,000,000	*Kabupaten Rokan Hulu*
Kabupaten Natuna	-	10,000,000,000	*Kabupaten Natuna*
Kota Tanjung Pinang	400,000,000	45,000,000,000	*Kota Tanjung Pinang*
Kota Batam	3,100,000,000	-	*Kota Batam*
Kabupaten Kepulauan Meranti	50,000,000,000	-	*Kabupaten Kepulauan Meranti*
Sub jumlah	3,206,971,083,176	905,582,992,270	*Sub total*
Sektor non Bank, swasta/perorangan	2,083,437,460,579	859,398,393,009	*Sector non Bank, private/ personal*
Sub jumlah	**5,290,408,543,755**	**1,764,981,385,279**	*Sub total*
Syariah			***Sharia***
Sektor pemerintah (kemenag)	126,300,000,000	69,500,000,000	*Goverment institution sector*
Sektor swasta lainnya	94,219,995,472	80,134,465,700	*Other private sector*
Sub jumlah	**220,519,995,472**	**149,634,465,700**	*Sub total*
Jumlah	**5,510,928,539,227**	**1,914,615,850,979**	*Total*

Tingkat suku bunga deposito berjangka (dana Pihak ketiga) pada 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar 0,10% s/d 11,25% dan 0,60% s/d 9,5% untuk konvensional, sedangkan untuk syariah masing-masing sebesar 5,17% s/d 10,01% dan 5,27% s/d 6,46%.

Time deposit interest rate per annum in Rupiah at December 31, 2014 and December 31, 2013 respectively are 0,10% up to 11,25% and 0,60% up to 9,5% for conventional. Meanwhile for sharia respectively rate are 5,17% up to 10,01% and 5,27% up to 6,46%.

Upaya dan kebijakan manajemen untuk menjaga agar deposan tetap menempatkan dananya pada Bank yaitu dengan cara memberikan suku bunga yang bersaing dengan bank lain, dengan memberikan insentif kepada nasabah yang menempatkan dananya dalam bentuk tabungan dengan program

The efforts and policies by the management in order to maintain the depositors to remain placing their funds in the bank are by means of providing interest rate competing with other banks, providing incentives to customers placing their funds in the form of saving with the program of sinat tebar milyar lottery to be

undian sinar tebar milyar yang diundi secara periodik dan menambah fasilitas layanan sehingga nasabah mendapat kemudahan bertransaksi.

allotted periodically and by adding service facilities resulting in the customers obtaining easiness in performing their transactions.

15. Simpanan dari bank lain / *Deposits from other banks*

Akun ini terdiri dari :	31 Desember 2014	31 Desember 2013	*This account consist of :*
a. Berdasarkan hubungan pihak			*a. Based on related parties*
Pihak berelasi	8,768,476,216	5,815,836,584	*Related parties with bank*
Pihak ketiga	1,801,978,020,275	1,850,882,070,049	*Unrelated parties with bank*
Jumlah	**1,810,746,496,491**	**1,856,697,906,633**	*Total*
b. Berdasarkan jenis/ hubungan			*b. Based on deposits and relationship*
Giro			*Current account*
Pihak berelasi	4,253,313,922	2,505,027,757	*Related parties with bank*
Pihak ketiga	23,801,980,772	23,190,815,529	*Unrelated parties with bank*
Sub Jumlah	28,055,294,694	25,695,843,286	*Sub total*
Tabungan			*Savings*
Pihak berelasi	4,515,162,293	3,310,808,827	*Related parties with bank*
Pihak ketiga	2,126,039,505	1,681,254,520	*Unrelated parties with bank*
Sub Jumlah	6,641,201,798	4,992,063,347	*Sub total*
Deposito			*Deposit*
Pihak berelasi	2,500,000,000	-	*Related parties with bank*
Pihak ketiga			*Unrelated parties with bank*
1 bulan	85,550,000,000	4,100,000,000	*1 month*
3 bulan	1,000,000,000	-	*3 month*
6 bulan	2,000,000,000	-	*6 month*
12 bulan	-	-	*12 month*
> 12 bulan	-	400,000,000	
Sub Jumlah	91,050,000,000	4,500,000,000	*Sub total*
Simpanan dari Pihak ketiga			*Saving from other related*
Interbank Call Money (ICM)	1,685,000,000,000	1,821,510,000,000	*Interbank Call Money*
Sub Jumlah	1,685,000,000,000	1,821,510,000,000	*Sub total*
Jumlah	**1,810,746,496,491**	**1,856,697,906,633**	*Total*

Tingkat suku bunga simpanan dari bank lain (dana Pihak ketiga) per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar 0,40% s/d 8,50% dan 0,5% s/d 8,5% per tahun.

The Interest rate of saving's of other banks (Third parties) as of December 31, 2014 and December 31, 2013 respectively are 0,40% up to 8,50% and 0,5% up to 8,5% per annun.

16. Obligasi yang diterbitkan / *Bond of issued*

Akun ini terdiri dari :	31 Desember 2014	31 Desember 2013	*This account consist of :*
Perolehan Obligasi - Diamortisasi	500,000,000,000	500,000,000,000	*Amortized of Bond - At cost*
Biaya Transaksi obligasi yang belum diamortisasi	(106,070,092)	(214,784,021)	*Unamortized of Bond transaction expenses*
Jumlah - bersih	499,893,929,908	499,785,215,979	*Total - Net*

Informasi mengenai klasifikasi dan nilai wajar obligasi yang diterbitkan diungkapkan pada Catatan 35.

Information with regards to the classification and fair value of bonds issued was disclosed in Note 35.

Obligasi I Bank Riau Kepri Tahun 2011

Pada tanggal 8 Juli 2011, Bank menerbitkan Obligasi I Bank Riau Kepri Tahun 2011 dengan nilai nominal sebesar Rp500.000.000.000. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal emisi sampai dengan tanggal jatuh tempo pada tanggal 8 Juli 2016. Tingkat bunga obligasi tetap sebesar 10,4% per tahun dan ditawarkan sebesar 100% dari nilai nominal. Wali amanat untuk penerbitan obligasi tersebut adalah PT Bank Mega, Tbk. Obligasi tersebut dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 11 Juli 2011 dan dinyatakan efektif

Bank Riau Kepri Bond I Years 2011

On July 8, 2011, the Bank issued Bank Riau Kepri years 2011 Bonds I with bond nominal value amounting to Rp500.000.000.000. This bond was issued without letter and this time period are 5 (five) since emition dated till dated of time period on July 8, 2016. The rate of bond interest are 10,4% per annum and offered to public 100% from nominal value. The trustee for that bond issued are PT Bank Mega, Tbk. That bond listed in the Indonesia Stock Exchange dated on July 11, 2011 and became effective based on Bapepam-LK Decision Letter number S-7208/PL/2011 dated on June 30

Indonesia pada tanggal 11 Juli 2011 dan dinyatakan efektif berdasarkan surat keputusan Bapepam-LK No.S-7298/BL/2011 pada tanggal 30 Juni 2011.

LK Decision Letter number S-7298/BL/2011 dated on June 30, 2011.

16. Obligasi yang diterbitkan (lanjutan)

Obligasi I Bank Riau Kepri Tahun 2011 (lanjutan)

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Bank baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Bank lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Bank yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Bank baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.C.1 Lampiran Keputusan ketua Bapepam No. KEP-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 dan Peraturan No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Bapepam-LK No. KEP-135/BL/2006 tanggal 14 Desember 2006.

Bank telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Fitch Ratings Indonesia. Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang sesuai dengan surat No. RC50/DIR/VI/2011 tanggal 23 Juni 2011, Obligasi I Bank Riau Kepri tahun 2011 telah mendapat peringkat A (idn).

Bank menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan PT Fitch, baik langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi "Afiliasi" dalam UUPM. Sesuai Peraturan Bapepam-LK No.IX.C.11, Bank akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan setiap 1 tahun sekali selama kewajiban atas efek belum lunas.

Bank dapat melakukan pembelian kembali (buyback) obligasi 1 tahun setelah tanggal penjatahan untuk sebagian atau seluruh obligasi sebelum tanggal pelunasan pokok obligasi. Bank mempunyai hak pembelian kembali obligasi tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan obligasi atau disimpan.

Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 bulan sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing bunga dimana pembayaran bunga ke-1 dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2011, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi adalah pada tanggal 8 Juli 2016.

Besarnya bunga efektif yang dibebankan ke beban bunga obligasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp52.108.713.929 dan Rp52.097.978.039, diantaranya masih terhutang sebesar Rp11.844.444.444 yang akan dibayar pada 8 Januari 2015.

16. Bond of issued (continued)

Bank Riau Kepri Bond I Years 2011 (continued)

This Bonds are not secured by specific guarantee, but secured by all of the Bank's assets, moveable and non-moveable assets, including assets that already owned and will be owned in the future in accordance with Article 1131 and 1132 of Indonesia's Civil Code.

The right of bond holder is side by side equally without any preference right towards other Bank creditors both existing now as well as in the days to come, except for the rights of Bank creditors guaranteed specially by the wealth of the Bank both the one already existing as well as those existing in days to come.

In order to meet the provision of Regulation No. IX.C.1 with Attachment by Bapepam No. KEP-42/PM/2000 dated October 27, 2000 and Regulation No. IX.C.11 with Attachment by Bapepam-LK No. KEP-135/BL/2006 dated December 14, 2006.

The Bank has performed ratings done by PT Fitch Ratings Indonesia. Based on the result of long term debt letter in accordance with the letter No. RC50/DIR/VI/2011 dated the 23rd of June 2011, Bond I of Bank Riau Kepri year 2011 has obtained rating A (idn).

The Bank emphatically stating as not having any affiliation with PT Fitch, both directly and indirectly in accordance with the definition of "Affiliation" in UUPM. In accordance with the Regulation of Bapepam-LK No.IX.C.11, the Bank shall perform rating over the Bonds issued once a year as long as the liabilities on the bond has not been paid up.

The Bank may perform buyback to the bonds 1 year after the date of allotment or part or all bonds before the date of paying up the principal of the bonds. The Bank has the right to buyback the same to be used as paying up for the bonds or to be kept by considering the laws.

The interest of the bonds shall be paid every 3 month in accordance with the date of payment for each interest whereas the payment for the first interest shall be performed on October 8, 2011, as for the last payment of the interest, which is also the due date of the bonds shall be on July 8, 2016.

The amount of effective interest rate to be charged on the interest liability of the bonds interest for the period ended on December 31, 2014 and December 31, 2013 respectively are Rp52.108.713.929 and Rp52.097.978.039, as for outstanding is Rp11.844.444.444 are will be paid on January 8, 2015.

16. Obligasi yang diterbitkan (lanjutan)

Obligasi I Bank Riau Kepri Tahun 2011 (lanjutan)

Seluruh Obligasi tersebut telah terjual kepada publik dengan rincian pemegang obligasi sampai dengan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut :

16. *Bond of issued (continued)*

Bank Riau Kepri Bond I Years 2011 (continued)

All the aforesaid Bonds have been sold to public with the details on the holder of bonds up until the month as of December 31, 2014 and December 31, 2013 is as follows:

Per 31 Desember 2014 / ***As of December 31, 2014***

No.	Pemegang Obligasi / *Bondholders Name*	%	Pemegang Rekening / *Accounts Name*	Perolehan obligasi / *Bond at cost*	Biaya transaksi obligasi / *Bond transaction cost*
1	Marviani O	0.20%	PT Bank Bukopin	1,000,000,000	212,140
2	Bank Bukopin -Treasury Operation	4.00%	PT Bank Bukopin	20,000,000,000	4,242,804
3	Iskandar Zulkarnaen R, SE	0.20%	PT Bank Bukopin	1,000,000,000	212,140
4	Nikko Indah Nusantara Dua- Reksa	0.20%	Bank Central Asia Tbk, PT	1,000,000,000	212,140
5	BCA -Treasury Departemen	10.00%	Bank Central Asia Tbk, PT	50,000,000,000	10,607,009
6	PT Bank Jabar Banten	2.40%	Bank Danamon Indonesia Tbk, PT	12,000,000,000	2,545,682
7	BPD Lampung -Dana Pensiun	0.60%	Bank Mandiri, PT - Custody	3,000,000,000	636,421
8	PT BPD Sumbar -Dana Pensiun	2.40%	Bank Mandiri, PT - Custody	12,000,000,000	2,545,682
9	BPD Kalsel -Dana Pensiun	0.60%	Bank Mandiri, PT - Custody	3,000,000,000	636,421
10	Batavia Terbatas Ultima	2.40%	Bank Mandiri, PT - Custody	12,000,000,000	2,545,682
11	BPD NTT -Dana Pensiun	2.00%	Bank Mandiri, PT - Custody	10,000,000,000	2,121,402
12	Perumpel dan Perumpeng-Dana Pensiun	5.00%	Bank Mandiri, PT - Custody	25,000,000,000	5,303,505
13	BPD Kalbar -Yayasan Dana Pensiun	0.60%	Bank Mandiri, PT - Custody	3,000,000,000	636,421
14	BPD Papua	3.00%	Bank Mandiri, PT - Custody	15,000,000,000	3,182,103
15	BPD Sumatera Utara	15.00%	Bank Mandiri, PT - Custody	75,000,000,000	15,910,514
16	BPD Jawa Tengah	4.60%	Bank Mandiri, PT - Custody	23,000,000,000	4,879,224
17	PT Asuransi Raharja	0.40%	Bank Mandiri, PT - Custody	2,000,000,000	424,280
18	BPD Kalimantan Barat	0.40%	Bank Mandiri, PT - Custody	2,000,000,000	424,280
19	PT Bank Riau -Dana Pensiun	4.00%	Bank Mandiri, PT - Custody	20,000,000,000	4,242,804
20	PT Bank Sumut -Dana Pensiun Pegawai	1.60%	Bank Mandiri, PT - Custody	8,000,000,000	1,697,121
21	Karyawan Pupuk Kujang -Dana Pensiun	0.20%	Bank Mandiri, PT - Custody	1,000,000,000	212,140
22	BPD Bali -Dana Pensiun Pegawai	1.80%	Bank Mandiri, PT - Custody	9,000,000,000	1,909,262
23	Rajawali Nusindo -Dana Pensiun	0.40%	Bank Mandiri, PT - Custody	2,000,000,000	424,280
24	BPD Sumsel dan Babel	3.60%	Bank Mandiri, PT - Custody	18,000,000,000	3,818,523
25	PT Wijaya Karya -Dana Pensiun	0.40%	Bank Mandiri, PT - Custody	2,000,000,000	424,280
26	Samudera Indonesia -Dana Pensiun	0.20%	Bank CIMB Niaga TBK, PT	1,000,000,000	212,140
27	PT Jamsostek (Persero) -JHT	6.00%	Bank CIMB Niaga TBK, PT	30,000,000,000	6,364,205
28	PT Jamsostek (Persero) - Non JHT	20.00%	Bank CIMB Niaga TBK, PT	100,000,000,000	21,214,018
29	Bank DKI -Dana Pensiun	1.60%	Bank Negara Indonesia (Persero), PT	8,000,000,000	1,697,121
30	PT Jasa Marga -Dana Pensiun	1.00%	Bank Negara Indonesia (Persero), PT	5,000,000,000	1,060,701
31	BPD Jabar -Dana Pensiun	3.00%	Bank Negara Indonesia (Persero), PT	15,000,000,000	3,182,103
32	BPD SulSel -Dana Pensiun	0.80%	Bank Negara Indonesia (Persero), PT	4,000,000,000	848,561
33	PT ASDP -Dana Pensiun	0.20%	Bank Negara Indonesia (Persero), PT	1,000,000,000	212,140
34	BPD Sumsel -Dana Pensiun	1.20%	Danareksa Sekuritas, PT	6,000,000,000	1,272,841
		100%	Jumlah / *Amounting to*	500,000,000,000	106,070,092

Per 31 Desember 2013 / ***As of December 31, 2013***

No.	Nama Pemegang Obligasi / *Bondholders Name*	%	Nama Pemegang Rekening / *Accounts Name*	Perolehan obligasi / *Bond at cost*	Biaya transaksi obligasi / *Bond transaction cost*
1	Marviani O	0.20%	PT Bank Bukopin	1,000,000,000	429,568
2	Bank Bukopin -Treasury Operation	4.00%	PT Bank Bukopin	20,000,000,000	8,591,361
3	Iskandar Zulkarnaen R, SE	0.20%	PT Bank Bukopin	1,000,000,000	429,568
4	Nikko Indah Nusantara Dua- Reksa	0.20%	Bank Central Asia Tbk, PT	1,000,000,000	429,568
5	BCA -Treasury Departemen	10.00%	Bank Central Asia Tbk, PT	50,000,000,000	21,478,402
6	PT Bank Jabar Banten	2.40%	Bank Danamon Indonesia Tbk, PT	12,000,000,000	5,154,817
7	BPD Lampung -Dana Pensiun	0.60%	Bank Mandiri, PT - Custody	3,000,000,000	1,288,704
8	PT BPD Sumbar -Dana Pensiun	2.40%	Bank Mandiri, PT - Custody	12,000,000,000	5,154,817
9	BPD Kalsel -Dana Pensiun	0.60%	Bank Mandiri, PT - Custody	3,000,000,000	1,288,704
10	Batavia Terbatas Ultima	2.40%	Bank Mandiri, PT - Custody	12,000,000,000	5,154,817

11	BPD NTT -Dana Pensiun	2.00%	Bank Mandiri, PT - Custody	10,000,000,000	4,295,680
12	Perumpel dan Perumpeng-Dana Pensiun	5.00%	Bank Mandiri, PT - Custody	25,000,000,000	10,739,201
13	BPD Kalbar -Yayasan Dana Pensiun	0.60%	Bank Mandiri, PT - Custody	3,000,000,000	1,288,704

16. Obligasi yang diterbitkan (lanjutan)

Obligasi I Bank Riau Kepri Tahun 2011 (lanjutan)

Per 31 Desember 2013

16. *Bond of issued (continued)*

Bank Riau Kepri Bond I Years 2011 (continued)

As of December 31, 2013

No.	Nama Pemegang Obligasi / *Bondholders Name*	%	Nama Pemegang Rekening / *Accounts Name*	Perolehan obligasi / *Bond at cost*	Biaya transaksi obligasi / *Bond transaction cost*
14	BPD Papua	3.00%	Bank Mandiri, PT - Custody	15,000,000,000	6,443,521
15	BPD Sumatera Utara	15.00%	Bank Mandiri, PT - Custody	75,000,000,000	32,217,603
16	BPD Jawa Tengah	4.60%	Bank Mandiri, PT - Custody	23,000,000,000	9,880,065
17	PT Asuransi Raharja	0.40%	Bank Mandiri, PT - Custody	2,000,000,000	859,136
18	BPD Kalimantan Barat	0.40%	Bank Mandiri, PT - Custody	2,000,000,000	859,136
19	PT Bank Riau -Dana Pensiun	4.00%	Bank Mandiri, PT - Custody	20,000,000,000	8,591,361
20	PT Bank Sumut -Dana Pensiun Pegawai	1.60%	Bank Mandiri, PT - Custody	8,000,000,000	3,436,544
21	Karyawan Pupuk Kujang -Dana Pensiun	0.20%	Bank Mandiri, PT - Custody	1,000,000,000	429,568
22	BPD Bali -Dana Pensiun Pegawai	1.80%	Bank Mandiri, PT - Custody	9,000,000,000	3,866,112
23	Rajawali Nusindo -Dana Pensiun	0.40%	Bank Mandiri, PT - Custody	2,000,000,000	859,136
24	BPD Sumsel dan Babel	3.60%	Bank Mandiri, PT - Custody	18,000,000,000	7,732,225
25	PT Wijaya Karya -Dana Pensiun	0.40%	Bank Mandiri, PT - Custody	2,000,000,000	859,136
26	Samudera Indonesia -Dana Pensiun	0.20%	Bank CIMB Niaga TBK, PT	1,000,000,000	429,568
27	PT Jamsostek (Persero) -JHT	6.00%	Bank CIMB Niaga TBK, PT	30,000,000,000	12,887,041
28	PT Jamsostek (Persero) - Non JHT	20.00%	Bank CIMB Niaga TBK, PT	100,000,000,000	42,956,804
29	Bank DKI -Dana Pensiun	1.60%	Bank Negara Indonesia (Persero), PT	8,000,000,000	3,436,544
30	PT Jasa Marga -Dana Pensiun	1.00%	Bank Negara Indonesia (Persero), PT	5,000,000,000	2,147,840
31	BPD Jabar -Dana Pensiun	3.00%	Bank Negara Indonesia (Persero), PT	15,000,000,000	6,443,521
32	BPD SulSel -Dana Pensiun	0.80%	Bank Negara Indonesia (Persero), PT	4,000,000,000	1,718,272
33	PT ASDP -Dana Pensiun	0.20%	Bank Negara Indonesia (Persero), PT	1,000,000,000	429,568
34	BPD Sumsel -Dana Pensiun	1.20%	Danareksa Sekuritas, PT	6,000,000,000	2,577,408
		100%	Jumlah / *Amounting to*	500,000,000,000	214,784,021

17. Pinjaman yang diterima

Akun ini terdiri dari :	31 Desember 2014	31 Desember 2013	*This account consist of :*
Penarikan penerusan KLBI untuk KPKM	-	14,219,312	*KLBI Received for KPM*
Dana Kelolaan	662,753,646	1,513,648,944	*Chanelling*
Penarikan penerusan lain (Pokok) Tembilal	1,658,756,088	1,658,756,088	l of other forwarding (Principal) Tembilahan
Pinjaman KLBI untuk KPR	-	44,724,166	*Borrowings KLBI for KPR*
Pinjaman Dana FLPP Kemenpera	9,056,760,064	1,064,885,469	*Borrowing RDI Financial Minister for KPR*
Pinjaman Indonesia Eximbank	299,994,917,204	-	
Jumlah	**311,373,187,002**	**4,296,233,979**	*Total*

17. *Borrowings*

A. Pinjaman dari Bank Indonesia Pekanbaru.

Merupakan pinjaman dana bergulir dari Likuiditas Bank Indonesia. Berdasarkan perjanjian kredit No.32/25/UK/PmK2/Pbr tanggal 14 mei 1999, BPD Riau melakukan perjanjian Kerjasama dengan Bank Indonesia Pekanbaru dalam rangka Penyaluran Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) untuk penerusan Kredit kepada Pengusaha kecil dan Pengusaha Mikro (KPKM). Plafon KLBI ditetapkan sebesar Rp7.322.000.000. Besarnya suku bunga KLBI ditetapkan sebesar 13% dan 16% untuk suku bunga KPKM kepada debitur. Jangka waktu maksimun pembiayaan selama 6 tahun atau sampai 31 Desember 2004. Syarat dan ketentuan mengenai KLBI diatur dalam SK Direksi Bank Indonesia No.31/185/KEP/Dir tertanggal 5 Januari 1999 serta Surat Edaran Bank Indonesia No.31/20/UK tertanggal 12 Februari 1999 tentang KPKM melalui Bank umum. Saldo per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah sebesar Nihil dan Rp14.219.312

A. *Loans from Indonesian Bank of Pekanbaru Branch.*

Based on credit agreement No. 32/25/UK/PmK2/Pbr dated the 14th of May 1999, BPD Riau performs Cooperation agreement with Bank Indonesia Pekanbaru in the framework of Channeling the Liquidity Credit of Bank Indonesia (KLBI/Kredit Likuiditas Bank Indonesia) to forward Credit to small Businessman and Micro Businessman (KPKM). KLBI platform is decided in the amount of Rp7.322.000.000. The amount of KLBI interest rate is decided in the amount of 13% and 16% for KPKM interest to the debtor. The maximum financing time period is 6 years or up to 31st of December 2004. The requirement and provision on KLBI shall be arranged in the Decree Letter of Board of Directors of Bank Indonesia No. 31/185/KEP/Dir dated the 5th of January 1999 as well as the Circulatory Note of Bank Indonesia No. 31/20/UK dated the 12th of February 1999 on KPKM through public Bank. Balanced as of December 31, 2014 and December

Rp [illegible]

public Bank Balanced as of December 31, 2014 and December 31, 2013 are Rp and Rp14.219.312.

17. Pinjaman yang diterima (lanjutan)

B. Pinjaman dari Pemerintah Provinsi Riau

Saldo dana kelolaan per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp.662.753.646 dan Rp.1.513.648.944. Pinjaman dari Pemerintah Provinsi Riau terdiri dari MoU Nomor 68/MoU/2002 tanggal 2 Oktober 2002 dan 69/MoU/2002 tanggal 3 Oktober 2002. Berdasarkan surat Pemerintah Provinsi Riau No. 900/Keu/93 tanggal 8 Mei 2014 meminta kepada bank untuk menyetorkan saldo sebesar Rp.3.172.405.032 ke kas daerah. Setelah dilakukan pemindahan dana oleh kantor cabang bank ke Pemerintah Provinsi Riau ternyata terdapat dana dari Inhil revolving fund Kabupaten Indragiri Hilir sebesar Rp1.658.756.088 yang disetor sebagaimana surat Bank Riau Kepri No. 376/KR.01/KM/2014 tanggal 9 Desember 2014 prihal koreksi dana kelolaan pinjaman, sehingga dana tersebut dapat dikembalikan ke rekening PYD Penarikan Penerusan Lain (Pokok) di cabang Tembilahan.

B1. Dana Kelolaan - Pinjaman dari Pemerintah Provinsi Riau (MoU Nomor 68/MoU/2002 tanggal 2 Oktober 2002).

Merupakan pinjaman dana bergulir dari pemerintah provinsi Riau. Berdasarkan naskah kesepakatan bersama nomor 68/MoU/2002 dan nomor 17/DIR/BPDR/X/2002 tanggal 2 Oktober 2002 antara propinsi Riau dengan Bank dijelaskan bahwa :

Dalam rangka penyelenggaraan pinjaman modal proyek-preoyek APBD Provinsi Riau 2001 dijelaskan mengenai Channeling dimana channeling tersebut merupakan sistem penyaluran dana yang disediakan oleh penyedia sumber dana (Gubernur Riau) dan risiko kredit berada pada pihak penyedia sumber dana.

Besarnya jumlah dana pinjaman modal berdasarkan nota kesepakatan tersebut diatas yang dananya diambil dari APBD pemerintah provinsi Riau tahun 2001 sebesar Rp52.806.133.400 yang pada saat penandatanganan nota kesepakatan telah disalurkan kepada Bank sebesar Rp52.015.862.921. Sejak ditandatangani nota kesepakatan bersama tersebut, Bank membukukannya di rekening "Pelimpahan Penerusan Pinjaman Modal Ekonomi Kerakyatan Pemerintah Provinsi Riau.

Jangka waktu nota kesepakatan bersama tersebut selama 5 tahun sejak ditandatangani nota tersebut diatas dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakan bersama. Sedangkan besarnya suku bunga yang ditetapkan yaitu sebesar 3% per tahun dihitung secara sliding.

17. Pinjaman yang diterima (lanjutan)

B2. Pinjaman dari Pemerintah Provinsi Riau (MoU Nomor 69/MoU/2002 tanggal 3 Oktober 2002).

Berdasarkan naskah kesepakatan bersama nomor 69/MoU/2002 dan nomor 18/DIR/BPDR/X/2002 tanggal 3 Oktober 2002 antara pemerintah propinsi Riau dengan Bank Pembangunan Daerah Riau dalam rangka Penyaluran Dana Pinjaman Modal Ekonomi Kerakyatan Provinsi Riau 2002 dengan menggunakan sistem Channelling. Dijelaskan mengenai Sistem Channeling tersebut adalah sistem penyaluran dana yang disediakan oleh penyedia sumber dana (Gubernur Riau) dan resiko kredit berada pada pihak penyedia sumber dana

17. Borrowings (continued)

B. Loans from Government of Riau Province

The balance of funds under management as of December 31, 2014 and 2013 respectively Rp.662.753.646 and Rp.1.513.648.944. Loans from the Government of Riau Province consists of MoU No. 68 / MOU / 2002 dated October 2, 2002 and 69 / MOU / 2002 dated October 3, 2002. Based on the Riau Provincial Government No. 900 / Monetary / 93 dated May 8, 2014 to ask the bank to deposit the balance of Rp.3.172.405.032 to the local treasury. After the transfer of funds by a bank branch to the Riau provincial government apparently a revolving fund of funds from Inhil Indragiri Downstream of Rp1.658.756.088 paid as letters Bank Riau Riau No. 376 / KR.01 / KM / 2014 dated December 9, 2014 prihal correction managed fund loans, so that the funds can be returned to the PYD Withdrawal Other Forwarding (Principal) in Tembilahan branch.

B1. Channeling - Loans from Government of Riau Province (MoU Number 68/MoU/2002 dated on October 2, 2002).

Based on the manuscript of collective agreement number 68/MoU/2002 and number 17/DIR/BPDR/X/2002 dated the 2nd of October 2002 between Riau provincial government and Bank Pembangunan Daerah Riau are :

In the framework of holding projects capital loan of APBD Riau Province 2001 it is elaborated on the Channeling whereas the channeling is the finance channeling system provided by the fund source supplier (Governor of Riau) and the credit risk shall be on the fund source supplier party.

The amount of total capital loan funds based on the above mentioned memorandum of understanding the funds taken from the Local Income Expenditure Budget (APBD) of Riau province government year 2001 is in the amount of Rp52.806.133.400, which at the time of signing the MoU, has been channelled to the Bank in the amount of Rp52.015.862.921. As of the signing the collective MoU, the Bank has booked it in the account of "Capital Loan Transfer of the People Economics of Riau Province Government.

The time period of the collective memorandum of understanding is for 5 years as of the signing of the above mentioned memorandum of understanding and it may be extended again by collective agreement. As for the interest rate decided it is in 3% per year counted by means of sliding.

17. Borrowings (continued)

B2. Loans from Government of Riau Province (MoU Number 69/MoU/2002 dated on October 3, 2002).

Based on the manuscript of collective memorandum of understanding number 69/MoU/2002 and number 18/DIR/BPDR/X/2002 dated the 3rd of October 2002 between the government of Riau province and Bank Pembangunan Daerah Riau in the framework of Channeling Capital Loan Funds of the People Economics of Riau Province 2002 uses the Channeling system. Elaborating on the Channeling system the fund channeling system shall be provided by the fund source supplier (Governor of Riau) and credit risk on fund source supplier party

penyedia sumber dana.

(Governor of Riau) and credit risk on fund source supplier party.

17. Pinjaman yang diterima (lanjutan)

B2. Pinjaman dari Pemerintah Provinsi Riau (MoU Nomor 69/MoU/2002 tanggal 3 Oktober 2002) (lanjutan)

Besarnya jumlah dana pinjaman modal berdasarkan nota kesepakatan tersebut diatas yang dananya berasal dari APBD pemerintah provinsi Riau tahun 2002 dan bersumber dari DIPDA Nomor.13/DIPDA/2002 dengan kode proyek 2P.0.5.2.01.006 sebesar Rp.100.000.000.000. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp.99.000.000.000 dialokasikan untuk penerima pinjaman modal dengan sasaran kredit bidang Tanaman pangan sebesar Rp.26.460.000.000, peternakan sebesar Rp11.270.000.000, perikanan dan kelautan sebesar Rp.17.640.000.000,perkebunan sebesar Rp.29.400.000.000, perindustrian dan perdagangan sebesar Rp.7.840.000.000, Koperasi UKM sebesar Rp.4.900.000.000, pemberdayaan dan perlindungan masyarakat sebesar Rp.490.000.000 dan BMT (Baitul Maal Wattamwil) sebesar Rp.1.000.000.000. Sedangkan untuk alokasi kredit sebesar Rp.1.000.000.000 diteruskan kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) serta diteruspinjamkan kepada Usaha Mikro dan Kecil oleh BPR tersebut.

Pelimpahan dana sebesar Rp.1.000.000.000 kepada BPR tersebut tidak diberlakukan sebagai pinjaman modal oleh Bank Riau.

Pengalokasian dana pinjaman modal yang berasal dari APBD 2002, yang disebabkan belum tercapainya penyaluran sesuai pagu oleh masing-masing dinas, dapat dilakukan oleh Bank Riau atas persetujuan tertulis dari Pemerintah Provinsi Riau.

Jangka waktu nota kesepakatan bersama tersebut selama 5 tahun sejak ditandatangani nota tersebut diatas dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakan bersama. Sedangkan besarnya suku bunga yang ditetapkan yaitu sebesar 3% per tahun dihitung secara flat.

C. Penarikan penerusan lain (Pokok) Cabang Tembilahan

Berdasarkan surat Pemerintah Provinsi Riau No. 900/Keu/93 tanggal 8 Mei 2014 meminta kepada bank untuk menyetorkan saldo sebesar Rp.3.172.405.032 ke kas daerah. Setelah dilakukan pemindahan dana oleh kantor cabang bank ke Pemerintah Provinsi Riau ternyata terdapat dana dari Inhil revolving fund Kabupaten Indragiri Hilir sebesar Rp1.658.756.088 yang disetor sebagaimana surat Bank Riau Kepri No. 376/KR.01/KM/2014 tanggal 9 Desember 2014 prihal koreksi dana kelolaan pinjaman, sehingga dana tersebut dapat dikembalikan ke rekening PYD Penarikan Penerusan Lain (Pokok) di cabang Tembilahan. Saldo penarikan penerusan lain (Pokok) Tembilahan per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp1.658.756.088 dan Rp1.658.756.088.

17. Borrowings (continued)

B2. Loans from Government of Riau Province (MoU Number 69/MoU/2002 dated on October 3, 2002) (continued)

The amount of total capital loan funds based on the above collective memorandum of understanding the funds of which coming from the Local Revenue Expenditure Budget (APBD) of Riau province government year 2002 and with its source from DIPDA Number 13/DIPDA/2002 with project code 2P.0.5.2.01.006 in the amount of Rp. 100.000.000.000. Of that amount, the amount of Rp. 99.000.000.000 shall be allocated for the capital loan receiver with credit targets in the field of food Plant in the amount of Rp. 26.460.000.000, animal husbandry in the amount of Rp. 11.270.000.000, fishery and marine in the amount of Rp. 17.640.000.000, plantation in the amount of Rp. 29.400.000.000, industry and trade in the amount of Rp. 7.840.000.000, Cooperative UKM in the amount of Rp. 4.900.000.000, community empowerment and protection in the amount of Rp. 490.000.000 and BMT (Baitul Maal Wattamwil) in the amount of Rp. 1.000.000.000. As for credit allocation in the amount of Rp. 1.000.000.000 shall be forwarded to Bank Perkreditan Rakyat (BPR) as well as loan forwarded to Micro and Small Business by BPR.

Fund transfer in the amount of Rp. 1.000.000.000 to BPR shall not be made as capital loan by Bank Riau.

The allocation of capital loan fund coming from the Local Revenue Expenditure Budget (APBD) 2002, resulted from not yet achieving the channeling according to the collateral by each official, it can be done by Bank Riau by written approval from

The time period of that collective memorandum of understanding is for 5 years as of the signing of the above mentioned memorandum of understanding and it can be extended again by collective agreement. As for the amount of interest rate decided it is in the amount of 3% per year counted with flat rate.

C. Penarikan penerusan lain (Pokok) Cabang Tembilahan

Based on the letter of Riau Provincial Government No. 900 / Monetary / 93 dated May 8, 2014 to ask the bank to deposit the balance of Rp.3.172.405.032 to the local treasury. After the transfer of funds by a bank branch to the Riau provincial government apparently a revolving fund of funds from Inhil Indragiri Downstream of Rp1.658.756.088 paid as letters Bank Riau Riau No. 376 / KR.01 / KM / 2014 dated December 9, 2014 prihal correction managed fund loans, so that the funds can be returned to the PYD Withdrawal Other Forwarding (Principal) in Tembilahan branch. The balance of other forwarding withdrawal (Principal) Tembilahan December 31, 2014 and 2013 respectively Rp1.658.756.088 and Rp1.658.756.088.

17. Pinjaman yang diterima (lanjutan)

D. Pinjaman dari Pemerintah Republik Indonesia (Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan Republik Indonesia)

Saldo per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp Nihil dan Rp44.724.166.

Berdasarkan perjanjian pinjaman Nomor KP-038/DP3/2004 tanggal 16 September 2004 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Bank dalam rangka pendanaan kredit usaha mikro dan kecil dijelaskan bahwa maksud dan tujuan dilakukan perjanjian ini yaitu untuk penyaluran dana dari pemerintah provinsi riau terhadap Bank yang digunakan untuk pendanaan KUMK serta meningkatkan akses usaha mikro dan kecil terhadap dana pembiayaan investasi dan modal kerja dengan persyaratan yang ringan dan terjangkau.

Besarnya pinjaman dana dalam perjanjian kerjasama tersebut sebesar Rp25.000.000.000. Bank Riau dikenakan bunga yang besarnya sama dengan tingkat bunga Surat Utang Pemerintah (SUP) yang dikenakan Bank Indonesia kepada Pemerintah Indonesia. Persentase bunga tersebut akan diberitahun secara tertulis dan terpisah dari perjanjian ini atas dasar pemberitahuan yang oleh Pemerintah Indonesia dari Bank Indonesia.

Bunga dihitung atas pinjaman yang telah ditarik dari waktu ke waktu dengan ketentuan tidak bunga berbunga dengan dasar perhitungan untuk menetapkan besarnya bunga adalah 1 bulan dihitung menurut hari yang sebenarnya, sama dengan 365 hari.

Jangka waktu pinjaman sejak tanggal 16 September 2004 sampai dengan 10 Desember 2009. Bank Riau menanggung segala sesuatunya atas tunggakan pokok dan tunggakan bunga KUMK yang disalurkan oleh pihak Kedua.

E. Pusat Pembiayaan Perumahan Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia.

Perjanjian Kerjasama Operasional antara Pusat Pembiayaan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dengan PT. Bank Riau Kepri No. 18/SK.9/HK.02.04/06/2014 dan No. 091/PKO/2014 tanggal 12 Juni 2014 tentang penyaluran dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan dalam rangka pembiayaan kredit pemilikan rumah sejahtera, bahwa sebelumnya kedua belah pihak telah menandatangani perjanjian kerja sama operasional No. 17/SK.9/HK.02.04/12/2013 dan No. 113/PKO/2013 tanggal 30 Desember 2013. Saldo per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp.9.056.760.064. dan Rp.1.064.885.469.

F. Indonesia Eximbank - Medan

Persetujuan pembiayaan lembaga keuangan bank antara bank Riau Kepri dengan bank Indonesia Eximbank berdasarkan surat dari Indonesia Eximbank No. BS.0144/MDN/06/2014 tanggal 30 Juni 2014. Jenis fasilitas kredit modal kerja (KMK dengan plafond Rp.100.000.000.000 (Seratus Miliar Rupiah) jangka waktu enam bulan sejak tanggal pencairan sejumlah Rp.99.994.917.204 dengan tingkat suku bunga 9,75% p.a.

17. Borrowings (continued)

D. Loans from Government of Indonesian Republic (General Director of Financial Institution, Financials Department of Indonesia Republic).

Balanced as of December 31, 2014 and December 31, 2013 respectively are Rp Nihil and Rp44.724.166.

Based on the loan agreement Number KP-038/DP3/2004 dated the 16th of September 2004 between the Government of the Republic Indonesia and The Bank in the framework of financing micro and small business credit it is explained that the objective and purpose of this agreement is to channel the funds from Riau provincial government to the Bank to be used for the financing of Medium Small Business Credit (KUMK) as well as to improve micro and small business access for the investment financing funds and working capital with light and affordable requirements.

The amount of fund loan in the cooperation agreement is Rp25.000.000.000. Bank Riau is charged with interest in the amount similar with interest rate level in Government Debt Letter/Surat Utang Pemerintah (SUP) charged by Bank Indonesia to Indonesian Government. The percentage of that interest shall be notified in writing and separated from this agreement on the basis of notification by the Government of Indonesia to Bank Indonesia.

The interest shall be counted on the loan already withdrawn from time to time providing that it is not interest upon interest with the calculation basis to decide the amount of interest that is 1 month counted according to 365 days.

The term of loan is from the 16th of September 2004 to 10th of December 2009. Bank Riau shall bare everything on the principal arrear and interest arrears of KUMK channeled by Second party.

E. Center for Housing Ministry of Housing of the Republic of Indonesia.

Operation agreement between the Center for Public Housing Republic of Indonesia with PT. Bank Riau Riau No. 18 / SK.9 / HK.02.04 / 06/2014 and No. 091 / PKO / 2014 dated June 12, 2014 on the distribution of funds liquidity facility in order to finance housing finance mortgages prosperous, that before the two sides have signed a cooperation agreement operational No. 17 / SK.9 / HK.02.04 / 12/2013 and No. 113 / PKO / 2013 dated December 30, 2013. Balance as of December 31, 2014 and 2013 respectively Rp.9.056.760.064. and Rp.1.064.885.469.

F. Indonesia Eximbank - Medan

Approval of the financial institution financing the bank with the bank Riau Riau Islands of Indonesia Eximbank by virtue of Indonesia Eximbank No. BS.0144 / MDN / 06/2014 of 30 June 2014. The working capital credit facility type (KMK with ceiling Rp.100.000.000.000 (Hundred Billion Rupiah) a period of six months from the date of disbursement amount Rp.99.994.917.204 to rate 9.75% pa

17. Pinjaman yang diterima (lanjutan)

F.1 Indonesia Eximbank - Medan

Persetujuan pembiayaan lembaga keuangan bank antara bank Riau Kepri dengan bank Indonesia Eximbank berdasarkan surat dari Indonesia Eximbank No. BS.0209/MDN/10/2014 tanggal 9 Okober 2014. Jenis fasilitas KMK/KI Refinancing dengan plafond Rp.200.000.000.000 (Dua Ratus Miliar Rupiah) jangka waktu tiga bulan sejak tanggal pencairan dengan tingkat suku bunga 9,75% p.a. Saldo pinjaman per 31 Desember 2014 sebesar Rp.299.994.917.204.

17. *Borrowings (continued)*

F.1 Indonesia Eximbank - Medan

Approval of the financial institution financing the bank with the bank Riau Riau Islands of Indonesia Eximbank by virtue of Indonesia Eximbank No. BS.0209 / MDN / 10/2014 dated 9, 2014. Okober facility type KMK / KI Refinancing with ceiling Rp.200.000.000.000 (Two Hundred Billion Rupiah) a period of three months from the date of disbursement with the interest rate of 9.75% pa The loan balance at December 31, 2014 at Rp.299.994.917.204.

18. Estimasi kerugian komitmen dan kontijensi

Rincian laporan transaksi komitmen dan kontijensi dalam kegiatan usaha bank adalah sebagai berikut:

18. *Estimated losses from commitments and contingencies*

Statement the transactionquality of commitment and contingencies in bank activities are as follow :

	31 Desember 2014	31 Desember 2013	
A. Komitmen			***A. Commitments***
Kewajiban komitmen			*Commitment liabilities*
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik			*1. Uncollection credit facilities from clients*
BUMN	30,364,739,987	61,910,880,287	*BUMN*
Lainnya	127,238,398,636	134,579,487,858	*Other*
Jumlah	157,603,138,623	196,490,368,145	*Total*
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	-	-	*2. Others loans facilities*
Jumlah kewajiban komitmen	157,603,138,623	196,490,368,145	*Total comitment liabilities*
B. Kontinjensi			***B. Contingencies***
Tagihan kontinjensi			*Contigencies claim*
1. Garansi yang diterima	-	-	*1. Guarantee receivable*
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian			*2. Interest income in process*
Bunga kredit yang diberikan	160,049,325,598	120,683,629,103	*Interest loans*
Bunga lainnya	-	-	*Other loans*
Jumlah tagihan kontinjensi	160,049,325,598	120,683,629,103	*Total*
Kewajiban kontinjensi			*Contigencies liabilities*
1. Garansi yang diberikan	152,161,638,679	152,945,874,895	*1. Guarantee extended*
2. Lainnya	-	-	*2. Other*
Jumlah	152,161,638,679	152,945,874,895	*Total*
C. Lainnya			***C. Other***
1. Penerusan kredit	228,123,604,490	230,368,741,621	*1. Distribution chanelling credit*
2. Aset produktif yang dihapus buku			*2. Write-off productive asset*
Aset produktif :			*Productive Asset :*
Kredit yang diberikan	86,645,473,300	88,177,018,552	*Loans*
Lainnya	259,275,000	259,275,000	*Other*
Aset produktif yang dihapus buku yang dipulihkan atau berhasil ditagih			*Write-off productive asset has repaired or successfully billed*
Kredit yang diberikan	16,593,101,580	13,087,244,579	*Loans*
Lainnya	-	-	*Other*
Jumlah	331,621,454,370	331,892,279,752	*Total*

19. Hutang pajak / 19. *Tax Liabilities*

Akun ini terdiri dari :	31 Desember 2014	31 Desember 2013	*This account consists of :*
Pajak penghasilan :			*Income tax :*
Pasal 21	258,713,771	238,464,253	*Article 21*
Pasal 22	-	1,112,299	*Article 22*
Pasal 23	202,567,975	543,997,863	*Article 23*
Pasal 4 ayat 2	3,783,465,981	2,867,026,435	*Article 4 (2)*
Pajak Pertambahan Nilai / PPN	225,740,564	827,953,723	*Value added tax - output*
Pajak penghasilan badan pasal 29	3,664,845,000	45,636,098,250	*Income taxes article 29*
Bunga pasal 8 (2) KUP tahun 2008	-	17,402,724,192	*Interest article 8(2)KUP the year 2008*
Pajak lainnya	1,003,921,545	20,283,077	*Other taxes*
Jumlah	**9,139,254,836**	**67,537,660,092**	*Total*

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dengan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak penghasilan dan tarif pajak yang berlaku adalah :

Reconciliation Between Income tax expense and the throretical tax amount on the company's profit before income tax is as follows :

Perhitungan taksiran pajak penghasilan : / ***Extimated of company's income tax are as follow :***

	31 Desember 2014	31 Desember 2013	
Laba sebelum pajak	690,141,205,364	603,874,562,346	***Profit before income tax***
Koreksi fiskal			***Fiscal corrections***
Beda temporer			***Temporary differences***
CKPN Penempatan pada bank lain	807,254,644	314,692,632	*Placement with other bank (CKPN)*
CKPN Kredit yang diberikan	(63,181,901,085)	(496,998,956)	*Loans (CKPN)*
Jasa produksi-bersih	15,490,034,636	21,008,823,250	*Provision for employee bonuses-net*
Jumlah beda temporer	**(46,884,611,804)**	**20,826,516,926**	*Total*
Beda permanen			***Permanent differences***
Beban tenaga kerja, umum dan administrasi.	42,824,076,036	19,979,180,381	*Expenses of employee, general and administration.*
Tantiem pengurus	25,028,522,472	21,156,013,813	*Management Tantiem*
Beban operasional lainnya	22,402,074,025	14,682,503,954	*Others operating expenses*
Pendapatan non operasional	(27,319,028,627)	(397,394,001)	*Non operating income*
Beban non operasional	28,559,999,434	47,982,862,207	*Non operating expenses*
Jumlah beda permanen	**91,495,643,341**	**103,403,166,354**	*Total*
Jumlah koreksi fiskal	**44,611,031,537**	**124,229,683,280**	*Total fiscal of corection*
Penghasilan kena pajak	**734,752,236,901**	**728,104,245,626**	*Taxable income*
Pembulatan	**734,752,236,000**	**728,104,245,000**	
25% x 734,752,236,000	183,688,059,000	-	
25% x 728,104,245,000		182,026,061,250	
Jumlah	**183,688,059,000**	**182,026,061,250**	*Total*
Pajak dibayar dimuka			*Prepaid taxes*
Pph pasal 25	180,023,214,000	136,389,963,000	*Income taxes article 25*
Pph pasal 23	-	-	*Income taxes article 23*
Jumlah	**180,023,214,000**	**136,389,963,000**	*Total*
Pajak penghasilan (lebih) kurang bayar	**3,664,845,000**	**45,636,098,250**	*Income taxes (overpayment) less paid taxes*

Pada tahun 2014 bank menerima surat ketetapan pajak kurang bayar dan lebih bayar yaitu sebagai berikut:

- Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) pajak penghasilan No. 00002/406/11/218/14 tahun pajak 2011, tanggal penerbitan 31 Desember 2014 sebesar Rp.20.934.844.750.

In 2014 the bank received tax assessments for underpayment and overpayment is as follows:

- Letter of Tax Overpayment (SKPLB) income tax No. 00002/406/11/218/14 tax year 2011, the date of publication December 31, 2014 amounted to Rp.20.934.844.750.

19. Hutang pajak (lanjutan)

Pada tahun 2014 bank menerima surat ketetapan pajak kurang bayar dan lebih bayar yaitu sebagai berikut (lanjutan):

- Surat Tagihan Pajak, pajak penghasilan No. 00011/106/09/218/14 tahun pajak 2009, tanggal penerbitan 30 Desember 2014, jatuh tempo 29 Januari 2015 sanksi administrasi : Bunga pasal 8 (2) KUP sebesar Rp.4.611.008.819.
- Surat Tagihan Pajak, pajak penghasilan No. 00020/106/10/218/14 tahun pajak 2010, tanggal penerbitan 30 Desember 2014, jatuh tempo 29 Januari 2015 Sanksi administrasi : Bunga pasal 8 (2) KUP sebesar Rp.3.476.836.660.
- Surat Tagihan Pajak, pajak penghasilan No. 00069/106/12/218/14 tahun pajak 2012, tanggal penerbitan 30 Desember 2014, jatuh tempo 29 Januari 2015 Sanksi administrasi : Bunga pasal 8 (2) KUP sebesar Rp.389.134.100
- Surat Tagihan Pajak, pajak penghasilan No. 00149/106/13/218/14 tahun pajak 2013, tanggal penerbitan 30 Desember 2014, jatuh tempo 29 Januari 2015 sanksi administrasi : Bunga pasal 8 (2) KUP sebesar Rp.144.584.880.

Pada tahun 2013, Bank menerima Surat Tagihan Pajak (STP) yang telah dilakukan penelitian atas pelaksanaan kewajiban PPh Pasal 25/29 oleh Kantor wilayah Dirjen Pajak Riau dan Kepulauan Riau KPP Madya Pekanbaru dengan nomor 00011/106/08/218/13 diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2013 dan jatuh tempo pada tanggal 30 Januari 2014 untuk masa tahun pajak 2008. Jumlah tagihan pajak atas STP tersebut sebesar Rp17.402.724.192 atas sanksi administrasi berupa Bunga pasa 8 (2) KUP. Disamping itu pada tahun 2013 Bank telah membayar PPh Pasal 29 Kurang bayar tahun 2008 sebesar Rp15.538.146.600. Atas STP sebesar Rp17.402.724.192 telah mendapatkan pengurangan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-772/WPJ.02/2014 tanggal 25 Juni 2014 Tentang Pengurangan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib pajak sebesar Rp9.944.413.824. Jumlah pengurangan tersebut akan di kompensasikan setelah selesainya penelitian atas kewajiban PPh Pasal 25/29 tahun berikutnya.

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Bank menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terhutang. Direktur Jenderal Pajak (DJP) dapat menetapkan atau mengubah kewajiban pajak dalam batas waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terhutangnya pajak, atau terakhir tahun 2013, mana yang lebih awal. Ketentuan baru yang diberlakukan terhadap tahun pajak 2008 dan tahun-tahun selanjutnya menentukan bahwa DJP dapat menetapkan atau mengubah Liabilitas pajak tersebut dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak saat terhutangnya pajak.

19. *Tax Liabilities (continued)*

In 2014 the bank received tax assessments for underpayment and overpayment is as follows (continued):

- STPs, income tax No. 00011/106/09/218/14 fiscal year 2009, the date of publication December 30, 2014, maturing January 29, 2015 administrative sanctions: Interest Article 8 (2) CTP for Rp.4.611.008.819.
- STPs, income tax No. 00020/106/10/218/14 tax year 2010, the date of publication December 30, 2014, maturing January 29, 2015 Administrative sanctions: Interest Article 8 (2) CTP for Rp.3.476.836.660.
- STPs, income tax No. 00069/106/12/218/14 tax year 2012, the date of publication December 30, 2014, maturing January 29, 2015 Administrative sanctions: Interest Article 8 (2) CTP for Rp.389.134.100
- STPs, income tax No. 00149/106/13/218/14 tax year 2013, the date of publication December 30, 2014, maturing January 29, 2015 administrative sanctions: Interest Article 8 (2) CTP for Rp.144.584.880.

In the year of 2013, Bank received Tax Payable letter (STP) that had been analyzed in implementation of Inconme Tax (PPh art 25/29) by Tax Directorate General Riau region dan Riau Islands KPP Madya Pekanbaru under number 00011/106/08/218/13 publised at December 31, 2013 and due to at January 30, 2014 for the tax period 2008. Total payable on that STP amounted to Rp.17.402.724.192 on administration punishment as interest artical 8(2) KUP. Besides, in the year of 2013 Bank had payed Income tax (PPh art.29) minus payed amounted to Rp. 15.538.146.600.For Tax Payment Letter amounted to Rp.Rp17.402.724.192 have got the shortage based on the Decision of the Tax Directorate General, Decision Number 772/WPJ.02/2014 dated June 25 2014, about the Shortage of Administration Sanction on Tax Payment Letter, because of the request of Taxpayer amounted to Rp.9.944.413.824. This amount decrease after the investigation of the obligation on Income tax Article 25/ 29 for the following year.

Under the taxation laws of Indonesia, the Company submits tax returns on the basis of self assessment. The Director General of Tax (DGT)may assess or amend taxes within 10 (ten) years of the time the tax becomes due, or until the end of 2013, whichever is earlier. There are new rules applicable to fiscal year 2008 and subsequent years stipulating that the DGT may assess or amend taxes within 5 (five) years of the time the taxe becomes due.

20. Liabilitas lain-lain / *Other liabilities*

Akun ini terdiri dari :	31 Desember 2014	31 Desember 2013	*This account consists of :*
Setoran jaminan bank garansi	29,501,243,974	34,779,485,297	*Bank guarantee collateral deposit*
Provisi bank garansi	11,307,562	34,472,012	*Guarante bank provision*
Pendapatan bunga ditangguhkan	678,280,081	678,474,249	*Income deferred of interest*
Kredit kelolaan belum disalurkan	1,034,384,067	1,023,034,067	*Undirected loans*
Bagian laba yang akan dibayar	-	193,526,577	*Profit wil be paid*
Selisih pasiva dalam penyelesaian	389,262,800	392,961,900	*Difference passiva in progress*
Rekening perantara sistem	6,316,713,497	13,271,101,670	*Attemt system account*
Hutang beban imbalan pasca kerja	23,940,931,485	-	*Employe benefits Liabilities*
Pos kredit dalam penyelesaian	5,877,262,575	3,260,655,779	*Account credit in progress*
Jumlah	**67,749,386,041**	**53,633,711,550**	*Total*

Bagian laba yang akan dibayar merupakan saldo akumulasi pembagian dana kesejahteraan, jasa produksi dan kemitraan bina lingkungan yang belum direalisasikan penggunaannya.

The profit part to be paid is the balance of accumulated welfare fund distribution, bonuses and partnership enviropment fund whereas its use has not yet been realized.

Setoran jaminan bank garansi adalah setoran penerbitan bank garansi yang belum jatuh tempo terdiri dari Setoran jaminan BG Penawaran, BG Pelaksanaan, BG Uang muka dan BG Pemeliharaan.

The deposit for bank guarantee collateral is the deposit for bank guarantee issuance not yet on due date consisting of the Deposit of Offering BG collateral, Application BG, Down payment BG and Maintenance BG.

Sebelum 1 Januari 2010, penerimaan provisi atas kredit modal kerja, investasi dan konsumtif serta bank garansi dicatat sebagai provisi diterima dimuka dan dilakukan amortisasi sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit. Sejak tanggal 1 Januari 2010 provisi merupakan biaya perolehan yang diatribusi kepada nilai kredit (nilai wajar).

Before the 1st day of January 2010, the receipt of provision on working capital credit, investment and consumption as well as bank guarantee shall be recorded as provision received in advance and amortization to be performed up to the due date of the credit. As of the 1st day of January 2010 the provision is the cost of revenues attributed to the credit value (reasonable value).

21. Modal Saham / *Share capital*

Bank mengeluarkan 2 (dua) jenis saham yang terdiri dari saham seri A dan seri B. Saham seri A berhak menerima deviden terlebih dahulu, memiliki hak suara dalam mengajukan usul pencalonan anggota direksi dan komisaris perseroan serta dewan pengawas syariah serta dapat memiliki saham seri B dan memiliki 10 hak suara dalam setiap lembar. Saham seri B merupakan saham yang berhak menerima dividen dan sisa kekayaan dalam proses likuidasi, setelah pemegang saham seri A serta memiliki 1 hak suara dalam setiap lembarnya. Sampai dengan 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 saham yang dikeluarkan perseroan adalah saham seri A.

The Bank issues 2 (two) types of shares consisting of shares series A and shares series B. Shares series A shall be entitled to receive dividend first, have voting rights in forwarding votes for the candidates of the members of Board of Directors and Board of Commissioners of the limited liability company as well as syariah supervisory body and able to possess shares series B and have 10 votes in each page. Share series B is share entitled to received dividend and the remaining assets in liquidity process, after the share series A holder, as well having 1 vote in each page. Until December 31, 2013 and December 31, 2012, the shares issued by the limited liability company are shares series A.

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diaktakan oleh Notaris Refizal, SH, M.Hum dengan nomor 46 tertanggal 15 Juni 2012 bahwa pemegang saham menyetujui rencana penerbitan saham seri B maksimum sebesar Rp25.000.000.000 atau sekitar 3% dari modal yang disetor saat ini. Saham seri B tersebut akan dikelola Koperasi Karyawan atau Yayasan milik Bank dan diperuntukkan bagi pengurus, karyawan, koperasi dan Yayasan milik Bank serta Koperasi pegawai milik Pemda Propinsi Riau.

Based on minute of the Shareholders Extraordinary General Meeting Number 46 dated June 15, 2010 by Notary Refizal, SH, M.Hum, that the shareholders approved the plan publish the B series share maximize Rp25.000.000.000 or about 3% of paid up capital nowadays. B series sahare will be manage by the employees cooperation or the foundation owned by the bank with the purpose for the management, employees, cooperation and the foundation owned by the bank, and the employees cooperation owned by the Govenment of Riau Province.

Modal dasar perseroan berjumlah Rp2.000.000.000.000 terbagi atas 20.000.000 lembar saham yang terdiri dari 17.000.000 lembar saham seri A dengan nilai nominal Rp100.000 per saham dan 3.000.000 lembar saham seri B dengan nilai nominal Rp100.000 per saham.

The working capital of the Bank is in the total amount of Rp2.000.000.000.000 divided into 20.000.000 share consisting of 17.000.000 share series A with nominal value Rp100.000 per share and 3.000.000 share series B with nominal value

Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh oleh para pemegang saham sebanyak 8.400.739 lembar saham seri A

Of the said working capital it has been placed and deposited fully paid by the shareholders as many as 8.268.739 share series A

dengan nilai nominal saham sebesar Rp100.000 per lembar saham atau sebesar Rp840.073.900.000.

21. Modal Saham (lanjutan)

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diaktakan oleh Notaris Refizal, SH, M.Hum dengan nomor 46 tertanggal 15 Juni 2012 bahwa pemegang saham telah menyetujui tambahan modal tahun 2011 sebesar Rp54.800.929.133, rencana tambahan modal dari 70% dividen tahun 2011 sebesar Rp122.340.843.240, dari kabupaten Anambas sebesar Rp7.500.000.000 dan dari kabupaten kep.Meranti sebesar Rp15.000.000.000.

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dengan akta no.45 tanggal 15 Juni 2012 yang diaktakan oleh Notaris Refizal, SH, M.Hum disebutkan bahwa posisi modal disetor Bank telah berubah dari Rp826.873.900.000 menjadi Rp840.073.900.000. Penambahan modal ditempatkan dan modal disetor sebesar Rp13.200.000.000 telah dicatat dan ditatausahakan sesuai dengan administrasi Bank Indonesia berdasarkan surat No.14/12/DPB1/APBU/Pbr tanggal 7 Februari 2012.

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat dengan akta no.60 tanggal 26 Juni 2012 yang diaktakan oleh Notaris Refizal, SH, M.Hum dijelaskan bahwa para pemegang saham menyetujui penambahan modal disetor sebesar Rp54.801.000.000 sehingga posisi modal disetor Bank telah berubah dari Rp840.073.900.000 menjadi Rp894.874.900.000. Berdasarkan surat dari Bank Indonesia mengenai Laporan Perubahan Modal Disetor Bank dengan Nomor 14/52/DPB1/APBU/Pbr tanggal 28 Desember 2012.

Rencana tambahan modal disetor tahun 2013 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Riau Kepri nomor 43 tanggal 15 Juni 2013 yang diaktakan oleh Notaris Refizal, SH, M.Hum menerangkan bahwa telah disetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor oleh para pemegang saham sebesar Rp54.771.345.829 dari Pemerintah Daerah dan pengembalian 70% dividen masing-masing pemegang saham yaitu sebesar Rp133.591.100.000. Sehingga proyeksi modal disetor tahun 2013 dari Rp902.374.800.000 menjadi Rp1.090.737.245.829.

Bank telah mendapatkan penegasan dari Bank Indonesia atas tambahan modal sebesar Rp54.801.000.000 yang telah ditatausahakan sesuai dengan administrasi Bank Indonesia.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Riau Kepri nomor 60 tanggal 26 Juni 2012 yang diaktakan oleh Notaris Refizal, SH, M.Hum menerangkan bahwa telah disetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor oleh para pemegang saham sebesar Rp7.500.000.000 dari Kabupaten Anambas, perubahan tersebut merubah susunan modal ditempatkan yang semula sebesar Rp894.874.800.000 berubah menjadi Rp902.374.800.000.

Berdasarkan surat dari Bank Indonesia nomor 15/5/DPB1/APBU/Pbr tanggal 14 Januari 2013 mengenai Laporan Perubahan Modal Bank Riau Kepri, dijelaskan bahwa Bank telah mendapatkan pengesahan dari Bank Indonesia atas perubahan modal tersebut.

Adapun perubahan Modal tersebut adalah modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh para pemegang saham yang semula sebanyak 8.948.748 lembar saham seri A dengan nilai nominal saham sebesar Rp100.000 per lembar saham atau sebesar Rp894.874.800.000 menjadi 9.023.748 lembar saham seri A dengan

with nominal value in the amount of Rp100.000 per share or in the amount of Rp826.873.900.000.

21. Share capital (continued)

Based on minute of the Shareholders Extraordinary General Meeting Number 46 dated June 15, 2012 by Notary Refizal, SH, M.Hum, that the shareholders approved the increasing of capital of the year 2011 amounted Rp54.800.929.133, the planning of capital from 70% devidend in 2011 amounted to Rp122.340.843.240, from kabupaten Anambas amounted to Rp7.500.000.000, and kabupaten Meranti amounted to Rp15.000.000.000.

Based on General Meeting Of Shareholders (GMOS) were notarial deed number 47 dated on May 31, 2011 by notaries Fery Bakti, SH mentioned its authorized fully paid up capital of Bank as of June 30, 2012 was changed from Rp826.873.900.000 to become Rp840.073.900.000. Additional placed of capital and paid up capital amounted of Rp13.200.000.000 has been recorded in the administration of Bank Indonesia based on the letter No.14/12/DPB1/APBU/Pbr dated February 7, 2012.

Based on Meeting declare decision were notarial deed number 60 dated on June 26, 2012 by notaries Refizal, SH, M.Hum that the Shareholders was approved to paid up capital amount to Rp54.801.000.000 mentioned its authorized fully paid up capital of Bank as of December 31, 2012 was changed from Rp840.073.900.000 to become Rp894.874.900.000. Based on Letter of Bank Indonesia on the subject of Additional paid up capital and changing of shareholders composition with number 14/52/DPB1/APBU/Pbr dated December 28, 2012.

Addition plan of the working capital 2013 based on the minutes of meeting PT Bank Riau Kepri deed number 43 dated on June 15, 2013 by notarial Refizal, SH, M.Hum disclouse about additional paid up and fully paid capital by shareholders amounted to Rp54.771.345.829 from regional goverment and from 70% devidend amounted to Rp133.591.100.000. That changed was changing projection of the working capital 2013 with beginning are amounting to Rp902.374.800.000 to become Rp1.090.737.245.829. .

Bank has confirmed from Bank Indonesia about additional paid up capital amount to Rp54.801.000.000 was has been recorded in the administration of Bank Indonesia.

Based on the minutes of meeting PT Bank Riau Kepri deed number 60 dated on June 26, 2012 by notarial Refizal, SH, M.Hum disclouse about additional paid up and fully paid capital by shareholders amounted to Rp7.500.000.000 from Anambas regional goverment, that changed was changing that additional fully paid with beginning are amounting to Rp894.874.800.000 to become Rp902.374.800.000.

Based on letter from Bank of Indonesia number 15/5/DPB1/APBU/Pbr dated on Januari 14, 2013 about changing report of Bank Riau Kepri capital placement and fully paid up, explained that Bank has obtain confirmation from Bank of Indonesia as that changing.

The changed of The working capital it has been placed and deposited fully paid by the shareholders as many as from 8.948.748 share certificate series A with nominal value in the amount of Rp100.000 per share certificate or in the amount of Rp894.874.800.000 to become 9.023.748 per share A series with

nilai nominal saham sebesar Rp100.000 per lembar saham atau sebesar Rp902.374.800.000.

nominal value in the amount of Rp100.000 per share certificate or in the amount of Rp902.374.800.000.

21. Modal Saham (lanjutan)

21. *Share capital (continued)*

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Riau Kepri nomor 68 tanggal 26 Juni 2013 yang diaktakan oleh Notaris Refizal, SH, M.Hum menerangkan bahwa telah menyetujui penambahan modal disetor sebesar Rp.54.771.345.829 sehingga posisi modal disetor Bank telah berubah dari Rp902.374.800.000 menjadi Rp957.146.100.000. Laporan perubahan modal disetor tersebut telah disetujui oleh Bank Indonesia berdasarkan surat No.15/9/DPKP/Pbr tanggal 17 September 2013.

Based on the Minutes of Meeting of PT Bank Riau Kepri number 68 dated 26 June 2013, in the notarial deed of Refizal, SH, M.Hum explained they aproving the increasing of paid in capital amounted to Rp.54.771.345.829, so the Bank paid in capital changed, icreased from the amount of Rp.902.374.800.000 to Rp.957.146.100.000 . The Report of paid in capital changes had been aproved by Bank of Indonesia based on the letter number 15/9/DPKP/PBR dated September 17, 2013.

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Riau Kepri nomor 02 tanggal 01 Juni 2014 yang diaktakan oleh Notaris Fery Bakti, SH menerangkan bahwa telah menyetujui penambahan modal disetor sebesar Rp19.641.843.946 dan menyetujui rencana tambahan modal disetor tahun 2014 sebesar Rp177.710.516.033 atau sebesar dari 70% dari dividen yang dibagikan sebesar Rp253.872.165.762.

Based on the Minute of the Shareholders' Extraordinary General Meeting of PT Bank Riau Kepri number 02, dated June 01, 2014 in the deed of the Public Notary Fery Bakti, SH, explained that was approved the planning of paid in capital additional of the year 2014 amounted to Rp.177.710.516.033 or 70% of devidend shared amounted to Rp.258.872.165.762.

Realisasi modal disetor pada tahun 2014 sebesar Rp19.641.800.000 sehingga total modal disetor bank per 31 Desember 2014 menjadi sebesar Rp976.787.900.000. Perubahan modal disetor bank telah disetujui Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau berdasarkan surat OJK No. S-139/KO.5411/2014 tanggal 9 September 2014.

Realization of paid-in capital in 2014 amounted to Rp19.641.800.000 bringing the total paid up capital of the bank at December 31, 2014 amounted to Rp976.787.900.000. Changes in capital the bank has approved the Office of the Financial Services Authority FSA Riau Province by letter No. S-139 / KO.5411 / 2014 dated September 9, 2014.

Berdasarkan berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Bank Riau Kepri No.7 tanggal 8 November 2014 yang dibuat oleh notaris Fery Bakti, SH disetujui penambahan modal disetor pemerintah kota Batam sebesar Rp42.940.400.000 dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar Rp10.000.000.000. Sebagaimana juga dinyatakan pada akta pernyataan keputusan rapat PT. Bank Riau Kepri No.06 tanggal 2 Desember 2014 yang dibuat oleh notaris Fery Bakti, SH menyetujui penambahan modal disetor tersebut diatas sehingga total modal disetor menjadi Rp1.029.728.300.000 rincian modal disetor sebesar Rp976.787.900.000 adalah sebagai berikut :

Based on the minutes of the general meeting of shareholders extraordinary PT. Bank Riau Riau 7 November 8, 2014 made by notary Fery Bakti, SH approved additional paid-in capital amounted Rp42.940.400.000 Batam city government and the Government of the District of Rp10,000,000,000 Meranti Islands. As also stated in the Deed of PT. Bank Riau Riau Islands No.06 dated December 2, 2014 made by notary Fery Bakti, SH agreed to increase the paid up capital of the above so that the total paid up capital be paid up capital of Rp1.029.728.300.000 Rp976.787.900.000 details are as follows:

Komposisi kepemilikan modal disetor per 31 Desember 2014 sebagai berikut :

Composition of Authorized capital December 31, 2014 are as follow :

	31 Desember 2014/ December 31, 2014		
	Lembar saham / *per share*	**Per lembar saham / *par value (Rp)***	**Jumlah Nilai Saham / *Value of share (Rp)***
Modal Dasar / *Authorized capital*			
Saham Seri A / *Share of A series*	17,000,000	100,000	1,700,000,000,000
Saham Seri B / *Share of B series*	3,000,000	100,000	300,000,000,000
Jumlah / *total*	**20,000,000**		**2,000,000,000,000**
Modal Ditempatkan dan disetor penuh / *Issued and fully paid up capital*			
Saham Seri A / *Share of A series*	9,767,879	100,000	976,787,900,000
Saham Seri B / *Share of B series*	-	100,000	-
Jumlah / *total*	**9,767,879**		**976,787,900,000**

21. Modal Saham (lanjutan) / ***21. Share capital (continued)***

No.	Pemegang Saham / *Shareholders*	31 Desember 2014/ December 31, 2014			
		% Kepemilikan / *% ownership*	Lembar saham / *per share*	Per lembar saham / *par value (Rp)*	Jumlah Nilai Saham / *Value of share (Rp)*
	Terdiri dari pemerintah daerah :				
1.	Provinsi Riau	42.91%	4,191,682	100,000	419,168,200,000
2.	Kota Pekanbaru	1.54%	150,000	100,000	15,000,000,000
3.	Kabupaten Kampar	10.77%	1,051,812	100,000	105,181,200,000
4.	Kabupaten Bengkalis	12.45%	1,216,062	100,000	121,606,200,000
5.	Kabupaten Indragiri Hulu	0.66%	64,007	100,000	6,400,700,000
6.	Kabupaten Indragiri Hilir	3.95%	385,520	100,000	38,552,000,000
7.	Kabupaten Siak Sri Indrapura	3.35%	327,110	100,000	32,711,000,000
8.	Kota Dumai	0.53%	52,030	100,000	5,203,000,000
9.	Kabupaten Pelalawan	3.27%	319,668	100,000	31,966,800,000
10.	Kabupaten Rokan Hulu	0.85%	82,807	100,000	8,280,700,000
11.	Kabupaten Rokan Hilir	3.80%	371,351	100,000	37,135,100,000
12.	Kabupaten Kuantan Singingi	1.56%	152,086	100,000	15,208,600,000
13.	Kabupaten Bintan	3.49%	340,789	100,000	34,078,900,000
14.	Kota Batam	0.72%	70,596	100,000	7,059,600,000
15.	Kabupaten Karimun	0.74%	71,900	100,000	7,190,000,000
16.	Kabupaten Natuna	1.86%	181,546	100,000	18,154,600,000
17.	Kota Tanjung Pinang	0.86%	83,913	100,000	8,391,300,000
18.	Kabupaten Kep. Meranti	4.10%	400,000	100,000	40,000,000,000
19.	Kabupaten Lingga	0.61%	60,000	100,000	6,000,000,000
20.	Provinsi Kepulauan Riau	1.23%	120,000	100,000	12,000,000,000
21.	Kabupaten Anambas	0.77%	75,000	100,000	7,500,000,000
	Jumlah / *Amount to*	**100.00%**	**9,767,879**		**976,787,900,000**

Komposisi kepemilikan modal disetor per 31 Desember 2013 sebagai berikut :

Composition of Authorized capital December 31, 2013 are as follow :

	31 Desember 2013		
	Lembar saham / *per share*	Per lembar saham / *par value (Rp)*	Jumlah Nilai Saham / *Value of share (Rp)*
Modal Dasar / *Authorized capital*			
Saham Seri A / *Share of A series*	17,000,000	100,000	1,700,000,000,000
Saham Seri B / *Share of B series*	3,000,000	100,000	300,000,000,000
Jumlah / *total*	**20,000,000**		**2,000,000,000,000**
Modal Ditempatkan dan disetor penuh / *Issued and fully paid up capital*			
Saham Seri A / *Share of A series*	9,571,461	100,000	957,146,100,000
Saham Seri B / *Share of B series*	-	100,000	-
Jumlah / *total*	**9,571,461**		**957,146,100,000**

No.	Pemegang Saham / *Shareholders*	31 Desember 2013			
		% Kepemilikan / *% ownership*	Lembar saham / *per share*	Per lembar saham / *par value (Rp)*	Jumlah Nilai Saham / *Value of share (Rp)*
	Terdiri dari pemerintah daerah :				
1.	Provinsi Riau	43.79%	4,191,682	100,000	419,168,200,000
2.	Kota Pekanbaru	1.57%	150,000	100,000	15,000,000,000
3.	Kabupaten Kampar	10.99%	1,051,812	100,000	105,181,200,000
4.	Kabupaten Bengkalis	12.71%	1,216,062	100,000	121,606,200,000
5.	Kabupaten Indragiri Hulu	0.67%	64,007	100,000	6,400,700,000
6.	Kabupaten Indragiri Hilir	3.54%	339,102	100,000	33,910,200,000
7.	Kabupaten Siak Sri Indrapura	3.42%	327,110	100,000	32,711,000,000
8.	Kota Dumai	0.54%	52,030	100,000	5,203,000,000
9.	Kabupaten Pelalawan	3.34%	319,668	100,000	31,966,800,000
10.	Kabupaten Rokan Hulu	0.87%	82,807	100,000	8,280,700,000
11.	Kabupaten Rokan Hilir	3.88%	371,351	100,000	37,135,100,000

12.	Kabupaten Kuantan Singingi	1.59%	152,086	100,000	15,208,600,000
13.	Kabupaten Bintan	3.14%	300,789	100,000	30,078,900,000

21. Modal Saham (lanjutan) / ***21. Share capital (continued)***

No.	Pemegang Saham / *Shareholders*	31 Desember 2013			
		% Kepemilikan / *% ownership*	Lembar saham / *per share*	Per lembar saham / *par value (Rp)*	Jumlah Nilai Saham / *Value of share (Rp)*
14.	Kota Batam	0.74%	70,596	100,000	7,059,600,000
15.	Kabupaten Karimun	0.75%	71,900	100,000	7,190,000,000
16.	Kabupaten Natuna	1.90%	181,546	100,000	18,154,600,000
17.	Kota Tanjung Pinang	0.88%	83,913	100,000	8,391,300,000
18.	Kabupaten Kep. Meranti	3.13%	300,000	100,000	30,000,000,000
19.	Kabupaten Lingga	0.52%	50,000	100,000	5,000,000,000
20.	Provinsi Kepulauan Riau	1.25%	120,000	100,000	12,000,000,000
21.	Kabupaten Anambas	0.78%	75,000	100,000	7,500,000,000
	Jumlah / *Amount to*	**100.00%**	**9,571,461**		**957,146,100,000**

22. Tambahan modal disetor / ***22. Additional Paid-in Capital***

Akun ini terdiri dari :	31 Desember 2014	31 Desember 2013	*This account consists of :*
Setoran modal	2,084,940,000	2,084,940,000	*Paid Capital*
• Provinsi Riau	405	405	*Riau Province* •
• Kota Pekanbaru	18,217	18,217	*City of Pekanbaru* •
• Kota Tanjung Pinang	35,731	35,731	*City of Tanjung Pinang* •
• Kota Batam	42,940,411,793	11,793	*City of Batam* •
• Kabupaten Kampar	18,574	18,574	*Regional goverment of Kampar* •
• Kabupaten Bengkalis	29,804	29,804	*Regional goverment of Bengkalis* •
• Kabupaten Indragiri Hulu	11,089	11,089	*Regional govern. of Indragiri Hulu* •
• Kabupaten Indragiri Hilir	5,475,102,548	4,641,902,548	*Regional govern. Of Indragiri Hilir* •
• Kabupaten Bintan	4,000,022,286	4,000,022,286	*Regional goverment of Bintan* •
• Kabupaten Pelalawan	72,657	72,657	*Regional goverment of Pelalawan* •
• Kabupaten Rokan Hilir	37,421	37,421	*Regional goverment of Rokan Hilir* •
• Kabupaten Meranti	10,000,000,000	10,000,000,000	*Regional goverment of Meranti* •
• Kabupaten Lingga	-	1,000,000,000	*Regional goverment of Lingga* •
Jumlah	**64,500,700,524**	**21,727,100,524**	*Total*

Mutasi tambahan modal disetor per 31 Desember 2014 / ***Mutation of Additional Paid-in Capital December 31, 2014***

Keterangan / *Description*	31 Desember 2014			
	Saldo awal tahun / *Beginning balance*	Penambahan / *Additional*	Reklasifikasi ke modal/ *Reclasification to paid capital*	Saldo Akhir Tahun / *Ending balance*
Dana setoran modal / *Fund of paid capital*	2,084,940,000	-	-	2,084,940,000
Pemerintah provinsi Riau / *Government of Riau Province*	405	-	-	405
Pemerintah Kota / *Government of City*	-			
• Pekanbaru	18,217	-	-	18,217
• Tanjung Pinang	35,731	-	-	35,731
• Kampar	18,574	-	-	18,574
• Bengkalis	29,804	-	-	29,804
• Indragiri Hulu	11,089	-	-	11,089
• Indragiri Hilir	4,641,902,548	5,475,000,000	4,641,800,000	5,475,102,548
• Bintan	4,000,022,286	4,000,000,000	4,000,000,000	4,000,022,286
• Pelalawan	72,657	-	-	72,657
• Rokan Hilir	37,421	-	-	37,421
• Batam	11,793	42,940,400,000	-	42,940,411,793
• Kepulauan Meranti	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000
• Lingga	1,000,000,000	-	1,000,000,000	-

Jumlah / *Amount to*	**21,727,100,525**	**62,415,400,000**	**19,641,800,000**	**64,500,700,525**

22. Tambahan modal disetor (lanjutan) / ***22. Additional Paid-in Capital (continued)***

Mutasi tambahan modal disetor per 31 Desember 2013 / ***Mutation of Additional Paid-in Capital 31 December 2013***

Keterangan / *Description*	31 Desember 2013			
	Saldo awal tahun / *Beginning balance*	Penambahan / *Additional*	Reklasifikasi ke modal/ *Reclasification to paid capital*	Saldo Akhir Tahun / *Ending balance*
Dana setoran modal / *Fund of paid capital*	2,084,940,000	-	-	2,084,940,000
Pemerintah provinsi Riau / *Government of Riau Province*	405	-	-	405
Pemerintah Kota / *Government of City*	-			
• Pekanbaru	3,646,918,217	-	3,646,900,000	18,217
• Tanjung Pinang	35,731	-	-	35,731
• Kampar	18,574	-	-	18,574
• Bengkalis	20,000,029,804	-	20,000,000,000	29,804
• Indragiri Hulu	11,089	-	-	11,089
• Indragiri Hilir	2,816,558,602	4,641,843,946	2,816,500,000	4,641,902,548
• Bintan	4,000,022,286	4,000,000,000	4,000,000,000	4,000,022,286
• Pelalawan	4,120,072,657	-	4,120,000,000	72,657
• Rokan Hilir	4,187,937,421	-	4,187,900,000	37,421
• Batam	11,793	-	-	11,793
• Kepulauan Meranti	15,000,000,000	10,000,000,000	15,000,000,000	10,000,000,000
• Lingga	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
• Anambas	7,500,000,000	-	7,500,000,000	-
Jumlah / *Amount to*	**64,356,556,579**	**19,641,843,946**	**62,271,300,000**	**21,727,100,525**

23. Saldo laba / ***23. Retained earnings***

Akun ini terdiri dari :	31 Desember 2014	31 Desember 2013	*This account consists of :*
Cadangan umum dan tujuan	774,861,564,706	605,613,454,198	*General reverses and purpose*
Belum ditentukan penggunaannya	574,816,375,214	497,366,202,036	*Unappropriated*
Saldo laba	**1,349,677,939,920**	**1,102,979,656,234**	*Retained earnings*
Cadangan umum dan tujuan :			*General reverses and purpose : :*
• Cadangan umum	395,466,423,971	302,379,963,192	*General reserves* •
• Cadangan tujuan	379,395,140,735	303,233,491,006	*Purpose reserves* •
Jumlah	**774,861,564,706**	**605,613,454,198**	*Total*

a. Cadangan umum / ***a. General reserves***

Penggunaan cadangan umum ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengacu kepada perundang-undangan serta digunakan untuk menutup kerugian Bank.

The general reserves certainly by General Meeting Of Stockholders with refer to regulation by the Law and used for covered Bank losses.

Pembentukan cadangan umum tahun 2014 atas penetapan penggunaan laba tahun 2013, berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Riau Kepri, Akta No. 01, tanggal 01 Juni 2014 yang dibuat oleh Notaris Fery Bakti, SH Notaris di Pekanbaru.

In 2014 the general reserves as the profit in 2013, based on the minute of annual meeting of Bank Riau Kepri stockholder, notarial deed number 01, dated on June 01, 2014, prepared by Notary Fery Bakti, SH Notarial in Pekanbaru.

Pembentukan cadangan umum tahun 2013 atas penetapan penggunaan laba tahun 2012, berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Riau Kepri, Akta No. 42, tanggal 15 Juni 2013 yang dibuat oleh Notaris Refizal, SH, M.Hum, Notaris di Jakarta.

In 2013 the general reserves as the profit in 2012, based on the minute of annual meeting of Bank Riau Kepri stockholder, notarial deed number 42, dated on June 15, 2013, prepared by Notary Refizal, SH, M.Hum. Notarial in Jakarta.

Akun ini terdiri dari :	31 Desember 2014	31 Desember 2013	*This account consists of :*
Saldo awal	302,379,963,192	232,403,207,988	*Beginning balance*
Penambahan dari pembagian laba	93,086,460,779	69,976,755,204	*Additional from profit sharing*

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2014 dan 2013
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years ended
December 31, 2014 and 2013
(Expressed in fully Rupiah, unless otherwise stated)

Saldo akhir	**395,466,423,971**	**302,379,963,192**	*Ending balance*

23. Saldo laba (lanjutan)

b. Cadangan tujuan

Penggunaan dana cadangan tujuan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan serta digunakan untuk menambah modal Bank dan perluasan usaha Bank.

Pembentukan cadangan tujuan tahun 2014 atas penetapan penggunaan laba tahun 2013, berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Riau Kepri, Akta No. 01, tanggal 01 Juni 2014 yang dibuat oleh Notaris Fery Bakti, SH Notaris di Pekanbaru.

Pembentukan cadangan tujuan tahun 2013 atas penetapan penggunaan laba tahun 2012, berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Riau Kepri, Akta No. 42, tanggal 15 Juni 2013 yang dibuat oleh Notaris Refizal, SH, M.Hum, Notaris di Jakarta.

23. Retained earnings (continued)

b. Purpose reserves

The purpose reserves fund certainly by General Meeting Of Stockholders with refer to regulation by the Law and used for paid up bank capital and bank business expansion.

In 2014 the purposes reserves as the profit in 2013, based on the minute of annual meeting of Bank Riau Kepri stockholder, notarial deed number 01, dated on June 01, 2014, prepared by Notary Fery Bakti, SH Notarial in Pekanbaru.

In 2013 the purposes reserves as the profit in 2012, based on the minute of annual meeting of Bank Riau Kepri stockholder, notarial deed number 42, dated on June 15, 2013, prepared by Notary Refizal, SH, M.Hum. Notarial in Jakarta.

Akun ini terdiri dari :	31 Desember 2014	31 Desember 2013	*This account consists of :*
Saldo awal	303,233,491,006	245,979,782,203	*Beginning balance*
Penambahan dari pembagian laba	76,161,649,729	57,253,708,803	*Additional from net income distribution*
Saldo akhir	**379,395,140,735**	**303,233,491,006**	*Ending balance*

c. Belum ditentukan penggunaannya

c. Unappropriated

Akun ini terdiri dari :	31 Desember 2014	31 Desember 2013	*This account consists of :*
Saldo laba awal tahun	497,366,202,036	375,161,990,397	*Beginning balance*
Pembagian laba tahun lalu	(423,120,276,270)	(318,076,160,018)	*Profit sharing of last period*
Laba bersih tahun berjalan	500,570,449,448	423,120,276,270	*Current year net income*
Pengembalian Dana CSR	-	17,160,095,387	*Refund of CSR Fund*
Saldo laba akhir tahun	**574,816,375,214**	**497,366,202,036**	*Ending balance*

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diaktakan oleh Notaris Refizal, SH, M.Hum dengan akta nomor 45 tanggal 15 Juni 2012 dijelaskan bahwa Bank telah mengusulkan untuk mengembalikan dana CSR yang diambil dari laba bersih tahun 2010 sebesar Rp17.160.095.387 untuk dikembalikan ke laba ditahan karena tidak sesuai landasan hukum program CSR yaitu Undang-undang No.40 tahun 2007 pasal 74 ayat 2 yaitu kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya yang memperhatikan kewajaran dan kepatutan. Namun pada akhir keputusannya, Bank memutuskan untuk membagikan secara proporsional dana CSR tersebut sesuai dengan hasil RUPS tahun 2011.

Based on minute of the Shareholders Extraordinary General Meeting Number 45 dated June 15, 2012 by Notary Refizal, SH, M.Hum, explained that the Bank have approved to refund CSR fund took from the net income in 2010 amounted to Rp17.160.095.387 to retained earning because it was not in accordance with the law of CSR program, rule number 40, 2007 article 74 point 2 about the company responsibility that budgeted and calculated as expenses with qualification and properity. The final of ending decision, Bank was decided to distribute that CSR fund as proportional appropriate with General Meeting of Stockholders in year 2011.

24. Pendapatan bunga dan syariah

24. Interest and sharia Income

Akun ini terdiri dari :	31 Desember 2014	31 Desember 2013	*This account consists of :*
Pendapatan bunga SBI	112,594,496,596	80,223,662,091	*Interest income at Bank Ind*
Pendapatan jasa giro Bank Indonesia	6,969,190,140	8,181,482,254	*Interest income of Bank Indonesia*
Bunga penempatan pada bank lain	250,143,078,947	261,616,241,287	*Placement interest in other banks*
Bunga kredit pada bank lain	-	94,430,428	*Interest loans in other banks*
Bunga kredit yang diberikan	1,719,645,056,630	1,542,157,452,775	*Interest loans*
Pendapatan bunga lainnya	16,654,622	24,494,920	*Others interest income*
Jumlah pendapatan bunga	**2,089,368,476,935**	**1,892,297,763,754**	*Total interest income*

24. Pendapatan bunga dan syariah (lanjutan) / 24. Interest and sharia Income (continued)

Pendapatan marjin murabahah	71,985,801,324	49,262,690,876	Margin income of murabahah
Pendapatan ijarah	5,451,089,702	6,789,796,223	income for ijarah assets
Pendapatan bersih istishna paralel	126,875,000	217,500,000	Income for Istishna parallel
Bagi hasil pembiayaan mudharabah	103,599,996	103,599,996	Mudharabah profit sharing loan
Bagi hasil penempatan tabungan mudharabah pada bank lain	43,929,150	67,207,689	Placement in Others bank savings Mudharabah profit sharing
Bagi hasil penempatan deposito mudharabah pada bank lain	7,456,718,943	10,139,664,841	Placement in Others bank deposito Mudharabah profit sharing
Bagi hasil penempatan giro mudharabah pada bank lain	296,175,458	95,161,244	Placement in Others bank giro Mudharabah profit sharing
Bagi hasil pembiayaan musyarakah	166,202,417	617,825,964	Musyarakah profit sharing loan
Jumlah pendapatan syariah	**85,630,391,990**	**67,293,446,834**	Total sharia income
Jumlah	**2,174,998,868,925**	**1,959,591,210,588**	Total

25. Beban bunga dan syariah / 25. Interest and sharia expenses

Akun ini terdiri dari :	31 Desember 2014	31 Desember 2013	This account consists of :
Bunga giro	188,192,783,628	248,441,746,843	Current acoount expenses
Bunga tabungan	77,473,315,652	68,708,111,653	Savings expenses
Bunga pinjaman yang diterima	8,441,981,664	10,276,718	Interest expenses to Bank Ind
Bunga obligasi yang diterbitkan	52,108,713,929	52,097,987,039	Bond of interest expenses
Bunga simpanan bank	137,498,354,617	37,021,837,451	Interest expenses to Others Bank
Bunga deposito berjangka	332,659,433,826	228,561,343,578	Time deposit
Jumlah beban bunga	**796,374,583,316**	**634,841,303,282**	Total interest expenses
Bagi hasil tabungan mudharabah	9,593,900,314	9,019,218,506	Nisbah share income for savings
Bagi hasil deposito mudharabah	10,167,978,041	6,705,910,549	Nisbah share income for deposit
Bonus wadiah	910,471,338	963,814,579	Bonus of Wadiah expenses
Jumlah beban syariah	**20,672,349,693**	**16,688,943,634**	Total sharia expenses
Provisi dan komisi	808,873,653	723,727,055	Fee and commision
Jumlah	**817,855,806,662**	**652,253,973,971**	Total

26. Pendapatan operasional lainnya / 26. Others operating income

Akun ini terdiri dari :	31 Desember 2014	31 Desember 2013	This account consists of :
Provisi dan komisi selain kredit	30,251,726,443	32,467,118,374	Non credit fee and commission
Pendapatan restitusi biaya	16,784,969,660	19,243,709,602	Cost restitution of income
Pendapatan administrasi	43,762,388,270	44,332,316,047	Saving administration and ATM
Pendapatan kredit hapus buku	1,544,045,258	2,119,470,060	loans written-off income
Pendapatan fee	521,817,882	456,848,440	Profit of obligation sales
Dividen dari penyertaan pada bank	61,078,243	-	Dividends from investments in banks
Pemulihan CKPN penempatan pada bank lain	1,084,106,301	693,326,772	recovery allowance for impairment losses placement with others bank
Pemulihan CKPN kredit yang diberikan	48,743,388,401	-	CKPN recovery loans
Keuntungan bersih nilai efek yang diperdagangkan	20,800,150,000	21,452,550,000	Net profit of share sales
Keuntungan bersih penjualan obligasi	-	180,600,000	Net profit of obligation sales
Jumlah	**163,553,670,457**	**120,945,939,294**	Total

27. Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif / 27. Allowance for impairment losses on earning assets expenses

Akun ini terdiri dari :	31 Desember 2014	31 Desember 2013	This account consists of :
Kredit yang diberikan	26,561,561,575	53,105,953,991	Placement to other banks loans

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2014 dan 2013
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years ended
December 31, 2014 and 2013
(Expressed in fully Rupiah, unless otherwise stated)

Penempatan pada bank lain	807,254,644	-	*Placement in other bank*
Jumlah	**27,368,816,219**	**53,105,953,991**	*Total*

28. Beban operasional lainnya / ***28. Others operating expenses***

Akun ini terdiri dari :	31 Desember 2014	31 Desember 2013	*This account consists of :*
Beban umum dan adminitrasi	176,753,513,652	155,986,658,951	*General & administration expenses*
Beban tenaga kerja	485,134,320,808	424,520,677,570	*Personnel expenses*
Beban operasional lainnya	143,557,732,447	152,207,942,168	*Other operating expenses*
Jumlah	**805,445,566,907**	**732,715,278,689**	*Total*

- **Beban umum dan adminitrasi** / ***General & administration expenses*** •

Beban premi asuransi	11,696,943,330	9,601,272,605	*Insurance premium*
Pengkajian dan pengembangan usaha	21,249,644,795	15,102,006,604	*Research and development*
Beban sewa	26,293,559,009	22,999,768,767	*Rent expensess*
Promosi usaha	23,552,784,834	27,783,833,444	*Promotion expenses*
Pajak-pajak selain PPh Badan	404,394,016	425,506,397	*Tax exp. except income taxes*
Pemeliharaan aset tetap bangunan	4,902,671,675	4,518,520,410	*Building maintenance*
Pemeliharaan aset tetap kendaraan	3,911,663,068	2,934,607,094	*Vehicle maintenance*
Pemeliharaan aset tetap inventaris	5,256,011,893	4,514,363,387	*Equipments maintenance*
Penyusutan bangunan	2,694,887,299	2,026,760,411	*Building depreciation*
Penyusutan inventaris golongan I	11,075,348,264	12,787,882,945	*Equipments depreciation group I*
Penyusutan inventaris golongan II	4,616,574,683	4,073,938,363	*Equipments depreciation group II*
Amortisasi beban ditangguhkan	2,059,455,687	5,553,436,702	*Deferred expenses amortization*
Listrik, air, telepon dan elektronik	17,219,203,101	14,992,399,979	*Electricity, water, telephone*
Keperluan kantor	15,266,600,272	15,434,623,662	*Office supplies*
Perjalanan dinas	15,933,912,419	11,345,814,114	*Travelling expenses*
Beban umum dan administrasi lain	10,619,859,306	1,891,924,067	*Others general and administration*
Jumlah	**176,753,513,652**	**155,986,658,951**	*Total*

Akun ini terdiri dari :	31 Desember 2014	31 Desember 2013	*This account consists of :*
• **Beban tenaga kerja**			***Employee expenses*** •
Imbalan kerja dan tunjangan direksi	3,369,600,000	2,948,400,000	*Director's salaries & allowance*
Imbalan kerja dan tunjangan pegawai	126,421,901,473	124,772,954,689	*Employees' salaries & allowance*
Honor dewan komisaris	2,549,760,000	2,574,560,000	*Board of comisioners fee*
Beban lembur	4,077,013,794	1,704,933,038	*Over time payment*
Perawatan kesehatan	11,962,336,135	9,908,566,694	*Health care benefits*
Beban cuti	12,649,254,492	14,522,198,650	*Leave benefits*
Iuran pensiun, astek dan THT	19,542,984,307	19,104,303,716	*Pension, labour insurance & THT*
Jasa produksi	100,114,089,890	84,624,055,254	*Employee bonuses*
Tantiem pengurus	25,028,522,472	21,156,013,813	*Management Tantiem*
Pendidikan dan pelatihan	21,504,078,468	16,680,880,966	*Education & training benefits*
Penghargaan dan Jasa Masa Bakti	10,157,881,665	12,467,336,535	*The inauguration of the Bank official*
Insentif bonus	29,585,775,096	20,165,935,037	*Bonus incentive*
Olah Raga	1,807,576,779	4,232,067,639	*Sports*
Pakaian Dinas	11,137,341,000	10,806,316,000	*Uniform*
Tunjangan Hari raya	32,381,078,400	32,167,379,000	*Hari Raya Allowance*
Uang Makan Pegawai	13,987,088,750	13,073,396,550	*Employee meal expenses*
Seleksi Calon Pegawai	683,000	7,260,500	*Employee recruitment selection*
Tunjangan PPh pasal 21	29,140,983,327	30,016,538,677	*Allowance of income taxes art 21*
Ibadah Haji	97,575,372	35,221,000	*Hajj*
Beban imbalan pasca kerja	23,940,931,485	-	*Employe benefits Expenses*
Tenaga Kerja lainnya	5,047,089,903	3,552,359,812	*Other employee expenses*
Jumlah	**485,134,320,808**	**424,520,677,570**	*Total*
• **Beban operasional lainnya**		• ***Others operating expenses***	
Honorarium pihak ekstern	920,240,850	874,332,784	*Exsternal parties honorarium*
Penyelesaian kredit dan perkara	745,921,051	1,671,871,410	*Credit clearance and court matters*
Rapat Kerja	4,335,266,254	6,045,562,247	*Business meeting expenses*
Beban profesional	1,767,020,908	1,376,600,736	*Profesional fee*
Pengamanan dan Penertiban	3,519,281,100	3,377,305,475	*Security and safety expenses*
Beban bunga lainnya	25,389,268,537	37,154,778,960	*Others interest expenses*
Peresmian kantor	396,475,100	142,062,792	*Office grand opening*
Jasa penagihan kredit/ Pembiayaan	60,043,827,726	46,977,623,479	*Collector and loans service*

Hidangan ringan/ Minuman Pegawai	1,499,061,824	1,088,868,320	*snack employee*
Santunan kematian/ cacat pegawai	433,598,925	304,674,833	*Donation of employee*
Santunan Bencana Alam/ Kebakaran untuk	2,500,000	-	*Donation of force majure for employee*
Pembinaan kemitraan	21,572,000,000	12,062,500,000	*Pathnership*

28. Beban operasional lainnya (lanjutan)

28. *Others operating expenses (continued)*

- **Beban operasional lainnya (lanjutan)**
- ***Others operating expenses (continued)***

Kesalahan fee ATM Bersama	73,979,000	43,733,500	*ATM Bersama expenses*
Amortisasi hak sewa ijarah	4,354,648,843	5,451,181,303	*Amortization of ijarah rent*
Operasional lain-lainnya	18,504,642,330	35,636,846,329	*Other operating*
Jumlah	**143,557,732,447**	**152,207,942,168**	*Total*
Jumlah	**805,445,566,907**	**732,715,278,689**	*Total*

Bank membentuk penyisihan cadangan estimasi atas beban tantiem pengurus dan jasa produksi pada tahun 2014 dan 2013. Estimasi tersebut telah dicatat dan dibebankan pada periode tersebut. Pembayaran akan dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

The Bank establishes the setting aside of estimation reserve on the management dividend liability and the production service in 2014 and 2013. The estimation has been recorded and charged to that period. The payment shall be performed after obtaining the approval from the General Meeting of Shareholders.

Realisasi Dana Pembinaan Kemitraan/ CSR tahun 2013 sesuai Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 05 Juli 2013 yang dituangkan dalam akta Notaris Fery Bakti, SH Nomor 05 tanggal 05 Juli 2013 disetujui penyediaan Dana Pembinaan Kemitraan tahun 2013 sebesar Rp12.000.000.000. Berdasarkan RUPS Bank sesuai Akta berita acara RUPS tahunan Bank tahun 2013 akta No. 01 tanggal 01 Juni 2014 yang dibuat Notaris Fery Bakti, SH bahwa realisasi Dana Pembinaan Kemitraan tahun 2013 sebesar Rp4.111.230.000. Sisa dana tersebut akan direalisasikan di tahun 2015.

Realization of Partnership Development Fund / CSR in 2013 according the General Meeting of Shareholders' Extraordinary dated July 5, 2013 as stated in notarial deed Fery Bakti, SH No. 05 dated July 5, 2013 approved the provision of Partnership Development Fund in 2013 amounted to Rp12.000.000.000. Based on Bank AGM according Deed Bank official report of the Annual Meeting in 2013 deed No. 01 dated June 1, 2014 which made Notary Fery Bakti, SH that the realization of the Partnership Development Fund in 2013 amounted to Rp4.111.230.000. Remaining funds will be realized in 2015.

Penyediaan Dana Pembinaan Kemitraan tahun 2014 berdasarkan RUPS sesuai Akta berita acara RUPS Tahunan Bank akta No. 01 tanggal 01 Juni 2014 yang dibuat Notaris Fery Bakti, SH, disetujui Dana Pembinaan Kemitraan tahun 2014 sebesar Rp21.000.000.000 yang pelaksanaannya diatur dalam kebijakan Direksi tersendiri.

Provision of Partnership Development Fund in 2014 based on the minutes of the AGM in accordance Deed of Annual General Meeting of the Bank deed No. 01 dated June 1, 2014 which made Notary Fery Bakti, SH, Partnership Development Fund approved in 2014 by Rp21.000.000.000 the implementation of which is set in its own Board of Directors.

29. Pendapatan (beban) non operasional

29. *Non operating income (expenses)*

Akun ini terdiri dari :	31 Desember 2014	31 Desember 2013	*This account consists of :*
Pendapatan non operasional			***Non operating income***
Sewa	8,519,159	10,100,000	*Rent*
Koreksi pendapatan non operasional tahun lalu	6,375,664,718	387,294,001	*Correction of costs non operational last year*
Pendapatan pajak lebih bayar 2011	20,934,844,750	-	
Keuntungan penjualan aset tetap	19,250,000	303,268,900	*Gains of fixed assets sales*
Lain-lain	3,765,300,430	9,063,808,003	*Others income*
Jumlah	**31,103,579,057**	**9,764,470,904**	*Total*
Beban non operasional			***Non operating expenses***
Denda yang dibayar	117,454,352	554,105,178	*Fine has been paid*
Beban pajak 2009, 2010, 2012, 2013	8,621,564,459	-	*Tax expense 2009, 2010, 2012, 2013*
Beban pajak tahun 2008	-	32,940,870,792	*Tax expense 2008*
Koreksi beban non operasional tahun lalu	1,440,607,367	1,861,225,696	*Correction of costs non operational last year*
Iuran keanggotaan	6,524,629,284	1,380,263,989	*Member fee*
Non operasional lainnya	12,140,467,824	11,615,386,132	*Others non operating expenses*
Jumlah	**28,844,723,286**	**48,351,851,788**	*Total*
Jumlah - bersih	**2,258,855,770**	**(38,587,380,884)**	*Amount to - net*

Pos denda merupakan beban bank atas pembayaran denda yang

Penalty post is the liability of the bank for penalty payment

dibayarkan kepada Bank Indonesia, denda keterlambatan atas setoran pajak dan beban keterlambatan kartu kredit serta denda

payable to Bank Indonesia, penalty for delay on tax deposit and liability of credit card delay and for other penalty.

30. Transaksi dengan Pihak berelasi

Dalam kegiatan normal usaha, Bank melakukan transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama.

30. Related parties transaction

In the normal course of business, Bank enters into certain transactions with parties which are related to the management and/or owned by the same ultimate shareholder. All transactions with related parties have met the agreed terms and conditions.

No	Pihak berelasi/ Related parties	Sifat hubungan istimewa/ *Nature of relationship*	Transaksi/ *Transaction*
1.	Provinsi Riau / *Riau Province*	Pemegang Saham / Shareholders	Simpanan Giro *(current account)* dan Deposito (*Time deposit).*
2.	Kabupaten Bengkalis / *Regional Goverment of Bengkalis*	Pemegang Saham / Shareholders	Simpanan Giro *(current account)*
3.	Kabupaten Siak Sri Indrapura	Pemegang Saham / Shareholders	Simpanan Giro *(current account)* dan Deposito (*Time deposit).*
4.	Kabupaten Pelalawan	Pemegang Saham / Shareholders	Simpanan Giro *(current account)*
5.	Kabupaten Indragiri Hulu	Pemegang Saham / Shareholders	Simpanan Giro *(current account)*
6.	Kabupaten Indragiri Hilir	Pemegang Saham / Shareholders	Simpanan Giro *(current account)* dan Deposito (*Time deposit).*
7.	Kota Pekanbaru	Pemegang Saham / Shareholders	Simpanan Giro *(current account)* dan Deposito (*Time deposit).*
8.	Kota Dumai	Pemegang Saham / Shareholders	Simpanan Giro *(current account)* dan Deposito (*Time deposit).*
9.	Kabupaten Bintan	Pemegang Saham / Shareholders	Simpanan Giro *(current account)*
10.	Kabupaten Rokan Hilir	Pemegang Saham / Shareholders	Simpanan Tabungan (Saving), Simpanan Giro (current account) dan Deposito (Time deposit).
11.	Kabupaten Kuantan Sengingi	Pemegang Saham / Shareholders	Simpanan Giro *(current account)*
12.	Kota Tanjung Pinang	Pemegang Saham / Shareholders	Simpanan Giro *(current account)* dan Deposito (*Time deposit).*
13.	Kabupaten Kep. Meranti	Pemegang Saham / Shareholders	Simpanan Giro *(current account)*
14.	Provinsi Kepulauan Riau	Pemegang Saham / Shareholders	Simpanan Giro *(current account)*
15.	Kabupaten Kampar	Pemegang Saham / Shareholders	Simpanan Giro *(current account)*
16.	Kabupaten Lingga	Pemegang Saham / Shareholders	Simpanan Giro *(current account)*
17.	Kabupaten Karimun	Pemegang Saham / Shareholders	Simpanan Giro *(current account)*
18.	Kota Batam	Pemegang Saham / Shareholders	Simpanan Giro *(current account)*
19.	Kabupaten Natuna	Pemegang Saham / Shareholders	Simpanan Giro *(current account)* dan Deposito (*Time deposit).*
20.	Kabupaten Rokan Hulu	Pemegang Saham / Shareholders	Simpanan Giro *(current account)* dan Deposito (*Time deposit).*
21.	Kabupaten Kepulauan Anambas	Pemegang Saham / *Sahreholders*	Simpanan Giro *(current account)*
22.	Karyawan kunci / *Key Employees*	Direksi, Komisaris, Pemimpin Cabang, Pemimpin Divisi serta anggota keluarga dekat dengan orang-orang tersebut / *Directors, Commissioners, Heads of Branches, Heads of Divisions and close members of the families of such individuals*	Tabungan (*saving),* deposito *(time deposit)* dan Kredit yang diberikan *(Loans)*

23. PD.BPR Rokan Hilir	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama / *Owned by the ultimate shareholders.*	Simpanan Tabungan *(saving), Simpanan Giro (current account)*

30. Transaksi dengan Pihak berelasi (lanjutan) / ***30. Related parties transaction (continued)***

24. PD. Tuah Sekata	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama / *Owned by the ultimate shareholders.*	Simpanan Giro *(current account), Simpanan Deposito (Time deposits)*
25. PT Penjaminan Kredit Daerah Prop. Riau	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama / *Owned by the ultimate shareholders.*	Simpanan Giro *(current account),Simpanan Tabungan (saving)* dan Simpanan Deposito *(Time deposits)*
26. PT PER	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama / *Owned by the ultimate shareholders.*	Simpanan Giro *(current account)* dan Simpanan Deposito *(Time deposits)*
27. Riau Airlines	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama / *Owned by the ultimate shareholders.*	Simpanan Giro *(current account)*
28. PD. BPR Rohul	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama / *Owned by the ultimate shareholders.*	Simpanan Tabungan *(saving)*
29. PT Yastera	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama / *Owned by the ultimate shareholders.*	Simpanan Giro *(current account)* dan Pinjaman *(Loan)*
30. PD. Rokan Hulu Jaya	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama / *Owned by the ultimate shareholders.*	Simpanan Tabungan (saving), Simpanan Giro (current account)
31. BPR Karimun	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama / *Owned by the ultimate shareholders.*	Simpanan Tabungan (saving), Simpanan Giro (current account)
32. BPR Dana Amanah	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama / *Owned by the ultimate shareholders.*	Simpanan Giro *(current account)*
33. BANK PD BPR Sarimadu	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama / *Owned by the ultimate shareholders.*	Simpanan Tabungan (saving), Simpanan Giro (current account)
34. PT Bumi Laksamana Jaya	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama / *Owned by the ultimate shareholders.*	Simpanan Giro *(current account)*
35. Perusda Kab.Karimun UAB	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama / *Owned by the ultimate shareholders.*	Simpanan Giro *(current account)*
36. PD. Kampar Aneka Karya	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama / *Owned by the ultimate shareholders.*	Simpanan Giro *(current account)*
37. PDAM Tirta Kampar	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama / *Owned by the ultimate shareholders.*	Simpanan Tabungan *(saving)*
38. PD Air Minum Tirta Bintan	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama / *Owned by the ultimate shareholders.*	Simpanan Giro *(current account)*
39. PT Bumi Laksamana Jaya	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama / *Owned by the ultimate shareholders.*	Simpanan Giro *(current account)*

30. Transaksi dengan Pihak berelasi (lanjutan)

Dalam kegiatan usahanya, Bank juga mengadakan transaksi-transaksi tertentu dengan pihak-pihak berelasi. Transaksi-transaksi pada saldo tersebut meliputi:

30. Related parties transaction (continued)

In the normal course of business, the Bank entered into certain transactions with related parties. These transactions and balances include the following:

	31 Desember 2014	31 Desember 2013	
ASET			*ASET*
Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah			*Loans and Sharia loans*
Karyawan kunci	9,151,644,748	7,773,718,883	*Key management*
Jumlah	9,151,644,748	7,773,718,883	*Total*
% terhadap jumlah aset	0.04%	0.04%	*% with compare to total aset*
LIABILITAS			*LIABILITIES*
Simpanan Nasabah			*Deposits from costumer*
Simpanan dari nasabah (catatan 14)	8,591,129,466,051	5,649,635,038,891	*Deposits from costumer (Note 14)*
Jumlah	8,591,129,466,051	5,649,635,038,891	*Total*
% terhadap jumlah liabilitas	41.98%	32.50%	*% with compare to total liabilities*
Simpanan Dari Bank Lain			*Deposits from costumer*
Simpanan dari bank lain (catatan 15)	8,768,476,216	5,815,836,584	*Deposits from other Bank (Note 15)*
Jumlah	8,768,476,216	5,815,836,584	*Total*
% terhadap jumlah liabilitas	0.48%	0.31%	*% with compare to total liabilities*

Simpanan dari nasabah tersebut merupakan simpanan dari manajemen kunci, pemerintah daerah dan Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama.

Deposit from costumer represent deposits from key management, province and regional goverment and The company which owned share by the ultimate shareholders.

Simpanan dari bank lain merupakan simpanan dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang sahamnya dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama.

Deposit from other Bank represent deposits from Bank Perkreditan Rakyat (BPR) which owned share by the ultimate shareholders.

Komitmen dan kontinjensi

Tidak terdapat saldo komitmen dan kontinjensi kepada pihak berelasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013.

Commitment and contingencies

There were no commitments and contingencies to related parties for the year ended December 31, 2014 and December 31, 2013.

Kompensasi terhadap personil manajemen kunci Bank (diluar dari Komisaris dan Direksi) adalah sebagai berikut :

Compensation of key management personnel of the Bank (excluded from Commisioners and Director) are follows :

	31 Desember 2014	31 Desember 2013	
Gaji	8,184,029,500	7,920,208,500	*Salary*
Tunjangan	5,849,383,703	2,579,661,281	*Allowance*
Jasa Produksi	5,745,485,316	4,066,077,780	*Production Bonuses*
Imbalan jangka panjang	2,194,675,325	1,441,462,996	*Long-term benefit*
Jumlah	**21,973,573,844**	**16,007,410,557**	*Total*

31. Informasi segmen usaha

Bank mempertimbangkan jenis usaha sebagai segmen utama dan lokasi geografis sebagai segmen sekunder.

Informasi yang berkaitan dengan segmen usaha yang utama dari Bank disajikan dalam tabel di bawah ini:

31. Segmen information

The Bank considers the nature of its business as the primary segment and geographical areas as the secondary segment

Information concerning the primary segment information of the Bank is set out in the table below:

	31 Desember 2014	31 Desember 2013	
Aset Konvensional	27,058,575,140,121	24,040,910,697,598	*Conventional assets*
Aset Syariah	1,013,781,018,837	1,112,320,559,455	*Sharia assets*
Jumlah	28,072,356,158,957	25,153,231,257,052	*Total*

Eliminasi/penyesuaian	(5,218,288,023,951)	(5,693,313,148,570)	*Elimination/adjustment*
Jumlah	**22,854,068,135,006**	**19,459,918,108,483**	*Total*

31. Informasi segmen usaha (lanjutan) / ***31. Segmen information (continued)***

	31 Desember 2014	31 Desember 2013	
Pendapatan operasional *)			*Operating income *)*
Konvensional	2,265,771,788,100	2,878,450,679,544	*Conventional*
Syariah	95,963,100,622	84,815,634,190	*Sharia*
Jumlah	2,361,734,888,723	2,963,266,313,734	*Total*
Eliminasi/penyesuaian	(23,182,349,341)	(882,729,163,852)	*Elimination/adjustment*
Jumlah	**2,338,552,539,382**	**2,080,537,149,882**	*Total*
Pendapatan operasional - bersih **)			*Operating income - Nett*
Konvensional	1,933,906,512,269	1,371,437,396,948	*Conventional*
Syariah	57,101,822,058	68,126,690,556	*Sharia*
Jumlah	1,991,008,334,327	1,439,564,087,505	*Total*
Eliminasi/penyesuaian	(470,311,601,608)	(11,280,911,594)	*Elimination/adjustment*
Jumlah	**1,520,696,732,720**	**1,428,283,175,911**	*Total*

*) Pendapatan operasional terdiri dari pendapatan bunga dan syariah, dan pendapatan operasional lainnya.

*) *Operating Income consist of interest and sharia income and other operating income.*

**) Pendapatan operasional bersih terdiri dari pendapatan bunga dan syariah, dan pendapatan operasional lainnya dikurangi beban bunga.

**) *Net operating income consists of interest income and sharia, and other operating income minus interest expense.*

Informasi yang berkaitan dengan segmen usaha sekunder dari Bank disajikan dalam tabel di bawah ini:

Information concerning the secondary segment information of the Bank is set out in the table below:

	31 Desember 2014	31 Desember 2013	
Aset			***Assets***
Kota Pekanbaru	14,584,107,313,511	11,316,275,032,851	*City of Pekanbaru*
Kabupaten Kampar	1,117,123,600,125	992,271,438,533	*Regional Goverment of Kampar*
Kabupaten Bengkalis	1,874,459,653,130	2,058,729,291,163	*Regional Goverment of Bengkalis*
Kabupaten Indragiri Hulu	655,906,505,739	594,707,790,586	*Regional Goverment of Inhu*
Kabupaten Indragiri Hilir	689,689,679,639	636,770,736,127	*Regional Goverment of Inhil*
Kabupaten Siak Sri Indrapura	1,295,175,747,845	1,284,168,948,959	*Regional Goverment of Siak*
Kota Dumai	807,785,640,371	769,615,237,579	*City of Dumai*
Kabupaten Pelalawan	727,616,695,873	715,830,722,362	*Regional Goverment of Pelalawan*
Kabupaten Rokan Hulu	1,319,087,638,132	694,694,290,479	*Regional Goverment of Rokan Hulu*
Kabupaten Rokan Hilir	1,218,654,299,512	1,041,275,231,986	*Regional Goverment of Rokan Hilir*
Kabupaten Kuantan Singingi	627,517,272,533	575,273,827,745	*Regional Goverment of Kuantan*
Kota Batam	711,912,940,641	681,155,068,438	*City of Batam*
Kabupaten Karimun	430,023,453,571	409,733,093,667	*Regional Goverment of Karimun*
Kabupaten Natuna	325,230,331,067	278,036,633,223	*Regional Goverment of Natuna*
Kota Tanjung Pinang	1,309,596,591,078	885,609,256,115	*City of Tanjung Pinang*
Kabupaten Kep. Meranti	378,468,796,190	383,409,891,168	*Regional Goverment of Meranti*
Jumlah	28,072,356,158,957	23,317,556,490,981	*Total*
Eliminasi/penyesuaian	(5,218,288,023,951)	(3,857,638,382,499)	*Elimination/adjustment*
Jumlah	**22,854,068,135,006**	**19,459,918,108,482**	*Total*
Simpanan Nasabah dan Bank Lain			***Deposit from costumer and Other Bank***
Kota Pekanbaru	8,775,429,963,988	5,843,542,235,953	*City of Pekanbaru*
Kabupaten Kampar	636,853,097,447	709,247,324,495	*Regional Goverment of Kampar*
Kabupaten Bengkalis	1,804,657,682,884	1,819,613,643,885	*Regional Goverment of Bengkalis*
Kabupaten Indragiri Hulu	446,975,085,074	499,674,404,198	*Regional Goverment of Inhu*
Kabupaten Indragiri Hilir	675,753,051,208	612,327,647,786	*Regional Goverment of Inhil*
Kabupaten Siak Sri Indrapura	1,273,753,019,873	1,239,829,676,380	*Regional Goverment of Siak*
Kota Dumai	670,289,506,172	705,900,404,731	*City of Dumai*
Kabupaten Pelalawan	652,689,625,805	666,396,975,763	*Regional Goverment of Pelalawan*
Kabupaten Rokan Hulu	1,145,368,804,475	615,865,237,697	*Regional Goverment of Rokan Hulu*
Kabupaten Rokan Hilir	376,777,400,284	384,768,315,500	*Regional Goverment of Rokan Hilir*
Kabupaten Kuantan Singingi	386,544,456,872	368,704,145,205	*Regional Goverment of Kuantan*
Kota Batam	414,762,651,594	393,101,421,603	*City of Batam*
Kabupaten Karimun	235,212,601,759	261,504,399,513	*Regional Goverment of Karimun*

Kabupaten Natuna	200,214,615,140	203,403,505,839	*Regional Goverment of Natuna*
Kota Tanjung Pinang	708,258,229,113	819,005,111,618	*City of Tanjung Pinang*
Kabupaten Kep. Meranti	334,497,620,673	356,521,308,792	*Regional Goverment of Meranti*
Jumlah	**18,738,037,412,361**	**15,499,405,758,958**	*Total*

31. Informasi segmen usaha (lanjutan) / ***31. Segmen information (continued)***

	31 Desember 2014	31 Desember 2013	
Pendapatan operasional			***Operating Income***
Kota Pekanbaru	790,093,054,463	1,243,727,569,271	*City of Pekanbaru*
Kabupaten Kampar	156,489,528,753	142,938,709,814	*Regional Goverment of Kampar*
Kabupaten Bengkalis	61,956,074,700	188,115,907,886	*Regional Goverment of Bengkalis*
Kabupaten Indragiri Hulu	95,997,571,230	108,742,908,350	*Regional Goverment of Inhu*
Kabupaten Indragiri Hilir	81,621,830,377	103,588,340,566	*Regional Goverment of Inhil*
Kabupaten Siak Sri Indrapura	154,390,481,888	205,322,082,954	*Regional Goverment of Siak*
Kota Dumai	122,030,233,716	118,569,197,513	*City of Dumai*
Kabupaten Pelalawan	108,320,859,774	119,272,331,200	*Regional Goverment of Pelalawan*
Kabupaten Rokan Hulu	96,178,976,585	131,045,806,068	*Regional Goverment of Rokan Hulu*
Kabupaten Rokan Hilir	169,164,285,922	137,676,782,279	*Regional Goverment of Rokan Hilir*
Kabupaten Kuantan Singingi	90,474,282,773	84,087,192,104	*Regional Goverment of Kuantan*
Kota Batam	108,269,081,823	82,961,909,864	*City of Batam*
Kabupaten Karimun	57,796,889,383	52,699,676,613	*Regional Goverment of Karimun*
Kabupaten Natuna	47,847,150,838	38,761,107,093	*Regional Goverment of Natuna*
Kota Tanjung Pinang	172,931,886,482	142,525,938,646	*City of Tanjung Pinang*
Kabupaten Kep. Meranti	48,172,700,015	45,155,120,137	*Regional Goverment of Meranti*
Jumlah	**2,361,734,888,723**	**2,945,190,580,356**	*Total*
Eliminasi/penyesuaian	(23,182,349,341)	(864,653,430,474)	*Elimination/adjustment*
Jumlah	**2,338,552,539,382**	**2,080,537,149,882**	*Total*
Laba sebelum pajak			***Income before Taxes***
Kota Pekanbaru	(225,661,468,850)	(222,483,632,267)	*City of Pekanbaru*
Kabupaten Kampar	79,247,099,876	80,533,165,795	*Regional Goverment of Kampar*
Kabupaten Bengkalis	76,424,993,759	86,646,765,224	*Regional Goverment of Bengkalis*
Kabupaten Indragiri Hulu	47,884,156,079	61,303,797,208	*Regional Goverment of Inhu*
Kabupaten Indragiri Hilir	59,829,530,227	39,206,608,974	*Regional Goverment of Inhil*
Kabupaten Siak Sri Indrapura	107,628,683,915	94,032,404,372	*Regional Goverment of Siak*
Kota Dumai	73,883,678,707	67,629,368,376	*City of Dumai*
Kabupaten Pelalawan	74,977,030,573	67,710,270,000	*Regional Goverment of Pelalawan*
Kabupaten Rokan Hulu	69,369,912,039	65,257,731,326	*Regional Goverment of Rokan Hulu*
Kabupaten Rokan Hilir	67,910,129,398	63,504,583,113	*Regional Goverment of Rokan Hilir*
Kabupaten Kuantan Singingi	50,695,494,269	49,754,978,003	*Regional Goverment of Kuantan*
Kota Batam	50,328,518,467	37,635,477,576	*City of Batam*
Kabupaten Karimun	24,743,147,848	27,566,635,274	*Regional Goverment of Karimun*
Kabupaten Natuna	22,327,231,306	22,854,401,280	*Regional Goverment of Natuna*
Kota Tanjung Pinang	80,126,162,600	67,273,301,564	*City of Tanjung Pinang*
Kabupaten Kep. Meranti	30,426,905,152	24,825,488,487	*Regional Goverment of Meranti*
Jumlah	**690,141,205,365**	**633,251,344,306**	*Total*
Eliminasi/penyesuaian	-	(29,376,781,960)	*Elimination/adjustment*
Jumlah	**690,141,205,365**	**603,874,562,346**	*Total*

32. Laba per saham / ***32. Earning per share***

Laba per saham dihitung dengan membagi laba bersih kepada pemegang saham dengan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

Earning per share is calculated by dividing net income attributable to shareholders by the weighted average number of common shares outstanding during the year.

Akun ini terdiri dari :	31 Desember 2014	31 Desember 2013	*This account consists of :*
Laba bersih setelah pajak	500,570,449,448	423,120,276,270	*Net income*
Laba operasional	687,882,349,594	642,461,943,230	*Operating income*
Modal disetor awal tahun	957,146,100,000	894,874,800,000	*Beginning balance*
Mutasi rata-rata tertimbang modal disetor	8,184,083,333	25,757,100,000	*Mutation of average paid in capital*
Rata-rata tertimbang modal disetor	**965,330,183,333**	**920,631,900,000**	*Average paid in capital*

• Laba bersih per saham	**51,855**	**45,960**	*Net profit per share* ·

33. Program pensiun pegawai

Bank menyelenggarakan dana pensiun untuk semua pegawainya dengan program manfaat pasti dan program pensiun iuran pasti serta Bank memberikan imbalan kerja jangka panjang dan pasca kerja lainnya kepada para karyawan yang memenuhi syarat terdiri dari program pensiun manfaat pasti (Dana pensiun), Program Pensiun Iuran Pasti (THT), Penghargaan Masa Bhakti (PMB), Masa Persiapan Pensiun (MPP) dan Cuti Besar.

Program THT dikelola oleh Bank. Kontribusi pegawai adalah sebesar 5,00% dari penghasilan karyawan dan sisa dana yang diperlukan untuk mendanai program tersebut dikontribusi oleh Bank. Imbalan THT berupa pembayaran jumlah lump-sum yang diberikan kepada karyawan yang memasuki usia pensiun atau berhenti bekerja oleh sebab lain yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 04/KEPDIR/2004 tanggal 5 Januari 2004 yang terakhir diubah dengan Surat Keputusan Direksi No. No. 98-A/KEPDIR/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Penghargaan Pensiun PT. Bank Riau Kepri.

Program PMB dikelola sendiri oleh Bank dan diatur dalam peraturan program PMB yang terakhir ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 35/KEPDIR/2006 tanggal 03 Mei 2006. Imbalan PMB berupa piagam dan uang tunai yang besarnya telah diputuskan dalam SK Direksi tersebut kepada pegawai dengan masa kerja 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun dan 30 tahun dengan syarat hasil penilaian kinerja dua tahun terakhir berpredikat baik.

Program MPP dikelola sendiri oleh Bank dan merupakan program imbalan kerja bagi karyawan yang akan memasuki masa pensiun.

Program Cuti Besar dikelola sendiri oleh Bank dan merupakan program imbalan kerja bagi karyawan yang memiliki masa kerja di atas 5 tahun dan kelipatannya untuk penggantian hak cuti besar.

Tingkat Iuran Normal untuk program pensiun Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Riau adalah sebesar 12,08% dari Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP). Berdasarkan Peraturan Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Riau bahwa peserta membayar iuran 5% dari PhDP maka Iuran Normal sebesar 7,08% dari Penghasilan Dasar Pensiun ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri sebagai Pendiri. Laporan per 31 Desember 2014 disajikan berdasarkan laporan Dana Pensiun Bank Riau dengan rincian sebagai berikut :

33. Pension plan

The Bank administers pension fund for all employees with certain benefit program and Defined Contribution Pension Plan Bank and Bank provides long-term benefits and postemployment benefits to all qualified employees which consist of defined benefit pension (Dapen), defined dues pension (THT), Service Pay Benefit (PMB), Pension Preparation Period (MPP) and Annual Leave.

The THT benefit plan is managed by Bank. The employee"s contribution is 5.00% of the employee"s salary and the remaining amounts required to fund the plan are contributed by the Bank. The THT benefit represents a lump-sum payment to employees who reach pension age or retire due to other reasons as mentioned in the Board of Directors Decision Letter No. 04/KEPDIR/2004 dated January 5, 2004, which was last amended based on Board of Directors" Decision Letter Nomor 98-A/KEPDIR/2010 dated October 29, 2010 about Pansion Plan policy PT Bank Riau Kepri.

The PMB Program is self-managed by the Bank and is based on the latest PMB plan regulation which is stipulated in the Directors Decision Letter Number 35/KEPDIR/2006 dated May 03, 2006. The PMB benefit represents a certificated and cash money amounting was decide in Director Decision Letter to employees with working service periods of 15, 20, 25 and 30 years, respectively. The qualifying employee is required to have good results in the performance of evaluation for the last two years.

MPP plan is self-managed by the Bank and is an employee benefit plan for employees who will enter pension age.

Annual leave program is self-managed by the Bank for employee who have a service life of over 5 years and multiples for replacement of annual leave rights.

Normal contribution rate for pension program of benefit pension of Riau Regional Development Bank Inc. Ltd.,is 12,08% from employee"s pension base salary (PhDP). Based on pension fund regulation of Riau Regional Development Bank Inc. Ltd, membership pay 5% from PhDP and 7,08% from pension base salary completely responsibility of PT Bank Riau Kepri. Finansial statement period December 31, 2014 prepared on benefit pension plan statement of Riau Bank, are as follow:

Laporan nilai kini aktuarial	31 Desember 2014	31 Desember 2013	*Actuarist report*
• Jumlah aset neto	285,796,300,420	259,738,059,052	*Total net assets* •
• Selisih kewajiban aktuaria	(43,448,824,138)	(17,468,225,807)	*difference actuarial liability* •
• Kewajiaban aktuaria akhir tahun	242,347,476,282	242,269,833,245	*Actuary liability at the year end* •
Iuran normal bulanan			*Monthly normal contribution*
• Iuran Normal Peserta	2,049,271,350	2,129,012,860	*Attendance* •
• Iuran Normal Pemberi kerja	3,299,327,631	3,723,142,457	*Job provider* •

33. Program pensiun pegawai (lanjutan)

Status aset (liabilitas) program imbalan kerja pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2014	31 Desember 2013	
Jumlah aset neto			*Total net assets*
• Aset neto awal tahun	259,738,059,052	253,118,163,001	*Net assets beginning of year* •
• Kenaikan (penurunan) aset bersih	26,058,241,368	6,619,896,051	*Increase (decrease) in net assets* •
Aset neto akhir tahun	**285,796,300,420**	**259,738,059,052**	*Net assets end of year*

Aset Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Riau terutama terdiri dari obligasi, Surat berharga dan deposito berjangka.

Rekonsiliasi atas perubahan aset (liabilitas) imbalan kerja selama periode/tahun berjalan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2014	31 Desember 2013	
Kenaikan (penurunan) aset bersih			*Increase (decrease) in net assets*
• Hasil usaha bersih	26,019,182,831	20,987,326,082	*Operation Income* •
• Peningkatan (penurunan) nilai investasi	1,478,925,893	(14,065,377,241)	*Increase(decrease) of investment value* •
• Kontribusi pemberi kerja	5,348,598,981	5,852,155,317	*Contribution of the companyn* •
• Imbalan yang dibayarkan	(6,788,466,337)	(6,048,312,909)	*Paid reward* •
Jumlah	**26,058,241,368**	**6,725,791,249**	*Total*

Pendapatan (biaya) imbalan kerja untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebagai berikut:

	31 Desember 2014	31 Desember 2013	
Hasil usaha			*Operation Income*
• Hasil usaha investasi	29,382,211,137	24,121,143,902	*Investment Income* •
• Beban operasional	(2,987,466,000)	(2,837,759,325)	*Operating expense* •
• Pendapatan beban lain-lain	(35,992,056)	(18,663,245)	*income in other expenses* •
• Pajak penghasilan	(339,570,250)	(277,395,250)	*Income tax* •
Jumlah hasil usaha bersih	**26,019,182,831**	**20,987,326,082**	*Total net operation*

Perhitungan Dana Pensiun Bank Riau Kepri untuk tanggal 31 Desember 2010 dilakukan oleh aktuaris independen melalui PT Gemma Mulia Inditama yang tertuang dalam laporannya dengan nomor 4358/DP-GMI/III/11 tertanggal 15 Maret 2011 dengan melakukan asumsi perhitungan untuk tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014.

Perhitungan Laporan Aktuaris Dana pensiun Bank Pembangunan Daerah Riau dilakukan untuk valuasi per 30 April 2013 yang dibuat oleh PT Gemma Mulia Inditama dengan laporan No. 4821/DP-GMI/V/13 tanggal 29 Mei 2013.

Terakhir perhitungan Laporan Aktuaris Dana pensiun Bank Pembangunan Daerah Riau dilakukan untuk valuasi per 31 Desember 2013 yang dibuat oleh PT Sienco Aktuarindo Utama dengan laporan No. 118/LA-DPI/SAU/03-2014 tanggal 20 Maret 2014.

Jumlah kewajiban yang berkaitan dengan program pensiun Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Riau secara keseluruhan 31 Desember 2014 sesuai dengan posisi hasil valuasi aktuaria per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut :

	Sekarang	Sebelumnya	
• Kewajiban Aktuaria	242,347,676,000	210,532,360,913	*Actuary liabilities* •
• Kewajiban Solvabilitas	242,347,676,000	210,532,360,913	*Solvability Liabilities* •
• Kekayaan	285,796,300,420	259,738,059,052	*Assets* •
• Rasio Pendanaan	117.00%	123.10%	*Fund Ratio* •

33. Pension plan (continued)

The employee benefits assets (liabilities) status As of 31 December 31, 2014 and December 31, 2013 are as follows:

Pension Fund assets of Bank Pembangunan Daerah Riau consist mainly of bonds, marketable securities and time deposits.

Following are the reconciliation of the movements of employee benefit assets (liabilities) during the year:

Employee benefits income (expenses) for the periods ended December 31, 2014 and December 31, 2013 are as follows:

Calculation of Pension Fund Bank Riau Keprii for the year ended December 31, 2010 its done by independent actuaris PT Gemma Mulia Inditama in the report with number 4358/DP-GMI/III/11 dated in March 15, 2011 for the calculated asumption for the year 2011, 2012, 2013 and 2014.

Calculation of Pension Fund Actuarist of Riau Development Bank performed for the valuation as at April 30, 2013 formed by PT Gemma Mulia Inditama by the report Number 4821/DP-GM/V/13 dated May 29, 2013

Recent calculation of Pension Fund Actuarist of Riau Development Bank performed for the valuation as at December 31, 2013 formed by PT Sienco Aktuarindo Utama by the report Number 118/LA-DPI/SAU/03-2014 dated March 20, 2014

Total liabilitiy related to Pension Fund of Development Bank of Riau Regional overall December 31, 2014 in accordance with the position of the actuarial valuation results as at 31 December 2013 are as follows:

• Rasio Solvabilitas	117.00%	123.10%	*Solvability Ratio* •
• Kualitas Pendanaan	Tingkat I	Tingkat I	*Fund Quality* •
• (Defisit)/ Surplus	43,448,624,138	48,633,095,830	*(Defisit)/ Surplus* •

33. Program pensiun pegawai (lanjutan)

Tingkat Iuran Normal untuk program pensiun Bank Pembangunan Daerah Riau adalah sebesar 13,05% dan 12,08% untuk posisi 31 Desember 2013 dan 30 April 2013 dari Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP).

Asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan aktuaria atas seluruh imbalan kerja di atas adalah:

• Tingkat bunga aktuaria	8% per tahun	*Actuarial interest rate* •
• Tingkat kenaikan Penghasilan Dasar Per tahun	0,0% per tahun	*Annual salary growth rate* •
• Tingkat kenaikan Manfaat Pensiun	5% per 2 tahun	*Pension income rate* •
• Tingkat Mortalitas	Tabel 1949 Annuity Mortality Table	*Mortality rate* •
• Tingkat cacat	10% dari tabel mortalita	*Disability rate* •
• Metode perhitungan usia	Usia ulang tahun terakhir	*Age calculation method* •
• Metode pembiayaan	Attained Age Normal	*Cost method* •
• Cadangan pensiun anak	1% dari cadangan Manfaat Pensiun Peserta	*Allowance Pension for children* •
• Selisih usia suami-istri	5 Tahun	*Different age* •
• Usia pensiun dipercepat	46 tahun	*Early retirement age* •
• Usia pensiun normal	56 tahun	*Normal retirement age* •

Penyelenggaraan Program Pensiun Iuran Pasti karyawan Bank dilakukan dengan Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Riau Kepri dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Tentang Penyediaan Layanan Program Pensiun, Nomor 022/DLK/I/2013 dan 315/DIR/HC/2013 tanggal 24 Juni 2013. Perjanjian kerja sama antara Bank dengan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Tentang Pengelolaan Program Tunjangan Hari Tua Kumpulan No. 54/DIR/BR/2005 dan 067.SJ.U.0805 tanggal 18 Agustus 2005.

33. Pension plan (continued)

Normal grade of contribution for Fund program of Development Bank of Riau Regional amounted to 13,05 % adn 12,08% for December 31, 2013 and April 30, 2013 of Based of Pensiun yield.

Key assumptions used in the actuarial calculation for all types of employee benefits are:

Implementation Defined Contribution Pension Plan Bank employees conducted by the Cooperation Agreement between PT Bank Riau Riau Islands by the Financial Institutions Pension Fund (Pension Fund) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. About Provision of Services Pension Plan, No. 022 / DLK / I / 2013 and 315 / DIR / HC / 2013 dated June 24, 2013.The cooperation agreement between the Bank and PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) About the Program Management Annuities set No. 54 / DIR / BR / 2005 and 067.SJ.U.0805 dated August 18, 2005.

34. Praktek manajeman risiko yang dijalankan

Bank telah mengimplementasikan prosedur manajemen risiko sesuai dengan PBI tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum yang dicakup dalam PBI No. 11/25/BI/2009 tentang perubahan atas PBI no. 5/8/PBI/2003 dan SE No. 13/23/DPNP/2011 tanggal 25 Oktober tentang Perubahan Surat Edaran BI No. 5/21/DPNP perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, sehingga Bank harus mengelola serta melakukan mitigasi risiko sesuai ruang lingkup aktivitas bisnisnya.

Bank memiliki pengungkapan terhadap risiko di bawah ini yang berasal dari aktivitas bisnis dan instrumen keuangan:

- Risiko kredit / *Credit risk*
- Risiko pasar / *Market risk*
- Risiko likuiditas / *Liquidity risk*
- Risiko operasional / *Operating risk*

Catatan di bawah ini menyajikan informasi mengenai eksposur Bank terhadap setiap risiko di atas, tujuan, kebijakan dan proses yang dilakukan oleh Bank dalam mengukur dan mengelola risiko.

a. Kerangka manajemen risiko

Organisasi manajemen risiko Bank melibatkan pengawasan dari Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Pemantau Risiko. Komite Pemantau Risiko merupakan pemantau risiko tertinggi di Dewan Komisaris. Komite Pemantau Risiko tersebut menyetujui dan memonitor pelaksanaan kerangka dan kebijakan manajemen risiko Bank. Komite Pemantau Risiko tersebut mengadakan pertemuan setiap bulannya untuk menilai kinerja dari setiap

34. Licence management risk in operation

The Bank has implemented the risk management procedures in accordance with PBI on Risk Management Implementation for Public Bank included in PBI No. 11/25/BI/2009 on the amendments for PBI no. 5/8/PBI/2003 and SE No.13/23/DPNP/2011 dated October 25 on Amendment of Circulatory Note No. 5/21/DPNP. Bank must manage as well as perform the risk mitigation in accordance with the scope of its business activities.

The Bank has exposures to the following risks from financial instruments:

- Risiko hukum / *Law risk*
- Risiko reputasi / *Reputation risk*
- Risiko strategis / *Strategic risk*
- Risiko kepatuhan / *Compliance risk*

The following notes present information about the Bank's exposure to each of the above risks, the Bank's objectives and policies for measuring and managing risk.

a. Risk management framework

Organization of the Bank's risk management involves oversight from the Commissioners, Directors, and the Risk Monitoring Committee. The Risk Monitoring Committee is the highest risk authority in the Commissioners' level. They approves and monitors the implementation of risk management policies and framework of the Bank. The Risk Monitoring Committee meets every month to assess the

portofolio kredit dan mendiskusikan masalah-masalah risiko. Dewan Komisaris mendelegasikan kuasa kepada Dewan Direksi untuk implementasi strategi manajemen risiko.

performance of the respective credit portofolios and discuss risk issues. Commissioners delegate authority to Board of Directors to implement the risk management strategy.

34. Praktek manajeman risiko yang dijalankan (lanjutan)

a. Kerangka manajemen risiko (lanjutan)

Komite Risiko Manajemen dibentuk oleh Direksi dan bertanggungjawab untuk mengelola risiko yang ada di Bank. Komite Risiko Manajemen tersebut terdiri dari semua anggota Direksi dan senior manajer eksekutif. Komite Manajemen Risiko diketuai oleh Direktur Utama.

Kebijakan manajemen risiko ditetapkan untuk mengidentifikasi dan menganalisa risiko yang dihadapi Bank, menetapkan batasan risiko dan pengendalian yang sesuai, serta mengawasi risiko dan kepatuhan terhadap batasan yang telah ditetapkan. Kebijakan dan sistem manajemen risiko ditelaah secara berkala untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar, produk, dan jasa yang ditawarkan. Melalui pelatihan serta standar dan prosedur pengelolaan, Bank mengembangkan lingkungan pengendalian yang taat dan konstruktif, dimana semua karyawan memahami tugas dan kewajiban mereka.

Komite Audit Bank memiliki tanggung jawab untuk memantau kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur manajemen risiko, dan untuk menelaah kecukupan kerangka manajemen risiko yang terkait dengan risiko-risiko yang dihadapi oleh Bank. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit dibantu oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI). SKAI secara berkala maupun sesuai kebutuhan, menelaah pengendalian dan prosedur manajemen risiko dan melaporkan hasilnya ke Komite Audit Bank.

b. Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko terjadinya kerugian keuangan yang disebabkan nasabah atau Pihak ketiga gagal memenuhi kewajibannya.

Risiko kredit dikelola melalui penetapan kebijakan-kebijakan dan proses-proses yang meliputi kriteria pemberian kredit, tujuan dan persetujuan kredit, penetapan harga, pemantauan, pengelolaan kredit bermasalah dan manajemen portofolio. Bank juga dengan ketat memantau perkembangan portofolio kredit Bank yang memungkinkan Bank untuk melakukan tindakan pencegahan secara tepat waktu apabila terjadi penurunan kualitas kredit.

Bank terus melanjutkan untuk mengelola dan mengawasi secara aktif kualitas portfolio pinjaman yang diberikan dengan cara meningkatkan kebijakan manajemen risiko kredit secara efektif, penyempurnaan prosedur dan pengembangan system dalam upaya menjaga dampak negatif yang diakibatkan oleh kredit bermasalah.

Bank telah mengimplementasikan upaya disetiap tahap yang berhubungan dengan aktifitas penagih hutang untuk meningkatkan proses penagihan dan memperkuat pemantauan kegiatan penagihan. Beberapa upaya telah dilakukan Bank untuk mengantisipasi hal tersebut seperti pengaturan tentang pembagian tugas dan fungsi karyawan untuk penagihan. Namun upaya yang dilakukan Bank belumlah maksimal. Bank masih membutuhkan banyak sumber daya manusia untuk mengupayakan hal tersebut, terutama Bank yang berada di daerah kabupaten, kecamatan dan kelurahan

34. Licence management risk in operation (continued)

a. Risk management framework (continued)

The Risk Management Committee is established by the Board of Directors and is responsible for managing risk of the Bank. The Risk Management Committee comprises of all members of the Board of Directors and senior management executives. It is chaired by President Director.

The Bank's risk management policies are established to identify and analyze the risks faced by the Bank, to set appropriate risk limits and controls, and to monitor risks and adherence to limits. Risk management policies and systems are reviewed regularly to reflect changes in market conditions, products and services offered. The Bank, through its training and management standards and procedures, aims to develop a disciplined and constructive control environment, in which all employees understand their roles and obligations.

The Bank's Audit Committee is responsible for monitoring compliance with the Bank's risk management policies and procedures, and for reviewing the adequacy of the risk management framework in relation to the risks faced by the Bank. The Bank's Audit Committee is assisted in these functions by Internal Audit. Internal Audit undertakes both regular and ad-hoc reviews of risk management controls and procedures, the results of which are reported to the Bank's Audit Committee.

b. Credit risk

Credit risk is defined as the risk of losses associated with the possibility that a customer or unrelated party fail to meet its obligation.

Credit risk is managed through established policies and processes covering credit acceptance criteria, credit origination and approval, pricing, monitoring, problem loan management and portfolio management. The Bank also closely monitors the development of its loan portfolios, to enable the Bank initiate a preventive action in a timely manner when there is a deterioration in credit quality.

Bank continued to actively manage and monitor the loan portfolio quality by improving credit risk management policies effectively, improving procedures and systems development in an effort to keep the negative impact caused by nonperforming loans (NPL).

The Bank has implemented the effort in every stage related to the activity of debt billing in order to improve the process of billing and strengthening the supervision on the billing activity. Several efforts have been performed by the Bank to anticipate the matter thereof such as the arrangements on the distribution of duties and functions of employees for the billing. Even so the efforts made by the Bank have not been maximal. The Bank still needs a lot of human resources to meet those efforts, especially Banks situated in the area of district, sub district and county

daerah kabupaten, kecamatan dan kelurahan.

district and county.

34. Praktek manajeman risiko yang dijalankan (lanjutan)

b. Risiko kredit (lanjutan)

Bank juga belum melakukan perjanjian dengan agen penagihan (pihak ketiga) untuk membantu upaya Bank dalam melakukan penagihan, begitu juga dengan karyawan Bank yang belum diberikan pelatihan dalam melakukan pekerjaan penagihan baik mengenai tata cara penagihan dan kode etik dalam melakukan penagihan.

Sistem Informasi Manajemen telah tersedia dan mencakup tingkat yang cukup rinci untuk mendeteksi setiap perkembangan yang kurang baik sedini mungkin sehingga memungkinkan dilakukannya tindakan secara tepat waktu atas penurunan kualitas kredit atau untuk meminimalisasi kerugian kredit.

i. Eksposur maksimum terhadap risiko kredit

Untuk aset keuangan yang diakui di laporan posisi keuangan, eksposur maksimum terhadap risiko kredit sama dengan nilai tercatatnya. Untuk liabilitas kontinjensi, eksposur maksimum terhadap risiko kredit adalah nilai maksimum yang harus Bank bayarkan dalam hal timbul kewajiban atas instrumen yang diterbitkan. Untuk komitmen kredit, eksposur maksimum terhadap risiko kredit adalah sebesar jumlah fasilitas yang belum ditarik dari nilai penuh fasilitas kredit yang telah disepakati (committed) kepada nasabah.

Berikut ini menyajikan eksposur maksimum terhadap risiko kredit Bank atas instrumen keuangan pada laporan posisi keuangan dan komitmen dan kontinjensi (rekening administratif), tanpa memperhitungkan agunan yang dimiliki atau jaminan kredit lainnya.

34. Licence management risk in operation (continued)

b. Credit risk (continued)

The Bank has not yet performed any agreement with the billing agent (third party) either to help the effort of the Bank in performing the billing, neither the employees of the Bank have been given the training in performing the work of billing both on the procedures of billing and the ethical codes in performing the billing.

Management Information Systems (MIS) are in place and cover a sufficient level of detail to detect any adverse development at an early stage, allowing for timely measures to be taken to counteract for any possible deterioration in credit quality or to minimize credit losses.

i. Maximum exposure to credit risk

For financial assets recognized on the statement of financial position, the maximum exposure to credit risk equals their carrying amount. For contingent liabilities, the maximum exposure to credit risk is the maximum amount that the Bank would have to pay if the obligations of the instruments issued are called upon. For credit commitments, the maximum exposure to credit risk is the full amount of the un-drawn committed credit facilities granted to customers.

The following presents the Bank's maximum exposure to credit risk of statements of financial position and offbalance sheet financial instruments, without taking into account of any collateral held or other credit enhancement.

	31 Desember 2014	31 Desember 2013	
Laporan posisi keuangan :			*Statement of financial position :*
Giro pada Bank Indonesia	1,289,270,431,156	1,214,020,913,656	*Current account with Bank Indonesia*
Giro pada Bank lain	69,642,528,594	98,471,093,030	*Current account with other Bank*
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain	5,872,156,716,327	4,636,122,228,951	*Placement with Bank Indonesia and other Bank*
Surat berharga	1,419,899,202,009	1,033,223,476,123	*Marketable securities*
Kredit yang diberikan	12,764,751,327,767	11,537,988,370,349	*Loans*
Penyertaan	500,333,335	500,333,335	*Invesment*
Aset lain-lain	228,659,148,848	165,512,590,159	*Other assets*
Jumlah	**21,644,879,688,034**	**18,685,839,005,602**	*Total*
Komitmen dan kontinjensi - diluar laporan posisi keuangan:			*Commitment and contingencies off-Banlanced sheet*
Fasilitas kredit kepada debitur yang belum digunakan	157,603,138,623	196,490,368,145	*Unused loan facilities*
Bank garansi yang diterbitkan	152,161,638,679	152,945,874,895	*Bank guaranteed issued*
Jumlah	**21,954,644,465,336**	**19,035,275,248,642**	*Total*

Berdasarkan PBI nomor 14/14/PBI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 dan SE BI nomor 14/35/DPNP tanggal 10 Desember 2012 tentang Laporan Tahunan Bank Umum disampaikan kepada Bank Indonesia dijelaskan mengenai pengungkapan eksposur risiko dan penerapan manajemen risiko yang mencakup pengungkapan tagihan bersih berdasarkan wilayah seperti tabel berikut ini (dalam jutaan Rupiah):

Based on PBI number 14/14/PBI/2012 dated on October 18, 2012 and SE BI number 14/35/DPNP dated on December 10, 2012 on The Bank of yearly general report to report to Bank Indonesia explained about risk exposure disclosure and risk management implementation with net billing based on area as table are as follow (in millions Rupiah):

34. Praktek manajeman risiko yang dijalankan (lanjutan)

b. Risiko kredit (lanjutan)

i. Eksposur maksimum terhadap risiko kredit (lanjutan)

34. Licence management risk in operation (continued)

b. Credit risk (continued)

i. Maximum exposure to credit risk (continued)

Tagihan bersih berdasarkan wilayah / *Net Billing based on area*

Kategori Portofolio / *Portfolio category*	31 Desember 2014					
	Dalam Jutaan Rupiah / *In Millions Rupiah*					
	Wilayah/area 1	Wilayah/area 2	Wilayah/area 3	Wilayah/area 4	Wilayah/area 5	Jumlah/Total
Tagihan Pemerintah / *Goverment billed*	2,715,091	-	-	-	-	2,715,091
Tagihan Ke Entitas Sektor Publik / *to Public entity sector*	-	-	-	-	148,070	148,070
Tagihan Kepada Bank / *Billing to the Bank*	3,346,522	-	-	36	2,348,023	5,694,580
Kredit Beragun Rumah / *Loans with house guarantee*	160,426	74,774	163,019	14,418	78	412,715
Kredit Beragun Properti Komersial / *Loans with commerc property guarantee*	1,202	6,416	1,021	-	-	8,639
Kredit Pegawai / Pensiunan / *Loans of employee or retired*	1,963,376	904,859	5,483,516	1,038,355	-	9,390,106
Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel/ Receivable to Micro business, small business and Retail	267,554	83,622	1,666,392	123,064	-	2,140,632
Tagihan kepada Korporasi / Receivable to the Corporation	159,849	6,939	42,520	18,133	20,829	248,270
Tagihan yang Telah Jatuh Tempo / *With due dated*	7,423	2,775	14,476	419	-	25,093
Aset lainnya / *Other assets*	984,938	146,297	508,792	36,865	-	1,676,892
Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)/ Exposure in Syariah business uni (if it exist)	262,138	318,869	316,654	16,324	112,000	1,025,985
Total	9,868,519	1,544,550	8,196,390	1,247,613	2,628,999	23,486,072

34. Praktek manajeman risiko yang dijalankan (lanjutan)

b. Risiko kredit (lanjutan)

i. Eksposur maksimum terhadap risiko kredit (lanjutan)

34. Licence management risk in operation (continued)

b. Credit risk (continued)

i. Maximum exposure to credit risk (continued)

Tagihan bersih berdasarkan wilayah (lanjutan) / *Net Billing based on area (continued)*

Kategori Portofolio / *Portfolio category*	31 Desember 2013					
	Dalam Jutaan Rupiah / *In Millions Rupiah*					
	Wilayah/area 1	Wilayah/area 2	Wilayah/area 3	Wilayah/area 4	Wilayah/area 5	Jumlah/Total
Tagihan Pemerintah / *Goverment billed*	2,104,077	-	-	-	-	2,104,077
Tagihan Ke Entitas Sektor Publik / *to Public entity sector*	-	-	-	-	237,223	237,223
Tagihan Kepada Bank / *Billing to the Bank*	2,900,509	-	1,398	35	1,679,573	4,581,515
Kredit Beragun Rumah / *Loans with house guarantee*	144,789	81,626	163,733	13,449	-	403,597
Kredit Beragun Properti Komersial / *Loans with commerc property guarantee*	36,461	5,485	11,216	-	-	53,162
Kredit Pegawai / Pensiunan / *Loans of employee or retired*	1,824,844	806,763	5,027,655	931,985	-	8,591,247
Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel/ Receivable to Micro business, small business and Retail	287,454	74,297	1,498,111	122,568	305	1,982,735
Tagihan kepada Korporasi / Receivable to the Corporation	159,356	3,609	24,440	9,254	29,481	226,139
Tagihan yang Telah Jatuh Tempo / *With due dated*	9,436	4,650	14,580	291	-	28,957
Aset lainnya / *Other assets*	547,901	186,733	388,457	11,249	-	1,134,340
Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)/ Exposure in Syariah business uni (if it exist)	204,300	238,599	265,173	11,909	110,000	829,981
Total	8,219,128	1,401,762	7,394,764	1,100,740	2,056,582	20,172,976

34. Praktek manajeman risiko yang dijalankan (lanjutan)

b. Risiko kredit (lanjutan)

i. Eksposur maksimum terhadap risiko kredit (lanjutan)

34. Licence management risk in operation (continued)

b. Credit risk (continued)

i. Maximum exposure to credit risk (continued)

Pengelompokkan wilayah / *Grouping area*

Wilayah / *Area*	Pengelompokkan wilayah / *area*				
	Wilayah/area 1	Wilayah/area 2	Wilayah/area 3	Wilayah/area 4	Wilayah/area 5
Pekanbaru	√				
Kampar			√		
Bengkalis			√		
Indragiri Hulu			√		
Indragiri Hilir			√		
Siak Sri Indrapura			√		
Dumai	√				
Pelalawan			√		
Rokan Hulu			√		
Rokan Hilir			√		
Kuantan Singingi			√		
Batam		√			
Karimun				√	
Natuna, Bintan dan Anambas				√	
Tanjung Pinang		√			
Kepulauan Meranti			√		
Lingga				√	
Diluar Riau dan Kepulauan Riau					√

CKPN Tagihan bersih berdasarkan wilayah / *CKPN Net Billing based on area*

Kategori Portofolio / *Portfolio category*	31 Desember 2014					
	Dalam Jutaan Rupiah / *In Millions Rupiah*					
	Wilayah/area 1	Wilayah/area 2	Wilayah/area 3	Wilayah/area 4	Wilayah/area 5	Jumlah/Total
Tagihan / *Receivable*	9,969,355	1,582,542	8,461,970	1,260,893	2,644,433	23,919,193
Tagihan belum jatuh tempo/ *Receivable due dated not yet*	91,354	12,052	230,075	13,104	-	346,585
Tagihan telah jatuh tempo/ *Receivable after due dated*	63,342	34,415	233,583	5,435	-	336,775
CKPN Individual / *Individualis CKPN*	-	16,371	6,887	-	-	23,258
CKPN Kolektif / *Collective CKPN*	78,781	23,455	259,348	7,868	1,137	370,589

Kategori Portofolio / *Portfolio category*	31 Desember 2013					
	Dalam Jutaan Rupiah / *In Millions Rupiah*					
	Wilayah/area 1	Wilayah/area 2	Wilayah/area 3	Wilayah/area 4	Wilayah/area 5	Jumlah/Total
Tagihan / *Receivable*	8,219,128	1,401,762	7,394,764	1,100,740	2,056,582	20,172,976
Tagihan belum jatuh tempo/ *Receivable due dated not yet*	85,927	12,706	185,451	11,157	-	295,241
Tagihan telah jatuh tempo/ *Receivable after due dated*	66,485	39,313	226,885	5,310	-	337,993
CKPN Individual / *Individualis CKPN*	-	18,988	7,387	-	-	- 26,375
CKPN Kolektif / *Collective CKPN*	101,766	25,642	249,800	11,141	34	388,383

34. Praktek manajeman risiko yang dijalankan (lanjutan)

b. Risiko kredit (lanjutan)

i. Eksposur maksimum terhadap risiko kredit (lanjutan)

34. Licence management risk in operation (continued)

b. Credit risk (continued)

i. Maximum exposure to credit risk (continued)

Tagihan bersih berdasarkan sektor ekonomi / *Net Billing based on economic sector*

Sektor Ekonomi / *Economic sector*	31 Desember 2014 / Dalam Jutaan Rupiah / *In Millions Rupiah*					
	Tagihan ke Pemerintah / Billing to the Goverment	Tagihan Ke Entitas Sektor Publik / to Public entity sector	Tagihan kepada Bank / Billing to the Bank	Kredit Beragun Rumah tinggal / Loans with house guarantee	Kredit Properti Komersial / Loans with commerc property guarantee	Kredit Pegawai / Pensiunan / Loans of employee or retired
Pertanian, perburuhan dan Kehutanan / *Agriculture, labour and forest*	-	-	-	548	-	-
Perikanan / *Fishing*	-	-	-	-	-	-
Pertambangan dan Penggalian / *Mining and excavating*	-	-	-	-	-	-
Industri pengolahan / *Manufacture industry*	-	-	-	-	-	-
Listrik, Gas dan Air / *Electricity, Gas and Water*	-	109,084	-	-	-	-
Konstruksi / *Construction*	-	-	-	-	1,021	-
Perdagangan dan eceran / *Commerce and retail*	-	-	-	-	5,659	1,773
Penyediaan akomodasi da makan minum / *Acomodation and food supply*	-	-	-	168	1,438	-
Transportasi, pergudangan dan komunikasi / *Transportation, warehouse and*	-	-	-	-	-	-
Perantara keuangan / *Financial broker*	-	38,986	5,694,580	-	-	-
Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan / *Real estate, rental and company service*	-	-	-	-	-	-
Jasa pendidikan / *Education service*	-	-	-	-	-	-
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial / *Healthy service and sociality activation*	-	-	-	-	-	-
Jasa kemasyarakatan ,sosial budaya , hiburan dan perorangan lainnya / *Social service, social*						

culture, entertainment and individual	-	-	-	-	521	-

34. Praktek manajemen risiko yang dijalankan (lanjutan)

b. Risiko kredit (lanjutan)

i. Eksposur maksimum terhadap risiko kredit (lanjutan)

34. Licence management risk in operation (continued)

b. Credit risk (continued)

i. Maximum exposure to credit risk (continued)

Tagihan bersih berdasarkan sektor ekonomi / *Net Billing based on economic sector*

Sektor Ekonomi / *Economic sector*	31 Desember 2014 — Dalam Jutaan Rupiah / *In Millions Rupiah*					
	Tagihan ke Pemerintah / Billing to the Government	Tagihan Ke Entitas Sektor Publik / to Public entity sector	Tagihan kepada Bank / Billing to the Bank	Kredit Beragun Rumah tinggal / Loans with house guarantee	Kredit Properti Komersial / Loans with commerc property guarantee	Kredit Pegawai / Pensiunan / Loans of employee or retired
Jasa perorangan yang melayani rumah tangga / *Individual service to serve housekeeping*	-	-	-	-	-	-
Kegiatan yang belum jelas batasannya / *The uncertainty limited*	-	-	-	-	-	-
Bukan Lapangan Usaha / *Not job opportunity*	-	-	-	411,999	-	9,388,333
Lainnya / *Others*	2,715,091	-	-	-	-	-
Total	2,715,091	148,070	5,694,580	412,715	8,639	9,390,106

Tagihan bersih berdasarkan sektor ekonomi / *Net Billing based on economic sector*

Sektor Ekonomi / *Economic sector*	31 Desember 2014 — Dalam Jutaan Rupiah / *In Millions Rupiah*					
	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel/ Receivable to Micro business, small business and Retail Portofolio / Receivable	Tagihan kepada Korporasi / Receivable to coorporate	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya	Eksposure di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	Jumlah / Total
Pertanian, perburuhan dan Kehutanan / *Agriculture, labour and forest*	1,021,086	-	4,745	-	73,334	1,099,713
Perikanan / *Fishing*	15,617	31,208	73	-	-	46,898
Pertambangan dan Penggalian / *Mining and excavating*	525	-	54	-	1,867	2,446
Industri pengolahan / *Manufacture industry*	23,543	-	1,974	-	1,332	26,849
Listrik, Gas dan Air / *Electricity, Gas and Water*	930	1,088	-	-	90	111,192
Konstruksi / *Construction*	125,973	116,369	3,480	-	9,616	256,458
Perdagangan dan eceran / *Commerce and retail*	796,886	5,649	7,432	-	31,659	849,058
Penyediaan akomodasi, makan dan minum / *Acomodation, food and water supply*						

	42,053	-	221	-	-	43,880

34. Praktek manajeman risiko yang dijalankan (lanjutan)

b. Risiko kredit (lanjutan)

i. Eksposur maksimum terhadap risiko kredit (lanjutan)

34. Licence management risk in operation (continued)

b. Credit risk (continued)

i. Maximum exposure to credit risk (continued)

Tagihan bersih berdasarkan sektor ekonomi / *Net Billing based on economic sector*

Sektor Ekonomi / *Economic sector*	31 Desember 2014 Dalam Jutaan Rupiah / *In Millions Rupiah*					
	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel/ Receivable to Micro business, small business and Retail Portofolio / Receivable	Tagihan kepada Korporasi / Receivable to coorporate	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya	Eksposure di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	Jumlah / Total
Transportasi, pergudangan dan komunikasi / *Transportation, warehouse and communication*	8,379	-	23	-	1,229	9,631
Perantara keuangan / *Financial broker*	1,610	19,594	-	-	-	5,754,770
Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan / *Real estate, rental and company service*	7,424	459	102	-	27,594	35,579
Jasa pendidikan / *Education service*	3,139	-	-	-	-	3,139
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial / *Healthy service and sociality activation*	6,222	1,655	-	-	-	7,877
Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya / *Social service, social culture, entertainment and individual*	60,169	7,229	2,100	-	3,655	73,674
Jasa perorangan yang melayani rumah tangga / *Individual service to serve housekeeping*	357	-	2	-	6,257	6,616
Kegiatan yang belum jelas batasannya / *The uncertainty limited*	-	-	-	-		-
Bukan Lapangan Usaha / *Not job opportunity*	26,719	65,020	4,887	-	628,959	10,525,917
Lainnya / *Others*	-	-	-	1,676,892	240,392	4,632,375
Total	**2,140,632**	**248,270**	**25,093**	**1,676,892**	**1,025,985**	**23,486,073**

34. Praktek manajeman risiko yang dijalankan (lanjutan)

b. Risiko kredit (lanjutan)

i. Eksposur maksimum terhadap risiko kredit (lanjutan)

34. Licence management risk in operation (continued)

b. Credit risk (continued)

i. Maximum exposure to credit risk (continued)

Tagihan bersih berdasarkan sektor ekonomi / *Net Billing based on economic sector*

Sektor Ekonomi / *Economic sector*	31 Desember 2013 / Dalam Jutaan Rupiah / *In Millions Rupiah*					
	Tagihan ke Pemerintah / Billing to the Goverment	Tagihan Ke Entitas Sektor Publik / to Public entity sector	Tagihan kepada Bank / Billing to the Bank	Kredit Beragun Rumah tinggal / Loans with house guarantee	Kredit Properti Komersial / Loans with commerc property guarantee	Jumlah dipindahkan / Total to moved
Pertanian, perburuhan dan Kehutanan / *Agriculture, labour and forest*	-	-	-	-	1,502	1,502
Perikanan / *Fishing*	-	-	-	-	1,805	1,805
Pertambangan dan Penggalian / *Mining and excavating*	-	-	-	-	-	-
Industri pengolahan / *Manufacture industry*	-	6,082	-	-	-	6,082
Listrik, Gas dan Air / *Electricity, Gas and*	-	173,287	-	-	-	173,287
Konstruksi / *Construction*	-	52,000	-	304	31,012	83,316
Perdagangan dan eceran / *Commerce and retail*	-	-	-	-	10,874	10,874
Penyediaan akomodasi da makan minum / *Acomodation and food supply*	-	-	-	-	-	-
Transportasi, pergudangan dan komunikasi / *Transportation, warehouse and communication*	-	5,855	-	-	2,502	8,357
Perantara keuangan / *Financial broker*	-	-	4,581,515	-	-	4,581,515
Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan / *Real estate, rental and company service*	-	-	-	-	-	-
Jasa pendidikan / *Education service*	-	-	-	-	-	-
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial / *Healthy service and sociality activation*	-	-	-	-	-	-
Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya / *Social service, social culture, entertainment*						

and individual	-	-	-	138	5,427	5,565

34. Praktek manajeman risiko yang dijalankan (lanjutan)

b. Risiko kredit (lanjutan)

i. Eksposur maksimum terhadap risiko kredit (lanjutan)

34. Licence management risk in operation (continued)

b. Credit risk (continued)

i. Maximum exposure to credit risk (continued)

Tagihan bersih berdasarkan sektor ekonomi / *Net Billing based on economic sector*

Sektor Ekonomi / *Economic sector*	31 Desember 2013 / Dalam Jutaan Rupiah / *In Millions Rupiah*					
	Tagihan ke Pemerintah / Billing to the Goverment	Tagihan Ke Entitas Sektor Publik / to Public entity sector	Tagihan kepada Bank / Billing to the Bank	Kredit Beragun Rumah tinggal / Loans with house guarantee	Kredit Properti Komersial / Loans with commerc property guarantee	Jumlah dipindahkan / Total to moved
Jasa perorangan yang melayani rumah tangga / *Individual service to serve housekeeping*	-	-	-	-	-	-
Kegiatan yang belum jelas batasannya / *The uncertainty limited activity*	-	-	-	-	-	-
Bukan Lapangan Usaha / *Not job opportunity*	-	-	-	403,155	40	403,195
Lainnya / *Others*	2,104,077	-	-	-	-	2,104,077
Total	2,104,077	237,224	4,581,515	403,597	53,162	7,379,575

Tagihan bersih berdasarkan sektor ekonomi / *Net Billing based on economic sector*

Sektor Ekonomi / *Economic sector*	31 Desember 2013 / Dalam Jutaan Rupiah / *In Millions Rupiah*					
	Pindahan Jumlah / Moving total	Kredit Pegawai / Pensiunan / Loans of employee or retired	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel / Receivable to Micro business, small business and Retail Portfolio	Tagihan kepada Korporasi / Receivable to coorporate	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Jumlah / Total
Pertanian, perburuhan dan Kehutanan / *Agriculture, labour and forest*	1,502	-	861,913	801	3,228	867,444
Perikanan / *Fishing*	1,805	-	7,620	5,251	212	14,888
Pertambangan dan Penggalian / *Mining and excavating*	-	-	687	-	34	721
Industri pengolahan / *Manufacture industry*	6,082	-	18,181	-	3,431	27,694
Listrik, Gas dan Air / *Electricity, Gas and Water*	173,287	-	2,988	-	6	176,281
Konstruksi / *Construction*	83,316	-	167,465	95,840	5,878	352,499
Perdagangan dan eceran / *Commerce and retail*	10,874	2,347	770,561	4,839	7,565	796,186
Penyediaan akomodasi, makan dan minum / *Acomodation, food and*						

water supply	-	-	34,926	-	180	35,106

34. Praktek manajemen risiko yang dijalankan (lanjutan)

b. Risiko kredit (lanjutan)

i. Eksposur maksimum terhadap risiko kredit (lanjutan)

34. Licence management risk in operation (continued)

b. Credit risk (continued)

i. Maximum exposure to credit risk (continued)

Tagihan bersih berdasarkan sektor ekonomi / *Net Billing based on economic sector*

Sektor Ekonomi / *Economic sector*	31 Desember 2013 / Dalam Jutaan Rupiah / *In Millions Rupiah*					
	Pindahan Jumlah / Moving total	Kredit Pegawai / Pensiunan / Loans of employee or retired	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel / Receivable to Micro business, small business and Retail Portofolio	Tagihan kepada Korporasi / Receivable to coorporate	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Jumlah / Total
Transportasi, pergudangan dan komunikasi / *Transportation, warehouse and communication*	8,357	-	7,094	-	431	15,882
Perantara keuangan / *Financial broker*	4,581,515	-	3,197	29,481	1,010	4,615,203
Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan / *Real estate, rental and company service*	-	-	8,176	938	44	9,158
Jasa pendidikan / *Education service*	-	-	2,912	-	-	2,912
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial / *Healthy service and sociality activation*	-	-	10,851	-	86	10,937
Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya / *Social service, social culture, entertainment and individual*	5,565	-	55,439	8,234	675	69,913
Jasa perorangan yang melayani rumah tangga / *Individual service to serve housekeeping*	-	-	425	-	-	425
Kegiatan yang belum jelas batasannya / *The uncertainty limited activity*	-	-	-	-	-	-
Bukan Lapangan Usaha / *Not job opportunity*	403,195	8,588,900	30,300	80,756	6,177	9,109,328
Lainnya / *Others*	2,104,077	-	-	-	-	2,104,077
Total	**7,379,575**	**8,591,247**	**1,985,647**	**226,140**	**28,957**	**18,208,654**

34. Praktek manajeman risiko yang dijalankan (lanjutan)

b. Risiko kredit (lanjutan)

i. Eksposur maksimum terhadap risiko kredit (lanjutan)

34. Licence management risk in operation (continued)

b. Credit risk (continued)

i. Maximum exposure to credit risk (continued)

Tagihan bersih berdasarkan sektor ekonomi / *Net Billing based on economic sector*

Sektor Ekonomi / *Economic sector*	31 Desember 2013 Dalam Jutaan Rupiah / *In Millions Rupiah* Pindahan Jumlah / Moving total	Aset lainnya / Others assets	Eksposur di Unit Usaha Syariah / Exposure at Sharia Units	Jumlah / Total
Pertanian, perburuhan dan Kehutanan / *Agriculture, labour and forest*	867,444	-	39,759	907,203
Perikanan / *Fishing*	14,888	-	-	14,888
Pertambangan dan Penggalian / *Mining and excavating*	721	-	-	721
Industri pengolahan / *Manufacture industry*	27,694	-	564	28,258
Listrik, Gas dan Air / *Electricity, Gas and Water*	176,281	-	-	176,281
Konstruksi / *Construction*	352,499	-	12,465	364,964
Perdagangan dan eceran / *Commerce and retail*	796,186	-	48,914	845,100
Penyediaan akomodasi, makan dan minum / *Acomodation, food and water supply*	35,106	-	3,173	38,279
Transportasi, pergudangan dan komunikasi / *Transportation, warehouse and communication*	15,882	-	238	16,120
Perantara keuangan / *Financial broker*	4,615,203	-	-	4,615,203
Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan / *Real estate, rental and company service*	9,158	-	35,610	44,768
Jasa pendidikan / *Education service*	2,912	-	-	2,912
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial / *Healthy service and sociality activation*	10,937	-	378	11,315
Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya / *Social service, social culture, entertainment and individual*	69,913	-	-	69,913
Jasa perorangan yang melayani rumah tangga / *Individual service to serve housekeeping*	425	-	-	425
Kegiatan yang belum jelas batasannya / The uncertainty limited activity	-	-	486,980	486,980
Bukan Lapangan Usaha / *Not job opportunity*	9,109,328	-	-	9,109,328
Lainnya / *Others*	2,104,077	1,134,340	201,900	3,440,317
Total	**18,208,654**	**1,134,340**	**829,981**	**20,172,975**

Dijelaskan dalam lampiran SE BI nomor 14/35/DPNP tanggal 10 Desember 2012 dalam pengungkapan eksposur kredit penerapan manajemen risiko Bank yang bersifat kuantitatif wajib disajikan dalam bentuk perbandingan dengan laporan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, Khusus untuk penerapan di tahun pertama, Bank tidak perlu melakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya.

In SE BI number 14/35/DPNP dated on December 10, 2012 was explained to disclosure credit exposure for application to Bank risk management is quantitative must present into comparative report with same period to last year. Meanwhile, specially for the application in the first year, Bank not necessary to comparative report with period to the year before.

ii. Analisis risiko konsentrasi kredit

Bank melakukan pengungkapan kuantitatif atas pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) individual dan kolektif, serta metode statistik yang digunakan dalam perhitungan CKPN dengan melalui pendekatan yang akan digunakan seperti terlihat pada tabel berikut dibawah ini :

ii. Concentration of credit risk analysis

The Bank has been quantitive disclosure of allowance for impairment losses (AFIL) as individual and colective, with statistic method was using in that calculating of allowance for impairment losses with approach will be used look likes see on table below :

34. Praktek manajeman risiko yang dijalankan (lanjutan)

b. Risiko kredit (lanjutan)

ii. Analisis risiko konsentrasi kredit (lanjutan)

34. Licence management risk in operation (continued)

b. Credit risk (continued)

ii. Concentration of credit risk analysis (continued)

Tagihan dan pencadangan berdasarkan sektor ekonomi / *Net Billing and allowed based on economic sector*

Sektor Ekonomi / *Economic sector*	31 Desember 2014					
	Dalam Jutaan Rupiah / *In Millions Rupiah*					
		Tagihan yang mengalami penurunan nilai / *Nett Biling was impaired*				
	Tagihan / Billing	Belum jatuh tempo / Not held- to-maturity	Telah jatuh tempo / held- to-maturity	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Individual	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Kolektif	Tagihan yang dihapus buku / Receivable has write-off
Pertanian, perburuhan dan Kehutanan / *Agriculture, labour and forest*	1,160,368	59,400	56,203	-	67,726	-
Perikanan / *Fishing*	57,568	2,677	2,474	-	5,036	-
Pertambangan dan Penggalian / *Mining and excavating*	3,327	161	483	-	451	-
Industri pengolahan / *Manufacture industry*	47,279	1,867	18,596	16,371	2,333	-
Listrik, Gas dan Air / *Electricity, Gas and Water*	126,390	439	-	-	45	-
Konstruksi / *Construction*	320,045	8,688	36,376	6,887	32,900	-
Perdagangan dan eceran / *Commerce and retail*	955,597	117,119	79,729	-	90,711	-
Penyediaan akomodasi, makan dan minum / *Acomodation, food and water supply*	46,763	6,615	2,347	-	2,721	-
Transportasi, pergudangan dan komunikasi / *Transportation, warehouse and communication*	10,599	2,475	903	-	971	-
Perantara keuangan / *Financial broker*	5,756,609	449	684	-	685	-
Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan / *Real estate, rental and company service*	38,900	530	759	-	1,228	-
Jasa pendidikan / *Education service*	3,152	192	-	-	30	-
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial / *Healthy service and sociality activation*	8,745	360	-	-	99	-
Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya /						

Social service, social culture, entertainment and individual	81,045	5,436	5,822	-	4,857	-

34. Praktek manajeman risiko yang dijalankan (lanjutan)

34. *Licence management risk in operation (continued)*

b. Risiko kredit (lanjutan)

b. Credit risk (continued)

ii. Analisis risiko konsentrasi kredit (lanjutan)

ii. Concentration of credit risk analysis (continued)

Tagihan dan pencadangan berdasarkan sektor ekonomi / *Net Billing and allowed based on economic sector*

Sektor Ekonomi / *Economic sector*	31 Desember 2014 (Dalam Jutaan Rupiah / *In Millions Rupiah*)					
	Tagihan / Billing	Tagihan yang mengalami penurunan nilai / *Nett Biling was impaired*: Belum jatuh tempo / Not held- to-maturity	Tagihan yang mengalami penurunan nilai / *Nett Biling was impaired*: Telah jatuh tempo / held- to-maturity	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Individual	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Kolektif	Tagihan yang dihapus buku / Receivable has write-off
Jasa perorangan yang melayani rumah tangga / *Individual service to serve housekeeping*	7,067	20	17	-	20	-
Kegiatan yang belum jelas batasannya / *The uncertainty limited*	-	-	-	-	-	-
Bukan Lapangan Usaha / *Not job opportunity*	10,658,144	140,157	132,382	-	158,350	-
Lainnya / *Others*	4,637,594	-	-	-	1,155	-
Total	**23,919,191**	**346,585**	**336,775**	**23,258**	**369,318**	**-**

Tagihan dan pencadangan berdasarkan sektor ekonomi / *Net Billing and allowed based on economic sector*

Sektor Ekonomi / *Economic sector*	31 Desember 2013 (Dalam Jutaan Rupiah / *In Millions Rupiah*)					
	Tagihan / Billing	Tagihan yang mengalami penurunan nilai / *Nett Biling was impaired*: Belum jatuh tempo / Not held- to-maturity	Tagihan yang mengalami penurunan nilai / *Nett Biling was impaired*: Telah jatuh tempo / held- to-maturity	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Individual	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Kolektif	Tagihan yang dihapus buku / Receivable has write-off
Pertanian, perburuhan dan Kehutanan / *Agriculture, labour and forest*	907,203	53,719	56,394	-	61,894	-
Perikanan / *Fishing*	14,888	185	2,546	-	2,915	-
Pertambangan dan Penggalian / *Mining and excavating*	721	242	495	-	498	-
Industri pengolahan / *Manufacture industry*	28,258	888	18,942	16,505	2,964	-
Listrik, Gas dan Air / *Electricity, Gas and Water*	176,281	-	99	-	280	-
Konstruksi / *Construction*	364,964	8,458	39,048	4,391	49,356	-
Perdagangan dan eceran / *Commerce and retail*	845,100	75,182	76,473	5,479	98,774	-
Penyediaan akomodasi, makan dan minum / *Acomodation, food and*						

water supply	38,279	4,136	2,696	-	4,597	-

34. Praktek manajemen risiko yang dijalankan (lanjutan)

b. Risiko kredit (lanjutan)

ii. Analisis risiko konsentrasi kredit (lanjutan)

34. Licence management risk in operation (continued)

b. Credit risk (continued)

ii. Concentration of credit risk analysis (continued)

Tagihan dan pencadangan berdasarkan sektor ekonomi / *Net Billing and allowed based on economic sector*

Sektor Ekonomi / *Economic sector*	31 Desember 2013					
	Dalam Jutaan Rupiah / *In Millions Rupiah*					
	Tagihan / Billing	Tagihan yang mengalami penurunan nilai / *Nett Biling was impaired*		Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Individual	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Kolektif	Tagihan yang dihapus buku / Receivable has write-off
		Belum jatuh tempo / Not held- to-maturity	Telah jatuh tempo / held- to-maturity			
Transportasi, pergudangan dan komunikasi / *Transportation, warehouse and*	16,120	581	932	-	740	-
Perantara keuangan / *Financial broker*	4,615,203	651	1,251	-	244	-
Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan / *Real estate, rental and company service*	44,768	314	785	-	1,010	-
Jasa pendidikan / *Education service*	2,912	97	-	-	94	-
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial / *Healthy service and sociality activation*	11,315	402	87	-	405	-
Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya / *Social service, social culture, entertainment and individual*	69,913	4,770	5,644	-	7,749	-
Jasa perorangan yang melayani rumah tangga / *Individual service to serve housekeeping*	425	31	24	-	29	-
Kegiatan yang belum jelas batasannya / *The uncertainty limited*	486,980	2,174	3,757	-	-	-
Bukan Lapangan Usaha / *Not job opportunity*	9,109,329	143,411	128,820	-	155,679	-
Lainnya / *Others*	3,440,318	-	-	-	1,155	-
Total	**20,172,977**	**295,241**	**337,993**	**26,375**	**388,383**	**-**

Risiko konsentrasi kredit timbul ketika sejumlah pelanggan bergerak dalam aktivitas usaha yang sejenis atau memiliki karakteristik yang sejenis yang dapat menyebabkan kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban

Concentrations of credit risk arise when a number of customers are engaged in similar business activities or when they have similar characteristics that would cause their ability to meet contractual obligations to be similarly

kontraktualnya sama-sama dipengaruhi oleh perubahan kondisi ekonomi ataupun kondisi lainnya.

affected by changes in economic or other conditions.

34. Praktek manajeman risiko yang dijalankan (lanjutan)

b. Risiko kredit (lanjutan)

ii. Analisis risiko konsentrasi kredit (lanjutan)

Bank mendorong adanya diversifikasi dari portofolio kreditnya pada berbagai wilayah industri, dan produk kredit sebagai upaya untuk meminimalisasi risiko kredit.

Berdasarkan PBI nomor 14/14/PBI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 dan SE BI nomor 14/35/DPNP tanggal 10 Desember 2012 tentang Laporan Tahunan Bank Umum disampaikan kepada Bank Indonesia dijelaskan mengenai pengungkapan eksposur risiko dan penerapan manajemen risiko yang mencakup pengungkapan tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak Bank secara individual seperti diungkap tabel berikut ini (dalam jutaan Rupiah):

34. Licence management risk in operation (continued)

b. Credit risk (continued)

ii. Concentration of credit risk analysis (continued)

The Bank encourages the diversification of its credit portfolio among a variety of industries, and credit product in order to minimize the credit risk.

Based on PBI number 14/14/PBI/2012 dated on October 18, 2012 and SE BI number 14/35/DPNP dated on December 10, 2012 on The Bank of yearly general report to report to Bank Indonesia explained about risk exposure disclosure and risk management implementation with net billing based on rest contract of Bank due dated in individual was disclosure as table are as follow (in millions Rupiah):

Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak / *Net Billing based on rest contract of Bank due dated*

Kategori Portofolio / *Portofolio category*	31 Desember 2014 / Dalam Jutaan Rupiah / *In Millions Rupiah*					
	≤ 1 tahun / ≤ 1 years	> 1 tahun s.d. 3 tahun / > 1 years until 3 years	> 3 tahun s.d. 5 tahun / > 3 years until 5 years	> 5 tahun / 5 years	Non kontraktual / Non contractual	Jumlah / Total
Tagihan Pemerintah / *Goverment billed*	2,715,091	-	-	-	-	2,715,091
Tagihan Ke Entitas Sektor Publik / *to Public entity sector*	38,986	-	109,084	-	-	148,070
Tagihan Kepada Bank / *Billing to the Bank*	5,626,190	68,390	-	-	-	5,694,580
Kredit Beragun Rumah / *Loans with house guarantee*	2,623	20,069	87,653	302,370	-	412,715
Kredit Beragun Properti Komersial / *Loans with commerc property guarantee*	2,466	2,696	1,375	2,102	-	8,639
Kredit Pegawai / Pensiunan / *Loans of employee or retired*	44,060	509,959	1,279,165	7,556,922	-	9,390,106
Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel/ Receivable to Micro business, small business and Retail	374,347	755,153	700,244	310,888	-	2,140,632
Tagihan kepada Korporasi / Receivable to the Corporation	206,931	39,282	2,057	-	-	248,270
Tagihan yang Telah Jatuh Tempo / *With due dated*	14,633	4,345	3,216	2,899	-	25,093
Aset lainnya / *Other assets*	-	-	-	-	1,676,892	1,676,892
Eksposur di Unit Usaha Syariah / *Exposure at Sharia Units*	156,233	33,719	108,338	645,700	81,995	1,025,985
Total	9,181,560	1,433,613	2,291,132	8,820,881	1,758,887	23,486,072

34. Praktek manajeman risiko yang dijalankan (lanjutan)

b. Risiko kredit (lanjutan)

ii. Analisis risiko konsentrasi kredit (lanjutan)

34. Licence management risk in operation (continued)

b. Credit risk (continued)

ii. Concentration of credit risk analysis (continued)

Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak / *Net Billing based on rest contract of Bank due dated*

Kategori Portofolio / *Portofolio category*	31 Desember 2013 / Dalam Jutaan Rupiah / *In Millions Rupiah*					
	≤ 1 tahun / ≤ 1 years	> 1 tahun s.d. 3 tahun / > 1 years until 3 years	> 3 tahun s.d. 5 tahun / > 3 years until 5 years	> 5 tahun / 5 years	Non kontraktual / Non contractual	Jumlah / Total
Tagihan Pemerintah / *Goverment billed*	2,104,077	-	-	-	-	2,104,077
Tagihan Ke Entitas Sektor Publik / *to Public entity sector*	58,261	28,962	-	150,000	-	237,223
Tagihan Kepada Bank / *Billing to the Bank*	4,581,515	-	-	-	-	4,581,515
Kredit Beragun Rumah / *Loans with house guarantee*	3,031	17,667	48,725	334,174	-	403,597
Kredit Beragun Properti Komersial / *Loans with commerc property guarantee*	39,037	4,732	6,489	2,904	-	53,162
Kredit Pegawai / Pensiunan / *Loans of employee or retired*	54,916	436,696	966,223	7,133,412	-	8,591,247
Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel/ *Receivable to Micro business, small business and Retail*	425,303	689,207	662,582	205,643	-	1,982,735
Tagihan kepada Korporasi / *Receivable to the Corporation*	150,445	36,927	6,277	32,491	-	226,139
Tagihan yang Telah Jatuh Tempo / *With due dated*	19,197	2,734	1,773	5,253	-	28,957
Aset lainnya / *Other assets*	-	-	-	-	1,134,340	1,134,340
Eksposur di Unit Usaha Syariah / *Exposure at Sharia Units*	191,687	54,160	536,105	1,122	46,907	829,981
Total	7,627,470	1,271,085	2,228,174	7,864,999	1,181,247	20,172,976

Rincian mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai / *Detailed mutation of Allowance of Impairment Losses*

Keterangan / *Description*	31 Desember 2014 / Dalam jutaan Rupiah / *In million Rupiah*	
	CKPN Individual / *Individual CKPN*	CKPN Kolektif / *Collective CKPN*
Saldo awal CKPN / *Beginning balance CKPN*	26,375	388,383
Pembentukan (pemulihan) CKPN tahun berjalan (net) / *Increase (decrease) CKPN end of the year (nett)*		
a. Pembentukan CKPN pada periode berjalan / *Increase of year end CKPN*	-	-
b. Pemulihan CKPN pada periode berjalan / *Decrease of year end CKPN*	(3,117)	(19,065)

Pembentukan (pemulihan) lainnya pada periode berjalan / *Others Increase (decrease) of the year end*	-	-
Saldo akhir CKPN / *Ending balance CKPN*	**23,258**	**369,318**

34. Praktek manajeman risiko yang dijalankan (lanjutan)

b. Risiko kredit (lanjutan)

ii. Analisis risiko konsentrasi kredit (lanjutan)

34. *Licence management risk in operation (continued)*

b. Credit risk (continued)

ii. Concentration of credit risk analysis (continued)

Rincian mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai / *Detailed mutation of Allowance of Impairment Losses*

Keterangan / *Description*	31 Desember 2013 Dalam jutaan Rupiah / *In million Rupiah*	
	CKPN Individual / *Individual CKPN*	CKPN Kolektif / *Collective CKPN*
Saldo awal CKPN / *Beginning balance CKPN*	29,662	331,990
Pembentukan (pemulihan) CKPN tahun berjalan (net) / reserve *(recovery) CKPN end of the year (nett)*		
a. Pembentukan CKPN pada periode berjalan / *Increase of year end CKPN*	4	65,973
b. Pemulihan CKPN pada periode berjalan / *Decrease of year end CKPN*	(3,291)	(9,580)
Pembentukan (pemulihan) lainnya pada periode berjalan / *Others reserve (recovery) of the year end*	-	-
Saldo akhir CKPN / *Ending balance CKPN*	**26,375**	**388,383**

Dijelaskan dalam lampiran SE BI nomor 14/35/DPNP tanggal 10 Desember 2012 dalam pengungkapan eksposur kredit penerapan manajemen risiko Bank yang bersifat kuantitatif wajib disajikan dalam bentuk perbandingan dengan laporan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, Khusus untuk penerapan di tahun pertama, Bank tidak perlu melakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya.

In SE BI number 14/35/DPNP dated on December 10, 2012 was explained to disclosure credit exposure for application to Bank risk management is quantitative must present into comparative report with same period to last year. Meanwhile, specially for the application in the first year, Bank not necessary to comparative report with period to the year before.

Penambahan diversifikasi ini berdasarkan rencana strategi Bank, sektor target, kondisi ekonomi saat ini, kebijakan pemerintah, sumber pendanaan, dan proyeksi pertumbuhan. Konsentrasi kredit yang diberikan berdasarkan jenis, sektor ekonomi, jatuh tempo, jangka waktu perjanjian kredit, Pihak berelasi dan kolektibilitas diungkapkan pada tabel diatas.

The extent of diversification is based on the Bank's strategic plan, target sectors, current economic conditions, government policy, funding sources and growth projections. Concentration of credit risk of loans receivable by type, economic sector, maturity, term of credit agreement, related party and collectibility is disclosed in table above.

Dalam hal pengendalian risiko kredit, Bank telah melaksanakan beberapa tahapan berikut :

In the frame of controlling credit risk, Bank was doing for several step is as follow :

- Menyediakan modal yang cukup untuk menutup risiko Bank dapat menyediakan modal baik dalam rangka memenuhi rasio kecukupan modal maupun dalam meng-cover risiko secara keseluruhan. Dalam hal ini Bank Riau Kepri telah menghitung ATMR Risiko Kredit dengan pendekatan standar dalam laporan KPMM.
- Memelihara kualitas aset produktif.
- Pengawasan aktif Komisaris dan Direksi.
- Meningkatkan efisiensi proses manajemen kredit
- Meningkatkan budaya kredit yang sehat.
- Mempersiapkan bisnis yang cepat tanggap.

- *Providing sufficient capital to cover the risk Bank can provide the capital both in the framework of meeting the capital adequacy ratio as well as to cover the risk as a whole. In this case Bank Riau Kepri have contacted the Credit Risk ATMR with standard approach in the KPMM report.*
- *Maintaining productive asset quality.*
- *Supervising the active Board of Commissioners and*
- *Improving the credit management efficiency.*
- *Improving healthy credit culture.*
- *Providing quicker business response.*

34. Praktek manajeman risiko yang dijalankan (lanjutan) / ***34. Licence management risk in operation (continued)***

b. Risiko kredit (lanjutan) / *b. Credit risk (continued)*

ii. Analisis risiko konsentrasi kredit (lanjutan) / *ii. Concentration of credit risk analysis (continued)*

Pengungkapan tagihan bersih dan tehnik Mitigasi Risiko Kredit / *Nett receivable and Mitigation technic of credit risk disclosure*

Kategori Portofolio / Portfolio category	Tagihan Bersih / Nett receivable	31 Desember 2014 / Dalam Jutaan Rupiah / *In Millions Rupiah*				
		Bagian yang dijamin dengan :				
		Agunan/ Collateral	Garansi / Guarantee	Asuransi kredit / Loans insurance	Lainnya / Others	Bagian yang Tidak Dijamin
A. Eksposur Neraca / *Balance sheet exposure*						
Tagihan Pemerintah / *Goverment billed*	2,715,091	-	-	-	2,715,091	-
Tagihan Ke Entitas Sektor Publik / *to Public*	132,888	-	-	-	91,064	41,824
Tagihan Kepada Bank / *Billing to the Bank*	5,694,580	-	-	-	-	5,694,580
Kredit Beragun Rumah / *Loans with house*	412,699	-	-	-	-	412,699
Kredit Beragun Properti Komersial / *Loans with*	7,750	-	-	-	-	7,750
Kredit Pegawai / Pensiunan / *Loans of*	9,390,106	-	-	-	-	9,390,106
Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel/ Receivable to Micro business, small business and Retail	2,070,155	-	-	-	-	2,070,155
Tagihan kepada Korporasi / Receivable	110,738	-	-	-	-	110,738
Tagihan yang Telah Jatuh Tempo / *With due*	19,804	-	-	-	-	19,804
Aset lainnya / *Other assets*	1,676,892	-	-	-	-	1,676,892
Eksposur di Unit Usaha Syariah / *Exposure at*	1,022,870	-	-	-	-	1,022,870
Total / *Jumlah*	23,253,574	-	-	-	2,806,155	20,447,419
B. Eksposur transaksi rekening administratif / *Transaction of administrative account exposure*						
Tagihan Pemerintah / *Goverment billed*	-	-	-	-	-	-
Tagihan Ke Entitas Sektor Publik / *to Public entity sector*	15,182	-	-	-	15,182	-
Tagihan Kepada Bank / *Billing to the Bank*	-	-	-	-	-	-
Kredit Beragun Rumah / *Loans with house guarantee*	16	-	-	-	-	16
Kredit Beragun Properti Komersial / *Loans with commerc property*	889	-	-	-	-	889
Kredit Pegawai / Pensiunan / *Loans of employee or retired*	-	-	-	-	-	-

34. Praktek manajeman risiko yang dijalankan (lanjutan) / ***34. Licence management risk in operation (continued)***

b. Risiko kredit (lanjutan) / *b. Credit risk (continued)*

ii. Analisis risiko konsentrasi kredit (lanjutan) / *ii. Concentration of credit risk analysis (continued)*

Pengungkapan tagihan bersih dan tehnik Mitigasi Risiko Kredit / *Nett receivable and Mitigation technic of credit risk disclosure*

Kategori Portofolio / Portfolio category	Tagihan Bersih / Nett receivable	31 Desember 2014				
		Dalam Jutaan Rupiah / *In Millions Rupiah*				
		Agunan/ Collateral	Bagian yang dijamin dengan : Garansi / Guarantee	Asuransi kredit / Loans insurance	Lainnya / Others	Bagian yang Tidak Dijamin
B. Eksposur transaksi rekening administratif (lanjutan) / *Transaction of administrative account exposure (continued)*						
Tagihan Ke Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	70,476	-	-	-	-	70,476
Tagihan kepada Korporasi / Receivable to the Corporation	137,531	-	-	-	-	137,531
Tagihan yang Telah Jatuh Tempo / *With due dated*	5,289	-	-	-	-	5,289
Aset lainnya / *Other assets*	-	-	-	-	-	-
Eksposur di Unit Usaha Syariah / *Exposure at*	3,115	-	-	-	-	3,115
Total / *Jumlah*	232,498	-	-	-	15,182	217,316
C. Eksposur Risiko Kredit Akibat Kegagalan Pihak Lawan / *Exposure counterparty credit risk*						
Tagihan Pemerintah / *Goverment billed*	-	-	-	-	-	-
Tagihan Ke Entitas Sektor Publik / *to Public*	-	-	-	-	-	-
Tagihan Kepada Bank / *Billing to the Bank*	-	-	-	-	-	-
Kredit Beragun Rumah / *Loans with house*	-	-	-	-	-	-
Kredit Beragun Properti Komersial / *Loans with*	-	-	-	-	-	-
Kredit Pegawai /						
Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel/ Receivable to Micro business, small business and Retail	-	-	-	-	-	-
Tagihan kepada						
Tagihan yang Telah Jatuh Tempo / *With due*	-	-	-	-	-	-
Aset lainnya / *Other*						
Eksposur di Unit Usaha						
Total / *Jumlah*	-	-	-	-	-	-
Total / *Jumlah*	23,486,072	-	-	-	2,821,337	20,664,735

34. Praktek manajeman risiko yang dijalankan (lanjutan)

b. Risiko kredit (lanjutan)

ii. Analisis risiko konsentrasi kredit (lanjutan)

34. Licence management risk in operation (continued)

b. Credit risk (continued)

ii. Concentration of credit risk analysis (continued)

Pengungkapan tagihan bersih dan tehnik Mitigasi Risiko Kredit / *Nett receivable and Mitigation technic of credit risk disclosure*

Kategori Portofolio / Portfolio category	Tagihan Bersih / Nett receivable	31 Desember 2013				
		Dalam Jutaan Rupiah / *In Millions Rupiah*				
		Bagian yang dijamin dengan :				
		Agunan/ Collateral	Garansi / Guarantee	Asuransi kredit / Loans insurance	Lainnya / Others	Bagian yang Tidak Dijamin
A. Eksposur Neraca / *Balance sheet exposure*						
Tagihan Pemerintah / *Goverment billed*	2,104,077	-	-	-	2,104,077	-
Tagihan Ke Entitas Sektor Publik / *to Public*	175,313	-	-	-	88,089	87,224
Tagihan Kepada Bank / *Billing to the Bank*	4,581,515	-	-	-	-	4,581,515
Kredit Beragun Rumah / *Loans with house*	403,551	-	-	-	-	403,551
Kredit Beragun Properti Komersial / *Loans with*	44,175	-	-	-	-	44,175
Kredit Pegawai / Pensiunan / *Loans of*	8,591,247	-	-	-	-	8,591,247
Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel/ Receivable to Micro business, small business and Retail	1,863,754	-	-	-	-	1,863,754
Tagihan kepada Korporasi / Receivable	96,622	-	-	-	-	96,622
Tagihan yang Telah Jatuh Tempo / *With due*	17,997	-	-	-	-	17,997
Aset lainnya / *Other assets*	1,134,340	-	-	-	-	1,134,340
Eksposur di Unit Usaha Syariah / *Exposure at*	810,950	-	-	-	-	810,950
Total / *Jumlah*	19,823,541	-	-	-	2,192,166	17,631,375
B. Eksposur transaksi rekening administratif / *Transaction of administrative account exposure*						
Tagihan Pemerintah / *Goverment billed*	-	-	-	-	-	-
Tagihan Ke Entitas Sektor Publik / *to Public entity sector*	30,955	-	-	-	30,955	-
Tagihan Kepada Bank / *Billing to the Bank*	-	-	-	-	-	-
Kredit Beragun Rumah / *Loans with house guarantee*	23	-	-	-	-	23
Kredit Beragun Properti Komersial / *Loans with commerc property*	4,494	-	-	-	-	4,494
Kredit Pegawai / Pensiunan / *Loans of*						

employee or retired	-	-	-	-	-	-

34. Praktek manajeman risiko yang dijalankan (lanjutan)

b. Risiko kredit (lanjutan)

ii. Analisis risiko konsentrasi kredit (lanjutan)

34. Licence management risk in operation (continued)

b. Credit risk (continued)

ii. Concentration of credit risk analysis (continued)

Pengungkapan tagihan bersih dan tehnik Mitigasi Risiko Kredit / *Nett receivable and Mitigation technic of credit risk disclosure*

Kategori Portofolio / Portfolio category	Tagihan Bersih / Nett receivable	31 Desember 2013 Dalam Jutaan Rupiah / *In Millions Rupiah* Bagian yang dijamin dengan :			
		Agunan/ Collateral	Garansi / Guarantee	Asuransi kredit / Loans insurance	Lainnya / Others	Bagian yang Tidak Dijamin
B. Eksposur transaksi rekening administratif (lanjutan) / *Transaction of administrative account exposure (continued)*						
Tagihan Ke Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	79,733	-	-	-	-	79,733
Tagihan kepada Korporasi / Receivable to the Corporation	120,805	-	-	-	-	120,805
Tagihan yang Telah Jatuh Tempo / *With due dated*	5,480	-	-	-	-	5,480
Aset lainnya / *Other assets*	-	-	-	-	-	-
Eksposur di Unit Usaha Syariah / *Exposure at*	19,031	-	-	-	-	19,031
Total / *Jumlah*	260,521	-	-	-	30,955	229,566
C. Eksposur Risiko Kredit Akibat Kegagalan Pihak Lawan / *Exposure counterparty credit risk*						
Tagihan Pemerintah / *Goverment billed*	-	-	-	-	-	-
Tagihan Ke Entitas Sektor Publik / *to Public*	-	-	-	-	-	-
Tagihan Kepada Bank / *Billing to the Bank*	-	-	-	-	-	-
Kredit Beragun Rumah / *Loans with house*	-	-	-	-	-	-
Kredit Beragun Properti Komersial / *Loans with*	-	-	-	-	-	-
Kredit Pegawai /						
Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel/ Receivable to Micro business, small business and Retail	-	-	-	-	-	-
Tagihan kepada						
Tagihan yang Telah Jatuh Tempo / *With due*	-	-	-	-	-	-
Aset lainnya / *Other*						
Eksposur di Unit Usaha	-	-	-	-	-	-
Total / *Jumlah*	-	-	-	-	-	-
Total / *Jumlah*	20,084,062	-	-	-	2,223,121	17,860,940

34. Praktek manajeman risiko yang dijalankan (lanjutan)

b. Risiko kredit (lanjutan)

iii. Konsentrasi berdasarkan jenis debitur (lanjutan)

34. Licence management risk in operation (continued)

b. Credit risk (continued)

iii. Concentration by type of debtors (continued)

Pengungkapan tagihan bersih dan tehnik Mitigasi ATMR Risiko Kredit / *Nett receivable and Mitigation technic ATMR of credit risk disclosure*

Kategori Portofolio / *Portfolio category*	31 Desember 2014 Dalam Jutaan Rupiah / *In Millions Rupiah*		
	Tagihan bersih / Nett receivable	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
A. Eksposur Neraca / *Balance sheet exposure*			
Tagihan Pemerintah / *Goverment billed*	2,715,091	-	-
Tagihan Ke Entitas Sektor Publik / *to Public entity sector*	132,888	57,775	10,824
Tagihan Kepada Bank / *Billing to the Bank*	5,694,580	1,141,916	1,141,916
Kredit Beragun Rumah / *Loans with house guarantee*	412,699	166,175	166,175
Kredit Beragun Properti Komersial / *Loans with commerc property guarantee*	7,750	7,750	7,750
Kredit Pegawai / Pensiunan / *Loans of employee or retired*	9,390,106	4,695,053	4,695,053
Tagihan Ke Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	2,070,155	1,552,616	1,552,616
Tagihan kepada Korporasi / *Receivable to the Corporation*	110,738	95,064	95,064
Tagihan yang Telah Jatuh Tempo / *With due dated*	19,804	29,564	29,564
Aset lainnya / *Other assets*	1,676,892	-	910,908
Eksposur di Unit Usaha Syariah / *Exposure at Sharia Units*	-	-	-
Jumlah / *total*	22,230,704	7,745,913	8,609,871
B. Eksposur transaksi rekening administratif / *Transaction of administrative account exposure*			
Tagihan Pemerintah / *Goverment billed*	-	-	-
Tagihan Ke Entitas Sektor Publik / *to Public entity sector*	15,182	7,591	-
Tagihan Kepada Bank / *Billing to the Bank*	-	-	-
Kredit Beragun Rumah / *Loans with house guarantee*	16	6	6
Kredit Beragun Properti Komersial / *Loans with commerc property guarantee*	889	889	889
Kredit Pegawai / Pensiunan / *Loans of employee or retired*	-	-	-
Tagihan Ke Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	70,476	52,857	52,857
Tagihan kepada Korporasi / *Receivable to the Corporation*	137,531	137,531	137,531
Tagihan yang Telah Jatuh Tempo / *With due dated*	5,289	7,933	7,933
Aset lainnya / *Other assets*	-	-	-
Eksposur di Unit Usaha Syariah / *Exposure at Sharia Units*	-	-	-
Jumlah / *total*	229,383	206,808	199,217
C. Eksposur Risiko Kredit Akibat Kegagalan Pihak Lawan / *Exposure counterparty credit risk*			
Tagihan Pemerintah / *Goverment billed*	-	-	-
Tagihan Ke Entitas Sektor Publik / *to Public entity sector*	-	-	-
Tagihan Kepada Bank / *Billing to the Bank*	-	-	-
Kredit Beragun Rumah / *Loans with house guarantee*	-	-	-
Kredit Beragun Properti Komersial / *Loans with commerc property guarantee*	-	-	-
Kredit Pegawai / Pensiunan / *Loans of employee or retired*	-	-	-
Tagihan Ke Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-
Tagihan kepada Korporasi / *Receivable to the Corporation*	-	-	-
Tagihan yang Telah Jatuh Tempo / *With due dated*	-	-	-
Aset lainnya / *Other assets*	-	-	-
Eksposur di Unit Usaha Syariah / *Exposure at Sharia Units*	-	-	-
Jumlah / *total*	-	-	-
Jumlah / *Grand total*	**22,460,087**	**7,952,721**	**8,809,087**

34. Praktek manajeman risiko yang dijalankan (lanjutan)

b. Risiko kredit (lanjutan)

iii. Konsentrasi berdasarkan jenis debitur (lanjutan)

34. Licence management risk in operation (continued)

b. Credit risk (continued)

iii. Concentration by type of debtors (continued)

Pengungkapan tagihan bersih dan tehnik Mitigasi ATMR Risiko Kredit / *Nett receivable and Mitigation technic ATMR of credit risk disclosure*

Kategori Portofolio / *Portfolio category*	31 Desember 2013		
	Dalam Jutaan Rupiah / *In Millions Rupiah*		
	Tagihan bersih / Nett receivable	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
A. Eksposur Neraca / *Balance sheet exposure*			
Tagihan Pemerintah / *Goverment billed*	2,104,077	-	-
Tagihan Ke Entitas Sektor Publik / *to Public entity sector*	175,313	61,489	17,445
Tagihan Kepada Bank / *Billing to the Bank*	4,581,515	916,303	916,303
Kredit Beragun Rumah / *Loans with house guarantee*	403,551	160,521	160,521
Kredit Beragun Properti Komersial / *Loans with commerc property guarantee*	44,175	44,175	44,175
Kredit Pegawai / Pensiunan / *Loans of employee or retired*	8,591,247	4,295,624	4,295,624
Tagihan Ke Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	1,863,754	1,397,815	1,397,815
Tagihan kepada Korporasi / *Receivable to the Corporation*	96,622	76,091	76,091
Tagihan yang Telah Jatuh Tempo / *With due dated*	17,997	25,085	25,085
Aset lainnya / *Other assets*	1,134,340	-	572,020
Eksposur di Unit Usaha Syariah / *Exposure at Sharia Units*	-	-	-
Jumlah / *total*	19,012,590	6,977,102	7,505,078
B. Eksposur transaksi rekening administratif / *Transaction of administrative account exposure*			
Tagihan Pemerintah / *Goverment billed*	-	-	-
Tagihan Ke Entitas Sektor Publik / *to Public entity sector*	30,955	15,478	-
Tagihan Kepada Bank / *Billing to the Bank*	-	-	-
Kredit Beragun Rumah / *Loans with house guarantee*	23	9	9
Kredit Beragun Properti Komersial / *Loans with commerc property guarantee*	4,494	4,494	4,494
Kredit Pegawai / Pensiunan / *Loans of employee or retired*	-	-	-
Tagihan Ke Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	79,733	59,800	59,800
Tagihan kepada Korporasi / *Receivable to the Corporation*	120,805	120,805	120,805
Tagihan yang Telah Jatuh Tempo / *With due dated*	5,480	8,221	8,221
Aset lainnya / *Other assets*	-	-	-
Eksposur di Unit Usaha Syariah / *Exposure at Sharia Units*	-	-	-
Jumlah / *total*	241,491	208,806	193,328
C. Eksposur Risiko Kredit Akibat Kegagalan Pihak Lawan / *Exposure counterparty credit risk*			
Tagihan Pemerintah / *Goverment billed*	-	-	-
Tagihan Ke Entitas Sektor Publik / *to Public entity sector*	-	-	-
Tagihan Kepada Bank / *Billing to the Bank*	-	-	-
Kredit Beragun Rumah / *Loans with house guarantee*	-	-	-
Kredit Beragun Properti Komersial / *Loans with commerc property guarantee*	-	-	-
Kredit Pegawai / Pensiunan / *Loans of employee or retired*	-	-	-
Tagihan Ke Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-
Tagihan kepada Korporasi / *Receivable to the Corporation*	-	-	-
Tagihan yang Telah Jatuh Tempo / *With due dated*	-	-	-
Aset lainnya / *Other assets*	-	-	-
Eksposur di Unit Usaha Syariah / *Exposure at Sharia Units*	-	-	-
Jumlah / *total*	-	-	-
Jumlah / *Grand total*	**19,254,081**	**7,185,908**	**7,698,406**

34. Praktek manajeman risiko yang dijalankan (lanjutan)

b. Risiko kredit (lanjutan)

iii. Konsentrasi berdasarkan jenis debitur (lanjutan)

34. Licence management risk in operation (continued)

b. Credit risk (continued)

iii. Concentration by type of debtors (continued)

Pengungkapan tagihan bersih berdasarkan bobot risiko setelah memperhitungkan dampak mitigasi risiko kredit / *Nett receivable based on risk value after calculating impact of credit risk*

Kategori Portofolio / *Portfolio category*	Per 31 Desember 2014 / *As of December, 31 2014* — Dalam jutaan Rupiah / *In millions Rupiah*								ATMR	Beban Modal / Capital expenses
	0%	20%-35%	40%-45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya/ *Others*		
A. Eksposur Neraca / *Balance sheet exposure*										
Tagihan Pemerintah / *Goverment billed*	2,715,091	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Ke Entitas Sektor Publik / *to Public entity sector*	93,902	28,896	-	10,090	-	-	-	-	10,824	866
Tagihan Kepada Bank / *Billing to the Bank*	-	5,684,580	-	10,000	-	-	-	-	1,141,916	91,353
Kredit Beragun Rumah / *Loans with house guarantee*	-	7,763	375,269 29,667		-	-	-	-	166,175	13,294
Kredit Beragun Properti Komersial / *Loans with commerc property guarantee*	-	-	-	-	-	7,750	-	-	7,750	620
Kredit Pegawai / Pensiunan / *Loans of employee or retired*	-	-	-	9,390,106	-	-	-	-	4,695,053	375,604
Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel/ *Receivable to Micro business, small business and Retail*	-	-	-	-	2,070,155	-	-	-	1,552,616	124,209
Tagihan kepada Korporasi / *Receivable to the Corporation*	-	19,594	-	-	-	91,145	-	-	95,064	7,605
Tagihan yang Telah Jatuh Tempo / *With due dated*	-	-	-	-	-	284	19,520	-	29,564	2,365
Aset lainnya / *Other assets*	766,234	-	-	-	-	910,157	500	-	910,907	72,873
Eksposur di Unit Usaha Syariah / *Exposure at Sharia Units*	-	-	-	-	-	-	-	1,022,870	479,797	38,384
Jumlah / *total*	3,575,227	5,740,833	404,936	9,410,196	2,070,155	1,009,336	20,020	1,022,870	9,089,668	727,173
B. Eksposur transaksi rekening administratif / *Transaction of administrative account exposure*										
Tagihan Pemerintah / *Goverment billed*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Ke Entitas Sektor Publik / *to Public entity sector*	15,182	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Kepada Bank / *Billing to the Bank*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

34. Praktek manajeman risiko yang dijalankan (lanjutan)

b. Risiko kredit (lanjutan)

iii. Konsentrasi berdasarkan jenis debitur (lanjutan)

34. Licence management risk in operation (continued)

b. Credit risk (continued)

iii. Concentration by type of debtors (continued)

Pengungkapan tagihan bersih berdasarkan bobot risiko setelah memperhitungkan dampak mitigasi risiko kredit / *Nett receivable based on risk value after calculating impact of credit risk*

Kategori Portofolio / *Portfolio category*	Per 31 Desember 2014 / *As of December, 31 2014* Dalam jutaan Rupiah / *In millions Rupiah*								ATMR	Beban Modal / Capital expenses
	0%	20%-35%	40%-45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya/ *Others*		
B. Eksposur transaksi rekening administratif (lanjutan) / *Transaction of administrative account exposure (continued)*										
Kredit Beragun Rumah / *Loans with house guarantee*	-	-	16	-	-	-	-	-	6	1
Kredit Beragun Properti Komersial / *Loans with commerc property guarantee*	-	-	-	-	-	889	-	-	889	71
Kredit Pegawai / Pensiunan / *Loans of employee or retired*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Ke Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	70,476	-	-	-	52,857	4,229
Tagihan kepada Korporasi / *Receivable to the Corporation*	-	-	-	-	-	137,531	-	-	137,531	11,002
Tagihan yang Telah Jatuh Tempo / *With due dated*	-	-	-	-	-	-	5,289	-	7,933	635
Aset lainnya / *Other assets*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksposur di Unit Usaha Syariah / *Exposure at Sharia Units*	-	-	-	-	-	-	-	3,115	1,580	126
Jumlah / *total*	15,182	-	16	-	70,476	138,420	5,289	3,115	200,797	16,064
Jumlah dipindahkan/ *Total moved*	3,590,410	5,740,833	404,952	9,410,196	2,140,631	1,147,756	25,309	1,025,985	9,290,465	743,237
C. Eksposur Risiko Kredit Akibat Kegagalan Pihak Lawan / *Exposure counterparty credit risk*										
Tagihan Pemerintah / *Goverment billed*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Ke Entitas Sektor Publik / *to Public entity sector*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Kepada Bank / *Billing to the Bank*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kredit Beragun Rumah / *Loans with house guarantee*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kredit Beragun Properti Komersial / *Loans with commerc property guarantee*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

34. Praktek manajeman risiko yang dijalankan (lanjutan)

b. Risiko kredit (lanjutan)

iii. Konsentrasi berdasarkan jenis debitur (lanjutan)

34. Licence management risk in operation (continued)

b. Credit risk (continued)

iii. Concentration by type of debtors (continued)

Pengungkapan tagihan bersih berdasarkan bobot risiko setelah memperhitungkan dampak mitigasi risiko kredit / *Nett receivable based on risk value after calculating impact of credit risk*

Kategori Portofolio / *Portfolio category*	Per 31 Desember 2014 / *As of December, 31 2014* — Dalam jutaan Rupiah / *In millions Rupiah*								ATMR	Beban Modal / Capital expenses
	0%	20%-35%	40%-45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya/ *Others*		
C. Eksposur Risiko Kredit Akibat Kegagalan Pihak Lawan (lanjutan) / *Exposure counterparty credit risk (continued)*										
Kredit Pegawai / Pensiunan / *Loans of employee or retired*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel/ *Receivable to Micro business, small business and Retail*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan kepada Korporasi / Receivable to the Corporation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan yang Telah Jatuh Tempo / *With due*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset lainnya / *Other*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksposur di Unit Usaha Syariah / *Exposure at Sharia Units*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah / *Total*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah / Grand *Total*	3,590,410	5,740,833	404,952	9,410,196	2,140,631	1,147,756	25,309	1,025,985	9,290,465	743,237

Pengungkapan tagihan bersih berdasarkan bobot risiko setelah memperhitungkan dampak mitigasi risiko kredit / *Nett receivable based on risk value after calculating impact of credit risk*

Kategori Portofolio / *Portfolio category*	Per 31 Desember 2013 / *As of December 31, 2013* — Dalam jutaan Rupiah / *In millions Rupiah*								ATMR	Beban Modal / Capital expenses
	0%	20%-35%	40%-45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya/ *Others*		
A. Eksposur Neraca / *Balance sheet exposure*										
Tagihan Pemerintah / *Goverment billed*	2,104,077	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Ke Entitas Sektor Publik / *to Public entity sector*	88,089	87,223	-	-	-	-	-	-	17,445	1,396
Tagihan Kepada Bank / *Billing to the Bank*	-	4,581,515	-	-	-	-	-	-	916,303	73,304
Kredit Beragun Rumah / *Loans with house guarantee*	-	28,233	375,318	-	-	-	-	-	160,521	12,842
Kredit Beragun Properti Komersial / *Loans with commerc property*	-	-	-	-	-	44,175	-	-	44,175	3,534

34. Praktek manajeman risiko yang dijalankan (lanjutan)

b. Risiko kredit (lanjutan)

iii. Konsentrasi berdasarkan jenis debitur (lanjutan)

34. Licence management risk in operation (continued)

b. Credit risk (continued)

iii. Concentration by type of debtors (continued)

Kategori Portofolio / *Portfolio category*	Per 31 Desember 2013 / *As of December 31, 2013* — Dalam jutaan Rupiah / *In millions Rupiah*								ATMR	Beban Modal / Capital expenses
	0%	20%-35%	40%-45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya/ *Others*		
A. Eksposur Neraca (lanjutan) / *Balance sheet exposure (continued)*										
Kredit Pegawai / Pensiunan / *Loans of employee or retired*	-	-	-	8,591,247	-	-	-	-	4,295,624	343,650
Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel/ *Receivable to Micro business, small business and Retail*	-	-	-	-	1,863,754	-	-	-	1,397,815	111,825
Tagihan kepada Korporasi / *Receivable to the Corporation*	-	19,303	-	10,178	-	67,141	-	-	76,091	6,087
Tagihan yang Telah Jatuh Tempo / *With due*	-	-	-	-	-	3,821	14,176	-	25,085	2,007
Aset lainnya / *Other assets*	562,570	-	-	-	-	571,269	500	-	572,020	45,762
Eksposur di Unit Usaha Syariah / *Exposure at Sharia Units*	-	-	-	-	-	-	-	810,950	373,884	29,911
Jumlah / *Total*	2,754,736	4,716,274	375,318	8,601,425	1,863,754	686,406	14,676	810,950	7,878,962	630,317
B. Eksposur transaksi rekening administratif / *Transaction of administrative account exposure*										
Tagihan Pemerintah / *Goverment billed*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Ke Entitas Sektor Publik / *to Public entity sector*	30,955	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Kepada Bank / *Billing to the Bank*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kredit Beragun Rumah / *Loans with house guarantee*	-	8	16	-	-	-	-	-	9	1
Kredit Beragun Properti Komersial / *Loans with commerc property*	-	-	-	-	-	4,494	-	-	4,494	360
Kredit Pegawai / Pensiunan / *Loans of employee or retired*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Ke Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	79,733	-	-	-	59,800	4,784
Tagihan kepada Korporasi / *Receivable to the Corporation*	-	-	-	-	-	120,805	-	-	120,805	9,664

34. Praktek manajeman risiko yang dijalankan (lanjutan)

b. Risiko kredit (lanjutan)

iii. Konsentrasi berdasarkan jenis debitur (lanjutan)

34. Licence management risk in operation (continued)

b. Credit risk (continued)

iii. Concentration by type of debtors (continued)

Kategori Portofolio / *Portfolio category*	Per 31 Desember 2013/ *As of December 31, 2013* — Dalam jutaan Rupiah / *In millions Rupiah*								ATMR	Beban Modal / Capital expenses
	0%	20%-35%	40%-45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya/ *Others*		
B. Eksposur transaksi rekening administratif (lanjutan) / *Transaction of administrative account exposure (continued)*										
Tagihan yang Telah Jatuh Tempo / *With due dated*	-	-	-	-	-	-	5,480	-	8,221	658
Aset lainnya / *Other assets*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksposur di Unit Usaha Syariah / *Exposure at Sharia Units*	-	-	-	-	-	-	-	19,031	9,700	776
Jumlah / *Total*	30,955	8	16	-	79,733	125,299	5,480	19,031	203,028	16,242
C. Eksposur Risiko Kredit Akibat Kegagalan Pihak Lawan / *Exposure counterparty credit risk*										
Tagihan Pemerintah / *Goverment billed*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Ke Entitas Sektor Publik / *to Public entity sector*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Kepada Bank / *Billing to the Bank*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kredit Beragun Rumah / *Loans with house guarantee*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kredit Beragun Properti Komersial / *Loans with commerc property*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kredit Pegawai / Pensiunan / *Loans of employee or retired*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel/ *Receivable to Micro business, small business and Retail*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan kepada Korporasi / Receivable to the Corporation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

34. Praktek manajeman risiko yang dijalankan (lanjutan)

b. Risiko kredit (lanjutan)

iii. Konsentrasi berdasarkan jenis debitur (lanjutan)

34. Licence management risk in operation (continued)

b. Credit risk (continued)

iii. Concentration by type of debtors (continued)

Kategori Portofolio / *Portfolio category*	Per 31 Desember 2013 / *As of December 31, 2013* Dalam jutaan Rupiah / *In millions Rupiah*								ATMR	Beban Modal / Capital expenses
	0%	20%-35%	40%-45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya/ *Others*		
C. Eksposur Risiko Kredit Akibat Kegagalan Pihak Lawan (lanjutan) / *Exposure counterparty credit risk (continued)*										
Tagihan yang Telah Jatuh Tempo / *With due dated*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset lainnya / *Other*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksposur di Unit Usaha Syariah / *Exposure at Sharia Units*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah / *Total*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah / Grand *Total*	2,785,691	4,716,282	375,334	8,601,425	1,943,487	811,705	20,157	829,981	8,081,990	646,559

Pengungkapan eksposur di Unit Usaha Syariah / *Exposure disclosure at Sharia Unit in Bank*

Jenis transaksi	31 Desember 2014 / *As of December 31, 2014* Dalam Jutaan Rupiah / *In Millions Rupiah*		*Transaction*
	Faktor pengurang modal / Capital decrease factor	ATMR	
Total eksposur	-	481,377	*Total exposure*

Jenis transaksi	31 Desember 2013 / *As of December 31, 2013* Dalam Jutaan Rupiah / *In Millions Rupiah*		*Transaction*
	Faktor pengurang modal / Capital decrease factor	ATMR	
Total eksposur	-	383,584	*Total exposure*

Pengungkapan total pengukuran risiko (dalam jutaan Rupiah) / *Disclosure of total risk value (in millions rupiah)*

Keterangan	31 Desember 2014 Faktor pengurang modal / Capital decrease factor	*Description*
Jumlah ATMR Risiko Kredit	9,290,464	*Total credit risk ATMR*
Jumlah faktor pengurang modal	-	*Total capital decrease factor*

Keterangan	31 Desember 2013 Faktor pengurang modal / Capital decrease factor	*Description*
Jumlah ATMR Risiko Kredit	8,081,990	*Total credit risk ATMR*
Jumlah faktor pengurang modal	-	*Total capital decrease factor*

34. Praktek manajeman risiko yang dijalankan (lanjutan)

b. Risiko kredit (lanjutan)

34. Licence management risk in operation (continued)

b. Credit risk (continued)

Pengungkapan tagihan bersih berdasarkan kategori portofolio dan skala peringkat - Bank secara individual / *Disclosure of net billing based on portofolio category and rating scale - Individuall Bank.*

Per 31 Desember 2014 / *As of December 31, 2014 :*

Kategori Portofolio / *Portfolio category*	Tagihan Bersih / *Net Billing*				
	Lembaga Pemeringkat/ *Agency*	**Peringkat Jangka Panjang/ *Long-Term rating***			
	Standard and Poor's	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-
	Fitch Rating	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-
	Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3	A1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3
	PT. Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn)	A+ (idn) s.d A- (idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn)
	PT. ICRA Indonesia	[idr]AAA	[idr]AA+ s.d [idr]AA-	[idr] A+ s.d [idr] A-	[idr]BBB+ s.d [idr]BBB-
	PT. Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-	idA+ s.d id A-	id BBB+ s.d id BBB-
Tagihan Pemerintah / *Goverment billed*		-	-	-	-
Tagihan Ke Entitas Sektor Publik / *to Public entity sector*		8,896	20,000	10,090	-
Tagihan Kepada Bank / *Billing to the Bank*		2,934,891	638,751	930,678	25,000
Kredit Beragun Rumah / *Loans with house guarantee*		-	-	-	-
Kredit Beragun Properti Komersial / *Loans with commerc property guarantee*		-	-	-	-
Kredit Pegawai / Pensiunan / *Loans of employee or retired*		-	-	-	-
Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel/ *Receivable to Micro business, small business and Retail*		-	-	-	-
Tagihan kepada Korporasi / Receivable to the Corporation		19,594	-	-	-
Tagihan yang Telah Jatuh Tempo / *With due dated*		-	-	-	-
Aset lainnya / *Other assets*		-	-	-	-
Eksposur di Unit Usaha Syariah / *Exposure at Sharia Units*		-	-	-	-
Jumlah/ *total*		2,963,380	658,751	940,768	25,000

34. Praktek manajeman risiko yang dijalankan (lanjutan)

b. Risiko kredit (lanjutan)

34. Licence management risk in operation (continued)

b. Credit risk (continued)

Per 31 Desember 2014 / *As of December 31, 2014 :*

Kategori Portofolio / *Portfolio category*	Tagihan Bersih / *Net Billing*				
	Lembaga Pemeringkat/ *Agency*		Peringkat Jangka Panjang/ *Long-Term rating*		
	BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	Kurang dari B-	A-1	A-2
	BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	Kurang dari B-	F1+ s.d F1	F2
	Ba1 s.d Ba3	B1 s.d B3	Kurang dari B3	P-1	P-2
	BB+(idn) s.d BB-(idn)	B+(idn) s.d B-(idn)	Kurang dari B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)
	[idr]BB+ s.d [idr]BB-	[idr]B+ s.d [idr]B-	Kurang dari [idr] B-	[idr]A1+ s.d [idr]A1	[idr]A2+ s.d [idr]A2
	id BB+ s.d id BB-	id B+ s.d id B-	Kurang dari idB-	idA1	idA2
Tagihan Pemerintah / *Goverment billed*	-	-	-	-	-
Tagihan Ke Entitas Sektor Publik / *to Public*	-	-	-	-	-
Tagihan Kepada Bank / *Billing to the Bank*	-	-	-	-	-
Kredit Beragun Rumah / *Loans with house guarantee*	-	-	-	-	-
Kredit Beragun Properti Komersial / *Loans with commerc property guarantee*	-	-	-	-	-
Kredit Pegawai / Pensiunan / *Loans of employee or retired*	-	-	-	-	-
Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel/ *Receivable to Micro business, small business and Retail*	-	-	-	-	-
Tagihan kepada Korporasi / Receivable to the Corporation	-	-	-	-	-
Tagihan yang Telah Jatuh Tempo / *With due dated*	-	-	-	-	-
Aset lainnya / *Other assets*	-	-	-	-	-
Eksposur di Unit Usaha Syariah / *Exposure at Sharia Units*	-	-	-	-	-
Jumlah/ *total*	-	-	-	-	-

34. Praktek manajeman risiko yang dijalankan (lanjutan)

b. Risiko kredit (lanjutan)

34. Licence management risk in operation (continued)

b. Credit risk (continued)

Pengungkapan tagihan bersih berdasarkan kategori portofolio dan skala peringkat - Bank secara individual / *Disclosure of net billing based on portofolio category and rating scale - Individuall Bank.*

Per 31 Desember 2014 / *As of December 31, 2014 :*

Kategori Portofolio / *Portfolio category*	Tagihan Bersih / *Net Billing*			
	Peringkat Jangka Pendek/ *Short-Term Rating*		Tanpa Peringkat/ *Non Rating*	Total
	A-3	Kurang dari A-3		
	F3	Kurang dari F3		
	P-3	Kurang dari P-3		
	F3(idn)	Kurang dari F3(idn)		
	[idr]A3+ s.d [idr]A3	Kurang dari [idr]A3		
	idA3 s.d id A4	Kurang dari idA4		
Tagihan Pemerintah / *Goverment billed*	-	-	2,715,091	2,715,091
Tagihan Ke Entitas Sektor Publik / *to Public entity sector*	-	-	109,084	148,070
Tagihan Kepada Bank / *Billing to the Bank*	-	-	1,165,261	5,694,580
Kredit Beragun Rumah / *Loans with house guarantee*	-	-	412,715	412,715
Kredit Beragun Properti Komersial / *Loans with commerc property guarantee*	-	-	8,639	8,639
Kredit Pegawai / Pensiunan / *Loans of employee or retired*	-	-	9,390,106	9,390,106
Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel/ *Receivable to Micro business, small business and Retail*	-	-	2,140,632	2,140,632
Tagihan kepada Korporasi / Receivable to the Corporation	-	-	228,676	248,270
Tagihan yang Telah Jatuh Tempo / *With due dated*	-	-	25,093	25,093
Aset lainnya / *Other assets*	-	-	1,676,892	1,676,892
Eksposur di Unit Usaha Syariah / *Exposure at Sharia Units*	-	-	1,025,985	1,025,985
Jumlah/ *total*	-	-	18,898,174	23,486,072

34. Praktek manajeman risiko yang dijalankan (lanjutan)

b. Risiko kredit (lanjutan)

34. Licence management risk in operation (continued)

b. Credit risk (continued)

Pengungkapan tagihan bersih berdasarkan kategori portofolio dan skala peringkat - Bank secara individual / *Disclosure of net billing based on portofolio category and rating scale - Individuall Bank.*

Per 31 Desember 2013/ *As of December 31, 2013 :*

Kategori Portofolio / *Portfolio category*	Tagihan Bersih / *Net Billing*				
	Lembaga Pemeringkat/ *Agency*	**Peringkat Jangka Panjang/ *Long-Term rating***			
	Standard and Poor's	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-
	Fitch Rating	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-
	Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3	A1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3
	PT. Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn)	A+ (idn) s.d A- (idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn)
	PT. ICRA Indonesia	[idr]AAA	[idr]AA+ s.d [idr]AA-	[idr] A+ s.d [idr] A-	[idr]BBB+ s.d [idr]BBB-
	PT. Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-	idA+ s.d id A-	id BBB+ s.d id BBB-
Tagihan Pemerintah / *Goverment billed*		-	-	-	-
Tagihan Ke Entitas Sektor Publik / *to Public entity sector*		29,142	58,082	-	-
Tagihan Kepada Bank / *Billing to the Bank*		2,610,724	313,793	1,043,254	-
Kredit Beragun Rumah / *Loans with house guarantee*		-	-	-	-
Kredit Beragun Properti Komersial / *Loans with commerc property guarantee*		-	-	-	-
Kredit Pegawai / Pensiunan / *Loans of employee or retired*		-	-	-	-
Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel/ *Receivable to Micro business, small business and Retail*		-	-	-	-
Tagihan kepada Korporasi / *Receivable to the Corporation*		19,303	-	10,178	-
Tagihan yang Telah Jatuh Tempo / *With due dated*		-	-	-	-
Aset lainnya / *Other assets*		-	-	-	-
Eksposur di Unit Usaha Syariah / *Exposure at Sharia Units*		-	-	-	-
Jumlah/ *total*		2,659,169	371,875	1,053,432	-

34. Praktek manajeman risiko yang dijalankan (lanjutan)

b. Risiko kredit (lanjutan)

34. Licence management risk in operation (continued)

b. Credit risk (continued)

Pengungkapan tagihan bersih berdasarkan kategori portofolio dan skala peringkat - Bank secara individual / *Disclosure of net billing based on portofolio category and rating scale - Individuall Bank.*

Per 31 Desember 2013/ *As of December 31, 2013 :*

Kategori Portofolio / *Portfolio category*	Tagihan Bersih / *Net Billing*				
	Lembaga Pemeringkat/ *Agency*		Peringkat Jangka Panjang/ *Long-Term rating*		
	BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	Kurang dari B-	A-1	A-2
	BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	Kurang dari B-	F1+ s.d F1	F2
	Ba1 s.d Ba3	B1 s.d B3	Kurang dari B3	P-1	P-2
	BB+(idn) s.d BB-(idn)	B+(idn) s.d B-(idn)	Kurang dari B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)
	[idr]BB+ s.d [idr]BB-	[idr]B+ s.d [idr]B-	Kurang dari [idr] B-	[idr]A1+ s.d [idr]A1	[idr]A2+ s.d [idr]A2
	id BB+ s.d id BB-	id B+ s.d id B-	Kurang dari idB-	idA1	idA2
Tagihan Pemerintah / *Goverment billed*	-	-	-	-	-
Tagihan Ke Entitas Sektor Publik / *to Public entity sector*	-	-	-	-	-
Tagihan Kepada Bank / *Billing to the Bank*	-	-	-	-	-
Kredit Beragun Rumah / *Loans with house guarantee*	-	-	-	-	-
Kredit Beragun Properti Komersial / *Loans with commerc property*	-	-	-	-	-
Kredit Pegawai / Pensiunan / *Loans of employee or retired*	-	-	-	-	-
Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel/ *Receivable to Micro business, small business and Retail*	-	-	-	-	-
Tagihan kepada Korporasi / *Receivable to the Corporation*	-	-	-	-	-
Tagihan yang Telah Jatuh Tempo / *With due dated*	-	-	-	-	-
Aset lainnya / *Other assets*	-	-	-	-	-
Eksposur di Unit Usaha Syariah / *Exposure at Sharia Units*	-	-	-	-	-
Jumlah/ *total*	-	-	-	-	-

34. Praktek manajeman risiko yang dijalankan (lanjutan)

b. Risiko kredit (lanjutan)

Pengungkapan tagihan bersih berdasarkan kategori portofolio dan skala peringkat - Bank secara individual / *Disclosure of net billing based on portofolio category and rating scale - Individuall Bank.*

Per 31 Desember 2013/ *As of December 31, 2013 :*

Kategori Portofolio / *Portfolio category*	Tagihan Bersih / *Net Billing*			
	Peringkat Jangka Pendek/ *Short-Term Rating*		Tanpa Peringkat/ *Non Rating*	Total
	A-3 F3 P-3 F3(idn) [idr]A3+ s.d [idr]A3 idA3 s.d id A4	Kurang dari A-3 Kurang dari F3 Kurang dari P-3 Kurang dari F3(idn) Kurang dari [idr]A3 Kurang dari idA4		
Tagihan Pemerintah / *Goverment billed*	-	-	2,104,077	2,104,077
Tagihan Ke Entitas Sektor Publik / *to Public entity sector*	-	-	88,089	175,313
Tagihan Kepada Bank / *Billing to the Bank*	-	-	613,745	4,581,516
Kredit Beragun Rumah / *Loans with house guarantee*	-	-	403,551	403,551
Kredit Beragun Properti Komersial / *Loans with commerc property guarantee*	-	-	44,175	44,175
Kredit Pegawai / Pensiunan / *Loans of employee or retired*	-	-	403,551	403,551
Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel/ *Receivable to Micro business, small business and Retail*	-	-	1,863,754	1,863,754
Tagihan kepada Korporasi / *Receivable*	-	-	67,141	96,622
Tagihan yang Telah Jatuh Tempo / *With due dated*	-	-	17,997	17,997
Aset lainnya / *Other assets*	-	-	-	-
Eksposur di Unit Usaha Syariah / *Exposure at Sharia Units*	-	-	829,981	829,981
Jumlah/ *total*	-	-	6,436,060	10,520,535

c. Risiko Pasar

Risiko pasar merupakan risiko yang timbul karena adanya pergerakan faktor pasar dari portofolio yang dimiliki oleh Bank, yang dapat merugikan Bank (adverse movement). Yang dimaksud dengan faktor pasar adalah suku bunga dan nilai tukar, termasuk derivatif dari kedua jenis risiko pasar tersebut misalnya perubahan harga opsi.

Risiko pasar ada di aktivitas fungsional Bank dan kegiatan tresuri. Aktivitas ini mencakup penempatan dalam bentuk surat berharga

34. Licence management risk in operation (continued)

b. Credit risk (continued)

c. Market risk

Market risk is the risk arising from adverse movement in market variables in portfolios held by the Bank that could incur losses for the Bank (adverse movement). Market variables are defined as interest rates and exchange rates, including derivatives of these two types of market risk, i.e., change in option prices.

Market risk exists in both bankwide and treasury activities. These activities include placement in securities and money

dan pasar uang maupun penyertaan pada lembaga keuangan lainnya, penyediaan dana (pinjaman dan bentuk sejenis lainnya) dan kegiatan pendanaan dan penerbitan surat utang, serta kegiatan pembiayaan perdagangan.

market, equity participation in other financial institutions, provisions of funds (loans and other similar forms), funding and issuance of debt instruments, and trade financing activities.

34. Praktek manajeman risiko yang dijalankan (lanjutan)

34. Licence management risk in operation (continued)

c. Risiko Pasar (lanjutan)

c. Market risk (continued)

Tujuan dari manajemen risiko pasar adalah untuk mengelola dan melakukan kontrol atas eksposur risiko pasar dalam parameter yang dapat diterima, serta memaksimalkan tingkat pengembalian atas risiko.

The objective of market risk management is to manage and control market risk exposures within acceptable parameters, while optimizing the return on risk.

Risiko pasar dikelola melalui kebijakan yang komprehensif dan kerangka limit untuk mengukur dan memonitor nilai risiko berdasarkan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) oleh Bank. Limit dari risiko pasar ditetapkan pada tingkat bank-wide dan dilaporkan serta dipantau oleh Divisi kepatuhan dan manajemen Risiko setiap hari. Management Action Triggers (MAT) membantu manajemen pada saat tingkat risiko mencapai batasan-batasan tertentu.

Market risk is managed through a comprehensive policy and limit framework to measure and monitor the amount of risk based on risk appetite of the Bank. Market risk limits are set at bankwide level and are reported and monitored by Compliance and Risk Management on a daily basis. Management Action Triggers (MAT) helps to sensitize the management in case the risk level is reaches certain thresholds.

ALCO berperan sebagai forum manajemen senior tertinggi untuk mengambil keputusan atas kebijakan yang berkaitan dengan manajemen risiko pasar dan likuiditas. Divisi Market and Liquidity Risks bertanggungjawab untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko pasar di Bank berdasarkan kerangka yang disetujui oleh ALCO.

ALCO acts as the apex senior management forum charged to take all decisions on policy regarding market and liquidity risk management. Market Risk is responsible for identifying, measuring, monitoring and controlling market risk in the Bank based on framework approved by ALCO.

Secara keseluruhan, risiko pasar dibagi menjadi dua bagian sebagai berikut:

On overall, market risk is divided into two following risks:

i. Risiko nilai tukar

i. Value exchange risk

Merupakan penjumlahan dari nilai absolute dari selisih bersih aset dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing ditambah dengan selisih bersih tagihan dan Liabilitas baik yang merupakan komitmen maupun kontijensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing yang semuanya dinyatakan dalam rupiah.

It is the total amount of the absolute value from the net difference of assets and liabilities in the balance sheet for every foreign exchange plus the net difference of receivables and payables both as commitments as well as contingencies in administrative account for every foreign exchange all of which are stated in rupiah.

Bank wajib mengelola dan memelihara PDN paling tinggi 20% dari modal setiap 30 (tiga puluh) menit sejak sistem treasury bank dibuka sampai dengan sistem treasury bank ditutup sesuai dengan PBI No.12/10/PBI/2010 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/13/PBI/2003 Tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum.

The bank is obliged to manage and maintain PDN at the highest 20% of the capital for every 30 (thirty) minutes since the bank treasury system is opened until the bank treasury system is closed in accordance with PBI No. 12/10/PBI/2010 concerning the Third Change on Indonesia's Bank Regulation Number 5/13/PBI/2003 Concerning Public Bank Net Foreign Exchange Position.

Bank harus menetapkan limit internal Net Open Position (NOP) secara konsisten dalam rangka mencegah terjadinya pelampauan batasan yang ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku terutama dalam hal seluruh limit internal yang ditetapkan dan telah digunakan.

The bank must decide on the limit internal Net Open Position (NOP) consistently in the framework of preventing the occurrence of exceeding the limit decided upon by the prevailing regulations, especially in the case of all internal limits decided and already used.

Perhitungan rasio Posisi Devisa Netto PT Bank Riau Kepri dapat disajikan sebagai berikut :

Calculated for Position Nett Deivizen Ratio at PT Bank Riau Keppri prepared as follow :

	31 Desember 2014	31 Desember 2013	
• Aset Valuta Asing			*Foreign exchange asset*
Mata uang Euro			*Euro Currency*
Kas	87,083,630	78,517,367	*Cash*
Giro pada Bank lain	427,742,446	895,300,775	*Current account with other Bank*
	514,826,075	**973,818,143**	

34. Praktek manajeman risiko yang dijalankan (lanjutan)

c. Risiko Pasar (lanjutan)

i. Risiko nilai tukar (lanjutan)

34. Licence management risk in operation (continued)

c. Market risk (continued)

i. Value exchange risk (continued)

	31 Desember 2014	31 Desember 2013	
Mata uang Dolar Amerika			*United State Dollar Currency*
Kas	9,700,486,229	6,103,108,960	*Cash*
Giro Bank Indonesia	24,831,925,000	11,013,850,000	*Current account with Bank Indonesia*
Giro pada Bank lain	11,091,952,992	27,107,873,119	*Current account with other Bank*
Deposito pada Bank lain	49,540,000,000	97,360,000,000	*Deposit to other Bank*
Pendapatan bunga yang akan diterima pada Bank lain	143,110,657	140,626,297	*Interest income accrual with other Bank*
Jumlah	95,307,474,878	141,725,458,376	*Total*
Mata uang Dolar Singapura			*Singapore Currency*
Kas	3,737,324,675	2,945,828,658	*Cash*
Giro pada Bank lain	6,910,910,801	5,884,300,178	*Current account with other Bank*
Jumlah	**10,648,235,476**	**8,830,128,836**	*Total*
• Liabilitas valuta Asing			*Foreign exchange liabilities*
Mata uang Dolar Amerika			*United State Dollar Currency*
Giro	11,314,964,609	69,410,384,450	*Current account*
Deposito	2,397,909,390	2,348,517,920	*Deposit*
Surat berharga lainnya	-	36,510,000,000	*SBL-Interbank Call Money*
KU Yakim TT	-	-	*KU Yakim TT*
Bunga deposito masih harus dibayar	941,012	766,832	*Accrued deposit interest*
Jumlah	**13,713,815,012**	**108,269,669,202**	*Total*
Mata uang Dolar Singapura			*Singapore Currency*
Giro perseorangan dan Perusahaan	1,995,117,090	1,677,675,559	*Individual current account*
Deposito perorangan	1,574,984,268	2,079,928,057	*Individual deposit*
Liabilitas (Bunga Dep YMH)	685,681	579,827	*Liabilities (Accrued Deposit Interest)*
KU Yakim	-	-	*KU Yakim*
Jumlah	**3,570,787,038**	**3,758,183,443**	*Total*
• Posisi Devisa Netto (PDN)			*Netto of Devisa Position*
Mata uang Euro	514,826,075	973,818,143	*Euro Currency*
Mata uang Dolar Amerika	81,593,659,866	33,455,789,174	*United State Dollar Currency*
Mata uang Dolar Singapura	7,077,448,438	5,071,945,393	*Singapore Currency*
Jumlah PDN	**89,185,934,379**	**39,501,552,710**	*Total PDN*
Jumlah PDN (dalam jutaan Rupiah)	**89,186**	**39,502**	*Total PDN (in millions Rupiah)*
Jumlah Modal (dalam jutaan Rupiah)	**2,116,617**	**1,897,690**	*Total Capital (in millions Rupiah)*
Rasio % PDN	**4.21%**	**2.08%**	*NDP ratio (%)*

ii. Risiko tingkat suku bunga

Risiko suku bunga adalah potensi kerugian yang timbul akibat pergerakan suku bunga di pasar yang berlawanan dengan posisi atau transaksi Bank yang mengandung risiko suku bunga.

Bank belum mengelola risiko suku bunga, sehingga Bank belum melakukan perhitungan atas risiko tingkat suku bunga Bank.

Tabel di bawah ini menyajikan portofolio Bank (tidak termasuk portofolio yang diperdagangkan) pada nilai tercatatnya, yang dikelompokkan menurut mana yang lebih awal antara tanggal re-pricing atau tanggal jatuh tempo kontraktual (disajikan dalam jutaan rupiah):

ii. Interest rate risk

Interest rate risk is the potential loss incurred from adverse movement in market interest rates with respect to a Bank position or transaction carrying interest rate risk.

The Bank was not to carry out interest rate risk, with the result that Bank have not did calculated to Bank interest rate risk.

The table below summarizes the Bank's nontrading portfolios at carrying amounts, categorized by the earlier of contractual re-pricing or maturity dates (expressed in million rupiah):

36. Praktek manajeman risiko yang dijalankan (lanjutan)

c. Risiko Pasar (lanjutan)

ii. Risiko tingkat suku bunga (lanjutan)

34. Licence management risk in operation (continued)

c. Market risk (continued)

ii. Interest rate risk (continued)

Akun/ *Account*	Per 31 Desember 2014 / *As of December 31, 2014*				
	Nilai tercatat (dalam jutaan Rupiah / *in million Rp) / Carrying amount*	Suku bunga tetap/ *Fixed interest rate (dalam jutaan rupiah / in million rupiah)*			
		< dari 3 bulan/ *Less then 3 months*	3 - 12 bulan/ *Months*	12 - 24 bulan/ *Months*	> dari 24 bulan/ *More then 24 months*
Aset/ *Assets*					
Giro pada Bank Indonesia / *Current accounts in Bank Indonesia*	1,289,270	1,289,270	-	-	-
Giro pada Bank Lain / *Current accounts in other Bank*	69,643	69,643	-	-	-
Penempatan pada Bank lain / *Placement in other Bank*	5,873,426	5,872,079	1,347	-	-
Surat-surat berharga/ *Marketable securities*	1,419,899	-	1,419,899	-	-
Kredit yang diberikan/ *Loans*	12,764,751	-	640,416	536,792	11,978,965
Penyertaan/ *Invesment*	500	-	-	-	500
Aset lain-lain/ *Other Assets*	228,659	-	228,659	-	-
Jumlah/ *Total*	21,646,149	7,230,992	2,290,321	536,792	11,979,465
Liabilitas/ *Liabilities*					
Simpanan nasabah/ *Deposit from costumer*	-	(3,781,165)	(1,724,578)	(5,185)	(11,416,362)
Simpanan dari bank lain/ *Deposit from others Banks*	(1,810,746)	(88,050)	(3,000)	(1,719,696)	-
Obligasi yang diterbitkan/ *Bond issued*	(499,894)	-	-	-	(499,894)
Pinjaman yang diterima/ *Borrowings*	(311,373)	(311,373)	-	-	-
Jumlah/ *Total*	(2,622,014)	(4,180,588)	(1,727,578)	(1,724,882)	(11,916,256)
Pengaruh dari derivatif untuk manajemen Risiko/ *Effect of derrivatives held for risk management*	-	-	-	-	-
Selisih/ *Difference*	19,024,135	3,050,404	562,743	(1,188,090)	63,209

Akun/ *Account*	31 Desember 2013 / *December 31, 2013*				
	Nilai tercatat (dalam jutaan Rupiah / *in million Rp) / Carrying amount*	Suku bunga tetap/ *Fixed interest rate (dalam jutaan rupiah / in million rupiah)*			
		< dari 3 bulan/ *Less then 3 months*	3 - 12 bulan/ Months	12 - 24 bulan/ Months	> dari 24 bulan/ *More then 24 months*
Aset/ *Assets*					
Giro pada Bank Indonesia/ *Current accounts in Bank Indonesia*	1,214,021	1,214,021	-	-	-
Giro pada Bank Lain/*Current accounts in other Bank*	98,471	98,471	-	-	-
Penempatan pada Bank lain/ *Placement in other Bank*	4,637,668	4,636,360	1,308	-	-
Surat-surat berharga/ *Marketable securities*	1,033,223	-	1,033,223	-	-
Kredit yang diberikan/ *Loans*	11,951,592	-	669,013	447,807	10,834,772
Penyertaan/ *Invesment*	500	-	-	-	500
Aset lain-lain/ *Other Assets*	165,513	-	165,513	-	-
Jumlah/ *Total*	19,100,989	5,948,852	1,869,057	447,807	10,835,272
Liabilitas/ *Liabilities*					
Simpanan nasabah/ *Deposit from costumer*	(13,642,708)	(1,398,547)	(514,468)	(1,601)	(11,728,092)
Simpanan dari bank lain/ *Deposit from others Banks*	(1,856,698)	(4,100)	-	(1,852,598)	-
Obligasi yang diterbitkan/ *Bond issued*	(499,785)	-	-	-	(499,785)
Pinjaman yang diterima/ *Borrowings*	(4,296)	(4,296)	-	-	-

Jumlah/ *Total*	(16,003,487)	(1,406,943)	(514,468)	(1,854,199)	(12,227,877)
Pengaruh dari derivatif untuk manajemen Risiko/ *Effect of derrivatives held for risk management*	-	-	-	-	-
Selisih/ *Difference*	3,097,502	4,541,909	1,354,590	(1,406,392)	(1,392,605)

34. Praktek manajeman risiko yang dijalankan (lanjutan)

c. Risiko Pasar (lanjutan)

Dalam hal pelaksanaan dan pengendalian risiko pasar, bank telah menyelesaikan beberapa tahap sebagai berikut:

- Melakukan identifikasi suku bunga secara tepat pada setiap penggunaan dana bank baik aktivitas fungsional tertentu maupun aktivitas bank secara keseluruhan.

ii. Risiko tingkat suku bunga (lanjutan)

- Melakukan mark to market.
- Setiap penempatan terhadap bank counterparty dilakukan kajian risiko oleh Divisi Manajemen Risiko terhadap fasilitas credit line yang akan diberikan.
- Pengawasan aktif Komisaris dan Direksi serta setiap transaksi yang dilakukan sesuai dengan instruksi dan rekomendasi Komite Aset dan Liabilitas (ALCO).

34. Licence management risk in operation (continued)

c. Market risk (continued)

In the frame of implementation and controlling market risk, Bank has done several step is as follows :

- *Performing the interest rate identification accurately in every use of bank finance both for certain functional activities as well as bank activities as a whole.*

ii. Interest rate risk (continued)

- *Performing mark to market.*
- *Every allocation on bank counterparty is done by risk evaluation by the Risk Management Division to the credit line facilities given.*
- *Active supervision on the active Board of Commissioners and Directors and every transaction is done in accordance with the instructions and recommendations by the Asset and Liability Committee (ALCO).*

Dalam Jutaan Rupiah / In Millions Rupiah

Jenis Risiko / *Risk Type*	31 Desember 2014	
	Bank	
	Beban modal / Capital expenses	ATMR
Risiko suku bunga spesifik / *Specifik interest risk*	-	-
Risiko suku bunga umum / *General interest risk*	-	-
Risiko nilai tukar / *Value exchange risk*	7,135	89,186
Risiko ekuitas / *Equity risk*	-	-
Risiko komoditas / *Commodity risk*	-	-
Risiko pilihan / *Option risk*	-	-
Jumlah / *Total*	7,135	89,186

Dalam Jutaan Rupiah / In Millions Rupiah

Jenis Risiko / *Risk Type*	31 Desember 2013	
	Bank	
	Beban modal / Capital expenses	ATMR
Risiko suku bunga spesifik / *Specifik interest risk*	-	-
Risiko suku bunga umum / *General interest risk*	2,255	28,192
Risiko nilai tukar / *Value exchange risk*	3,160	39,502
Risiko ekuitas / *Equity risk*	-	-
Risiko komoditas / *Commodity risk*	-	-
Risiko pilihan / *Option risk*	-	-
Jumlah / *Total*	5,415	67,694

d. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko yang disebabkan oleh ketidak mampuan Bank dalam memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo dan menutup posisi di pasar. Risiko likuiditas merupakan risiko yang terpenting pada bank umum dan perlu dikelola secara berkesinambungan.

Asset and Liability Committee (ALCO) berperan sebagai forum manajemen senior tertinggi untuk memonitor situasi likuiditas Bank. ALCO bertanggungjawab untuk menentukan kebijakan dan

d. Liquidity risk

Liquidity risk is the risk that the Bank is unable to meet its obligation associated with financial liabilities at due date. Liquidity risk is the most important risk to a commercial bank and as such needs to be managed on an on-going basis.

The Asset and Liability Committee (ALCO), which acts as the apex body entrusted to monitor liquidity situation of the Bank. ALCO is in charge of determining the policy and strategy of the

strategi yang berkaitan dengan aset dan liabilitas Bank sejalan dengan prinsip kehati-hatian manajemen risiko dan peraturan yang berlaku.

Bank's asset and liabilities in line with the principles of prudent risk management and applicable regulatory requirements.

34. Praktek manajeman risiko yang dijalankan (lanjutan)

d. Risiko likuiditas (lanjutan)

ALCO menyetujui kerangka limit, mempertimbangkan struktur laporan posisi keuangan jangka panjang dari Bank. ALCO juga menyetujui asumsi likuiditas dan skenario stress testing yang akan diterapkan.

Bank mengelola risiko likuiditas melalui analisis perbedaan jatuh tempo likuiditas dan rasio-rasio likuiditas. Risiko likuiditas diukur dan dipantau secara harian berdasarkan kerangka kerja limit risiko likuiditas. Kerangka kerja digunakan untuk mengelola situasi likuiditas Bank pada kondisi normal (business-as-usual) dan kejadian kondisi stress. Rencana pendanaan darurat likuiditas (liquidity contingency plan) telah disusun untuk mempersiapkan Bank jika terjadi krisis likuiditas.

Eksposur terhadap Risiko Likuiditas

Analisis kesenjangan likuiditas untuk memberikan pandangan terhadap ketidaksesuaian arus kas masuk terkait dengan arus kas keluar di setiap saat. Kondisi ini dikelola secara terpusat oleh Tresuri yang mempunyai akses dan otorisasi secara langsung ke interbank, nasabah besar (institusional) dan professional market yang lainnya, dalam upaya membantu aktivitas bisnis Bank di pengumpulan dana dan pemberian kredit.

Salah satu rasio likuiditas adalah rasio dari aset likuid bersih terhadap liabilitas 1 bulan. Untuk tujuan ini, aset yang bersifat likuid termasuk kas dan setara kas dan efek-efek berperingkat investasi, yang diperdagangkan secara aktif dan likuid di pasar dikurangi dengan simpanan dari bank dan komitmen yang jatuh tempo dalam satu bulan mendatang.

Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013, rasio dari aset likuid bersih terhadap simpanan nasabah adalah

	31 Desember 2014	31 Desember 2013	
Kas dan setara kas	8,008,303,534,006	6,523,230,422,016	Cash and cash equivalent
Surat berharga yang diperdagangkan	-	-	Marketable securities available to sell
Surat berharga yang dimiliki hingga jatuh tempo	1,419,899,202,009	1,033,223,476,123	Marketable securities available for held-to-maturity
Simpanan dari Bank lain	(1,810,746,496,492)	(1,856,697,906,633)	Deposit from other Banks
Jumlah aset liquid bersih	**7,617,456,239,523**	**5,699,755,991,506**	Total net liquid assets
Simpanan dari nasabah	**16,927,290,915,871**	**13,642,707,852,322**	Deposit from costumer
Rasio aset likuid bersih terhadap simpanan dari nasabah	**45%**	**42%**	Ratio of net liquid assets to deposit from costumers

Sisa jatuh tempo kontraktual dari liabilitas keuangan

Kebijakan likuiditas Bank ditujukan untuk memastikan bahwa kebutuhan dana dapat dipenuhi, baik untuk membayar deposito pada saat jatuh tempo atau untuk kewajiban penarikan nasabah atau untuk memenuhi fasilitas kredit yang belum digunakan.

Pengelolaan dan pemantauan posisi likuiditas Bank berada dalam tanggung jawab Bagian Asset and Liabilities Management di

34. Licence management risk in operation (continued)

d. Liquidity risk (continued)

ALCO approves the limit framework, deliberates on thelong-term structural statement of financial position positioning of the Bank. In addition, ALCO approves all liquidity assumption and stress testing scenarios.

The Bank manages liquidity risk through liquidity gap analysis and liquidity ratios. Liquidity risk is measured and monitored on a daily basis based on liquidity risk limit framework. The framework manages the liquidity situation of the Bank under both a business-as-usual and stress event. Liquidity contingency plan is in place to prepare the Bank in the case of a liquidity crisis.

Exposure to Liquidity risk

Liquidity gap analysis provides insight as to the mismatch of expected cash inflows vis-à-vis outflows on any given day. This is centrally managed within Treasury which has direct and authorized access to interbank, wholesale, and other professional markets, to supplement core banking activities of lending and deposit taking.

One of liquidity ratios is net liquid assets to 1 month liabilities. For this purpose, net liquid assets are considered as including cash and cash equivalents and investment grade debt securities for which there is an active and liquid market less any deposits from banks and commitments maturing within next month.

As at December 31, 2014 and December 31, 2013, the ratio of net liquid assets to deposits from customers were as follows:

Residual contractual maturities of financial liabilities

Bank's liquidity policy is purposed to ensure that funding requirements can be met, either to pay customer withdrawals or unused loan facilities.

Managing and monitoring the Bank's liquidity position is the responsibility for Asset and Liabilities Management Group in

Divisi Treasury. Sumber dana dan waktu jatuh tempo deposito dikelola untuk menghindari adanya dana yang idle dan menentukan jumlah serta instrumen aset likuid yang tepat untuk menjamin tingkat likuiditas yang terkendali secara terus menerus.

Division of Treasury. Sources of funds and maturity of time deposits maturing managed to prevent idle funds and determine the appropriate amount of liquid assets instrument to ensure a controlled level of liquidity continuously.

34. Praktek manajeman risiko yang dijalankan (lanjutan)

d. Risiko likuiditas (lanjutan)

Nilai nominal arus masuk/arus keluar yang disajikan pada tabel di bawah ini merupakan arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan terkait dengan pokok dan bunga atas liabilitas keuangan. Pengungkapan instrumen derivatif menunjukkan nilai bersih derivatif yang dapat diselesaikan secara neto, juga arus masuk dan keluar bruto untuk derivatif yang diselesaikan secara bersamaan (misalnya, kontrak berjangka valuta asing).

Bank telah membangun model pengukuran risiko likuiditas untuk mengukur risiko likuiditas dari portofolio aset dan kewajiban Bank, dan memberikan jaminan keamanan tambahan berdasarkan skenario terbaik (best case), terburuk (worst case) dan paling mungkin terjadi (most probable case).

Dalam hal pelaksanaan dan pengendalian risiko likuiditas, Bank telah menerapkan beberapa langkah berikut:

- Menganalisa perilaku portofolio asset dan portofolio liability/ Liabilitas.
- Memenuhi ketentuan otoritas moneter seperti pemeliharaan GWM Primer maupun GWM Sekunder baik dalam rupiah maupun valuta asing.
- Pengawasan aktif dari Komisaris dan Direksi.
- Memiliki rencana pendanaan darurat (contingency funding plan).
- Monitoring Likuiditas yang dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko setiap bulannya dari laporan keuangan, sehingga dapat diambil langkah-langkah mitigasi risiko likuiditas.

e. Risiko operasional

Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh kurang memadainya atau kegagalan dari proses internal, faktor manusia dan sistem atau dari kejadian-kejadian eksternal.

Risiko ini melekat dalam semua proses bisnis, kegiatan operasional, sistem dan produk Bank, dari mulai Kantor Pusat sampai cabang kecil di seluruh Indonesia. Kegagalan mengelola risiko operasional dapat menyebabkan kerugian financial, keselamatan karyawan dan reputasi Bank.

Komponen utama Kerangka Kerja Pengelolaan Risiko Operasional yang dijalankan berkesinambungan yaitu:

1. Akuntabilitas yang jelas

   Semua pihak di Bank menjalankan penugasan terkait dengan perannya masing-masing dalam pengelolaan risiko

   Direksi seperti halnya Dewan Komisaris bertanggung-jawab untuk mengawasi efektivitas dari kerangka-kerja pengelolaan Risiko operasional secara menyeluruh serta pelaksanaannya.

34. Licence management risk in operation (continued)

d. Liquidity risk (continued)

The nominal inflow/outflow disclosed in the following table represents the contractual undiscounted cash flows relating to the principal and interest on the financial liability or commitment. The disclosure for derivatives shows a net amount for derivatives that are net settled, but a gross inflow and outflow amount for derivatives that have simultaneous gross settlement (e.g. currency forward).

The Bank has developed a liquidity risk measurement model to measure the liquidity risk of the Bank's assets and liabilities portfolio, and to provide additional security guarantees based on best case, worst case and most probable case scenarios.

In the frame of liquidity risk control applied, Bank was doing several steps is as follows :

- *To analyzed behaviour of asset and liabilities portfolio.*
- *To considerate regulation of monetery otority likes Primery and secondary of statutory reserve maintenance in Rupiah or foreign exchange.*
- *Surveillance on active Board of Commissioners and*
- *By having contingencies funding plan*
- *Liquidity monitoring by Risk mangement division for monthly from financial report, and then can take procedure of mitigate the liquidity risk.*

e. Operational risk

Operational risk is defined as the risk of losses resulting from inadequate or failure of internal control processes, people and systems or from external events.

This type of risk is inherent in every business processes, operational activities, systems and products of Bank, from Head Office Units to micro branches located in remote areas of Indonesia. Failure to manage operational risks correctly could lead to financial losses, employee safety and reputation of the Bank.

Major components of Operational Risk Management Framework which are being consistently practiced are:

1. *The right accountability*

   All parties in the Bank are designated for their respective roles in the management of operational risk.

   The Board of Directors of Danamon as well as the Board of Commissioners are responsible to oversee the effectiveness of the overall operational risk management framework as well as its execution.

34. Praktek manajeman risiko yang dijalankan (lanjutan)

e. Risiko operasional (lanjutan)

1. Akuntabilitas yang jelas (lanjutan)

Unit bisnis dan fungsi support sebagai pemilik dari proses pengelolaan risiko dan fungsi Pengendalian Internal yang ada pada setiap Risk Taking Unit (RTU) berperan sebagai lini pertahanan lapis pertama dalam penegakan pengelolaan risiko operasional sehari-hari. Mereka bertanggungjawab dalam mengidentifikasi, mengelola, memitigasi dan melaporkan Risiko Operasional.

Divisi Manajemen Risiko bersama-sama dengan Divisi Kepatuhan dan Hukum berperan sebagai pertahanan lapis kedua.

Divisi Manajemen Risiko berfungsi dalam perancangan, pendefinisian, pengembangan dan pemeliharaan kerangka kerja risiko operasional secara keseluruhan, memantau penerapan kerangka kerja oleh RTU, memastikan kecukupan kontrol atas kebijakan dan prosedur, serta berperan sebagai koordinator/fasilitator atas aktivitas pengelolaan risiko operasional yang efektif.

Sedangkan Satuan Kerja Auditor Internal (SKAI) secara independen berperan sebagai pertahanan lapis ketiga.

2. Siklus pengelolaan Risiko Operasional

Dalam rangka menerapkan manajemen risiko operasional, Bank mengacu kepada kerangka Basel Accord II, Ketentuan Bank Indonesia serta International Best Practices. Pengelolaan risiko operasional meliputi proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko operasional.

Disamping melakukan proses manajemen risiko terhadap risiko yang melekat dalam aktivitas existing, Bank juga melakukan penerapan manajemen risiko secara menyeluruh atas rencana penerbitan produk dan aktivitas baru sesuai dengan jenis risiko yang telah ditetapkan dalam PBI No: 5/8/PBI/2003 beserta perubahannya melalui PBI No; 11/25/PBI/2009 tentang penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan SE BI No. 11/35/DPNP tanggal 31 Desember 2009 perihal Pelaporan Produk dan Aktivitas Baru.

Bank telah mengalokasikan kebutuhan modal risiko operasional berdasarkan Basel Committee on Banking Supevision dan SE BI No. 11/13/DPNP tanggal 27 Januari 2009 perihal Perhitungan Aser Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Risiko Operasional dengan menggunakan Pendekatan Indikator Dasar (PID).

Bank menggunakan pendekatan Basic Indicator dan saat ini masih melakukan pengembangan terhadap perhitungan penyisihan modal dengan metode Standardized Approach serta pengumpulan data risiko yang digunakan dalam perhitungan beban modal Risiko Operasional dengan menggunakan pendekatan yang lebih kompleks (Advanced Measurement Approach).

34. Licence management risk in operation (continued)

e. Operational risk (continued)

1. *The right accountability (continued)*

Business unit and supporting unit as the owner of risk management process and Internal Control functions in each Risk Taking Units act as the first line of defence in day-today execution / implementation of operational risk management. They are responsible to identify, manage, mitigate and reports on Operational Risk.

Risk Management Division together with Compliance and Legal Division act as the second line of defence.

Risk Management Division function to design, interpret, develop and maintaining the overall operational risk management framework, monitor the RTU's adherence to the framework, ensuring the control adequacy of policies and procedures, and act as the coordinator/facilitator of the overall operational risk management activities to ensure its effectiveness.

Meanwhile, the Work of Internal Auditors Unit (SKAI) are independently doing the role as the third line of defence

2. *Operational Risk Management Cycle*

In order to implement operational risk management, Bank made reference to Basel Accord II, Bank Indonesia Regulations and International Best Practices. Operational risk management encompasses the identification, measurement, monitoring and operational control processes.

In addition take risk management process against the risks inherent in the existing activity. Bank also take a risk management implementation comprehensively of new products and activities issuing plan in accordance with the type of risk that has beeb established in PBI: 5/8/PBI/2003 its amandement through PBI: 11/25/PBI2009 on the Application of Risk Management for Bank anad Bank SE no. 11/35/DPBP dated December 31,2009, concerning Products and Activities Report.

Bank has been allocating operational risk capital requirements under Basel Committee on Banking Supervision and Bank No. SE. 11/13/DPNP dated Januari 27, 2009 regarding the calculation of Risk Weighted Assets (RWA) Operational risk by Using the Basic indicator Approach (BIA).

Bank, using Basic Indicator approach and methodology, is currently doing a development of the capital allowance calculation by method of Standardize Approach and the collection of risk data collection risk capital charges using a more complex approach (Advanced Measurement Approach).

Pendekatan yang digunakan	Dalam Jutaan Rupiah / *In Millions Rupiah*		
	Pendapatan bruto	Beban modal / Capital expenses	ATMR
Pendekatan indicator dasar / *Basic indicator approach*	1,175,938	176,391	2,204,885

34. Praktek manajeman risiko yang dijalankan (lanjutan)

e. Risiko operasional (lanjutan)

34. Licence management risk in operation (continued)

e. Operational risk (continued)

Pendekatan yang digunakan	31 Desember 2013		
	Dalam Jutaan Rupiah / *In Millions Rupiah*		
	Pendapatan bruto	Beban modal / Capital expenses	ATMR
Pendekatan indicator dasar / *Basic indicator approach*	1,072,406	160,861	2,010,761

Dalam hal pelaksanaan dan pengendalian risiko operasional, Bank telah menerapkan langkah berikut :

2. Siklus pengelolaan Risiko Operasional (lanjutan)

- Pengukuran risiko operasional dengan menggunakan Pendekatan Indikator Dasar sesuai dengan PBI 10/15/PBI/2008 tentang Liabilitas Penyediaan Modal Minimum dan SE BI No. 11/3/DPNP/2009 tentang Perhitungan ATMR Untuk Risiko Operasional Dengan Menggunakan Pendekatan Indikator Dasar (PID).
- Pengawasan aktif Komisaris dan Direksi.
- Memiliki kebijakan, prosedur dan proses untuk mengendalikan atau memitigasi risiko operasional sesuai dengan kompleksitas operasional bank.
- Adanya tindak lanjut atas hasil temuan Audit Intern dan Ekstern.

In the frame of applied and controlling operational risk, Bank was doing several steps is as follows :

2. *Operational Risk Management Cycle (continued)*

- *The measurement of operational risk uses Basic Indicator Approach in accordance with PBI 10/15/PBI/2008 on the Obligations of Minimum Capital Procurement and SE BI No. 11/3/DPNP/2009 on ATMR Calculation For Operational Risk Using Basic Indicator Approach (PID)*
- *Surveillance on active Board of Commissioners and*
- *By having the policies, procedures and process to control or mitigate the operational risks in accordance with the complexity of the bank operation.*
- *The existence of follow-ups on the results of Intern and Extern Audit findings.*

Pengungkapan profil maturitas Rupiah / *Rupiah profile maturity disclosure*

Akun perkiraan / *Accounting chart*	Saldo / Balanced	31 Desember 2014					
		Dalam Jutaan Rupiah / *In Millions Rupiah*					
		< 1 bulan / < 1 month	> 1-3 bulan / > 1-3 month	> 3-6 bulan / > 3-6 month	> 6-12 bulan / > 6-12 month	> 12 bulan / > 12 month	
Neraca / *Balance sheet*							
A. Aset / *Assets*							
1. Kas / *Cash*	752,709	752,709	-	-	-	-	
2. Penempatan pada Bank Indonesia / *Placement with Bank Indonesia*	2,622,098	1,397,329	344,678	880,091	-	-	
3. Penempatan pada Bank lain / *Placement with other Bank*	5,558,220	5,357,620	200,600	-	-	-	
4. Surat Berharga / *Marketable securities*	195,130	-	-	-	5,818	189,312	
5. Kredit yang diberikan / *Loans*	12,325,548	67,009	116,459	138,077	193,098	11,810,905	
6. Tagihan lainnya / *Others receivable*	-	-	-	-	-	-	
7. Lain-lain / *Others*	507,538	83,955	180,023	115,057	62,775	65,728	
Jumlah aset / *Total aset*	21,961,243	7,658,622	841,760	1,133,225	261,691	12,065,945	
B. Kewajiban / *Liability*							
1. Dana pihak ketiga / *Deposit from costumer*	16,240,364	12,118,690	1,277,080	1,259,955	929,693	654,946	
2. Kewajiban pada Bank Indonesia / *Liabilities to Bank Indonesia*	6	-	-	-	-	6	
3. Kewajiban pada Bank							

Lain / *Liabilities to Other Bank*	1,730,746	1,725,246	3,000	2,500	-	-
4. Surat Berharga yang diterbitkan / *Bond issued*	499,894	-	-	-	-	499,894

34. Praktek manajeman risiko yang dijalankan (lanjutan)

34. Licence management risk in operation (continued)

e. Risiko operasional (lanjutan)

e. Operational risk (continued)

Pengungkapan profil maturitas Rupiah / *Rupiah profile maturity disclosure*

Akun perkiraan / *Accounting chart*	Saldo / Balanced	31 Desember 2014				
		Dalam Jutaan Rupiah / *In Millions Rupiah*				
		< 1 bulan / < 1 month	> 1-3 bulan / > 1-3 month	> 3-6 bulan / > 3-6 month	> 6-12 bulan / > 6-12 month	> 12 bulan / > 12 month
Neraca / *Balance sheet*						
B. Kewajiban / *Liability*						
5. Pinjaman yang diterima / *Borrowing*	309,714	-	-	-	-	309,714
6. Kewajiban lainnya / *Others liability*	-	-	-	-	-	-
7. Lain-lain / *Others*	1,074,937	460,678	132,463	135,561	136,374	209,861
Jumlah kewajiban / *Total liability*	19,855,661	14,304,614	1,412,543	1,398,016	1,066,067	1,674,421
Selisih aset dengan kewajiban dalam neraca	**2,105,582**	**(6,645,992)**	**(570,783)**	**(264,791)**	**(804,376)**	**10,391,524**

Akun perkiraan / *Accounting chart*	Saldo / Balanced	31 Desember 2014				
		Dalam Jutaan Rupiah / *In Millions Rupiah*				
		< 1 bulan / < 1 month	> 1-3 bulan / > 1-3 month	> 3-6 bulan / > 3-6 month	> 6-12 bulan / > 6-12 month	> 12 bulan / > 12 month
Rekening administratif/Administrative account						
A. Tagihan rekening administratif / *Administrative account receivable*						
1. Komitmen / *Commitment*	-	-	-	-	-	-
2. Kontijensi / *Contingencies*	160,049	160,049	-	-	-	-
Jumlah / *Total*	160,049	160,049	-	-	-	-
B. Kewajiban rekening administratif / *Administrative account liabilities*						
1. Komitmen / *Commitment*	154,533	27,986	18,514	35,204	38,714	34,115
2. Kontijensi / *Contingencies*	241,201	152,117	36,859	32,598	6,856	12,771
Jumlah / *Total*	395,734	180,103	55,373	67,802	45,570	46,886
Selisih tagihan dan kewajiban dalam rekening administratif/ *Differences of Receivables and administrative liabilitiy accounts*	**(235,685)**	**(20,054)**	**(55,373)**	**(67,802)**	**(45,570)**	**(46,886)**
Selisi aset - kewajiban + tagihan - kewajiban rek administratif/ *Differences of Assets - liabilities + Receivables - administrative liabilitiey accounts.*	**1,869,897**	**(6,666,046)**	**(626,156)**	**(332,593)**	**(849,946)**	**10,344,638**
Selisih komulatif /						

different	**(6,666,046)**	**(7,292,202)**	**(7,624,795)**	**(8,474,741)**	**1,869,897**

34. Praktek manajeman risiko yang dijalankan (lanjutan)

e. Risiko operasional (lanjutan)

34. Licence management risk in operation (continued)

e. Operational risk (continued)

Pengungkapan profil maturitas Rupiah / *Rupiah profile maturity disclosure*

Akun perkiraan / *Accounting chart*	Saldo / Balanced	31 Desember 2013				
		Dalam Jutaan Rupiah / *In Millions Rupiah*				
		< 1 bulan / < 1 month	> 1-3 bulan / > 1-3 month	> 3-6 bulan / > 3-6 month	> 6-12 bulan / > 6-12 month	> 12 bulan / > 12 month
Neraca / *Balance sheet*						
A. Aset / *Assets*						
1. Kas / *Cash*	553,443	553,443	-	-	-	-
2. Penempatan pada Bank Indonesia / *Placement with Bank Indonesia*	2,029,561	1,775,836	-	-	253,725	-
3. Penempatan pada Bank lain / *Placement with other Bank*	4,450,268	4,450,268	-	-	-	-
4. Surat Berharga / *Marketable securities*	180,206	15,025	-	-	43,236	121,945
5. Kredit yang diberikan / *Loans*	11,332,566	65,139	145,611	140,227	198,540	10,783,049
6. Tagihan lainnya / *Others receivable*	-	-	-	-	-	-
7. Lain-lain / *Others*	375,088	80,676	8,365	7,077	136,390	142,580
Jumlah aset / *Total aset*	18,921,132	6,940,387	153,976	147,304	631,891	11,047,574
B. Kewajiban / *Liability*						
1. Dana pihak ketiga / *Deposit from costumer*	12,980,317	10,974,930	706,210	518,536	359,018	421,623
2. Kewajiban pada Bank Indonesia / *Liabilities to Bank Indonesia*	59	-	-	-	-	59
3. Kewajiban pada Bank Lain / *Liabilities to Other Bank*	1,820,188	1,820,188	-	-	-	-
4. Surat Berharga yang diterbitkan / *Bond issued*	499,785	-	-	-	-	499,785
5. Pinjaman yang diterima / *Borrowing*	4,238	-	-	-	-	4,238
6. Kewajiban lainnya / *Others liability*	-	-	-	-	-	-
7. Lain-lain / *Others*	1,458,614	625,180	187,297	190,395	191,208	264,534
Jumlah kewajiban / *Total liability*	16,763,201	13,420,298	893,507	708,931	550,226	1,190,239
Selisih aset dan kewajiban dalam neraca/ *Differences of assets and liabilities in balance sheet*	**2,157,931**	**(6,479,911)**	**(739,531)**	**(561,627)**	**81,665**	**9,857,335**

34. Praktek manajeman risiko yang dijalankan (lanjutan)

e. Risiko operasional (lanjutan)

Rekening administratif/ *Administrative account*

A. Tagihan rekening administratif / *Administrative account receivable*

1. Komitmen / *Commitment*	-	-	-	-	-	-
2. Kontijensi / *Contingencies*	120,684	120,684	-	-	-	-
Jumlah / *Total*	120,684	120,684	-	-	-	-

B. Kewajiban rekening administratif / *Administrative account liabilities*

1. Komitmen / *Commitment*	177,826	16,006	11,928	50,181	28,119	71,592
2. Kontijensi / *Contingencies*	152,577	84,094	13,313	28,618	14,411	12,141
Jumlah / *Total*	330,403	100,100	25,241	78,799	42,530	83,733
Selisih tagihan dan kewajiban dalam rekening administratif/ *Differences of Receivables and administrative liabilitiy accounts*	**(209,719)**	**20,584**	**(25,241)**	**(78,799)**	**(42,530)**	**(83,733)**
Selisi aset - kewajiban + tagihan - kewajiban rek administratif/ *Differences of Assets - liabilities + Receivables - administrative liabilitiey accounts.*	**1,948,212**	**(6,459,327)**	**(764,772)**	**(640,426)**	**39,135**	**9,773,602**
Selisih komulatif / *Commulative different*		**(6,459,327)**	**(7,224,099)**	**(7,864,525)**	**(7,825,390)**	**1,948,212**

Pengungkapan profil maturitas valuta asing / *Foreign exchange profile maturity disclosure*

Akun perkiraan / *Accounting chart*	Saldo / Balanced	31 Desember 2014				
		Dalam Jutaan Rupiah / *In Millions Rupiah*				
		< 1 bulan / < 1 month	> 1-3 bulan / > 1-3 month	> 3-6 bulan / > 3-6 month	> 6-12 bulan / > 6-12 month	> 12 bulan / > 12 month
Neraca / *Balance sheet*						
A. Aset / *Assets*						
1. Kas / *Cash*	1,092	1,092	-	-	-	-
2. Penempatan pada Bank Indonesia / *Placement with Bank Indonesia*	2,005	2,005	-	-	-	-
3. Penempatan pada Bank lain / *Placement with other Bank*	5,488	5,488	-	-	-	-
4. Surat Berharga / *Marketable securities*	-	-	-	-	-	-
5. Kredit yang diberikan / *Loans*	-	-	-	-	-	-
6. Tagihan lainnya / *Others receivable*	-	-	-	-	-	-

34. *Licence management risk in operation (continued)*

e. Operational risk (continued)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2014 dan 2013
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years ended
December 31, 2014 and 2013
(Expressed in fully Rupiah, unless otherwise stated)

7. Lain-lain / *Others*	-	-	-	-	-	-
Jumlah aset / *Total aset*	8,585	8,585	-	-	-	-

34. Praktek manajeman risiko yang dijalankan (lanjutan)

34. Licence management risk in operation (continued)

e. Risiko operasional (lanjutan)

e. Operational risk (continued)

B. Kewajiban / *Liability*						
1. Dana pihak ketiga / *Deposit from costumer*	1,396	1,363	23	8	2	-
2. Kewajiban pada Bank Indonesia / *Liabilities to Bank Indonesia*	-	-	-	-	-	-
3. Kewajiban pada Bank Lain / *Liabilities to Other Bank*	-	-	-	-	-	-
4. Surat Berharga yang diterbitkan / *Bond issued*	-	-	-	-	-	-
5. Pinjaman yang diterima / *Borrowing*	-	-	-	-	-	-
6. Kewajiban lainnya / *Others liability*	-	-	-	-	-	-
7. Lain-lain / *Others*	7,190	7,190	-	-	-	-
Jumlah kewajiban / *Total liability*	8,586	8,553	23	8	2	-
Selisih aset dan kewajiban dalam neraca/ *Differences of assets and liabilities in balance sheet*	**(1)**	**32**	**(23)**	**(8)**	**(2)**	**-**

Pengungkapan profil maturitas valuta asing / *Foreign exchange profile maturity disclosure*

Akun perkiraan / *Accounting chart*	Saldo / Balanced	31 Desember 2014				
		Dalam Jutaan Rupiah / *In Millions Rupiah*				
		< 1 bulan / < 1 month	> 1-3 bulan / > 1-3 month	> 3-6 bulan / > 3-6 month	> 6-12 bulan / > 6-12 month	> 12 bulan / > 12 month
Rekening administratif / *Administrative account*						
A. Tagihan rekening administratif / *Administrative account receivable*						
1. Komitmen / *Commitment*	-	-	-	-	-	-
2. Kontijensi / *Contingencies*	-	-	-	-	-	-
Jumlah / *Total*	-	-	-	-	-	-
B. Kewajiban rekening administratif / *Administrative account liabilities*						
1. Komitmen / *Commitment*	-	-	-	-	-	-
2. Kontijensi / *Contingencies*	-	-	-	-	-	-
Jumlah / *Total*	-	-	-	-	-	-
Selisih tagihan dan kewajiban dalam rekening administratif/ *Differences of Receivables and administrative liabilitiy accounts*	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Selisi aset - kewajiban + tagihan - kewajiban rek administratif/ *Differences of Assets -*						

liabilities + Receivables - administrative liabilitiey accounts.	**(1)**	**32**	**(23)**	**(8)**	**(2)**	**-**
Selisih komulatif / *Commulative different*		**32**	**9**	**1**	**(1)**	**(1)**

34. Praktek manajeman risiko yang dijalankan (lanjutan) / ***34. Licence management risk in operation (continued)***

e. Risiko operasional (lanjutan) / *e. Operational risk (continued)*

Pengungkapan profil maturitas valuta asing / *Foreign exchange profile maturity disclosure*

Akun perkiraan / *Accounting chart*	Saldo / Balanced	31 Desember 2013 — Dalam Jutaan Rupiah / *In Millions Rupiah*				
		< 1 bulan / < 1 month	> 1-3 bulan / > 1-3 month	> 3-6 bulan / > 3-6 month	> 6-12 bulan / > 6-12 month	> 12 bulan / > 12 month
Neraca / *Balance sheet*						
A. Aset / *Assets*						
1. Kas / *Cash*	750	750	-	-	-	-
2. Penempatan pada Bank Indonesia / *Placement with Bank Indonesia*	905	905	-	-	-	-
3. Penempatan pada Bank lain / *Placement with other Bank*	10,785	10,785	-	-	-	-
4. Surat Berharga / *Marketable securities*	-	-	-	-	-	-
5. Kredit yang diberikan / *Loans*	-	-	-	-	-	-
6. Tagihan lainnya / *Others receivable*	-	-	-	-	-	-
7. Lain-lain / *Others*	-	-	-	-	-	-
Jumlah aset / *Total aset*	12,440	12,440	-	-	-	-
B. Kewajiban / *Liability*						
1. Dana pihak ketiga / *Deposit from costumer*	6,204	6,103	91	8	2	-
2. Kewajiban pada Bank Indonesia / *Liabilities to Bank Indonesia*	-	-	-	-	-	-
3. Kewajiban pada Bank Lain / *Liabilities to Other Bank*	3,000	3,000	-	-	-	-
4. Surat Berharga yang diterbitkan / *Bond issued*	-	-	-	-	-	-
5. Pinjaman yang diterima / *Borrowing*	-	-	-	-	-	-
6. Kewajiban lainnya / *Others liability*	-	-	-	-	-	-
7. Lain-lain / *Others*	3,234	3,234	-	-	-	-
Jumlah kewajiban / *Total liability*	12,438	12,337	91	8	2	-
Selisih aset dan kewajiban dalam neraca/ *Differences of assets and liabilities in balance sheet*	**2**	**103**	**(91)**	**(8)**	**(2)**	**-**

34. Praktek manajeman risiko yang dijalankan (lanjutan)

e. Risiko operasional (lanjutan)

Pengungkapan profil maturitas valuta asing / *Foreign exchange profile maturity disclosure*

Akun perkiraan / *Accounting chart*	Saldo / Balanced	31 Desember 2013					
		Dalam Jutaan Rupiah / *In Millions Rupiah*					
		< 1 bulan / < 1 month	> 1-3 bulan / > 1-3 month	> 3-6 bulan / > 3-6 month	> 6-12 bulan / > 6-12 month	> 12 bulan / > 12 month	
Rekening administratif / *Administrative account*							
A. Tagihan rekening administratif / *Administrative account receivable*							
1. Komitmen / *Commitment*	-	-	-	-	-	-	
2. Kontijensi / *Contingencies*	-	-	-	-	-	-	
Jumlah / *Total*	-	-	-	-	-	-	
B. Kewajiban rekening administratif / *Administrative account liabilities*							
1. Komitmen / *Commitment*	-	-	-	-	-	-	
2. Kontijensi / *Contingencies*	-	-	-	-	-	-	
Jumlah / *Total*	-	-	-	-	-	-	
Selisih tagihan dan kewajiban dalam rekening administratif/ *Differences of Receivables and administrative liabilitiy accounts*	-	-	-	-	-	-	
Selisi aset - kewajiban + tagihan - kewajiban rek administratif/ *Differences of Assets - liabilities + Receivables - administrative liabilitiey accounts.*	**2**	**103**	**(91)**	**(8)**	**(2)**	**-**	
Selisih komulatif / *Commulative different*		**103**	**12**	**4**	**2**	**2**	

f. Risiko hukum

Bank mengelola risiko hukum dengan memastikan seluruh aktivitas dan hubungan kegiatan usaha Bank dengan pihak ketiga didasarkan pada aturan dan persyaratan yang dapat melindungi kepentingan Bank dari segi hukum. Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis dalam bisnis, yang antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna. Bank telah membentuk Divisi Hukum dan Corporate secretary sebagai salah satu strategi pengendalian internal Bank terhadap potensi risiko hukum.

g. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh

34. Licence management risk in operation (continued)

e. Operational risk (continued)

f. Law risk

The Bank manages the legal risks by making sure that all activities and relations of the Bank business activities with third party shall be based on the regulations and requirements that is able to protect the interests of the Bank from legal aspects. The legal risk is the risk resulted from the existence of weaknesses in the judicial aspect in business, among them resulted from the existence of lawsuit, the absence of supportive rules of laws the weaknesses in the bond such as not meeting the requirements for the validity of contract and the bond of collateral is not perfect. The Bank has formed Legal Division and Corporate secretary as one of the strategies of the Bank's internal control against legal risk potential.

g. Reputation risk

Risk reputation is the risk, among others, resulted from the

adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Bank atau persepsi negatif terhadap Bank. Bank mengelola risiko reputasi dengan memastikan kesesuaian antara aktivitas kegiatan usaha Bank bersama-sama dengan aktivitas lain sehingga reputasi Bank tetap terjaga.

existence of negative publication related to the Bank's business activities or negative perception toward the Bank. The Bank manages the reputation risk by making sure that the appropriateness between the Bank's business activities and other activities resulting in the Bank's reputation is still being maintained.

34. Praktek manajeman risiko yang dijalankan (lanjutan)

h. Risiko Strategi

Risiko strategis adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi Bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya Bank terhadap perubahan eksternal. Bank mengelola risiko strategis melalui proses pertimbangan dan pengambilan keputusan setiap kebijakan strategis secara kolektif dan komprehensif oleh Direksi dan Komite-Komite yang telah dibentuk.

i. Risiko kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perudang-undangan dan ketentuan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Bank melaksanakan Fungsi Kepatuhan, Fungsi Kepatuhan Bank meliputi tindakan untuk :

- Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank;
- Tindakan mengelola Risiko Kepatuhan dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
- Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah; dan
- Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

j. Risiko penyelewengan

Dalam hal pelaksanaan dan pengendalian risiko penyelewengan, Bank telah menerapkan beberapa langkah berikut:

- Pengelolaan operasional "Bank" tidak tergantung pada kebijakan seseorang.
- Pengelola "Bank" dalam melaksanakan kegiatan operasional tidak melakukan hal-hal yang cenderung menguntungkan diri sendiri, maupun keluarganya.
- Manajemen "Bank" memahami dan senantiasa mewaspadai jenis-jenis risiko yang melekat dalam kegiatan usaha "Bank" yang dipimpinnya.
- Pemilik "Bank" memiliki komitmen yang kuat untuk mengembangkan banknya.
- Pemilik mayoritas menyerahkan pengelolaan "Bank" kepada manajemen profesional.

34. Licence management risk in operation (continued)

h. Strategic risk

The strategic risk is the risk among them resulted from the existence of determining and implementing inaccurate Bank's strategies, inaccurate business decision taking or the lack of responsiveness of the Bank towards external changes. The Bank manages the strategic risks through the process of consideration and decision taking for every strategic policy collectively and comprehensively by Board of Directors ad Committees already formed.

i. Compliance risk

Compliance risk is the risk arising resulted from the Bank not complying and/or not implementing the prevailing rules of laws and provisions, including the Syariah (Islamic Rules) Principal for Public Bank and Syariah Business Unit.

The Bank implements the Compliance Function, the Bank Compliance Function includes the acts to:

- *Manifest the performance of Compliant Culture in all organizational levels and business activities of the Bank;*
- *Perform in managing Compliance Risk shall be done by referring to the provisions of Bank Indonesia concerning Risk Management For Public Bank.*
- *Make sure that the policies, provisions, systems, and procedures as well as business activities performed by the Bank has been in accordance with the provisions of Bank Indonesia and the prevailing rules of laws, including Syariah Principal for Syariah Public Bank and Syariah Business Units; and*
- *Make sure the compliance of the Bank to the commitment made by the Bank to Indonesia and/or other supervising authorities in charge.*

j. Deviation risk

In the framework of applied and controlling deviation risk, Bank was doing several steps is as follows :

- *Managing operational of "Bank" is not depending on ones decision.*
- *"Bank" management in operate activities in thet circumstance carrying out things for personal, famyly or group benefit.*
- *The managemen of "Bank" realize and always aware of any kind of risk stick in bank activity managed by them.*
- *The owner of "Bank" have a strong comitment to develop their bank.*
- *The majority owner have submitted to carry out "Bank" to the professional management.*

- Senantiasa diupayakan meningkatkan kesejahteraan pegawai sehingga bisa berkonsentrasi dalam bekerja.
- Senantiasa dilaksanakan pendidikan dan pelatihan termasuk pembinaan moral dan keagamaan dalam rangka meningkatkan kualitas pengetahuan, iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

- *Continously make an effort to increase official prosperity to make an effect of contrentration in doing work .*
- *Always carriyng out education and training including building moral and religious in the framework o increasing ability, beliveness and obey the Only God.*

35. Aset keuangan dan liabilitas keuangan

Sebagian besar instrumen keuangan pada laporan posisi keuangan disajikan menggunakan nilai wajar. Berikut ini adalah perbandingan antara nilai tercatat seperti yang dilaporkan pada laporan posisi keuangan dan nilai wajar laporan keuangan.

Pada tabel berikut ini, instrumen keuangan telah dialokasikan berdasarkan klasifikasinya. Kebijakan akuntansi penting pada Catatan 2C menjelaskan bagaimana setiap kategori aset keuangan dan liabilitas keuangan diukur dan bagaimana pendapatan dan beban, termasuk keuntungan dan kerugian atas nilai wajar (perubahan nilai wajar instrumen keuangan) diakui.

Pengelompokan aset keuangan telah diklasifikasikan menjadi aset keuangan yang diperdagangkan; aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo; pinjaman yang diberikan dan piutang; dan aset keuangan tersedia untuk dijual. Demikian halnya dengan setiap liabilitas keuangan juga telah diklasifikasikan menjadi yang diperdagangkan dan biaya perolehan diamortisasi.

Nilai wajar pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan informasi yang tersedia dan belum diperbaharui untuk merefleksikan perubahaan keadaan pasar setelah tanggal laporan posisi keuangan.

Tabel berikut ini merupakan nilai tercatat dan nilai wajar dari aset keuangan dan liabilitas keuangan Bank pada tanggal 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013.

35. Financial assets and financial liabilities

A significant number of financial instruments are carried at fair value in the statements of financial position. Below is the comparison of the carrying amounts, as reported on the financial position, and the fair value of financial statements.

In the following table, financial instruments have been allocated based on their classification. The significant accounting policies in Note 2C describe how the categories of the financial assets and financial liabilities are measured and how income and expenses, including fair value gains and losses (changes in fair value of financial instruments), are recognized.

Financial asset classes have been allocated into trading; held to maturity; loans and receivables and available for sale financial assets. Similarly, each class of financial liability has been allocated into trading and at amortized cost.

The fair value are based on relevant information available as at the statements of financial position date and have not been updated to reflect changes in market condition after the statements of financial position date.

The table below sets out the carrying amount and fair values of the Bank financial assets and liabilities as at December 30, 2014 and December 31, 2013.

Tahun 2014 / *Year 2014*

Perkiraan/ *Account*	Nilai tercatat tahun 2014 (dalam jutaan Rupiah) / *Carrying amount year 2014 (In Milions Rupiah)*						
	diperdagangkan / *trading*	dimiliki hingga jatuh tempo/ *held-to-maturity*	pinjaman diberikan/ *Loans*	tersedia untuk dijual/ *Available for sale*	amortisasi lainnya/ *Other amortized*	Nilai tercatat/ *Carrying amount*	Nilai wajar/ *Fair value*
Aset keuangan							
Kas/ *Cash*	-	-	775,964	-	-	775,964	775,964
Giro pada Bank Indonesia/ *Current account with Indonesia Bank*	-	-	1,289,270	-	-	1,289,270	1,289,270
Giro pada Bank Lain/ *Current account with other Bank*	-	-	69,643	-	-	69,643	69,643
Penempatan pada Bank Lain/ *Placement with Other Bank*	-	-	5,872,157	-	-	5,872,157	5,872,157
Surat-surat berharga/ *Marketable securities*	-	1,419,899	-	-	-	1,419,899	1,419,899
Kredit yang diberikan/ *Loans*	-	-	12,764,751	-	-	12,764,751	12,764,751
Penyertaan/ *Invesment*	-	-	500	-	-	500	500
Aset lain-lain/ *Other assets*	-	-	228,659	-	-	228,659	228,659
Liabilities keuangan							
Kewajiban segera/ *Current liabilities*	-	-	-	-	840,737	840,737	840,737
Simpanan nasabah/ *Deposit from costumer*	-	-	-	-	-	-	-
Simpanan dari Bank lain/ *Deposits from other Banks*	-	-	-	-	1,810,746	1,810,746	1,810,746
Obligasi yang diterbitkan/ *Bond*							

issued	-	-	-	-	499,894	499,894	499,894
Pinjaman yang diterima/ *Borrowing*	-	-	-	-	311,373	311,373	311,373
Liabilitas lain-lain/ *Other liabilities*	-	-	-	-	67,749	67,749	67,749

35. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

35. Financial assets and financial liabilities (continued)

Tahun 2013 / *Year 2013*

Perkiraan/ *Account*	Nilai tercatat tahun 2013 (dalam jutaan Rupiah) / Carrying amount year 2013 (In Milions Rupiah)						
	diperdagangkan / *trading*	dimiliki hingga jatuh tempo/ *held-to-maturity*	pinjaman diberikan/ *Loans*	tersedia untuk dijual/ *Available for sale*	amortisasi lainnya/ *Other amortized*	Nilai tercatat/ *Carrying amount*	Nilai wajar/ *Fair value*
Aset keuangan							
Kas/ *Cash*	-	-	573,070	-	-	573,070	573,070
Giro pada Bank Indonesia/ *Current account with Indonesia Bank*	-	-	1,214,021	-	-	1,214,021	1,214,021
Giro pada Bank Lain/ *Current account with other Bank*	-	-	98,471	-	-	98,471	98,471
Penempatan pada Bank Lain/ *Placement with Other Bank*	-	-	4,636,122	-	-	4,636,122	4,636,122
Surat-surat berharga/ *Marketable securities*	-	1,033,223	-	-	-	1,033,223	1,033,223
Kredit yang diberikan/ *Loans*	-	-	11,537,988	-	-	11,537,988	11,537,988
Penyertaan/ *Invesment*	-	-	500	-	-	500	500
Aset lain-lain/ *Other assets*	-	-	165,513	-	-	165,513	165,513
Liabilities keuangan							
Kewajiban segera/ *Current liabilities*	-	-	-	-	1,258,387	1,258,387	1,258,387
Simpanan nasabah/ *Deposit from costumer*	-	-	-	-	13,642,708	13,642,708	13,642,708
Simpanan dari Bank lain/ *Deposits from other Banks*	-	-	-	-	1,856,698	1,856,698	1,856,698
Obligasi yang diterbitkan/ *Bond issued*	-	-	-	-	499,785	499,785	499,785
Pinjaman yang diterima/ *Borrowing*	-	-	-	-	4,296	4,296	4,296
Liabilitas lain-lain/ *Other liabilities*	-	-	-	-	53,634	53,634	53,634

Metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar adalah sebagai berikut:

The following methods and assumptions are used to estimate the fair values:

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan, kecuali efek-efek dimiliki hingga jatuh tempo, pinjaman yang diberikan yang mempunyai risiko nilai wajar, piutang pembiayaan konsumen, obligasi yang diterbitkan, dan pinjaman yang diterima, mendekati nilai tercatatnya karena mempunyai jangka waktu tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut dan/atau suku bunganya sering ditinjau ulang.

The fair value of financial assets and liabilities, except for held to maturity marketable securities, loans with fair value risk, consumer financing receivables, bonds issued, and borrowings, approximated to the carrying amount largely due to short-term maturities of these instruments and/or repricing frequently.

Nilai wajar efek-efek dimiliki hingga jatuh tempo dan obligasi yang diterbitkan ditentukan berdasarkan harga kuotasi pasar yang berlaku pada tanggal 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013.

The fair value of held to maturity marketable securities and bonds issued was determined on the basis of quoted market price as of December 31, 2014 and December 31, 2013.

Nilai wajar pinjaman yang diberikan yang mempunyai risiko nilai wajar, piutang pembiayaan konsumen, dan pinjaman yang diterima dinilai menggunakan diskonto arus kas berdasarkan tingkat suku bunga pasar pada tanggal 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013.

The fair value of loans with fair value risk, consumer financing receivables, and borrowing are determined by discounting cash flows using market interest rate as at June 30, 2014 and December 31, 2013.

Nilai wajar investasi dalam saham dinilai sebesar biaya perolehannya karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal.

The fair value of investments in shares is carried at cost due to its fair value cannot be reliably measured.

36. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)

Rasio penyediaan modal minimum adalah rasio modal terhadap aset tertimbang menurut risiko (ATMR). Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No. 14/18/PBI/2012 tentang kewajiban penyediaan modal minimum bank umum tanggal 28 November 2012.

Beberapa faktor penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan PBI No. 13/1/PBI/2011, tanggal 5 Januari 2011, Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan SE BI No. 13/24/DPNP, tanggal 25 Oktober 2011, Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

36. Capital Adequacy Ratio (CAR)

The capital adequacy ratio (CAR) is capital against average assets risk (ATMR). Based on Bank indonesia regulation number 14/18/PBI/2012 of the minimum capital requirement for commercial banks on 28 November of 2012.

Several calculation to value the bank condition level, based on PBI number 13/1/PBI/2011, January 5, 2011 about Value of General Bank Condition Level System and Bank of Indonesia Decree number 13/24/DPNP, October 25, 2011, About the Value of General Bank Condition.

	31 Desember 2014	31 Desember 2013	
Aset Tertimbang Menurut Risiko (dalam jutaan Rupiah)			***Risk Weighted Assets (in millions Rupiah)***
Setelah memperhitungkan Risiko Kredit	9,290,464	8,081,990	*After Credit Risk*
Setelah memperhitungkan Risiko Kredit dan Operasional	11,495,349	10,092,751	*After Credit Risk and Operational Risk*
Setelah memperhitungkan Risiko Kredit, Operasional, dan Risiko Pasar	11,584,535	10,160,445	*After Credit Risk, Operational Risk and Market Risk*
Komponen modal (dalam jutaan Rupiah)			***Capital componen (In Millions Rupiah)***
• Modal Inti	2,000,486	1,796,665	*Principle Capital* •
• Modal Pelengkap	116,131	101,025	*Capital Completion* •
Total Modal	**2,116,617**	**1,897,690**	*Total Capital*
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum			***Capital Adequacy Ratio***
Setelah memperhitungkan Risiko Kredit	22.78%	23.48%	*After Credit Risk*
Setelah memperhitungkan Risiko Kredit dan Operasional	18.41%	18.80%	*After Credit Risk and Operational Risk*
Setelah memperhitungkan Risiko Kredit, Operasional, dan Risiko Pasar	18.27%	18.68%	*After Credit Risk, Operational Risk and Market Risk*

Penilaian tingkat kesehatan bank :

To value the bank condition level :

a. Permodalan			*a. Capital*
• Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) terhadap ketentuan yang berlaku untuk Risiko kredit, operasional dan pasar.	18.27%	18.68%	*Capital adecuacy ratio against to carry out regulation for credit risk,operation and market.* •
• Aset produktif bermasalah - CKPN Aset produktif bermasalah terhadap Modal inti dan cadangan umum	1.54%	1.07%	*Non performance productive assets - allowance for impairment losses compare with principal capital and general reserve* •
• Aset kualiatas rendah - CKPN Aset kualiatas rendah terhadap Modal inti dan cadangan umum	16.17%	13.57%	*Lower quality assets - allowance for impairment losses compare with principal capital and general reserve* •

36. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (lanjutan)

Penilaian tingkat kesehatan bank (lanjutan) :

b. Kemampuan menghasilkan laba (Rentabilitas)			
• Laba sebelum pajak dibanding dengan rata-rata total aset (ROA)	3.37%	3.00%	• Income Before taxes compared with average total assets (ROA)
• Pendapatan bunga dikurangi beban bunga dibanding dengan rata-rata aset produktif (Net Interest Margin)	7.54%	7.49%	• Net interestIncome compared with average productive assets (Net Interest Margin)
• Pendapatan bunga bersih terhadap rata-rata total aset	6.63%	6.50%	• Net interest income compare with total assets average
• Beban Overhead terhadap rata-rata total aset	3.93%	3.64%	• Overhead cost compare with total assets averrage
c. Kemampuan memenuhi likuiditas			c. Capacity of fulling liquidity
• Aset likuid primer dan sekunder terhadap Total aset	41.25%	38.83%	• Primary and secondary liquidity assets compare with total assets
• Aset likuid primer dan sekunder terhadap Pendanaan jangka pendek	47.22%	44.76%	• Primary and secondary liquidity assets compare with current liabities
• Kredit yang diberikan dibanding dengan dana pihak ketiga (LDR)	77.72%	87.60%	• Loan compared with related parties fund (LDR)
d. Risiko Kredit			d. Credit risk
• Kredit bermasalah dibanding dengan total kredit (NPL-Kotor)	2.79%	2.81%	• Non performance loan compared with total loans (NPL-Gross)
• Kredit kualitas rendah terhadap total kredit	5.65%	5.30%	• Lower quality loans compare with total loans
• Kredit bermasalah - CKPN kredit bermasalah terhadap total kredit - CKPN kredit bermasalah (NPL-Bersih)	0.29%	0.19%	• Non performing loans - CKPN Non performing loans compare with total loans - CKPN Non performing loans (NPL-Net)
• CKPN atas kredit terhadap Total kredit	2.98%	3.46%	• CKPN loans compare with total loans
e. Penilaian risiko pasar			e. Market risk value
• Aset Trading, derivatif, dan Fair Value Option (FVO) terhadap Total Aset	92.31%	92.32%	• Tradding assets, derivatif and fair value option compare with total assets
• Kewajiban perdagangan, derivatif, dan Fair Value Option (FVO) terhadap Total Kewajiban	95.52%	92.06%	• Tradding liabilities, derivatif and fair value option compare with total liabilities

36. *Capital Adequacy Ratio (continued)*

To value the bank condition level (continued) :

37. Perjanjian yang signifikan

1. Program "Cobranding" Kartu Kredit

Program "cobranding" merupakan suatu bentuk kerjasama untuk menerbitkan kartu kredit oleh dua institusi keuangan, dimana kerjasama ini terjadi antara PT Bank Mega, Tbk selaku sponsor dan Bank sebagai pihak yang disponsori. Penerbitan kartu dilakukan dibawah lisensi PT Bank Mega, Tbk dengan pembagian hak dan kewajiban yang telah diatur dalam perjanjian kerjasama.

37. *Signifikan Agreement*

1. *Credit Card "Cobranding" program*

Program "co-branding" is a form of cooperation to issue credit card by two financial institutions, wherein the cooperation happens between PT Bank Mega, Tbk as the sponsor and the Bank as the party sponsored. The issuance of the cards shall be performed under the license of PT Bank Mega, Tbk with distribution of rights and obligations already arranged in the

Berdasarkan perjanjian kerjasama antara PT Bank Mega, Tbk dengan PT Bank Riau Kepri tentang program "cobranding" kartu kredit dengan Nomor perjanjian 06A/PKS/BR/2009 tanggal 2 Januari 2009. Dalam perjanjian tersebut antara PT Bank Mega, Tbk dengan Bank sepakat untuk melakukan perjanjian dengan ketentuan sebagai berikut:

37. Perjanjian yang signifikan (lanjutan)

1. Program "Cobranding" Kartu Kredit (lanjutan)

a. Seluruh persyaratan administrasi dan finansial dari Visa internasional dalam rangka penerbitan kartu kredit tersebut akan dipenuhi oleh Bank. PT Bank Mega,Tbk bersedia menjadi sponsor Bank untuk menjadi participant member Visa International, sehingga memungkinkan penerbitan kartu kredit Bank Riau Kepri Visa. Atas sponsorship tersebut Bank menjamin seluruh Risiko kredit dan kerugian yang ditimbulkan akibat penerbitan kartu kredit Bank Riau Visa.

b. Biaya yang timbul karena kegiatan operasional meliputi cetak kartu dan billing statement, pengiriman kartu dan billing statement serta kegiatan otorisasi maka PT Bank Mega, Tbk, berhak memperoleh seluruh pendapatan interchange fee. Pendapatan fee lainnya seperti late charge, forex mark up dan lainnya merupakan hak dari kedua belah pihak dengan komposisi masing-masing sebesar 50%.

c. Net spread interest income yakni selisih dari Interest charge of fund PT Bank Mega, Tbk. Sehubungan dengan pembagian pendapatan Net Spread Interest Income atas revolving balance dari pemegang kartu yang menggunakan fasilitas kredit / tidak membayar full, maka dilakukan pembagian keuntungan dengan pola sebagai berikut :

Jumlah kartu yang diterbitkan / *Credit card issued*	Pembagian bagi hasil bunga / *Net Interest Spread*	
	PT Bank Riau Kepri	PT Bank Mega, Tbk
< 8.000	55%	45%
3.001 - < 8.000	60%	40%
> 8.000	65%	35%

d. PT Bank Mega, Tbk memberikan training kepada karyawan Bank yang akan menangani kerjasama ini khususnya pengetahuan mengenai produk kartu kredit Bank Riau Kepri Visa, Costumer Service, Marketing, Akuisisi, Usage, Analisa Kredit dan Collection.

e. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 2 Januari 2010 dan selanjutnya akan diperpanjang secara otomatis untuk setiap jangka waktu yang sama.

2. Pengadaan Sewa Halte Bus Kota dengan menamakan PT Bank Riau Kepri

Berdasarkan perjanjian kerjasama antara Bank dengan PT Wahyu Tripraja Karya atas pengadaan sewa 2 halte bus kota untuk dinamakan dengan PT Bank Riau Kepri tanggal 10 Mei 2012 nomor 003/PT.WTK-PT.BRK/VI/2012 yang mana perjanjian tersebut berdasar pada Surat Penawaran No.070/PT.WTK-PNW/II/12, SPK nomor 01/SPK/PL.03/ DUM/2012, serta pada tanggal 10 Mei 2012 nomor 004/PT.WTK-PT.BRK/VI/2012 yang mana perjanjian tersebut berdasar pada Surat Penawaran No.071/PT.WTK-PNW/II/12, SPK nomor 02/SPK/PL.03/

cooperation agreement.

Based on the cooperation agreement between PT Bank Mega, Tbk and PT Bank Riau Kepri on the program "co-branding" of credit card with agreement Number 06A/PKS/BR/2009 dated the 2nd of January 2009. In the agreement thereof between PT Bank Mega, Tbk and the Bank it is agreed upon to perform the agreement with the provision as follows:

37. Signifikan Agreement (continued)

1. Credit Card "Cobranding" program (continued)

a. All administrative and financial terms and conditions from Visa International in the framework of the credit card thereof shall be met by the Bank. PT Bank Mega,Tbk is available to become the sponsoring Bank to become participant member Visa International, in order to make possible the issuance of thee credit card of Bank Riau Kepri Visa. By sponsorship thereof, the Bank guarantees all credit risks and losses arise from the issuance of the credit card of Bank Riau Visa.

b. The costs arise from the operational activities including the printing of the cards and billing statement, card delivery and billing statement as well the authorization activities, therefore PT Bank Mega, Tbk, shall be entitled to obtain all incomes of interchange fee. Other fee incomes such as late charge, foreign exchange mark up and so on shall be the rights of both parties with the composition for each is 50%.

c. Net spread interest income is the difference of Interest charge of fund of PT Bank Mega, Tbk. Related to the distribution of income of Net Spread Interest Income on revolving balance from the cardholder using the credit facility / not paying in full, then the distribution of profits shall be performed as follows:

d. PT Bank Mega, Tbk provides training to the employees of the Bank who are about to handle this cooperation, especially on the knowledge of credit card product of Bank Riau Kepri Visa, Costumer Service, Marketing, Acquisition, Usage, Credit Analysis and Collection.

e. This agreement shall be valid up to the 2nd of January 2010 and further shall be extended automatically for every similar term.

2. Agreement to Rent of Bus Shelter for Branding PT Bank Riau Kepri

Based on the cooperation agreement between the Bank and PT Wahyu Tripraja Karya on the city bus stop rent to be named by PT Bank Riau Kepri on May 10, 2012 number 003/PT.WTK-PT.BRK/VI/2012 whereas the agreement thereof shall be based on the Offering Letter No.070/PT.WTK-PNW/II/12, SPK number 01/SPK/PL.03/ DUM/2012 with number 004/PT.WTK-PT.BRK/VI/2012 whereas the agreement thereof shall be based on the Offering Letter No.071/PT.WTK-PNW/II/12, SPK number 02/SPK/PL.03/ DUM/2012 and procurement number

No.071/PT.WTK-PNW/II/12, SPK nomor 02/SPK/PL.03/DUM/2012 dan pengadaan nomor 79/KEPDIR/2011.

02/SPK/PL.03/ DUM/2012 and procurement number 79/KEPDIR/2011.

37. Perjanjian yang signifikan (lanjutan)

2. Pengadaan Sewa Halte Bus Kota dengan menamakan PT Bank Riau Kepri (lanjutan)

Adapun ketentuan dari Surat Perjanjian tersebut dapat di jelaskan seperti dibawah ini :

a. Pengadaan sewa halte bus kota tersebut terletak di Jl.Jend.Sudirman Depan kantor Departemen Agama Pekanbaru dan depan kantor Dinas Pariwisata Pekanbaru dengan rincian halte 8 x 3M, listrik telah dibayar selama setahun dan rancangan logo yang akan terpasang pada halte terbuat dari bahan vinyl.

b. Harga pekerjaan pengadaan sewa kedua halte tersebut sebesar Rp137.500.000 sudah termasuk PPN 10%. Pembayaran dilakukan sekaligus 100% dan pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan dengan dinyatakan melalui Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

c. Jangka waktu pelaksanaan pengadaan sewa 2 halte bus kota tersebut terhitung sejak tanggal 22 Mei 2012 sampai dengan 21 Mei 2013.

3. Perjanjian penyelenggaraan Anjungan Tunai Mandiri ("ATM") Bersama

Pada tanggal 3 Oktober 2003, Bank mengadakan perjanjian penyelenggaraan ATM Bersama dengan PT Artajasa Pembayaran Elektronis dengan nomor perjanjian 30/DIR/BPDR/X/2003. Perjanjian tersebut berlaku selama 36 bulan dan akan diperpanjang secara otomatis setiap tahunnya sepanjang tidak ada perubahan dalam perjanjian tersebut. Dalam perjanjian tersebut, Bank akan mendapatkan manfaat jaringan ATM Bersama di lebih dari 31.000 ATM di seluruh Indonesia.

4. Kontrak pengadaan barang dan jasa yang terbesar tahun 2014 sebagai berikut:

- Pengadaan barang / jasa penyempurnaan aplikasi mobil banking (PT Metalogix Infolink Persada) Nilai pekerjaan sebesar Rp.660.000.000
- Pekerjaan renovasi bangunan Kantor Capem Tuanku Tambusai (CV Warna Abadi) Nilai pekerjaan sebesar
- Pekerjaan renovasi bangunan Kantor Capem Tangkerang (CV AJB) Nilai pekerjaan sebesar Rp.663.000.000.
- Pembangunan rumah dinas pemimpin Cabang Selat Panjang (CV Cahaya Bumi Melayu) Nilai pekerjaan sebesar Rp.955.444.247.
- Pengadaan kendaraan roda tiga untuk Pemda Tanjung Pinang dan Dabo Singkep sebagai Corporate Social Responsibility (CSR) (CV Syf Fairus) Nilai pengadaan sebesar Rp.570.000.000
- Renovasi bbangunan kantor Capem bagan Batu (CV Nuansa

37. Signifikan Agreement (continued)

2. Agreement to Rent of Bus Shelter for Branding PT Bank Riau Kepri (continued)

As for the provisions of the Agreement Letter thereof, it can be explained below:

a. Procurement of the bus stop rent thereof is situated in Jl. Jend. Sudirman in front of Religion official of Pekanbaru and in front of the Tourism Official office of Pekanbaru with the specification the bus stop size 8 x 3M, power has been paid for one year and the logo design to be installed at the bus stop shall be made of vinyl material.

b. The price for the rent of two shelter procurement work thereof is Rp137.500.000 including VAT 10%. The payment shall be done as a whole 100%, after the work has been completed by PT Wahyu Tripraja Karya to be stated through the Minutes of Work Transfer.

c. The term of the procurement performance of 2 city bus stop rent thereof shall be counted from the May 22 2012 up to May 21, 2013.

3. Joint (Automatic Teller Machine) ("ATM") Agreement

On October 3, 2003, the Bank entered into a Joint ATM agreement with PT Artajasa Pembayaran Elektronis number 30/DIR/BPDR/X/2003. That agreement is for a period of 36 month dan will be automaticly renew for period of 1 year, if there is not changed of that agreement. Based on this agreement, the Bank will utilize a joint ATM network of 31,000 ATM units throughout Indonesia.

4. Contract procurement biggest 2014 as follows:

- Procurement of goods / services consummation car banking applications (PT Metalogix Infolink Persada) Value of work for Rp.660.000.000
- Office building renovation work Capem lord Tambusai (CV Warna Abadi) Value of Rp.794.200.000 job.
- Office building renovation work Capem Tangkerang (CV AJB) Value of Rp.663.000.000 job.
- Construction of the official residence of the leader of the Selat Panjang Branch (CV Cahaya Bumi Melayu) value of the work of Rp.955.444.247.
- Procurement of three-wheeled vehicles to local government and Dabo Tanjung Pinang Singkep as Corporate Social Responsibility (CSR) (CV SYF Fairuz) Value procurement of Rp.570.000.000
- Renovation of office buildings Capem chart Stone (CV Nuansa

Bangun Persada) Nilai pekerjaan sebesar Rp.768.547.000.

- Pengadaan mobil dinas pimpinan divisi (PT Agung Auto Mall Pekanbaru) Nilai pengadaan sebesar Rp.4.284.749.985.
- Pengadaan truk pengangkut sampah untuk beberapa Pemkab sebagai Corprate Social Responsibility (CSR) (PT Suka Fajar Pekanbaru) Nilai pengadaan sebesar Rp.1.272.000.000.

Bangun Persada) Value of Rp.768.547.000 job.

- Procurement official car division leaders (PT Agung Auto Mall Pekanbaru) Value procurement of Rp.4.284.749.985.
- Procurement garbage trucks for several regency as Corprate Social Responsibility (CSR) (PT Suka Fajar Pekanbaru) Value procurement of Rp.1.272.000.000.

37. Perjanjian yang signifikan (lanjutan)

4. Kontrak pengadaan barang dan jasa yang terbesar tahun 2014 sebagai berikut (lanjutan):

- Pengadaan ambulance untuk Pemkab. Bengkalis Corporate Social Responbility (CSR) (PT Sejahtera Buana Trada) Nilai pengadaan sebesar Rp.872.516.000.
- Pengadaan kalender dinding untuk tahun 2015 (PT Simpul Reka Citra) Nilai pengadaan sebesar Rp.723.415.250.
- Pengadaan agenda kerja tahunan 2015 (CV Macth Indonesia) Nilai pengadaan sebesar Rp.693.550.000.
- Renovasi bangunan kantpr Capem Syariah Duri Nilai pekerjaan sebesar Rp.850.813.000.

37. Signifikan Agreement (continued)

4. Contract procurement biggest 2014 as follows:

- Ambulance to local government procurement. Bengkalis Corporate Social Responsibility (CSR) (PT Sejahtera Buana Trada) Value procurement of Rp.872.516.000.
- Procurement wall calendar for 2015 (PT Simpul Reka Citra) Value procurement of Rp.723.415.250.
- Procurement annual work agenda in 2015 (CV Macth Indonesia) Value procurement of Rp.693.550.000.
- Renovation of the building kantpr Sharia Capem Duri value of Rp.850.813.000 job.

38. Kondisi ekonomi

Kondisi ekonomi di Indonesia telah mempengaruhi operasi "Bank" dan diperkirakan masih akan mempengaruhi operasi "Bank" dimasa mendatang. Meskipun terdapat peningkatan pada indikator ekonomi tertentu namun perbankan Indonesia masih berada pada aktivitas pemberian kredit yang terbatas.

Apabila kondisi ekonomi memburuk, dalam hal depresiasi Rupiah atau peningkatan suku bunga yang signifikan dapat berakibat buruk terhadap kemampuan nasabah "Bank" (peminjam dan pihak-pihak yang mengadakan kontrak dengan "Bank") untuk memenuhi Liabilitasnya pada saat jatuh tempo yang akan mempunyai konsekuensi negatif terhadap profitalitas dan kecukupan modal "Bank".

Perbaikan ekonomi dan pemulihan ekonomi tergantung pada beberapa faktor seperti tindakan moneter dan fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan pihak lainnya serta tindakan-tindakan lain diluar pengendalian dari "Bank". Oleh karena itu tidaklah mungkin untuk menentukan dampak masa depan kondisi ekonomi terhadap likuiditas dan pendapatan "Bank" dan realisasi dari aset, termasuk pengaruh dari nasabah dan pemegang saham.

38. Condition economic

The condition of economi in Indonesia estimated will influence bank operation ain the future. Though there are increasing in certain economical indicator but indonesian banks still in limited issuing credit activity.

when ever economic condition decrease badly, rupiah depreciation and significantly increasing or interest rate happened, it will cause the ability of the relation tu fulfil their liabilities to the bank (debtors and direction accomplish contrac with bank). This circum stances will effect the bank profitabilities ind insufficient fund.

The improvement of economi recovery depending to several factor like meansures monetery and fiscal implemented by Indonesia government and other parties in outside bank controling. So it's not possible to certain future impact of economi condition toward liquidity and profit of bank and relation for assets, including the relation and share holders to belong influence for.

39. Lembaga Penjamin Simpanan

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 26 tahun 1998 yang dilaksanakan melalui Keputusan Menteri Keuangan tanggal 28 Januari 1998 dan Surat Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN (SKB BI dan BPPN) No.30/270/KEP/DIR dan No.1/BPPN/1998 tanggal 6 Maret 1998, Pemerintah telah menjamin Liabilitas tertentu dari seluruh bank umum yang berbadan hukum Indonesia.

Berdasarkan perubahan terakhir Keputusan Menteri Keuangan No.179/KMK.017/2000 tanggal 26 Mei 2000, jaminan tersebut berlaku sejak tanggal 26 Januari 1998 sampai dengan 31 Januari 2001 dan dapat diperpanjang dengan sendirinya setiap 6 (enam) bulan berikutnya secara terus menerus, kecuali apabila dalam waktu

39. Saving Guaranty Board (LPS)

Based on Decree of Precident number 26, 1998 in behaviourd to pass decree of the Minister of Finance of the Republic Indonesia date January 28, 1998 and eldest BPPN (SKB BI and BPPN) number, 30/270/KEP/DIR and number 1/BPPN/1998 date March 6,1998, Government alredy guarantee liabilities to be certain for all general bank law bend Indonesia.

Based ending addendum to be able decree of the Minister of Finance number 179/KMK.017/2000 date May 26, 2000. Guarantee beavioured mentioned since date January 26, 1998 up to January 31, 2001 and to be able to continue automatically every next 6 (six) month continuously, except if in 6 (six) month

6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Program Penjaminan atau jangka waktu perpanjangannya. Menteri Keuangan mengumumkan pengakhiran dan atau perubahan Program Penjaminan tersebut untuk diketahui oleh umum. Atas penjaminan ini Pemerintah membebankan premi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.

before ending period guarante program or period to lengthen. The Minister of Finance announce that ending or addendum of guarentee program as explanation to the public. Above this guarentee the government free premi in calculated based on percentage tarranged.

39. Lembaga Penjamin Simpanan (lanjutan)

Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.179/KMK.017/2000 tanggal 26 Mei 2000 tentang "Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Jaminan Pemerintah terhadap Liabilitas Pembayaran Bank Umum", telah diperbarui dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.84/KMK.06/2004 tanggal 27 Pebruari 2004 tentang "Syarat Tata Cara dan Ketentuan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah terhadap Liabilitas Pembayaran Bank Umum". Perubahan tersebut antara lain mengenai pembayaran premi penjaminan yang sebelumnya dibayarkan melalui Badan Penyehatan Perbankan, diubah menjadi dibayarkan melalui Unit Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah (UP3).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.05/2005 tanggal 3 Maret 2005, terhitung sejak tanggal 18 April 2005 jenis Liabilitas bank umum yang dijamin berdasarkan program penjaminan Pemerintah meliputi giro, tabungan, deposito berjangka dan pinjaman yang diterima dari bank lain dalam bentuk transaksi pasar uang antar bank.

Program penjaminan Pemerintah melalui UP3 telah berakhir pada tanggal 22 September 2005, dinyatakan dalam Peraturan Menteri Keuangan No.68/PMK.05/2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang Perhitungan dan Pembayaran Premi Program Penjaminan Pemerintah Terhadap Liabilitas Pembayaran Bank Umum Periode 1 Juli sampai dengan 21 September 2005.

39. Saving Guaranty Board (LPS) (continued)

The decree of the Minister of Finance of Republic Indonesia number 179/KMK. 017/2000 date May 26 2000 in front "condition and arrangement guarentee governmen against payered general bank" alredy in new with the decree of the Minister of Finance of Republic Indonesia number 84/KMK.06/2004 date February 27, 2004 in front "Condition and arrangement guarentee government against payered general bank". Addendum mentioned among other to hit payer guarentee premium before in payment to Bank recovery board in addendum refering payment to Government guarantee implementation unit (UP3).

In accordance with decree of the Minister of Finance number 17/PKM.05/2005 date March 3, 2005, calculated date April 18, 2005 sort of iabilities of general bank guarenteed based on government guarentee program including current account, saving. Time deposits and borrowing for other bank in bend transaction money market of inter bank.

The program guarentee government UP3 already ended dated on september 22, 2005, as in obviously in decree of the minister of finance number. 68/PMK.05/2005 dated August 10,2005 in front calculated and payer premium government guarentee program against payment liabilities general bank period July 1 up to September 21, 2005.

39. Lembaga Penjamin Simpanan (lanjutan)

Sebagai pengganti UP3, Pemerintah telah membentuk lembaga independen yaitu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berdasarkan Undang-undang No. 24 Tahun 2004 tanggal 22 September 2004 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan, dimana LPS menjamin dana masyarakat termasuk dana dari bank lain dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Undang-Undang No 24 tahun 2004 tersebut dengan Perubahan melalui Undang-Undang RI No. 7 tahun 2009, tentang "Lembaga Penjaminan Simpanan" tanggal 13 Januari 2009.

Pembayaran premi Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) oleh Bank untuk premi awal periode 01 Januari 2014 sampai dengan 30 Juni 2014 sebesar Rp13.962.166.358 dan periode 1 Juli 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar Rp.11.374.636.273.

39. Saving Guaranty Board (LPS) (continued)

As the change UP3, goverment already bend independent board that is Saving Guaranty Board (LPS) based on rule number 24, 2004 dated September 22, 2004 about saving guarentee board, deposit, where LPS guarentee public fund including other bank fund in current account, time deposit and saving and others equal. Rule number 24, 2004 about change from the RI rules number 7, 2009 about Saving Guaranty Board (LPS), January 13, 2009.

Saving Guaranty Board (LPS) payment of Bank for beginning premium January 01, 2014 up to June 30, 2014 amounted Rp13.962.1166.358.and the period of July 1, 2014 to December 31, 2014 at Rp.11.374.636.273.

40. Peristiwa setelah tanggal neraca

Tidak terdapat peristiwa atau kejadian penting yang signifikan yang berpengaruh kepada penyajian laporan keuangan setelah tanggal neraca.

40. Subsequence event

There are not found an affair or important and significant event affected to preparing of financial report after balance sheet date.

41. Standar Akuntansi Keuangan Baru dan Revisi

41. New and Revised Accounting Standards

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan revisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interprestasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) serta mencabut beberapa PSAK tertentu. Standar-standar akuntansi keuangan tersebut akan berlaku efektif sebagai berikut:

As of date of completion of the financial statements, the Indonesian Institute of Accountants has issued the following revised financial accounting standards (SFAS) and interpretations (IFAS) and has rescinded certain accounting standards (SFAS). These standards will be applicable to financial statements as follows:

Periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2012

Periods beginnig on or after January 1, 2012

41. Standar Akuntansi Keuangan Baru dan Revisi (lanjutan)

Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

a. PSAK No. 18 (Revisi 2010), "Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya", mengatur akuntansi dan pelaporan program manfaat purnakarya untuk semua peserta sebagai suatu kelompok. Pernyataan ini melengkapi PSAK No. 24 (Revisi 2010), "Imbalan Kerja".

b. PSAK 28 (revisi 2011) Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian.

c. PSAK 33 (revisi 2011), Aktivitas pengupasan lapisan Tanah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pertambangan Umum.

d. PSAK No. 34 (Revisi 2010), "Akuntansi Kontrak Konstruksi", mengatur perlakuan akuntansi pendapatan dan biaya yang berhubungan dengan kontrak konstruksi.

e. PSAK 36 (revisi 2011), Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa.

f. PSAK 45 (revisi 2011), Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba.

g. PSAK No. 61, "Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah", diterapkan untuk akuntansi, dan pengungkapan, atas hibah pemerintah dan pengungkapan atas bentuk lain bantuan pemerintah.

h. PSAK 62, Kontrak Asuransi.

i. PSAK 63, Pelaporan Keuangan dalam ekonomi Hiperinflasi.

j. PSAK 64, Aktivitas eksplorasi dan evaluasi pada pertambangan Sumber Daya Mineral.

ISAK

a. ISAK No. 13, "Lindung Nilai Investasi Neto Dalam Kegiatan Usaha Luar Negeri" - Diterapkan terhadap entitas yang melakukan lindung nilai atas risiko mata uang asing yang timbul dari investasi netonya di dalam kegiatan usaha luar negeri dan berharap dapat memenuhi persyaratan akuntansi lindung nilai sesuai PSAK No. 55 (Revisi 2006). Mengacu pada entitas induk dan laporan keuangan dimana aset neto dari kegiatan usaha luar negeri dimasukkan sebagai laporan keuangan.

b. ISAK 16, Perjanjian jasa Konsensi.

c. ISAK No. 18, "Bantuan Pemerintah – Tidak Ada Relasi Spesifik dengan Aktivitas Operasi", menetapkan bantuan pemerintah kepada entitas yang memenuhi definisi hibah pemerintah dalam PSAK No. 61, "Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah", bahkan jika tidak ada persyaratan yang secara spesifik terkait dengan aktivitas operasi entitas selain persyaratan untuk beroperasi pada daerah atau sektor industri tertentu.

d. ISAK 19, Penerapan pendekatan penyajian kembali dalam PSAK 63: Pelaporan Keuangan dalam ekonomi Hiperinflasi.

41. *New and Revised Accounting Standards (continued)*

Standart Financial Accounting Statement (SFAS)

a. *SFAS No. 18 (Revised 2010), "Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans", Reporting by Retirement Benefit Plans", establish the plan to all participants as a group. This Standard complements PSAK No. 24 (Revised 2010), "Employee Benefits".*

b. *SFAS 28 (revised 2011), Accounting for Casualty Insurance*

c. *SFAS 33 (revised 2011), Stripping cost Activity and Environmental Management in the Public Mining.*

d. *SFAS No. 34 (Revised 2010), "Accounting for Construction Contracts", prescribes the accounting treatment of revenue and costs associated with construction contracts.*

e. *SFAS 36 (revised 2011), Accounting for Life Insurance Contract.*

f. *SFAS 45 (revised 2011), Financial reporting for Non-Profit Organization.*

g. *SFAS No. 61, "Accounting for Government Grants and Disclosures of Government Assistance", applies in the accounting for, and in the disclosures of, government grants and in the disclosures of other forms of government*

h. *SFAS 62, Insurance contract.*

i. *SFAS 63, Financial reporting in Hyperinflationary Economies.*

j. *SFAS 64, Exploration for and Evaluation of Mineral Resources.*

IFAS

a. *IFAS No. 13, "Hedges of Net Investment in a Foreign Operation" - Applies to an entity that hedges the foreign currency risk arising from its net investments in foreign operations and wishes to qualify for hedge accounting in accordance with PSAK No. 55 (Revised 2006). Refers to the parent entity and to the financial statements in which the net assets of foreign operations are included as financial statements.*

b. *IFAS 16, Servise Concession*

c. *IFAS No. 18, "Government Assistance-No Specific Relation to Operating Activities", prescribes government grants to entities that prescribes government grants to entities that PSAK No. 61, "Accounting for Government Grants and Disclosures of Government Assistance", even if there are no conditions specifically relating to the operating activities of the entity other than the requirement to operate in certain regions or industry sectors.*

d. *IFAS 19, Applying the restatement approach under PSAK 63: Financial reporting in Hyperinflationary Economies.*

41. Standar Akuntansi Keuangan Baru dan Revisi (lanjutan)

Sebagaimana dinyatakan dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SE-BI) No. 11/33/DPNP tanggal 8 Desember 2009, untuk penerapan pertama awal PSAK No. 50 dan No. 55 (Revisi 2006), Bank akan mengikuti/menerapkan ketentuan transisi penurunan nilai atas kredit yang digolongkan secara kolektif dengan menggunakan estimasi yang didasarkan pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai Penilaian Kualitas aset Bank Umum. Sesuai dengan SE-BI tersebut ketentuan transisi penurunan nilai atas kredit secara kolektif dapat diterapkan paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember 2011.

Pencabutan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PPSAK) yang diterbitkan oleh DSAK efektif mulai tanggal 1 Januari 2010 yang relevan untuk Bank adalah sebagai berikut:

a. PPSAK No. 4, "Pencabutan PSAK No. 31 (Revisi 2000): Akuntansi Perbankan, PSAK No. 42: Akuntansi Perusahaan Efek, dan PSAK No. 49: Akuntansi Reksa Dana". PPSAK ini berlaku untuk semua entitas yang menerapkan PSAK No. 31 (Revisi 2000), PSAK No. 42 dan PSAK No. 49.

b. PPSAK No. 5, "Pencabutan ISAK No. 06: Interpretasi atas Paragraf 12 dan 16 PSAK No. 55 (1999) tentang Instrumen Derivatif Melekat pada Kontrak dalam Mata Uang Asing".

Berikut ini ikhtisar PSAK yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) - IAI yang relevan untuk Bank, namun belum berlaku efektif untuk laporan keuangan konsolidasian 31 Desember 2014:

Efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015:

a. PSAK No. 1 (Revisi 2013), "Penyajian Laporan Keuangan", yang diadopsi dari IAS 1, mengatur perubahan penyajian kelompok pospos dalam Penghasilan Komprehensif Lain.
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi disajikan terpisah dari pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi.

b. PSAK No. 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja", yang diadopsi dari IAS 19, yang menghapus mekanisme koridor dan pengungkapan atas informasi liabilitas kontinjensi untuk menyederhanakan klarifikasi dan pengungkapan.

c. PSAK No. 46 (Revisi 2014), "Pajak Penghasilan", yang diadopsi dari IAS 12. PSAK ini memberikan tambahan pengaturan untuk aset dan liabilitas pajak tangguhan yang
berasal dari aset yang tidak disusutkan yang diukur dengan menggunakan model revaluasi, dan yang berasal dari properti investasi yang diukur dengan menggunakan model nilai wajar.

41. New and Revised Accounting Standards (continued)

As stated in Bank Indonesia"s Circular Letter (SEBI) No. 11/33/DPNP dated December 8, 2009, for initial implementation of PSAK No. 50 and No. 55 (Revised 2006), the Bank will implement the impairment policy transition for loans that are classified as collective using estimation based on Bank Indonesia regulation concerning Asset Quality Ratings for Commercial Bank. In accordance with that SE-BI, the collective loan impairment policy transition is implemented at the latest on December 31, 2011.

The Revocation of Statement of Financial Accounting Standards (PPSAK) by DSAK effective in January 1, 2010 that are relevant for the Bank are as follows:

a. PPSAK No.4, "The Revocation of PSAK No. 31 (Revised 2000): Accounting for the Banking Industry, PSAK No. 42: Accounting for Investment Companies, and PSAK No. 49: Accounting for Mutual Funds". This PPSAK is effective to all entities that implement PSAK No. 31 (Revised 2000), PSAK No. 42 and PSAK No. 49.

b. PPSAK No. 5, "The Revocation of ISAK No.6: Intrepretation on Paragraph 12 and 16 PSAK No. 55 (1999) concerning Embedded Derivatives in Foreign Currency Contracts".

The following summarizes the SFAS which were issued by the Financial Accounting Standards Board (FASB) and are relevant to the Bank, but not yet effective to the Bank on consolidated financial statements as of December 31, 2014:

Effective on or after January 1, 2015:

SFAS No. 1 (Revised 2013), "Presentation of Financial Statement", adopted from IAS 1, which regulates the amendments presentation to group items of Other Comprehensive Income. Items which reclassified to income statement are presented separately from items not reclassified to income statement.

b. SFAS No. 24 (Revised 2013), "Employee Benefits", adopted from IAS 19, which eliminates corridor approach and disclosure about contingent liability information to simplify clarification and disclosure.

c. SFAS No. 46 (Revised 2014), "Income Taxes", adopted from IAS 12. This SFAS now provides additional provision for deferred tax asset or deferred tax liability arises from a nondepreciable asset measured using the revaluation model, and those arises from investment property that is measured using the fair value model.

d. PSAK No. 48 (Revisi 2014), "Penurunan Nilai Aset", yang diadopsi dari IAS 36. PSAK ini memberikan tambahan persyaratan pengungkapan untuk setiap aset individual atau unit penghasil kas yang mana kerugian penurunan nilai telah diakui atau dibalik selama periode.

d. SFAS No. 48 (Revised 2014), "Impairment of Assets", adopted from IAS 36. This SFAS provides additional disclosure terms for each individual asset (including goodwill) or a cashgenerating unit, for which an impairment loss has been recognized or reversed during the period.

41. Standar Akuntansi Keuangan Baru dan Revisi (lanjutan)

Efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015 (lanjutan):

41. New and Revised Accounting Standards (continued)

Effective on or after January 1, 2015 (continued):

e. PSAK No. 50 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Penyajian", yang diadopsi dari IAS 32. PSAK ini mengatur lebih dalam kriteria mengenai hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan kriteria penyelesaian secara neto.

e. SFAS No. 50 (Revised 2014), "Financial Instruments: Presentation", adopted from IAS 32. This SFAS provides deeper about criterion on legally enforceable right to set off the recognized amounts and criterion to settle on a net basis.

f. PSAK No. 55 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", yang diadopsi dari IAS 39. PSAK ini, antara lain, menambah pengaturan kriteria instrumen lindung nilai yang tidak dapat dianggap telah kedaluarsa atau telah dihentikan, serta ketentuan untuk mencatat instrumen keuangan pada tanggal pengukuran dan pada tanggal setelah pengakuan awal.

f. SFAS No. 55 (Revised 2014), "Financial Instruments: Recognition and Measurement", adopted from IAS 39. This SFAS, among other, provides additional provision for the criteria of not an expiration or termination of the hedging instrument, and provision to account financial instruments at the measurement date and after initial recognition.

g. PSAK No. 60 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengungkapan", yang diadopsi dari IFRS 7. PSAK ini, antara lain, menambah pengaturan pengungkapan saling hapus dengan informasi kuantitatif dan kualitatif, serta pengungkapan mengenai pengalihan instrumen keuangan.

g. SFAS No. 60 (Revised 2014), "Financial Instruments: Disclosures", adopted from IFRS 7. This SFAS, among other, provides additional provision on offsetting disclosures with quantitative and qualitative information, and disclosures on transfers of financial instruments.

h. PSAK No. 65 "Laporan Keuangan Konsolidasi", yang diadopsi dari IFRS 10, menggantikan porsi PSAK No. 4 (Revisi 2009) yang mengenai pengaturan akuntansi untuk laporan keuangan konsolidasian, menetapkan prinsip penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian ketika entitas mengendalikan satu atau lebih entitas lain.

h. SFAS No. 65, "Consolidated Financial Statements", adopted from IFRS 10, revised the SFAS No. 4 (Revised 2009) provides guidance on accounting treatment for consolidated financial statements and the principal in preparing and presentating consolidated financial statements when an entity control one or more other entity.

i. PSAK No. 66, "Pengaturan Bersama", yang diadopsi dari IFRS 11, menggantikan PSAK No. 12 (Revisi 2009) dan ISAK No. 12. PSAK ini menghapus opsi metode konsolidasi proporsional untuk mencatat bagian ventura bersama.

i. SFAS No. 66, "Joint arrangement", adopted from IFRS 11, replacing SFAS No. 12 (Revised 2009) and ISAK No. 12. This SFAS remove proportional consolidated method option in recording portion part of joint venture.

j. PSAK No. 67, "Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain", yang diadopsi dari IFRS 12, mencakup semua pengungkapan yang diatur sebelumnya dalam PSAK No. 4 (Revisi 2009), PSAK No. 12 (Revisi 2009) dan PSAK No. 15 (Revisi 2009). Pengungkapan ini terkait dengan kepentingan entitas dalam entitasentitas lain.

j. SFAS No. 67, "Disclosure of Interests in Other Entities", adopted from IFRS 12, include all disclosure which previously mention in SFAS No. 4 (Revised 2009), SFAS No. 12 (Revised 2009) and SFAS No. 15 (Revised 2009). This disclosure related to the interests in other entities.

k. PSAK No. 68, "Pengukuran Nilai Wajar", yang diadopsi dari IFRS 13, memberikan panduan tentang bagaimana pengukuran nilai wajar ketika nilai wajar disyaratkan atau diizinkan.

k. SFAS No. 68, "Fair Value Measurement", adopted from IFRS 13, provides guidance on how to determine fair value and requires disclosures about fair value measurement.

Saat ini Bank sedang mengevaluasi dan belum menetapkan dampak dari PSAK yang dikeluarkan tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasian.

The Bank is currently evaluating and has not yet determined the impact of these issued SFAS on its consolidated financial statements.

42. Informasi lainnya

Permasalahan hukum

Permasalahan hukum yang masih dihadapi Bank dan telah diajukan melalui proses hukum, sampai dengan saat ini adalah sebagai berikut:

42. Other information

Legal Issues

The number of legal issues facing the Bank and has been filed through the legal process, are as follows:

42. Informasi lainnya (lanjutan)

Permasalahan hukum (lanjutan)

Perdata

Cabang Pembantu Dalu-Dalu :

Gugatan dari Jaharo, Dkk melawan Masni binti Jaharo, Dkk (Tergugat). Capem Dalu-dalu sebagai Turut Tergugat III. Gugatan dimenangkan oleh Masni binti Jaharo, Dkk (Tergugat). Jaharo, Dkk menggugat Masni binti Jaharo, Dkk karena telah menjual tanah hibah dari Jaharo kepada orang lain (Debitur Capem Dalu-dalu/Tergugat III). Dengan menangnya Tergugat maka posisi agunan yang ada di Bank akan tetap di kuasai oleh Bank Riau Kepri.

Cabang Pasir Pangaraian :

Gugatan dari Sudirman melawan Cabang Pasir Pengaraian sebagai Tergugat. Dimana pada tingkat Pengadilan Negeri (PN) Pasir Pengaraian dimenangkan oleh Bank Riau Kepri. Sudirman telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru dan saat ini sedang menunggu putusan dari PT Pekanbaru. Gugatan ini adalah tentang Perbuatan Melawan Hukum. Dimana menurut Sudirman, Cabang Pasir Pengaraian telah salah dalam menyalurkan kredit sebesar Rp 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah). Menurut Sudirman, dirinya tidak pernah menerima kredit dari Cabang Pasir Pengaraian, tetapi yang menerima adalah temannya yang bernama Zulkifli. BRK tetap meminta kepada Penggugat/Debitur untuk melunasi seluruh tunggakannya.

Cabang Dumai :

Gugatan dari Sdri. Melati melawan Cabang Dumai sebagai Tergugat. Dimana saat ini sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Dumai dan telah sampai pada tahap Pembuktian dari Penggugat (Sdri. Melati). Gugatan ini adalah tentang Perbuatan Melawan Hukum dimana SKGR milik Sdri. Melati sebagai agunan kredit atas nama debitur Sdr. Ricardo telah hilang di Cabang Dumai ketika akan mengambil agunan tersebut pada saat telah melunasi kredit. Berdasarkan diskusi dengan staf Mahkamah Agung RI disarankan untuk percepat penyelesaian perkara dapat ditempuh dengan cara menyurati hakim-hakim Mahkamah Agung yang memeriksa perkara tersebut.

Cabang Utama :

Gugatan dari Drs. Wasisno melawan Cabang Utama. Sidang perdana telah dilakukan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013. Gugatan tentang Perbuatan Melawan Hukum dimana menurut Drs. Wasisno, Cabang Utama telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena mengirim Surat Peringatan 1, 2 dan 3 serta akan melakukan lelang atas agunan bersangkutan yang juga merupakan

42. Other information (continued)

Legal Issues (continued)

Civil

Cabang Pembantu Dalu-Dalu :

The accousing of Mr. Jaharo and friends contra Mrs. Masni binti Jaharo and friends (suspect). Dalu-dalu Branch Office as a suspect III . This sue has winned by Mrs. Masni binti Jaharo and friends . Mr. Jaharo and friends sue Mrs. Masni binti Jaharo and friends because of sold the given land from Mr. Jaharo to the other person (the debtor of Dalu-dalu Branch office/ suspect III).

Cabang Pasir Pangaraian :

The accusing of Mr. Sudirman contra Pasir Pangaraian Branch Office as an Accused. Where at the level of Pekanbaru Court has winned by Riau Kepri bank. Mr. Sudirman has submitted consideration to Pekanbaru High Court and nowaday is awaiting the decision of Pekanbaru High Court. This accusing is about contra law act. Where according to Mr. Sudirman Pasir Pangaraian Branch Office has made mistake in channeling the loan as much as Rp/ 400.000.000,- (for hundred million rupiah). According to Mr. Sudirman, he himself have been received the loan from Pasir Pangaraian Branch Office, but the receiver is his friend Mr. Zulkifli.

Cabang Dumai :

Lawsuit of Ms. Jasmine against Branch Dumai as Defendants. Which is currently on trial in the District Court (PN) Dumai and has reached the stage of Proof of Plaintiff (Miss. Jasmine). This lawsuit is about the act of Unlawful where Ms. SKGR belongs. Jasmine as collateral on behalf of the debtor Br. Ricardo has been lost in Dumai branch when it will take the collateral when the credit has been paid off. Based on discussions with the staff of the Supreme Court suggested to accelerate the settlement can be reached by way of written to the Supreme Court judges who examined the case.

Cabang Utama :

Lawsuit of Drs. Wasisno against Main Branch. Initial trial was conducted on Wednesday, June 26, 2013. The suit of Unlawful Acts which, according to Drs. Wasisno, Main Branch has committed an unlawful act for sending warning letters 1, 2 and 3 and will conduct an auction on the collateral in question which is also concerned that a residential house located at

rumah tempat tinggal ybs yg terletak di Jalan Nuri 22 Sukajadi Pekanbaru. Drs. Wasisno diduga mengajukan gugatan ini untuk menunda pelaksanaan eksekusi atas agunan yang bersangkutan dimana perjanjian kredit akan jatuh tempo pada tgl 17 Februari 2014 dan termasuk tipikal debitur yang beritikad tidak baik. Drs Joko Wasisno telah melunasi kreditnya di Cabang Utama pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014. Dengan demikian perkara ybs di PN Pekanbaru gugur demi hukum.

Jalan Nuri 22 Sukajadi Pekanbaru. Drs. Wasisno allegedly filed this lawsuit to delay the execution of the collateral in question where the credit agreement will expire on the date February 17, 2014 and includes the typical debtor bad faith. Drs Joko Wasisno has paid off her credit at the Main Branch on Friday, January 24, 2014. Thus the relevant case in Pekanbaru PN fall by law.

42. Informasi lainnya (lanjutan)

Permasalahan hukum (lanjutan)

Cabang Pasar Pusat (1) :

Gugatan dari Syahrial melawan Cabang Pasar Pusat sebagai Tergugat V dan Zulfikar (Pegawai Bank Riau Kepri) sebagai (Tergugat III). Dimana pada tingkat Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru dan Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru dimenangkan oleh Syahrial. Bank Riau Kepri telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan saat ini sedang menunggu putusan dari Mahkamah Agung (MA). Gugatan ini tentang Perbuatan Melawan Hukum, dimana Syahrial menggugat Suwarno/Developer (Tergugat I), Notaris Hardiyanti Hoesodo (Tergugat II), Notaris Pupung Mulyantini (Tergugat IV) dan BPN Kota Pekanbaru (Tergugat VI) karena menurut Syahrial, dirinya dan saudaranya yang lain sebagai ahli waris yang sah dari orang tua mereka, tidak pernah menjual sebidang tanah kepada Suwarno.

Cabang Pasar Pusat (2) :

Gugatan dari Jondra Effendi melawan Suwarno dkk sebagai Tergugat dan Cabang Pasar Pusat sebagai Turut Tergugat. Dimana Bank Riau Kepri selaku Turut Tergugat telah melakukan perlawanan dengan menyampaikan Jawaban dan Eksepsi, menyampaikan Duplik serta telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Acara persidangan selanjutnya dengan agenda Penyampaian Bukti Surat dari Penggugat. Gugatan ini adalah tentang Perbuatan Melawan Hukum dimana Jondra membeli tanah bangunan dari Suwarno, namun faktanya surat tanah atas nama Suwarno telah dipasangkan Hak Tanggungan oleh Turut Tergugat (BRK). Tindak lanjut Bank Riau Kepri selaku turut tergugat telah melakukan perlawanan dengan menyampaikan jawaban dan eksepsi pada tanggal 22 Desember 2014 dan menyampaikan duplik pada tanggal 7 Januari 2015, serta telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Acara persidangan selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2015 dengan agenda Penyampaian Bukti Surat dan Penggugat.

42. Other information (continued)

Legal Issues (continued)

Cabang Pasar Pusat (1) :

The accusing of Mr. Syahrial contra Pasar pusat branch office as accused V and Zulfikar (the employee of Riau Kepri Bank) as accused III. Where at the level of Pekanbaru Court, winned by Syahrial. Riau Kepri Bank has been submited a casation to the Supreme Court and nowaday is awaiting for the decision of the Supreme Court. This accusition is about contra law act, where Mr.Syahrial accused Mr. Suwarno/Developer (accused I), Notary Hardiyant Hoesodo (accused II), Notary Pupung Mulyantini (accused IV) and Land National Board (BPN) Pekanbaru City (accused VI) because according to Mr. Syahrial, he himself and his other brother and sister are the owner legally, from their parents, never sell a piece of land to Mr. Suwarno.

Cabang Pasar Pusat (2) :

Lawsuit of Jondra Effendi against Suwarno et al as Defendants and Markets Branch Participate Center as Defendants. Where the Bank Riau Riau Also as Defendant has to fight with the express Answers and Exception, convey Rejoinder and set by Judge Events subsequent trial with the agenda Submission of Letter of Plaintiff. This lawsuit is about the act of Unlawful where Jondra buy building land of Suwarno, but the fact of land documents on behalf Suwarno paired Participate Encumbrance by Defendant (BRK). Follow-up Bank Riau Riau as a co-defendant had to take the fight to deliver answers and exceptions on December 22, 2014 and deliver closing argument on January 7, 2015, and has been determined by the judges show the next hearing on January 14, 2015 with the agenda Submission of Letters and plaintiff.

43. Penyajian dan penyelesaian laporan keuangan

Manajemen "Bank" bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 2 Maret 2015.

43. Preparation and completion of the financial statements

The "Bank" managements are resposible for the preparation of the financial statement which were completed on March 2, 2015.

=== ooOoo ===